Pemerintah
Kota Padang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Tahun 2025-2029

BAPPEDA
KOTA PADANG
2025

WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025 – 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 145);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG
dan
WALI KOTA PADANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat,

kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

9. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
10. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
11. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
15. Sasaran adalah rumusan, kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah.
16. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
17. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
18. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
19. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan pengunaan sumber daya pembangunan.

Pasal 2

RPJMD Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan dalam melakukan kegiatan Pembangunan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dijabarkan dari Visi, Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Pasal 3

RPJMD Tahun 2025-2029 bertujuan untuk:

a. menetapkan Strategi dan kebijakan umum Pembangunan Daerah serta merumuskan program pembangunan terpadu, sinkron dan bersinergi dengan pembangunan nasional dan pembangunan Provinsi Sumatera Barat serta menampung kondisi dan karakteristik Daerah;

b. menjabarkan Visi, Misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2025-2029 dengan memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah serta indikasi Kerangka Pendanaan;
c. menetapkan pedoman untuk penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah, RKPD, dan Rencana Kerja PD; dan
d. menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menentukan Program prioritas dan Kegiatan Pembangunan.

Pasal 4

(1) Ruang lingkup RPJMD Tahun 2025-2029 meliputi penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan serta Prioritas dan Program Strategis Wali Kota dan Wakil Wali Kota disertai dengan Rencana Kerja dalam Kerangka Pendanaan yang bersifat indikatif.
(2) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai tolok ukur dalam melakukan evaluasi Kinerja tahunan dan Kinerja lima tahunan Pemerintah Daerah.
(3) Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1) Wali Kota melalui kepala PD unsur penunjang urusan pemerintahan dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD Tahun 2025-2029.
(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. perumusan kebijakan perencanaan Daerah;
    b. pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; dan
    c. hasil dari Rencana Pembangunan Daerah.
(3) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Perubahan RPJMD Tahun 2025-2029 dapat dilakukan apabila:
    a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
    b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;dan
    c. terjadi perubahan yang mendasar.
(2) Dalam rangka efektifitas Perubahan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlakunya RPJMD Tahun 2025-2029 kurang dari 3 (tiga) tahun.
(3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan

keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan Nasional.

(4) Perubahan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan rencana strategis PD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 19 Agustus 2025

WALI KOTA PADANG,

KADLY AMRAN

Diundangkan di Padang
pada tanggal 19 Agustus 2025

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,

CORRI SAIDAN

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2025 NOMOR 9
NO.REG PERATURAN DERAH KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT (9/47/2025)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA KOTA PADANG

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029.

I. UMUM

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanahkan perencanaan pembangunan daerah perlu disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan responsif untuk menjamin pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien dan tepat sasaran. Rencana pembangunan daerah disusun untuk jangka panjang 20 (dua puluh) tahun, menengah 5 (lima) tahun), dan tahunan 1 (satu) tahun dalam bentuk dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Penyusunan RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk dapat memberi arah dan pedoman bagi para pelaku pembangunan (Pemerintah, Swasta dan Masyarakat) dalam melakukan kegiatan untuk mendorong proses pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Padang. Disamping itu, penyusunan RPJMD Kota Padang juga dimaksudkan untuk dapat melakukan koordinasi terhadap kegiatan pembangunan yang dilakukan Perangkat Daerah agar terwujud keterpaduan dan sinergi kegiatan pembangunan antar sektor dan antar wilayah dalam Kota Padang.

Penulisan RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2045.

RPJMD Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai pedoman pembangunan daerah bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kota Padang sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang dijabarkan melalui strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, kolaboratif, koordinatif dan integratif.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 152

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025 – 2029

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025 – 2029

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN I-1

1.1. Latar Belakang I-1

1.2. Dasar Hukum Penyusunan I-3

1.3 Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya I-6

1.3.1 RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kota Padang Tahun 2025-2045 ..... I-7

1.3.2 RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029 dengan RTRW Kota Padang Tahun 2010-2030 ..... I-9

1.3.3 RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029 dengan KLHS RPJMD Tahun 2025-2029 ..... I-9

1.3.4 RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029 dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 ..... I-10

1.3.5 RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029 dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ..... I-10

1.3.6 RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) I-11

1.4 Maksud dan Tujuan I-12

1.4.1 Maksud I-12

1.4.2 Tujuan I-12

1.5 Sistematika Penulisan I-13

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-1

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah II-1

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi II-1

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-76

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah II-109

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum II-133

2.1.5 Indikator Kinerja Kunci II-139

2.2 Gambaran Keuangan Daerah II-253

2.2.1 Kinerja Keuangan Daerah Masa Lalu II-253

2.2.2 Kebijakan Keuangan Masa Lalu II-286

2.2.3 Kerangka Pendanaan II-295

2.3 Permasalahan dan Isu Strategis II-313

2.3.1 Permasalahan Pembangunan II-313

2.3.2 Isu Strategis Pembangunan Daerah..... II-335
2.4 Capaian Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)..... II-351
2.4.1 Bidang Pendidikan II-353
2.4.2 Bidang Kesehatan II-353
2.4.3 Bidang Pekerjaan Umum II-355
2.4.4 Bidang Perumahan Rakyat II-356
2.4.5 Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM) .. II-356
2.4.6 Bidang Sosial II-358
2.5 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) II-359
2.5.1 Pelaksanaan TPB Menurut Kategori Capaian II-359
2.5.2 Pelaksanaan TPB Menurut Kategori Pilar..... II-361
2.5.3 Pelaksanaan TPB Menurut Kategori Urusan II-362
BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III-1
3.1 Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang Tahun 2025-2045. III-1
3.1.1. Visi dan Sasaran Visi RPJPD Kota Padang Tahun 2025-2045. III-2
3.1.2. Misi RPJPD Kota Padang Tahun 2025-2045 ..... III-3
3.1.3. Arah dan Sasaran Pembangunan RPJPD Kota Padang Tahun 2025-2045 III-16
3.2. Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 . III-21
3.2.1. Visi RPJMN Tahun 2025-2029 ..... III-21
3.2.2. Misi RPJMN Tahun 2025-2029..... III-21
3.2.3. Sasaran Pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029..... III-22
3.3. Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 ..... III-23
3.3.1. Visi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029..... III-23
3.3.2. Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029..... III-24
3.3.3. Sasaran Pembangunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 ..... III-27
3.4. Visi dan Misi RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029 ..... III-36
3.4.1. Visi RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029 ..... III-36
3.4.2. Misi RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029 ..... III-38
3.4.3. Keterkaitan antara Visi dan Misi RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029 dengan Visi dan Misi RPJPD Kota Padang Tahun 2025-2045. III-41

3.4.4 Keterkaitan antara Visi dan Misi RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029 dengan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat dan RPJMN Tahun 2025-2029 ..... III-41

3.4.5 Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029..... III-43

3.5 Arah Kebijakan Daerah, Strategi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Padang Tahun 2025-2029..... III-56

3.5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Padang Tahun 2025-2029 III-56

3.5.2. Strategi Pembangunan Kota Padang Tahun 2025-2029 ..... III-76

3.5.3. Program-Program Prioritas Daerah Untuk Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 ..... III-84

3.5.4. Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029 terhadap Fokus Prioritas RPJMN Tahun 2025-2029 ..... III-109

3.6 Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029 terhadap Program Strategis Nasional (ProSN) RPJMN Tahun 2025-2029 III-120

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV-1

4.1 Program Perangkat Daerah..... IV-2

4.2 Indikator Kinerja Makro IV-89

4.3 Indikator Kinerja Utama..... IV-90

4.4 Indikator Kinerja Daerah..... IV-98

4.5 Indikator Kinerja Kunci..... IV-106

Daftar Tabel

Tabel II- 1 Luas Kota Padang berdasarkan Kecamatan (km²) II-2
Tabel II- 2 Kondisi Kemiringan Lahan Kota Padang Menurut Kelurahan.. II-4
Tabel II- 3 Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Tahun 2024..... II-12
Tabel II- 4 Luas Tanah Menurut Jenis Penggunaannya di Kota Padang Tahun 2020 – 2024..... II-13
Tabel II- 5 Perhitungan D3T Air Kota Padang (m³/dtk) II-18
Tabel II- 6 Ringkasan Daya Dukung Kota Padang dalam Jasa Penyediaan II-19
Tabel II- 7 Ekoregion yang Mempengaruhi Kategori Sangat Tinggi dan Tinggi pada Daya Dukung Jasa Penyediaan II-20
Tabel II- 8 Tutupan Lahan yang Mempengaruhi Kategori Sangat Tinggi dan Tinggi pada Daya Dukung Jasa Penyediaan II-20
Tabel II- 9 Ringkasan Daya Tampung Kota Padang dalam Jasa Pengaturan II-25
Tabel II- 10 Ekoregion yang Mempengaruhi Kategori Sangat Tinggi dan Tinggi pada Daya Tampung Kota Padang dalam Jasa Pengaturan II-26
Tabel II- 11 Tutupan Lahan yang Mempengaruhi Kategori Sangat Tinggi dan Tinggi pada Daya Tampung Kota Padang dalam Jasa Pengaturan II-27
Tabel II- 12 Ringkasan Daya Dukung dan Daya Tampung Kota Padang dalam Jasa Budaya..... II-32
Tabel II- 13 Ekoregion yang Mempengaruhi Kategori Sangat Tinggi dan Tinggi pada Daya Dukung Jasa Budaya II-33
Tabel II- 14 Tutupan Lahan yang Mempengaruhi Kategori Sangat Tinggi dan Tinggi pada Daya Tampung Kota Padang dalam Jasa Pengaturan II-33
Tabel II- 15 Ringkasan Daya Tampung Kota Padang dalam Jasa Pendukung II-36
Tabel II- 16 Ekoregion yang Mempengaruhi Kategori Sangat Tinggi dan Tinggi pada Daya Dukung dan Daya Tampung Kota Padang dalam Jasa Pendukung II-37
Tabel II- 17 Tutupan Lahan yang Mempengaruhi Kategori Sangat Tinggi dan Tinggi pada Daya Dukung dan Daya Tampung Kota Padang dalam Jasa Pendukung..... II-37
Tabel II- 18 Indeks Ketahanan Pangan Kota Padang Tahun 2020-2024 . II-41
Tabel II- 19 Kapasitas Air Baku (m3/detik) 42
Tabel II- 20 Konsumsi Listrik per Kapita Kota Padang Tahun 2020-2024 (KWh)..... II-43
Tabel II- 21 Persentase Akses Rumah Tangga Terhadap Air Minum Perpipaan Kota Padang Tahun 2020-2024..... II-45
Tabel II- 22 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Padang Tahun 2020-2024 ..... II-45
Tabel II- 23 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Layanan Sanitasi Layak..... II-46
Tabel II- 24 Timbulan Sampah Terolah Kota Padang Tahun 2020-2024 II-47

Tabel II- 25 Proporsi RT dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah Kota Padang Tahun 2020-2024 ..... II-47
Tabel II- 26 Tingkat Resiko Bencana Kota Padang II-48
Tabel II- 27 Indeks Resiko Bencana Kota Padang II-50
Tabel II- 28 Klasifikasi Indeks Resiko Bencana II-50
Tabel II- 29 Indeks Ketahanan Daerah II-50
Tabel II- 30 Klasifikasi Indeks Ketahanan Daerah II-50
Tabel II- 31 Sebaran Wilayah Rawan Gempa Bumi Menurut Kelurahan di Kota Padang..... II-52
Tabel II- 32 Wilayah Rawan Bencana Tsunami Menurut Kelurahan di Kota Padang..... II-58
Tabel II- 33 Wilayah Rawan Bencana Likuifaksi Kota Padang II-63
Tabel II- 34 Wilayah Rawan Banjir di Kota Padang Tahun 2021 ..... II-70
Tabel II- 35 Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kota Padang Tahun 2024 ..... II-74
Tabel II- 36 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kota Padang (ribu jiwa) Tahun 2024 ..... II-75
Tabel II- 37 Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Padang Tahun 2025 – 2029 .....II-76
Tabel II- 38 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Padang Menurut Lapangan Usaha (persen), 2020-2024 ..... II-78
Tabel II- 39 Perbandingan Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, 2020-2024..... II-79
Tabel II- 40 Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024 ..... II-82
Tabel II- 41 Perbandingan nilai IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024..... II-86
Tabel II- 42 Angka Literasi dan Numerasi Kota Padang Tahun 2020-2024 ....II-91
Tabel II- 43 Proporsi Penduduk Berumur >15 Tahun yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi di Kota Padang Tahun 2020-2024 ..... II-92
Tabel II- 44 Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi Kota Padang Tahun 2019-2024 ..... II-93
Tabel II- 45 Jumlah Fasilitas Kesehatan Kota Padang 2020-2024..... II-93
Tabel II- 46 Usia Harapan Hidup Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-94
Tabel II- 47 Balita Gizi Buruk Kota Padang Tahun 2020-2024..... II-96
Tabel II- 48 Capaian Penanganan Stunting Kota Padang Tahun 2020-2024 ..... II-97
Tabel II- 49 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional..... II-98
Tabel II- 50 Capaian Indek Kesehatan (IKS) Kota Padang Tahun 2020-2024 ..... II-100
Tabel II- 51 Indikator Pelestarian Budaya..... II-102

Tabel II- 52 Indeks Pembangunan Keluarga Kota Padang Tahun 2020-2024 ..... II-102
Tabel II- 53 Rekapitulasi Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kota Padang Tahun 2020-2024 ..... II-103
Tabel II- 54 Rekapitulasi Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Padang Tahun 2020-2024 ..... II-103
Tabel II- 55 Metodologi Penghitungan Indeks Pembangunan Gender UNDP Tahun 2010 ..... II-106
Tabel II- 56 Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kota Padang per Jenis Kelamin II-106
Tabel II- 57 Indeks Pembangunan Gender Kota Padang Tahun 2020-2024 ..... .II-106
Tabel II- 58 Indikator Indeks Pemberdayaan Gender II-107
Tabel II- 59 Indeks Pemberdayaan Gender Kota Padang Tahun 2020-2024 ..... II-107
Tabel II- 60 Indeks Ketimpangan Gender Kota Padang Tahun 2020-2024… II-108
Tabel II- 61 Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Kota Padang Tahun 2020-2024 (Persen)..... II-112
Tabel II- 62 Produktivitas Total Kota Padang Tahun 2020-2024 ..... II-114
Tabel II- 63 Indeks Inovasi Daerah Kota Padang Tahun 2020-2024 ..... II-123
Tabel II- 64 Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau II-128
Tabel II- 65 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan dan Kondisi di Kota Padang Tahun 2024..... II-129
Tabel II- 66 Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan Kota Padang Tahun 2020-2024 (%) II-130
Tabel II- 67 Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB Kota Padang Tahun 2020-2024 ..... II-131
Tabel II- 68 Nilai Transaksi Saham per Kapita Kota Padang Tahun 2020-2022 ..... II-132
Tabel II- 69 Indeks Reformasi Birokrasi Kota Padang Tahun 2020-2024.....II-134
Tabel II- 70 Indeks Reformasi Hukum II-134
Tabel II- 71 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kota Padang Tahun 2020-2024..... II-135
Tabel II- 72 Indeks SPBE Kota Padang Tahun 2020-2024 ..... II-136
Tabel II- 73 Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) Kota Padang..... II-137
Tabel II- 74 Persentase Penanganan Pelanggaran Perda Kota Padang Tahun II-137
Tabel II- 75 Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Padang tahun 2020-2024..... II-138
Tabel II- 76 Angka Kriminalitas Kota Padang Tahun 2020-2024..... II-139
Tabel II- 77 Indikator Kinerja Kunci Keluaran II-140
Tabel II- 78 Indikator Kinerja Kunci Hasil II-224

Tabel II- 79 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan II-249
Tabel II- 80 Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2020-2024 (Rp)..... II-255
Tabel II- 81 Target dan Realisasi Serta Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024 ..... II-259
Tabel II- 82 Kontribusi Komponen Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024 (%) II-260
Tabel II- 83 Realisasi Pendapatan Daerah Kota Padang Tahun 2020-2024 (rupiah)..... II-262
Tabel II- 84 Proporsi Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Tahun 2020-2024 (%) II-263
Tabel II- 85 Proporsi Sumber Pendapatan Transfer Kota Padang Tahun 2020-2024 (%) II-269
Tabel II- 86 Proporsi Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2020-2024 .. II-272
Tabel II- 87 Realisasi Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2020-2024 (rupiah) II-274
Tabel II- 88 Kinerja Komponen Pembiayaan Kota Padang Tahun 2020-2024 (rupiah)..... II-276
Tabel II- 89 Proporsi Komponen Pembiayaan Kota Padang Tahun 2020-2024 (%) II-276
Tabel II- 90 Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Padang Tahun 2020-2024 ..... II-279
Tabel II- 91 Neraca Kota Padang Tahun 2020-2024 (rupiah)..... II-280
Tabel II- 92 Rasio Likuiditas dan Rasio Solvabilitas Kota Padang Tahun 2020-2024 ..... II-285
Tabel II- 93 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah II-288
Tabel II- 94 Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal II-289
Tabel II- 95 Kriteria Penilaian Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah..... ..... II-291
Tabel II- 96 Kriteria Penilaian Rasio Efektivitas II-292
Tabel II- 97 Defisit Riil Anggaran Kota Padang Tahun 2020-2024..... II-294
Tabel II- 98 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Padang Tahun 2020-2024 ..... II-294
Tabel II- 99 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Kota Padang Tahun 2025-2030 (rupiah)..... II-296
Tabel II- 100 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Padang Tahun 2025-2030 (rupiah)..... II-312
Tabel II- 101 Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Kota Padang Tahun 2019-2024 ..... II-329
Tabel II- 102 Identifikasi Isu Strategis Daerah Kota Padang..... II-346
Tabel II- 103 Identifikasi Isu Strategis Daerah Menurut Potensi, Permasalahan dan Isu KLHS Kota Padang II-350
Tabel II- 104 Realisasi SPM Bidang Pendidikan..... II-353
Tabel II- 105 Realisasi SPM Bidang Kesehatan II-354

Tabel II- 106Target Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum..... II-355
Tabel II- 107 SPM Bidang Perumahan Rakyat II-356
Tabel II- 108 Realisasi SPM Satpol PP II-357
Tabel II- 109 Target Pencapaian SPM Kebencanaan (BPBD)..... II-357
Tabel II- 110 Target Pencapaian SPM Damkar..... II-358
Tabel II- 111 Realisasi SPM Bidang Sosial II-359
Tabel II- 112 Capaian Indikator TPB Berdasarkan TPB Kota Padang ... II-360
Tabel II- 113 Capaian Indikator TPB Berdasarkan Pilar..... II-361
Tabel II- 114 Capaian Indikator TPB Berdasarkan Kategori Jenis Urusan Kota Padang..... II-362
Tabel III- 1 Sasaran Visi Kota Padang 2025-2045 .....III-3
Tabel III- 2 Arah Kebijakan Kota Padang Berdasarkan Misi Pembangunan Tahun 2025-2045.....III-19
Tabel III- 3 Visi RPJMN Tahun 2025-2029.....III-24
Tabel III- 4 Tujuan Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 .....III-28
Tabel III- 5 Sasaran Visi Kota Padang Tahun 2025-2029 .....III-38
Tabel III- 6 Keterkaitan antara Visi dan Misi RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029 dengan Visi dan Misi RPJPD Kota Padang Tahun 2025-2045 .....III-41
Tabel III- 7 Keterkaitan antara Visi dan Misi RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029 dengan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat dan RPJMN Tahun 2025-2029 .....III-42
Tabel III- 8 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kota Padang Tahun 2025-2029 .....III-48
Tabel III- 9 Visi, Misi, dan Arah Kebijakan RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029 .....III-67
Tabel III- 10 Arah Kebijakan Pembangunan Kota Padang Tahun 2025-2029 .....III-70
Tabel III- 11 Tahapan Pembangunan RPJMD Kota Padang III-75
Tabel III- 12 Perumusan Strategi Berdasarkan Misi Pembangunan Kota Padang Tahun 2025-2029 .....III-76
Tabel III- 13 Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Prioritas RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029 .....III-85
Tabel III- 14 Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah untuk Mencapai Target Penurunan Kemiskinan III-110
Tabel III- 15 Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah untuk Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia III-112
Tabel III- 16 Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.....III-114
Tabel III- 17 Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah untuk Peningkatan Transformasi Sektor Publik III-118
Tabel III- 18 Arah Kebijakan, dan Bentuk Kegiatan Daerah terhadap Program Strategis Nasional.....III-121

Tabel IV- 1 Rencana Program dan Pendanaan IV-2
Tabel IV- 2 Target Indikator Makro Pembangunan Daerah Kota Padang IV-89
Tabel IV- 3 Indikator Kinerja Utama Kota Padang Tahun 2025-2030 .....IV-91
Tabel IV- 4 Indikator Kinerja Daerah 2025 – 2030 .....IV-99
Tabel IV- 5 Indikator Kinerja Kunci Keluaran 2025 – 2029 .....IV-106

Daftar Gambar

Gambar I- 1 Tahapan, Jadwal Penyusunan dan Penetapan RPJMD Tahun 2025-2029 .....I-3
Gambar I- 2 Hubungan RPJMD terhadap Dokumen Perencanaan Lainnya I-7
Gambar I- 3 Keterkaitan RPJMD Dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah I-12
Gambar I- 4 Hubungan dan Keterkaitan RPJMD 2025-2029 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya I-13
Gambar II- 1 Peta Kota Padang.....II-1
Gambar II- 2 Suhu Udara dan Kelembapan Kota Padang Tahun 2020 – 2024.....II-11
Gambar II- 3 a. Daya Dukung dan Daya Tampung Air Kota Padang; b. Daya Dukung dan Daya Tampung Air Kota Padang menurut Kecamatan.....II-17
Gambar II- 4 a. Daya Dukung Jasa Penyediaan Pangan Kota Padang; b. Daya Dukung Jasa Penyediaan Pangan Kota Padang menurut Kecamatan.....II-21
Gambar II- 5 a. Daya Dukung Jasa Penyediaan Air Bersih Kota Padang; b. Daya Dukung Jasa Penyediaan Air Bersih Kota Padang menurut Kecamatan.....II-22
Gambar II- 6 a. Daya Dukung Jasa Penyediaan Serat (Fiber) Kota Padang ; b. Daya Dukung Jasa Penyediaan Serat (Fiber) Kota Padang menurut Kecamatan II-23
Gambar II- 7 a. Daya Dukung Jasa Penyediaan Bahan Bakar, Kayu dan Fosil Kota Padang; b. Daya Dukung Jasa Penyediaan Bahan Bakar, Kayu dan Fosil Sangat Tinggi dan Tinggi Kota Padang menurut Kecamatan.....II-24
Gambar II- 8 a. Daya Dukung Jasa Penyediaan Sumber Daya Genetik Kota Padang; b. Daya Dukung Jasa Penyediaan Sumber Daya Genetik Kota Padang Menurut Kecamatan.....II-25
Gambar II- 9 a. Daya Dukung Jasa Pengaturan Iklim Kota Padang; b. Daya Dukung Jasa Pengaturan Iklim Sangat Tinggi dan Tinggi Kota Padang menurut Kecamatan.....II-28
Gambar II- 10 a. Daya Dukung Daya Tampung Jasa Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir Kota Padang; b. Daya Dukung Daya Tampung Jasa Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir Kota Padang menurut Kecamatan.....II-28
Gambar II- 11 a. Daya Dukung Daya Tampung Jasa Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Kota Padang; b. Daya Tampung Daya Dukung Jasa Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Kota Padang menurut Kecamatan.....II-29
Gambar II- 12 a. Daya Dukung Daya Tampung Jasa Pengaturan Pemurnian Air Kota Padang; b. Daya Tampung Daya Dukung Jasa Pengaturan Pemurnian Air Kota Padang menurut Kecamatan.....II-29
Gambar II- 13 a. Daya Dukung Daya Tampung Jasa Pengaturan Penguraian Limbah Kota Padang; b. Daya Tampung Daya Dukung Jasa Pengaturan Penguraian Limbah Kota Padang menurut Kecamatan.....II-30
Gambar II- 14 a. Daya Dukung Daya Tampung Jasa Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara Kota Padang; b. Daya Dukung Daya Tampung Jasa Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara Kota Padang menurut Kecamatan.....II-30
Gambar II- 15 a. Daya Dukung Daya Tampung Jasa Pengaturan Penyerbukan Alami (Pollination) Kota Padang; b. Daya Dukung Daya Tampung Jasa Pengaturan Penyerbukan Alami (Pollination) Menurut Kecamatan.....II-31

Gambar II- 16 a. Daya Dukung Daya Tampung Jasa Pengaturan Pengendalian Hama dan Penyakit Kota Padang; b. Daya Dukung Jasa Pengaturan Pengendalian Hama dan Penyakit Kota Padang Menurut Kecamatan.....II-32
Gambar II- 17 a. Daya Dukung Daya Tampung Jasa Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup Kota Padang; b. Daya Dukung Jasa Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup Kota Padang Menurut Kecamatan.....II-34
Gambar II- 18 Daya Dukung Daya Tampung Jasa Budaya Rekreasi dan Ecotourism Kota Padang; b. Daya Dukung Jasa Budaya Rekreasi dan *Ecotourism Kota Padang* menurut Kecamatan.....II-35
Gambar II- 19 a. Daya Dukung Daya Tampung Jasa Budaya Estetika (alam) Kota Padang; b. Daya Dukung Jasa Budaya Estetika (alam) Kota Padang menurut Kecamatan.....II-36
Gambar II- 20 a. Daya Dukung Daya Tampung Jasa Pendukung Pembentukan Lapisan Tanah dan Pemeliharaan Kesuburan Kota Padang; b. Daya Dukung Daya Tampung Jasa Pendukung Pembentukan Lapisan Tanah dan Pemeliharaan Kesuburan menurut Kecamatan.....II-38
Gambar II- 21 a. Daya Dukung dan Daya Tampung Jasa Pendukung Siklus Hara (Nutrient Cycle) Kota Padang; b. Daya Dukung Jasa Pendukung Siklus Hara (*Nutrient Cycle*) Sangat Tinggi dan Tinggi menurut Kecamatan.....II-39
Gambar II- 22 Daya Dukung dan Daya Tampung Jasa Pendukung Produksi Primer Kota Padang; b. Daya Dukung Jasa Pendukung Produksi Primer Sangat Tinggi dan Tinggi Kota Padang Menurut Kecamatan.....II-40
Gambar II- 23 a. Daya Dukung dan Daya Tampung Jasa Pendukung Biodiversitas (Perlindungan Plasma Nutfah) Kota Padang; b. Daya Dukung Jasa Pendukung Biodiversitas menurut Kecamatan.....II-41
Gambar II- 24 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kota Padang Tahun 2020-2024.....II-43
Gambar II- 25 Sebaran Wilayah Rawan Gempa Bumi Menurut Kecamatan di Kota Padang.....II-51
Gambar II- 26 Wilayah Rawan Bencana Tsunami Menurut Kelurahan di Kota Padang.....II-56
Gambar II- 27 Wilayah Rawan Bencana Likuifaksi Kota Padang.....II-63
Gambar II- 28 Wilayah Rawan Banjir Kota Padang Menurut Kelurahan.....II-69
Gambar II- 29 Peta Daya dukung dan Daya Tampung Lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Kota Padang.....II-73
Gambar II- 30 Jumlah Penduduk (jiwa) dan Laju pertumbuhan Penduduk (%) Kota Padang, Tahun 2020-2024 (jiwa).....II-74
Gambar II- 31 Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Nasional Tahun 2020-2024.....II-77
Gambar II- 32 PDRB Per Kapita Kota Padang dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024.....II-81
Gambar II- 33 Persentase Penduduk Miskin Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024.....II-82
Gambar II- 34 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024.....II-84
Gambar II- 35 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024.....II-84
Gambar II- 36 Nilai IPM Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Indonesia Tahun 2020-2024 .....II-85
Gambar II- 37 Indeks Gini Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020 - 2024.....II-87

Gambar II- 38 Angka Partisipasi Kasar Kota Padang Tahun 2020-2024 .....II-88
Gambar II- 39 Angka Partisipasi Murni Kota Padang Tahun 2020-2024.....II-89
Gambar II- 40 Angka Partisipasi Sekolah Kota Padang Tahun 2020-2024..II-90
Gambar II- 41 Harapan Lama Sekolah Kota Padang dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024.....;....II-90
Gambar II- 42 Rata-rata Lama Sekolah Kota Padang Tahun 2020-2024.....II-91
Gambar II- 43 Jumlah Kasus Kematian Ibu Kota Padang Tahun 2020-2024.....II-95
Gambar II- 44 Kasus Balita Gizi Buruk dari Terbanyak ke Terkecil pada masing-masing Kecamatan di Kota Padang tahun 2024.....II-97
Gambar II- 45 Cakupan Penemuan dan Pengobatan Tuberkulosis Kota Padang Tahun 2020-2024.....II-99
Gambar II- 46 Angka Keberhasilan Pengobatan TBC.....II-99
Gambar II- 47 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Padang Tahun 2019-2023.....II-100
Gambar II- 48 Angka Ketergantungan Penduduk Kota Padang Tahun 2020-2024.....II-109
Gambar II- 49 Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Kota Padang Tahun 2020-2024 .....II-110
Gambar II- 50 Pengeluaran Konsumsi Perkapita di Kota Padang Tahun 2020-2024.....II-111
Gambar II- 51 Pengeluaran Konsumsi Perkapita Di Kota Padang Tahun 2024.....II-111
Gambar II- 52 Perkembangan Nilai PDRB di Kota Padang Tahun 2020-2024 .....II-112
Gambar II- 53 Kontribusi PDRB ADHB Kota Padang dari Terbesar ke Terkecil Tahun 2024.....II-114
Gambar II- 54 Rasio PDRB Industri Pengolahan Kota Padang Tahun 2020-2024 .....II-115
Gambar II- 55 Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum (%).....II-115
Gambar II- 56 Rasio PDRB Ekonomi Kreatif Tahun 2019-2023.....II-116
Gambar II- 57 Proporsi Jumlah IKM terhadap Industri Besar (%).....II-117
Gambar II- 58 Rasio Volume Koperasi Terhadap PDRB Kota Padang Tahun 2019-2024.....II-117
Gambar II- 59 Proporsi Jumlah UKM Non Pertanian Kota Padang Tahun 2019 - 2023.....II-118
Gambar II- 60 ROA BUMD Perumda PDAM Kota Padang Tahun 2019-2024.....II-119
Gambar II- 61 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Kota Padang Tahun 2020-2024 (%).....II-119
Gambar II- 62 Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal Kota Padang dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 – 2024 (%).....II-120
Gambar II- 63 Jumlah Wisatawan Mancanegara di Kota Padang Tahun 2020-2024.....II-121
Gambar II- 64Rasio Kewirausahaan Kota Padang Tahun 2019-2024.....II-122
Gambar II- 65 Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kota Padang Tahun 2020-2024 (%).....II-124
Gambar II- 66 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kota Padang Tahun 2020-2024 (juta/tahun)II-125
Gambar II- 67 Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Tahun 2022-2024 .....II-125

Gambar II- 68 Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terhadap PDRB ADHB Kota Padang Tahun 2020-2024 (%)……II-126
Gambar II- 69 Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB Kota Padang Tahun 2020-2024……II-127
Gambar II- 70 Proporsi PDRB Kota Padang Terhadap Provinsi Tahun 2020 - 2024 (%)……II-128
Gambar II- 71 Inflasi Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024……II-130
Gambar II- 72 Total Kredit Terhadap PDRB Kota Padang Tahun 2019 – 2023 (%)……II-132
Gambar II- 73 Realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Pembiayaan Daerah Kota Padang Tahun 2020-2024……II-258
Gambar II- 74 Rata-Rata Proporsi Sumber Pendapatan Daerah Kota Padang Tahun 2020-2024 (%)……II-260
Gambar II- 75 Perkembangan Item Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Tahun 2020-2024……II-263
Gambar II- 76 Realisasi dan Pertumbuhan Pajak Daerah Kota Padang Tahun 2020-2024 (juta rupiah)……II-264
Gambar II- 77 Realisasi dan Pertumbuhan Retribusi Daerah Kota Padang Tahun 2020-2024 (juta rupiah)……II-265
Gambar II- 78 Realisasi dan Pertumbuhan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Kota Padang Tahun 2020-2024 (juta rupiah)……II-266
Gambar II- 79 Realisasi dan Pertumbuhan Lain-lain PAD yang Sah Kota Padang Tahun 2020-2024 (juta rupiah)……II-267
Gambar II- 80 Realisasi dan Pertumbuhan Pendapatan Transfer Kota Padang Tahun 2020-2024 (juta rupiah)……II-268
Gambar II- 81 Realisasi dan Pertumbuhan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Padang Tahun 2020-2024 (juta rupiah)……II-270
Gambar II- 82 Realisasi dan Pertumbuhan Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2020-2024 (juta rupiah)……II-271
Gambar II- 83 Rata-Rata Proporsi Pos – pos Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2020-2024 (%)……II-272
Gambar II- 84 Proporsi Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Daerah Kota Padang 2020-2024 (juta rupiah……II-287
Gambar II- 85 Rasio Kemandirian Daerah Kota Padang Tahun 2020-2024 ……II-288
Gambar II- 86 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Padang Tahun 2020-2024 (juta rupiah)……II-289
Gambar II- 87 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kota Padang Tahun 2020-2024……II-291
Gambar II- 88 Rasio Efektivitas Kota Padang Tahun 2020-2024 (juta rupiah)……II-292
Gambar II- 89 Megatrend Global 2045……II-335
Gambar II- 90 Program Prioritas Pembangunan Nasional RPJMN 2025-2029……II-340
Gambar II- 91 Grafik Persentase Capaian Indikator TPB Kota Padang……II-360
Gambar II- 92 Grafik Persentase Capaian Indikator TPB Kota Padang Berdasarkan Pilar……II-362
Gambar II- 93 Grafik Persentase Capaian Indikator TPB Kota Padang Berdasarkan Kategori Jenis Urusan……II-363
Gambar III- 1 Keterkaitan Strategi dan Arah Kebijakan dalam Konsep Penyusunan RPJMD ……III-56

Gambar III- 2 Arah Kebijakan dan Target Penurunan Kemiskinan Nasional Tahun 2025-2029 .....III-109
Gambar III- 3 Kerangka Pikir Pembangunan Manusia III-112
Gambar III- 4 Strategi dan Deregulasi Perizinan serta Kebijakan Fiskal dan Moneter *Pro-Growth* III-114
Gambar III- 5 Upaya Pengoptimalan Transformasi Digital Layanan Publik dalam Pemerintah Digital III-118

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan sangat penting dan signifikan dalam menentukan arah dan fokus pembangunan daerah. Selain untuk menjadikan pembangunan lebih terarah, perencanaan pembangunan juga dapat berfungsi sebagai standar atau alat ukur untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah tersebut, disusun secara berjangka meliputi: (i) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahunan, (ii) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahunan, dan (iii) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahunan.

Selain itu, perencanaan pembangunan juga bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, pengoptimalan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Undang-undang SPPN tersebut, mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah yang merupakan penjabaran Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan RPJM Nasional. Dokumen RPJMD ini dijabarkan secara lebih teknis dalam dokumen perencanaan perangkat daerah 5 (lima) tahunan dalam bentuk dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang nantinya akan dituangkan per tahun dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Penyusunan dokumen RPJMD ini juga mempedomani Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Dengan terpilihnya pasangan kepala daerah pada tanggal 6 Februari 2025 dan dilantiknya pada tanggal 20 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia, maka H. Fadly Amran, BBA dan H. Maigus Nasir, M.Pd secara resmi menjabat sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang untuk periode

2025-2030. Sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Pasal 162 ayat (1): “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.”

Sehingga sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka perlu disusun dokumen RPJMD untuk periode 2025-2029. Sebagai satu kesatuan perencanaan daerah yang utuh, RPJMD Kota Padang 2025-2029 merupakan irisan sebagai salah satu tahapan untuk mewujudkan tujuan dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Tahun 2025-2045, RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029 tentu juga merupakan rangkaian kesinambungan dari pelaksanaan RPJMD Kota Padang periode sebelumnya, sehingga tidak bisa lepas dari capaian-capaian yang telah dihasilkan.

Penyusunan RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029 dilaksanakan melalui tata cara dan proses sebagai berikut :

1. Penyiapan rancangan awal RPJMD guna memperoleh gambaran awal permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis daerah serta perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran serta target indikator kinerja yang disepakati melalui Forum Konsultasi Publik.
2. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD guna memperoleh masukan dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan. Sehingga masukan dan komitmen hasil Musrenbang menjadi masukan utama penyempurnaan rancangan RPJMD untuk menjadi rancangan akhir RPJMD.
3. Rancangan akhir RPJMD beserta Rancangan Peraturan Daerah disampaikan kepada DPRD guna diproses lebih lanjut menjadi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029 berdasarkan hasil reviu APIP dan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi oleh Kementerian Hukum.
4. Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2029 memiliki nilai-nilai strategis dan politis, yaitu:
    a. Media untuk mengimplementasikan janji Kepala Daerah terpilih yang telah disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat;
    b. Pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun;
    c. Pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD);
    d. Alat atau instrumen pengendalian bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk melihat seberapa jauh pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan selama masa jabatannya;

e. Instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja Kepala Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun;

f. Pedoman bagi daerah dalam penyusunan rencana pembangunan daerah yang selaras dan sinkron dengan nasional dan provinsi; dan

g. Pedoman penilaian kinerja keberhasilan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah melalui Kementerian/Lembaga terkait.

Sedangkan tahapan, jadwal penyusunan dan penetapan RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029, sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dapat dilihat pada infografis berikut ini.

Gambar I- 1 Tahapan, Jadwal Penyusunan dan Penetapan RPJMD Tahun 2025-2029

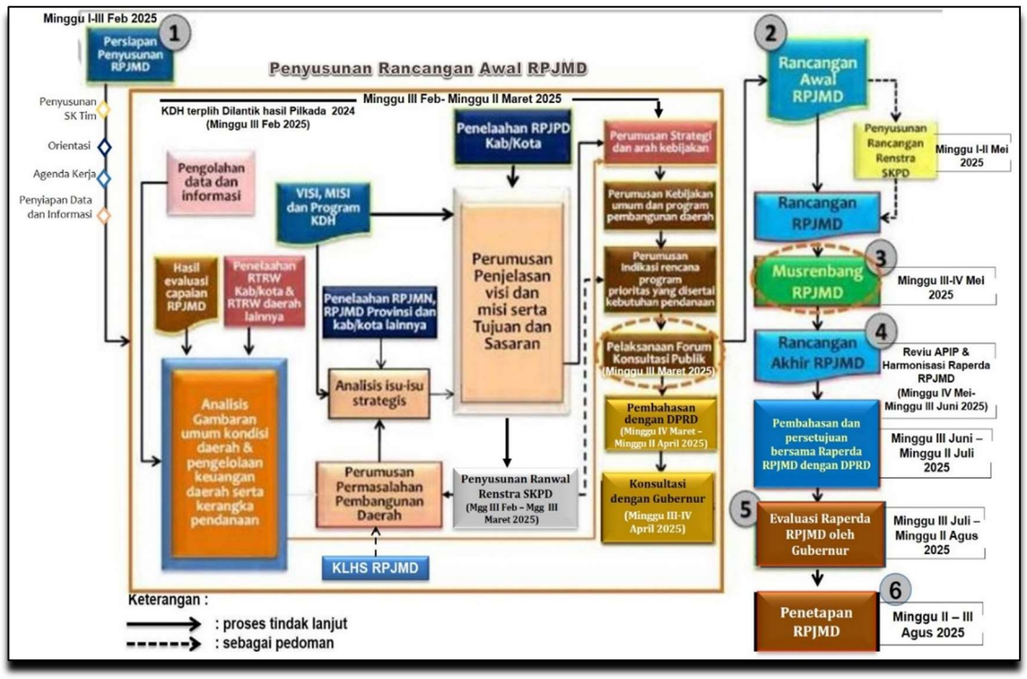

Sumber : PMDN No. 86/2017

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 9);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (PUG);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodeikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat 2025-2045 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 225);
26. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 11).

Selain dasar hukum diatas, pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ada aturan baru yaitu Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Kepala Daerah Hasil Pemilu Serentak Tahun 2024 merupakan salah satu dasar hukum operasional yang sangat penting dalam proses penyusunan RPJMD Kota Padang Tahun 2025–2029.

Inmendagri ini dikeluarkan sebagai pedoman teknis untuk pemerintah daerah dalam menyesuaikan proses penyusunan RPJMD dengan siklus hasil Pilkada Serentak 2024, serta memastikan bahwa penyusunan RPJMD dilakukan secara tepat waktu, terkoordinasi, dan selaras dengan kebijakan nasional dan provinsi.

1.3 Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya

RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029 merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat. Penyusunan RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJPD Kota Padang Tahun 2025-2045 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 serta sinkronisasi yang imperatif dengan RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029. Selain itu, RPJMD mengacu kepada Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD serta memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten/Kota tetangga. Adapun hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, digambarkan melalui skema pada infografis berikut ini.

Gambar I- 2 Hubungan RPJMD terhadap Dokumen Perencanaan Lainnya

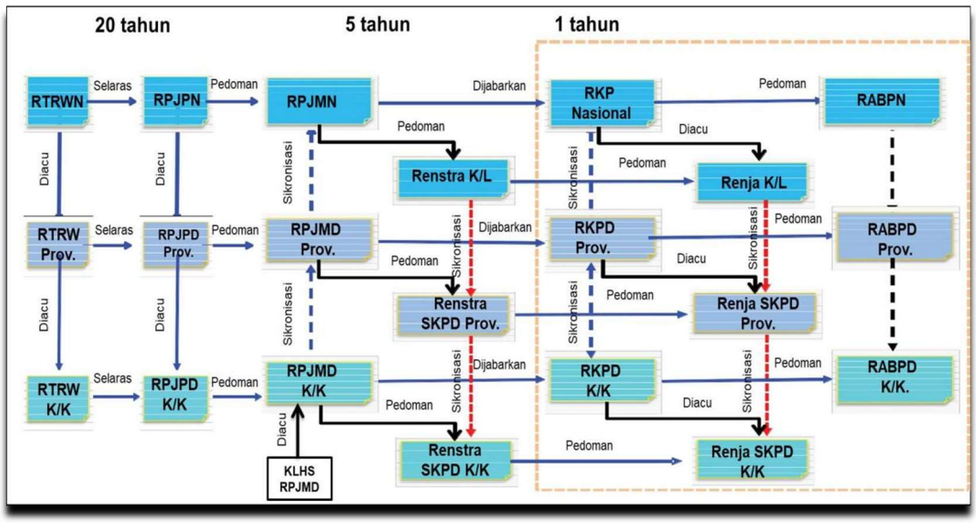

Sumber : PMDN No. 86/2017

Hubungan RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan lainnya, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1.3.1 RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kota Padang Tahun 2025-2045

Kerterkaitan RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kota Padang Tahun 2025-2045 memiliki peran yang sangat strategis karena menjadi pondasi awal dalam upaya mewujudkan visi RPJPD Tahun 2025-2045, yaitu; **"Kota Padang Maju, Berbudaya, dan Berkelanjutan Menuju Kota Jasa Terkemuka.** Visi tersebut sebagai pengejawantahan visi Indonesia Emas 2045, "Negara Kesatuan Republik Indonesia Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan" melalui 8 (delapan) misi merupakan agenda transformasi, yaitu;

transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, supremasi hukum, stabilitas, dan ketangguhan diplomasi, ketahanan sosial budaya dan ekologi, pembangunan kewilayahan yang merata dan berkualitas, sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan dan kesinambungan pembangunan. Secara garis besar, kedelapan misi atau agenda transformasi tersebut dijabarkan dalam 17 (tujuh belas) arah pembangunan yang diukur melalui 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan.

Kota Padang merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu memberikan sumbangsih pada pencapaian cita-cita nasional menuju Indonesia Emas Tahun 2045. Tidak hanya itu, Kota Padang perlu memberikan respons yang tepat terhadap *mega-trends* global berdasarkan potensi dan keunggulan daerah yang dimiliki. Hal ini guna memanfaatkan peluang-peluang yang muncul ditingkat global bagi pembangunan sosial, ekonomi, industri, teknologi dan hal lainnya bagi Kota Padang.

Guna menentukan tahapan dan prioritas pembangunan Kota Padang selama 20 tahun dan mencapai target kinerja secara terukur dan konsisten, maka arah kebijakan dalam mencapai visi dan misi pada RPJPD Tahun 2025-2045 dibagi menjadi 4 tahapan yakni:

1. Tahap Pertama (tahun 2025-2029) adalah Penguatan Pondasi Transformasi Kota Padang Menuju Kota Jasa Terkemuka.
2. Tahap Kedua (tahun 2030-2034) adalah Percepatan Pembangunan Kota Jasa Terkemuka yang Inklusif Berbasis Budaya.
3. Tahap Ketiga (tahun 2035-2039) adalah Penguatan Daya Saing yang Inklusif Menuju Kota Jasa Terkemuka.
4. Tahap Keempat (tahun 2040-2045) adalah Perwujudan Kota Padang Menjadi Kota Jasa Terkemuka.

Berikut diuraikan arah dan tema pembangunan berdasarkan periodesasi RPJMD selama RPJPD Kota Padang Tahun 2025-2045.

Adapun arah kebijakan pembangunan Kota Padang Periode Tahun 2025-2029 dalam RPJPD adalah sebagai berikut :

1. Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
2. Percepatan hilirisasi SDA dan produktifitas tenaga kerja serta penguatan riset inovasi hilirisasi SDA.
3. Penciptaan kelembagaan efisien, tepat fungsi; peningkatan kualitas ASN; penyediaan regulasi yang efektif; optimalisasi digitalisasi pelayanan publik.
4. Penguatan supremasi hukum, demokratisasi dan stabilitas ekonomi makro dan daerah, daya saing daerah.
5. Penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.
6. Pembangunan wilayah dan pusat-pusat pertumbuhan berkeadilan.

7. Pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana dasar masyarakat serta infrastruktur dasar dan ekonomi daerah yang berkeadilan.
8. Reformasi tata kelola fiskal dan sinergi pembiayaan Pembangunan non pemerintah

Merujuk kepada tahapan dan arah kebijakan pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045, periodesasi Tahun 2025-2029 difokuskan kepada, "**Penguatan transformasi sosial, Perekonomian yang Berkualitas dan Berkelanjutan, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih, Keamanan Daerah Tangguh, Masyarakat Damai, Demokratis, dan Inklusif, serta Stabilitas Ekonomi Makro Daerah, Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi, Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan, Sarana dan Prasarana Kota yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan"**.

Berlandaskan tahapan dan arah kebijakan pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045 tahap pertama tersebut, sehingga menjadi pedoman dalam perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan serta indikasi program prioritas pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran visi, misi dan program kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang periodesasi 2025-2030.

Kesesuaian antara RPJMD dan RPJPD menjadi penting agar kesinambungan pembangunan daerah dapat terjaga, serta setiap program dan kegiatan pembangunan yang dirancang dalam RPJMD mampu berkontribusi secara nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kota Padang. Dengan demikian, RPJMD tidak hanya menjadi alat perwujudan visi kepala daerah, tetapi juga merupakan instrumen implementatif untuk mewujudkan cita-cita pembangunan jangka panjang Kota Padang secara bertahap dan terukur.

1.3.2 RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029 dengan RTRW Kota Padang Tahun 2010-2030

Penyusunan RPJMD perlu memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 sebagai acuan untuk mengarahkan lokasi kegiatan (spasial) dan menyusun program pembangunan yang berkaitan pemanfaatan ruang kawasan.

Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang yang asumsi-asumsinya, meliputi: 1) struktur ruang dalam susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional; 2) distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya; dan 3) pemanfaatan ruang melalui program yang disusun dalam rangka mewujudkan

rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu

Dalam menyusun RPJMD ini selain berpedoman pada RTRW daerah sendiri, juga perlu memperhatikan RTRW daerah lain, guna terciptanya sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar kabupaten/kota serta keterpaduan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan kabupaten/kota, dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

1.3.3 RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029 dengan KLHS RPJMD Tahun 2025-2029

Salah satu dokumen perlu diperhatikan dan diselaraskan dalam penyusunan RPJMD adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS adalah kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah.

Dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, maka penyusunan RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029 harus dilakukan dengan mengintegrasikan KLHS RPJMD ke dalam seluruh proses perencanaan. Keselarasan ini penting untuk mengoptimalkan potensi wilayah secara berkelanjutan, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta menjaga keseimbangan ekologis dan kelestarian lingkungan hidup.

Harmonisasi kedua dokumen ini akan memperkuat kebijakan pembangunan yang inklusif dan berwawasan lingkungan, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memastikan keberlanjutan pembangunan di masa yang akan datang

1.3.4 RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029 dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029 merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga dalam penyusunan RPJMD ini perlu memperhatikan prioritas pembangunan nasional lima tahun mendatang. Oleh karena itu, dalam

merumuskan tujuan dan sasaran serta prioritas pembangunan dan program prioritas pembangunan RPJMD memiliki integrasi, sinkronisasi dan sinergi dengan arah pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029 yang dijabarkan melalui penyelarasan target indikator makro dan dukungan program prioritas pembangunan RPJMD terhadap prioritas pembangunan nasional bersifat imperatif.

RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029 juga disusun dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029. Upaya integrasi ini menjadi kunci dalam menciptakan sinergi pembangunan antar level pemerintahan untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah yang menyeluruh, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, percepatan pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kualitas layanan publik. Keselarasan antara dokumen RPJMD Kota Padang dan dokumen perencanaan Provinsi Sumatera Barat akan memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas sektor, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dapat berjalan lebih efektif, efisien dan berkelanjutan.

Sinergitas antara RPJMD Kota Padang dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat diharapkan dapat mempercepat realisasi program pembangunan di daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan.

1.3.5 RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029 dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah disusun sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah bersifat indikatif. RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dalam waktu 5 (lima) tahun. Secara eksplisit, Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan. Pada dasarnya tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program dalam Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

Keterkaitan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah, dapat dilihat pada infografis berikut ini.

Gambar I- 3 Keterkaitan RPJMD Dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah

Sumber : PMDN No. 86/2017

1.3.6 RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Pelaksanaan RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029 setiap tahunnya akan dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kota Padang yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun serta kebijakan prioritas nasional. Sedangkan sasaran pembangunan pada RKPD berpedoman pada RPJMD yang mengandung makna, bahwa prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah harus selaras dan sejalan dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD. Selain itu, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas tahunan harus selaras dan sejalan dengan indikasi rencana program prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD. Oleh karena itu, dalam dokumen RKPD perlu ditetapkan prioritas pembangunan daerah atau agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang merah/tonggak capaian antara *(milestones*) menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD melalui rencana program pembangunan daerah tahunan.

Penyusunan dokumen RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029, juga harus meperhatikan dan mempedomani dokumen perencanaan lainnya. Hubungan dan keterkaitan dokumen RPJMD dengan dokumen lainnnya dapat dilihat dari gambar berikut:

Gambar I- 4 Hubungan dan Keterkaitan RPJMD 2025-2029 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

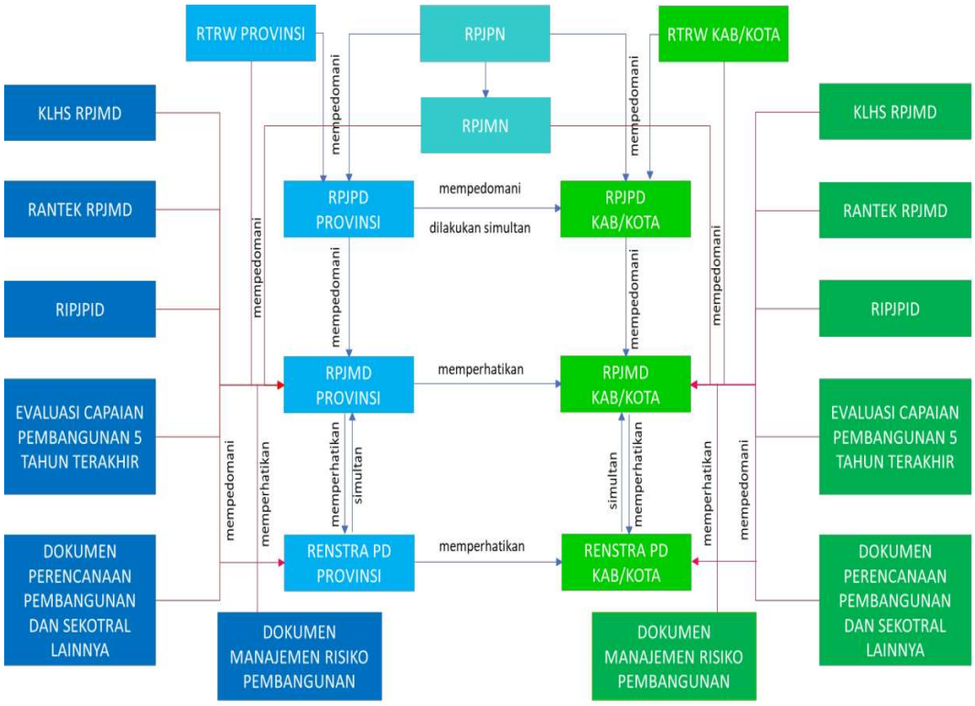

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai pedoman pembangunan daerah bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kota Padang sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang dijabarkan melalui strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, kolaboratif, koordinatif dan integratif.

1.4.2 Tujuan

Tujuan dari disusunnya RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029, yaitu :

1. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 5 (lima tahun) kedepan.
2. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 5 (lima) tahun ke depan.
3. Menjabarkan visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang terpilih ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang dijabarkan melalui strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan Tahun 2025-2029 dengan berpedoman

kepada RPJPD Kota Padang Tahun 2025-2045 dan RTRW Kota Padang.

4. Menetapkan berbagai program prioritas dan pagu indikatif serta target indikator kinerja program Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan periodesasi Tahun 2025-2029.
5. Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah atau Indikator Kinerja Kunci, sebagai acuan penilaian keberhasilan kinerja Pemerintah Kota Padang selama periode 2025-2029.
6. Pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah periode 2025-2029.
7. Acuan bagi seluruh para pemangku kepentingan pembangunan (*stakeholders*) berpartisipasi dalam mendukung pembangunan daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Penyusunan RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029 terdiri dari 5 bab, sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Kepala Daerah Hasil Pemilu Serentak Tahun 2024, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan penyusunan RPJMD.

Bab II Gambaran Umum Daerah

Menjelaskan gambaran umum kondisi daerah yang memuat aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat,aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum, selanjutnya pada bab ini juga menjelaskan tentang gambaran keuangan daerah yang menjelaskan tentang realisasi APBD tahun 2020-2024 dan proyeksi keuangan tahun anggaran 2025-2029. Bab ini juga menjelaskan permasalahan dan isu strategis daerah.

Bab III Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Bab ini menjelaskan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029, serta strategi dan arah kebijakan dan program prioritas Pembangunan daerah untuk kurun

waktu 5 (lima) tahun kedepan yang merupakan penjabaran terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah.

Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Menjelaskan program Perangkat Daerah beserta pagu indikatif serta penetapan Indikator Kinerja Daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diukur melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Bab V Penutup

Bab ini menjelaskan kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

Kota Padang adalah ibukota Provinsi Sumatera Barat, secara administratif memiliki luas wilayah ± 1.414,96 km², berada di pesisir pantai Barat pulau Sumatera dengan posisi astronomis antara 1000 05'05" BT - 1000 34'09" BT dan 000 44'00" LS - 01008'35" LS.

Kota Padang terdiri kawasan daratan dan perairan/laut, dimana luas kawasan daratan adalah 694,96 km² sedangkan kawasan perairan/laut luasnya 720,00 km². Kota Padang memiliki 19 pulau-pulau kecil yang tersebar pada beberapa kecamatan, dan 21 sungai besar dan kecil dimana 5 diantaranya merupakan sungai besar, dengan sungai terpanjang adalah sungai Batang Kandis yang panjangnya ± 20 km.

Gambar II- 1 Peta Kota Padang

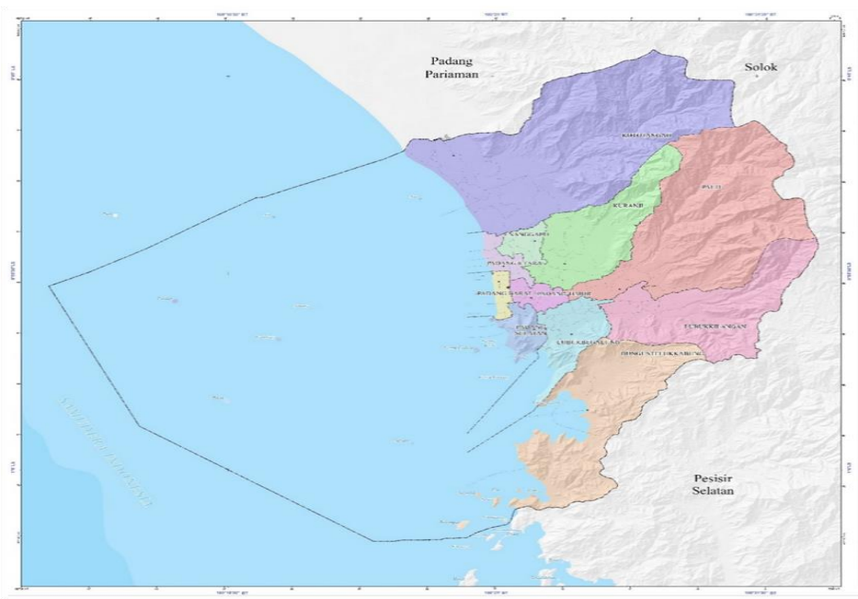

Sumber: RDTR Kota Padang Tahun 2023 -2043

Pada tahun 1980, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tanggal 21 Maret 1980 wilayah Kota Padang yang sebelumnya terdiri dari 3 kecamatan dengan 15 kampung dikembangkan menjadi 11 kecamatan dan 193 kelurahan, kemudian dengan ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 dilakukan penggabungan kelurahan menjadi 104 kelurahan. Adapun batas-batas wilayah administratif Kota Padang sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Solok dan Kota Solok
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan.

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Mentawai.

Wilayah kecamatan yang terluas di kota Padang adalah Kecamatan Koto Tangah yaitu 232,25 km² atau 33,42% sedangkan wilayah kecamatan yang terkecil luasnya adalah Kecamatan Padang Barat yaitu 7 km² atau 1,01%. Luas dan komposisi luas lahan serta ketinggian daerah menurut Kecamatan di Kota Padang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II- 1 Luas Kota Padang berdasarkan Kecamatan (km²)

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas (km²)	% luas	Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL) (meter)	Jarak ke Ibukota Padang
1	Bungus Teluk Kabung	6	100,78	14,50	0 - 850	33,00
2	Lubuk Kilangan	7	85,99	12,37	25 - 1853	15,00
3	Lubuk Begalung	15	30,91	4,45	8 - 400	14,00
4	Padang Selatan	12	10,03	1,44	0 - 322	17,00
5	Padang Timur	10	8,15	1,17	4 - 10	13,00
6	Padang Barat	10	7,00	1,01	0 - 8	12,00
7	Padang Utara	7	8,08	1,16	0 - 25	11,00
8	Nanggalo	6	8,07	1,16	3 - 8	8,00
9	Kuranji	9	57,41	8,26	8 - 1000	9,00
10	Pauh	9	146,29	21,05	10 - 1600	16,00
11	Koto Tangah	13	232,25	33,42	0 - 1600	13,40
TOTAL		**104**	**694,96**	**100,00**		

Sumber: Kota Padang Dalam Angka, 2025

2.1.1.1.1 Kondisi Topografi

Wilayah Kota Padang memiliki topografi yang bervariasi, perpaduan daratan yang landai dan perbukitan bergelombang yang curam. Sebagian besar topografi wilayah Kota Padang memiliki tingkat kelerengan lahan rata-rata >40%. Ketinggian wilayah Kota Padang dari permukaan laut juga bervariasi, mulai 0 mdpl sampai >1.000 mdpl. Topografi Kota Padang terdiri dari dataran tinggi/perbukitan, dataran rendah, daerah aliran sungai serta mempunyai pulau-pulau dan pantai.

Berdasarkan posisi wilayahnya, Kota Padang secara fisik mempunyai ciri yang menonjol:

1. Wilayah Pantai; seluruhnya berhadapan dengan Samudera Hindia.
2. Wilayah Dataran Rendah; sebagian besar sudah berkembang sebagai daerah pusat kota.
3. Wilayah Dataran tinggi; berupa lereng Bukit Barisan melingkari Kota Padang.

Kondisi kemiringan lereng di Kota Padang umumnya didominasi oleh kemiringan lereng antara >40% yaitu dengan luasan 20.763,72 hektar atau sebesar 29,87%. Kelurahan dengan tingkat kemiringan >40% paling luas adalah Kelurahan Lambung Bukit dan Kelurahan Limau Manis yang terdapat di Kecamatan Pauh. Kawasan dengan kelerengan lahan >40% ini merupakan kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung.

Kemiringan lereng lainnya yang cukup dominan di Kota Padang adalah kemiringan lereng 25-40% yaitu seluas 16.709,01 hektar atau sebesar 24,04%. Kelurahan dengan tingkat kemiringan 25-40% yang paling luas terdapat di Kelurahan Lambung Bukit Kecamatan Pauh dan Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa pada umumnya kemiringan lereng di Kota Padang dapat dikatakan memiliki kemiringan yang cukup tinggi dengan dominasi kemiringan sebesar 15% sampai dengan >40% yaitu seluas 45.787,83 hektar atau sebesar 65,87% dari luas Kota Padang.

Dalam perencanaan permukiman umumnya kemiringan lereng yang aman untuk dapat dimanfaatkan adalah kemiringan lereng antara 0-15%, saat ini di Kota Padang kemiringan lereng tersebut seluas 23.722,85 hektar atau sebesar 34,14% dari luas Kota Padang. Kelurahan dengan tingkat kemiringan yang cukup landai tersebut paling luas berada di Kelurahan Batipuh Panjang

Kecamatan Koto Tangah, dan pada umumnya hampir seluruh kelurahan di Kecamatan Koto Tangah merupakan daerah dengan tingkat kemiringan lereng sebesar 0-3%. Kelurahan lainnya yang memiliki kemiringan lereng yang cukup landai adalah Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji, serta beberapa kelurahan lainnya di Kecamatan Kuranji umumnya memiliki kemiringan lereng yang cukup landai. Untuk lebih jelasnya terkait dengan kemiringan lereng di Kota Padang menurut kelurahan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II- 2 Kondisi Kemiringan Lahan Kota Padang Menurut Kelurahan

Kecamatan	Kelurahan	Kemiringan Lahan					
		0 - 3%	3 - 8%	8 - 15%	15 - 25%	25 - 40%	>40%
Bungus Teluk Kabung	Bungus Barat	183,26	171,61	99,36	200,10	346,47	533,42
	Bungus Selatan	102,21	12,05	44,65	92,23	189,51	64,61
	Bungus Timur	184,52	261,71	221,64	390,24	644,27	1.056,20
	Teluk Kabung Selatan	131,09	75,04	87,31	369,43	774,20	608,29
	Teluk Kabung Tengah	84,11	105,52	109,27	351,08	759,18	642,52
	Teluk Kabung Utara	60,30	55,85	80,92	263,49	312,87	160,52
Bungus Teluk Kabung Total		745,50	681,77	643,15	1.666,57	3.026,51	3.065,56
Koto Tangah	Air Pacah	471,86	15,15	-	-	-	-
	Balai Gadang	582,01	422,79	399,81	1.375,30	2.295,84	1.971,06
	Batang Kabung	240,34	-	-	-	-	-
	Batipuh Panjang	752,35	94,30	29,37	5,89	3,74	0,58
	Bungo Pasang	404,18	6,36	-	-	-	-
	Dadok Tunggul Hitam	366,67	-	-	-	-	-
	Koto Panjang Ikua Koto	592,85	54,68	-	-	-	-

Kecamatan	Kelurahan	Kemiringan Lahan					
		0 - 3%	3 - 8%	8 - 15%	15 - 25%	25 - 40%	>40%
	Koto Pulai	266,26	15,30	-	-	-	-
	Lubuk Buaya	483,16	-	-	-	-	-
	Lubuk minturun	220,01	245,58	386,38	1.366,09	2.972,41	3.940,97
	Padang Sarai	513,90	-	-	-	-	-
	Parupuk Tabing	489,35	-	-	-	-	-
	Pasir Nan Tigo	364,45	-	-	-	-	-
Koto Tangah Total		5.747,37	854,17	815,56	2.747,28	5.272,00	5.912,61
Kuranji	Ampang	132,81	-	-	-	-	-
	Anduring	114,60	-	-	-	-	-
	Gunung Sarik	547,32	65,07	49,00	84,90	113,77	28,95
	Kalumbuk	246,14	6,85	-	-	-	-
	Korong Gadang	383,76	44,09	15,45	9,27	3,51	-
	Kuranji	570,72	193,72	266,13	528,73	828,66	1.134,59
	Lubuk Lintah	179,98	9,68	-	-	-	-
	Pasar Ambacang	296,49	38,71	2,68	-	-	-
	Sungai Sapih	554,60	4,05	5,32	6,11	-	-
Kuranji Total		3.026,42	362,17	338,59	629,01	945,94	1.163,54
Lubuk	Banuaran Nan XX	54,11	15,99	-	-	-	-

Kecamatan	Kelurahan	Kemiringan Lahan					
		0 - 3%	3 - 8%	8 - 15%	15 - 25%	25 - 40%	>40%
begalung	Batung Taba Nan XX	143,76	3,17	2,70	-	-	-
	Cangkeh Nan XX	76,05	-	-	-	-	-
	Gates Nan XX	17,55	11,87	8,43	63,40	230,15	331,05
	Gurun Laweh Nan Dua Puluh	64,61	-	-	-	-	-
	Kampung Baru Nan XX	31,34	16,25	0,02	-	-	-
	Kampung Jua Nan XX	107,48	21,28	12,32	84,03	87,80	31,68
	Koto Baru Nan XX	13,67	39,54	5,67	2,16	-	-
	Lubuk Begalung Nan XX	97,33	10,39	0,93	-	-	-
	Pagambiran Ampalu Nan XX	191,93	45,83	19,80	70,82	195,89	173,69
	Pampangan Nan XX	88,49	18,25	2,49	6,92	36,31	50,28
	Parak Laweh Pulau Air Nan XX	93,06	0,66	-	-	-	-
	Tanah Sirah Nan XX	78,23	6,15	5,12	-	-	-
	Tanjung Aur	2,82	9,13	-	0,72	-	-
	Tanjung Saba	88,75	16,82	5,74	-	-	-

Kecamatan	Kelurahan	Kemiringan Lahan					
		0 - 3%	3 - 8%	8 - 15%	15 - 25%	25 - 40%	>40%
	Pitameh Nan XX						
Lubuk Begalung Total		1.149,18	215,33	63,22	228,05	550,15	586,70
Lubuk Kilangan	Bandar Buat	229,22	167,21	7,54	0,68	-	-
	Batu Gadang	28,74	256,78	353,69	616,55	768,37	1.649,25
	Beringin	62,14	29,59	50,21	80,31	115,44	102,54
	Indarung	14,84	302,63	530,54	231,42	680,53	1.437,26
	Koto Lalang	176,78	64,86	11,94	21,65	8,50	-
	Padang Besi	19,67	51,07	10,37	-	-	-
	Tarantang	62,88	26,63	21,19	82,49	108,13	80,08
Lubuk Kilangan Total		594,27	898,77	985,49	1.033,10	1.680,96	3.269,12
Nanggalo	Gurun Laweh	132,43	-	-	-	-	-
	Kampung Lapai Baru	117,40	-	-	-	-	-
	Kampung Olo	91,42	5,25	1,92	0,17	-	-
	Kurao Pagang	300,28	-	-	-	-	-
	Surau Gadang	199,42	1,79	-	-	-	-
	Tabing Bandar adang	90,64	9,51	-	1,53	2,53	-
Nanggalo Total		931,58	16,55	1,92	1,70	2,53	
Padang Barat	Belakang Tangsi	38,01	22,91	-	-	-	-

Kecamatan	Kelurahan	Kemiringan Lahan					
		0 - 3%	3 - 8%	8 - 15%	15 - 25%	25 - 40%	>40%
	Berok Nipah	41,29	4,81	0,12	-	-	-
	Flamboyan Baru	51,09	-	-	-	-	-
	Kampung Jao	66,36	-	-	-	-	-
	Kampung Pondok	31,34	18,03	-	-	-	-
	Olo	52,10	-	-	-	-	-
	Padang Pasir	62,54	-	-	-	-	-
	Purus	54,13	-	-	-	-	-
	Rimbo Kaluang	62,16	-	-	-	-	-
	Ujung Gurun	39,63	-	-	-	-	-
Padang Barat Total		498,65	45,75	0,12	-	-	
Padang Selatan	Air Manis	82,00	24,92	11,16	14,29	76,43	61,75
	Alang Laweh	21,80	0,29	-	-	-	-
	Batang Arau	7,57	7,22	3,12	9,21	28,49	7,57
	Belakang Pondok	27,79	5,32	-	-	-	-
	Bukit Gado-Gado	15,39	-	11,04	50,44	47,73	39,84
	Mata Air	17,55	69,53	14,94	24,23	55,09	97,61
	Pasa Gadang	29,92	10,87	-	0,01	0,68	-

Kecamatan	Kelurahan	Kemiringan Lahan					
		0 - 3%	3 - 8%	8 - 15%	15 - 25%	25 - 40%	>40%
	Ranah Parak Rumbio	16,83	6,60	-	-	-	-
	Rawang	74,82	17,61	5,24	7,52	36,27	21,66
	Seberang Padang	50,81	3,31	-	0,98	11,92	6,09
	Seberang Palinggam	8,07	-	-	14,46	20,99	59,42
	Teluk Bayur	33,12	6,70	0,30	6,23	70,31	23,65
Padang Selatan Total		385,68	152,36	45,79	127,38	347,91	317,59
Padang Timur	Andalas	123,38	-	-	-	-	-
	Ganting Parak Gadang	81,46	0,52	-	-	-	-
	Jati	90,85	-	-	-	-	-
	Jati Baru	76,52	-	-	-	-	-
	Kubu Marapalam	76,08	-	-	-	-	-
	Kubu Parak Karakah	228,74	-	-	-	-	-
	Parak Gadang Timur	69,85	4,61	-	0,04	-	-
	Sawahan	53,89	-	-	-	-	-
	Sawahan Timur	72,02	-	-	-	-	-
	Simpang Haru	40,56	-	-	-	-	-
Padang Timur Total		913,35	5,14	0,04		-	

Kecamatan	Kelurahan	Kemiringan Lahan					
		0 - 3%	3 - 8%	8 - 15%	15 - 25%	25 - 40%	>40%
Padang Utara	Air Tawar Barat	148,15	-	-	-	-	-
	Air Tawar Timur	68,11	-	-	-	-	-
	Alai Parak Kopi	162,30	-	-	-	-	-
	Gunung Pangilun	118,65	30,15	2,31	11,51	20,21	-
	Lolong Belanti	115,23	-	-	-	-	-
	Ulak Karang Selatan	90,53	-	-	-	-	-
	Ulak Karang Utara	85,22	-	-	-	-	-
Padang Utara Total		788,18	30,15	2,31	11,51	20,21	
Pauh	Binuang Kampung Dalam	151,77	7,53	-	-	-	-
	Cupak Tangah	146,50	61,79	1,58	-	-	-
	Kapala Koto	102,44	149,86	6,87	2,18	3,62	-
	Koto Luar	24,42	116,62	41,83	71,24	145,10	65,34
	Lambung Bukit	66,06	144,30	400,44	1.134,83	3.360,93	3.763,06
	Limau Manis	19,86	222,50	248,03	411,85	983,26	2.043,92
	Limau Manis Selatan	47,68	143,55	258,66	250,37	369,89	576,28
	Piai Tangah	234,31	4,24	-	-	-	-

Kecamatan	Kelurahan	Kemiringan Lahan					
		0 - 3%	3 - 8%	8 - 15%	15 - 25%	25 - 40%	>40%
	Pisang	183,53	-	-	-	-	-
Pauh Total		976,56	850,39	957,41	1.870,47	4.862,80	6.448,60
KOTA PADANG TOTAL		**15.756,74**	**4.112,54**	**3.853,56**	**8.315,11**	**16.709,01**	**20.763,72**

Sumber: RDTR Kota Padang Tahun 2023 – 2043
Keterangan : - (data = 0)

2.1.1.1.2 Klimatologi

Secara geografis, posisi Kota Padang terletak di pesisir pantai barat pulau Sumatera sehingga memiliki suhu dan kelembapan yang cukup tinggi. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, suhu Kota Padang mengalami kenaikan yang cukup tinggi dengan suhu maksimum sebesar 35,90 ℃ dan suhu minimum 22 ℃ di tahun 2020.

Kelembapan maksimum Kota Padang sebesar 100% terjadi di tahun 2020 dan tahun 2022. Sementara itu, Kelembapan minimum sebesar 20% terjadi di tahun 2020. Data lengkap perubahan suhu dan kelembapan Kota Padang dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar II- 2 Suhu Udara dan Kelembapan Kota Padang Tahun 2020 – 2024

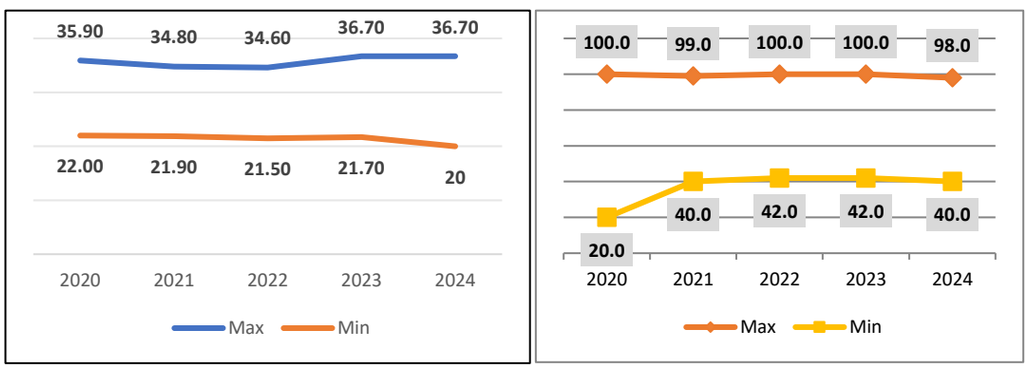

Suhu Udara (°C) Kelembapan (%)

Sumber: Kota Padang Dalam Angka, 2025

Secara rata-rata Kota Padang memiliki normal curah hujan pada kategori menengah dengan curah hujan/harinya sebesar 100-300 mm3. Namun, pada bulan Oktober dan Desember normal curah hujan Kota Padang berada pada kategori sangat tinggi dimana rata-rata curah hujan/hari melebihi 600 mm3 dengan hari hujan pada masing-masing bulan tersebut selama 17 dan 23 hari.

Kota Padang memiliki rata-rata curah hujan yang cukup tinggi sebesar 392,15 mm3 dengan rata-rata jumlah hari hujan sebanyak 21 hari sepanjang tahun 2024. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember dan terendah pada bulan Juli. Hari hujan terbanyak terjadi

pada bulan November, sedangkan hari hujan terkecil terjadi pada bulan Juli. Jumlah curah hujan dan hari hujan selama tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel II- 3 Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Tahun 2024

Bulan	Tahun 2024	
	Curah Hujan (mm^3)	Hari Hujan (hari)
Januari	460.3	18
Februari	306.9	17
Maret	613.5	21
April	445.1	26
Mei	337.6	26
Juni	197.7	19
Juli	138.7	13
Agustus	325.8	22
September	274.2	20
Oktober	620.5	17
November	363.6	27
Desember	621.9	23
Rata-Rata	392.15	20.75

Sumber: Kota Padang Dalam Angka, 2025

2.1.1.1.3 Kondisi Geologi

Kondisi geologi Kota Padang yang menjadi ibukota Provinsi Sumatera Barat berdasarkan peta geologi lembang Padang, Sumatera (Kastowo, Gerhard W.Leo, S.Gafoer & T.C.Amin, 1996), ditutupi oleh batuan dari umur muda ke tua sebagai berikut:

1. Aluvium (Qal): terdiri dari lanau, pasir dan kerikil umumnya terdapat di dataran pantai, termasuk endapan rawa disebelah utara Tiku, sebelah barat daya Lubuk Kalung dan sebelah timur Padang, setempat kadang-kadang terdapat sisa-sisa batu apung tuf.
2. Kipas Aluvium (Qf): kebanyakan terdiri dari hasil rombakan andesit berasal dari gunung api strato, qtau. Permukaannya ditutupi oleh bongkah-bongkah andesit. Kipas-kipas aluvium yang terdapat pada lereng-lereng gunung api kwarter dipetakan sebagai hasil-hasil dari gunung api tersebut.
3. Aliran yang tak teruraikan (QTau): lahar, fanglomerat dan endapan-endapan koluvium yang lain.
4. Andesit dan Tuf (QTia): berselingan dan/atau andesit sebagai inklusi didalam tuf.
5. Tuf Kristal yang telah mengeras (QTi): terdapat dibagian selatan, pejal dan tersemen baik di dekat sungai Buluh berwarna muda dan terdiri dari matriks yang banyak mengandung serabut-serabut gelas dengan fragmen-fragmen kuarsa, plagioklas dan fragmen-fragmen batuan gunung api yang berkomposisi menengah hingga asam dengan garis tengah sampai 10 cm.

Lebih ke selatan berwarna kelabu muda sampai kelabu tua kehijauan yang komposisinya lebih mafik, matriks umumnya klontik dan tuf mengandung fragmen-fragmen batuan berkomposisi menengah sampai mafik disamping kuarsa dan plagioklas, terdapat kontak selaras maupun kontak sesar antara tuf dan andesit dimana sumbertuf tidak diketahui.

6. Batu Gamping Jura (R) : terdiri dari batu gamping kompak putih sampai kelabu kebiruan, pejal dan berongga berumur jura yang dapat dikorelasikan dengan anggota batu gamping formasi siguntur (Jsl) di lembah Painan dan bagian Timur Laut Muara Siberut.

2.1.1.1.4 Jenis Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kota Padang berdasarkan jenisnya dari tahun 2020 sampai tahun 2024 tidak berubah dengan total luas lahan 69.496 Ha. Data BPS menunjukkan dari tahun 2020-2024, terjadi peningkatan penggunaan lahan untuk tanah perumahan dari 7.246,18 menjadi 8.011,58 Ha dan penurunan penggunaan lahan untuk sawah dari 4.868,90 Ha menjadi 3.961,49 Ha. Untuk lebih jelasnya perkembangan penggunaan lahan di Kota Padang dari Tahun 2020 sampai dengan z Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II- 4 Luas Tanah Menurut Jenis Penggunaannya di Kota Padang Tahun 2020 – 2024

No.	Jenis Penggunaan	2020		2021		2022		2023		2024		+/-
		Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	
1	Hutan Lebat	35.448,00	51,01	35.448,00	51,01	35.448,00	51,01	35.448,00	51,01	35.448,00	51,01	0,00
2	Kebun Campuran	13.625,50	19,61	13.625,50	19,61	13.625,50	19,61	13.625,50	19,61	13.625,50	19,61	0,00
3	Perumahan	7.246,18	10,43	7.839,76	11,28	7.882,36	11,34	8.005,06	11,52	8.011,58	11,53	0,18
4	Sawah beririgrasi teknis	4.868,90	7,01	4.133,31	5,95	4.090,71	5,89	3.968,01	5,71	3.961,49	5,70	-0,18
5	Perkebunan Rakyat	2.147,50	3,09	2.147,50	3,09	2.147,50	3,09	2.147,50	3,09	2.147,50	3,09	0,00
6	Semak	1.415,10	2,04	1.415,10	2,04	1.415,10	2,04	1.415,10	2,04	1.415,10	2,04	0,00
7	Kebun Sayuran	1.343,00	1,93	1.343,00	1,93	1.343,00	1,93	1.343,00	1,93	1.343,00	1,93	0,00
8	Ladang	926,51	1,33	939,47	1,35	939,47	1,35	939,47	1,35	939,47	1,35	0,00
9	Jasa	716,31	1,03	756,96	1,09	756,96	1,09	756,96	1,09	756,96	1,09	0,00
10	Industri	702,50	1,01	773,32	1,11	773,32	1,11	773,32	1,11	773,32	1,11	0,00

No.	Jenis Penggunaan	2020		2021		2022		2023		2024		+/-
		Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	
11	Sungai dll	379,45	0,55	387,99	0,56	387,99	0,56	387,99	0,56	387,99	0,56	0,00
12	Perusahaan	262,80	0,38	270,30	0,39	270,30	0,39	270,30	0,39	270,30	0,39	0,00
13	Kolam Ikan	100,80	0,15	100,80	0,15	100,80	0,15	100,80	0,15	100,80	0,15	0,00
14	Jalan Arteri dan Kolektor	135,00	0,19	135,00	0,19	135,00	0,19	135,00	0,19	135,00	0,19	0,00
15	Rawa	120,00	0,17	120,00	0,17	120,00	0,17	120,00	0,17	120,00	0,17	0,00
16	Sawah non irigasi	10,70	0,02	10,70	0,02	10,70	0,02	10,70	0,02	10,70	0,02	0,00
17	Peternakan	27,33	0,04	27,33	0,04	27,33	0,04	27,33	0,04	27,33	0,04	0,00
18	Tanah Kota	16,00	0,02	17,16	0,02	17,16	0,02	17,16	0,02	17,16	0,02	0,00
19	Tanah kosong	2,17	0,00	2,55	0,00	2,55	0,00	2,55	0,00	2,55	0,00	0,00
20	Danau Buatan	2,25	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00	0,00
Jumlah		**69.496,00**	**100,00**	**69.496,00**	**100,00**	**69.496,00**	**100,00**	**69.496,00**	**100,00**	**69.496,00**	**100,00**	

Sumber: Kota Padang Dalam Angka, 2025

2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

Potensi alam yang dimiliki Kota Padang diantaranya di bidang kelautan dan perikanan, pariwisata serta sumber daya alam tambang yakni tambang batu kapur sebagai bahan utama produksi semen. Potensi di bidang kelautan dan perikanan di dukung dengan posisi Kota Padang yang berada di pantai barat pulau Sumatera. Hal ini juga didukung dengan adanya Pelabuhan Teluk Bayur sebagai pintu masuk perdagangan internasional. Sementara itu, potensi sumber daya alam yang menunjang pariwisata alam yakni Pantai Padang, Gunung Padang dan Pantai Air Manis, Sungai Pisang, Pantai Pasir Jambak, dan pulau-pulau kecil, dan Taman Hutan Raya (THR) Bung Hatta dan Geosite Gua Kelelawar Padayo yang berlokasi di Kelurahan Indarung Kecamatan Lubuk Kilangan.

2.1.1.2.1 Wilayah Potensi Perikanan.

Wilayah Pelabuhan Bungus dalam RPJPD akan dikembangkan sebagai Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS), dalam skala pelayanan regional dan internasional. PPS ini akan dikembangkan sebagai pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan rencana pengembangan Kawasan Minapolitan Bungus. PPS Bungus sudah dilengkapi prasarana penunjang. Selain itu, ada juga pelabuhan Muara Anai yang direncanakan untuk pengembangan pelabuhan nelayan, aktivitas penangkapan ikan di sekitar kawasan perairan setempat dengan bobot kapal dibawah 30 DWT.

2.1.1.2.2 Wilayah Potensi Pertanian.

Ruang untuk pengembangan budi daya pertanian kota diarahkan pada lokasi-lokasi yang memiliki saluran-saluran irigasi teknis, antara lain Kecamatan Pauh, Kuranji, Bungus Teluk kabung, dan Koto Tangah. Upaya untuk mempertahankan kawasan pertanian kota tidak hanya dalam rangka ketahanan pangan namun juga sebagai bagian penataan lanskap kota, membatasi terjadinya urbanisasi penduduk atau tidak terjadinya perpindahan mata pencaharian penduduk dari pertanian ke lainnya, sehingga pertanian tetap terjaga antara lahan terbangun dan lahan tidak terbangun. Hutan Lindung dan Hutan Suaka di Kota Padang juga harus dijaga kelestariannya sebagai kawasan penyangga dan pembatas antara kawasan lindung dan kawasan budi daya.

2.1.1.2.3 Wilayah Potensi Pariwisata.

Potensi wisata yang ada meliputi wisata alam, budaya, bahari, belanja, kuliner, sejarah dan wisata konveksi. Pengembangan wisata kuliner, belanja dan konveksi direncanakan terintegrasi dengan kawasan perdagangan dan jasa. Sedangkan wisata alam budaya dan sejarah direncanakan terintegrasi pada wisata kuliner. Rincian kawasan tersebut adalah sebagai berikut:

2.1.1.2.3.1 Kawasan Pariwisata Alam

Pantai Padang, Gunung Padang dan Pantai Air Manis, Sungai Pisang, Pantai Pasir Jambak, dan pulau-pulau kecil, dan Taman Hutan Raya (THR) Bung Hatta.

2.1.1.5.3.2 Kawasan Pariwisata Budaya.

Kawasan kota lama yaitu kawasan Pondok dan kawasan Muaro, permukiman tradisional/adat nagari adat di Kecamatan Bungus, Koto Tangah, Pauh dan Kuranji;

2.1.1.5.3.3 Kawasan Agrowisata.

Kecamatan Koto Tangah, Pauh.

2.1.1.2 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kota Padang 2025 – 2029

Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kota Padang tahun 2025 – 2029 mengacu kepada dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) Kota Padang yang disusun tahun 2021. Jasa ekosistem daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kota Padang terdiri atas 20 jasa ekosistem. Dari Kajian Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Padang Tahun 2021, dapat di ilustrasikan bahwa:

1. Dari 20 jasa ekosistem, rata-rata daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (DDDTLH) Kota Padang memiliki kategori sangat tinggi dan tinggi, kecuali untuk jasa penyediaan pangan, jasa penguraian limbah dan jasa budaya tempat tinggal;
2. Karena ekoregion Kota Padang tidak akan berubah dalam jangka pendek, maka untuk mempertahankan DDDTLH jasa ekosistem tersebut, diperlukan upaya untuk menjaga tutupan lahan eksisting terutama hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, sawah irigasi, perkebunan campuran dan permukiman. Perencanaan pembangunan dapat direncanakan pada tutupan lahan selain tutupan lahan tersebut.
3. Perencanaan pembangunan pada kecamatan dengan jasa ekosistem kategori sangat tinggi dan tinggi diantaranya adalah Kecamatan Koto Tangah, Pauh, Lubuk Kilangan, Bungus Teluk Kabung dan Kuranji, perlu diperhatikan agar tidak menghilangkan jasa ekosistem pada kecamatan-kecamatan tersebut.

Berikut adalah daya dukung daya tampung menurut Kecamatan terhadap 20 jasa ekosistem tersebut

2.1.1.2.4 Daya Dukung dan Daya Tampung Air

Analisis daya dukung dan daya tampung air dilakukan pada wilayah Kota Padang. Hasilnya menunjukkan status D3T Air wilayah Kota Padang masih mempunyai cadangan air dan masih sekitar 92% dari luas wilayah Kota Padang yang termasuk dalam kategori belum

terlampaui. Sedangkan, untuk kategori terlampaui ada sekitar 8% dari total luas Kota Padang, yaitu disekitar Kecamatan Kuranji, dan Kecamatan Nanggalo. Status D3T Air wilayah Kota Padang masih mempunyai cadangan air dan masih sekitar 92% dari luas wilayah Kota Padang yang termasuk dalam kategori belum terlampaui. Sedangkan, untuk kategori terlampaui ada sekitar 8% dari total luas Kota Padang, yaitu disekitar Kecamatan Kuranji, dan Kecamatan Nanggalo.

Gambar II- 3 a. Daya Dukung dan Daya Tampung Air Kota Padang; b. Daya Dukung dan Daya Tampung Air Kota Padang menurut Kecamatan

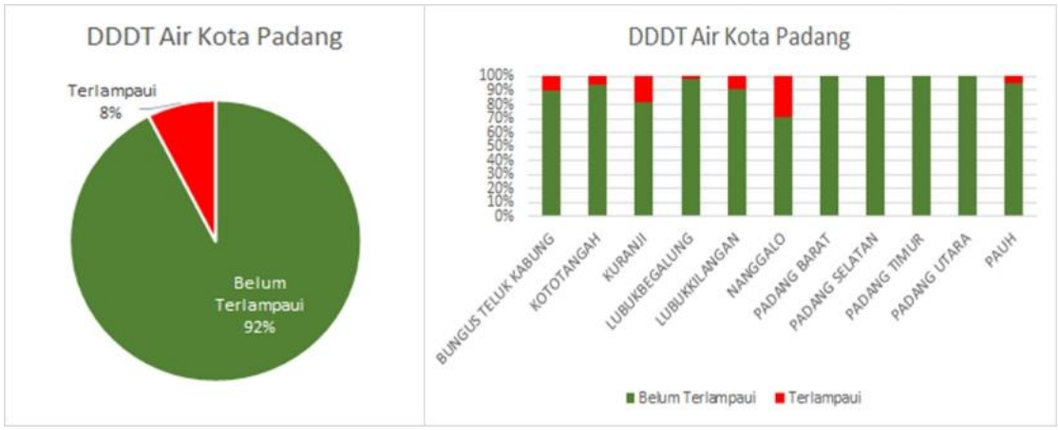

a b

Sumber: KLHS RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029

Perhitungan D3T Air Kota Padang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II- 5 Perhitungan D3T Air Kota Padang (m^3/dtk)

Kecamatan	Ketersediaan Air	Kebutuhan Air			Status DDDT	
		Domestik	Lahan	Total	Belum Terlampaui	Terlampaui
Bungus Teluk Kabung	194928019,5	7241702,4	32117893,19	39359595,59	8157,716615	920,9594629
Koto Tangah	307279589,8	23639040	62255236,47	85894276,47	20983,66048	1272,633701
Kuranji	103655451,5	14892768	40676982,51	55569750,51	5282,089663	1183,570349
Lubuk Begalung	49194664,02	10104652,8	5736328,236	15840981,04	2740,988422	44,91055653
Lubuk Kilangan	131296645,1	8431257,6	29750205,18	38181462,78	7599,266307	784,7866667
Nanggalo	22804352,37	6858259,2	10836352,99	17694612,19	676,0098679	278,2748941
Padang Barat	8722358,631	4687027,2	11350,96599	4698378,166	542,129217	0
Padang Selatan	31278469,15	6200668,8	618774,7414	6819443,541	1362,617373	0,015488158
Padang Timur	19274298,71	7267708,8	329979,4131	7597688,213	918,5275466	0
Padang Utara	16617084,24	7698412,8	110315,6895	7808728,49	847,0707308	0
Pauh	241819844,4	11540361,6	31270775,96	42811137,56	15172,29692	793,9257906
Grand Total	1126870777	108561859,2	213714195,3	322276054,5	64282,37314	5279,076909

Sumber: KLHS RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029

2.1.1.2.5 Jasa Ekosistem Penyediaan

Jasa ekosistem penyediaan adalah barang yang dihasilkan oleh ekosistem dan dimanfaatkan secara langsung oleh manusia. Daya dukung Kota Padang untuk jasa penyediaan berdasarkan rata-rata persentase luas dari kelima jasa penyediaan masih cukup tinggi untuk kategori sangat tinggi dan tinggi yaitu dengan nilai 54,08%, seperti terlihat pada Tabel 2-6. Daya dukung jasa penyediaan pangan untuk Kota Padang dengan kategori sangat tinggi dan tinggi, relatif rendah yaitu hanya 9,95%.

Tabel II- 6 Ringkasan Daya Dukung Kota Padang dalam Jasa Penyediaan

No	Nama Jasa Penyediaan	Persentase Luas DDDTLH		
		Sangat Tinggi dan Tinggi	Sedang	Rendah dan Sangat Rendah
1	Pangan	9,95%	11,88%	78,17%
2	Air Bersih	59,88%	13,38%	26,73%
3	Serat	65,08%	10,99%	23,92%
4	Bahan Bakar	61,93%	17,94%	20,13%
5	Sumber Daya Genetik	73,54%	9,52%	16,94%
Rata-rata		54,08%	12,74%	33,18%

Sumber: KLHS RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029

Daya dukung jasa penyediaan air bersih, serat, bahan bakar, kayu dan fosil serta sumber daya genetik relatif sangat tinggi dan tinggi. Daerah dengan daya dukung jasa-jasa tersebut yang relatif tinggi adalah Kecamatan Koto Tangah, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kecamatan Bungus, dan Kecamatan Pauh.

Hal tersebut dipengaruhi oleh ekoregion dan tutupan lahan yang mendukung jasa penyediaan tersebut. Dalam jasa penyediaan, ekoregion yang berpengaruh untuk kategori sangat tinggi dan tinggi diantarnya adalah dataran fluvio gunung api, dataran fluvio marin dan pegunungan patahan. Sedangkan tutupan lahan yang berpengaruh antara lain adalah hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, perkebunan campuran dan sawah irigasi. Rincian dan persentase untuk setiap jasa penyediaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II- 7 Ekoregion yang Mempengaruhi Kategori Sangat Tinggi dan Tinggi pada Daya Dukung Jasa Penyediaan

No	Nama Jasa Penyediaan	Kategori Sangat Tinggi dan Tinggi		Persentase Ekoregion Terbesar (dari Total Luas Kategori Sangat Tinggi dan Tinggi)		
		Luas (Ha)	Persentase	Dataran Fluvio Gunung Api	Dataran Fluvio Marin	Pegunungan Patahan
1	Pangan	6889,11	9,95%	42,46%	30,94%	3,43%
2	Air Bersih	41458,82	59,88%	9,44%	2,66%	83,70%
3	Serat	45061,36	65,08%	1,51%	3,18%	86,87%
4	Bahan Bakar	42875,88	61,93%	3,31%	3,64%	87,81%
5	Sumber Daya Genetik	50919,05	73,54%	3,70%	2,51%	84,51%

Sumber: KLHS RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029

Tabel II- 8 Tutupan Lahan yang Mempengaruhi Kategori Sangat Tinggi dan Tinggi pada Daya Dukung Jasa Penyediaan

No	Nama Jasa Penyediaan	Kategori Sangat Tinggi dan Tinggi		Persentase Tutupan Lahan Terbesar (dari Total Luas Kategori Sangat Tinggi dan Tinggi)			
		Luas (Ha)	Persentase	Sawah Irigasi	Perkebunan Campuran	Hutan Lahan Kering Sekunder	Hutan Lahan Kering Primer
1	Pangan	6889,11	9,95%	79,30%	16,07%	-	0,19%
2	Air Bersih	41458,82	59,88%	5,70%	2,67%	1,25%	86,04%
3	Serat	45061,36	65,08%	0,64%	11,06%	5,00%	79,17%
4	Bahan Bakar	42875,88	61,93%	-	10,13%	4,29%	83,20%
5	Sumber Daya Genetik	50919,05	73,54%	-	7,70%	4,42%	70,06%

Sumber: KLHS RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029

a. Jasa Penyediaan Pangan

Jasa penyediaan pangan adalah jasa ekosistem dalam menghasilkan barang yang dapat digunakan untuk pangan, baik dikonsumsi langsung maupun menjadi bahan baku bagi produksi pangan. Jenis-jenis pangan di Indonesia sangat bervariasi diantaranya seperti beras, jagung, ketela, gandum, sagu, segala macam buah, ikan, daging, telur

dan sebagainya. Penyediaan pangan oleh ekosistem dapat berasal dari hasil pertanian dan perkebunan, hasil pangan peternakan, hasil laut dan termasuk pangan dari hutan.

Gambar II- 4 a. Daya Dukung Jasa Penyediaan Pangan Kota Padang; b. Daya Dukung Jasa Penyediaan Pangan Kota Padang menurut Kecamatan

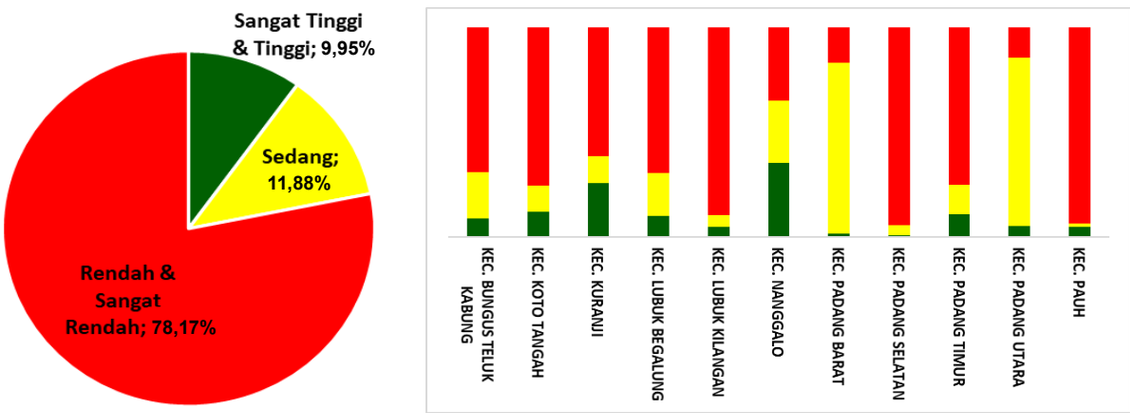

a b

Sumber: KLHS RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029

Luasan lahan yang mendukung jasa penyediaan pangan di Kota Padang hanya sebagian kecil yang masuk kategori sangat tinggi dan tinggi, sebagaimana yang terlihat pada Gambar 2-4, hanya 9,95 % luasan lahan di Kota Padang yang memberikan daya dukung yang tinggi pada jasa penyediaan pangan. Sementara itu, sebagian besar dari luasan lahan Kota Padang tersebut, sekitar 78,17%, memberikan daya dukung yang masuk kategori sangat rendah dan rendah pada jasa penyediaan pangan. Sisanya, sebesar 11,88%, adalah masuk kategori sedang. Daya dukung jasa penyediaan pangan yang masuk kategori sangat tinggi dan tinggi tersebar di beberapa Kecamatan di Kota Padang. Sebagian besar berada di Kecamatan Koto Tangah dengan luas 2.750,96 Ha atau 39,93% dari kategori yang sama. Kemudian di Kecamatan Kuranji dengan luas 1.388,33 Ha atau 20,15% dan Kecamatan Pauh dengan luas 833,45 Ha atau 12,10%.

b. Jasa Penyediaan Air Bersih

Air bersih merupakan kebutuhan dasar manusia, sehingga ketersediaannya menjadi penting dalam mendukung aktivitas manusia di suatu wilayah. Secara alami, air bersih dapat berasal dari air permukaan, seperti: sungai dan danau maupun berasal dari air tanah. Air bersih erat kaitannya dengan ketersediaan catchment area dan recharge area di suatu wilayah. Ketersediaannya akan menjaga stabilitas pasokan air baik air permukaan dan bawah permukaan.

Luasan lahan yang mendukung jasa penyediaan air bersih di Kota Padang secara umum dikategorikan tinggi dan sangat tinggi. Kategori rendah dan sangat rendah untuk jasa penyediaan air bersih di Kota Padang memiliki luasan 18.509,81 Ha atau setara dengan 26,73% dari luasan Kota Padang. Sedangkan untuk kategori tinggi dan sangat

tinggi pada daya dukung jasa penyediaan air bersih sebesar 41.458,82 Ha (59,88%) dan kategori sedang memiliki luasan 9.267,21 Ha atau setara dengan 13,38% dari luasan Kota Padang.

Gambar II- 5 a. Daya Dukung Jasa Penyediaan Air Bersih Kota Padang; b. Daya Dukung Jasa Penyediaan Air Bersih Kota Padang menurut Kecamatan

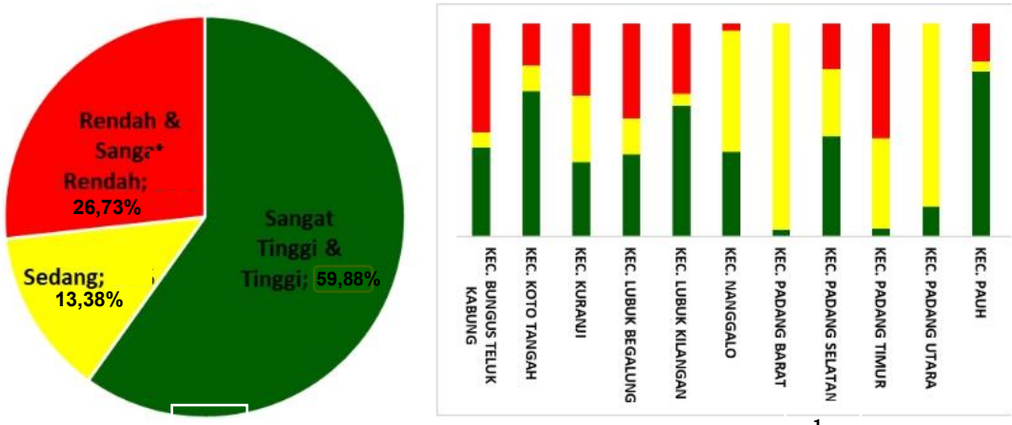

a b

Sumber: KLHS RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029

Jasa penyediaan air bersih yang masuk kategori sangat tinggi dan tinggi sebagian berada 2 Kecamatan, hal ini dapat dilihat pada gambar diatas. Kedua wilayah tersebut adalah Kecamatan Koto Tangah dengan luasan 15.804,65 Ha atau 38,12% dan Kecamatan Pauh dengan luasan 12.872,74 Ha atau 31,05%. Sebagian besar wilayah tersebut memiliki tutupan lahan berupa hutan lahan kering primer dan pegunungan patahan.

Daya dukung jasa penyediaan air bersih pada kategori sedang tersebar hampir pada seluruh Kecamatan di Kota Padang, diantaranya di Kecamatan Padang Utara, Kecamatan Nanggalo dan Kecamatan Padang Barat

Sekitar 18.509,81 Ha luas wilayah Kota Padang memiliki daya dukung jasa penyediaan air bersih dengan kategori rendah dan sangat rendah. Kecamatan dengan kategori rendah dan sangat rendah luasan terbesar, terdapat di Kecamatan Koto Tangah dengan luasan 4.598,89 Ha dan Kecamatan Bungus Teluk Kabung dengan luas 4.196,35 Ha.

c. Jasa Penyediaan Serat (Fiber)

Serat adalah hasil alam penting untuk pemenuhan kebutuhan manusia, serat antara lain berupa kayu, biomassa, termasuk bahan bakar dan bahan dasar lainnya untuk berbagai keperluan. Serat alami dapat digolongkan ke dalam (1) serat tumbuhan/serat pangan, (2) serat kayu, (3) serat hewan, dan (4) serat mineral, seperti logam dan karbon. Serat dapat diperoleh dari hasil hutan, hasil laut, hasil pertanian dan perkebunan untuk material. Penghasil utama serat adalah tutupan hutan tanaman.

Daya dukung penyediaan serat tergolong kategori sangat tinggi dan tinggi dominan di Kota Padang, yaitu dengan luas 45.061,36 Ha atau 65,08% dari luas Kota Padang. Kategori sedang mempunyai luas 7.611,24 Ha atau 10,99% dan kategori rendah dan sangat rendah adalah 16.563,25 Ha atau 23,92%, seperti terlihat pada berikut:

Gambar II- 6 a. Daya Dukung Jasa Penyediaan Serat (Fiber) Kota Padang ; b. Daya Dukung Jasa Penyediaan Serat (Fiber) Kota Padang menurut Kecamatan

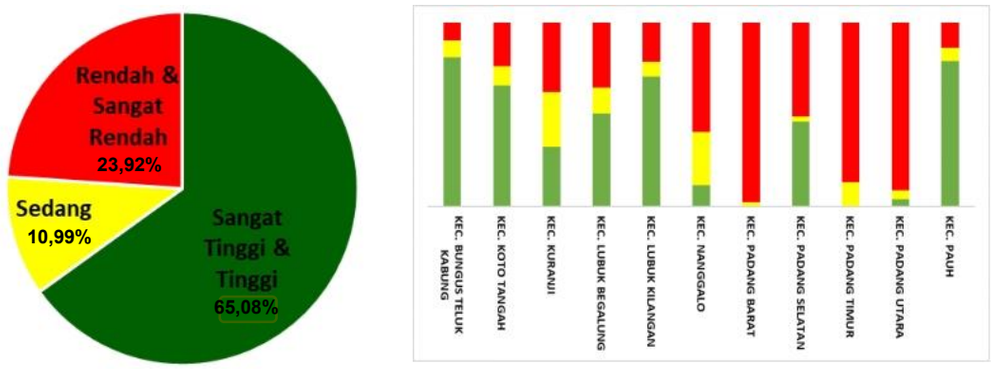

a. **b.**

Sumber: KLHS RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029

d. Jasa Penyediaan Bahan Bakar, Kayu dan Fosil

Bahan bakar berupa biomassa, kayu, dan fosil adalah barang penting yang disediakan alam untuk berbagai kebutuhan baik domestik maupun komersial. Meskipun akhir-akhir ini pemakaian biomasa untuk bahan bakar ditentang karena melepaskan emisi karbon dari proses pembakaran, akan tetapi sumber energi alternatif belum menjangkau semua lapisan masyarakat. Daya dukung ekosistem jasa penyediaan bahan bakar, kayu dan fosil di Kota Padang tergolong sangat tinggi dan tinggi. Luas kategori tersebut mencapai 42875,87 Ha atau 61,93% yang tersebar hampir di seluruh Kecamatan di Kota Padang seperti terlihat pada gambar berikut:

Gambar II- 7 a. Daya Dukung Jasa Penyediaan Bahan Bakar, Kayu dan Fosil Kota Padang; b. Daya Dukung Jasa Penyediaan Bahan Bakar, Kayu dan Fosil Sangat Tinggi dan Tinggi Kota Padang menurut Kecamatan

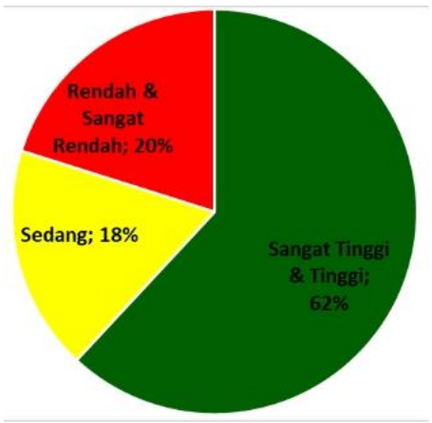

a.

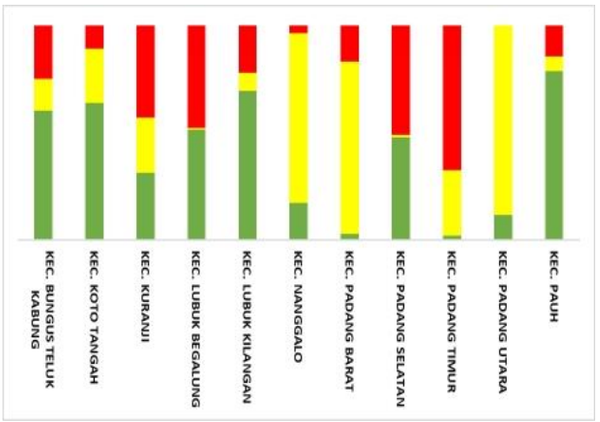

b.

Sumber: KLHS RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029

e. Jasa Penyediaan Sumber Daya Genetik

Sumber daya genetik adalah adalah salah satu jasa ekosistem yang penting. Sumber daya ini digolongkan ke dalam jasa penyediaan, karena sumber daya genetik adalah sumber daya yang memberikan peluang untuk berkembangnya spesies. Kombinasi genetik yang terdapat pada suatu tumbuhan misalnya adalah hasil persilangan dan penggabungan dari bermacam-macam sumber daya genetik.

Jasa penyediaan dalam hal ini tidak hanya dilihat sebagai potensi ekonomi tetapi juga penyediaan sebagai penjaga stabilitas ekosistem dan keberlanjutan fungsi ekosistem. Ketika ekosistem mengalami perubahan sehingga jenis tumbuhan tertentu yang berkembang dalam ekosistem akan mengalami tekanan dan mungkin akan punah. Padi sebagai salah satu tumbuhan pangan penting dapat saja tidak lagi tumbuh dengan baik pada ekosistem aslinya karena ekosistem tersebut telah berubah. Namun jika pada ekosistem tersebut ada tumbuhan yang secara genetik mirip dan berkerabat dengan padi masih dapat tumbuh, maka tumbuhan kerabat padi inilah yang akan menjadi pengganti sumber pangan baru. Kota Padang memiliki daya dukung jasa penyediaan sumber daya genetik yang sangat tinggi dengan luasan mencapai 50.919,05 Ha atau 73,54%. Sisanya adalah yang tergolong sedang dengan luas 6.590,88 Ha atau 9,52% dan rendah serta sangat rendah dengan luas 11.725,91Ha atau 16,94%.

Gambar II- 8 a. Daya Dukung Jasa Penyediaan Sumber Daya Genetik Kota Padang; b. Daya Dukung Jasa Penyediaan Sumber Daya Genetik Kota Padang Menurut Kecamatan

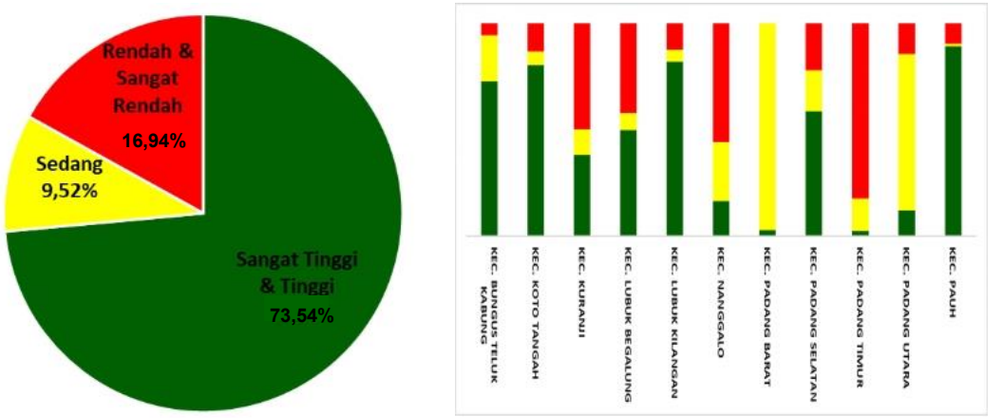

a. **b.**

Sumber: KLHS RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029

2.1.1.2.6 Jasa Ekosistem Pengaturan

Jasa ekosistem pengaturan adalah manfaat yang diperoleh manusia dari ekosistem melalui pengaturan yang dilakukan oleh ekosistem. Siklus kehidupan dalam ekosistem menghasilkan barang dan jasa yang dapat dimanfaatkan manusia. Daya tampung jasa pengaturan Kota Padang untuk semua jenis jasa (8 jasa) memiliki persentase untuk kategori sangat tinggi dan tinggi dominan. Rata-rata persentase kategori sangat tinggi dan tinggi jasa pengaturan Kota Padang adalah 60,27%, seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel II- 9 Ringkasan Daya Tampung Kota Padang dalam Jasa Pengaturan

No	Nama Jasa Pengaturan	Persentase Luas DDDTLH		
		Sangat Tinggi dan Tinggi	Sedang	Rendah dan Sangat Rendah
1	Iklim	62,19%	14,56%	23,24%
2	Tata Aliran Air dan Banjir	74,08%	25,02%	25,02%
3	Perlindungan Bencana	69,64%	10,53%	19,83%
4	Pemurnian Air	59,12%	15,09%	25,79%
5	Penguraian Limbah	18,04%	8,89%	73,06%
6	Kualitas Udara	71,24%	5,52%	23,24%
7	Penyerbukan Alami	76,40%	10,73%	12,87%
8	Pengendaliaan Hama	70,69%	8,36%	20,94%

No	Nama Jasa Pengaturan	Persentase Luas DDDTLH		
		Sangat Tinggi dan Tinggi	Sedang	Rendah dan Sangat Rendah
Rata-rata		60,27%	11,73%	28,00%

Sumber: KLHS RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029

Ekoregion yang mempengaruhi kategori sangat tinggi dan tinggi dalam jasa pengaturan adalah pegunungan patahan, seperti terlihat pada Tabel 2.10. Sedangkan tutupan lahan yang mempengaruhi secara umum adalah hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, perkebunan campuran dan sawah irigasi seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel II- 10 Ekoregion yang Mempengaruhi Kategori Sangat Tinggi dan Tinggi pada Daya Tampung Kota Padang dalam Jasa Pengaturan

No	Nama Jasa Pengaturan	Kategori Sangat Tinggi dan Tinggi		Persentase Ekoregion Terbesar (dari Total Luas Kategori Sangat Tinggi dan Tinggi)		
		Luas (Ha)	Persentase	Pegunungan Patahan	Dataran Fluvio Gunung Api	Dataran Fluvio Marin
1	Iklim	43059,92	62,19%	88,00%	1,61%	3,35%
2	Tata Aliran Air dan Banjir	51913,93	54,85%	75,40%	6,47%	8,03%
3	Perlindungan Bencana	48216,52	69,64%	87,14%	0,37%	2,14%
4	Pemurnian Air	40930,09	59,12%	84,84%	8,44%	0,80%
5	Penguraian Limbah	12491,16	18,04%	-	65,73%	23,80%
6	Kualitas Udara	49321,62	71,24%	88,31%	1,76%	3,16%
7	Penyerbukan Alami	52893,38	76,40%	81,32%	3,23%	4,35%
8	Pengendaliaan Hama	48945,87	70,69%	85,38%	2,56%	3,58%

Sumber: KLHS RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029

Tabel II- 11 Tutupan Lahan yang Mempengaruhi Kategori Sangat Tinggi dan Tinggi pada Daya Tampung Kota Padang dalam Jasa Pengaturan

No	Nama Jasa Pengaturan	Kategori Sangat Tinggi dan Tinggi		Persentase Tutupan Lahan Terbesar (dari Total Luas Kategori Sangat Tinggi dan Tinggi)			
		Luas (Ha)	Persentase	Sawah Irigasi	Perkebunan Campuran	Hutan Lahan Kering Sekunder	Hutan Lahan Kering Primer
1	Iklim	43059,92	62,19%	-	11,57%	5,23%	82,84%
2	Tata Aliran Air dan Banjir	51913,93	54,85%	9,40%	9,60%	4,34%	68,72%
3	Perlindungan Bencana	48216,52	69,64%	2,36%	7,56%	4,67%	73,98%
4	Pemurnian Air	40930,09	59,12%	5,49%	2,76%	0,44%	87,16%
5	Penguraian Limbah	12491,16	18,04%	34,65%	7,84%	5,46%	1,80%
6	Kualitas Udara	49321,62	71,24%	0,38%	10,10%	4,57%	72,33%
7	Penyerbukan Alami	52893,38	76,40%	-	9,42%	4,26%	67,44%
8	Pengendalian Hama	48945,87	70,69%	0,03%	10,18%	4,60%	72,88%

Sumber: KLHS RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029

a. Jasa Pengaturan Iklim

Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang untuk suatu lokasi di bumi atau planet lain. Penentuan tipe suatu iklim dilakukan berdasarkan sintesis kejadian cuaca selama kurun waktu yang panjang. Ekosistem mampu memberikan jasa berupa pengaturan iklim mikro secara alamiah, seperti pengaturan suhu, kelembaban dan hujan, angin, pengendalian gas rumah kaca, dan penyerapan karbon.

Fungsi pengaturan iklim dipengaruhi oleh keberadaan faktor biotik khususnya vegetasi, serta letak dan faktor fisiografis seperti ketinggian tempat dan bentuk lahan. Kawasan dengan kepadatan vegetasi yang rapat dan letak ketinggian yang besar seperti pegunungan akan memiliki sistem pengaturan iklim yang lebih baik yang bermanfaat langsung pada pengurangan emisi karbon dioksida dan efek rumah kaca serta menurunkan dampak pemanasan global seperti peningkatan permukaan laut dan perubahan iklim ekstrim dan gelombang panas.

Ekosistem Kota Padang mampu memberikan jasa pengaturan iklim dengan kategori tinggi dan sangat tinggi seluas 43.059,92 Ha atau 62,19% dari luas kategori yang sama. Luas wilayah dengan sedang adalah seluas 10.083,18 Ha atau 14,56% dan kategori rendah seluas 16.092,75 Ha atau 23,24 % seperti terlihat pada gambar berikut:

Gambar II- 9 a. Daya Dukung Jasa Pengaturan Iklim Kota Padang; b. Daya Dukung Jasa Pengaturan Iklim Sangat Tinggi dan Tinggi Kota Padang menurut Kecamatan

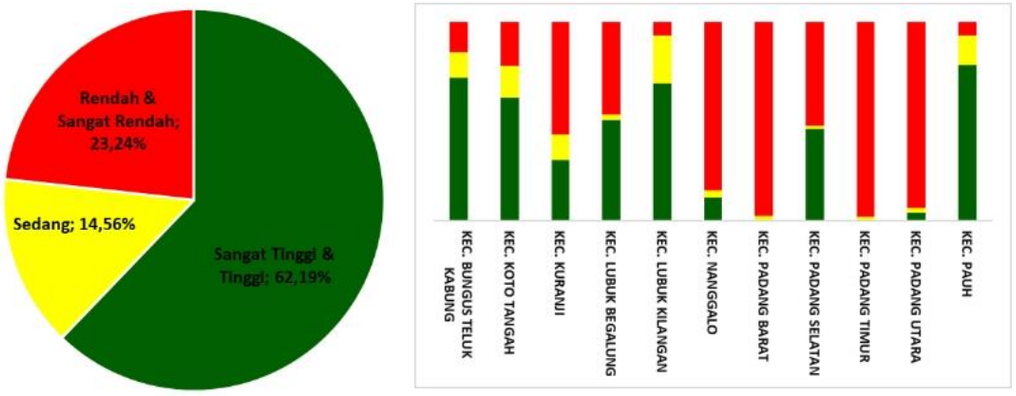

a. b.

Sumber: KLHS RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029

b. Jasa Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir

Secara umum jasa pengaturan tata aliran air dan banjir Kota Padang berada pada kategori sangat tinggi dan tinggi. Luasan lahan untuk tersebut adalah sekitar 51.913,93 Ha (74,98%). Kategori sedang memiliki luas 17.321,92 Ha (25,02%) dan kategori rendah dan sangat rendah 0 Ha. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar II- 10 a. Daya Dukung Daya Tampung Jasa Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir Kota Padang; b. Daya Dukung Daya Tampung Jasa Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir Kota Padang menurut Kecamatan

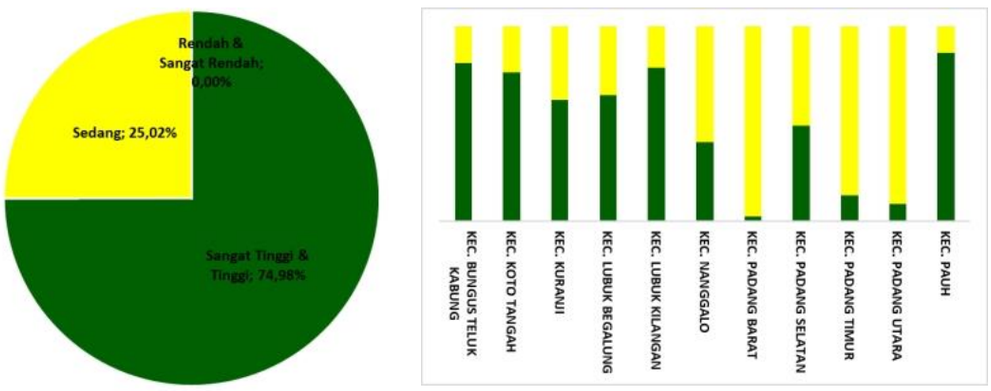

a. b.

Sumber: KLHS RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029

c. Jasa Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana

Secara umum Kota Padang berada pada kategori sangat tinggi dan tinggi dalam hal jasa pengaturan ini. Kota Padang memiliki kategori sangat tinggi dan tinggi sebesar 69,64% dari luasan Kota Padang sedangkan kategori sedang 10,53% dan kategori rendah 19,83%.

Gambar II- 11 a. Daya Dukung Daya Tampung Jasa Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Kota Padang; b. Daya Tampung Daya Dukung Jasa Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Kota Padang menurut Kecamatan

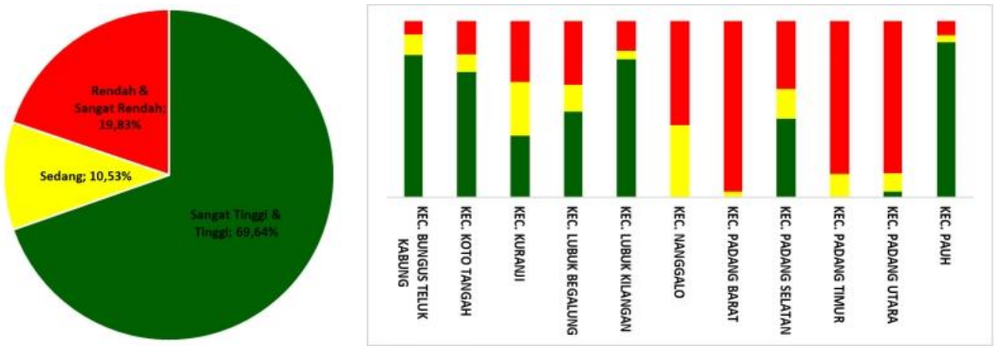

a. **b.**

Sumber: KLHS RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029

d. Jasa Pengaturan Pemurnian Air

Secara umum Kota Padang berada pada kategori sangat tinggi dan tinggi dalam hal jasa pengaturan ini. Kota Padang memiliki kategori sangat tinggi dan tinggi sebesar 59,12% dari luasan Kota Padang sedangkan kategori sedang 15,09% dan kategori rendah 25,79%.

Gambar II- 12 a. Daya Dukung Daya Tampung Jasa Pengaturan Pemurnian Air Kota Padang; b. Daya Tampung Daya Dukung Jasa Pengaturan Pemurnian Air Kota Padang menurut Kecamatan

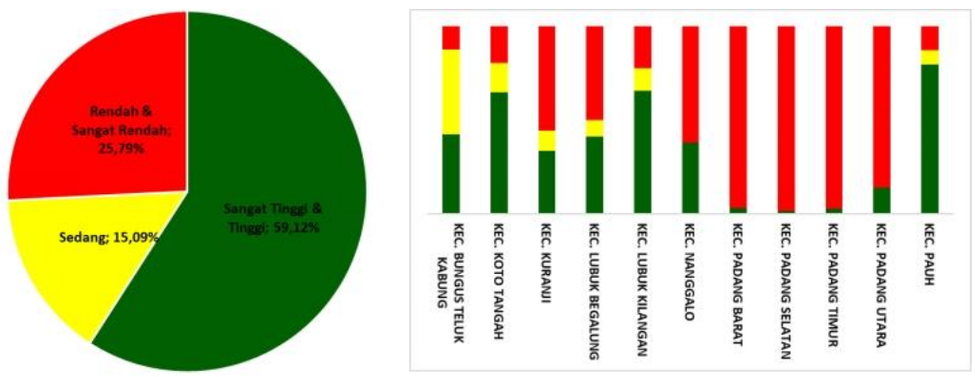

a. **b.**

Sumber: KLHS RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029

e. Jasa Pengaturan Penguraian Limbah

Secara umum Kota Padang berada pada kategori rendah dan sangat rendah dalam hal jasa pengaturan ini. Kota Padang memiliki kategori sangat tinggi dan tinggi sebesar 18,04% dari luasan Kota Padang sedangkan kategori sedang 8,89% dan kategori rendah dan sangat rendah 73,06%.

Gambar II- 13 a. Daya Dukung Daya Tampung Jasa Pengaturan Penguraian Limbah Kota Padang; b. Daya Tampung Daya Dukung Jasa Pengaturan Penguraian Limbah Kota Padang menurut Kecamatan

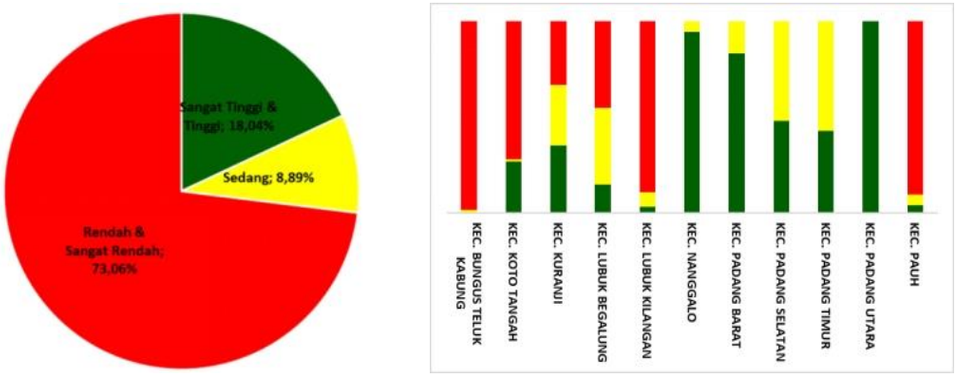

a. **b.**

Sumber: KLHS RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029

f. Jasa Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara

Daya dukung jasa pengaturan pemeliharaan kualitas udara Kota Padang berada pada kategori sangat tinggi dan tinggi yang tersebar di seluruh Kecamatan di Kota Padang. Untuk kategori tinggi dan sangat tinggi seluas 50.156,73 Ha (71,24%), sedangkan kategori sedang seluas 2.259,92 Ha (5,52%). Pada tingkat rendah dan sangat rendah seluas 17.101,04 Ha (23,24%%). Jasa ini dipengaruhi oleh ekoregion pegunungan patahan serta tutupan lahan hutan lahan kering primer dan hutan lahan kering sekunder.

Gambar II- 14 a. Daya Dukung Daya Tampung Jasa Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara Kota Padang; b. Daya Dukung Daya Tampung Jasa Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara Kota Padang menurut Kecamatan

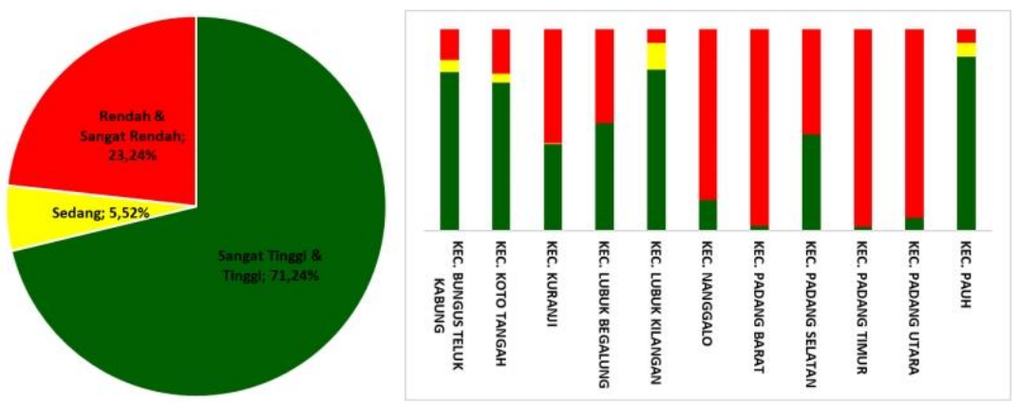

a. **b.**

Sumber: KLHS RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029

g. Jasa Pengaturan Penyerbukan Alami (Pollination)

Hutan dan areal yang bervegetasi umumnya menjadi penyedia habitat spesies. Kota Padang yang memiliki kawasan hutan yang cukup luas tentu saja menyediakan jasa penyerbukan alami ini. Daya tampung jasa pengaturan penyerbukan alami dengan kategori sangat tinggi dan tinggi di Kota Padang, dengan luas 52.893,38 atau 76,40%, kategori sedang dengan luas 7.431,37 Ha atau 10,73% dan kategori rendah dan sangat rendah dengan luas 8.911,09 Ha atau 12,87%. Jasa ini dipengaruhi oleh ekoregion pegunungan patahan serta tutupan lahan hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder dan perkebunan campuran.

Kecamatan dengan luas kategori sangat tinggi dan tinggi terluas berada pada Kecamatan Koto Tangah dengan luas sebesar 18.429,17 Ha atau 34,84%. Selanjutnya, Kecamatan Pauh dengan luas 14.916,30 Ha (28,20%). Untuk kategori rendah dan sangat rendah terluas berada pada Kecamatan Kuranji dengan luas 1962,42 Ha atau 22,02%.

Gambar II- 15 a. Daya Dukung Daya Tampung Jasa Pengaturan Penyerbukan Alami (Pollination) Kota Padang; b. Daya Dukung Daya Tampung Jasa Pengaturan Penyerbukan Alami (Pollination) Menurut Kecamatan

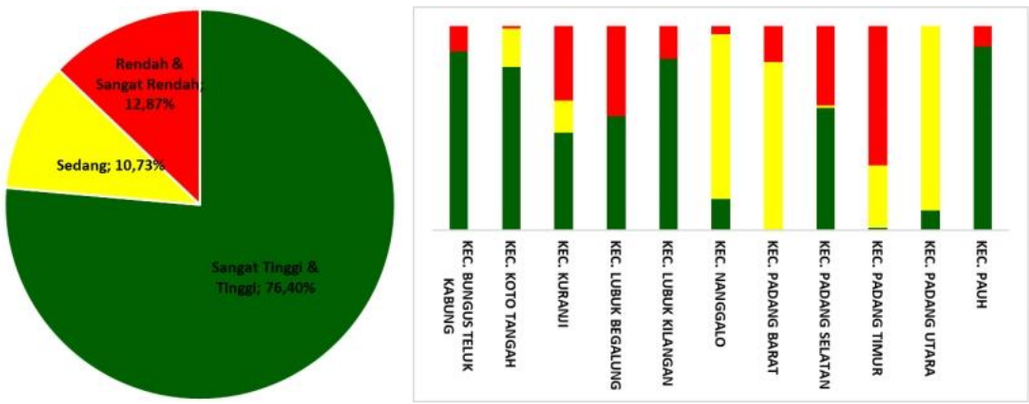

a. **b.**

Sumber: KLHS RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029

h. Jasa Pengaturan Pengendalian Hama dan Penyakit

Daya dukung daya tampung jasa pengaturan pengendalian hama dan penyakit Kota Padang umumnya berada pada kategori tinggi dan sangat tinggi dengan persentase mencapai 70,69%. Sedangkan pada kategori sedang seluas 5.790,96 Ha (8,36%). Kategori rendah dan sangat rendah seluas 14.499,02 Ha (20,94 %).

Hampir semua Kecamatan mempunyai jasa pengendalian hama dengan kategori sangat tinggi dan tinggi. Diantaranya adalah Kecamatan Koto Tangah dengan luas 16.933,20 Ha atau 34,60% dan Kecamatan Pauh dengan luas 14.452,47 Ha atau 29,53%. Kecamatan dengan kategori sedang terluas juga berada pada Kecamatan Koto

Tangah dengan luas 2.253,72 Ha atau 38,92%. Pada seluruh area kecamatan Padang Timur memiliki jasa pengaturan pengendalian hama dan penyakit yang rendah, sekitar 862,80 Ha. Sedangkan kecamatan dengan kategori rendah dan sangat rendah terluas adalah Kecamatan Koto Tangah dengan luas 3.933,83 Ha atau 27,13%. Kemudian Kecamatan Kuranji dengan luas 3.026,48 Ha atau 20,87%.

Gambar II- 16 a. Daya Dukung Daya Tampung Jasa Pengaturan Pengendalian Hama dan Penyakit Kota Padang; b. Daya Dukung Jasa Pengaturan Pengendalian Hama dan Penyakit Kota Padang Menurut Kecamatan

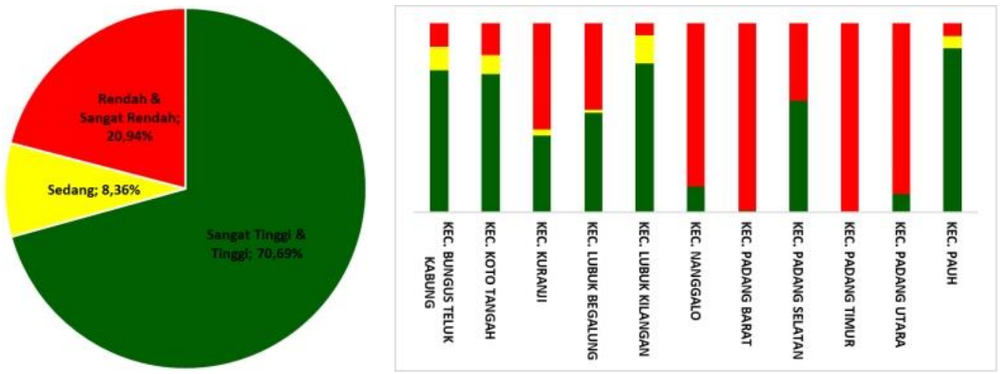

a. **b.**

Sumber: KLHS RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029

2.1.1.2.7 Jasa Ekosistem Budaya

Jasa ekosistem budaya adalah jasa yang dihasilkan oleh lingkungan hidup yang dapat mendukung manusia dalam menopang kehidupan sosial dan budaya. Jasa ini berupa jasa non-material melalui pengayaan budaya, perkembangan kognitif, refleksi, rekreasi dan estetika. Lingkungan hidup memiliki daya dukung bagi manusia dalam memanfaatkan jasa ekosistem bagi tujuan sosial budaya tersebut, dan pada saat yang bersamaan juga menyerap limbah dari kegiatan sosial dan budaya tersebut.

Secara umum rata-rata persentase jasa budaya dengan kategori sangat tinggi dan tinggi adalah 50,98%. Hanya jasa budaya tempat tinggal yang mempunyai persentase kategori rendah dan sangat rendah yang cukup tinggi yaitu 76,41%, seperti terlihat pada Tabel berikut:

Tabel II- 12 Ringkasan Daya Dukung dan Daya Tampung Kota Padang dalam Jasa Budaya

No	Nama Jasa Budaya	Persentase Luas DDDTLH		
		Sangat Tinggi dan Tinggi	Sedang	Rendah dan Sangat Rendah
1	Tempat Tinggal	21,33%	2,26%	76,41%

No	Nama Jasa Budaya	Persentase Luas DDDTLH		
		Sangat Tinggi dan Tinggi	Sedang	Rendah dan Sangat Rendah
2	Rekreasi	65,13%	13,77%	21,09%
3	Estetika (Alam)	66,46%	8,53%	25,01%
Rata-rata		50,98%	8,19%	40,84%

Sumber: KLHS RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029

Secara umum, ekoregion yang mempengaruhi jasa budaya adalah dataran fluvio gunung api, dataran fluvio marin, dataran aluvial dan pegunungan patahan. Sementara itu, tutupan lahan yang mempengaruhi adalah permukiman, sawah irigasi, hutan lahan kering primer dan hutan lahan kering sekunder

Tabel II- 13 Ekoregion yang Mempengaruhi Kategori Sangat Tinggi dan Tinggi pada Daya Dukung Jasa Budaya

No	Nama Jasa Budaya	Kategori Sangat Tinggi dan Tinggi		Persentase Ekoregion Terbesar (dari Total Luas Kategori Sangat Tinggi dan Tinggi)			
		Luas (Ha)	Persentase	Dataran Fluvio Gunung Api	Dataran Fluvio Marin	Dataran aluvial	Pegunungan Patahan
1	Tempat Tinggal	14766,79	21,33%	56,13%	25,63%	9,69%	1,02%
2	Rekreasi	45096,64	65,13%	0,44%	0,72%	0,08%	96,77%
3	Estetika (Alam)	46016,07	66,46%	0,41%	0,71%	0,07%	94,84%

Sumber: KLHS RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029

Tabel II- 14 Tutupan Lahan yang Mempengaruhi Kategori Sangat Tinggi dan Tinggi pada Daya Tampung Kota Padang dalam Jasa Pengaturan

No	Nama Jasa Budaya	Kategori Sangat Tinggi dan Tinggi		Persentase Tutupan Lahan Terbesar (dari Total Luas Kategori Sangat Tinggi dan Tinggi)			
		Luas (Ha)	Persentase	Sawah Irigasi	Permukiman	Hutan Lahan Kering Sekunder	Hutan Lahan Kering Primer
1	Tempat Tinggal	14766,79	21,33%	15,68%	65,45%	0,33%	0,17%
2	Rekreasi	45096,64	65,13%	0,52%	0,33%	2,13%	79,10%

No	Nama Jasa Budaya	Kategori Sangat Tinggi dan Tinggi		Persentase Tutupan Lahan Terbesar (dari Total Luas Kategori Sangat Tinggi dan Tinggi)			
		Luas (Ha)	Persentase	Sawah Irigasi	Permukiman	Hutan Lahan Kering Sekunder	Hutan Lahan Kering Primer
3	Estetika (Alam)	46016,07	66,46%	2,25%	0,33%	2,38%	77,52%

Sumber: KLHS RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029

a. Jasa Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup

Daya dukung jasa budaya tempat tinggal dan ruang hidup Kota Padang pada kategori rendah dan sangat rendah yaitu mencapai 76,41%. Kategori tinggi dan sangat tinggi hanya 21,33% sedangkan kategori sedang mencapai 2,26%. Daya dukung jasa budaya tempat tinggal di Kota Padang dengan kategori sangat tinggi dan tinggi adalah di Kecamatan Koto Tangah dengan luas 6.506,55 Ha atau 44,06% dan Kecamatan Kuranji 2.133,49 Ha atau 14,45%. Untuk kategori rendah terluas juga terdapat di Kecamatan Koto Tangah dengan luas 16.606,62 Ha atau 31,39% dan Kecamatan Pauh dengan luas 15.706,49 Ha atau 29,69%.

Kategori sedang terluas berada pada Kecamatan Kuranji dengan luas 531,17 Ha atau 33,93%, Kecamatan Bungus Teluk Kabung dengan luas 452,42 Ha atau 28,90% dan Kecamatan Lubuk Kilangan dengan luas sebesar 237,91 Ha atau 15,20%.

Gambar II- 17 a. Daya Dukung Daya Tampung Jasa Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup Kota Padang; b. Daya Dukung Jasa Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup Kota Padang Menurut Kecamatan

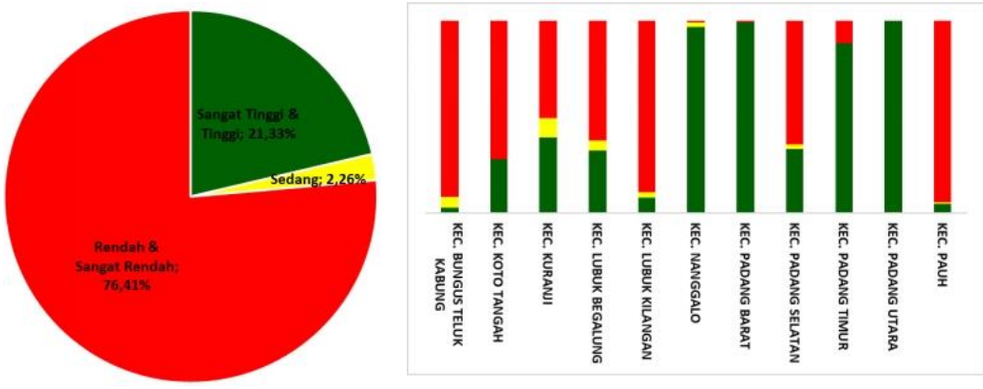

a. **b.**

Sumber: KLHS RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029

b. Jasa Budaya Rekreasi dan Ecotourism

Sebanyak 65,13% atau 45096,64 Ha dari luas Kota Padang termasuk dalam kategori daya dukung dan daya tampung rekreasi dan

ecotourism tinggi dan sangat tinggi. Sedangkan, untuk kategori sedang sebesar 13,77% dan untuk kategori rendah dan sangat rendah sebesar 21,09%. Jasa ini dipengaruhi oleh ekoregion dataran fluvio gunung api dan dataran fluvio marin serta tutupan lahan permukiman, sawah irigasi, hutan lahan kering primer dan hutan lahan kering sekunder.

Dari segi tutupan lahan, wilayah yang mempunyai daya dukung dan daya tampung untuk penyediaan jasa rekreasi dan ecotourism adalah juga wilayah yang mempunyai daya dukung jasa penyediaan serat yang tinggi juga. Kedua fungsi ini bisa saling berseberangan apabila pemanfaatan tidak memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Daya dukung dan daya tampung Kota Padang dalam jasa budaya rekreasi dan ecotourism. Daerah dengan potensi sangat tinggi dan tinggi terluas adalah Kecamatan Koto Tangah dengan luas 15.678,10 Ha atau 34,79% dari luas daerah dengan kategori yang sama. Kemudian Kecamatan Pauh dengan luas 14.153,11 Ha atau 31,38%. Daerah dengan kategori rendah dan sangat rendah terluas adalah Kecamatan Koto tangah dengan luas 23.120,75 Ha atau 33,39%.

Gambar II- 18 Daya Dukung Daya Tampung Jasa Budaya Rekreasi dan Ecotourism Kota Padang; b. Daya Dukung Jasa Budaya Rekreasi dan *Ecotourism Kota Padang* menurut Kecamatan

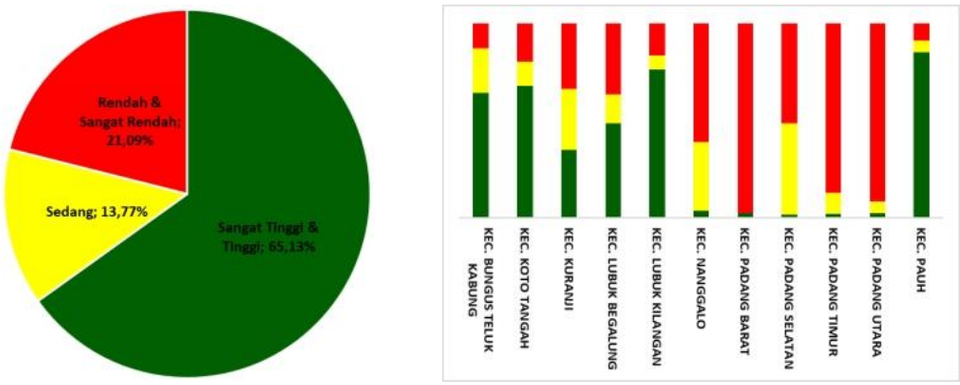

a. **b.**

Sumber: KLHS RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029

c. Jasa Budaya Estetika (Alam)

Daya dukung Kota Padang untuk penyediaan jasa estetika alam umumnya adalah tinggi, yaitu hampir 66,46% dari luas wilayah atau seluas 46.016,07 Ha. Sedangkan, untuk kateori sedang sebesar 8,53% dan untuk kategori rendah dan sangat rendah sebesar 25,01%. Sebaran lebih rinci menurut kecamatan tentang daya dukung jasa budaya estetika alam. Daerah dengan kategori tinggi dan sangat tinggi terluas berada pada Kecamatan Koto Tangah dengan luas 15.766,0 Ha atau 34,26%, dan Kecamatan Pauh dengan luas 14335,04 Ha atau 31,15%. Untuk kategori rendah dan sangat rendah terluas juga berada

pada Kecamatan Koto Tangah, Kecamatan Kuranji, dan Kecamatan Bungus Teluk Kabung.

Gambar II- 19 a. Daya Dukung Daya Tampung Jasa Budaya Estetika (alam) Kota Padang; b. Daya Dukung Jasa Budaya Estetika (alam) Kota Padang menurut Kecamatan

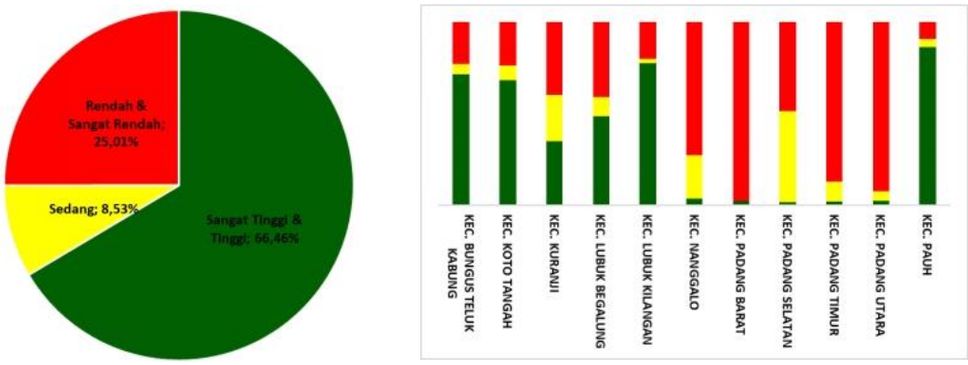

a. **b.**

Sumber: KLHS RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029

2.1.1.2.8 Jasa Ekosistem Pendukung

Jasa Ekosistem Pendukung adalah jasa ekosistem yang diperlukan untuk menghasilkan jasa ekosistem lainnya. Daya dukung dan daya tampung jasa pendukung di Kota Padang dengan kategori sangat tinggi dan tinggi mempunyai rata-rata 70,18%. Keempat jenis jasa ini memiliki Persentase kategori sangat tinggi dan tinggi di atas 50%. Ekoregion yang mempengaruhi jasa ini adalah pegunungan patahan, dataran fluvio gunung api dan dataran fluvio marin.

Tabel II- 15 Ringkasan Daya Tampung Kota Padang dalam Jasa Pendukung

No	Nama Jasa Pendukung	Persentase Luas DDDTLH		
		Sangat Tinggi dan Tinggi	Sedang	Rendah dan Sangat Rendah
1	Pembentukan Tanah	73,82%	7,59%	18,59%
2	Siklus Hara	65,95%	11,91%	22,13%
3	Produksi Primer	71,95%	12,21%	15,85%
4	Biodiversitas	69,02%	12,64%	18,33%
Rata-rata		70,18%	11,09%	18,73%

Sumber: KLHS RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029

Tabel II- 16 Ekoregion yang Mempengaruhi Kategori Sangat Tinggi dan Tinggi pada Daya Dukung dan Daya Tampung Kota Padang dalam Jasa Pendukung

No	Nama Jasa Pendukung	Kategori Sangat Tinggi dan Tinggi		Persentase Ekoregion Terbesar (dari Total Luas Kategori Sangat Tinggi dan Tinggi)		
		Luas (Ha)	Persentase	Dataran Fluvio Gunung Api	Dataran Fluvio Marin	Pegunungan Patahan
1	Pembentukan Tanah	51109,59	73,82%	16,2%	6,84%	69,74%
2	Siklus Hara	45662,83	65,95%	18,15%	3,14%	75,96%
3	Produksi Primer	49812,40	71,95%	16,64%	7,27%	71,56%
4	Biodiversitas	47787,15	69,02%	17,34%	3,94%	74,68%

Sumber: KLHS RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029

Tabel II- 17 Tutupan Lahan yang Mempengaruhi Kategori Sangat Tinggi dan Tinggi pada Daya Dukung dan Daya Tampung Kota Padang dalam Jasa Pendukung

No	Nama Jasa Pendukung	Kategori Sangat Tinggi dan Tinggi		Persentase Tutupan Lahan Terbesar (dari Total Luas Kategori Sangat Tinggi dan Tinggi)	
		Luas (Ha)	Persentase	Hutan Lahan Kering Sekunder	Hutan Lahan Kering Primer
1	Pembentukan Tanah	51109,59	73,82%	4,41%	69,80%
2	Siklus Hara	45662,83	65,95%	1,64%	78,12%
3	Produksi Primer	49812,40	71,95%	3,43%	71,61%
4	Biodiversitas	47787,15	69,02%	4,71%	74,65%

Sumber: KLHS RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029

a. Jasa Pendukung Pembentukan Lapisan Tanah dan Pemeliharaan Kesuburan

Secara umum di Kota Padang yang dapat mendukung pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan dapat dibagi menjadi lahan dengan kategori tinggi dan sangat tinggi, sedang, serta rendah dan sangat rendah. Lahan yang berpotensi tinggi dan sangat tinggi memiliki luasan 51.109,59 Ha atau sekitar 73,82% dari keseluruhan lahan yang terdapat di Kota Padang. Lahan yang memiliki potensi sedang sebagai pendukung pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan memiliki luasan sebesar 5,253,45 Ha atau

sekitar 7,59%. Sedangkan lahan yang memiliki potensi rendah dan sangat rendah memiliki luasan sebesar 12.872,80 Ha atau sebesar 18,59% dari keseluruhan lahan yang terdapat di Kota Padang.

Daya dukung dan daya tampung Kota Padang dalam mendukung pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan tersebar di beberapa Kecamatan, seperti kecamatan Koto Tangah dan Pauh dengan kategori tinggi dan sangat tinggi sekitar 34,26% dan 31,25%. Untuk kategori sedang terluas berada pada Kecamatan Koto Tangah dengan persentase sebesar 31,12%. Begitu juga dengan kategori rendah dan sangat rendah juga berada pada Kecamatan Koto tangah, dan Kecamatan Kuranji dengan persentase luas masing-masingnya adalah 31,86% dan 12,40%.

Gambar II- 20 a. Daya Dukung Daya Tampung Jasa Pendukung Pembentukan Lapisan Tanah dan Pemeliharaan Kesuburan Kota Padang; b. Daya Dukung Daya Tampung Jasa Pendukung Pembentukan Lapisan Tanah dan Pemeliharaan Kesuburan menurut Kecamatan

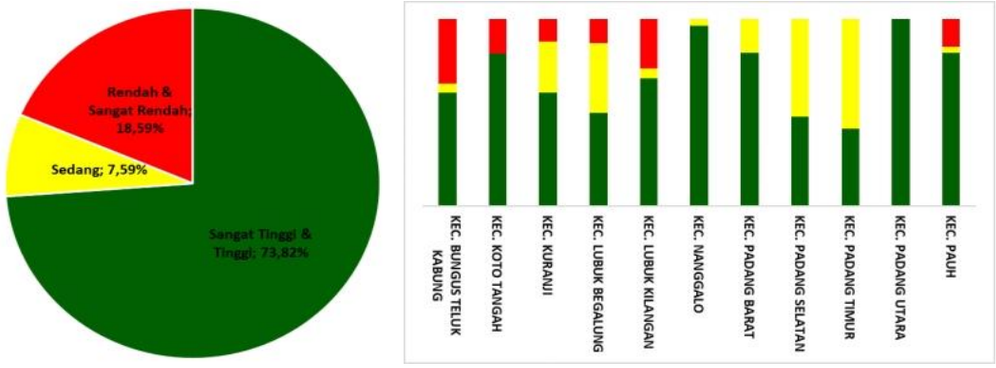

a. **b.**

Sumber: KLHS RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029

b. Jasa Pendukung Siklus Hara (Nutrient Cycle)

Daya dukung untuk jasa pendukung siklus hara yang terdapat di Kota Padang umumnya berpotensi tinggi dan sangat tinggi mencapai 45.662,83 Ha atau 65,95%. Lahan yang memiliki potensi sedang sebagai pendukung siklus hara memiliki luasan sebesar 8.248,37 Ha atau sekitar 11,91%. Sedangkan lahan yang memiliki potensi rendah memiliki luasan sebesar 15.324,64 Ha atau 22,13% dari keseluruhan lahan di Kota Padang.

Daya dukung jasa pendukung siklus hara di Kota Padang dengan kategori sangat tinggi dan tinggi terluas berada di Kecamatan Koto Tangah dengan luas 17.496, 35 Ha atau 38,32% dan Kecamatan Pauh dengan luas 12.820,71 Ha atau 28,08%. Untuk kategori rendah terluas juga terdapat di Kecamatan Koto Tangah dengan luas 4.585,83 Ha atau 29,92% dan Kecamatan Bungus Teluk Kabung dengan luas 8.227,28 Ha atau 29,21%.

Kategori sedang terluas berada pada Kecamatan Kuranji dengan luas 2.196,81 Ha atau 26,63%, Kecamatan Lubuk begalung dengan luas 1.449,30 Ha atau 17,57%.

Gambar II- 21 a. Daya Dukung dan Daya Tampung Jasa Pendukung Siklus Hara (Nutrient Cycle) Kota Padang; b. Daya Dukung Jasa Pendukung Siklus Hara (*Nutrient Cycle*) Sangat Tinggi dan Tinggi menurut Kecamatan

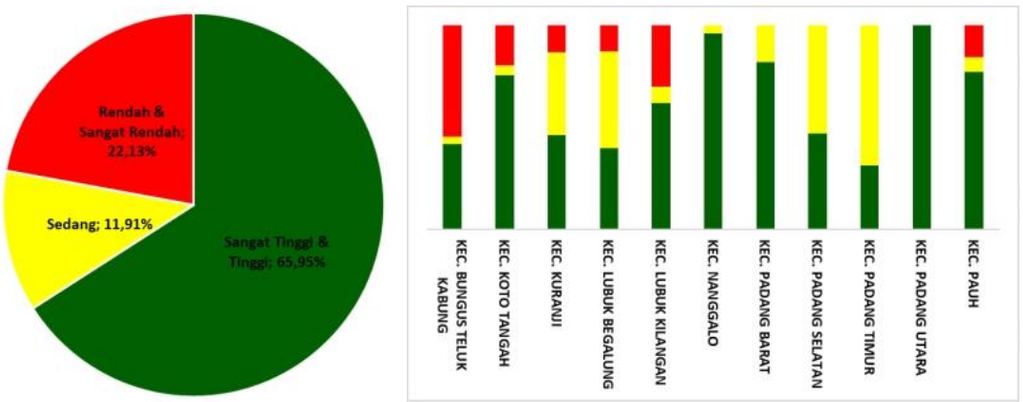

a. **b.**

Sumber: KLHS RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029

c. Jasa Pendukung Produksi Primer

Untuk jasa pendukung produksi primer ini sekitar 71,95% wilayah Kota Padang memiliki kategori sangat tinggi dan tinggi. Sisanya sebesar 12,21% dengan kategori sedang dan 15,85% yang berkategori rendah dan sangat rendah. Daya dukung jasa pendukung siklus hara di Kota Padang dengan kategori sangat tinggi dan tinggi terluas berada di Kecamatan Koto Tangah dengan luas 18.758,75 Ha atau 37,66% dan Kecamatan Pauh dengan luas 13.603,16 Ha atau 27,31%. Untuk kategori rendah terluas juga terdapat di Kecamatan Koto Tangah dengan luas 3.634,26 Ha atau 33,12% dan Kecamatan Pauh dengan luas 2.441,33 Ha atau 22,25%. Kategori sedang terluas berada pada Kecamatan Bungus Teluk Kabung dengan luas 2.409,90 Ha atau 28,52%, Kecamatan Kuranji dengan luas 1.492,66 Ha atau 17,66%.

Gambar II- 22 Daya Dukung dan Daya Tampung Jasa Pendukung Produksi Primer Kota Padang; b. Daya Dukung Jasa Pendukung Produksi Primer Sangat Tinggi dan Tinggi Kota Padang Menurut Kecamatan

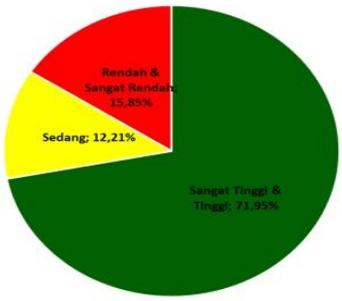

a.

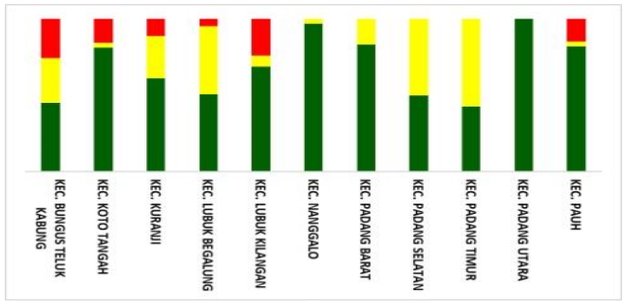

b.

Sumber: KLHS RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029

d. Jasa Pendukung Biodiversitas (Perlindungan Plasma Nutfah)

Luas jasa ekosistem pendukung biodiversitas yang tergolong sangat tinggi dan tinggi mencapai 69,02% dari luas wilayah Kota Padang, 12,64% untuk kategori sedang, dan 18,33% untuk kategori rendah dan sangat rendah. Luas wilayah dengan jasa ekosistem pendukung biodiversitas, kategori sangat tinggi dan tinggi terluas berada pada Kecamatan Koto Tangah dengan luas 17.924,07 Ha atau 37,51%, Kecamatan Pauh mencapai 13.007,68 Ha atau 27, 22%.

Untuk kategori sedang terluas berada pada Kecamatan Kuranji dengan luas 2.146,51 Ha atau 24,52%, dan Kecamatan Lubuk Begalung dengan luas 1.378,07 Ha atau 15,74%. Sedangkan untuk kategori rendah dan sangat rendah berada pada Kecamatan Koto Tangah dengan luas 4.025,51 Ha atau 31,71%, dan Kecamatan Bungus Teluk Kabung dengan luas 2.954,69 Ha atau 23,28%. Daya dukung dan daya tampung Kota Padang dalam jasa pendukung biodiversitas (perlindungan plasma nutfah).

Gambar II- 23 a. Daya Dukung dan Daya Tampung Jasa Pendukung Biodiversitas (Perlindungan Plasma Nutfah) Kota Padang; b. Daya Dukung Jasa Pendukung Biodiversitas menurut Kecamatan

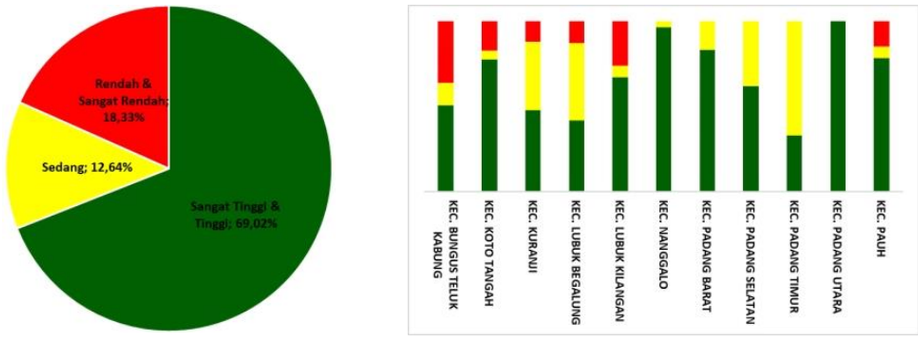

a. **b.**

Sumber: KLHS RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029

2.1.1.3 Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

2.1.1.3.1 Indeks Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pembangunan ketahanan pangan dan gizi dilakukan secara sistemik dengan melibatkan lintas sektor. Pendekatan ini diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang memadai melalui produksi pangan domestik dan perdagangan; tercapainya stabilitas ketersediaan dan akses pangan secara makro-meso dan mikro; tercukupinya kualitas (keragaman dan keamanan pangan) dan kuantitas konsumsi pangan yang didukung oleh perbaikan infrastruktur.

Dari tahun 2020-2024, Nilai IKP Kota Padang termasuk dalam kategori memiliki ketahanan pangan yang cukup baik, karena berada dalam range >61,13-70,64. Artinya produksi pangan wilayah mencukupi kebutuhan (cukup), prevalensi balita stunting cukup rendah, akses air bersih cukup, dan persentase penduduk hidup miskin cukup rendah. Secara umum artinya penanganan kerentanan pangan yang komprehensif telah dilakukan di Kota Padang. Perkembangan indeks ketahanan Kota Padang terlihat pada tabel berikut:

Tabel II- 18 Indeks Ketahanan Pangan Kota Padang Tahun 2020-2024

No.	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Ketahanan Pangan	-	68,03	69,25	69,85	86

Sumber : Dinas Perikanan Pangan Kota Padang, 2025

2.1.1.3.2 Kapasitas Air Baku (m3/detik)

Kota Padang dialiri oleh 7 (tujuh) sungai besar (orde 1), yaitu sungai Batang Anai, Sungai Batang Kandis, Sungai Batang Air Dingin, Sungai Batang Kuranji, Sungai Batang Arau, Sungai Batang Bungus dan Sungai Batang Timbulun dengan 28 (dua puluh delapan) Sub DAS (ordo 2) dan 3 (tiga) Sub DAS (ordo 3), namun baru sebagian sungai yang dimanfaatkan sebagai sumber air baku oleh PDAM di Kota Padang. Kapasitas air baku di Kota Padang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II- 19 Kapasitas Air Baku (m3/detik)

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Kapasitas Air Baku (m3/detik)	1.985	1.985	2.025	2.025	2.025

Sumber: PDAM Kota Padang, 2025

Berdasarkan data diatas terlihat peningkatan kapasitas air baku di Kota Padang. Dalam kurun waktu 2020 – 2024 kapasitas air baku meningkat dari 1.685 m3/detik menjadi 1.985 m3/detik pada tahun 2020. Dan sejak tahun 2022 meningkat menjadi 2.025 m3/detik. Upaya yang dilakukan dalam menjaga kapasitas air baku ini dilaksanakan melalui identifikasi sumber-sumber air baku yang dapat dimanfaatkan baik bersumber dari air permukaan, air tanah, maupun mata air; identifikasi kebutuhan dasar air bersih masyarakat dan ketersediaan potensi air baku masa depan, menyusun rencana pengelolaan air bersih masyarakat; dan menyusun rencana anggaran investasi penyediaan air bersih, serta melakukan konservasi di kawasan DAS yang menjadi sumber air baku.

2.1.1.3.3 Konsumsi Listrik per Kapita (KWh)

Konsumsi listrik per kapita adalah salah satu indikator bidang energi untuk mengukur tingkat kemajuan ekonomi dan kesejahteraan suatu negara. Semakin tinggi taraf hidup suatu masyarakat, kecenderungan penggunaan peralatan listrik juga akan semakin meningkat. Indikator ini menunjukkan rata-rata penggunaan listrik per individu dalam satu tahun yang merefleksikan modernisasi dalam aktivitas ekonomi, industri maupun gaya hidup.

Konsumsi energi listrik Kota Padang cenderung meningkat setiap tahunnya seiring dengan peningkatan jumlah rumah di Kota Padang dan peningkatan aktivitas ekonomi serta perubahan gaya hidup dan peningkatan jumlah kepemilikan alat listrik yang digunakan oleh masyarakat.

Tabel II- 20 Konsumsi Listrik per Kapita Kota Padang Tahun 2020-2024 (KWh)

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Konsumsi energi listrik PLN (KWh)	1.539.980.432	1.637.864.800	1.555.363.018	1.627.070.157	1.681.500.981
Jumlah penduduk (jiwa)	909.040	913.448	919.145	934.847	965.050
Konsumsi listrik per kapita	1.694,07	1.793,05	1.692,18	1.740,46	1.742,39

Sumber: Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2021-2025

2.1.1.3.4 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau *Prevalence of Undernourishment (PoU)* adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Atau, probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang secara regular mengkonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energinya. Indikator PoU ini digunakan untuk memonitor tren atau perubahan pola ketidakcukupan konsumsi energi dari makanan, dalam suatu populasi, secara berkala dari waktu ke waktu. Indikator ini dapat menggambarkan perubahan dalam ketersediaan makanan dan kemampuan rumah tangga untuk mengakses makanan tersebut, pada tingkat sosial ekonomi yang berbeda, serta pada tingkat nasional dan sub-nasional. Selain itu, bisa juga untuk mengetahui situasi pangan dan gizi suatu wilayah.

Gambar II- 24 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kota Padang Tahun 2020-2024

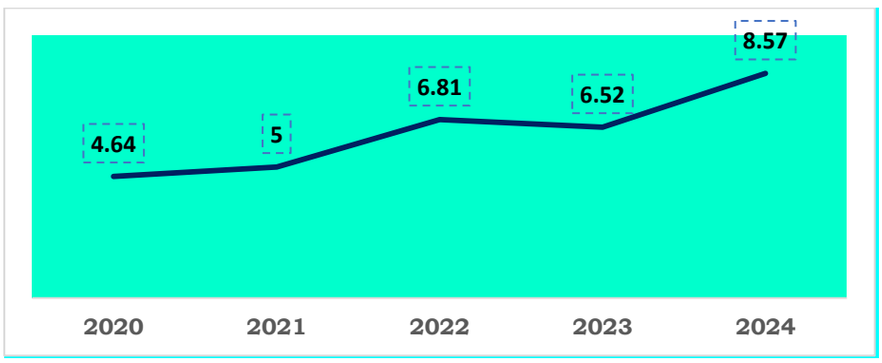

Sumber: BPS Sumatera Barat, 2025

Terdapat 5 (lima) klasifikasi status PoU yaitu sangat rendah (2,5%), rendah (2,5%-4%), sedang (5%-19%), tinggi (20%-34%) dan sangat tinggi (>35%). Secara umum, capaian prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Kota Padang meningkat dari tahun 2020 sebesar 4,64% ke tahun 2024 sebesar 8,57% dengan klasifikasi/kategori dari rendah menjadi sedang. Angka tersebut berarti proporsi penduduk di

Kota Padang yang mengkonsumsi makanan kurang dari kebutuhan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif cenderung naik dari 4,64 % pada tahun 2020 menjadi 8,57% pada tahun 2024 dari seluruh jumlah penduduk. Peningkatan PoU ini dipengaruhi antara lain oleh tingkat kemiskinan, ketimpangan akses pangan, keterbatasan produksi pangan lokal dan aksesibilitas distribusi pangan yang buruk.

2.1.1.3.5 Akses Rumah Tangga Terhadap Air Siap Minum Jaringan Perpipaan

Akses rumah tangga di wilayah Kota Padang terhadap air minum aman merujuk pada kemampuan penduduk kota dalam mendapatkan air bersih yang layak dikonsumsi secara langsung melalui sistem perpipaan yang terhubung ke sumber air terjamin. Hal ini mencakup keberadaan infrastruktur perpipaan air, seperti jaringan PDAM, yang memastikan air dapat dialirkan langsung ke rumah-rumah warga. Cakupan layanan ini memiliki jangkauan yang luas, sementara daerah pinggiran atau permukiman padat masih mengalami berbagai kendala. Faktor seperti kualitas infrastruktur, biaya yang terjangkau, serta tingkat pemahaman masyarakat turut memengaruhi sejauh mana rumah tangga dapat memanfaatkan layanan ini. Peningkatan akses air minum melalui perpipaan tidak hanya berdampak positif pada kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi indikator penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terdiri dari sistem perpipaan dan non perpipaan. Sistem penyediaan air minum perpipaan terdiri dari sistem perpipaan PDAM dan sistem perpipaan Non Perumda (PAMSIMAS). Untuk sistem perpipaan dikelola oleh Perumda Air Minum Kota Padang, sedangkan untuk sistem perpipaan non Perumda dikelola oleh masyarakat.

Secara administratif cakupan pelayanan jaringan perpipaan Kota Padang pada tahun 2023 (PERUMDAM dan PAMSIMAS) yang terlayani sebanyak sebesar 73,19% (Perumdam sebesar 67,19% dan PAMSIMAS sebesar 6%), dan Pelayanan SPAM Bukan Perpipaan sebanyak 24,43 % sehingga sisanya belum terlayani Sistem Penyediaan Air Minum.

Pada tahun 2023, capaian akses air minum yang disediakan melalui jaringan perpipaan atau bersumber dari PDAM di Kota Padang mencapai 73,19 %. Angka ini menunjukkan bahwa sebanyak 73,19 % masyarakat telah memperoleh air minum dengan kuantitas yang mencukupi kebutuhan harian, kualitas yang memenuhi standar peraturan perundang-undangan, serta ketersediaan air yang mengalir secara terus-menerus selama 24 jam per hari. Untuk melihat distribusi masyarakat yang telah mendapatkan akses air minum melalui jaringan perpipaan, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II- 21 Persentase Akses Rumah Tangga Terhadap Air Minum Perpipaan Kota Padang Tahun 2020-2024

Indikator	Capaian Kinerja				
	2020	2021	2022	2023	2024
Akses Rumah Tangga Terhadap Air siap Minum Perpipaan	67,53	70,26	71,75	73,19	78,26

Sumber: BPS Kota Padang, 2025

2.1.1.4 Kualitas Lingkungan Hidup

2.1.1.4.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan salah satu unsur yang diutamakan dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah dapat tergambar dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. IKLH merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara daerah dan menjadi acuan bersama bagi semua pihak dalam mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. IKLH dihitung berdasarkan realisasi dari indikator kinerja sasaran yaitu Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang digunakan sebagai pengganti indeks tutupan lahan, Indek Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU).

Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Padang tahun 2020-2024 fluktuatif dengan nilai terendah pada tahun 2021 yaitu 70,7 dan tertinggi tahun 2024 yaitu 77,26. Nilai yang diperoleh dalam kurun waktu 5 tahun tersebut berkategori baik (skor 70-89). Ini menunjukkan kualitas lingkungan hidup Kota Padang yang semakin baik dari tahun ke tahun. Nilai IKLH Kota Padang Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II- 22 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Padang Tahun 2020-2024

Indikator	Capaian Kinerja				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks kualitas Lingkungan hidup	71,53	70,07	70,82	72,28	77,26
Indeks kualitas air	66,55	63.63	66.67	69,99	69,09
Indeks kualitas udara	74,51	74.83	73.87	74,11	87,8
Indeks kualitas lahan	73,02	72.40	72.34	73,20	71,78

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2025

2.1.1.4.2 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Akses sanitasi aman merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan sanitasi. Sebelumnya indikator yang dipakai adalah akses sanitasi layak. Sanitasi layak adalah sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan yaitu fasilitas tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu, dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau IPAL.

Kota padang telah membangun sub sistem pengelolaan air limbah domestik setempat (SPALD-S) tangki septik individual dari Tahun 2020 s.d Tahun 2024 yang pembiayaannya bersumber dari APBD, APBN, DAK dan hibah. Total pembangunan sub SPALD-S (Tangki Septik Individual) yang telah dibangun sekitar 3.735 unit. Dan kota padang juga telah memiliki 1 unit SPALD-T rusunawa, SPALD-T (IPAL komunal) sebanyak 38 unit, MCK ++ sebanyak 4 unit yang dikelola oleh masyarakat melalui Kelompok Pemanfaat Dan Pemelihara (KPP) dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Nanggalo yang mendukung pencapaian target sanitasi aman bagi masyarakat kota padang.

Infrastruktur terbangun yang ada saat ini belum sepenuhnya beroperasi secara optimal, termasuk didalamnya aspek pemeliharaan, baik oleh lembaga terkait tingkat kota, maupun oleh masyarakat. Hal ini disebabkan beberapa keterbatasan baik dari kelembagaan, sumber daya dan pendanaan. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan dari semua sektor dalam upaya peningkatkan kinerja penyelenggaraan sanitasi aman, perluasan layanan, peningkatan pemanfaatan sarana yang telah terbangun, edukasi dan promosi untuk penyadaran masyarakat, dan upaya-upaya penting lainnya.

Adapun persentase Rumah Tangga dengan akses sanitasi layak selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II- 23 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Layanan Sanitasi Layak

Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak	%	82,50	80,13	76,10	78,56	78,22

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2025

2.1.1.4.3 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Pengelolaan timbulan sampah harus memenuhi standar agar tidak membahayakan lingkungan dan kesehatan. Berdasarkan data tahun 2024, jumlah sampah yang berhasil diolah di fasilitas pengelolaan sampah di Kota Padang mencapai 74,8 % dari total timbulan sampah sebesar 240.131,93 ton/tahun. Capaian ini menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 74,26% dari total timbulan sebesar 236.296,62 ton/tahun.

Data timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah Kota Padang pada tahun 2020-2024 terlihat pada tabel berikut:

Tabel II- 24 Timbulan Sampah Terolah Kota Padang Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Timbulan sampah yang ditangani	%	74,99	78.24	72.55	74,26	74,8

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, 2025

2.1.1.4.4 Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah adalah persentase rumah tangga yang mendapatkan layanan pengumpulan sampah yang menyeluruh, yaitu di mana sampah mereka diambil langsung dari rumah mereka secara teratur.

Pengukuran proporsi ini penting dalam konteks pengelolaan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Tingginya proporsi rumah tangga dengan layanan penuh menunjukkan bahwa lebih banyak penduduk memiliki akses ke layanan persampahan sekaligus sanitasi dasar yang memadai, sehingga membantu mengurangi pencemaran lingkungan, meningkatkan kebersihan, dan mencegah penyakit yang timbul akibat pengelolaan sampah yang buruk.

Tabel II- 25 Proporsi RT dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah Kota Padang Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Proporsi Rumah Tangga	%	75	72,12	72.55	73,69	75,54

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, 2025

Secara umum data pada tabel di atas menunjukkan dalam kurun waktu 2020-2024, sebesar 70-75 % rumah tangga di Kota Padang sudah memiliki akses ke layanan pengumpulan sampah dan ini juga berarti bahwa sekitar 30 % nya lagi melakukan pengolahan sampah

secara mandiri seperti membakar, membuang ke sungai atau menimbunnya di lahan kosong. Hal tersebut tentunya dapat menghambat efektivitas pengurangan dan daur ulang sampah yang bisa berdampak negatif terhadap lingkungan dan berkurangnya nilai ekonomi daur ulang sampah.

2.1.1.5.4 Wilayah Potensi Industri Kecil dan Menengah (IKM).

Potensi IKM di kota Padang dikembangkan untuk menampung kegiatan ekonomi skala kecil dan menengah. Sentra IKM yang ada di Kota Padang terpusat di Kecamatan Lubuk Kilangan, Lubuk Begalung dan Koto Tangah.

2.1.1.5.5 Wilayah Potensi Pertambangan.

Pengembangan area tambang skala besar berlokasi di Kecamatan Lubuk Kilangan sebagai penghasil semen (PT. Semen Indonesia). Potensi tambang lainnya seperti galian non logam skala kecil berada pada sebagian besar Kecamatan.

2.1.1.5.6 Wilayah potensi perdagangan.

Sebagai ibukota provinsi, Kota Padang berada pada posisi strategis sebagai pusat perdagangan karena memiliki pelabuhan laut Teluk Bayur, Terminal tipe A di Anak Aia dan Bandara Internasional Minangkabau yang tidak jauh dari Kota Padang. Kota Padang memiliki 1 unit Pasar Raya dan 16 unit pasar rakyat serta beberapa pusat perbelanjaan modern.

2.1.1.5.7 Wilayah potensi pendidikan.

Kota Padang memiliki beberapa Perguruan Tinggi Negeri diantaranya, Universitas Andalas di Kecamatan Pauh, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol di Kecamatan Koto Tangah dan Universitas Negeri Padang di Kecamatan Padang Utara serta Perguruan Tinggi Swasta yang tersebar di beberapa kecamatan. Dengan demikian Kota Padang telah menjadi kota tujuan pendidikan secara nasional, yang juga diminati oleh calon mahasiswa dari negara lain.

2.1.1.6 Resilensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Kota Padang merupakan salah satu kota yang rawan terhadap bencana gempa bumi dan tsunami disebabkan letak Kota Padang berada pada dua lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Selain itu, bencana yang sering terjadi adalah kebakaran, pohon tumbang, longsor, abrasi pantai dan banjir karena hujan atau naiknya permukaan air laut.

Dari dokumen Kajian Resiko Bencana Kota Padang Tahun 2023-2027, tingkat resiko bencana di Kota Padang dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel II- 26 Tingkat Resiko Bencana Kota Padang

No	Jenis Bahaya	Kelas Bahaya	Kelas Kerentanan	Kelas Kapasitas	Kelas Risiko	Nilai Indeks
1.	Banjir	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	0,609

No	Jenis Bahaya	Kelas Bahaya	Kelas Kerentanan	Kelas Kapasitas	Kelas Risiko	Nilai Indeks
2.	Banjir Bandang	Tinggi	Sedang	Rendah	Tinggi	0,713
3.	Cuaca Ekstrim	Tinggi	Sedang	Sedang	Tinggi	0,837
4.	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	Tinggi	Sedang	Sedang	Tinggi	0,670
5.	Gempabumi	Tinggi	Sedang	Sedang	Tinggi	0,864
6.	Kebakaran Hutan dan Lahan	Rendah	Sedang	Rendah	Sedang	0,509
7.	Kekeringan	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	0,615
8.	Tanah Longsor	Tinggi	Sedang	Rendah	Tinggi	0,674
9.	Tsunami	Tinggi	Sedang	Sedang	Tinggi	0,709

Sumber: Dokumen KRB Kota Padang 2023-2027

2.1.1.6.1 Indeks Resiko Bencana Daerah

Upaya penanggulangan bencana perlu diawali dengan pemahaman atas risiko bencana yang ada berdasarkan hasil kajian risiko. Penilaian dampak bencana (korban jiwa, kerusakan atau kerugian) menjadi penilaian potensi kehilangan atau kerugian (risiko). Penilaian tersebut terwujud dalam indeks risiko bencana. Indeks risiko bencana bertujuan untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana di setiap kabupaten atau kota.

Indeks ini menilai tingkat kebencanaan berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya, kerentanan dan kapasitas pemerintah serta komunitas dalam menghadapi bencana. Komponen bahaya adalah fenomena alam yang dapat menyebabkan bencana seperti gempa bumi, tsunami, banjir, longsor dan lainnya. Komponen kerentanan adalah (1) kondisi fisik, (2) sosial budaya, (3) ekonomi dan (4) lingkungan yang rentan terpapar bencana. Sementara komponen kapasitas adalah dari unsur ketahanan daerah seperti kebijakan dan kelembagaan, pendidikan dan pelatihan, logistik, kapasitas mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan darurat, serta kapasitas pemulihan.

Data perkembangan indeks risiko bencana di Kota Padang menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam 5 tahun terakhir (2020-2024) dapat dilihat pada Tabel 2-13. Menurunnya risiko

bencana di suatu daerah, akan terlihat dari menurunnya nilai indeks risiko bencana yang dimiliki daerah tersebut.

Tabel II- 27 Indeks Resiko Bencana Kota Padang

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Risiko Bencana	169,92	181,7	179,03	166,99	155,96
Kelas	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi

Sumber: BPBD Kota Padang, 2025

Tabel II- 28 Klasifikasi Indeks Resiko Bencana

Total Nilai	Kelas Risiko Bencana	Warna (di peta)
< 13	Rendah	Hijau
13 – 144	Sedang	Kuning
> 144	Tinggi	Merah

Sumber: BPBD Kota Padang, 2025

Tabel II- 29 Indeks Ketahanan Daerah

Uraian	2021	2022	2023	2024
Indeks Ketahanan Daerah	0,20	0,35	0,49	0,52
Kelas	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang

Sumber: BPBD Kota Padang, 2025

Tabel II- 30 Klasifikasi Indeks Ketahanan Daerah

Nilai Indeks	Kelas Ketahanan Daerah
< 0,40	Rendah
0,40 – 0,80	Sedang
> 0,80	Tinggi

Sumber: BPBD Kota Padang, 2025

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan bagian dari perhitungan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). IKD dinilai setiap tahun untuk mengukur keberhasilan capaian kegiatan penanggulangan bencana. IKD dan IRBI (atau IRB) menjadi rapor atau gambaran capaian upaya penanggulangan bencana di tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota. Nilai ini akan menjadi panduan bagi para pengambil kebijakan untuk menentukan prioritas upaya penanggulangan bencana di daerah guna menurunkan indeks risiko bencana sebagai upaya meningkatkan ketangguhan masyarakat.

Rincian dari masing-masing potensi bencana pada wilayah Kota Padang sebagai berikut:

a. Gempa Bumi

Gambar II- 25 Sebaran Wilayah Rawan Gempa Bumi Menurut Kecamatan di Kota Padang

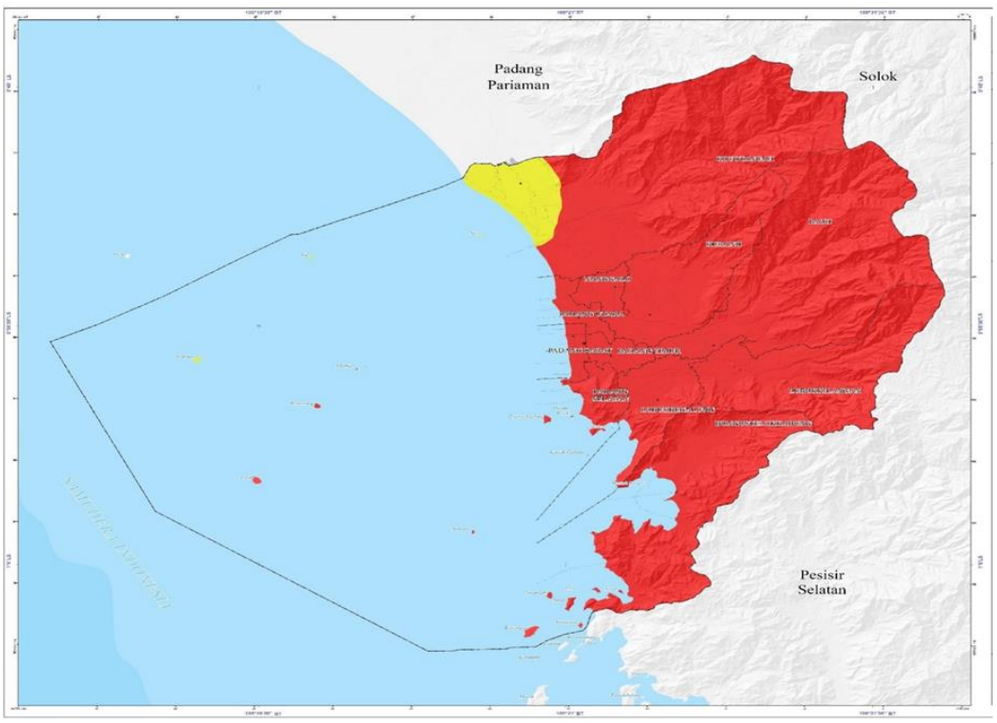

Sumber: RDTR Kota Padang Tahun 2023 - 2043

Data bencana gempa dari BMKG memperlihatkan lokasi pusat-pusat gempa di perairan Kota Padang tersebar merata dengan pusat gempa lebih banyak di perairan antara Pulau Enggano dan daratan Pulau Sumatera. Frekuensi kejadian gempa pada periode tahun 1963 hingga 2009 terjadi peningkatan, dengan jumlah gempa terjadi 3 sampai 16 kali pertahun dalam kurun 1963-1975, frekuensi hingga 2 kali kejadian dalam tahun 1984 hingga 1995, frekuensi hingga 4 kali kejadian dalam kurun 1995 hingga 2009. Kebanyakan sumber-sumber gempa tersebut berada pada kedalaman 33 hingga 100 km, dengan magnitudo terbesar 7,9 Skala Richter. Zona tektonik aktif yang terbentuk dari penunjaman lempeng di sebelah Barat Pulau Sumatera juga dapat dilihat dari adanya gunung api aktif yang muncul di sepanjang jalur patahan aktif di bagian sisi Barat Pulau Sumatera yang bergerak geser kanan *(dextral strike slip fault)*. Jalur patahan Sumatera yang juga biasa disebut dengan Patahan Semangko sepanjang 1.650 km, menyebabkan blok sebelah barat Sumatera bergerak ke utara sedangkan yang di sebelah timur bergerak ke selatan serta melahirkan kepulauan busur dalam *(inner island arc)* seperti Pulau Nias, Mentawai dan Enggano. Gempa vulkanik yang terjadi di Kota Padang disebabkan posisi kota berada di dekat 3 gunung api aktif, yaitu Gunung Talang, Merapi dan Tandikek.

Tabel II- 31 Sebaran Wilayah Rawan Gempa Bumi Menurut Kelurahan di Kota Padang

Kecamatan	Kelurahan	Kawasan Rawan Bencana Gempa bumi Menengah (Ha)	Kawasan Rawan Bencana Gempa bumi Tinggi (Ha)
Bungus Teluk Kabung	Bungus Barat	-	1.534,23
	Bungus Selatan	-	505,26
	Bungus Timur	-	2.758,57
	Teluk Kabung Selatan	-	2.045,37
	Teluk Kabung Tengah	-	2.051,68
	Teluk Kabung Utara	-	933,95
	Total	-	9.829,07
Koto Tangah	Air Pacah	-	487,00
	Balai Gadang	88,11	6.958,70
	Batang Kabung	203,58	36,76
	Batipuh Panjang	791,89	94,34
	Bungo Pasang	19,58	390,97
	Dadok Tunggul Hitam	-	366,67
	Koto Panjang Ikua Koto	-	647,53
	Koto Pulai	112,28	169,28
	Lubuk Buaya	483,16	-
	Lubuk Minturun	-	9.131,45
	Padang Sarai	513,90	-
	Parupuk Tabing	-	489,35
	Pasir Nan Tigo	364,45	-
	Total	2.576,95	18.772,04
Kuranji	Ampang	-	132,81
	Anduring	-	114,60
	Gunung Sarik	-	889,01

Kecamatan	Kelurahan	Kawasan Rawan Bencana Gempa bumi Menengah (Ha)	Kawasan Rawan Bencana Gempa bumi Tinggi (Ha)
	Kalumbuk	-	252,98
	Korong Gadang	-	456,08
	Kuranji	-	3.522,55
	Lubuk Lintah	-	189,66
	Pasar Ambacang	-	337,88
	Sungai Sapih	-	570,08
	Total	-	6.465,66
Lubuk Begalung	Banuaran Nan Duapuluh	-	70,11
	Batung Taba Nan Duapuluh	-	149,63
	Cangkeh Nan Duapuluh	-	76,05
	Gates Nan Duapuluh	-	662,46
	Gurun Laweh Nan Dua Puluh	-	64,61
	Kampung Baru Nan Duapuluh	-	47,60
	Kampung Jua Nan Duapuluh	-	344,59
	Koto Baru Nan Duapuluh	-	61,05
	Lubuk Begalung Nan Duapuluh	-	108,65
	Pagambiran Ampalu Nan Duapuluh	-	697,97
	Pampangan Nan Duapuluh	-	202,74
	Parak Laweh Pulau Air Nan Duapuluh	-	93,71
	Tanah Sirah Nan Duapuluh	-	89,49
	Tanjung Aur	-	12,66
	Tanjung Saba Pitameh Nan Duapuluh	-	111,31

Kecamatan	Kelurahan	Kawasan Rawan Bencana Gempa bumi Menengah (Ha)	Kawasan Rawan Bencana Gempa bumi Tinggi (Ha)
	Total	-	2.792,64
Lubuk Kilangan	Bandar Buat	-	404,65
	Batu Gadang	-	3.673,38
	Beringin	-	440,22
	Indarung	-	3.197,22
	Koto Lalang	-	283,72
	Padang Besi	-	81,11
	Tarantang	-	381,40
	Total	-	8.461,70
Nanggalo	Gurun Laweh	-	132,43
	Kampung Lapai Baru	-	117,40
	Kampung Olo	-	98,75
	Kurao Pagang	-	300,28
	Surau Gadang	-	201,21
	Tabing Bandar Gadang	-	104,21
	Total	-	954,28
Padang Barat	Belakang Tangsi	-	60,92
	Berok Nipah	-	46,22
	Flamboyan Baru	-	51,09
	Kampung Jao	-	66,36
	Kampung Pondok	-	49,37
	Olo	-	52,10
	Padang Pasir	-	62,54
	Purus	-	54,13
	Rimbo Kaluang	-	62,16

Kecamatan	Kelurahan	Kawasan Rawan Bencana Gempa bumi Menengah (Ha)	Kawasan Rawan Bencana Gempa bumi Tinggi (Ha)
	Ujung Gurun	-	39,63
	Total	-	544,52
Padang Selatan	Air Manis	-	270,55
	Alang Laweh	-	22,08
	Batang Arau	-	63,20
	Belakang Pondok	-	33,11
	Bukit Gado-Gado	-	164,44
	Mata Air	-	278,95
	Pasa Gadang	-	41,47
	Ranah Parak Rumbio	-	23,44
	Rawang	-	163,10
	Seberang Padang	-	73,11
	Seberang Palinggam	-	102,94
	Teluk Bayur	-	140,32
	Total	-	1.376,71
Padang Timur	Andalas	-	123,38
	Ganting Parak Gadang	-	81,99
	Jati	-	90,85
	Jati Baru	-	76,52
	Kubu Marapalam	-	76,08
	Kubu Parak Karakah	-	228,74
	Parak Gadang Timur	-	74,51
	Sawahan	-	53,89
	Sawahan Timur	-	72,02
	Simpang Haru	-	40,56

Kecamatan	Kelurahan	Kawasan Rawan Bencana Gempa bumi Menengah (Ha)	Kawasan Rawan Bencana Gempa bumi Tinggi (Ha)
	Total	-	918,53
Padang Utara	Air Tawar Barat	-	148,15
	Air Tawar Timur	-	68,11
	Alai Parak Kopi	-	162,30
	Gunung Pangilun	-	182,82
	Lolong Belanti	-	115,23
	Ulak Karang Selatan	-	90,53
	Ulak Karang Utara	-	85,22
	Total	-	852,35
Pauh	Binuang Kampung Dalam	-	159,29
	Cupak Tangah	-	209,86
	Kapala Koto	-	264,97
	Koto Luar	-	464,55
	Lambung Bukit	-	8.869,63
	Limau Manis	-	3.929,42
	Limau Manis Selatan	-	1.646,42
	Piai Tangah	-	238,55
	Pisang	-	183,53
	Total	-	15.966,22
KOTA PADANG TOTAL		**2.576,95**	**66.933,72**

Sumber: RDTR Kota Padang Tahun 2023 - 2043
Keterangan : - (data = 0)

b. Gelombang Tsunami

Gambar II- 26 Wilayah Rawan Bencana Tsunami Menurut Kelurahan di Kota Padang

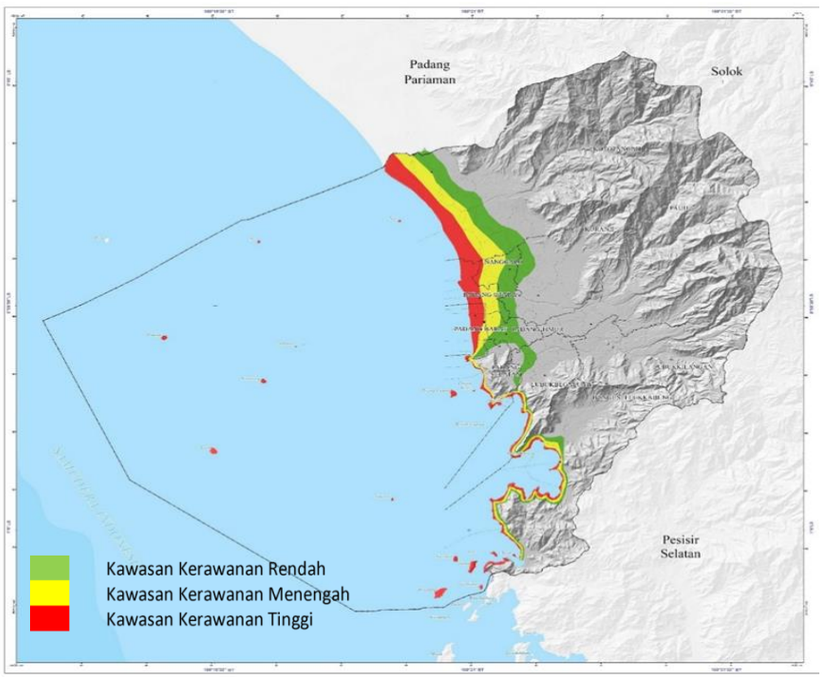

Sumber: RDTR Kota Padang Tahun 2023 – 2043

Letak Kota Padang yang berada di Pantai Barat Sumatera, yang berbatasan langsung dengan laut terbuka (Samudera Hindia) dan zona tumbukan aktif dua lempeng menjadikan Padang salah satu kota paling rawan bahaya gelombang tsunami. Gempa tektonik sepanjang daerah subduksi dan adanya seismik aktif, dapat mengakibatkan gelombang yang luar biasa dahsyat. Dari catatan sejarah bencana, gelombang tsunami pernah melanda Sumatera Barat pada tahun 1797 dan 1833.

Kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami dengan resiko sangat tinggi ditetapkan pada kawasan sepanjang pantai yang meliputi wilayah:

1. Kecamatan Koto Tangah Kelurahan Aie Pacah, Balai Gadang, Batang Kabung, Batipuh Panjang, Bungo Pasang, Dadok Tunggul Hitam, Koto Panjang Ikua Koto, Koto Pulai, Lubuk Buaya, Padang Sarai, Parupuk Tabing, Pasir Nan Tigo.
2. Kecamatan Nanggalo Kelurahan Gurun Laweh, Kampung Lapai Baru, Kampung Olo, Kurao Pagang, Surau Gadang, Tabing Banda Gadang.
3. Kecamatan Padang Utara Kelurahan Air Tawar Barat, Air Tawar Timur, Alai Parak Kopi, Gunung Pangilun, Lolong Belanti, Ulak Karang Selatan, Ulak Karang Utara.
4. Kecamatan Padang Barat Kelurahan Belakang Tangsi, Berok Nipah, Flamboyan Baru, Kampung Jao, Kampung Pondok, Olo, Padang Pasir, Purus, Rimbo Kaluang, Ujung Gurun.
5. Kecamatan Padang Timur Kelurahan Andalas, Ganting Parak Gadang, Jati, Jati Baru, Kubu Marap Alam, Kubu Parak Karakah, Parak Gadang Timur, Sawahan, Sawahan Timur, Simpang Haru.

6. Kecamatan Padang Selatan Air Manis, Alang Laweh, Batang Arau, Belakang Pondok, Bukit Gado-Gado, Mata Air, Ranah Parak Rumbio, Rawang, Seberang Padang, Teluk Bayur.
7. Kecamatan Lubuk Begalung Banuaran Nan XX, Batung Tabanan XX, Gates Nan XX, Gurun Laweh Nan XX, Lubuk Begalung Nan XX, Pagambiran Ampalu Nan XX, Pampangan Nan XX, Parak Laweh Pulau Aie Nan XX.
8. Kecamatan Bungus Teluk Kabung, kelurahan Bungus Barat, Bungus Selatan, Bungus Timur, Telukkabung Selatan, Teluk Kabung Tengah, Teluk Kabung Utara.

Tabel II- 32 Wilayah Rawan Bencana Tsunami Menurut Kelurahan di Kota Padang

Kecamatan	Kelurahan	Zona Kerawanan Menengah (Ha)	Zona Kerawanan Rendah (Ha)	Zona Kerawanan Tinggi (Ha)
Bungus Teluk Kabung	Bungus Barat	76,05	98,10	56,50
	Bungus Selatan	57,99	41,84	22,74
	Bungus Timur	-	0,75	-
	Teluk Kabung Selatan	45,38	37,08	219,21
	Teluk Kabung Tengah	174,99	135,77	166,14
	Teluk Kabung Utara	47,02	34,08	33,55
Bungus Teluk Kabung Total		401,43	347,61	498,15
Koto Tangah	Air Pacah	4,59	181,80	-
	Balai Gadang	-	27,66	-
	Batang Kabung	142,66	-	97,68
	Batipuh Panjang	81,93	389,86	-
	Bungo Pasang	200,91	106,13	103,51
	Dadok Tunggul Hitam	201,89	164,77	-
	Koto Panjang Ikua Koto	-	302,97	-

Kecamatan	Kelurahan	Zona Kerawanan Menengah (Ha)	Zona Kerawanan Rendah (Ha)	Zona Kerawanan Tinggi (Ha)
	Koto Pulai	51,28	205,55	-
	Lubuk Buaya	283,19	89,77	110,21
	Lubuk Minturun	195,86	45,05	272,99
	Padang Sarai	127,87	-	361,48
	Parupuk Tabing	-	-	364,45
	Pasir Nan Tigo	1.290,16	1.513,56	1.310,32
Koto Tangah Total		2.580,32	3.027,12	2.620,64
Kuranji	Ampang	-	13,30	-
	Anduring	-	19,36	-
	Gunung Sarik	-	22,57	-
	Kalumbuk	-	310,76	-
	Korong Gadang	-	485,84	-
	Kuranji	-	42,47	-
	Lubuk Lintah	-	1,65	-
	Pasar Ambacang	94,02	57,51	102,35
	Sungai Sapih	-	52,17	-
Kuranji Total		94,02	1.005,63	102,35
Lubuk Begalung	Banuaran Nan Duapuluh	-	3,11	-
	Batung Taba Nan Duapuluh	-	15,36	-
	Cangkeh Nan Duapuluh	-	80,39	-

Kecamatan	Kelurahan	Zona Kerawanan Menengah (Ha)	Zona Kerawanan Rendah (Ha)	Zona Kerawanan Tinggi (Ha)
	Gates Nan Duapuluh	94,02	252,65	102,35
	Gurun Laweh Nan Dua Puluh	-	114,47	-
	Kampung Baru Nan Duapuluh	77,48	-	39,92
	Kampung Jua Nan Duapuluh	78,49	20,26	-
	Koto Baru Nan Duapuluh	101,30	172,80	26,18
	Lubuk Begalung Nan Duapuluh	121,00	80,21	-
	Pagambiran ampalu Nan Duapuluh	2,55	101,66	-
	Pampangan Nan Duapuluh	380,82	489,40	66,10
	Parak Laweh Pulau Air Nan Duapuluh	28,79	1,06	31,07
	Tanah Sirah Nan Duapuluh	11,25	23,30	3,20
	Tanjung Aur	4,53	-	46,57
	Tanjung Saba Pitameh Nan Duapuluh	55,65	2,10	8,61
Lubuk Begalung Total		955,88	1.356,77	324,00
Lubuk Kilangan	Bandar Buat	2,13	-	49,97
	Batu Gadang	15,30	-	47,23
	Beringin	-	-	54,13

Kecamatan	Kelurahan	Zona Kerawanan Menengah (Ha)	Zona Kerawanan Rendah (Ha)	Zona Kerawanan Tinggi (Ha)
	Indarung	4,82	-	57,34
	Koto Lalang	5,35	-	34,28
	Padang Besi	136,63	58,44	332,40
	Tarantang	30,68	-	93,02
Lubuk Kilangan Total		194,92	58,44	668,38
Nanggalo	Gurun Laweh	11,90	-	16,54
	Kampung Lapai Baru	4,27	25,61	-
	Kampung Olo	17,02	-	26,24
	Kurao Pagang	-	12,19	-
	Surau Gadang	-	10,46	-
	Tabing Bandar Gadang	-	47,09	-
Nanggalo Total		33,18	95,34	42,78
Padang Barat	Belakang Tangsi	29,06	-	44,79
	Berok Nipah	92,92	129,16	180,59
	Flamboyan Baru	-	84,73	-
	Kampung Jao	-	79,50	-
	Kampungp Ondok	81,19	9,66	-
	Olo	76,52	-	-
	Padang Pasir	-	64,39	-
	Purus	-	14,28	-

Kecamatan	Kelurahan	Zona Kerawanan Menengah (Ha)	Zona Kerawanan Rendah (Ha)	Zona Kerawanan Tinggi (Ha)
	Rimbo Kaluang	-	31,92	-
	Ujung Gurun	17,77	36,12	-
Padang Barat Total		297,46	449,75	225,38
Padang Selatan	Air Manis	-	40,56	-
	Alang Laweh	177,42	431,23	-
	Batang Arau	-	-	148,15
	Belakang Pondok	-	-	68,11
	Bukit Gado-Gado	72,89	89,40	-
	Mata Air	174,34	7,90	0,59
	Pasa Gadang	24,54	-	90,68
	Ranah Parak Rumbio	1,06	-	89,47
	Rawang	-	-	85,22
	Seberang Padang	272,84	97,30	482,22
	Seberang Palinggam	2.846,25	3.805,19	2.972,13
Padang Selatan Total		3.569,35	4.471,58	3.936,56

Sumber: RDTR Kota Padang Tahun 2023 – 2043
Keterangan : - (data = 0)

c. Likuifaksi

Likuifaksi terjadi pada daerah yang tersusun dari endapan aluvium dimana batuannya bersifat material lepas *(loose unconsolidated),* jenuh air tanah, dengan kemiringan lereng memadai, sehingga bila mendapat guncangan kuat akibat gempa bumi, maka tegangan air pori akan meningkat dan mengakibatkan lapisan pasir tersebut akan cenderung menjadi bubur dan mengakibatkan daya dukung tanah menjadi berkurang dan meluncur mengikuti bidang lengsernya.

Rawan bencana likuifaksi di Kota Padang dibagi menjadi 2 (dua) tingkatan, yaitu likuifaksi tinggi dan likuifaksi sedang. Rawan bencana likuifaksi yang terdapat di Kota Padang umumnya merupakan rawan bencana likuifaksi sedang.

Kelurahan dengan kerawanan likuifaksi paling luas adalah Kelurahan Batipuh Panjang, Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto yang berada di Kecamatan Koto Tangah. Sedangkan kelurahan dengan tingkat rawan likuifaksi paling rendah adalah Kelurahan Batang Arau, Kecamatan Padang Selatan. Adapun sebaran rawan liquifaksi di Kota Padang menurut kelurahan dapat dilihat pada tabel dan gambar dibawah ini:

Gambar II- 27 Wilayah Rawan Bencana Likuifaksi Kota Padang

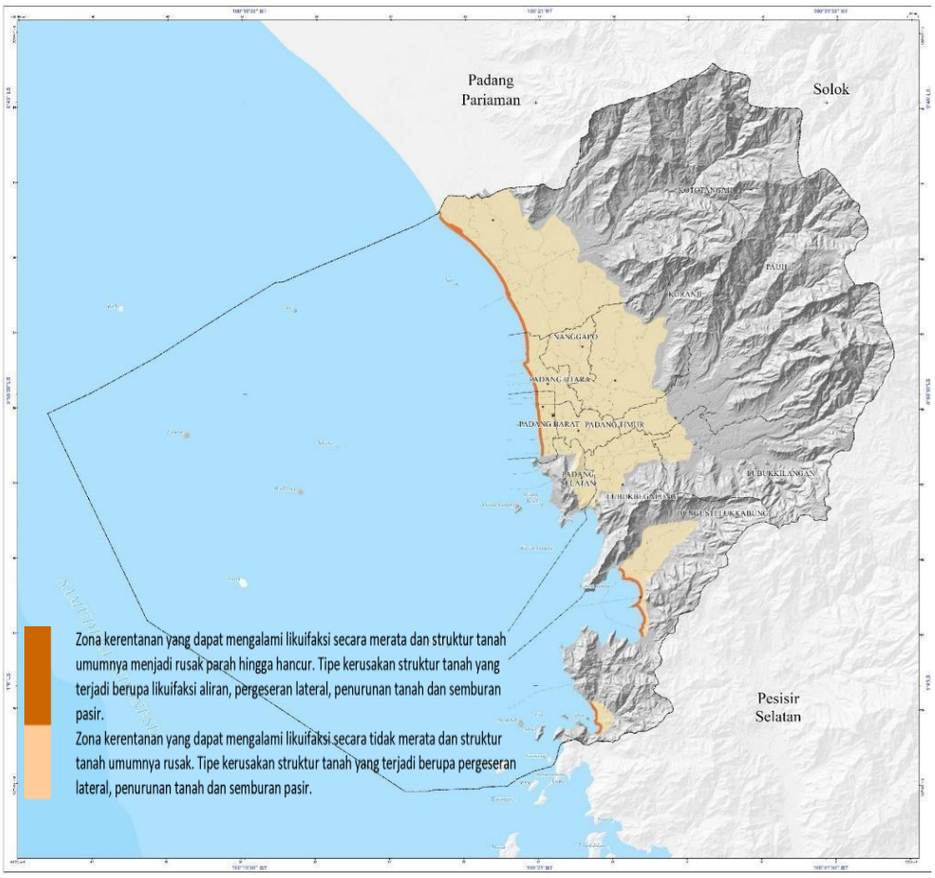

Sumber: RDTR Kota Padang Tahun 2023 - 2043

Tabel II- 33 Wilayah Rawan Bencana Likuifaksi Kota Padang

Kecamatan	Kelurahan	Sedang (Ha)	Tinggi (Ha)
Bungus Teluk Kabung	Bungus Barat	400,82	11,87
	Bungus Selatan	114,74	48,79
	Bungus Timur	494,98	-
	Teluk Kabung Selatan	157,76	53,36

Kecamatan	Kelurahan	Sedang (Ha)	Tinggi (Ha)
	Teluk Kabung Tengah	4,90	7,47
	Teluk Kabung Utara	67,11	60,19
Bungus Teluk Kabung Total		1.240,30	181,68
Koto Tangah	Aie Pacah	486,96	-
	Balai Gadang	502,96	-
	Batang Kabung	240,34	-
	Batipuh Panjang	867,14	-
	Bungo Pasang	387,84	22,70
	Dadok Tunggul Hitam	366,67	-
	Koto Panjang Ikua Koto	641,98	-
	Koto Pulai	281,56	-
	Lubuk Buaya	483,16	-
	Lubuk Minturun	231,15	-
	Padang Sarai	510,15	3,75
	Parupuk Tabing	447,88	41,47
	Pasir Nan Tigo	165,46	176,14
Koto Tangah Total		5.613,26	244,05
Kuranji	Ampang	132,81	-
	Anduring	114,60	-
	Gunung Sarik	579,54	-
	Kalumbuk	252,98	-
	Korong Gadang	445,07	-
	Kuranji	487,37	-

Kecamatan	Kelurahan	Sedang (Ha)	Tinggi (Ha)
	Lubuk Lintah	189,66	-
	Pasar Ambacang	337,88	-
	Sungai Sapih	570,08	-
Kuranji Total		3.110,01	-
Lubuk Begalung	Banuaran Nan Duapuluh	70,11	-
	Batung Taba Nan Duapuluh	149,63	-
	Cangkeh Nan Duapuluh	76,05	-
	Gates Nan Duapuluh	11,86	-
	Gurun Laweh Nan Duapuluh	64,61	-
	Kampung Baru Nan Duapuluh	47,60	-
	Kampung Jua Nan Duapuluh	99,78	-
	Koto Baru Nan Duapuluh	61,05	-
	Lubuk Begalung Nan Duapuluh	108,65	-
	Pangambiran Ampalu Nan Duapuluh	172,40	-
	Pampangan Nan Duapuluh	104,98	-
	Paraklaweh Pulau Aie Nan Duapuluh	93,71	-
	Tanah Sirah Nan Duapuluh	89,49	-
	Tanjung Aua	12,66	-
	Tanjung Sabapitameh Nan Duapuluh	111,31	-
Lubuk Begalung Total		1.273,91	-
Lubuk Kilangan	Bandar Buat	116,77	-

Kecamatan	Kelurahan	Sedang (Ha)	Tinggi (Ha)
	Beringin	3,40	-
	Koto Lalang	211,04	-
	Tarantang	87,93	-
Lubuk Kilangan Total		419,14	-
Nanggalo	Gurun Laweh	132,43	-
	Kampung Lapai Baru	117,40	-
	Kampung Olo	98,75	-
	Kurao Pagang	300,28	-
	Surau Gadang	201,21	-
	Tabing Banda Gadang	104,21	-
Nanggalo Total		954,28	-
Padang Barat	Belakang Tangsi	41,55	19,37
	Berok Nipah	8,12	3,35
	Flamboyan Baru	41,84	9,25
	Kampung Jao	66,36	-
	Kampung Pondok	32,86	-
	Olo	32,95	19,15
	Padang Pasir	62,54	-
	Purus	25,88	28,25
	Rimbo Kaluang	52,57	9,59
	Ujung Gurun	39,63	-
Padang Barat Total		404,30	88,96
Padang Selatan	Alang Laweh	22,08	-

Kecamatan	Kelurahan	Sedang (Ha)	Tinggi (Ha)
	Batang Arau	0,13	-
	Belakang Pondok	33,09	-
	Mata Air	229,76	-
	Pasa Gadang	26,47	-
	Ranah Parak Rumbio	23,44	-
	Rawang	137,72	-
	Seberang Padang	72,40	-
	Seberang Palinggam	27,46	-
	Teluk Bayur	16,21	-
Padang Selatan Total		588,77	-
Padang Timur	Andalas	123,38	-
	Ganting Parak Gadang	81,99	-
	Jati	90,85	-
	Jati Baru	76,52	-
	Kubu Marapalam	76,08	-
	Kubu Parakkarakah	228,74	-
	Parak Gadang Timur	74,51	-
	Sawahan	53,89	-
	Sawahan Timur	72,02	-
	Simpang Haru	40,56	-
Padang Timur Total		918,53	-
Padang Utara	Air Tawar Barat	107,54	40,61
	Air Tawar Timur	68,11	-

Kecamatan	Kelurahan	Sedang (Ha)	Tinggi (Ha)
	Alai Parak Kopi	162,30	-
	Gunung Pangilun	182,82	-
	Lolong Belanti	102,09	13,14
	Ulak Karang Selatan	75,60	14,93
	Ulak Karang Utara	63,15	22,07
Padang Utara Total		761,61	90,75
Pauh	Binuang Kampung Dalam	150,22	-
	Cupak Tangah	56,08	-
	Kapala Koto	7,03	-
	Lambung Bukit	0,65	-
	Piaitangah	238,55	-
	Pisang	183,53	-
Pauh Total		636,08	-
KOTA PADANG TOTAL		**15.920,18**	**605,44**

Sumber: RDTR Kota Padang Tahun 2023 - 2043
Keterangan : - (data = 0)

d. Longsoran Lahan

Sebagian besar daerah Kota Padang berada pada lokasi yang memiliki tingkat bahaya longsoran pada karakteristik lahan dengan kemiringan lahan berkisar 23 – 99%. Bentuk lereng umumnya tidak beraturan *(irreguler)*, dengan panjang lereng yang bervariasi, mulai dari 12 hingga 150 meter. Ketinggian daerah yang sebagian besar berupa kompleks perbukitan vulkanik, dan kompleks pegunungan vulkanik dengan ketinggian relief berkisar antara 500 -1.000 meter dari permukaan laut. Tingkat bahaya longsoran lahan tinggi hampir terdapat pada setiap Kecamatan di Kota Padang, kecuali Kecamatan Padang Utara dan Padang Timur yang daerahnya cenderung datar sehingga diindikasikan tingkat bahaya longsoran lahan rendah pada daerah tersebut. Tingkat risiko longsoran lahan tinggi yang memiliki luasan terbesar terdapat pada Kecamatan Padang Selatan dengan luas 16 Ha.

e. Abrasi Pantai.

Abrasi pantai merupakan peristiwa alam yang mengakibatkan terjadinya pengikisan pada pantai sehingga luas daerah pantai menjadi berkurang. Abrasi pantai banyak terjadi pada pantai di Kota Padang karena pantai-pantai tersebut berhubungan langsung dengan Samudera Hindia, terkecuali Pantai Bungus, karena pantai ini terletak pada daerah teluk, maka kecepatan arus sepanjang pantainya cenderung menjadi rendah. Salah satu faktor penyebab tingginya laju abrasi pantai, khususnya di daerah Pasir Parupuk dan Pantai Air Manis.

f. Banjir.

Gambar II- 28 Wilayah Rawan Banjir Kota Padang Menurut Kelurahan

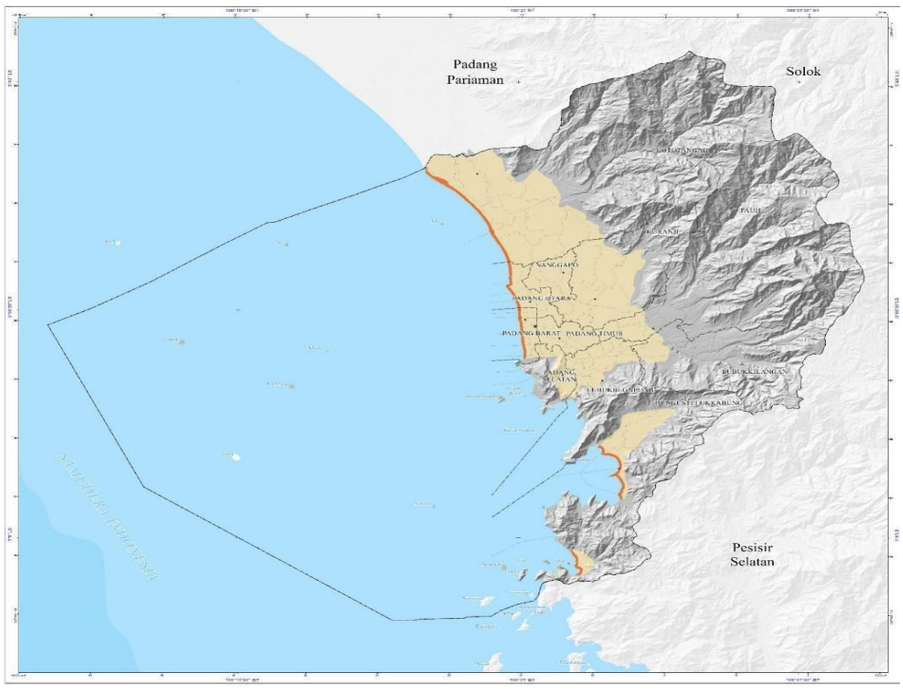

Sumber: RDTR Kota Padang Tahun 2023 - 2043

Kota Padang berpotensi mengalami banjir ringan dan sedang. Banjir ringan sering terjadi pada musim hujan. Banjir sedang sering terjadi pada wilayah bagian timur yang merupakan daerah perbukitan yang dilalui oleh sungai seperti Batang Bungus, Batang Arau, Batang Kuranji dan Batang Air Dingin serta masih terdapat 18 sungai lainnya yang mempunyai aliran permanen sepanjang tahun. Selain itu, terdapat beberapa wilayah di Kota Padang yang memiliki bentangan wilayah landai sehingga ketika durasi hujan cukup tinggi dan terjadi pasang laut tinggi, akan mengakibatkan banjir dan genangan air

Kota Padang merupakan daerah yang mempunyai curah hujan yang relatif tinggi dengan rata-rata curah hujan 354,75 mm per bulan dan rata-rata hari hujan 19 hari per bulan, sehingga terjadi luapan sungai dan banjir bandang. Tingkat bahaya banjir ringan bersifat genangan terbesar terdapat pada Kecamatan Koto Tangah dengan luas daerah 790 ha umumnya disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan

kejadian pasang surut air laut. Kejadian banjir di Kota Padang sering bertepatan dengan kejadian pasang naik, sehingga air yang akan mengalir ke laut terhambat karena bertemunya dua massa air, yaitu massa air tawar dan massa air laut ini yang sering menyebabkan banjir ringan yang bersifat genangan.

Kelurahan rawan banjir paling luas berada di Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tangah, yaitu 797,81 hektar sedangkan kelurahan rawan bencana banjir paling kecil adalah Kelurahan Alang Laweh Kecamatan Padang Selatan yaitu dengan luas 0,17 hektar dan Kelurahan Pasir Nan Tigo Kecamatan Kato Tangah dengan luas 0,79 hektar. Adapun sebaran wilayah rawan banjir dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II- 34 Wilayah Rawan Banjir di Kota Padang Tahun 2021

Kecamatan	Kelurahan	Rawan Banjir (Ha)
Bungus Teluk Kabung	Bungus Barat	275,77
	Bungus Selatan	68,04
	Bungus Timur	122,97
	Teluk Kabung Tengah	59,96
	Teluk Kabung Utara	103,47
Bungus Teluk Kabung Total		630,21
Koto Tangah	Aie Pacah	238,05
	Balai Gadang	178,86
	Batan Gkabung	102,01
	Batipuh Panjang	797,81
	Bungo Pasang	213,70
	Dadok Tunggul Hitam	271,02
	Koto Panjang Ikua Koto	125,99
	Koto Pulai	225,91
	Lubuk Buaya	63,91
	Lubuk Minturun	135,10

Kecamatan	Kelurahan	Rawan Banjir (Ha)
	Padang Sarai	118,85
	Parupuk Tabing	34,51
	Pasir Nan Tigo	0,79
Koto Tangah Total		2.506,52
Kuranji	Ampang	68,97
	Anduring	11,63
	Gunung Sarik	343,36
	Kalumbuk	108,67
	Kuranji	25,66
	Lubuk Lintah	14,40
	Sungai Sapih	519,40
Kuranji Total		1.092,09
Lubuk Begalung	Gates Nan Duapuluh	28,82
	Pagambiran Ampalu Nan Duapuluh	71,91
	Pampangan Nan Duapuluh	89,83
Lubuk Begalung Total		190,56
Nanggalo	Gurun Laweh	121,79
	Kampung Lapai Baru	24,39
	Kampung Olo	29,17
	Kurao Pagang	246,40
	Surau Gadang	130,14
	Tabing Banda Gadang	97,38
Nanggalo Total		649,27

Kecamatan	Kelurahan	Rawan Banjir (Ha)
Padang Selatan	Air Manis	2,65
	Alang Laweh	0,17
	Mata Air	67,84
	Pasa Gadang	19,49
	Ranah Parak Rumbio	7,91
	Rawang	133,80
	Seberang Padang	58,75
	Seberang Palinggam	22,30
	Teluk Bayur	28,37
Padang Selatan Total		341,29
Padang Timur	Andalas	43,77
	Ganting Parak Gadang	54,75
	Jati	90,85
	Jati Baru	13,36
	Sawahan	17,24
	Sawahan Timur	71,15
	Simpang Haru	7,84
Padang Timur Total		298,96
Padang Utara	Alai Parak Kopi	127,25
	Gunung Pangilun	19,31
Padang Utara Total		146,56
KOTA PADANG TOTAL		5.855,47

Sumber: RDTR Kota Padang Tahun 2023 - 2043

Gambar II- 29 Peta Daya dukung dan Daya Tampung Lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Kota Padang

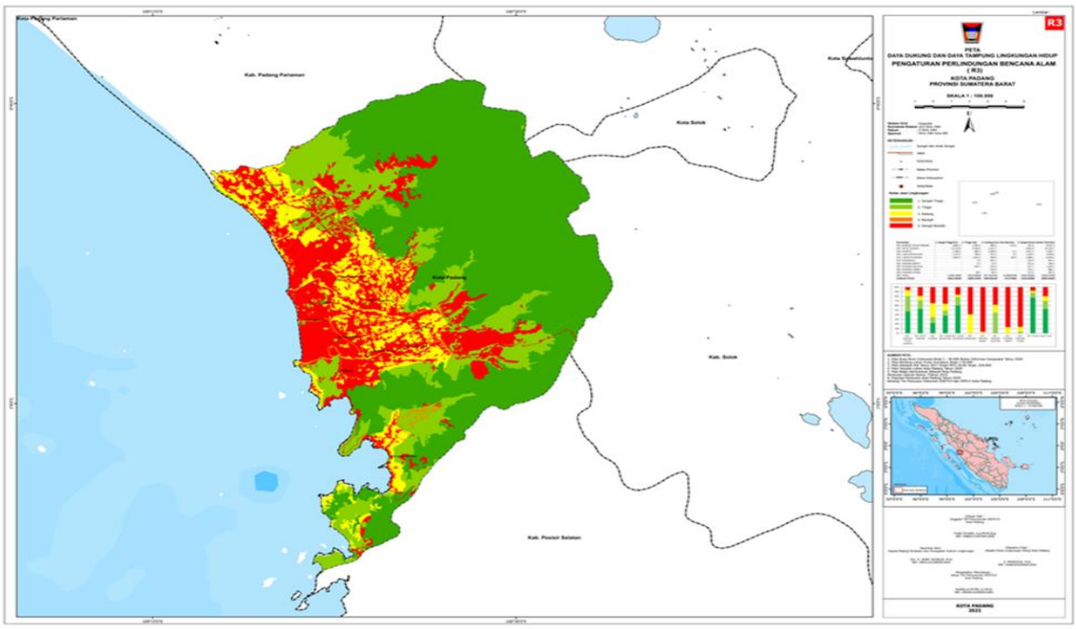

Sumber: KLHS KLHS RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029

Berdasarkan Peta Daya dukung dan Daya Tampung Lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Kota Padang, bahwa sebagian besar wilayah kota Padang memiliki daya dukung dan daya tampung yang tinggi atas jasa perlindungan dan pencegahan bencana alam. Akan tetapi, bagian wilayah yang jasa perlindungan terhadap bencana kategori tinggi tersebut adalah berada pada kawasan lindung, sementara pada kawasan budidaya, terutama pada bagian Timur yang memiliki kemiringan lahan yang tinggi, jasa perlindungan dan pencegahan bencana adalah sedang dan rendah. Untuk mengurangi resiko banjir di Kota Padang diperlukan alat yang bisa memantau ketinggian muka air sungai secara cepat dan akurat (real-time) sehingga dampak akibat banjir dapat diminimalisir. Pada tahun 2025 Kota Padang berencana menyediakan peralatan pemantau yaitu Patriot Net yang berfungsi sebagai sensor penanda terjadinya bencana banjir dipasang di daerah-daerah aliran sungai beresiko tinggi.

2.1.1.7 Demografi

Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Kota Padang pada tahun 2024 mencapai 954.177 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 1,26%. Jumlah penduduk tersebut mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang berada di angka 942.938 jiwa. Sementara itu, laju pertumbuhan penduduk Kota Padang tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 1,29% yang merupakan laju pertumbuhan tertinggi selama tahun 2020-2024. Perkembangan jumlah penduduk dan laju pertumbuhannya ditunjukkan pada gambar berikut:

Gambar II- 30 Jumlah Penduduk (jiwa) dan Laju pertumbuhan Penduduk (%) Kota Padang, Tahun 2020-2024 (jiwa)

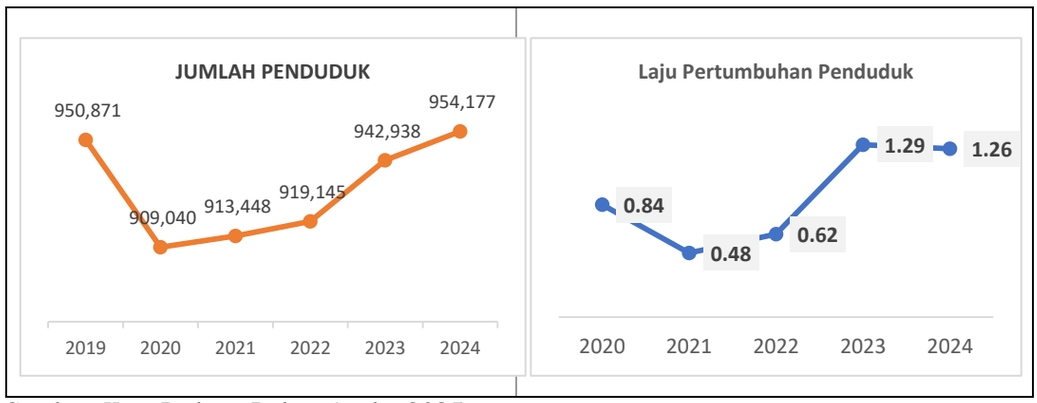

Sumber: Kota Padang Dalam Angka,2025

Perkembangan penduduk dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian dan migrasi. Jumlah penduduk Kota Padang berdasarkan kecamatan dan kepadatan penduduk secara rinci disajikan pada tabel berikut:

Tabel II- 35 Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kota Padang Tahun 2024

No	Kecamatan	Luas Wilayah km²	Jumlah Penduduk (jiwa)	Persentase	Kepadatan Penduduk (jiwa/km²)
1	Bungus Teluk Kabung	100,78	29.251	3,07	288
2	Lubuk Kilangan	85,99	61.655	6,46	704
3	Lubuk Begalung	30,91	130.410	13,67	4151
4	Padang Selatan	10,03	62.758	6,58	6208
5	Padang Timur	8,15	78.591	8,24	9584
6	Padang Barat	7,00	43.263	4,53	6165
7	Padang Utara	8,08	55.564	5,82	6859
8	Nanggalo	8,07	59.450	6,23	7333
9	Kuranji	57,41	155.485	16,30	2665
10	Pauh	146,29	63.886	6,70	434
11	Koto Tangah	232,25	213.854	22,41	906
	Total	**694,96**	**954.177**	**100**	

Sumber: Kota Padang Dalam Angka, 2025

Tabel diatas memperlihatkan bahwa jumlah dan kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Koto Tangah dan terendah di Kecamatan Bungus Teluk Kabung.

Berdasarkan jenis kelamin, pada tahun 2024 total penduduk perempuan sebesar 475.604 jiwa atau 49,85 persen dan total penduduk laki-laki sebesar 478.573 jiwa atau 50,15 persen. Data BPS menunjukkan, jumlah penduduk terbanyak berada pada kelompok umur 0-4 tahun di ikuti oleh 30 - 34 tahun yang merupakan kelompok umur produktif. Rincian komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kelompok usia dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II- 36 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kota Padang (ribu jiwa) Tahun 2024

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 - 4	42,49	40,77	83,26
5 - 9	38,48	36,51	74,98
10 - 14	37.41	35,84	73,25
15 - 19	38,37	35,73	74,10
20 - 24	37,40	34,88	72,29
25 - 29	39,66	37,95	77,61
30 - 34	40,45	39,87	80,32
35 - 39	38,18	37,10	75,28
40 - 44	34,09	33,12	67,21
45 - 49	30,16	30,26	60,42
50 - 54	27,29	28,77	56,06
55 - 59	24,11	26,28	50,39
60 - 64	19,53	21,23	40,76
65 - 69	14,86	16,21	31,07
70 - 74	9,30	10,85	20,15
75 +	6,79	10,23	17,02

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Jumlah	478,57	475,60	954.18

Sumber: Kota Padang Dalam Angka, 2025

Data kependudukan memiliki peran yang sangat penting untuk pembangunan. Perencanaan pembangunan perlu ditunjang dengan informasi terkait besaran dan komposisi kependudukan yang lengkap dan berkesinambungan. Hasil sensus, survei, dan data administratif menyediakan informasi penduduk untuk kondisi saat pendataan tersebut dilakukan. Namun, penyusunan perencanaan dan kebijakan sesuai dinamika waktu di masa mendatang membutuhkan informasi proyeksi penduduk di masa depan.

Proyeksi penduduk akan membantu pembuat kebijakan untuk memonitor dan mengevaluasi program, mengidentifikasi kesenjangan dalam implementasi, serta merancang kebijakan selanjutnya. Komponen laju pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan (migrasi). Pembentukan asumsi untuk ketiga komponen tersebut dilakukan menggunakan data-data yang menggambarkan tren di masa lampau, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan hubungannya satu sama lain. Penerapan asumsi yang digunakan akan menentukan hasil proyeksi jumlah dan struktur umur penduduk di masa depan. Pertumbuhan penduduk Kota Padang tahun adalah sebesar 0,23 persen per tahun. Proyeksi pertumbuhan penduduk Kota Padang selengkapnya disajikan pada Tabel berikut.

Tabel II- 37 Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Padang Tahun 2025 – 2029

Jumlah Penduduk Kota Padang Tahun 2024 (Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
	2025	2026	2027	2028	2029
954.177	956.371	958.570	960.774	962.983	965.197

Sumber : BPS Kota Padang (data diolah), 2025

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama dari pembangunan suatu wilayah. Kesejahteraan masyarakat pada dasarnya merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas. Indikasi capaian pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Padang diperlihatkan melalui indikator berikut :

2.1.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu tolok ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Indikator pertumbuhan ekonomi adalah nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan indikator makro ekonomi daerah. PDRB merupakan jumlah nilai tambah bruto yang timbul akibat adanya berbagai kegiatan ekonomi dan proses produksi yang tercipta di suatu daerah dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi dimiliki daerah tersebut atau bukan.

Pertumbuhan ekonomi Kota Padang dalam kurun waktu 2020-2024 mengalami peningkatan yang cukup baik. Kondisi ini juga terjadi pada Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, yang menandakan kondisi perekonomian global maupun nasional terkontraksi membaik. Pertumbuhan ekonomi Kota Padang pada Tahun 2024 berada di angka 4,65 % atau naik sebesar 0,11 % dibandingkan dengan angka di tahun 2023 yang lalu. Berikut disajikan Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Nasional Tahun 2020 - 2024:

Gambar II- 31 Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Nasional Tahun 2020-2024

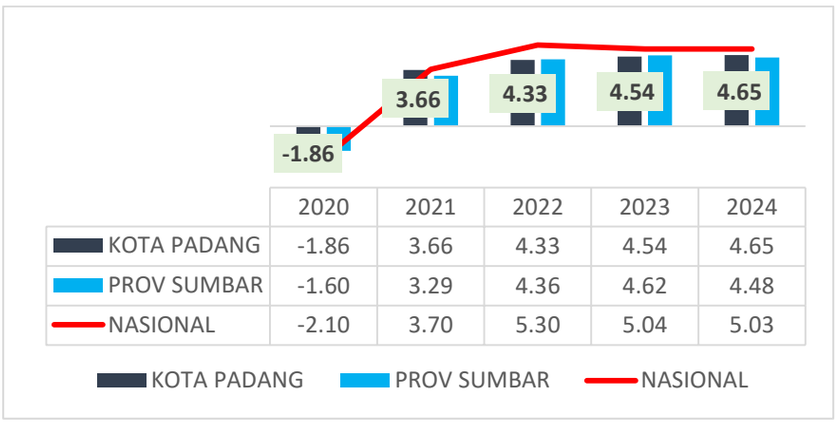

	2020	2021	2022	2023	2024
KOTA PADANG	-1.86	3.66	4.33	4.54	4.65
PROV SUMBAR	-1.60	3.29	4.36	4.62	4.48
NASIONAL	-2.10	3.70	5.30	5.04	5.03

Sumber: Kota Padang Dalam Angka 2025

Pertumbuhan ekonomi dihitung menggunakan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dengan tahun dasar tahun 2010. Pertumbuhan ekonomi Kota Padang tahun 2024 didukung oleh empat kategori utama, yaitu 1) Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib (7,94%), 2) Jasa lainnya (7,56%), 3) Real estat (6,09%) dan 4) Jasa keuangan dan asuransi (5,59%). Empat kategori ini memiliki peranan penting dan sangat berpengaruh besar pada pertumbuhan ekonomi Kota Padang. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Padang Menurut Lapangan Usaha dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel II- 38 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Padang Menurut Lapangan Usaha (persen), 2020-2024

Kode	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,51	1,34	2,38	3,93	2,70
B	Pertambangan dan Penggalian	-1,19	3,84	3,66	4,44	4,30
C	Industri Pengolahan	-1,42	1,06	0,66	0,74	1,78
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-7,7	0,72	3,55	4,61	4,64
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,02	4,74	1,77	3,05	2,90
F	Konstruksi	-493	1,27	4,81	6,68	4,40
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-2,09	6,32	7	4,98	4,44
H	Transportasi dan Pergudangan	-1,02	3,13	3,35	4,90	5,54
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-21,15	6,03	15,64	8,54	4,08
J	Informasi dan Komunikasi	11,66	6,03	7,09	7,55	5,33
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,99	9,65	3,39	0,55	5,59
L	*Real Estate*	0,2	2,39	5,73	6,51	6,09
M,N	Jasa Perusahaan	-4,12	0,99	6,39	6,47	5,24
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-1,9	0,57	-0,95	2,65	7,94
P	Jasa Pendidikan	7,87	1,66	2,67	1,72	3,24
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11,04	5,83	4,5	7,15	5,27
R,S,T, U	Jasa Lainnya	-9,83	7,22	12,08	7,56	7,56

Kode	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
Produk Domestik Regional Bruto		**6,06**	**5,65**	**-1,86**	**4,54**	**4,65**

Sumber: Kota Padang Dalam Angka 2025

Jika dibandingkan dengan capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024, Kota Padang berada pada posisi pertama dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Provinsi Sumatera Barat. Capaian ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya yakni urutan ke delapan belas akibat pandemi Covid-19 di tahun 2020, kembali membaik dan berada di posisi ketiga pada tahun 2021, posisi ke delapan pada tahun 2022 hingga menempati urutan ke tiga belas di tahun 2023.

Berikut perbandingan pertumbuhan PDRB Harga Konstan 2010 menurut lapangan usaha kabupaten/kota:

Tabel II- 39 Perbandingan Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, 2020-2024

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Kep. Mentawai	-1,85	2,89	4,94	4,04	3,97
Kabupaten Pesisir Selatan	-1,1	3,37	4,02	4,19	3,84
Kabupaten Solok	-1,12	3,32	4,31	4,36	3,91
Kabupaten Sijunjung	-1,1	3,15	3,95	4,26	3,89
Kabupaten Tanah Datar	-1,13	3,3	4,2	4,44	3,85
Kabupaten Padang Pariaman	-10,46	2,18	6,87	5,46	4,57
Kabupaten Agam	-1,38	3,7	4,21	4,52	4,12
Kabupaten Lima Puluh Kota	-1,16	3,33	4,04	4,55	4,03
Kaupaten Pasaman	-0,87	3,39	4,09	4,41	3,95
Kabupaten Solok Selatan	-1,24	3,35	4,02	4,57	4,09
Kabupaten Dharmasraya	-1,39	3,42	4,28	4,35	3,86
Kabupaten Pasaman Barat	-1,34	3,75	4,17	4,33	4,08
Kota Padang	**-1,86**	**3,66**	**4,33**	**4,54**	**4,65**

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Solok	-1,42	3,56	4,6	4,81	4,55
Kota Sawahlunto	-1,27	2,49	3,98	4,46	4,02
Kota Padang Panjang	-1,44	3,46	4,39	4,84	4,52
Kota Bukittinggi	-1,74	3,61	4,68	4,79	4,52
Kota Payakumbuh	-1,66	3,58	4,52	4,70	4,53
Kota Pariaman	-1,32	3,53	4,55	4,79	4,51
SUMATERA BARAT	-1,61	3,29	4,36	4,62	4,36

Sumber: Kota Padang Dalam Angka 2025

2.1.2.1.2 PDRB Per Kapita

PDRB perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. PDRB perkapita ini bisa diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan. Data yang tersaji merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah. Besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi penduduk di suatu wilayah. Nilai PDRB per Kapita Kota Padang tahun 2020-2024 dapat di lihat dari gambar berikut:

Gambar II- 32 PDRB Per Kapita Kota Padang dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024

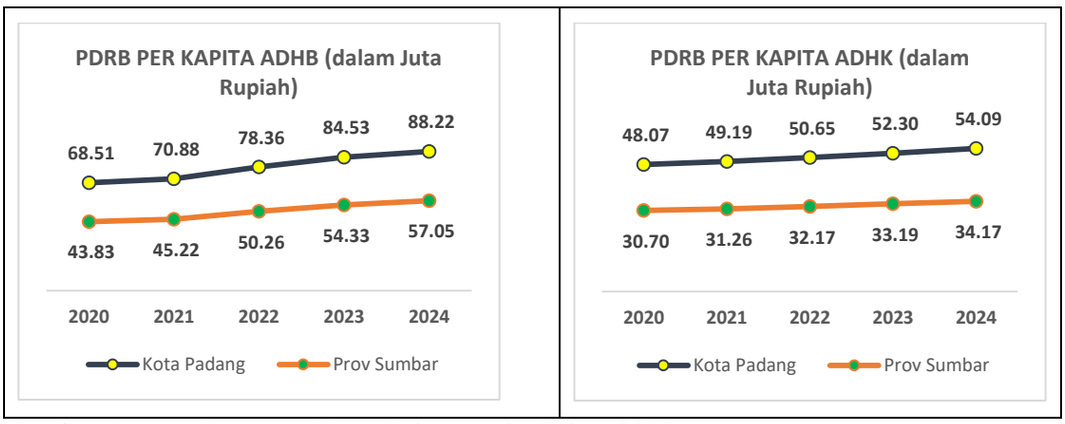

Sumber: Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2025

Nilai PDRB per kapita Kota Padang ADHB dan ADHK sejak tahun 2020 hingga 2024 selalu berada di atas nilai PDRB per kapita dari Provinsi Sumatera Barat. Kenaikan PDRB per kapita ADHK tidak setinggi kenaikan yang terjadi pada PDRB per kapita atas dasar harga berlaku, karena sudah tidak ada pengaruh inflasi.

2.1.2.1.3 Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah global. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach) untuk mengukur kemiskinan. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Persentase Persentase penduduk miskin Kota Padang meningkat cukup signifikan di tahun 2021 menjadi 4,94 dari angka 4,4 pada tahun sebelumnya disebabkan oleh pandemi Covid-19 dimana banyak dari masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan bahkan kehilangan mata pencarian.

Persentase penduduk miskin Kota Padang tahun 2021 yaitu 4,94% menjadi 4,06% di tahun 2024. Posisi Kota Padang masih berada di bawah nilai dari Provinsi dan Nasional. Berikut perbandingan persentase penduduk miskin Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional tahun 2020-2024:

Gambar II- 33 Persentase Penduduk Miskin Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024

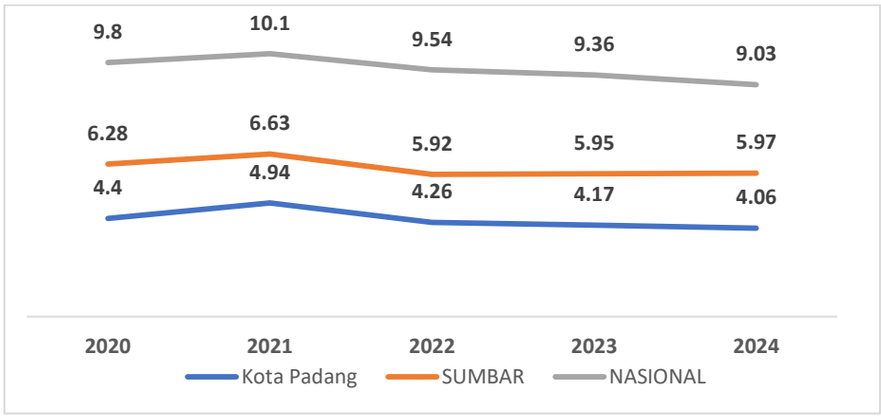

Sumber: Kota Padang Dalam Angka 2025

Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2020-2024, jumlah penduduk miskin di Kota Padang menempati urutan teratas. Hal ini juga disebabkan oleh jumlah penduduk miskin Kota Padang sebanyak 41,40 ribu jiwa di tahun 2024.

Tabel II- 40 Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kepulauan Mentawai	13,37	14,31	13,74	13,76	14,19
Pesisir Selatan	35,46	37,41	33,78	35,09	36,05
Solok	29,28	30,36	27,16	27,33	28,18
Sijunjung	29,28	16,81	15,07	15,02	14,99
Tanah Datar	15,34	15,89	14,91	14,56	15
Padang Pariaman	29,98	30,41	26,44	26,93	26,76
Agam	33,31	34,26	31,33	33,41	34,82
Lima Puluh Kota	26,43	28,51	26,00	27,02	27,72
Pasaman	20,29	21,57	19,94	19,99	20,01
Solok Selatan	12,39	13,41	11,81	11,91	12,33
Dharmasraya	15,7	17,6	15,08	15,49	15,25

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pasaman Barat	31,64	34,97	32,91	33,52	34,6
Kota Padang	**42,17**	**48,44**	**42,37**	**41,97**	**41,4**
Kota Solok	1,99	2,31	2,28	2,35	2,4
Kota Sawah Lunto	1,36	1,52	1,47	1,47	1,52
Kota Padang Panjang	2,84	3,28	2,89	2,98	3,06
Kota Bukittinggi	6,01	6,98	6,16	5,78	5,82
Kota Payakumbuh	7,74	8,66	8,08	7,88	7,62
Kota Pariaman	3,66	3,99	3,80	3,91	4,01
Provinsi Sumatera Barat	344,23	370,67	335,21	340,37	345,73

Sumber: Kota Padang Dalam Angka 2025

2.1.2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT mengindikasikan luas kesempatan kerja yang ada di wilayah tersebut. Semakin tinggi tingkat pengangguran terbuka di suatu wilayah maka dapat mengindikasikan bahwa semakin sempitnya kesempatan kerja yang ada di wilayah tersebut.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di angka 13,64 tahun 2020 akibat covid 19 sehingga banyak usaha yang tutup yang berujung terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). TPT mulai menurun menjadi 13,37 di tahun 2021 disebabkan antara lain oleh pelonggaran PPKM, adaptasi kebiasaan baru, kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota terhadap pemulihan ekonomi daerah. TPT dari tahun 2022-2024 konsisten mengalami penurunan menjadi 9,88 di tahun 2024. TPT Kota Padang dalam lima tahun terakhir masih berada di atas tren TPT Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Berikut grafik data TPT Kota Padang Tahun 2020-2024:

Gambar II- 34 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024

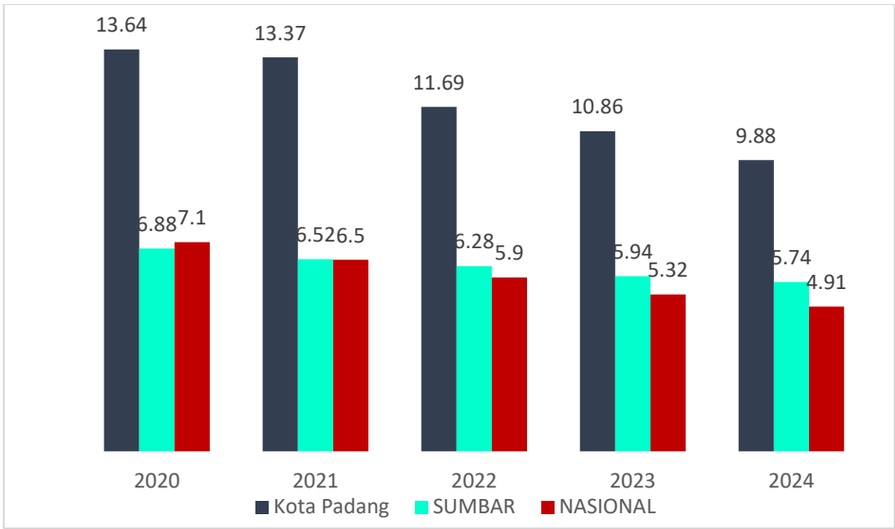

Sumber: Kota Padang Dalam Angka 2025

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian

Tren TPAK Kota Padang tahun 2020-2024 fluktuatif. Tahun 2021 berada pada angka 63,78 dan mengalami penurunan menjadi 62,81 di tahun 2022. Turunnya angka TPAK ini terjadi karena bertambahnya penduduk usia kerja yang masuk pada kelompok bukan angkatan kerja, utamanya semakin bertambahnya penduduk usia kerja yang bersekolah/mahasiswa dan mengurus rumah tangga. Data TPAK Kota Padang Tahun 2020-2024 disajikan pada gambar berikut:

Gambar II- 35 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024

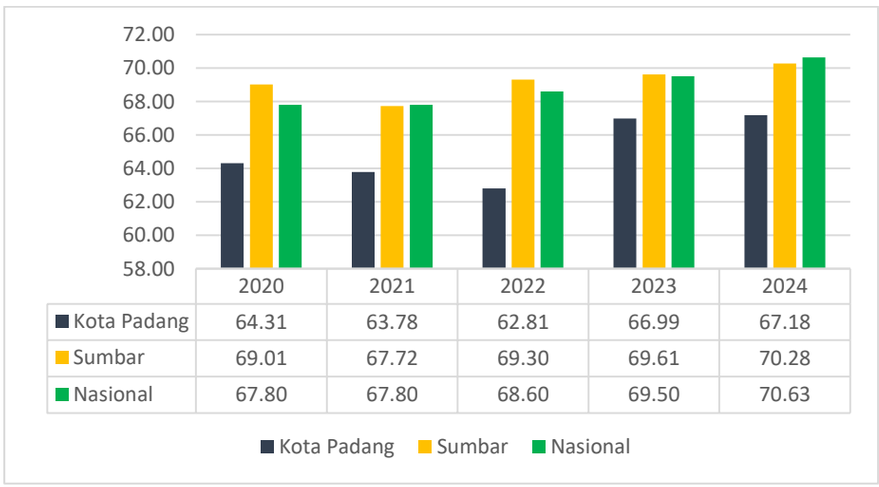

	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Padang	64.31	63.78	62.81	66.99	67.18
Sumbar	69.01	67.72	69.30	69.61	70.28
Nasional	67.80	67.80	68.60	69.50	70.63

Sumber: Kota Padang Dalam Angka 2025

2.1.2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan kondisi penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Berdasarkan konsep Pembangunan Manusia, PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), menetapkan peringkat kinerja pembangunan manusia pada skala 0,0 – 100,0 dengan kategori sebagai berikut:

Tinggi : IPM lebih dari 80,0

Menengah Atas : IPM antara 66,0 – 79,9

Menengah Bawah : IPM antara 50,0 – 65,9

Rendah : IPM kurang dari 50,0

Perkembangan nilai IPM Kota Padang, dibandingkan dengan kondisi Provinsi Sumatera Barat dan Indonesia dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar II- 36 Nilai IPM Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Indonesia Tahun 2020-2024

Sumber: Kota Padang Dalam Angka 2025

Pencapaian IPM Kota Padang dalam 5 tahun terakhir masuk ke dalam kategori Tinggi dengan angka capaian > 80. Pencapaian ini berada di atas pencapaian Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Jika dibandingkan nilai IPM Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, nilai IPM Kota Padang tertinggi sehingga berada di urutan teratas dari 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

Tabel II- 41 Perbandingan nilai IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024

NO	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kepulauan Mentawai	61,09	61,35	62,19	63,13	66,67
2	Pesisir Selatan	69,9	70,03	70,84	71,44	72,87
3	Solok	69,08	69,24	70,02	70,63	72,29
4	Sijunjung	67,74	67,86	68,69	69,65	72,88
5	Tanah Datar	72,33	72,46	73,29	73,98	76,49
6	Padang Pariaman	70,61	70,76	71,63	72,61	74,9
7	Agam	72,46	72,57	73,29	73,98	75,08
8	Lima Puluh Kota	69,47	69,68	70,28	70,7	72,51
9	Pasaman	66,64	66,77	67,41	68,13	70,61
10	Solok Selatan	69,04	69,23	69,71	70,58	73,17
11	Dharmasraya	71,51	71,76	72,3	73,04	74,82
12	Pasaman Barat	68,49	68,76	69,57	70,19	72,78
13	Kota Padang	82,82	82,9	83,29	83,58	84,38
14	Kota Solok	78,29	78,41	79,23	79,58	80,06
15	Kota Sawahlunto	72,64	72,88	73,73	74,42	76,68
16	Kota Padang Panjang	77,93	77,97	78,78	79,26	80,6
17	Kota Bukittinggi	80,58	80,7	81,42	81,78	82,61
18	Kota Payakumbuh	78,9	79,08	79,53	79,97	80,76
19	Kota Pariaman	76,9	77,07	77,65	78,13	80,49

Sumber: Kota Padang Dalam Angka 2025

2.1.2.1.6 Indeks Gini

Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat tingkat pemerataan pembangunan adalah indeks gini atau Rasio Gini. Rasio Gini adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi

penduduk. Indikator ini mengukur tingkat kesenjangan pendapatan penduduk dalam suatu wilayah dengan nilai 0 (nol) sampai 1 (satu). Jika nilai Rasio Gini suatu daerah mendekati nilai 1 maka pendapatan penduduk daerah yang bersangkutan semakin tidak merata, sedangkan jika nilainya mendekati nol, maka pendapatan penduduk daerah yang bersangkutan semakin merata. Berdasarkan nilai gini rasio, terdapat tiga kelompok ketimpangan yaitu: ketimpangan tinggi jika nilai koefisien gini rasio 0,5 atau lebih, ketimpangan sedang jika nilainya antara 0,30 - 0,49 dan ketimpangan rendah jika kurang dari 0,30.

Berikut perbandingan indeks gini Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir.

Gambar II- 37 Indeks Gini Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020 - 2024

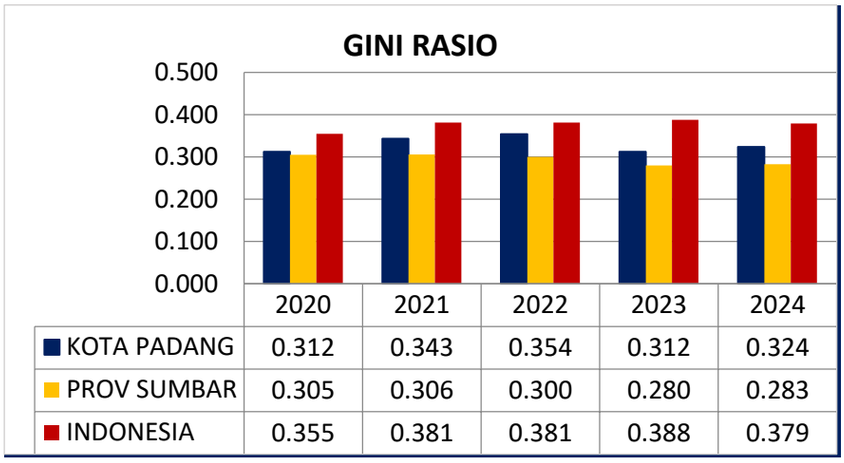

	2020	2021	2022	2023	2024
KOTA PADANG	0.312	0.343	0.354	0.312	0.324
PROV SUMBAR	0.305	0.306	0.300	0.280	0.283
INDONESIA	0.355	0.381	0.381	0.388	0.379

Sumber : Kota Padang Dalam Angka 2025

Nilai Gini Rasio Kota Padang selama kurun waktu 5 tahun berada pada kisaran 0,35 – 0,31 yang tergolong dalam kategori sedang. Oleh karena itu, tingkat pemerataan distribusi pendapatan perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Padang agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi yang dapat berakibat pada kesenjangan sosial dan menimbulkan konflik karena tujuan akhir dari pembangunan ekonomi adalah rakyat sejahtera.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota Padang secara berkelanjutan dan holistik berupa mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata, mengurangi tingkat kemiskinan melalui program sosiak yang efektif, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan untuk memperbaiki IPM, dan mengurangi ketimpangan pendapatan guna menurunkan Indeks Gini. Dengan Strategi yang terintegrasi, diharapkan kesejahteraan masyarakat Kota Padang dapat meningkat secara signifikan.

2.1.2.2 Pendidikan Berkualitas yang Merata

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar untuk menyiapkan sumber daya manusia dari aspek kecerdasan, akhlak, serta keterampilan.

Kemajuan pendidikan bisa dilihat dari berapa banyak anak usia sekolah yang mengikuti pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu hak dasar bagi seluruh masyarakat, dan pelayanan pendidikan merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah daerah. Dengan demikian, capaian kinerja pembangunan bidang pendidikan pada dasarnya merupakan hasil dari kerjasama antara masyarakat dan pemerintah daerah. Semakin baik tingkat pendidikan akan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Semakin baik kualitas SDM menjadikan semakin baik pula kualitas hidup masyarakat. Kesejahteraan sosial di bidang pendidikan diukur melalui beberapa indikator, diantaranya meliputi Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah.

2.1.2.2.1 Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa berbagai usia yang sedang menempuh pendidikan di jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK ini berfungsi untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan sekaligus merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Nilai APK SD/MI dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan kondisi yang cukup baik yaitu berada di angka rata-rata 105,55 sedangkan rata-rata nilai APK SMP/MTS berada pada angka 97,28. Nilai APK SD/MI pada periode tahun 2020-2022 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan nilai di tahun 2023-2024 yang mengalami kenaikan signifikan. Hal ini disebabkan oleh dampak ekonomi dan sosial akibat pandemi Covid-19 sejak tahun 2020. Sementara itu, nilai APK SMP/MTS di tahun 2023-2024 mengalami kenaikan yang besar dibandingkan dengan nilai di tahun 2020-2022.

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI dan SMP/MTS Kota Padang Tahun 2020-2024 disajikan pada gambar berikut:

Gambar II- 38 Angka Partisipasi Kasar Kota Padang Tahun 2020-2024

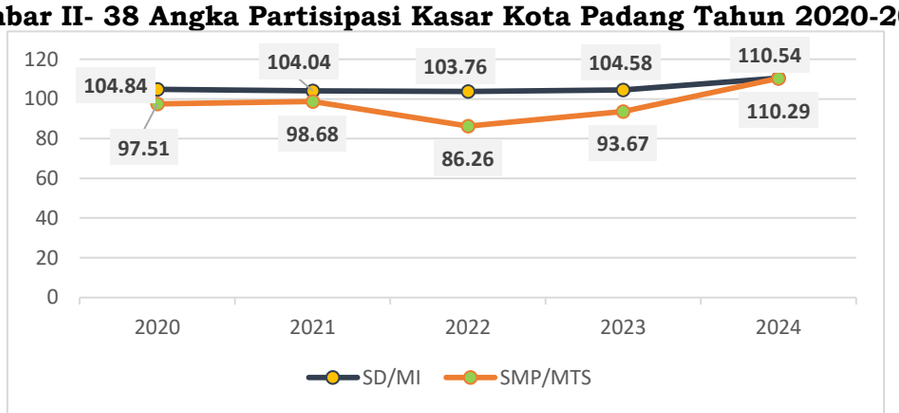

Sumber: Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2025

2.1.2.2.2 Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. APM merupakan indikator yang melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang yang sesuai dengan standar usia siswa di jenjang tersebut. Nilai APM SD/MI dan APM SMP/MTS dalam kurun lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan meskipun nilainya cukup kecil. Rata-rata nilai APM SD/MI sebesar 98,11 dan rata-rata APM SMP/MTS sebesar 81,53.

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI dan SMP/MTS Kota Padang Tahun 2020-2024 secara lengkap disajikan pada gambar berikut:

Gambar II- 39 Angka Partisipasi Murni Kota Padang Tahun 2020-2024

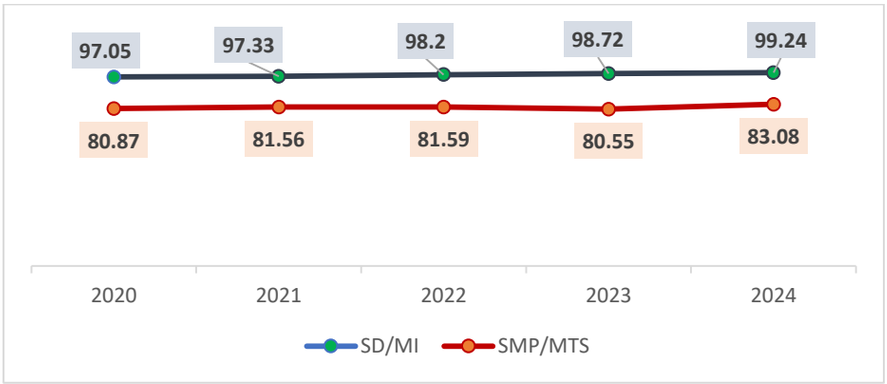

Sumber: Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2025

2.1.2.2.3 Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Semakin tinggi APS berarti semakin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah.

APS Kota Padang pada tingkat umur 7-12 tahun terus mengalami peningkatan dalam periode 2020-2023 dengan nilai tertinggi sebesar 99,97 pada tahun 2022 dan 2023 dan mengalami sedikit penurunan pada tahun 2024 menjadi 99,90. Sementara itu, APS pada tingkat umur 13-15 tahun yang mengalami penurunan pada tahun 2022 yaitu 95,24 mulai kembali naik tahun 2023 dan secara signifikan meningkat di tahun 2024 menjadi 98,02. Berikut disajikan data APS Kota Padang Tahun 2020-2024:

Gambar II- 40 Angka Partisipasi Sekolah Kota Padang Tahun 2020-2024

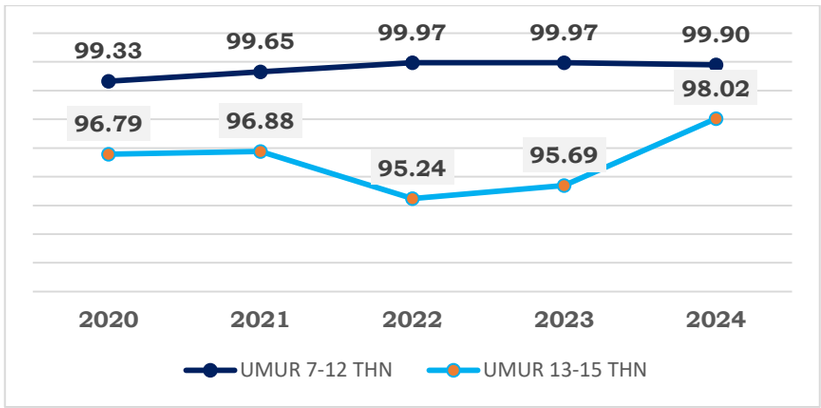

Sumber: Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2025

2.1.2.2.4 Angka Harapan Lama Sekolah

Angka harapan lama sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Data perkembangan angka harapan lama sekolah Kota Padang tahun 2020 –2024 masih berada di atas nilai angka harapan lama sekolah Provinsi Sumatera Barat. Data tersebut menunjukkan bahwa penduduk Kota Padang berharap mengenyam pendidikan sampai dengan memasuki perguruan tinggi.

Gambar II- 41 Harapan Lama Sekolah Kota Padang dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024

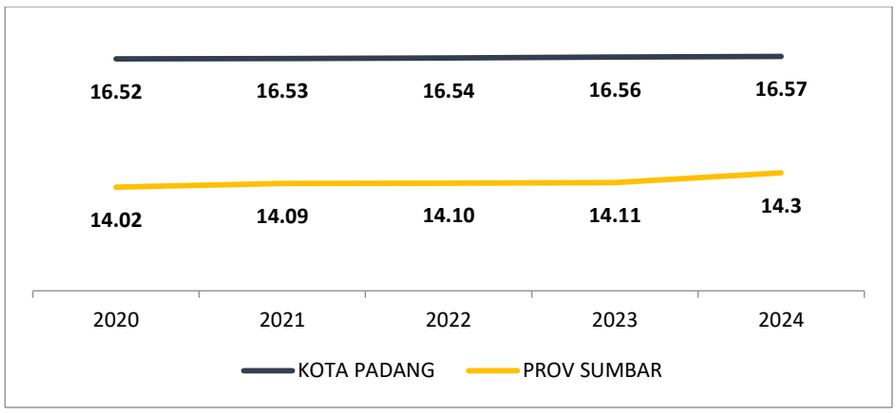

Sumber: Kota Padang Dalam Angka 2025

2.1.2.2.5 Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Rata-rata lama sekolah di Kota Padang terus mengalami peningkatan dari tahun 2020-2024, dari 11,58 pada tahun 2020 menjadi 11,63 pada tahun 2024.

Data perkembangan rata-rata lama sekolah Kota Padang tahun 2020–2024 masih berada di atas nilai rata-rata lama sekolah Provinsi Sumatera Barat. Rata-rata lama sekolah di Kota Padang Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar II- 42 Rata-rata Lama Sekolah Kota Padang Tahun 2020-2024

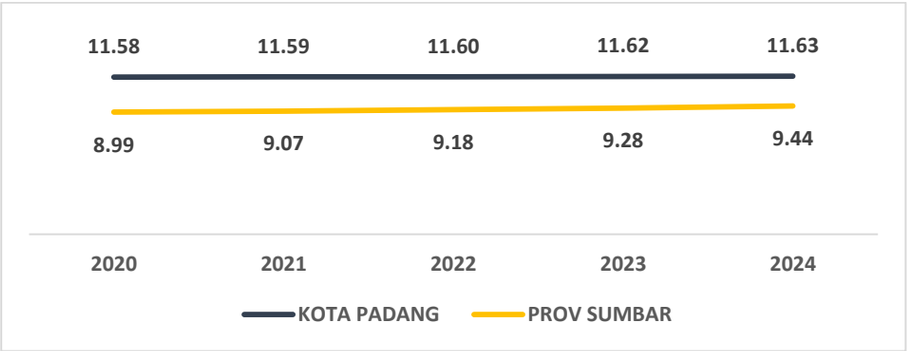

Sumber: Kota Padang Dalam Angka 2025

2.1.2.2.6 Indeks Literasi/Numerasi

Literasi numerasi adalah kemampuan dalam memahami angka, operasi hitung dan bilangan melalui berbagai konteks dalam permasalahan sehari-hari, baik menggunakan bahasa lisan maupun tulisan. Literasi numerasi erat kaitannya dengan matematika, dimana kemampuan numerasi memerlukan pengetahuan matematika, namun pembelajaran matematika belum tentu menumbuhkan kemampuan numerasi. Berikut adalah angka literasi/numerasi Kota Padang Tahun 2020-2024

Tabel II- 42 Angka Literasi dan Numerasi Kota Padang Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Capaian (Tahun)				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk :						
	a. Literasi						
	SD		-	-	-	73,56	83,59
	SMP		-	-	-	71,53	80,9
	b. Numerasi						
	SD		-	-	-	54,02	71,84
	SMP		-	-	-	45,55	74,68

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

2.1.2.2.7 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)

Proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi memperlihatkan kesanggupan penduduk untuk menyelesaikan studi di pendidikan tinggi. Indikator ini menunjukkan

gambaran kualitas sumberdaya manusia dari aspek tingkat pendidikan yang dimiliki. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka jumlah penduduk yang bekerja akan semakin banyak karena angkatan kerja banyak diserap oleh pasar kerja, dan dengan demikian akan mengurangi jumlah pengangguran. Capaian proporsi penduduk berusia >15 tahun yang berkualifikasi pendidikan tinggi di Kota Padang tahun 2020-2024 terlihat pada tabel berikut:

Tabel II- 43 Proporsi Penduduk Berumur >15 Tahun yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi di Kota Padang Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Proporsi penduduk berusia > 15 tahun yang berkualifikasi pendidikan tinggi	%	-	-	-	-	23,61
2	Jumlah penduduk berumur 15 tahun keatas yang berpendidikan tinggi		-	-	-	-	171.056
3	Jumlah penduduk berumur 15 tahun keatas		-	-	-	-	724.410

Sumber: Kota Padang Dalam Angka 2025

2.1.2.2.8 Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi Kota Padang

Ukuran keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan salah satunya dilihat apakah lapangan pekerjaan yang tersedia sudah berkesesuaian dengan tingkat pendidikan tenaga kerja.

Pekerja dengan lulusan pendidikan menengah tinggi diharapkan bisa bekerja di bidang keahlian dengan level yang sama, yaitu menengah tinggi juga. Data dari Sakernas BPS menunjukkan bahwa di Kota Padang tingkat kesesuaian ini cenderung berfluktuatif dan meningkat dari angka 46,81 % di tahun 2019 menjadi 67,02% di tahun 2023 lalu dan meningkat menjadi 73,52% pada tahun 2024, hal ini menggambarkan korelasi antara Pendidikan yang ditamatkan dengan pekerjaan yang didapatkan cenderung membaik dari tahun ke tahun.

Tabel II- 44 Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi Kota Padang Tahun 2019-2024

Tahun	Jumlah Pekerja Lulusan Perguruan Tinggi	Jumlah Pekerja Lulusan Sekolah Menengah	Total Bekerja	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)
2019	87.528	144.825	496.363	46,81
2020	81.110	152.122	515.793	45,22
2021	83.469	159.142	312.938	77,53
2022	90.812	150.960	328.748	73,54
2023	66.783	142.716	312.610	67,02
2024	134.326	223.443	486.638	73,52

Sumber : Bappeda Kota Padang, 2025 (data diolah)

2.1.2.3 Kesehatan untuk Semua

Perkembangan bidang kesehatan suatu daerah menjadi salah satu urusan wajib dan tujuan pokok pemerintah daerah dalam mensejahterakan masyarakatnya melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehat jasmani dan rohani. Sehingga diperlukan fasilitas dan tenaga medis pendukung kesehatan.

Adapun jumlah fasilitas kesehatan di Kota Padang yang terdiri dari Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Ibu dan Anak, Rumah Sakit Khusus, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Klinik/Balai Pengobatan, dan Posyandu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II- 45 Jumlah Fasilitas Kesehatan Kota Padang 2020-2024

Tahun	Jumlah						
	Rumah Sakit Umum	RS Ibu dan Anak	RS Khusus	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Klinik/Balai Kesehatan	Posyandu
2020	14	5	12	23	59	89	918
2021	14	5	7	23	59	83	919
2022	14	5	8	24	58	102	924
2023	14	5	8	24	57	110	929
2024	14	5	8	24	58	125	933

Sumber: Kota Padang Dalam Angka, 2025

Upaya pencapaian tujuan tersebut ditempuh melalui berbagai kebijakan diantaranya dengan peningkatan promosi kesehatan, budaya hidup bersih dan sehat, peningkatan kualitas lingkungan, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau, penyediaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan penyandang masalah sosial lainnya serta peningkatan kuantitas dan kualitas SDM bidang kesehatan.

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain perilaku dan kebiasaan hidup, lingkungan, sosial budaya, dan fasilitas kesehatan serta peran serta masyarakat dalam menerapkan pola hidup sehat.

Kondisi capaian derajat kesehatan masyarakat di Kota Padang akan dilihat dari indikator-indikator berikut ini:

2.1.2.3.1 Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Usia Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Dilihat dari indikator usia harapan hidup, tampak bahwa usia penduduk Kota Padang semakin lama semakin meningkat yang mengindikasikan keberhasilan program dan kegiatan di bidang kesehatan. Angka harapan hidup di Kota Padang tahun 2024 sebesar 75,2. Hal ini memperlihatkan bahwa upaya pemerintah Kota Padang untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat telah berhasil dicapai.

Tabel II- 46 Usia Harapan Hidup Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024

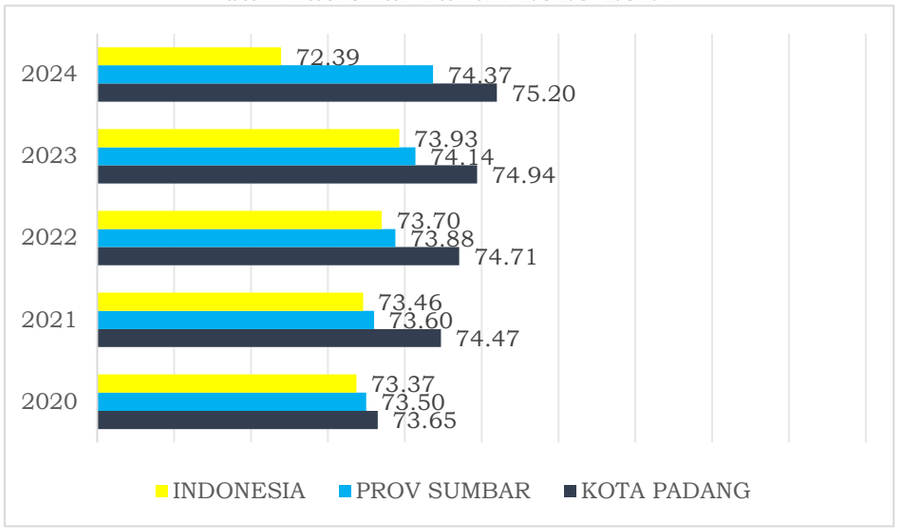

Sumber: Kota Padang Dalam Angka 2025

2.1.2.3.2 Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah angka yang menunjukan banyaknya kematian ibu hamil, melahirkan sampai nifas per 100.000 kelahiran hidup. AKI digunakan untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas sistem kesehatan dalam menyediakan pelayanan Kesehatan maternal yang aman dan berkualitas. Faktor kematian ibu disebabkan oleh rendahnya kualitas perawatan selama kehamilan dan persalinan,

rendahnya pengetahuan kesehatan tentang kondisi layak hamil bagi wanita usia subur, rendahnya aksesibilitas layanan kesehatan maternal, serta belum terlaksananya sistem regionalisasi rujukan secara optimal. Jumlah kematian ibu dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 cenderung fluktuatif, yakni tahun 2020 jumlah kematian ibu sebanyak 21 orang, tahun 2021 sebanyak 30 orang, tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 17 orang, tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 23 orang, dan tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 12 orang. Perkembangan penurunan angka kematian ibu dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Gambar II- 43 Jumlah Kasus Kematian Ibu Kota Padang Tahun 2020-2024

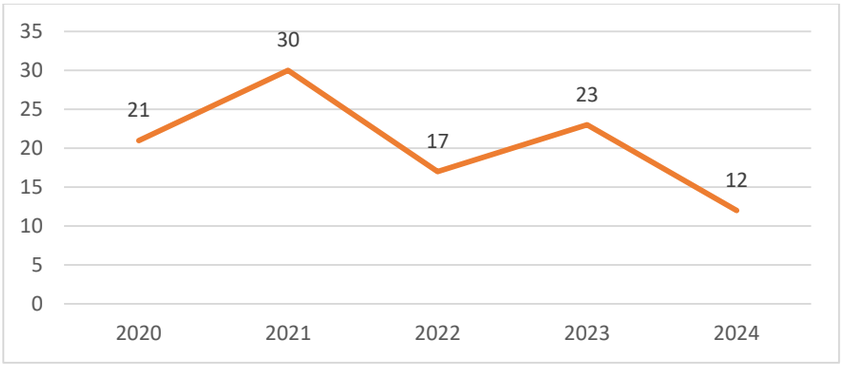

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Padang, 2025

2.1.2.3.3 Prevalensi Stunting dan Balita Gizi Buruk

Gizi Buruk adalah keadaan Kekurangan Energi dan Protein (KEP) tingkat berat akibat kurang mengkonsumsi makanan yang bergizi dan/atau menderita sakit dalam waktu lama. Gizi buruk adalah suatu kondisi yang ditandai dengan berat dan tinggi badan balita jauh di bawah rata-rata. Gizi buruk ditandai dengan status gizi sangat kurus (menurut BB terhadap TB) atau hasil pemeriksaan klinis yang menunjukkan gejala *marasmus, kwashiorkor* atau *marasmik kwashiorkor*. Menurut WHO, sebanyak 54% penyebab kematian bayi dan balita disebabkan karena keadaan gizi buruk pada anak. Anak yang mengalami gizi buruk memiliki risiko meninggal 13 kali lebih besar dibandingkan anak yang normal.

Berdasarkan data 5 tahun terakhir, terjadi peningkatan jumlah balita gizi buruk yang sangat signifikan di tahun 2021. Pada tahun 2020 terdapat 65 balita gizi buruk. Pada tahun 2021, terdapat 451 balita gizi buruk. Peningkatan tersebut disebabkan adanya perbedaan sumber data.

Data tahun 2020 diambil dari rekap manual laporan gizi bulanan puskesmas. Sistem pencatatan hasil penimbangan manual menyebabkan rendahnya cakupan pemeriksaan status gizi pada balita sehingga kasus gizi buruk baru diketahui dan ditangani oleh tenaga

kesehatan adalah kasus gizi buruk yang sudah bersifat kronis dan sangat parah.

Sedangkan pada tahun 2021, Kementerian Kesehatan menetapkan regulasi penggunaan aplikasi EPPGBM dalam pencatatan hasil penimbangan balita. Aplikasi ini secara otomatis dapat menunjukkan status gizi balita sehingga dapat mendeteksi dini masalah gizi pada balita. Aplikasi ini mencatat kasus gizi buruk murni karena penurunan berat badan menurut tinggi badan, dan juga kasus gizi buruk yang disebabkan oleh penyakit penyerta. Penggunaan aplikasi EPPGBM dapat meningkatkan deteksi dini kasus gizi buruk sehingga tenaga kesehatan dapat lebih dini menangani masalah yang muncul. Data pada tabel dibawah ini merupakan jumlah kasus seluruh balita gizi buruk (kasus baru dan kasus lama) yang dilaporkan sebagai berikut:

Tabel II- 47 Balita Gizi Buruk Kota Padang Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Sasaran Balita (orang)	80812	77845	77624	77506	83262
Jumlah Balita ditimbang (orang)	56395	34614	33195	48792	58103
Balita Gizi Buruk (%)	65	451	340	164	126

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Padang, 2025

Berdasarkan data tahun 2024, daerah yang mengalami kasus balita gizi buruk terbanyak adalah Kecamatan Koto Tangah. Sementara itu, daerah yang mengalami kasus terkecil adalah Kecamatan Bungus Teluk Kabung. Berikut daerah dengan kasus balita gizi buruk per kecamatan di tahun 2024.

Gambar II- 44 Kasus Balita Gizi Buruk dari Terbanyak ke Terkecil pada masing-masing Kecamatan di Kota Padang tahun 2024

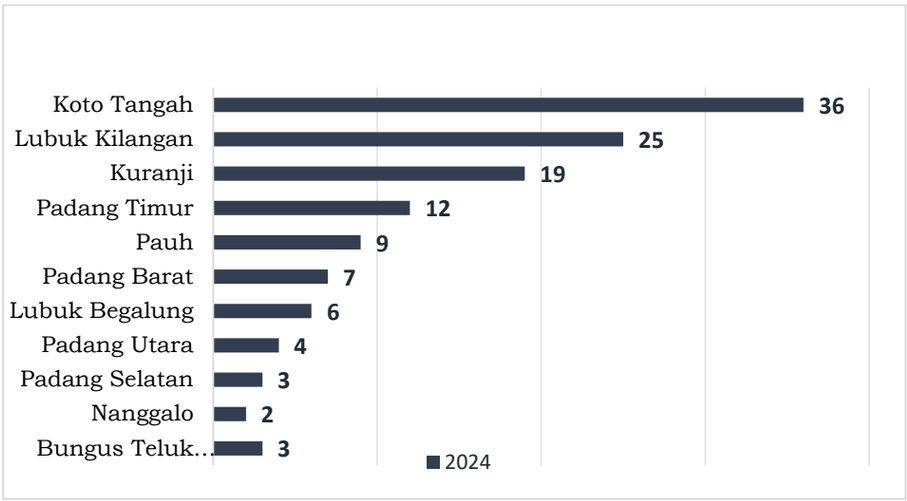

Sumber: Kota Padang Dalam Angka 2025

Capaian penanganan prevelansi stunting di Kota Padang tahun sudah baik ditunjukkan oleh data e-PPGBM tahun 2020 - 2024, namun sedikit berbeda dengan data SSGI yang menunjukkan kenaikan pada tahun tersebut. Data penanganan stunting kota padang tahun 2020-2024 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel II- 48 Capaian Penanganan Stunting Kota Padang Tahun 2020-2024

Tahun	Target		Capaian	
	SSGI	e-PPGBM	SSGI	e-PPGBM
2020	24,1%	8 %	- (pandemi)	9.11
2021	21,1%	8 %	18.9	7.09
2022	18,4%	7 %	19,5	4,69
2023	16%	7 %	24,2	2,65
2024	14%	6,5%	20,6	2,53

Sumber: Dinas Kesehatan, 2025

Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dihitung berdasarkan sampel balita di Kota Padang. Dari seluruh balita diambil sampel 740 orang, kemudian diperiksa status tinggi badan, berat badan, kondisi ekonomi, pendidikan orang tua, sanitasi dll sedangkan Elektronik Pencatatan Dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) adalah suatu aplikasi yg dibuat oleh kementerian kesehatan yang berisi data by name by address balita yang telah dilakukan pengukuran dan penimbangan oleh puskesmas setiap bulannya.

Peruntukan kedua data ini adalah data SSGI digunakan untuk evaluasi prevalensi angka stunting secara nasional dan data E-PPGBM digunakan untuk monitoring perkembangan tumbuh kembang balita (Kemenko PMK).

2.1.2.3.4 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Indikator Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional merupakan sebuah indikator yang menjadi penting sebagai bentuk evaluasi pemerintah pada sektor kesehatan untuk melihat kesejahteraan masyarakat yang memiliki perlindungan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat, terutama bagi masyarakat tidak mampu yang merupakan tanggungan pemerintah.

Cakupan kepesertaan masyarakat yang dilindungi melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Padang terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2019 cakupannya sebesar 93,47%, kemudian pada tahun 2023 capaiannya menjadi 98,01%, sehingga Kota Padang menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Republik Indonesia. Cakupan kepesertaan JKN ini dapat meningkat karena komitmen Pemerintah Kota Padang dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dan ketersediaan dana Pembangunan sektor kesehatan yang membuat penambahan kuota peserta PBI APBD Murni.

Tabel II- 49 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

No	Indikator	Satuan	Capaian (Tahun)				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional	%	91.44	92.69	95.2	98.01	98,06

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Padang, 2025

2.1.2.3.5 Cakupan Penemuan dan Pengobatan Tuberkulosis

Masih tingginya persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan angka kesakitan tidak terlepas dari masih tingginya angka prevalensi beberapa penyakit salah satunya tuberkulosis. Dalam kurun waktu tahun 2020-2024, prevalensi tuberkulosis yang tercatat di Kota Padang cenderung meningkat dari 170,4 menjadi 450 per 100.000 penduduk. Meningkatnya prevalensi tersebut di pengaruhi oleh meningkatnya cakupan penemuan dan pengobatan TBC dalam kurun waktu yang sama dimana pada tahun 2020 sebesar 41,2 dan 88,7 pada tahun 2024

Perkembangan cakupan penemuan dan pengobatan TBC dan prevalensi dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar II- 45 Cakupan Penemuan dan Pengobatan Tuberkulosis Kota Padang Tahun 2020-2024

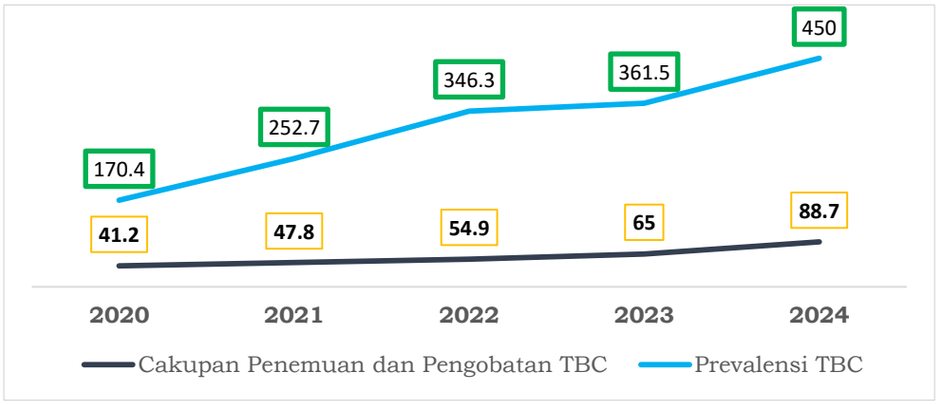

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Padang, 2025

2.1.2.3.6 Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis

Angka keberhasilan pengobatan TBC dalam kurun waktu lima tahun terakhir fluktuatif. Pada tahun 2020 angka keberhasilan pengobatan sebesar 90,3 %; tahun 2021 sebesar 90,2 %; tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 89,8 %; dan tahun 2023 sebesar 90 %, dan tahun 2024 kembali naik yakni sebesar 90,3 %, sebagaimana grafik berikut ini:

Gambar II- 46 Angka Keberhasilan Pengobatan TBC

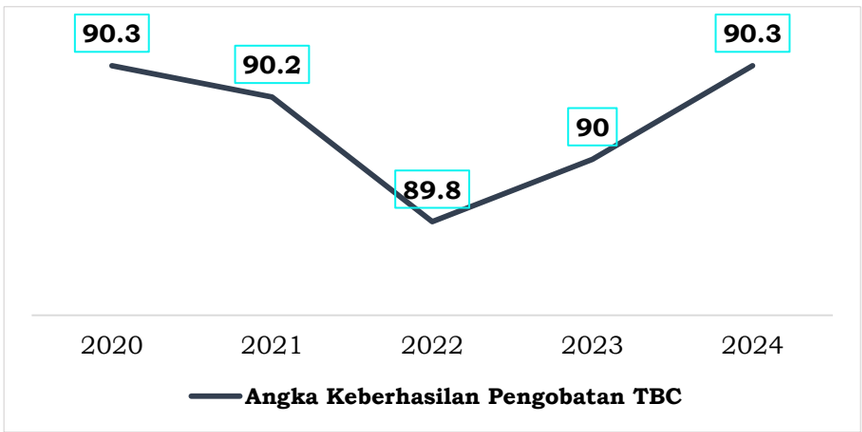

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Padang, 2025

2.1.2.3.7 Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh pemerintah untuk mengukur kesehatan masyarakat. IKS terdiri dari 12 indikator yang mencakup aspek kesehatan fisik, Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh pemerintah untuk mengukur kesehatan masyarakat. IKS terdiri dari 12 indikator yang mencakup aspek kesehatan fisik, mental, sosial, dan lingkungan dirancang untuk memastikan bahwa keluarga memiliki lingkup dan akses hidup sehat yang memadai.

IKS mencakup indikator yang mempengaruhi kesehatan fisik, mental, sosial, dan lingkungan keluarga. Dengan meningkatkan kualitas hidup dan praktik hidup sehat di keluarga, maka kesehatan individu dan

keluarga secara keseluruhan juga meningkat. Hal ini berkontribusi pada meningkatnya AHH.

Tahun 2023 IKS Kota Padang adalah 0.31, meningkat dibanding Tahun 2022 yang sebesar 0,30 dan tahun 2021 sebesar 0.27. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya untuk IKS. Artinya adanya peningkatan indicator pada keluarga kota Padang berdasarkan 12 indikator IKS.

Tabel II- 50 Capaian Indek Kesehatan (IKS) Kota Padang Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
IKS	-	0.27	0.30	0.31	0.32

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Padang, 2025

2.1.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

2.1.2.4.1 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Cakupan BPJS Ketenagakerjaan merupakan Indikator penting untuk mengetahui dan mengevaluasi akses Masyarakat terhadap perlindungan sosial terkait ketenagakerjaan. Data cakupan BPJS Ketenagakerjaan menjadi cerminan dari seberapa efektif program ini dalam mencakup berbagai segmen pekerja formal. Ini mencakup pekerja dari berbagai sektor ekonomi, termasuk industri, perdagangan, dan jasa, serta pekerja mandiri dan buruh harian.

Gambar II- 47 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Padang Tahun 2019-2023

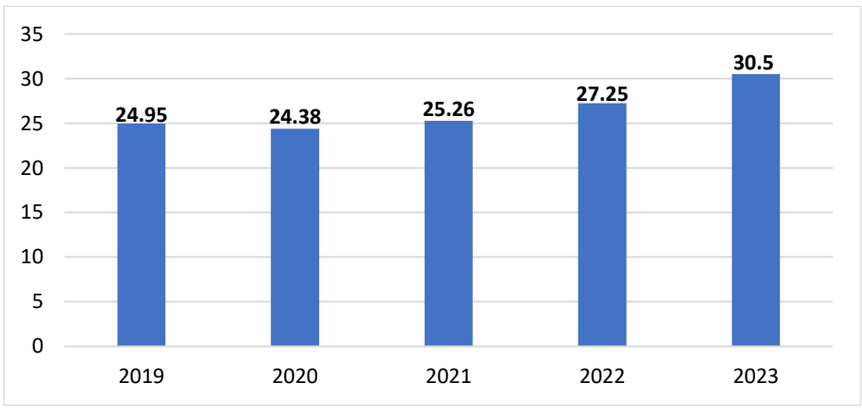

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang, 2024

Dari data di atas, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2019 cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Padang sebesar 24,95% peserta aktif yang mendapatkan perlindungan sosial ketenagakerjaan di Kota Padang. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, capaian kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan mengalami penurunan menjadi 24,38 dampak dari pandemi Covid-19. Pada 2021 sudah mulai adanya peningkatan secara konsisten yaitu sebesar 25,26% kemudian menjadi 27,25% pada Tahun 2022 dan pada Tahun 2023 telah mencapai 30,5% yang berarti 30,5% pekerja di Kota Padang telah mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja.

2.1.2.4.2 Persentase Disabilitas Bekerja di Sektor Formal

Pekerja penyandang disabilitas adalah penduduk penyandang disabilitas berusia 15 tahun ke atas yang bekerja dan mengalami satu atau lebih hambatan diantaranya: gangguan dalam penglihatan, pendengaran, mobilitas, menggunakan atau menggerakan jari atau tangan, gangguan berbicara atau memahami atau berkomunikasi dengan orang lain, gangguan mengingat, berkonsentrasi, dan gangguan emosional dengan tingkat keparahan rendah, sedang, sampai parah. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal adalah penyandang disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha. Indikator ini bertujuan untuk melihat sejauh mana perekonomian pemerintah dan dunia usaha dapat memberikan kesempatan bagi pekerja disabilitas untuk dapat bekerja disektor formal.

Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di Kota Padang berdiri pada tahun 2023 ketersediaan data terkait penyandang disabilitas yang bekerja sangat minim. Pada Tahun 2023 baru terdata sebanyak 16 orang disabilitas yang bekerja di sektor formal dari 2.888 orang penyandang disabilitas di Kota Padang atau sebesar 0,55 % dari total penyandang disabilitas Kota Padang.

2.1.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

2.1.2.5.1 Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama digunakan untuk mengukur tingkat kerukunan masyarakat dalam beragama di Indonesia, dengan tiga dimensi utama yaitu toleransi, kesetaraan dan kerjasama. Jika nilai IKUB ini tinggi berarti setiap masyarakat merasa diterima dari berbagai latar belakang agama dan merasa aman walaupun dalam perbedaan. Indeks Kerukunan Umat Beragama sampai saat ini belum dilakukan pengukurannya.

2.1.2.5.2 Indeks Pelestarian Kebudayaan

Kota Padang sebagai ibu kota provinsi Sumatera Barat menjadi titik kumpul berbagai aktivitas ekonomi, sosial dan budaya. Sebagai kawasan perkotaan, penduduk kota Padang cenderung lebih heterogen dibandingkan daerah lainnya di Sumatera Barat. Namun demikian, pemerintah dan masyarakat kota Padang tetap menjunjung dan menghargai nilai-nilai seni dan budaya Minangkabau. Hal ini terlihat dari aktivitas keseharian masyarakat dan upaya pengembangan pariwisata di Kota Padang yang berbasis kebudayaan.

Untuk mengukur capaian kinerja pelestarian kebudayaan, diharapkan dapat memberikan gambaran pelestarian kebudayaan secara lebih holistik. Pengukuran pelestarian kebudayaan di Kota Padang dilihat dari 2 (dua) indikator dimensi warisan budaya :

1. Jumlah warisan budaya benda yang dilestarikan
2. Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan

Tabel II- 51 Indikator Pelestarian Budaya

No	Indikator	Satuan	2022	2023	2024
1	Jumlah Warisan Budaya Benda Yang Dilestarikan	Objek	3	3	3
2	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda Yang Dilestarikan	Objek	5	5	5

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, 2024

2.1.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif

Pemberdayaan perempuan dan anak masih menjadi perhatian pemerintah daerah Kota Padang dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan dan keadilan gender dapat terjadi apabila porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis.

2.1.2.6.1 Indeks Pembangunan Keluarga

Indeks Pembangunan Keluarga adalah Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga) yang meliputi tiga dimensi yaitu Ketentraman, Kemandirian dan Kebahagiaan. Indeks ini berkolaborasi positif dengan Indeks Pembangunan Manusia.

Bangga untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas keluarga. Indeks Pembangunan keluarga digunakan untuk mengklasifikasikan suatu wilayah dengan status pembangunan keluarga tangguh, berkembang dan rentan.

1. Nilai iBangga yang kurang baik (rentan) dengan nilai kurang dari 40
2. Nilai iBangga yang cukup baik (berkembang) apabila nilainya antara 40-70
3. Nilai iBangga yang baik(tangguh) apabila nilainya diatas 70

Berikut disajikan data Indeks Pembangunan Keluarga Kota Padang tahun 2020-2024:

Tabel II- 52 Indeks Pembangunan Keluarga Kota Padang Tahun 2020-2024

	Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (I Bangga)				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
	-	53,49	56,45	64,77	64,22

Sumber: DP3AP2KB Kota Padang, 2025

Dari data di atas, nilai Indeks Pembangunan Keluarga di Kota Padang pada tahun 2023 telah berada pada Nilai iBangga yang cukup baik (berkembang) yakni berada pada nilai 64,77.

2.1.2.6.2 Indeks Perlindungan Khusus Anak

Perlindungan khusus anak hingga saat ini masih menjadi salah satu isu penting meskipun dalam upaya penyediaan perlindungan khusus anak pemerintah memiliki beragam tantangan. Perlindungan khusus anak diantaranya adalah perlindungan akan resiko kemiskinan, fenomena pekerja anak, kekerasan, maupun perlindungan terhadap anak dengan disabilitas. Indikator yang termasuk dalam IPKA adalah indikator yang menggambarkan kondisi anak yang membutuhkan perlindungan khusus, seperti anak penyandang disabilitas, pekerja anak, dan anak terlantar baik secara nasional maupun di tingkat provinsi. Hasil IPKA menjadi indikator yang sangat dibutuhkan sebagai dasar penyusun kebijakan terhadap perlindungan khusus anak dan sebagai indikator yang dapat menilai keberhasilan pembangunan.

Tabel II- 53 Rekapitulasi Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kota Padang Tahun 2020-2024

Tahun	Jenis Kekerasan						Jumlah
	Kdrt	Fisik	Psikis	Seksual	Penelantaran	Eksploitasi	
1	2	3	4	5	6	7	8
Tahun 2020	2	3	8	20	1	1	35
Tahun 2021	5	1	18	22	7	0	53
Tahun 2022	3	1	19	22	4	0	49
Tahun 2023	7	2	28	34	3	0	74
Tahun 2024	7	6	28	31	5	1	78
Januari – Juni 2025	3	2	8	12	1	0	26

Sumber : DP3AP2KB Kota Padang, 2025

Tabel II- 54 Rekapitulasi Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Padang Tahun 2020-2024

Tahun	Jenis Kekerasan						Jumlah
	Kdrt	Fisik	Psikis	Seksual	Penelantaran	Eksploitasi	
1	2	3	4	5	6	7	8
Tahun 2020	5	2	4	2	5	0	18
Tahun 2021	4	0	17	2	2	0	25
Tahun 2022	5	2	22	2	1	0	32
Tahun 2023	6	1	16	4	0	0	27
Tahun 2024	9	2	17	3	0	0	31
Januari – Juni 2025	3	0	7	1	0	0	11

Sumber : DP3AP2KB Kota Padang, 2025

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak di Kota Padang mengalami tren peningkatan selama periode 2020 hingga 2024, dengan kasus terbanyak terjadi pada tahun

2024 yaitu sebanyak 78 kasus. Jenis kekerasan yang paling dominan setiap tahunnya adalah kekerasan seksual dan psikis, sementara bentuk kekerasan lainnya seperti fisik, KDRT, penelantaran, dan eksploitasi juga menunjukkan fluktuasi. Meski data tahun 2025 baru mencakup hingga Juni, tercatat sudah ada 26 kasus, yang mengindikasikan potensi peningkatan jika tidak ditangani dengan serius. Temuan ini menekankan pentingnya upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak secara lebih intensif di Kota Padang.

Selain kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap perempuan di Kota Padang juga menunjukkan tren yang memprihatinkan selama periode 2020 hingga 2024. Jumlah kasus tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan total 32 kasus, didominasi oleh kekerasan psikis dan seksual. Sementara itu, bentuk kekerasan lainnya seperti KDRT, fisik, dan penelantaran tercatat lebih rendah namun tetap konsisten muncul setiap tahun. Pada tahun 2024 terdapat 31 kasus, dan meskipun data Januari–Juni 2025 hanya mencatat 11 kasus, angka tersebut tetap menunjukkan perlunya kewaspadaan karena berpotensi meningkat di paruh kedua tahun. Kondisi ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap perempuan, bersama dengan anak-anak, harus menjadi prioritas melalui kebijakan yang responsif, edukasi masyarakat, dan layanan penanganan kekerasan yang lebih kuat dan mudah diakses.

Analisis IPKA didasarkan pada capaian Klaster perlindungan khusus anak atas lima indikator utama penyusun IPKA. Kelima indikator tersebut adalah 1) Persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja; 2) Rasio anak berusia 5-17 tahun (disabilitas/non disabilitas) yang pernah mengakses internet; 3) Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak berusia 7-17 Tahun (disabilitas/non disabilitas); 4) Persentase anak berusia 0-17 tahun yang hidup di bawah garis kemiskinan; 5) Persentase anak berusia 5-17 tahun yang terlantar.

2.1.2.6.3 Indeks Pembangunan Gender / Indeks Pemberdayaan Gender /Indeks Ketimpangan Gender

Kesetaraan gender menjadi target pembangunan di banyak negara terutama yang mengalami disparitas pembangunan yang tinggi. Ketimpangan pembangunan menurut gender mengakibatkan pembangunan tidak dapat mencapai potensinya secara optimal. Kondisi yang ideal dalam pembangunan manusia yang diharapkan adalah kelompok penduduk laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sama untuk berperan dalam pembangunan, memegang kendali atas sumber daya pembangunan yang ada, serta menerima manfaat dari pembangunan yang setara dan adil. Kesetaraan gender sendiri dapat dimaknai sebagai kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia dalam berperan dan berpartisipasi dalam segala bidang.

Menyadari bahwa kesetaraan gender memainkan peran yang penting dalam pembangunan, kesetaraan gender adalah konsep yang penting dalam pembangunan masyarakat yang adil dan berkelanjutan, di mana semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, dapat mencapai potensi penuh mereka dan berkontribusi secara aktif dalam pembangunan. Berikut adalah indikator-indikator utama kesetaraan gender, yang biasa digunakan untuk menilai sejauh mana perempuan dan laki-laki memiliki akses dan peluang yang setara dalam berbagai bidang pembangunan:

a. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Menurut Sen (1989), pembangunan manusia meliputi konsep yang luas, mencakup pemberdayaan, kerjasama, kesetaraan, keberlanjutan, dan keamanan. Untuk menyederhanakan konsep yang sangat luas ini, United Nations Development Programme (UNDP) menyusun ukuran pembangunan manusia yang dikenal sebagai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selanjutnya, agar ukuran ini juga dapat digunakan untuk membandingkan capaian pembangunan berbasis gender, maka UNDP mengembangkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebagai turunan IPM. IPG merupakan rasio antara IPM perempuan dan IPM laki-laki, dimana semakin mendekati 100, maka semakin rendah kesenjangan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki. Dengan adanya ukuran terpisah antara IPM laki-laki dan IPM perempuan, maka analisis tentang kualitas hidup masing-masing kelompok gender tersebut dapat dilakukan secara parsial. Kualitas manusia dalam IPM diukur dari tiga dimensi yaitu meliputi dimensi pendidikan, dimensi kesehatan, dan dimensi ekonomi.

Adapun komponen pembentuk IPM yang digunakan adalah Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir yang mewakili dimensi kesehatan, Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang mewakili dimensi pendidikan, serta Pendapatan Nasional Bruto (PNB) perkapita yang mewakili dimensi ekonomi. AHH saat lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH saat lahir mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat.

Selanjutnya, HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak berusia 7 tahun ke atas di masa mendatang. Sementara itu, RLS didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Perbedaan pencapaian dalam bidang ekonomi menjadi penyebab utama kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan di Indonesia. Komponen penyusun IPM yang merefleksikan keadaan perekonomian diwakili oleh Pendapatan Nasional Bruto (PNB) perkapita.

Kesenjangan pencapaian dalam bidang ekonomi dapat dilihat dari perbedaan pendapatan laki-laki dan perempuan. Kesenjangan tersebut dapat dilihat melalui rasio PNB perkapita antara perempuan dan laki-laki. Jika rasio PNB mendekati angka 1, maka kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dari sisi ekonomi semakin kecil begitu pula sebaliknya.

Metodologi penghitungan Indeks Pembangunan Gender (IPG) mengacu pada metodologi baru yang di gunakan oleh UNDP tahun 2010 dengan dimensi dan indikator sebagai berikut:

Tabel II- 55 Metodologi Penghitungan Indeks Pembangunan Gender UNDP Tahun 2010

Dimensi	Indikator	
Umur Panjang dan sehat	Angka Harapan Hidup pada saat lahir (e0), laki-laki & perempuan	**IPG/ GDI**
Pengetahuan	1. Harapan Lama Sekolah (EYS); Laki-laki & Perempuan	
	2. Rata-rata Lama Sekolah (MYS); laki-laki & Perempuan	
Kehidupan yang layak	Perkiraan pendapatan; Laki-laki & Perempuan	

Sumber: DP3AP2KB Kota Padang, 2025

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Gender (IPG) diperoleh dari IPM Perempuan dibagi dengan IPM laki-laki. Capaian IPM Kota Padang menunjukkan bahwa IPM perempuan berada di bawah IPM laki-laki dan angka IPM ini pun mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya seperti pada data berikut ini.

Tabel II- 56 Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kota Padang per Jenis Kelamin

Indek Pembangunan Manusia (IPM)	Laki-laki					Perempuan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Padang	86,97	87,05	87,43	87,75	88,15	81,44	81,66	82,05	82,43	82,90

Sumber: DP3AP2KB Kota Padang, 2025

Tabel II- 57 Indeks Pembangunan Gender Kota Padang Tahun 2020-2024

Tahun	Capaian Indeks Pembangunan Gender				
	2020	2021	2022	2023	2024
IPG	93,64	93,81	93,85	93,94	94,04

Sumber: DP3AP2KB Kota Padang, 2025

Realisasi Indeks Pembangunan Gender dalam lima tahun terakhir mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Capaian IPG mendekati angka 100 berarti kesetaraan pembangunan antara laki-laki dan perempuan semakin baik. Tahun 2024 IPG Kota Padang berada pada angka 94,04 berarti capaian pembangunan perempuan setara 94,04% dari capaian laki-laki.

b. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi yang disebut sebagai dimensi IDG. IDG didapat dari rata-rata aritmatik dari tiga indeks yang dibentuk dari tiga komponen yaitu keterlibatan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan. Meski sama-sama digunakan dalam mengukur capaian kesetaraan gender, IDG berbeda dengan IPG. IPG mengukur capaian kualitas pembangunan manusia terpilah gender dari sisi kesehatan, pendidikan dan ekonomi sedangkan IDG melihat sejauh mana kesetaraan gender dalam hal peran aktif di dunia politik, pengambilan keputusan dan ekonomi.

Tabel II- 58 Indikator Indeks Pemberdayaan Gender

Dimensi	Indikator	
Keterwakilan di Parlemen	Proporsi Keterwakilan di Parlemen Laki-Laki dan perempuan	IDG atau GEM
Pengambilan Keputusan	Proporsi dari manajer, staf administrasi pekerja profesioanl dan teknisi, laki-laki dan perempuan	
Distribusi Pendapatan	Upah Buruh Non Pertanian, Laki-Laki dan Perempuan	

Sumber: DP3AP2KB Kota Padang, 2025

Angka IDG Kota Padang pada tahun 2021 mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya namun di tahun 2022 dan 2023 kembali meningkat pada angka yang cukup signifikan akan tetapi di tahun 2024 kembali turun, seperti pada tabel berikut ini:

Tabel II- 59 Indeks Pemberdayaan Gender Kota Padang Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	67,53	65,33	67,99	68,27	63,38

Sumber: DP3AP2KB Kota Padang, 2025

Penurunan angka Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) atau Gender Empowerment Index menunjukkan bahwa perempuan mengalami penurunan keterlibatan dalam sektor strategis, terutama dalam politik, ekonomi, dan pengambilan keputusan. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor struktural, budaya, maupun kebijakan.

c. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Indek Ketimpangan Gender adalah alat yang berguna untuk mengukur dan memantau kesetaraan gender dalam berbagai aspek pembangunan manusia, dan membantu dalam merumuskan kebijakan dan strategi untuk mencapai kesetaraan gender.

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan ukuran gabungan yang mencerminkan ketimpangan pencapaian antara perempuan dan laki-laki dalam 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu (i) dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator angka kematian ibu dan angka kelahiran remaja (ii) dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator tingkat pendidikan menengah ke atas bagi perempuan dan laki-laki usia 25 tahun ke atas dan persentase kursi parlemen yang di pegang perempuan, serta (iii) dimensi partisipasi ekonomi yang diwakili dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPAK perempuan. IKG berkisar antara 0 hingga 1, dimana nilai 0 menunjukkan kesetaraan sempurna antara laki-laki dan perempuan dengan tidak ada ketimpangan dalam pencapaian. Sedangkan nilai 1 menunjukkan ketimpangan ekstrim, dengan perempuan mengalami hasil yang jauh lebih buruk daripada laki-laki. Semakin tinggi nilai IKG, semakin besar ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam pencapaian pembangunan. Kegunaan IKG yaitu (i) IKG dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana ketimpangan gender berdampak pada pembangunan, (ii) IKG membantu memantau kemajuan dan perubahan dalam kesetaraan gender, (iii) IKG dapat digunakan untuk mengevaluasi program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan gender. Tujuan pengukuran IKG adalah mendorong untuk mengurangi ketimpangan gender dan menyediakan data untuk pemantauan pembangunan berkelanjutan (SDGs) terutama **Tujuan 5 : Kesetaraan Gender**. Berikut disajikan data Indeks Ketimpangan Gender Kota Padang tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel II- 60 Indeks Ketimpangan Gender Kota Padang Tahun 2020-2024

Tahun	Capaian Indeks Ketimpangan Gender				
	2020	2021	2022	2023	2024
	0,200	0,320	0,171	0,198	0,172

Sumber: DP3AP2KB Kota Padang, 2025

Dalam lima tahun terakhir angka IKG Kota Padang mengalami data yang berfluktuasi dan capaian di tahun 2024 sudah kembali turun.

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia yang dijabarkan sebagai berikut.

2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

2.1.3.1.1 Angka Ketergantungan

Angka ketergantungan di ukur dari rasio ketergantungan. Rasio Ketergantungan atau Rasio Beban Tanggungan adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk usia dibawah 15 tahun/penduduk muda dan penduduk usia 65 tahun atau lebih/penduduk tua) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15 sampai 64 tahun).

Berdasarkan data dari BPS, angka ketergantungan penduduk Kota Padang masih cukup tinggi. Artinya penduduk jumlah penduduk non produktif lebih banyak dari jumlah penduduk yang produktif.

Gambar II- 48 Angka Ketergantungan Penduduk Kota Padang Tahun 2020-2024

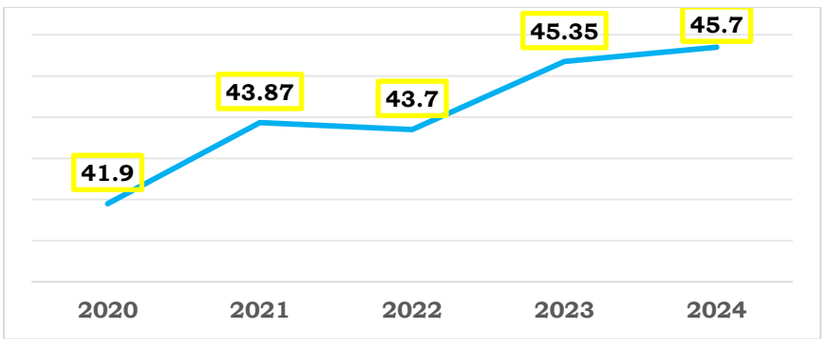

Sumber: BPS Kota Padang, 2025

2.1.3.1.2 Pengeluaran konsumsi rumah tangga Perkapita

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan maupun bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi/pengeluaran untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain.

Pengeluaran untuk konsumsi makanan dihitung selama seminggu yang lalu, sedangkan untuk bukan makanan dihitung selama sebulan dan 12 bulan yang lalu. Baik konsumsi makanan maupun bukan makanan selanjutnya dikonversikan ke dalam pengeluaran rata-rata

sebulan. Angka-angka konsumsi/pengeluaran rata-rata per kapita diperoleh dari hasil bagi jumlah konsumsi seluruh rumah tangga (baik mengkonsumsi makanan maupun tidak) terhadap jumlah penduduk.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga memberikan gambaran secara mikro bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat dalam menjalani kehidupan kesehariannya. Asumsinya jika pendapatan masyarakat meningkat maka pengeluaran konsumsi rumah tangga juga akan meningkat.

Gambar II- 49 Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Kota Padang Tahun 2020-2024

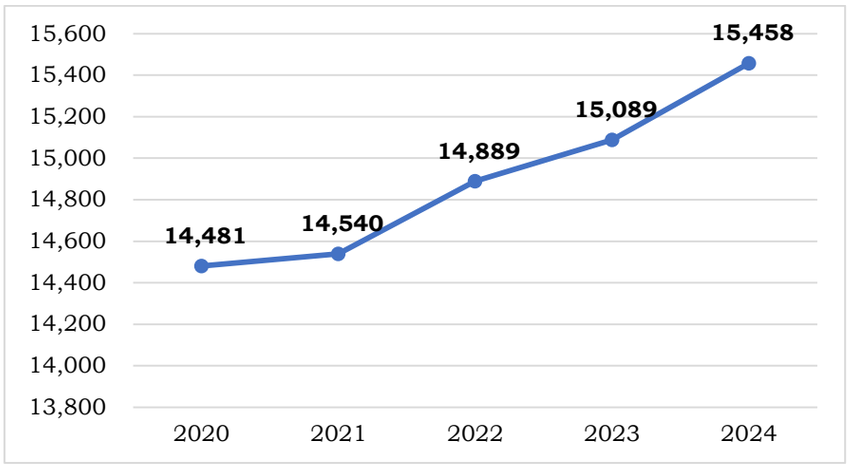

Sumber: Kota Padang Dalam Angka,2025

Secara umum, pengeluaran masyarakat Kota Padang cenderung meningkat selama lima tahun terakhir dan Secara total, pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita di Kota Padang pada tahun 2024 adalah sebanyak Rp.1.974.411,00. Sebagian besar pengeluaran digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan yang mencapai 53,3 persen atau Rp.1.051.703. Sedangkan sisanya digunakan untuk pengeluaran konsumsi makanan yang mencapai 46,7 persen atau Rp.922.708 sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar II- 50 Pengeluaran Konsumsi Perkapita di Kota Padang Tahun 2020-2024

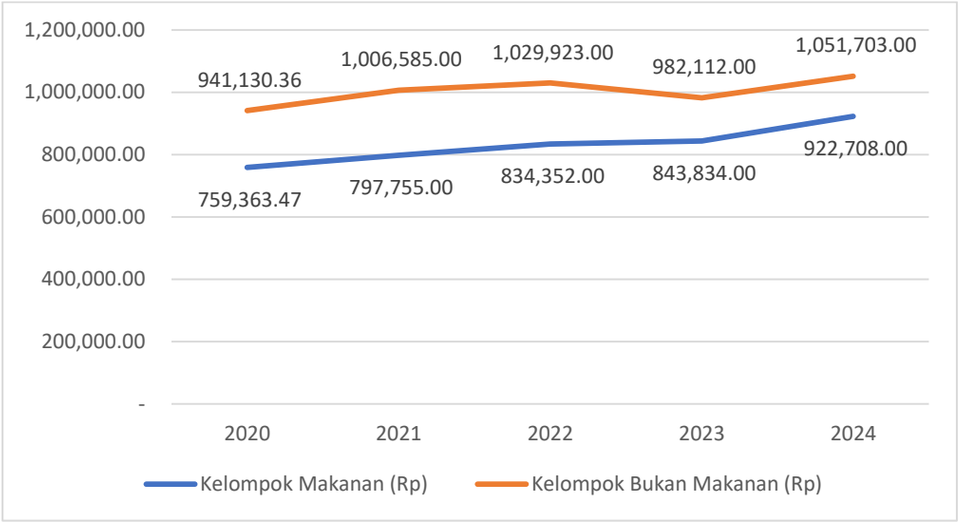

Sumber: Kota Padang Dalam Angka 2025

Gambar II- 51 Pengeluaran Konsumsi Perkapita Di Kota Padang Tahun 2024

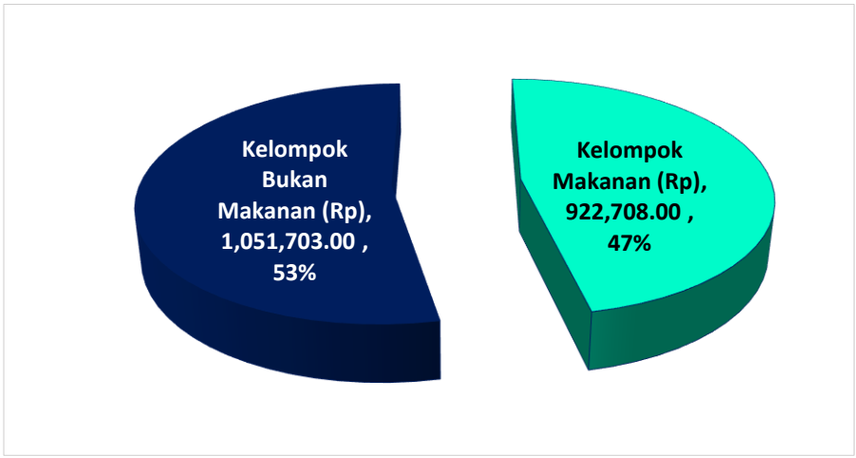

Sumber: Kota Padang Dalam Angka 2025

2.1.3.2 Iptek, Ekonomi dan Produktivitas Ekonomi

Kondisi ekonomi suatu daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota, diukur menggunakan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Pada dasarnya PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha (sektor) dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar.

PDRB harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui

pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Perkembangan nilai PDRB ADHB dan PDRB ADHK dalam kurun 5 tahun terakhir mengalami peningkatan. Namun, pada tahun 2020 mengalami penurunan akibat pengaruh Covid-19 yang membuat proses perekonomian pada sektor-sektor ekonomi unggulan terhambat diantaranya sektor perdagangan, industri dan pariwisata. Perkembangan nilai PDRB Kota Padang tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar II- 52 Perkembangan Nilai PDRB di Kota Padang Tahun 2020-2024

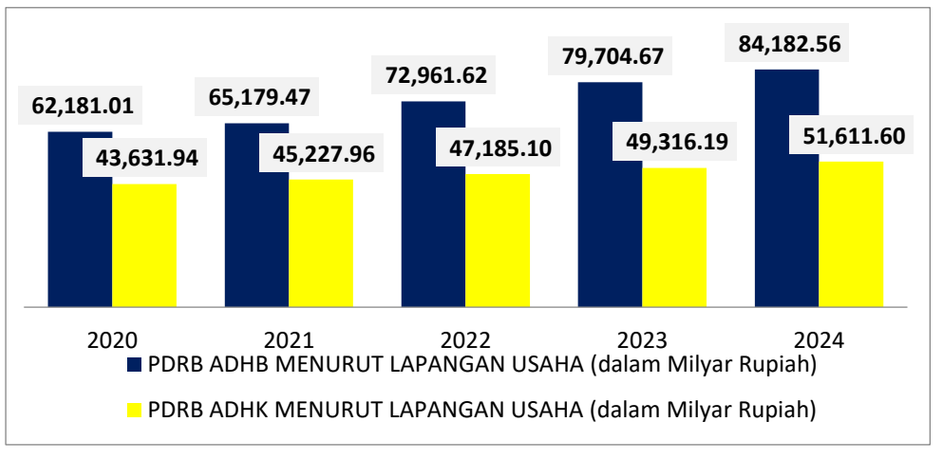

Sumber: Kota Padang Dalam Angka, 2025

Kontribusi lapangan usaha lainnya sebagai penyangga struktur ekonomi Kota Padang selama periode 2020 - 2024 dapat dilihat pada tabel yang disajikan berikut:

Tabel II- 61 Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Kota Padang Tahun 2020-2024 (Persen)

Kode	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,41	5,29	5,12	5,02	4,95
B	Pertambangan dan Penggalian	3,22	3,23	3,11	3,25	3,14
C	Industri Pengolahan	11,87	11,77	11,26	10,88	10,68
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,15	0,15	0,15	0,14	0,15
F	Konstruksi	10,44	10,12	10,21	10,46	10,44

Kode	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16,41	16,50	17,42	17,41	17,52
H	Transportasi dan Pergudangan	15,66	15,53	15,66	16,09	15,68
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,20	1,24	1,33	1,37	1,35
J	Informasi dan Komunikasi	8,22	8,34	8,49	8,49	8,48
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,14	5,64	5,6	5,27	5,29
L	*Real Estate*	3,15	3,11	3,13	3,19	3,32
M,N	Jasa Perusahaan	1,46	1,42	1,4	1,45	1,45
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,37	7,37	6,9	6,82	7,00
P	Jasa Pendidikan	5,69	5,54	5,35	5,17	5,19
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,89	1,93	1,9	1,96	2,04
R,S,T,U	Jasa Lainnya	2,61	2,70	2,86	2,95	3,23
Produk Domestik Regional Bruto		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: Kota Padang Dalam Angka, 2025

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Padang pada tahun 2024 dihasilkan oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor yaitu mencapai 17,52 persen. Selanjutnya disusul oleh lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 15,68 persen. Lapangan usaha yang memiliki peranan terkecil dihasilkan oleh lapangan usaha pengadaan listrik dan gas sebesar 0,09 persen.

Gambar II- 53 Kontribusi PDRB ADHB Kota Padang dari Terbesar ke Terkecil Tahun 2024

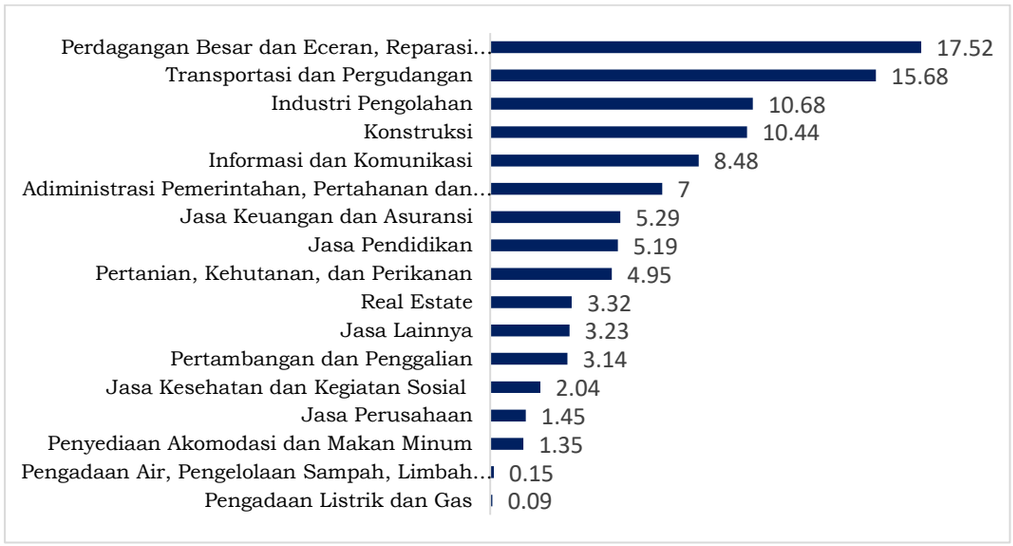

Sumber: Kota Padang Dalam Angka, 2025

Gambar diatas memperlihatkan kontribusi kategori PDRB di Kota Padang tahun 2024 mulai dari nilai kontribusi terbesar hingga nilai kontribusi terkecil dengan menggunakan harga berlaku.

Produktivitas daerah Kota Padang, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, diukur dengan membandingkan total nilai PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah Angkatan kerja Kota Padang. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II- 62 Produktivitas Total Kota Padang Tahun 2020-2024

Tahun	PDRB ADHB (Juta Rupiah)	Angkatan Kerja	Tingkat Produktivitas
2020	62.181.006,06	476.663	130,45
2021	65.178.860,85	480.324	135,70
2022	72.978.951,70	480.376	151,92
2023	79.704.673,24	478.779	166,47
2024	84.182.560,00	486.638	172,99

Sumber : BPS Kota Padang (data diolah), 2025

Berdasarkan tabel di atas, produktivitas Kota Padang memiliki tren yang meningkat selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2020, angka produktivitas total Kota Padang sebesar 130,45 dan 172,99 pada tahun 2024.

2.1.3.2.1 Rasio PDRB Industri Pengolahan

Industri pengolahan menjadi salah satu Lapangan Usaha utama dalam membentuk perekonomian Kota Padang. Rasio sektor Industri Pengolahan terhadap perekonomian Kota Padang dari tahun 2020 – 2024 cenderung menurun, terjadinya de-industrialisasi di Kota Padang ini disebabkan karena melemahnya perekonomian global dan nasional yang mengakibatkan berkurangnya permintaan dari negara luar maupun daerah lain terhadap produk industri olahan Kota Padang,

seperti industri semen dan turunannya, minyak kelapa sawit dan turunannya, karet dan turunannya serta terbatasnya lahan industri pengolahan di Kota Padang.

Gambar II- 54 Rasio PDRB Industri Pengolahan Kota Padang Tahun 2020-2024

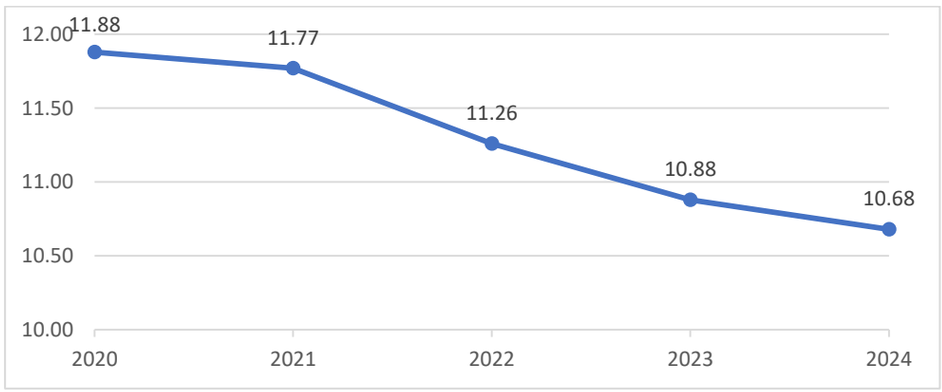

Sumber: Kota Padang dalam Angka, 2025

Mengingat keterbatasan lahan ini banyak para pelaku usaha industri yang ada di Kota Padang melakukan ekspansi usaha ke luar wilayah Kota Padang, menyebabkan industri olahan di Kota Padang cenderung stagnan. Pada Saat ini Pemerintah Kota Padang lebih menggiatkan pengembangan Industri Kecil Menengah dengan membuat sentra industri di Kota Padang, seperti Pembangunan Sentra Industri Rendang serta mengembangkan sentra industri yang telah ada.

2.1.3.2.2 Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum

Data statistik resmi belum secara spesifik mengelompokkan kontribusi sektor pariwisata sebagai satuan tersendiri dalam struktur PDRB menurut lapangan usaha sampai saat ini. Oleh karena itu, untuk menganalisis perkembangan sektor pariwisata daerah, digunakan pendekatan berbasis pada subsektor akomodasi dan makan minum yang secara umum mencerminkan aktivitas pariwisata di daerah.

Perkembangan kontribusi sektor akomodasi dan makan minum Kota Padang Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar II- 55 Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum (%)

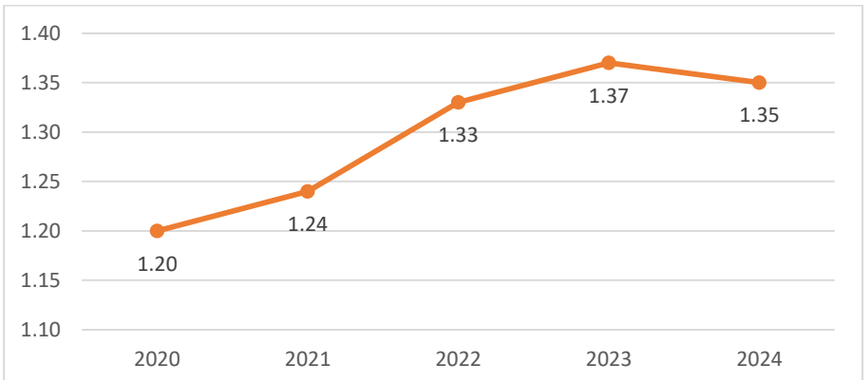

Sumber: Kota Padang Dalam Angka 2025

Grafik di atas menggambarkan pergerakan rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum atas dasar harga berlaku tahun 2020-2024. Karena terjadinya penyebaran virus Covid-19, Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 1,5% di tahun 2019 hingga mencapai angka 1,2 di tahun 2020 dan mulai naik kembali menjadi 1,24 ditahun 2021 hingga tahun 2022 menjadi 1,33 dan 1,37 di tahun 2023 seiring dengan perbaikan ekonomi masyarakat pasca Covid-19 terjadi peningkatan angka kunjungan kembali oleh para wisatawan. Lalu pada tahun 2024 mengalami sedikit penurunan menjadi 1,35.

2.1.3.2.3 Rasio PDRB Ekonomi Kreatif

Sektor ekonomi kreatif di Kota Padang mengalami tantangan besar akibat pandemi Covid-19, namun ada beberapa inisiatif yang sedang dilakukan untuk memulihkannya. Berdasarkan informasi, sekitar 258 pelaku ekonomi kreatif (ekraf) di Kota Padang terdampak oleh pandemi, dengan subsektor kuliner yang paling terparah.

Gambar II- 56 Rasio PDRB Ekonomi Kreatif Tahun 2019-2023

Sumber: Kota Padang Dalam Angka 2025

Sebagaimana bisa dilihat dari gambar di atas, rasio PDRB ekonomi kreatif berdasarkan harga berlaku di Kota Padang pada tahun 2019, dari angka 2,82% mengalami pertumbuhan negatif menjadi 2,62% karena pandemi Covid 19. Sedangkan menurut harga konstan, dari angka 9,84% turun drastis menjadi -9,83%. Seiring terjadinya perbaikan ekonomi masyarakat pasca terjadinya Covid-19, proporsi PDRB ekonomi kreatif di Kota Padang mulai merangkak naik dari tahun 2021 dengan persentase yang sangat kecil menjadi 2,7%, dan naik ke angka 2,86% di tahun 2022 hingga tahun 2023 mencapai angka 2,95% menurut harga berlaku. Dan menurut harga konstan juga mulai merangkak naik dari tahun 2021 dengan persentase yang cukup besar menjadi 7,22%, dan naik ke angka 12,08% di tahun 2022. Peningkatan PDRB jasa lainnya menurut harga konstan pada tahun 2022 bisa disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk pemulihan ekonomi setelah pandemi COVID-19, peningkatan permintaan dari konsumen, dan inovasi dalam berbagai subsektor jasa. Selain itu,

dampak kebijakan pemerintah yang mendukung sektor jasa juga berperan penting dalam mencapai peningkatan tersebut.

2.1.3.2.4 Proporsi Jumlah IKM

Proporsi jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) terhadap Industri Besar di Kota Padang dari Tahun 2020 - 2024 cenderung meningkat, pada tahun 2020 proporsinya sebesar 99,34% dan terus mengalami kenaikan setiap tahunnya sehingga mencapai 99,70% pada tahun 2024. Hal ini menggambarkan IKM Kota Padang sangat dominan di Kota Padang dibandingkan dengan jumlah Industri Besar, dan IKM akan terus tumbuh cukup signifikan. Pertumbuhan industri besar cukup stagnan di Kota Padang disebabkan adanya keterbatasan lahan industri di Kota Padang yang menyebabkan Industri Besar yang akan memperbesar skala usahanya, akan melakukan ekspansi ke luar Kota Padang.

Gambar II- 57 Proporsi Jumlah IKM terhadap Industri Besar (%)

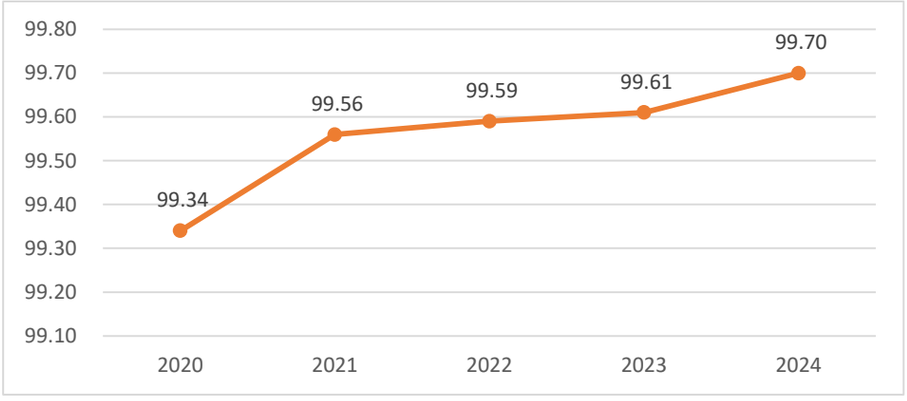

Sumber: BPS Kota Padang, 2025

2.1.3.2.5 Rasio Volume Koperasi Terhadap PDRB

Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB masing masing daerah. Di Kota Padang kenaikan volume usaha koperasi cenderung menurun sejak tahun 2021. Hal ini disebabkan adanya keterbatasan modal usaha yang dikelola oleh masing-masing koperasi.

Gambar II- 58 Rasio Volume Koperasi Terhadap PDRB Kota Padang Tahun 2019-2024

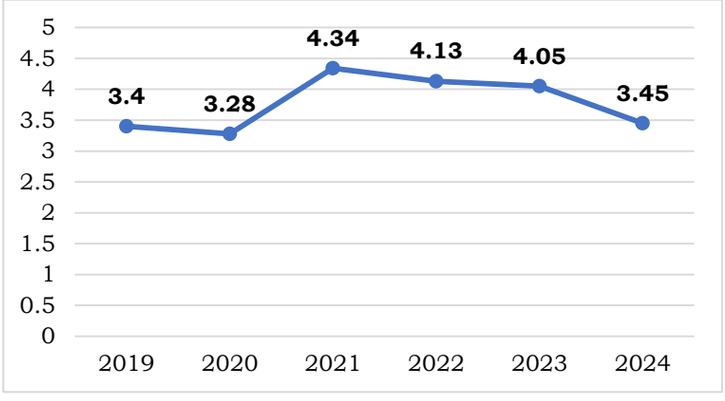

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, 2024

Pada Tahun 2021 terjadi kenaikan rasio volume usaha koperasi di Kota Padang disebabkan adanya Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam bentuk pemberian modal usaha dari Pemerintah ke koperasi-koperasi yang aktif di Kota Padang menyebabkan kenaikan volume usaha koperasi melebihi kenaikan PDRB Kota Padang.

2.1.3.2.6 Proporsi Jumlah UKM Non Pertanian

Sensus Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kota Padang baru dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kota Padang pada Tahun 2023, sehingga tidak didapatkan data pada Tahun 2019 – 2022 untuk jumlah UKM di sektor pertanian, hal ini menyebabkan tidak adanya ketersediaan data terkait proporsi UKM non pertanian.

Pada Tahun 2023 berdasarkan data sensus UKM jumlah total pelaku usaha mikro di Kota Padang sebanyak 132.519 pelaku dan usaha mikro di sektor pertanian sebanyak 21.341 pelaku usaha, dan jika diproporsikan jumlah UKM non pertanian berjumlah 83,9%. Kedepannya proporsi UKM non pertanian akan cenderung meningkat, hal disebabkan Kota Padang yang merupakan daerah perkotaan yang akan berspesialisasi pada sektor jasa perdagangan, jasa pariwisata, jasa Pendidikan, jasa Kesehatan, jasa transportasi dan pergudangan.

Gambar II- 59 Proporsi Jumlah UKM Non Pertanian Kota Padang Tahun 2019 - 2023

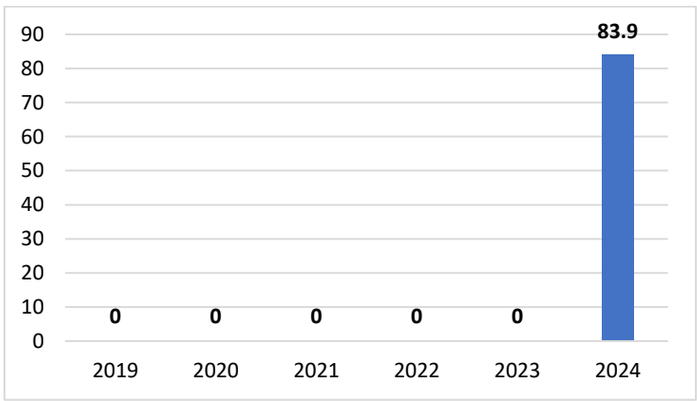

Sumber: BPS Kota Padang, 2024

2.1.3.2.7 ROA BUMD

Return on Asset (ROA) atau Pengembalian Aset adalah rasio keuangan yang mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan aset yang dimilikinya untuk menghasilkan laba. ROA dinyatakan dalam persentase, dan semakin tinggi nilai ROA, semakin baik kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari asetnya.

ROA penting bagi investor dan manajemen karena memberikan gambaran tentang efisiensi penggunaan aset. ROA yang meningkat dari waktu ke waktu menunjukkan perbaikan kinerja dan efisiensi perusahaan. Rasio ini sering dibandingkan dengan industri sejenis untuk memahami posisi perusahaan relatif terhadap pesaingnya. Dengan demikian, ROA memberikan pandangan yang baik mengenai

profitabilitas dan efisiensi aset, yang sangat penting dalam menilai kesehatan keuangan dan potensi pertumbuhan perusahaan.

Gambar II- 60 ROA BUMD Perumda PDAM Kota Padang Tahun 2019-2024

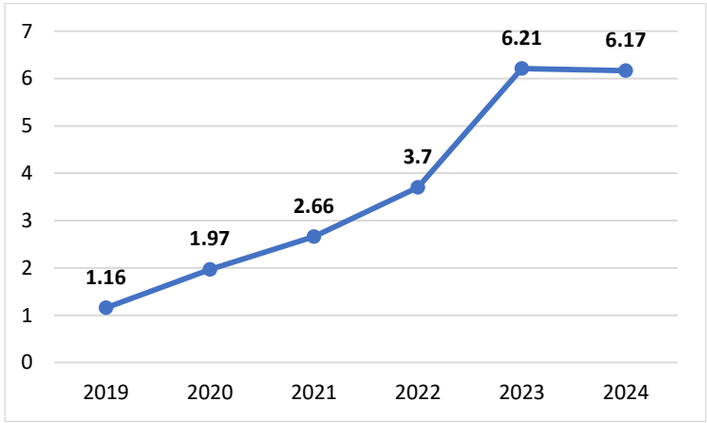

Sumber: PDAM Kota Padang, 2025

Secara keseluruhan, terjadi tren peningkatan yang stabil dalam ROA PDAM Padang selama enam tahun terakhir. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan aset dan profitabilitas perusahaan. Lonjakan ROA pada tahun 2023 mengindikasikan bahwa perusahaan telah melakukan transformasi atau perbaikan signifikan yang memungkinkan peningkatan efisiensi penggunaan aset secara lebih optimal.

2.1.3.2.8 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan di Kota Padang dalam kurun waktu 2020 – 2024 cenderung meningkat, meskipun terjadi penurunan pada tahun 2022. Peningkatan ini mencerminkan adanya kemajuan dalam keterlibatan perempuan dalam dunia kerja, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan seperti akses terhadap pekerjaan yang layak, kesenjangan upah, serta faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja. Upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kesempatan kerja bagi perempuan tetap diperlukan untuk memastikan peningkatan partisipasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Gambar II- 61 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Kota Padang Tahun 2020-2024 (%)

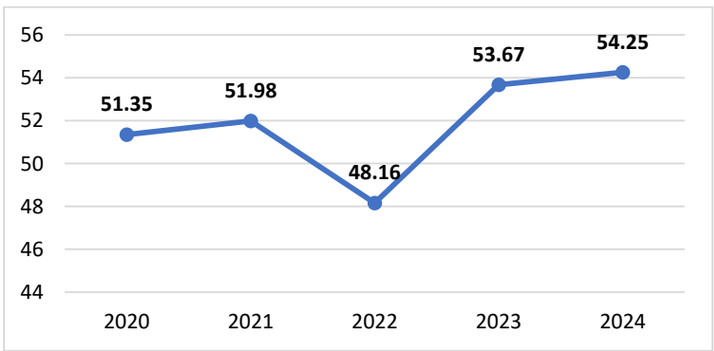

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2025

2.1.3.2.9 Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal

Tenaga kerja formal adalah pekerja yang bekerja di perusahaan resmi,baik pemerintah maupun swasta, dan memiliki kontrak yang jelas atau tenaga kerja dengan status pekerjaan utama dengan kategori berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar, dan buruh/karyawan/pegawai.

Lapangan kerja formal merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh buruh, karyawan, atau pegawai yang memiliki perjanjian kerja dengan perusahaan berbadan hukum. Sektor formal merupakan usaha yang telah mendapatkan perlindungan ekonomi dari pemerintah. Pada tahun 2020-2024, proporsi penciptaan lapangan kerja formal di Kota Padang berfluktuasi seperti yang terlihat pada grafik berikut.

Gambar II- 62 Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal Kota Padang dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 – 2024 (%)

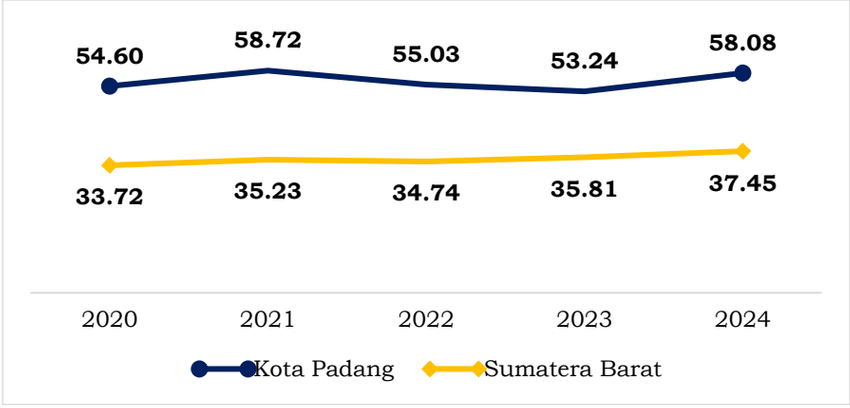

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2025

Dilihat dari rasio penciptaan atau daya tampung lapangan pekerjaan formal pada tahun 2020 mencapai 54,60 kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi 58,72, namun pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan menjadi 55.03. Pada tahun 2023 hingga 2024 proporsi ini kembali meningkat yang mungkin menunjukkan pemulihan dan upaya peningkatan lapangan kerja formal di berbagai sektor.

2.1.3.2.10 Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara

Jumlah tamu wisatawan mancanegara merujuk pada total banyaknya wisatawan asing yang mengunjungi suatu negara atau daerah tertentu dalam kurun waktu tertentu, biasanya dihitung per tahun. Angka ini sering digunakan sebagai indikator keberhasilan industri pariwisata suatu daerah dan dapat memengaruhi perencanaan ekonomi, promosi pariwisata, serta pengembangan fasilitas dan infrastruktur untuk mendukung pariwisata.

Perkembangan jumlah tamu wisatawan mancanegara di Kota Padang Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Gambar II- 63 Jumlah Wisatawan Mancanegara di Kota Padang Tahun 2020-2024

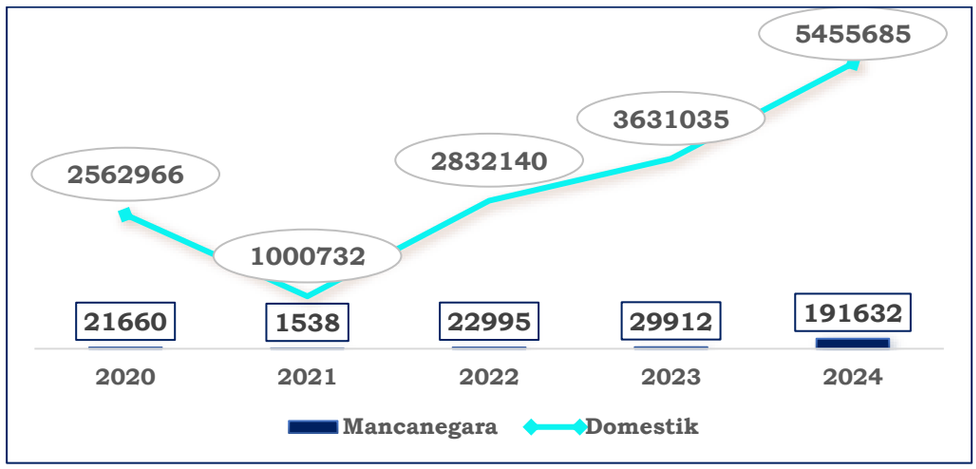

Sumber: BPS Kota Padang, 2025

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa jumlah wisatawan mancanegara pada tahun 2020 mencapai 21.660 orang. Seiring terjadinya Covid-19 dan adanya pembatasan angka kunjungan wisatawan asing, maka jumlah wisatawan asing di hotel berbintang di Kota Padang mengalami penurunan yang cukup drastis di tahun 2021 menjadi 1.538 orang. Pada tahun 2022, terjadi pertumbuhan yang positif untuk jumlah tamu wisatawan mancanegara mencapai 22.995 orang dan cukup meningkat menjadi 29.912 orang pada tahun 2023. Pada tahun 2024 meningkat dengan signifikan menjadi 191.632 orang. Hal ini seiring dengan adanya perbaikan ekonomi dengan pembukaan kembali pintu masuk wisatawan asing ke Kota Padang dan dibukanya kembali penerbangan luar negeri yang langsung ke Kota Padang. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Padang semakin diminati oleh wisatawan asing sebagai destinasi wisata.

2.1.3.2.11 Rasio Kewirausahaan

Rasio Kewirausahaan adalah suatu indikator yang mengukur tingkat aktivitas kewirausahaan di suatu wilayah atau negara. Rasio ini mencerminkan jumlah usaha baru atau kegiatan kewirausahaan dibandingkan dengan populasi atau jumlah usaha yang sudah ada. Rasio ini dapat memberikan gambaran tentang seberapa besar minat dan aktivitas kewirausahaan di suatu tempat. Rasio kewirausahaan juga bisa menunjukkan jumlah pelaku usaha yang berada pada ekonomi formal yang memiliki aspirasi bisnis bertumbuh tinggi dan bisa menyerap tenaga kerja. Dengan demikian, kewirausahaan bisa dilihat sebagai aktifitas menghasilkan nilai tambah dengan menjalankan bisnis baru atau bisnis yang sudah ada dan berfokus pada implementasi inovasi sebagai sumber daya saing. Rasio kewirausahaan ini diukur menggunakan

Gambar II- 64Rasio Kewirausahaan Kota Padang Tahun 2019-2024

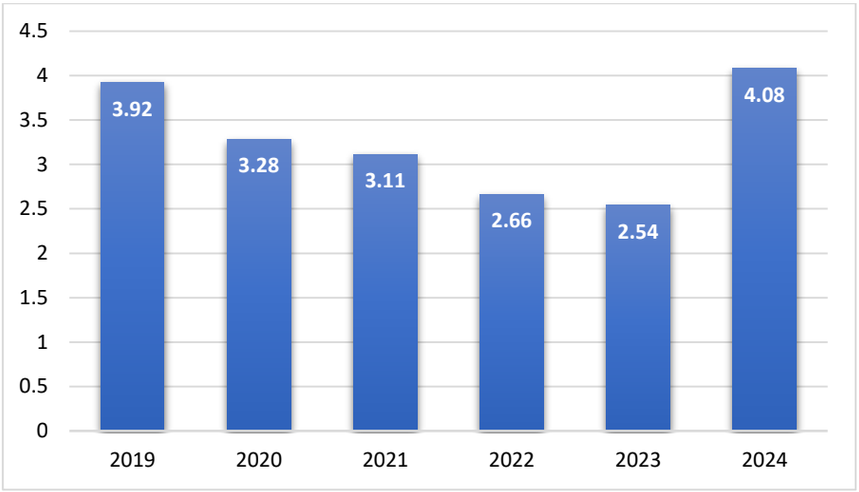

Sumber : Bappeda Kota Padang (data diolah), 2025

Pengembangan kewirausahaan di Kota Padang didukung oleh sistem perekonomian di Kota Padang yang semakin membaik pasca pandemi covid-19 serta adanya dukungan dari pemerintah baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun dari Pemerintah Kota Padang. Pada Tahun 2019 Rasio kewirausahaan di Kota berada di angka 3,92% ketika terjadi pandemi covid-19 pada Tahun 2020 terjadi penurunan rasio kewirausahaan menjadi 3,28% dan kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 4,08%.

Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Sumatera Barat periode 2015-2020 sebesar 1.05 persen. Penduduk Provinsi Sumatera Barat didominasi usia produktif, yaitu 68,08% berada di rentan usia 15 – 64 tahun. Banyaknya jumlah penduduk pada usia produktif di Provinsi Sumatera Barat merupakan peluang untuk mengembangkan sektor kewirausahaan baru generasi millennial. Keberadaan wirausaha wirausaha muda tentu menjadi aktor penguat pengembangan kewirausahaan di Sumatera Barat. Disamping itu tingginya jumlah penduduk wanita di Sumatera Barat setiap tahun merupakan potensi yang sangat besar, khususnya dalam berwirausaha. Jika dilihat kondisi eksisting, dapat diketahui bahwa proporsi jumlah entrepreneur (wirausaha) di Sumatera Barat masih didominasi oleh women entrepreneur (sebesar 50%) dibandingkan millennial entrepreneur (25%) dan pelaku ekonomi kreatif (25%). Proporsi jumlah entrepreneur di Sumatera Barat dapat diketahui secara cepat dan akurat dikarenakan saat ini sudah memiliki sistem pencatatan jumlah entrepreneur. Sistem pencatatan jumlah entrepreneur di Sumatera Barat, yaitu sumbar preneur.

2.1.3.2.12 Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah adalah pengukuran dari himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang tertuang dalam pasal 388 ayat (9) dan ayat (11) menyatakan bahwa “pemerintah pusat memberikan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah” dan “pemerintah pusat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada pemerintah daerah yang berhasil melaksanakan inovasi”. Sebagai bentuk penjabaran dari perundangan tersebut maka diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah adalah sebagai petunjuk pelaksanaan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan praktik-praktik inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan sasaran mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah.

Skor dan Predikat Kota Padang di tingkat nasional dalam pengukuran Indeks Inovasi Daerah tahun 2020-2024 terlihat pada tabel berikut:

Tabel II- 63 Indeks Inovasi Daerah Kota Padang Tahun 2020-2024

Tahun	Skor	Predikat
2020	3,799	Sangat Inovatif
2021	47,44	Inovatif
2022	48,18	Inovatif
2023	61,17	Sangat Inovatif
2024	63,72	Sangat Inovatif

Sumber: Bappeda Kota Padang, 2025

Pelaksanaan Inovasi Daerah tentunya perlu diperkuat dengan upaya dan langkah-langkah strategis agar inovasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang menjadi hal masif untuk dapat diterapkan. penyebarluasan praktik-praktik inovasi secara berkelanjutan, disamping itu perlu dilakukan menjadikan inovasi sebagai salah satu budaya dalam pemecahan masalah dalam pelaksanaan pemerintahan yang selaras dengan kebijakan daerah dimana pada saat ini tuntutan terhadap pelayanan terhadap masyarakat dituntut untuk lebih cepat (faster), lebih mudah (easier), lebih murah (cheaper), lebih pintar (smarter) dan lebih baik (better).

2.1.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Ekonomi Hijau adalah pembangunan ekonomi untuk menunjang pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada investasi, kapital dan infrastruktur, lapangan kerja dan keterampilan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan. Indeks Ekonomi Hijau ditujukan sebagai alat untuk mengukur progres dan capaian

transformasi ekonomi menuju Ekonomi Hijau secara tangible, representatif, dan akurat.

Indeks Ekonomi Hijau Daerah terdiri dari 16 indikator yang dibagi menjadi 3 (tiga) pilar Sustainable Development yaitu: ekonomi (6 indikator), sosial (4 indikator), dan lingkungan (6 indikator). Keterbatasan data pada tingkat kabupaten/kota untuk menghitung angka Indeks Ekonomi Hijau mengakibatkan penurunan indeks yaitu menjadi "Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan".

2.1.3.3.1 Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan salah satu sektor penting dalam kontribusi total PDRB sebuah daerah. Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kota Padang Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar II- 65 Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kota Padang Tahun 2020-2024 (%)

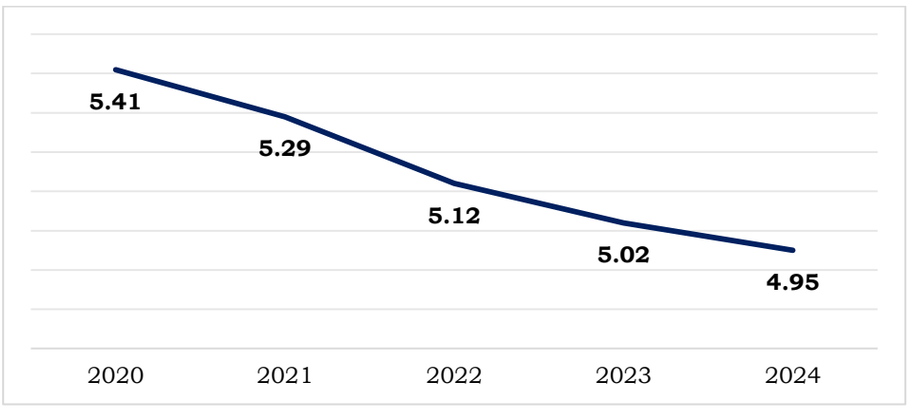

Sumber: BPS Kota Padang, 2025

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa perkembangan nilai rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tersebut cenderung mengalami penurunan. Hal ini terjadi kemungkinan diakibatkan luas lahan pertanian yang terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Selain itu juga disebabkan minat masyarakat khususnya generasi muda untuk berusaha di setor pertanian makin berkurang dan belum maksimalnya pengelolaan sektor kehutanan untuk menjadi sumber PDRB Kota Padang.

2.1.3.3.2 Tingkat produktifitas tenaga kerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan

Secara umum indikator produktivitas diartikan sebagai hubungan antara output berupa barang atau jasa dengan input sumber atau tenaga yang digunakan dalam suatu produksi. Dalam hal ini adalah terkait produktivitas tenaga kerja yang menjadi acuan dalam sebuah keberhasilan tenaga kerja dalam menghasilkan suatu produk tertentu. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan salah satu penyangga perekonomian dan tenaga kerja sebagian besar penduduk di Provinsi Sumatera Barat.

Kondisi produktivitas tenaga kerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terlihat dari jumlah penduduk yang bekerja dan kontribusi PDRB sektor ini di Kota Padang. Jumlah penduduk di Kota Padang yang bekerja di sektor ini tahun 2020-2024 terlihat cenderung fluktuatif, sejalan dengan distribusi PDRB sektor yang sama terhadap PDRB Kota Padang. Jumlah terendah penduduk yang bekerja pada sektor pada tahun 2020 yaitu 16.989 orang, dan tertinggi pada tahun 2023 yaitu 24.328 orang dan kembali turun pada tahun 2024 menjadi 19.029 orang yang bekerja di sektor pertanian.

Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kota Padang Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar II- 66 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kota Padang Tahun 2020-2024 (juta/tahun)

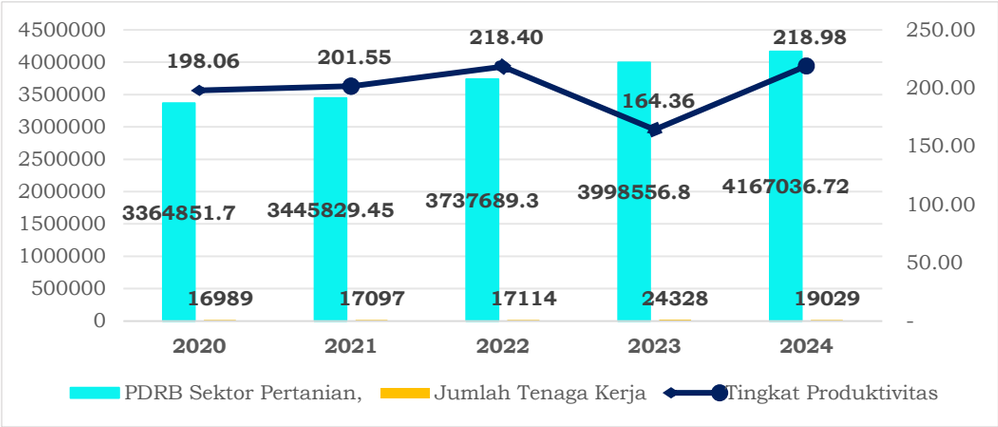

Sumber: BPS Kota Padang, 2025

2.1.3.4 Transformasi Digital

Perkembangan teknologi selaras dengan munculnya berbagai inovasi digital yang dapat membantu pekerjaan manusia. Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) merupakan suatu pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital baik dalam kehidupan sehari hari maupun terkait pekerjaannya. IMDI mulai dihitung pada tahun 2022 mencakup seluruh kabupaten/kota di Indonesia. IMDI Kota Padang pada tahun 2022 berada pada skor 49,16. Namun, di tahun 2023 IMDI yang dikeluarkan pemerintah pusat hanya pada tingkat Provinsi, dimana IMDI Provinsi Sumatera Barat berada pada skor 46,06. Berikut tabel IMDI Kota Padang dari tahun 2022 - 2024.

Gambar II- 67 Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Tahun 2022-2024

Tahun	2022	2023	2024
Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)	49,16	51,20	52,7
Kategori	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi

Sumber : Kementrian Komunikasi dan Digital RI,2024

2.1.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

2.1.3.5.1 Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan indikator perekonomian yang mengukur investasi dalam bentuk aset tetap pada suatu daerah dalam periode tertentu yang meliputi barang-barang modal yang dipergunakan untuk proses produksi lebih dari satu tahun. Indikator ini mengindikasikan penanaman modal dalam negeri dan asing yang meningkatkan pertumbuhan investasi

PMTB mencakup pengadaan, pembuatan, dan pembelian barang modal yaitu barang-barang yang digunakan untuk proses produksi, tahan lama atau yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun seperti bangunan, mesin-mesin dan alat angkutan termasuk pula disini perbaikan besar (berat) yang sifatnya memperpanjang umur atau mengubah bentuk atau kapasitas barang modal tersebut. Klasifikasi komponen PMTB dibagi menjadi 6 sub komponen yaitu Konstruksi; Mesin dan Peralatan; Kendaraan; Peralatan Lainnya; Cultivated Biological Resources (CBR) dan Produk Kekayaan Intelektual.

Grafik berikut menggambarkan perkembangan kontribusi PMTB terhadap PDRB Kota Padang kurun waktu 2020 -2024.

Gambar II- 68 Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terhadap PDRB ADHB Kota Padang Tahun 2020-2024 (%)

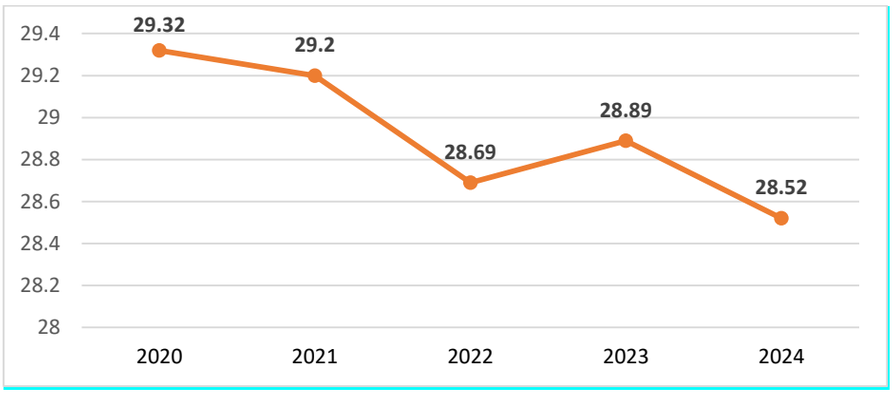

Sumber: BPS Kota Padang, 2025

Dari gambar terlihat kontribusi PMTB terhadap PDRB Kota Padang cenderung menurun dengan kontribusi tertinggi pada tahun 2020 sebesar 29,32 dan terendah pada tahun 2024 sebesar 28,52.

2.1.3.5.2 Ekspor Barang dan Jasa

Ekspor barang dan jasa (% PDB) merupakan share ekspor barang dan jasa terhadap PDB Nasional. Ekspor barang dan jasa memiliki dampak signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. PDB adalah ukuran nilai total produksi dalam suatu negara dalam satu periode waktu. Ekspor barang dan jasa dapat memperluas pasar untuk produk- produk domestik di pasar internasional, meningkatkan penjualan, dan membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pendapatan mendorong investasi, inovasi, dan

pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang terkait dengan produksi barang dan jasa yang diekspor. Selain itu, ekspor juga meningkatkan efisiensi dan daya saing industri dalam negeri untuk dapat bersaing di pasar global. Ekspor barang dan jasa Kota Padang Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar II- 69 Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB Kota Padang Tahun 2020-2024

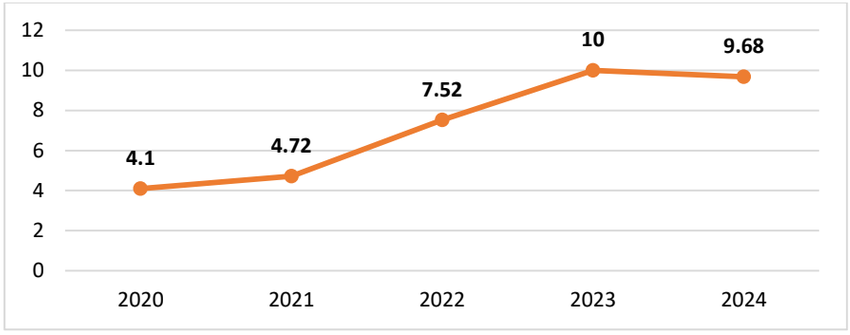

Sumber: BPS Kota Padang, 2025

Berdasarkan data 2020-2024, kontribusi ekspor barang dan jasa tertinggi dicapai pada tahun 2023 sebesar 10 % dan terendah pada tahun 2020 sebesar 4,1 %.

2.1.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

2.1.3.6.1 Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau

Salah satu infrastruktur dasar yang wajib disediakan dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah pemenuhan perumahan dengan menggunakan indikator capaian akses terhadap hunian layak dan terjangkau. Indikator ini memberikan gambaran tingkat pemenuhan akses masyarakat terhadap hunian yang layak, aman dan terjangkau, akses air minum layak serta akses sanitasi (air limbah) yang layak sesuai dengan yang ditetapkan dalam SDGs.

Rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi kriteria kecukupan luas bangunan, akses terhadap air minum dan sanitasi layak, dan ketahanan bangunan. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau di Kota Padang selama 5 tahun terakhir (tahun 2020-2024) berfluktuasi.

Pada tahun 2024, persentase rumah tangga di Kota Padang yang memiliki akses ke hunian yang layak dan terjangkau mencapai 73,3 meningkat dibandingkan tahun 2023 sebesar 72,30 %. Pada tahun 2022 terjadi penurunan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak sebabkan karena kesulitan perekonomian dan keterbatasan penghasilan sehingga mengakibatkan warga kota merasa sulit untuk mendapatkan rumah yang layak. Untuk menyelesaikan

permasalahan ini maka Kota Padang mendorong penyediaan rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau di Kota Padang dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel II- 64 Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau	76,55	72,41	69,17	72,30	73,36

Sumber : Dinas Perkim Kota Padang, 2025

2.1.3.6.2 Proporsi kontribusi PDRB Kota Terhadap Provinsi

Salah satu bentuk perwujudan daya saing ekonomi daerah adalah menitikberatkan pembangunan kawasan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan. Pembangunan Kawasan perkotaan didasarkan pada prinsip compact city, aman, nyaman, dan hijau dalam platform Smart City. Ukuran kinerja yang dapat menyatakan titik berat pembangunan kawasan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan adalah adanya peningkatan kontribusi ekonomi di kawasan perkotaan dibandingkan dengan kawasan perdesaan.

Gambar II- 70 Proporsi PDRB Kota Padang Terhadap Provinsi Tahun 2020 - 2024 (%)

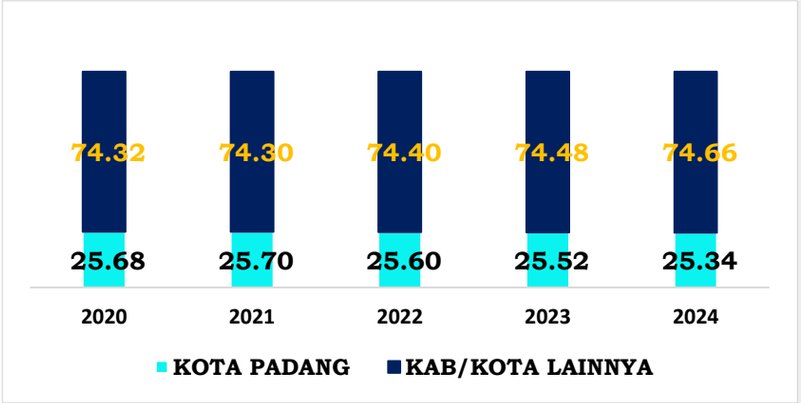

Sumber: BPS Kota Padang, 2025

2.1.3.6.3 Ketersediaan Jaringan Jalan

Jalan merupakan salah satu infrastruktur utama dalam mendorong perekonomian suatu daerah. Jalan sebagai sarana penunjang transportasi memiliki peran penting khususnya untuk transportasi darat. Sarana jalan di Kota Padang yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Padang sepanjang 624,691 Km dengan kondisi yang relatif baik. Berikut disajikan panjang jalan menurut kondisi dan status di Kota Padang.

Tabel II- 65 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan dan Kondisi di Kota Padang Tahun 2024

No	Jenis Permukaan	Kondisi Jalan (Km)			Jumlah
		Baik	Sedang	Rusak	
1	Aspal Beton	78,556	39,016	29,047	146,619
2	Aspal	238,218	118,202	94,914	451,334
3	Kerikil	-	-	4,336	4,336
4	Macadam	11,712	5,962	4,728	22,402
Jumlah		**328,486**	**163,180**	**133,025**	**624,691**

Sumber: Kota Padang Dalam Angka 2025

2.1.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro

2.1.3.7.1 Inflasi

Inflasi secara sederhana diartikan sebagai kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga hanya dari satu atau dua barang tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Inflasi timbul karena adanya tekanan dari sisi supply *(cost push inflation),* dari sisi permintaan *(demand pull inflation),* dan dari ekspektasi inflasi. Faktor-faktor terjadinya *cost push inflation* dapat disebabkan oleh depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri terutama negara-negara mitra dagang, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah *(administered price)*, dan terjadi *negative supply shocks* akibat bencana alam dan terganggunya distribusi.

Faktor penyebab terjadi *demand pull inflation* adalah tingginya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Pada konteks makro ekonomi, kondisi ini digambarkan oleh output riil yang melebihi output potensialnya atau permintaan total *(agregate demand)* lebih besar dari pada kapasitas perekonomian. Sementara itu, faktor ekspektasi inflasi dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi dalam menggunakan ekspektasi angka inflasi dalam keputusan kegiatan ekonominya.

Dari tingkat keburukannya, Kota Padang berada pada tingkat inflasi ringan karena harga barang masih di bawah angka 10 % dalam setahun. Inflasi Kota Padang selama periode 2020-2024 ditunjukkan oleh gambar berikut ini.

Gambar II- 71 Inflasi Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024

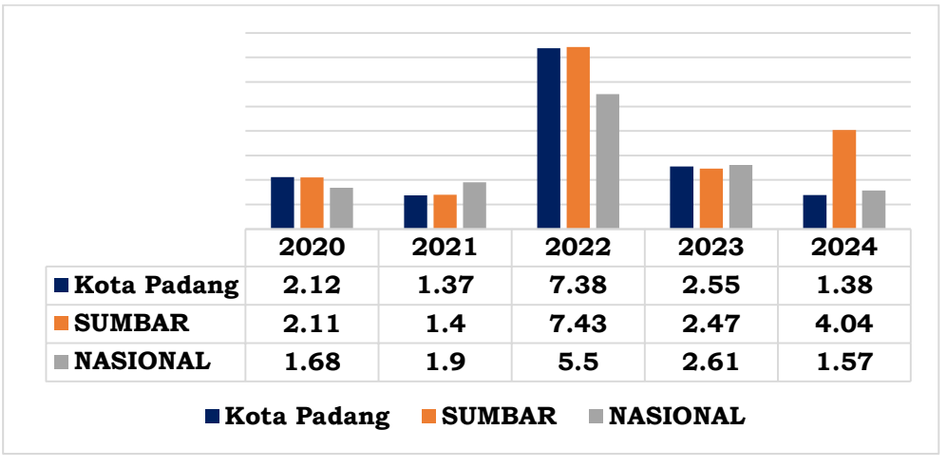

Sumber : Kota Padang Dalam Angka 2025

Perkembangan inflasi di Kota Padang dalam kurun lima tahun terakhir memperlihatkan bahwa inflasi tertinggi terjadi pada periode tahun 2022 dengan nilai 7,38. Tahun 2024 inflasi Kota Padang cukup terkendali dengan nilai 1,38, berada di bawah nilai inflasi Provinsi dan Nasional.

2.1.3.7.2 Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan

Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan merupakan turunan dari Indeks Inklusi Keuangan yang berguna untuk menentukan tingkat penggunaan produk dan layanan jasa keuangan oleh masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Indikator ini juga menunjukan ketersediaan akses bagi masyarakat untuk memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang disediakan lembaga keuangan formal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan.

Persentase rasio PDRB sektor jasa keuangan Kota Padang cukup fluktuatif dalam kurun tahun 2020-2024. Angka rasio tertinggi pada tahun 2021 yaitu 5,64, kemudian menurun pada tahun 2022-2023, dan lalu mengalami sedikit kenaikan pada tahun 2024 dengan persentase sebesar 5,29 %. Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan Kota Padang Tahun 2020-2024 dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel II- 66 Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan Kota Padang Tahun 2020-2024 (%)

Indikator	Capaian				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan	5,15	5,64	5,6	5,27	5,29

Sumber : BPS Kota Padang, 2025

2.1.3.7.3 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Indikator Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB merupakan sebuah alat pengukur yang digunakan untuk menghitung persentase kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah, serta

presentasi tersebut mampu menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak daerah bagi pemerintah daerah.

Tabel II- 67 Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB Kota Padang Tahun 2020-2024

Indikator	Capaian				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB	0,55	0,58	0,60	0,65	0,69

Sumber: BPS Kota Padang, 2025

2.1.3.7.4 Total Dana Pihak Ketiga Terhadap PDRB

Perhitungan Rasio Dana Pihak Ketiga per PDRB ini bertujuan untuk melihat kemampuan sumber pendanaan suatu daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah. Dana pihak ketiga merupakan dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun lembaga maupun badan usaha yang diperoleh bank dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh seluruh bank di suatu daerah. Rasio Dana Pihak Ketiga per PDRB merupakan perbandingan/persentase rasio total dana pihak ketiga perbankan di suatu daerah terhadap PDRB ADHB daerah tersebut pada suatu waktu tertentu.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik, rasio dana pihak ketiga per PDRB Kota Padang tahun 2024 yaitu 36,78%, dari Total Dana Pihak Ketiga sebesar Rp. 30.966,03 miliar dan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku sebesar Rp 84.182,56 miliar.

2.1.3.7.5 Nilai Transaksi Saham per Kapita

Sejak tahun 2020 hingga 2022, nilai transaksi saham per kapita di Kota Padang menunjukkan fluktuasi yang menarik. Pada tahun 2020 nilai transaksi saham per kapita tercatat sebesar Rp26.288.292. Tahun 2021 terjadi peningkatan yang lebih signifikan, dengan nilai transaksi saham per kapita mencapai Rp 26.387.586. Tren kenaikan ini berlanjut hingga tahun 2022 dengan nilai transaksi mencapai Rp 27.506.381. Namun, data untuk tahun 2023 tidak tersedia (NA), sehingga sulit untuk menilai kelanjutan tren ini secara penuh.

Secara keseluruhan, nilai transaksi saham per kapita menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2022, yang mungkin mencerminkan peningkatan partisipasi individu dalam pasar saham dan pertumbuhan ekonomi yang mendorong aktivitas perdagangan saham.

Tabel II- 68 Nilai Transaksi Saham per Kapita Kota Padang Tahun 2020-2022

Tahun	Nilai Transaksi Saham per Kapita (Rupiah)
2020	26.288.292
2021	26.387.586
2022	27.506.381

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2022

2.1.3.7.6 Total Kredit terhadap PDRB

Total Kredit per PDRB (%) menunjukkan persentase rasio total kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan di suatu daerah terhadap PDRB (atas dasar harga berlaku) daerah tersebut pada suatu waktu tertentu.Perhitungan Rasio Dana Pihak Ketiga per PDRB dan Rasio Total Kredit per PDRB ini bertujuan untuk melihat kemampuan sumber pendanaan dalam suatu daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah. Besarnya rasio kredit per PDRB dari rasio dana pihak ketiga per PDRB menggambarkan dana pihak ketiga (simpanan) belum mampu mendanai secara keseluruhan kredit yang disalurkan oleh lembaga keuangan ke sektor-sektor perekonomian.

Perkembangan total kredit terhadap PDRB Kota Padang tahun 2019 – 2023 dapat dilihat sebagai berikut.

Gambar II- 72 Total Kredit Terhadap PDRB Kota Padang Tahun 2019 – 2023 (%)

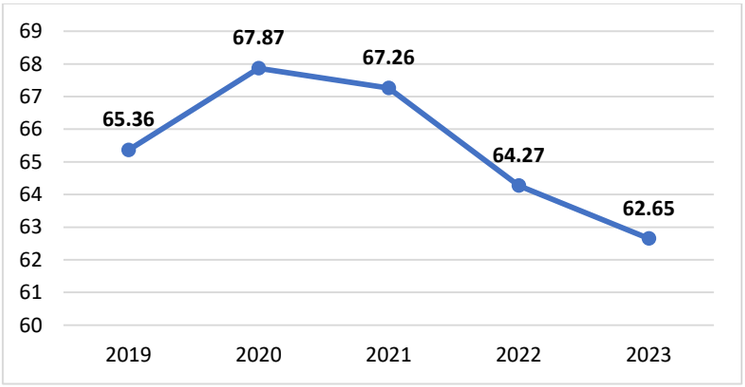

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan dan BPS Kota Padang, 2024

Dari tahun 2019 hingga 2023, rasio total kredit terhadap PDRB menunjukkan beberapa tren yang menarik. Pada tahun 2019, rasio kredit mencapai 65.36%, yang menandakan bahwa sektor kredit memiliki kontribusi signifikan dalam perekonomian. Pada tahun 2020, rasio sedikit meningkat menjadi 67.87%, mencerminkan pertumbuhan aktivitas kredit meskipun mungkin ada tantangan ekonomi global.

Pada tahun 2021 dan 2022, rasio tetap relatif stabil di sekitar 67.26% dan 64.27% masing-masing, menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan dan penurunan kecil, aktivitas kredit terus memainkan peran penting dalam perekonomian. Pada tahun 2023, rasio sedikit

menurun ke 62.65%, yang bisa menunjukkan adanya pengetatan kebijakan kredit atau perubahan dalam permintaan kredit.

Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa fluktuasi, rasio kredit terhadap PDRB tetap cukup tinggi, yang menunjukkan bahwa aktivitas kredit tetap menjadi pilar penting dalam struktur ekonomi.

2.1.3.7.7 Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah.

Berdasarkan Data Badan Riset dan Inovasi Nasional Indeks Daya Saing Daerah Kota Padang mengalami peningkatan dari 3,54 point pada tahun 2022 menjadi 3,93 point pada tahun 2023. Indek daya saing daerah Kota Padang berada diatas rata-rata Nasional dan Provinsi Sumatera Barat yang sudah mencapai angka 3,44 point dan 3,58 point. Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Indeks daya saing Kota Padang berada pada peringkat 1 di seluruh Kabupaten /Kota yang ada di Sumatera Barat

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

Pemerintah sebagai aparatur pelayanan masyarakat wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat berwujud pelayanan publik. Pelayanan yang baik dicerminkan dari tercapainya indikator – indikator antara lain sebagai berikut:

2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

2.1.4.1.1 Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi adalah suatu indeks yang digunakan untuk mengukur keberhasilan reformasi birokrasi pada suatu instansi pemerintah. Reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparaturur.

Indeks reformasi birokrasi Kota Padang terus mengalami peningkatan dengan capaian nilai tertinggi pada tahun 2024 yaitu 85,92 (A-) yang menempatkan Kota Padang dengan nilai tertinggi wilayah Sumatera dan 5 (lima) terbaik di Indonesia. Perkembangan indeks reformasi Kota Padang tahun 2020-2024 dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel II- 69 Indeks Reformasi Birokrasi Kota Padang Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	68,08	69,58	75,10	73,65	85,92

Sumber: Kementrian PAN-RB, 2025

2.1.4.1.2 Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi, serta penguatan sistem regulasi nasional yang merupakan salah satu indikator dalam penilaian reformasi birokrasi (RB). Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, penilaian Indeks Reformasi Hukum dilakukan pada (empat) variabel yaitu :

1. Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi atau memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi;
2. Kompetensi perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) yang berkualitas;
3. Kualitas re-regulasi atau de-regulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil review; dan
4. Penataan Database Peraturan Perundang-undangan.

Pengukuran IRH dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap seluruh Kementerian / lembaga dan pemerintah daerah sesuai dengan kalender kerja yang telah ditetapkan setiap tahun. Dalam rangka mendukung penilaian IRH, pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, Pemerintah Kota Padang telah berpartisipasi dalam penilaian tersebut pada tahun 2022 dengan nilai 73,25 (BB); tahun 2023 dengan nilai 57,21 (CC). Penurunan nilai IRH pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 menunjukkan perlunya pembenahan dalam penyusunan, penataan, dan pengelolaan produk hukum daerah. Namun, peningkatan signifikan pada tahun 2024 mencerminkan adanya perbaikan dan penguatan yang telah dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan sehingga IRH tahun 2024 dengan nilai 98,70 (Sangat Baik / AA).

Tabel II- 70 Indeks Reformasi Hukum

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Reformasi Hukum	Angka	-	-	73,25	57,21	98,70

Sumber: Bagian Hukum Setda Kota Padang, 2025

2.1.4.1.3 Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik dilingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks.

Angka indeks yang dihasilkan merupakan komposit dari berbagai data, baik data primer dan sekunder serta data obyektif maupun persepsi. Prinsip yang digunakan dalam menyusun indikator IPP berdasarkan kepada Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

1. Keadilan (Fairness);
2. Partisipasi (Participation);
3. Akuntabilitas (Accountability);
4. Transparansi (transparency);
5. Berdayaguna (useful);
6. Aksesibilitas (accessibility)

Aspek yang harus dipenuhi oleh unit penyelenggara pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, meliputi: Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan serta Inovasi. Indikator dihasilkan melalui persilangan antara prinsip dan aspek yang dijadikan dasar penilaian.

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kota Padang tahun 2020 - 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II- 71 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kota Padang Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	79,83	82,66	82,53	84,80	88,79

Sumber: Dinas DPMPTSP, 2025

2.1.4.1.4 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah daerah sudah merupakan keniscayaan. Disebutkan dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, bahwa pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. E-Government

adalah upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik. Suatu penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan informasi dan komunikasi.

SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Pemerintah menyadari pentingnya peran SPBE untuk mendukung semua sektor pembangunan. Upaya untuk mendorong penerapan SPBE telah dilakukan oleh pemerintah dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan sektoral yang mengamanatkan perlunya penyelenggaraan sistem informasi atau SPBE. Terkait dengan otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan e-government. Sejauh ini kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah melaksanakan SPBE secara sendiri-sendiri sesuai dengan kapasitasnya, dan mencapai tingkat kemajuan SPBE yang sangat bervariasi secara nasional.

Tabel II- 72 Indeks SPBE Kota Padang Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	2,47	3,00	3,01	3,54	3,96

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

2.1.4.1.5 Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK

Survei Penilaian Integritas (SPI) adalah survei yang dilakukan terhadap institusi untuk memetakan dan memonitor risiko korupsi serta upaya pencegahan korupsi. SPI tidak hanya menjadi alat untuk mengukur integritas pemerintah, tetapi juga sebagai langkah konkrit dalam memerangi korupsi yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan publik secara keseluruhan. Dengan partisipasi yang jujur dan objektif dari para responden, hasil SPI dapat memberikan gambaran yang akurat dan berarti bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Nilai SPI Kota Padang dalam kurun tahun 2022 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II- 73 Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) Kota Padang

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Survei Penilaian Integritas (SPI)	-	-	71,30	64,84	64,84

Sumber : Inspektorat, 2024

2.1.4.1.6 Persentase Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah (Perda)

Pada indikator persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, tingkat penyelesaian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah 100%. Artinya, seluruh gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang dideteksi oleh Satuan Polisi Pamong Praja diselesaikan dan ditanggapi seluruhnya dengan cara sebanyak 2025 kasus diselesaikan dengan cara non yustisi, 65 kasus diselesaikan secara yustisi (sidang tipiring) dan 176 kasus diselesaikan dengan serahkan ke Dinas Sosial. Adapun penyelesaian kasus pelanggaran perda ini menunjukkan tren yang meningkat sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II- 74 Persentase Penanganan Pelanggaran Perda Kota Padang Tahun

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban kota	Persentase penyelesaian pelanggaran perda	41,91%	322,16%	84,5%	100%	100%

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang, 2025

2.1.4.1.7 Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ditunjukkan dengan penilaian terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Substansi LPPD merupakan penjelasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan daerah. Kewenangan daerah dimaksud adalah melaksanakan berbagai kebijakan melalui penyelenggaraan urusan pemerintahan, terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib (Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar), Urusan Pilihan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, dan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan. LPPD memuat capaian kinerja makro, seperti: indeks pembangunan

manusia, angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, ketimpangan pendapatan.

Penetapan hasil EKPPD dikelompokkan ke dalam lima klasifikasi, yaitu:

1. Skor Kinerja 1,00 - 1,80: Sangat Rendah
2. Skor Kinerja 1,81 - 2,60: Rendah
3. Skor Kinerja 2,61 - 3,40: Sedang
4. Skor Kinerja 3,41 - 4,20: Tinggi
5. Skor Kinerja 4,21 - 5,00: Sangat Tinggi.

Nilai LPPD Kota Padang dalam beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II- 75 Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Padang tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Nilai (Tahun)				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai LPPD	Angka	3,316	3,316	3,316	2,99	Belum rilis

Sumber: Kementrian Dalam Negeri RI, 2025

Berdasarkan Nilai LPPD tahun 2020-2024 di atas, terlihat nilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Padang berada pada kategori SEDANG. Penilaian saat ini memperlihatkan perlunya upaya peningkatan kinerja dengan memperhatikan semua aspek (semua Urusan Pemerintahan) yang berkontribusi terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.1.4.2 Peningkatan Stabilisasi Keamanan Daerah

2.1.4.2.1 Angka kriminalitas

Angka kriminalitas adalah jumlah kejadian tindak kejahatan yang dilaporkan atau tercatat dalam suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Angka ini digunakan sebagai indikator tingkat keamanan dan ketertiban suatu daerah serta sering menjadi dasar dalam pembuatan kebijakan hukum dan sosial.

Jumlah kasus kriminal dan jumlah konflik sosial yang terjadi pada wilayah Kota Padang cenderung mengalami peningkatan dalam kurun tahun 2020-2024, angka kriminalitas mengalami peningkatan dari 1.104 di tahun 2021 menjadi 1.789 di tahun 2024 dengan kasus terbanyak pada tahun 2023 yaitu 1.968. Berikut adalah angka kriminalitas di Kota Padang tahun 2020-2024 :

Tabel II- 76 Angka Kriminalitas Kota Padang Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Nilai (Tahun)				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Kriminalitas	Angka	-	1.104	1.291	1.968	1.789

Sumber: BPS Kota Padang, 2025

2.1.5 Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang disusun berdasarkan pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi, Kabupaten dan Kota yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai berikut:

2.1.5.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Tabel II- 77 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Urusan	No	IKK OUTCOME	No	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
						2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Pendidikan	1	Tingkat partisipasi warga negara usia warga negara usia dalam PAUD	1	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	Jumlah PAUD : 507	Jumlah PAUD : 540	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				2	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	16.370	18.164	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				3	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				4	Jumlah kebutuhan minimal pendidikPAUD (Negeri dan Swasta)	1.104	1.783	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				5	Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	1.104	1.783	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				6	Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D- IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	322	1.393	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				7	Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memilikiijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal	199	429	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

No	Urusan	No	IKK OUTCOME	No	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
						2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah				
		2	Tingkat partisipasiwarga negara usia7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	1	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	• Jumlah SD : 346 • Jumlah SMP : 100	• Jumlah SD : 362 • Jumlah SMP : 122	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				2	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasarpeserta didik dari PemerintahDaerah	89.199	93.735	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeridan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didikdari Pemerintah Daerah	36.165	45.151	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				4	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	69.378	72.235	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				5	Jumlah peserta didik pada jenjangsekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerimapembebasan biaya pendidikan	28.325	36.367	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				6	Jumlah kebutuhan minimal pendidikpada jenjang sekolah dasar (Negeridan Swasta)	4.782	5.892	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				7	Jumlah kebutuhan minimal	2.406	3.389	Dinas	

No	Urusan	No	IKK OUTCOME	No	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
						2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					pendidikpada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)			Pendidikan dan Kebudayaan	
				8	Jumlah pendidik pada jenjangsekolah dasar	4.782	5.892	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				9	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama(Negeri dan Swasta)	2.406	3.389	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				10	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	1.248	1.283	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				11	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	617	1.351	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				12	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	1.248	1.283	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				13	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama(Negeri dan Swasta)	617	1.351	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				14	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat(D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	2.130	5.572	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeridan Swasta)	1.261	3.344	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

No	Urusan	No	IKK OUTCOME	No	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
						2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik				
				16	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	291	319	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				17	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama(Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	79	117	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				18	Jumlah tenaga penunjang lainnyapada jenjang sekolah dasar (Negeridan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat	1.146	1.189	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				19	Jumlah tenaga penunjang lainnyapada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat	576	665	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

No	Urusan	No	IKK OUTCOME	No	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
						2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		3	Tingkat partisipasiwarga negara usia13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	1	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi (Jumlah sekolahterakreditasi yang dimaksud adalahseluruh sekolah yang sudah terakreditasi, baik A, B atau C (dibuat terpisah)	• Jumlah SD : 346 • Jumlah SMP : 100	• Jumlah SD : 362 • Jumlah SMP : 122	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				2	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didikdari Pemerintah Daerah	89.199	93.735	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yangmenerima perlengkapan dasar peserta didik dari PemerintahDaerah	36.165	45.151	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				4	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	69.378	72.235	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				5	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yangmenerima pembebasan biaya pendidikan	28.325	36.367	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				6	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	4.782	5.892	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				7	Jumlah kebutuhan minimal pendidikpada jenjang sekolah menengah pertama	2.406	3.389	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				8	Jumlah pendidik pada jenjangsekolah dasar	4.782	5.892	Dinas Pendidikan	

No	Urusan	No	IKK OUTCOME	No	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
						2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
								dan Kebudayaan	
				9	Jumlah pendidik pada jenjangsekolah menengah pertama	2.406	3.389	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				10	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	1.248	1.283	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				11	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	617	1.351	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				12	Jumlah tenaga kependidikan padajenjang sekolah dasar	1.248	1.283	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				13	Jumlah tenaga kependidikan padajenjang sekolah menengah pertama	617	1.351	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				14	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	2.130	5.752	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yangmemiliki ijazah diploma empat (D- IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1.261	3.344	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				16	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki jazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan	291	319	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

No	Urusan	No	IKK OUTCOME	No	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
						2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					pelatihancalon kepala sekolah				
				17	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertamayang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihancalon kepala sekolah	79	117	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				18	Jumlah tenaga penunjang lainnyapada jenjang sekolah dasar yangmemiliki jazah SMA/sederajat	1.146	1.189	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				19	Jumlah tenaga penunjang lainnyapada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazahSMA/sederajat	576	665	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		4	Tingkat partisipasiwarga negara usia7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	1	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	Jumlah : 30	29	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				2	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasarpeserta didik dari PemerintahDaerah	5.237	4.467	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				3	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	493	4.467	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				4	Jumlah kebutuhan minimal	155	203	Dinas	

No	Urusan	No	IKK OUTCOME	No	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
						2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					pendidikpada satuan pendidikan kesetaraan(Negeri dan Swasta)			Pendidikandan Kebudayaan	
				5	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	155	203	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				6	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazahdiploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	112	169	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				7	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihancalon kepala sekolah	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				8	Jumlah kepala sekolah pada satuanpendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	19	22	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2	Kesehatan	1	Rasio daya tampung RS Rujukan	1	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kotayang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	27 RS	27	Dinas Kesehatan	
		2	Persentase RS Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasi	1	Jumlah RS dibina dan dipersiapkanakreditasinya	27 RS	27	Dinas Kesehatan	
		3	Persentase ibu hamil	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Daftar logistik pelayanan	Daftar logistik pelayanan	Dinas Kesehatan	

No	Urusan	No	IKK OUTCOME	No	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
						2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil			kesehatan ibuhamil (1.227.338)	kesehatan ibu hamil (588.020)		
				2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	Daftar SDM pelayanan kesehatan ibuhamil (74)	Daftar SDM pelayanan kesehatan ibu hamil (75)	Dinas Kesehatan	
		4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Daftar logistik pelayanan kesehatan ibu bersalin (39.549)	Daftar logistik pelayanan kesehatan ibu bersalin (18.948)	Dinas Kesehatan	
				2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	Daftar SDM pelayanan kesehatan ibu bersalin (56)	Daftar SDM pelayanan kesehatan ibu bersalin (48)	Dinas Kesehatan	
		5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Daftar logistik pelayanan kesehatan bayibaru lahir (79.140)	Daftar logistik pelayanan kesehatan bayi baru lahir (35.982)	Dinas Kesehatan	
				2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	Daftar SDM pelayanan kesehatan bayibaru lahir (74)	Daftar SDM pelayanan kesehatan bayi baru lahir (72)	Dinas Kesehatan	
		6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Daftar logistik pelayanan kesehatan balita (479.506)	Daftar logistik pelayanan kesehatan balita (254.190)	Dinas Kesehatan	
				2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Daftar SDM pelayanan kesehatan balita (16.333)	Daftar SDM pelayanan kesehatan balita (16.333)	Dinas Kesehatan	

No	Urusan	No	IKK OUTCOME	No	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
						2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Daftar logistik pelayanan kesehatan anakusia pendidikandasar (828.230)	Daftar logistik pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar (68.423)	Dinas Kesehatan	
				2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usiapendidikan dasar sesuai standar	Daftar SDM pelayanan kesehatan anakusia pendidikandasar (18.165)	Daftar SDM pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar (7.950)	Dinas Kesehatan	
		8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatansesuai standar	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Daftar logistik pelayanan kesehatan usia 15-59 tahun (442.785)	Daftar logistik pelayanan kesehatan usia 15-59 tahun (2.431.262)	Dinas Kesehatan	
				2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Daftar SDM pelayanan kesehatan usia 15-59 tahun (600)	Daftar SDM pelayanan kesehatan usia 15-59 tahun (924)	Dinas Kesehatan	
		9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatansesuai standar	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Daftar logistik pelayanan kesehatan usia 60 tahun (120.584)	Daftar logistik pelayanan kesehatan usia 60tahun (277.032)	Dinas Kesehatan	
				2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Daftar SDM pelayanan kesehatan usia 60 tahun (140)	Daftar SDM pelayanan kesehatan usia 60tahun (120)	Dinas Kesehatan	
		10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Daftar logistik pelayanan kesehatan penderitahipertensi	Daftar logistik pelayanan kesehatan penderita	Dinas Kesehatan	

No	Urusan	No	IKK OUTCOME	No	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
						2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			pelayanan kesehatan sesuai standar			(105.346)	hipertensi (71.780)		
				2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Daftar SDM pelayanan kesehatan penderita hipertensi (600)	Daftar SDM pelayanan kesehatan penderita hipertensi (924)	Dinas Kesehatan	
		11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Daftar logistik pelayanan kesehatan penderita DM (18.972)	Daftar logistik pelayanan kesehatan penderita DM (531.956)	Dinas Kesehatan	
				2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Daftar SDM pelayanan kesehatan penderita DM (600)	Daftar SDM pelayanan kesehatan penderita DM (924)	Dinas Kesehatan	
		12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Daftar logistik pelayanan kesehatan ODGJ (2.283)	Daftar logistik pelayanan kesehatan ODGJ (2.393)	Dinas Kesehatan	
				2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Daftar SDM pelayanan kesehatan ODGJ (49)	Daftar SDM pelayanan kesehatan ODGJ (48)	Dinas Kesehatan	
		13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Daftar logistik pelayanan kesehatan orang terduga TBC (133.419)	Daftar logistik pelayanan kesehatan orang terduga TBC (127.308)	Dinas Kesehatan	
				2	Jumlah SDM	Daftar SDM	Daftar SDM	Dinas Kesehatan	

No	Urusan	No	IKK OUTCOME	No	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
						2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	pelayanan kesehatan orang terduga TBC (306)	pelayanan kesehatan orang terduga TBC (500)		
		14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Daftar logistik pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV (97.628)	Daftar logistik pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV (70.965)	Dinas Kesehatan	
				2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Daftar SDM pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV (276)	Daftar SDM pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV (270)	Dinas Kesehatan	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Rasio luas kawasan permukiman rawanbanjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kota	1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	23,1184 Ha	21,4804 Ha	Dinas PUPR	
				2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	40.3299 m	38.596,1 m	Dinas PUPR	
				3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	Tidak ada	Tidak ada	Dinas PUPR	Kewenangan BalaiWilayah Sungai Sumatera V Kementerian PUPR
				4	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi,akresi di WS kewenangan kabupaten/kota	Tidak ada	Tidak ada	Dinas PUPR	Kewenangan BalaiWilayah Sungai Sumatera V Kementerian PUPR

No	Urusan	No	IKK OUTCOME	No	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
						2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					(m)				
				5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencanapengelolaan sumber daya air WSKewenangan kabupaten/kota	Ada	Ada	Dinas PUPR	
				6	Rencana Teknis tata pengaturan airdan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	Ada	Ada	Dinas PUPR	
				7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota i. Bangunan perkuatan tebing(m) ii. Tanggul sungai (m) iii. Kanal bajir (m) iv. Pintu air/bendung pengendalibanjir (Unit)	Jumlah • Bangunan perkuatan tebing 4.473,6 meter • Tanggul sungai .. • Kanal bajir. (m) • Pintuair/bendung pengendali banjr 2 (Unit)/124,5 meter • Pompa banjir (Unit dan Kapasitas) • Polder/Kolam Retensi……(Unit) • Breakwater …(m) • Seawall dan Bangunan	Jumlah Pintu air/bendung pengendali banjr 2 (Unit)/124,5 meter		

No	Urusan	No	IKK OUTCOME	No	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
						2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						pengaman pantai lainnya .....(m)			
		2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS KewenanganKota	1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	23,1184 Ha	21,4804 Ha	Dinas PUPR	
				2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota(m)	40.3299 m	38.596,1 m	Dinas PUPR	
				3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	Tidak ada	Tidak ada	Dinas PUPR	Kewenangan Balai Wilayah Sungai Sumatera V Kementerian PUPR
				4	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi,akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	Tidak ada	Tidak ada	Dinas PUPR	Kewenangan Balai Wilayah Sungai Sumatera V Kementerian PUPR
				5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencanapengelolaan sumber daya air WSKewenangan kabupaten/kota	ada	ada	Dinas PUPR	
				6	Rencana Teknis tata pengaturan airdan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	ada	ada	Dinas PUPR	

No	Urusan	No	IKK OUTCOME	No	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
						2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota i. Bangunan perkuatan tebing(m) ii. Tanggul sungai (m) iii. Kanal banjir (m) iv. Pintu air/bendung pengendalibanjir (Unit) v. Pompa banjir (Unit dan Kapasitas) vi. Polder/Kolam Retensi (Unit) vii. Breakwater (m) viii. Seawall dan Bangunanpengaman pantai lainnya (m)	Jumlah • Bangunan perkuatan tebing...(m) • Tanggul sungai...(m) • Kanal banjir.(m) • Pintu air / bendung pengendali banjir....(Unit) • Pompa banjir (Unit dan Kapasitas) • Polder/Kolam Retensi....(Unit) • Breakwater..(m) • Seawall dan Bangunan pengaman pantai lainnya...(m)	Jumlah • Bangunan perkuatan tebing..(m) • Tanggul sungai...(m) • Kanal banjir...(m) • Pintu air / bendung pengendali banjir....(Unit) • Pompa banjir (Unit dan Kapasitas) • Polder/Kolam Retensi....(Unit) • Breakwater ...(m) • Seawall dan Bangunan pengaman pantai lainnya...(m)	Dinas PUPR	
		3	Rasio luas daerah irigasi kewenangankota yang dilayani oleh jaringan irigasi	1	Persentase panjang jaringan irigasiprimer dalam kondisi baik	33,884 meter --------x 100 % 35.713 m 94,87 %	30,200 meter --------x 100 % 37.750 m = 80 %	Dinas PUPR	

No	Urusan	No	IKK OUTCOME	No	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
						2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				2	Persentase panjang jaringan irigasisekunder dalam kondisi baik	81.409 meter --------x100 % 94,733 m 85,93 %	43.688 meter --------x100 % 53,360 m = 80 %	Dinas PUPR	
				3	Persentase panjang jaringan irigasitersier dalam kondisi baik	.....	501,60 meter -------- x 100 % 501,60 m = 100 %	Dinas pertanian	
		4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kota	1	Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota	Ada	Ada	DPRKP	
				2	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota	Ada	Ada	DLH DPRKP	
				3	Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggaraan SPAM	2	3	DPRKP	
				4	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	12	15	DPRKP	
				5	Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	1 Pamsimas	1	DPRKP	
		5	Persentase jumlah rumah yang memperoleh	1	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan	183.408 rumah	185.049 rumah	DPRKP	

No	Urusan	No	IKK OUTCOME	No	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
						2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			layanan pengolahan air limbah domestik		pelayanan dasar menggunakan SPALD S				
				2	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	2.086 rumah	2.099 rumah	DPRKP	
				3	Jumlah rumah dengan akses unitpengolahan setempat dan datajumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	185.494 rumah	187.148 rumah	DPRKP	
				4	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	30.386 rumah	34.356 rumah	DPRKP	
				5	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	30.386 rumah	34.356 rumah	DPRKP	
				6	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	30.386 rumah	34.356 rumah	DPRKP	
				7	Kinerja penyediaan pelayananSPALD S akses dasar	9.622 -------- x 100% 10.247 = 93,90%	9.680 -------- x 100% 10.309 = 93,90%	DPRKP	

No	Urusan	No	IKK OUTCOME	No	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
						2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				8	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	31.846 --------x100% 228.115 = 13,96%	33.172 -------- x 100% 229.519 = 14,69 %	DPRKP	
				9	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	2.086 -------- x100% 11.918 =17,50	2.099 -------- x100% 11.991 = 17,50%	DPRKP	
				10	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	183.408 -------- x100% 226.444 = 80,99%	185.049 -------- x100% 227.873 = 81,22 %	DPRKP	
				11	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	18 -------- x 100% 20 = 90%	18 -------- x 100% 20 = 90%	DPRKP	
				12	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	81,6 -------- x 100% 200 = 40,80%	81,6 -------- x 100% 200 = 40,80%	DPRKP	

No	Urusan	No	IKK OUTCOME	No	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
						2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				13	Kinerja penyediaan sambunganrumah yang tersambung ke IPALD	2.086 --------x100% 11.918 = 17,50%	2.099 --------x 100% 11.991 = 17,50%	DPRKP	
				14	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	37.471 --------x100% 226.444 = 14,34 %	34.356 -------- x100% 227.837 = 15,08 %	DPRKP	
		6	Rasio kepatuhan IMB kota	1	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	.....		Dinas PUPR	
				2	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	3.795	5.194	DPUPR	
				3	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	Ada	Ada	Dinas PUPR	
				4	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	Ada	Ada	Dinas PUPR	
				5	Jumlah bangunan gedung yangditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	4 Unit	-	BPKAD	
				6	Jumlah bangunan gedung yangditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk	74 unit	-	BPKAD / Dinas Pariwisata	

No	Urusan	No	IKK OUTCOME	No	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
						2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					kepentingan strategis daerah provinsi				
				7	Jumlah bangunan gedung negaramilik Pemerintah Kab/Kota	702 unit	702 unit	BPKAD	
				8	Jumlah bangunan gedung negaramilik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/ dirawat	702 unit	702 unit	BPKAD	
		7	Tingkat kemantapan jalan kota	1	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SKjalan kewenangan Kab/Kota	624.691 Km	624.691 Km	Dinas PUPR	
				2	Panjang jalan yang dibangun	2.775 meter	2.775 meter	Dinas PUPR	
				3	Panjang jembatan yg dibangun	39 meter	39 meter	Dinas PUPR	
				4	Panjang jalan yang ditingkatkan(struktur/fungsi)	5.791 meter	5.791 meter	Dinas PUPR	
				5	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	235,8 m	260,1 m	Dinas PUPR	
				6	Panjang jalan yang direkonstruksiatau direhabilitasi	15.617 m	18.875,25 m	Dinas PUPR	
				7	Panjang jembatan yang direhabilitasi	35 meter	35 meter	Dinas PUPR	
				8	Panjang jalan yang dipelihara	23.814 meter	27.439,3 meter	Dinas PUPR	
				9	Panjang jembatan yang dipelihara	930,55 meter	1.181,55 meter	Dinas PUPR	
		8	Rasio tenaga	1	Jumlah Pelatihan Tenaga	Tidak ada	Tidak ada	Dinas PUPR	

No	Urusan	No	IKK OUTCOME	No	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
						2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			operator/teknisi/ analisis yang memilikisertifikat kompetensi		operator/teknisi/analis di wilayah kabupaten/kota				
				2	Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analis yang terlatihdi wilayah kabupaten/kota	367	367	Dinas PUPR	
				3	Jumlah tenaga kerja konstruksiterlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analis di wilayah kabupaten/kota	367	367	Dinas PUPR	
				4	Terselenggaranya Sistem InformasiPembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	Ada	Ada	Dinas PUPR	
				5	Tersedianya data dan informasipotensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	Ada	tidak	Dinas PUPR	
				6	Tersedianya data dan informasipotensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	Tidak	Tidak	Dinas PUPR	
				7	Tersedianya data dan informasipotensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang	Tidak	Tidak	Dinas PUPR	

No	Urusan	No	IKK OUTCOME	No	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
						2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					bersumber daripendanaan lainnya				
				8	Tersedianya data dan informasipaket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh	Ada	Ada	Dinas PUPR	
					badan usaha jasa konstruksi yangtermutakhir secara berkala	Ada	Ada		
				9	Tersedianya data dan profil OPDsub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	Ada	Ada	Dinas PUPR	
				10	Tersedianya data dan informasipelatihan tenaga operator dan teknisi/analis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	Ada	Ada	Dinas PUPR	
				11	Tersedianya data dan informasitenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat	Ada	Ada	Dinas PUPR	

No	Urusan	No	IKK OUTCOME	No	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
						2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					pelatihan operator dan teknisi/analis				
				12	Tersedianya data dan informasitenaga kerja konstruksi terlatihyang tersertifikasi operator/teknisi/analis di wilayah kab/kota	Tidak	Ada	Dinas PUPR	
				13	Tersedianya data dan informasibadan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	624.691 Km	Tidak Ada	Dinas PUPR	
				14	Tersedianya data dan informasipemenuhan komitmen permohonanIUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Tidak Ada	Tidak Ada	DPMPTSP	Izin sudah dihapuskan sesuai PP No. 5 Tahun 2021 tidak ada lagi di DPMPTSP
				15	Tersedianya data dan informasihasil pengawasan ketidaksesuaianjenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada	Ada	Dinas PUPR	
				16	Tersedianya data dan informasikecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada	Ada	Dinas PUPR	
				17	Tersedianya data dan informasihasil pengawasan ketidaksesuaianjenis, sifat,	Ada	Ada	Dinas PUPR	

No	Urusan	No	IKK OUTCOME	No	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
						2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadikewenangan pengawasannya				
				18	Jumlah badan usaha yang memilikiIUJKN di wilayah kab/kota	Tidak ada	Tidak ada	DPMPTSP	Izin sudah dihapuskan sesuai PP No. 5 Tahun 2021 tidak ada lagidi DPMPTSP
				19	Jumlah usaha perseorangan yangmemiliki TDUP di wilayahkabupaten/kota	Tidak ada	Tidak ada	DPMPTSP	Izin sudah dihapuskan sesuai PP No. 5 Tahun 2021 tidak ada lagidi DPMPTSP
				20	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	Tidak ada	Tidak ada	DPMPTSP	Izin sudah dihapuskan sesuai PP No. 5 Tahun 2021 tidak ada lagidi DPMPTSP
				21	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan diwilayah Kab/Kota	Tidak ada	.....	DPMPTSP/ DPUPR/ Disnakerin	
				22	Jumlah pemenuhan komitmenpermohonan IUJK badan usaha danTDUP yang disetujui	Tidak ada	Tidak ada	DPMPTSP	Izin sudah dihapuskan sesuai PP No. 5 Tahun 2022 tidak ada lagidi DPMPTSP
				23	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentukdan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenanganpengawasannya	171	55	Dinas PUPR	
				24	Jumlah kecelakaan	0	0	Dinas PUPR	

No	Urusan	No	IKK OUTCOME	No	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
						2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					konstruksi padaproyek yang menjadi kewenangan pengawasannya				
				25	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentukdan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	171	55	Dinas PUPR	
		9	Rasio proyek yangmenjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi		-	-		Dinas PUPR	
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1	Penyediaan dan rehabilitasi rumahlayak huni bagi korban bencana kota	1	Jumlah rumah yang berada padakawasan rawan bencana danrencana penanganannya	9.616	11.304	DPRKP	
				2	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	3	3	DPRKP	
				3	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	3 RT, 5 KK, 17 JIWA	3 RT, 5 KK, 13 JIWA	DPRKP	
				4	Jumlah unit rumah korban bencanayang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	2 UNIT	3 UNIT	DPRKP	
				5	Jumlah unit rumah korban bencanayang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	1 UNIT	-	DPRKP	
				6	Jumlah unit rumah korban	0	0	DPRKP	

No	Urusan	No	IKK OUTCOME	No	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
						2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					bencanayang dibangun baru/relokasi sesuaidengan rencana aksi				
				7	Jumlah unit dan lokasi rumah sewayang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0	0	DPRKP	
				8	Jumlah RT, KK dan Jiwa korbanbencana yang terfasilitasi	3 RT, 5 KK, 17 jiwa	3 RT, 5 KK, 13 jiwa	DPRKP	
				9	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	26,3 Ha	26,3 Ha	DPRKP	Sungai Pisang dan Jaruai, Kec. Bungus Teluk Kabung
		2	Fasilitasi penyediaan rumahlayak huni bagi masyarakat terdampak relokasiprogram pemerintah kota	1	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkanfasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	0	DPRKP	
				2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belummendapatkan fasilitasi penggantianhak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencanapemenuhanSPM	0	0	DPRKP	
				3	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	0	DPRKP	
				4	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan	0	0	DPRKP	

No	Urusan	No	IKK OUTCOME	No	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
						2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					penyediaan rumahlayak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM				
				5	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	0	DPRKP	
				6	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	0	0	DPRKP	
		3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10ha di kab/ kota yang ditangani	1	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	230,29 Ha	230,29 Ha	DPRKP	SK Kumuh No. 163Tahun 2014 = 107,96 Ha SK Kumuh No. 501Tahun 2019 = 122,33 Ha Total = 230,29 Ha
				2	Jumlah unit peningkatan kualitasRTLH	9.194 unit	9.428 unit	DPRKP	Akumulasi perbaikan RTLH 2014-2024
				3	Jumlah luasan (ha) penangananinfrastruktur kawasan kumuh	192,58 Ha	230,29 Ha	DPRKP	Penanganan kawasan kumuh tahun 2014-2024
		4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	1	Jumlah rumah di kab/kota	238.362 unit	239.828 unit	DPRKP	
				2	Jumlah unit Peningkatan KualitasRTLH	9.194 unit	9.428 unit	DPRKP	
				3	Jumlah rumah tidak layak huni	7.314 unit	7.080 unit	DPRKP	Akumulasi sisa RTLH tahun 2014-2023
				4	Jumlah rumah yang tidak dihuni	0	0	DPRKP	
				5	Rasio rumah dan KK	288.457	291.127	DPRKP	

No	Urusan	No	IKK OUTCOME	No	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
						2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						-------- x100% 238.362 =1,21%	-------- x 100% 239.828 = 1,21 %		
				6	Jumlah rumah pembangunan baru	5.085 unit	6.551 unit	DPRKP	
		5	Jumlah perumahanyang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Saranadan Utilitas Umum)	1	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	232.570 rumah	235.083 rumah	DPRKP	
				2	Jumlah unit rumah yang sudahdifasilitasi air minum	232.570 rumah	235.083 rumah	DPRKP	
				3	Jumlah unit rumah yang terfasilitasijalan lingkungan	10.373 unit	10.373 unit	DPRKP	
				4	Jumlah unit rumah yang terfasiltasiakses sanitasi (on site / off site)	185.494 rumah	187.148 rumah	DPRKP	
				5	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	0	0	DPRKP	
				6	Jumlah unit rumah yang terfasilitasiakses PJU	8.216	8.216	DPRKP/ Dishub	
				7	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	68	68	DPRKP	Data Asosiasi (REI dan APERSI)
				8	Jumlah pengembang yang teregistrasi	68	68	DPRKP	
				9	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	19	19	DPRKP	Tahun 2022-2024
5	Ketentra man,	1	Persentase Gangguan	1	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam	2.121	2.266	Satpol PP	

No	Urusan	No	IKK OUTCOME	No	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
						2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		Trantibum yang dapat diselesaikan		Kab/Kota yang ditangani				
				2	Jumlah Satlinmas yang terlatih dandikukuhkan	24 ---- x 100 % 24 = 100%	24 ---- x 100 % 24 = 100%	Satpol PP	
				3	Jumlah Peraturan Daerahdan Perkada yangditegakkan	65 ---- x 100 % 65 = 100%	21 ---- x 100 % 21 = 100%	Satpol PP	
				4	Jumlah Polisi Pamong Praja yangmemiliki kualitas sebagai PPNS	8 ----- x 100 % 61 =13,11%	10 ----- x 100 % 59 =16,94%	Satpol PP	
				5	Tersedianya SOP dalam penegakanPeraturan Daerahdan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	Ada 10 SOP	Ada 10 SOP	Satpol PP	
				6	Tersedianya sarana prasarana minimal	Ada Sebanyak 8 Jenis	Ada Sebanyak 8 Jenis	Satpol PP	
		2	Persentase Peraturan Daerahdan Perkada yang ditegakkan	1	Persentase Peraturan Daerahdan Perkada yang ditegakkan	100	100	Satpol PP	

No	Urusan	No	IKK OUTCOME	No	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
						2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasirawan bencana	1	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakansah/legal	0 -------- x100% 0 = 100 %	0 -------- x100% 0 = 100 %	BPBD	
				2	Persentase jumlah penduduk dikawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	14.694 --------x100% 928.541 =1,58 %	665.761 --------x100% 939.851 = 0,709 %	BPBD	
		4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	1 -------- x 100 % 1 = 100 %	1 -------- x100 % 1 = 100 %	BPBD	
				2	Persentase penyelesaian dokumen renkon sampai dinyatakan sah/legal	0 --------x100 % 0 = 0 %	0 --------x100 % 0 = 0 %	BPBD	
				3	Persentase jumlah aparaturur dan warga negara yang ikut pelatihan (Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana)	3.619 --------x 100% 928.541 = 0,39 %	7.965 -------- x 100 % 939.851 = 0,85 %	BPBD	
				4	Persentase warga negara yang ikutpelatihan	3.619 --------x100%	7.965 --------x100 %	BPBD	

No	Urusan	No	IKK OUTCOME	No	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
						2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						928.541 = 0,39 %	939.851 = 0,85 %		
				5	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	30.551 --------x100% 928.541 = 3,29 %	939.851 --------x100 % 939.851 = 100 %	BPBD	
				6	Persentase warga negara yangmendapat peralatan perlindungan	270 --------x100 % 928.541 = 0,02 %	939.851 -------- x100% 939.851 = 100 %	BPBD	
		5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan danevakuasi korban bencana	1	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiapstatus KLB	0 -------- x 100 % 0 = 0 %	0 -------- x 100 % 0 = 0 %	BPBD	Tidak ada KLB
				2	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiapstatus darurat bencana	1 --------x100% 1 = 100 %	1 --------x100% 1 = 100 %	BPBD	
				3	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	68 --------x100% 68	68 --------x100% 68	BPBD	

No	Urusan	No	IKK OUTCOME	No	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
						2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						= 100 %	=100 %		
				4	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	1.363 --------x100% 381,587 = 0,035%	2.337 --------x100% 2.337 = 100 %	BPBD	
		6	Persentase pelayanan penyelamatan danevakuasi korban bencana	1	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi padakondisi membahayakan manusia(operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/ kota	11 Jenis 642 Kejadian	9 Jenis 1.148 Kejadian	Dinas Damkar	
				2	Tersedianya pos sektor damkaryang dilengkapi sarana prasaranadamkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	Ada	Ada	Dinas Damkar	
				3	Tersedianya aparaturur selama 24(jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	Ada	Ada	Dinas Damkar	
				4	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar,sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan/desa	(Dibuat dalam bentuk) a. Pos 1. b. Pos 2. WMK 1	(Dibuat dalam bentuk) a. Pos 1.	Dinas Damkar	

No	Urusan	No	IKK OUTCOME	No	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
						2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						c. Pos 3. WMK 2 d. Pos 4. WMK 3 e. Pos 5. WMK 4 f. Pos 6. g. Mako 113	b. Pos 2. WMK 1 c Pos 3. WMK 2 d Pos 4. WMK 3 e Pos 5. WMK 4 f Pos 6. Mako 113		
				5	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	740	607	Dinas Damkar	
				6	Jumlah aparaturur pemadam kebakaran yang memenuhi StandarKualifikasi Pemadam sebagaimanadimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparaturur Pemadam Kebakaran	183	177	Dinas Damkar	
				7	Jumlah relawan kebakaran dibawah binaan Dimas PemadamKebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	Nihil	Nihil	Dinas Damkar	
				8	Jumlah peningkatan kapasitas aparaturur pemadam kebakaran	195 orang	199 orang	Dinas Damkar	
		7	Waktu tanggap (response time) penanganan	1	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	6,8 Menit	7,7 Menit	Dinas Damkar	

No	Urusan	No	IKK OUTCOME	No	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
						2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			kebakaran						
6	Sosial	1	Persentase penyandang disabilitas terlantar,anak terlantar, lanjut usia terlantardan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	1	Jumlah Layanan data yang dimiliki	1 Layanan (975 orang)	1 Layanan (1.116 orang)	Dinas Sosial	
				2	Jumlah data penyandang disabilitasterlantar, anak terlantar, lanjut usiaterlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	2.689 orang	2.952 orang	Dinas Sosial	
				3	Jumlah Tim Reaksi Cepat yangdibentuk	40 orang	40 orang	Dinas Sosial	
				4	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usiaterlantar dan gepeng yang dijangkau	12 orang	108 orang	Dinas Sosial	
				5	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanankedaruratan yang dimiliki	4 unit	4 unit	Dinas Sosial	
				6	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usiaterlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	929 orang	1.116 orang	Dinas Sosial	
				7	Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	1 unit	1 unit	Dinas Sosial	
				8	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak	297 orang	1.064 orang	Dinas Sosial	

No	Urusan	No	IKK OUTCOME	No	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
						2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					terlantar, lanjut usiaterlantar dan gepeng yang menerima paket sandang				
				9	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usiaterlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	16 orang	48 orang	Dinas Sosial	
				10	Jumlah alat bantu yang tersedia dirumah singgah/ shelter	1 unit	1 unit	Dinas Sosial	
				11	Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	975 paket	101 paket	Dinas Sosial	
				12	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalankesehatan	75 paket	101 paket	Dinas Sosial	
				13	Jumlah tenaga Kesehatan yangdisediakan di rumah singgah	0	0	Dinas Sosial	
				14	Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	6 orang	10 orang	Dinas Sosial	
				15	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usiaterlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik,mental dan sosial sesuai	852 orang	1.004 orang	Dinas Sosial	

No	Urusan	No	IKK OUTCOME	No	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
						2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial				
				16	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	82 orang	895 orang	Dinas Sosial	
				17	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usiaterlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	975 orang	181 orang	Dinas Sosial	
				18	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usiaterlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	975 orang	102 orang	Dinas Sosial	
				19	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usiaterlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	714 orang	60 orang	Dinas Sosial	
				20	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usiaterlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	52 orang	63 orang	Dinas Sosial	

No	Urusan	No	IKK OUTCOME	No	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
						2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				21	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usiaterlantar dan gepeng yang dirujuk	45 orang	13 orang	Dinas Sosial	
		2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saatdan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	1	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	3.940 orang	528 orang	Dinas Sosial	
				2	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	3.940 orang	528 orang	Dinas Sosial	
				3	Jumlah tempat penampunganpengungsi yang dimiliki	1.135 orang	137 orang	Dinas Sosial	
				4	Jumlah paket permakanan khususbagi kelompok rentan	3.940 orang	528 orang	Dinas Sosial	
				5	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukunganpsikososial	Ada/ 3.940 orang	Ada/ 528 orang	Dinas Sosial	
				6	Jumlah pekerja sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	170 orang	168 orang	Dinas Sosial	
7	Tenaga Kerja	1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yangmengacu ke rencana tenaga kerja	1	Dokumen perencanaan tenagakerja kabupaten/kota.	Ada	Ada	Disnakerin	
				2	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	((458.887+4,33 +103+37+701 +95.682)- (433.649+6,3+1	((436.053+4,54 +419.316,19+1 45+113+104.07 1)-	Disnakerin	

No	Urusan	No	IKK OUTCOME	No	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
						2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						.31+106+1.956 + 486.557)) -------- x 100 % 458.887 + 4,33 +103 +37 + 701 + 95.682 = - 140.202 %	(452.053+4,82+ 112.834,22+81 +73.050)) -------- x 100 % 436.053 + 4,54 +49.316,19+14 5 +0 + 104.071 = - 7.56 %		
				3	Jumlah perusahaan yang menyusunrencana tenaga kerja di kabupaten/kota	0	Tidak ada	Disnakerin	
		2	Persentase TenagaKerja Bersertifikat Kompetensi	1	Persentasepenerapan ProgramPBK dengan kualifikasi klaster	47 --------x100% 47 = 100%	18 --------x100% 18 = 100%	Disnakerin	
				2	Persentase instruktur bersertifikatkompetensi	204 --------x100% 270 = 75,55 %	230 --------x100% 294 = 78,23 %	Disnakerin	
				3	Rasio jumlah instruktur terhadappeserta pelatihan	204 --------x100 % 664	230 -------- x100 % 585	Disnakerin	

No	Urusan	No	IKK OUTCOME	No	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
						2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						= 30,72 %	= 39, 31 %		
				4	Persentase LPK yang terakreditasi	28 -------- x100% 55 = 50,91 %	37 --------x100 % 72 = 51,39 %	Disnakerin	
				5	Persentase LPK yang memilikiperizinan	48 --------x100% 55 = 87,27 %	53 --------x 100 % 72 = 73,61 %	Disnakerin	
				6	Jumlah penganggur yang dilatih	664	585	Disnakerin	
				7	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	647 --------x100% 664 = 97,44 %	585 --------x100 % 585 = 100 %	Disnakerin	
				8	Persentase penyerapan lulusan	30 -------- x 100 % 37 = 81,08 %	65 -------- x 100 % 81 = 80,25 %	Disnakerin	
				9	Lulusan bersertifikat kompetensi	647 --------x100% 647	585 --------x100 % 585	Disnakerin	

No	Urusan	No	IKK OUTCOME	No	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
						2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						= 100 %	= 100 %		
				10	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	0 --------x100% 0 = 0 %	Tidak ada	Disnakerin	
				11	Jumlah pelatihan Calon PekerjaMigran Indonesia (CPMI)/CalonTenaga Kerja Indonesia (CTKI)	0	Tidak ada	Disnakerin	
		3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	1	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	150 -------x100% 3.518 = 4,26%	125 -------x100% 3.562 = 3,51%	Disnakerin	
				2	Data tingkat produktivitas total	0 - (0+0) = 0	Tidak ada	Disnakerin	
		4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKSBipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	1	Persentase perusahaan yang telahmemiliki Peraturan Perusahaan (PP)	270 --------x100% 2.405 = 11,23%	315 --------x100% 2.442 = 12,89%	Disnakerin	
				2	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	12 --------x100% 117 = 10,26 %	12 --------x100 % 123 = 9,8 %	Disnakerin	
				3	Rekapitulasi tahunan jumlah	117	123	Disnakerin	

No	Urusan	No	IKK OUTCOME	No	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
						2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SBdi perusahaan yang tercatat, SP/SBdi luar perusahaan yang tercatatdan anggota SP/SB di perusahaan				
				4	Persentase perusahaan yang sudahmenyusun struktur skala upah	158 -------- x 100 % 281 = 56,22%	206 -------- x 100 % 327 = 62,9%	Disnakerin	
				5	Persentase perusahaan yang telahterdaftar sebatai peserta BPJS ketenagakerjaan	3255 --------x100% 3.518	3316 --------x100% 3.562 = 93,09 %	Disnakerin	= 92,52 %
				6	Persentase jumlah perusahaanyang berselisih	53 --------x100% 3.518 = 1,51%	47 --------x100 % 3.562 = 1,32%	Disnakerin	
				7	Jumlah mogok kerja	0	0	Disnakerin	
				8	Jumlah penutupan perusahaan	0	5	Disnakerin	
				9	Jumlah perselisihan kepentingan	0	0	Disnakerin	
				10	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat	0	0	Disnakerin	

No	Urusan	No	IKK OUTCOME	No	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
						2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan				
				11	Jumlah perselisihan PHK	51	44	Disnakerin	
				12	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	406	164	Disnakerin	
				13	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	8	10	Disnakerin	
				14	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yangdiberdayakan	Ada	Tidak Ada	Disnakerin	
				15	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama olehMediatorHubungan Industrial	22 --------x100 % 53 = 40,74 %	32 -------- x100% 47 = 68,08 %	Disnakerin	
		5	Persentase Tenagakerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kota	1	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	1.555	117	Disnakerin	
				2	Jumlah pencari kerja yang terdaftardi kab/kota	3.601	1.589	Disnakerin	
				3	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK)wilayah kab/kota	19 BKK	19 BKK	Disnakerin	
				4	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/ kota	16 Orang	16 Orang	Disnakerin	
				5	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	7 Orang	6 Orang	Disnakerin	
				6	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)	0	0	Disnakerin	

No	Urusan	No	IKK OUTCOME	No	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
						2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					antarkerja lokal dalam satu wilayahkab/kota				
				7	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota	755 Perjanjian	30 Perjanjian	Disnakerin	
				8	Jumlah penempatan tenaga kerjamelaluiInformasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	0	0	Disnakerin	
				9	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	0 -------- x100% 0 =0 %	0 --------x100 % 0 =0 %	Disnakerin	
				10	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	167 Orang	30 Orang	Disnakerin	
				11	Jumlah Pekerja Migran Indonesia(PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	0 -------- x 100 %0 = 0%	Tidak ada	Disnakerin	
				12	Jumlah Pekerja Migran Indonesia(PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yangmendapatkan pendidikandan pelatihan kerja	0 -------- x 100 %0 = 0%	Tidak ada	Disnakerin	
				13	Data pemberdayaan Pekerja MigranIndonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	0 -------- x 100 %0 = 0%	Tidak ada	Disnakerin	

No	Urusan	No	IKK OUTCOME	No	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
						2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				14	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap(LTSA) yang dibentukan	0 -------- x 100 %0 = 0%	Tidak ada	Disnakerin	
8	Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak	1	Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender)pada belanja langsung APBD	1	Jumlah lembaga pemerintah tingkatdaerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	39 lembaga	38 lembaga	DP3AP2KB	
				2	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudahdievaluasi melalui analisis gender ditingkat kabupaten/kota	49 program	115 program	DP3AP2KB	
		2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kota	1	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	2 media	2 media	DP3AP2KB	Media cetak dan elektronik
				2	Jumlah lembaga layanan anak yangtelah memiliki standar pelayanan minimal	2 lembaga	2 lembaga	DP3AP2KB	P2TP2A & Puspaga
				3	Persentase korban kekerasan anakyang terlayani	74 --------x100% 74 = 100 %	78 --------x100% 78 = 100 %	DP3AP2KB	
				4	Jumlah lembaga layanan anak yangmendapat pelatihan	2 lembaga	2 lembaga	DP3AP2KB	
				5	Jumlah lembaga layanan anak yangmendapatkan bantuan keuangan/ fasilitas	2 lembaga	2 lembaga	DP3AP2KB	P2TP2A & Puspaga

No	Urusan	No	IKK OUTCOME	No	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
						2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					oleh pemkab/ kota (APBD kab/kota)				
		3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	1	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kotayang mendapatkan pelatihan	1 organisasi	1 organisasi	DP3AP2KB	LSM NuraniPerempuan
				2	Jumlah kader perempuan tingkatkabupaten/kota yang sudah dilatih	98 relawan	104 kader	DP3AP2KB	
				3	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	2 lembaga	2 lembaga	DP3AP2KB	
				4	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuanganoleh pemerintah kabupaten/kota	2 lembaga	2 lembaga	DP3AP2KB	P2TP2A & Puspaga
				5	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	2 kebijakan	2 kebijakan	DP3AP2KB	
				6	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi	2(dua) lembaga	2(dua) lembaga	DP3AP2KB	
				7	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	27 -------x100%	31 ------- x 100 %	DP3AP2KB	

No	Urusan	No	IKK OUTCOME	No	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
						2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						27 =100 %	31 =100 %		
9	Pangan	1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	1	Tersedianya infrastruktur perundangan dan sarana pendukunglainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Adanya 8 infrastruktur pergudangan sebagai sarana pendukung penyimpanan cadangan pangan yaitu: 1. LDPM Cenno Pulai Kec. Koto Tangah 2. LDPM Fajar Mahkota Kec. Koto Tangah 3. LDPM Inbis Sejahtera Kec. Kuranji 4. LDPM Harapan Jaya Kec. Nanggalo 5. LDPM Harapan Bersama Kec. Pauh 6. LDPM Pisang Sakato Kec. Pauh 7. Lumbung Pangan Labuah	Adanya7 infrastruktur pergudangan sebagai sarana pendukung penyimpanan cadangan pangan yaitu: 1. LDPM Cenno Pulai Kec. Koto Tangah 2. LDPM Fajar Mahkota Kec. Koto Tangah 3. LDPM Inbis Sejahtera Kec. Kuranji 4. LDPM Harapan Jaya Kec. Nanggalo 5. LDPM Harapan Bersama Kec. Pauh 6. Lumbung Pangan Labuah	Dinas Perikanan dan Pangan	

No	Urusan	No	IKK OUTCOME	No	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
						2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Malintang Kec. Koto Tangah 8. Lumbung Pangan Lapau Munggu Kec. Kuranji	Malintang Kec. Koto Tangah 7. Lumbung Pangan Lapau Munggu Kec. Kuranji		
				2	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Ada	Ada	Dinas Perikanan dan Pangan	
				3	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk panganlokal	Tidak Ada	Tidak Ada	Dinas Perikanan dan Pangan	
				4	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konumsipangan yang beragam dan bergizi seimbang	Ada Kegiatan Pemberdayaan, Melalui Kegiatan : 1. Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan 2. Peningkatan Teknologi Pengolahan Pangan	Ada Kegiatan Pemberdayaan, Melalui Kegiatan : 1. Penganek aragaman konsumsi pngan local 2. Peningkatan Pelatihan Teknologi Pengolahan Pangan Lokal	Dinas Perikanan dan Pangan	
				5	Tersedianya peta ketahanan dankerentanan pangan	Ada	Ada	Dinas Perikanan dan Pangan	

No	Urusan	No	IKK OUTCOME	No	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
						2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				6	Tertanganinya kerawanan pangan	Pengembangan kewaspada-an Pangan dan Gizi	Penanganan kerawanan Pangan dan Gizi	Dinas Perikanan dan Pangan	
				7	Tersalurkannya cadangan panganpada daerah rentan rawan pangan	Ada	Ada	DinasPerikanan dan Pangan	
				8	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Ada	Ada	Dinas Perikanan dan Pangan	
10	Pertanahan	1	Persentase pemanfaatan tanahyang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	1	SK Izin Lokasi Yang DiterbitkanOleh Bupati/Walikota	1.262 --------x100% 1.262 = 100 %	1.435 --------x100% 1.435 = 100 %	Dinas Pertanahan	
				2	SK Bupati/Walikota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	2 --------x100% 2 = 100 %	1 --------x100% 1 =100 %	Dinas Pertanahan	
				3	SK Bupati/Walikota tentang Penetapan Besarnya Ganti RugiKepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	0 -------- x 100 %0 = 0 %	0 -------- x 100 %0 = 0 %	Dinas Pertanahan	
				4	Dokumen Izin membuka tanah	0 -----x100% 0	0 ----x100% 0	Dinas Pertanahan	

No	Urusan	No	IKK OUTCOME	No	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
						2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						= 0 %	= 0 %		
				5	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	120 Kapling --------- x 100% 128 Kapling = 93,75 %	95 Kapling --------- x 100 % 133 Kapling = 71,43 %	DPUPR	
		2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	1	-	-	-	Dinas Pertanahan	
		3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	1	-	-	-	DPMPTSP	
		4	Tersedianya TanahObyek Landreform(TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	1	-	-	-	Dinas Pertanahan	
		5	Tersedianya tanahuntuk masyarakat	1	-	-	-	BPKAD/Dinas Pertanahan	
		6	Penangan sengketatanah garapan yang	1	-	-	-	Dinas Pertanahan	

No	Urusan	No	IKK OUTCOME	No	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
						2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			dilakukan melalui mediasi						
11	Lingkungan Hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup(IKLH) Kota	1	Hasil perhitungan provinsi terhadap: a. Indeks kualitas air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) b. Indeks tutupan hutan (ITH) c. Indeks Tutupan Hutan (ITH)	IKA : 69.77 IKU : 74.11 IKL : 73.20	IKA : 69.09 IKU : 87.80 IKL : 71.78	DLH	
		2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayahKota	1	Tersedianya data dan informasipenanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	1. Armroll truck = 41 unit & dumptruck =38 unit dengan timbulan sampah 647,39 ton/hari (73.69%) 2. 30, 03 Ha 3. 1 TPST DLH & 157 TPS	1. Armroll truck = 43 unit & dumptruck =38 unit dengan timbulan sampah 657,90 ton/hari (74.80%) 2. 30, 03 Ha 3. 1 TPST DLH & 144 TPS	DLH	
		3	Ketaatan penanggung jawabusaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin	1	Data izin PPLH dan PUULH yangditerbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	26 --------x100% 26 = 100 %	36 -------- x100% 36 = 100 %	DLH	

No	Urusan	No	IKK OUTCOME	No	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
						2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota	2	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kotaterhadap usaha yang izinlingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	3 -------- x100 % 237 = 1.26 %	3 --------x100% 289 = 1.03 %	DLH	
				3	Penetapan hak MHA terkait denganPPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota	3 --------x 100% 3 = 100 %	16 --------x100% 16 = 100 %	DLH	Kelompok Masyarakat yang peduli lingkungan (Kampung iklim)
				4	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	3 -------- x 100 3 = 100%	16 -------x100% 16 = 100%	DLH	
				5	Jumlah lembaga kemasyarakatanyang diberikan diklat	3 ------ x 100 %3 = 100 %	16 ------x100% 16 = 100 %	DLH	
				6	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dandampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani	56 --------x100% 56 = 100 %	53 --------x100% 53 = 100 %	DLH	
12	Administrasi Kependu	1	Perekaman KTP Elektronik	1	Penerbitan akta perkawinan	229 --------x100%	225 --------x100%	Disdukcapil	

No	Urusan	No	IKK OUTCOME	No	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
						2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	dukan dan Catatan Sipil					229 = 100 %	225 = 100 %		
				2	Penerbitan akta perceraian	16 ------x100% 16 =100%	20 ------x100% 20 =100%	Disdukcapil	
				3	Penerbitan akta kematian	4.957 --------x100% 4.957 = 100 %	5.967 --------x100% 5.967 = 100 %	Disdukcapil	
				4	Penyajian data kependudukan	934.847 -------- x100% 934.847 = 100 %	946.982 --------x100 % 946.982 = 100 %	Disdukcapil	
		2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	1	Jumlah anak usia 0-17 bulan kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	125.608 --------x100% 260.471 = 48,17 %	153,675 --------x100% 256.125 = 60 %	Disdukcapil	
		3	Kepemilikan akta kelahiran	1	Jumlah anak usia 0 – 18 Tahun yang sudah memiliki akta lahir	272.077 --------x100% 272.803	272.411 --------x100% 273.663	Disdukcapil	

No	Urusan	No	IKK OUTCOME	No	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
						2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						= 99,73 %	= 99,54 %		
		4	Jumlah OPD yangtelah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	1	Jumlah Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	33 -------- x100% 39 = 84,62 %	4 --------x100% 42 = 9,52%	Disdukcapil	
13	Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa	1	Persentase pengentasan desa tertinggal	1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	-	-	Bag. Tata Pemerintahan	Bukan kewenangan pemerintah kota karena tidak memiliki desa
				2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	-	-	Bag. Tata Pemerintahan	Bukan kewenangan pemerintah kota karena tidak memiliki desa
				3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	-	-	Bag. Tata Pemerintahan	Bukan kewenangan pemerintah kota karena tidak memiliki desa
				4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	-	-	Bag. Tata Pemerintahan	Bukan kewenangan pemerintah kota karena tidak memiliki desa
		2	Persentase peningkatan statusdesa mandiri	1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	-	-	Bag. Tata Pemerintahan	Bukan kewenangan pemerintah kota karena tidak memiliki desa
				2	Jumlah desa yang melakukan	-	-	Bag.Pemerintaha	Bukan kewenangan

No	Urusan	No	IKK OUTCOME	No	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
						2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya			n	pemerintah kota karena tidak memiliki desa
				3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	-	-	Bag. Tata Pemerintahan	Bukan kewenangan pemerintah kota karena tidak memiliki desa
				4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan danlembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	-	-	Bag. Tata Pemerintahan	Bukan kewenangan pemerintah kota karena tidak memiliki desa
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	TFR (Angka Kelahiran Total)	1	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di- Perdakan	Ada	Ada	DP3AP2KB	
				2	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	24,4 th	24,4 th	DP3AP2KB	
				3	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15- 19)	4,0	5,3	DP3AP2KB	
				4	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	154157+158487 ------x100% 177015+177015 = 88,31 %	163.714+160 .247 ------x100%	DP3AP2KB	

No	Urusan	No	IKK OUTCOME	No	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
						2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
							181.305+181 .305 = 89,34 %		
				5	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasikemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	5(lima) Stakeholder	5(lima) Stakeholder	DP3AP2KB	
		2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern(Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	1	Persentase Fasilitasi Kesehatan(Faskes) yang siap melayani KB MKJP	68 ------ X 100% 104 = 65,38 %	70 ----- - X 100% 118 = 59,32 %	DP3AP2KB	
				2	Persentase Peserta KB Aktif (PA)Metode Kontrasepsi JangkaPanjang (MKJP)	16.9 70 ------ X 100% 91.9 00 = 18,47 %	16.8 48 ------ X 100% 91.5 45 = 18,40 %	DP3AP2KB	
				3	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	5 Kelompok (BKB, BKR, BKL, PIK R, UPPKS)	5 Kelompok (BKB,BKR, BKL, PIK R, UPPKS)	DP3AP2KB	

No	Urusan	No	IKK OUTCOME	No	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
						2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				4	Persentase pelayanan KB PascaPersalinan	6451 ------ X 100% 9036 = 71,39 %	4008 ------ X 100% 9325 = 42,98 %	DP3AP2KB	
		3	Persentase kebutuhan ber-KByang tidak terpenuhi (unmet need)	1	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	1. Kelurahan Belakang Pondok (1,43%) 2. Kelurahan tanjuang Aua Nan XX (1.68) 3. Kelurahan Air Tawar Timur (3,62%)	1. Kel Belakang Pondok (0,81%) 2. Kel. Tanjuang Aua Nan XX (1.25%) 3. Kel. Air Tawar Timur (1,58%)	DP3AP2KB	
				2	Persentase kesertaan KB keluargaPenerima Bantuan Iuran (PBI)	48.118 ------ X 100% 227.804 = 21,12 %	46.254 ------ X 100% 231.246 = 20 %	DP3AP2KB	
15	Perhubungan	1	Rasio konektivitasKota	1	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	4 ------ X 100% 5	4 ------ X 100% 5	Dishub	Data fasilitas pangkalan angkot tahun 2024

No	Urusan	No	IKK OUTCOME	No	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
						2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						= 80 %	= 80 %		
				2	Terlaksananya pelayanan uji berkala	33.535 / 16.743 X 100% = 200,40 %	42.825 / 17.800 X100% = 240,59 %	Dishub	
				3	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	0 / 0 x 100 % = 0 %	4 / 4 x 100 % = 100 %	Dishub	
				4	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintasuntuk jaringan jalan Kabupatenatau Kota	3 / 3 X 100% = 100 %	3 / 3 X 100% = 100 %	Dishub	
		2	V/C Rasio di jalanKota	1	Persentase pelaksanaanmanajemen dan rekayasa lalulintas untu jaringan jalan Kabupaten/Kota	3 / 3 X 100% = 100 %	3 / 3 X 100% = 100 %	Dishub	
16	Komunikasidan Informatika	1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses	1	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakanakses internet yang diamankanyang disediakan oleh Dinas	51 / 51 X 100% =100 %	51 / 51 X 100%	Diskominfo	

No	Urusan	No	IKK OUTCOME	No	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
						2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo		Kominfo		=100 %		
				2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	51 / 51 X 100% = 100%	51 / 51 X 100% = 100%	Diskominfo	
				3	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasissuara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkanjaringan intra pemerintah	Ya	Ya	Diskominfo	
		2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	1	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerahyang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dansub domain Instansi PenyelenggaraNegara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun2015	187 ---- x 100 %187 = 100 %	51 ----- X 100% 51 = 100 %	Diskominfo	
				2	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	35 ------ X 100 % 51 = 68,62 %	35 ----- X 100 % 51	Diskominfo	

No	Urusan	No	IKK OUTCOME	No	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
						2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
							= 68,62 %		
				3	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layananaplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang undangan	51 ---- x 100 %51 = 100 %	51 ----- - 51 X 100% = 100 %	Diskominfo	
				4	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasipemerintahan) yang tercantumdalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secaraelektronik	82 ----- - 158 X 100% = 51.89 %	94 ------ 158 X 100% = 59.49 %	Diskominfo	
				5	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasipemerintahan) yang memanfaatkansertifikat elektronik	8 ------ 82 X 100% = 9,75 %	8 ----- - 158 X 100% = 5,06 %	Diskominfo	
				6	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	81 ------ 81 X 100 % = 100 %	82 ----- - 82 X 100 % = 100 %	Diskominfo	
				7	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan	4 ------x100% 82	4 ------x100% 82	Diskominfo	

No	Urusan	No	IKK OUTCOME	No	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
						2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					pemerintah	= 4,87%	= 4,87%		
				8	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	51 / 51 X 100% = 100 %	51 / 51 X 100% = 100 %	Diskominfo	
				9	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	51 / 51 X 100% = 100 %	51 / 51 X 100% = 100 %	Diskominfo	
				10	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuaisiklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	51 / 51 X 100% = 100 %	51 / 51 X 100% = 100 %	Diskominfo	
				11	Persentase data yang dapat berbagi pakai	31 / 95 X 100 % = 31.95 %	31 / 95 X 100 % = 31.95 %	Diskominfo	
				12	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	51 ---- x 100 %51 = 100 %	51 / 51 X 100%	Diskominfo	

No	Urusan	No	IKK OUTCOME	No	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
						2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
							= 100 %		
				13	Persentase ASN pengelola TIK yangtersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	33 ----- - 63 X 100% = 52,38 %	33 ------ 63 X 100% = 52,38 %	Diskominfo/ BKPSDM	
				14	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi egovernment	Ada : Ada : 1. Master Plan TIK 2. Perwako Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Padang Nomor 76 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Ada : 1. Master Plan TIK 2. Perwako Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Padang Nomor 76 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Diskominfo	

No	Urusan	No	IKK OUTCOME	No	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
						2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerahkota	1	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah danpemerintah provinsi	43 ------ X 100% 43 = 100%	43 ----- - X 100% 43 = 100%	Diskominfo	
				2	Persentase konten informasi terkaitprogram dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuaidengan strategi komunikasi (STRAKOM)	5625 ------ X 100% 5354 = 105,1%	712 0 ----- - X 100% 712 0 = 100 %	Diskominfo	
				3	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	44 ---- x 100 %44 = 100 %	93 ---- x 100 %48 = 193,8 %	Diskominfo	
17	Koperasi , Usaha Kecildan Menengah	1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	1	Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	66 ------ X 100% 345 = 19.13 %	92 ------ X 100% 348 = 26.43 %	Dinas Koperasi danUKM	
				2	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh	0 ------ X 100% 0	0 ----- - X 100%	Dinas Koperasi danUKM	

No	Urusan	No	IKK OUTCOME	No	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
						2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	= 0 %	0 = 0 %		
				3	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	320 ------ X 100% 411 = 77,85 %	345 ------ X 100% 440 = 78,40 %	Dinas Koperasi danUKM	
				4	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilaikesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	326 ------ X 100% 411 = 79,31 %	350 ------ X 100% 440 = 79,54 %	Dinas Koperasi danUKM	
				5	Persentase koperasi yang mengikutipelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	130 ------ X 100% 411 = 31,63 %	139 ------ X 100% 440 = 33,40 %	Dinas Koperasi danUKM	
				6	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	1.002 ------ X 100% 213.900 = 0,46 %	1.631 ------ X 100 % 225.0 90 = 0,72 %	Dinas Koperasi danUKM	

No	Urusan	No	IKK OUTCOME	No	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
						2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				7	Persentase koperasi yang telahmenyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	17 / ----- - 411 X 100% = 4,13 %	27 / ------ 440 X 100% = 6,13 %	Dinas Koperasi danUKM	
				8	Persentase koperasi yang diberikandukungan fasilitasi pembiayaan	-	-	Dinas Koperasi danUKM	
				9	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi denganwilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	406 / ------ 411 X 100% = 98.78 %	440 / ------ 440 X 100% = 100 %	Dinas Koperasi danUKM	
				10	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayahkeanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	10 / ----- - 411 X 100% = 2.43%	38 / ------ 440 X 100% = 8.63%	Dinas Koperasi danUKM	
				11	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayahkeanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	192 / ----- - 411 X 100% = 46,71 %	294 / ----- - 440 X 100% = 66,81 %	Dinas Koperasi danUKM	
				12	Persentase koperasi yang diberikandukungan fasilitasi pendampingankielembagaan	199 / ------ X 100%	294 / ------ X 100%	Dinas Koperasi danUKM	

No	Urusan	No	IKK OUTCOME	No	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
						2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					dan usaha untukkoperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	411 = 48,41 %	440 = 66,81 %		
				13	Persentase koperasi yang diberikandukungan fasilitasi kemitraan untukkoperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	11 ----- - X 100% 411 = 2,67 %	36 ----- - X 100% 440 = 8,18 %	Dinas Koperasi danUKM	
		2	Meningkatnya Usaha Mikro yangmenjadi wirausaha	1	Rasio pertumbuhan wirausaha baruyang berskala mikro	1.495 ------ X 100% 43.282 =38,46%	3.785 ------ X 100% 47.692 = 7,93%	Dinas Koperasi danUKM	
				2	Persentase jumlah usaha mikroyang diinput ke dalam sistem onlinedata system (ODS)	12.143 -------- - X 100% 43.282 = 28,05%	14.500 ----- ---- X 100 % 47.692 = 30,40 %	Dinas Koperasi danUKM	
				3	Persentase jumlah usaha mikroyang bermitra	1.891 ------ X 100%	3.366 ------ X 100%	Dinas Koperasi danUKM	

No	Urusan	No	IKK OUTCOME	No	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
						2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						43.282 = 4,36 %	47.692 = 7,05 %		
				4	Persentase jumlah usaha mikroyang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	5.142 ------ X 100% 19.929 = 25.8 %	6.714 ------ X 100% 22.120 = 30.35 %	Dinas Koperasi danUKM	
				5	Persentase jumlah usaha mikroyang dberikan dukungan fasilitasi pemasaran	1.891 ------ X 100% 43.282 = 4,36 %	3.366 ------ X 100% 47.692 = 7,05 %	Dinas Koperasi danUKM	
				6	Rasio usaha mikro yang diberikandukungan fasilitasi pelatihan	1.717 ------ X 100% 43.282 = 3,96 %	2.584 ------ X 100% 47.692 = 4,41 %	Dinas Koperasi danUKM	
				7	Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melaluiLembaga pendampingan	43.282 ------ X 100%	47.692 ------ X 100%	Dinas Koperasi dan UKM	

No	Urusan	No	IKK OUTCOME	No	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
						2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						43.282 = 100 %	47.692 = 100 %		
18	Penanaman Modal	1	Persentase peningkatan investasi di Kota	1	PERATURAN DAERAHmengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	5	5	DPMPTSP	
				2	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Ada (Lampiran Peraturan DaerahNomor11 Tahun 2009)	Ada	DPMPTSP	
				3	Laporan evaluasi pelaksanaanpemberian fasilitas/ insentif penanaman modal	Tidak ada	1	DPMPTSP	
				4	Kegiatan seminar bisnis, forum,one on one meeting	1	0	DPMPTSP	
				5	Kegiatan pameran penanaman modal	0	0	DPMPTSP	
				6	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	1	Ada	DPMPTSP	
				7	Konsultasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal	77.650	1.485	DPMPTSP	
				8	Penerbitanperizinan dan non perizinan penanaman modal	77.650	90.099	DPMPTSP	
				9	Laporan realisasi penanaman modal	1.431.310.804.121,-	3.650.616.831.415	DPMPTSP	
				10	Pembinaan aparaturur	5	7	DPMPTSP	

No	Urusan	No	IKK OUTCOME	No	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
						2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					penanamanmodal tingkat kabupaten/kota				
				11	Pembinaan penanaman modal PMAdan PMDN	188 perusahaan	19	DPMPTSP	
				12	Tersedianya data dan informasiperizinan dan non peizinan provinsi kabupaten/kota	77.650	--	DPMPTSP	
19	Kepemudaandan Olahraga	1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	1	Jumlah pemuda yang mendapatpelatihan kewirausahaan	0	55	Dispora	
				2	Jumlah pemuda yang mendapatbantuan kewirausahaan	0	0	Dispora	
		2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	1	Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangankepemimpinan, kepedulian,kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	80	55	Dispora	
				2	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	0	55	Dispora	
		3	Peningkatan prestasi olahraga	1	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2pendidikan	480	494	Dispora	
				2	Jumlah penyelenggaraan event ORprestasi tingkat daerah	31	42	Dispora	
20	Statistik	1	Persentase Organisasi Perangkat	1	Tersedianya buku profil daerah	5 kali	Ada	Diskominfo	
				2	Jumlah survey statistik	6 kali	6 kegiatan	Diskominfo	

No	Urusan	No	IKK OUTCOME	No	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
						2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Daerah (OPD) yang menggunakan datastatistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah		sektoralyang dilakukan				
				3	Jumlah kompilasi statistik sektoralyang dilakukan	5 kali	7 kegiatan	Diskominfo	
				4	Jumlah survey statistik sektoralyang mendapat rekomendasi BPS	2 kali	1 kegiatan	Diskominfo	
				5	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi drBPS	11 / 11 X 100% = 100 %	3 kegiatan	Diskominfo	
				6	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	11 / 11 X 100% = 100%	16 / 18 X 100% = 88,89 %	Diskominfo	
				7	Persentase kelengkapan metadatavariabel sektoral	167 / 167 X 100% = 100 %	1.661 / 1.949 X 100% = 85,22 %	Diskominfo	
		2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan	1	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100 %	100 %	Diskominfo	

No	Urusan	No	IKK OUTCOME	No	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
						2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			evaluasi pembangunan daerah						
21	Persandian	1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	1	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatanpengamanan sinyal dibandingbanyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	12 ---- x 100 %12 = 100 %	12 ---- x 100 %12 = 100 %	Diskominfo	
				2	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	8 ---- x 100 %8 = 100 %	8 ---- x 100 %8 = 100 %	Diskominfo	
				3	Persentase sistem elektronik / asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	36 ---- x 100 %36 = 100 %	77 ---- x 100 %77 = 100 %	Diskominfo	
				4	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi (PHKS) yang ditetapkan	61 x 100 % 61 = 100 %	61 x 100 % 61 = 100 %	Diskominfo	
22	Kebudayaan	1	Terlestarikannya Cagar Budaya	1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	55 + 8 + 8 + 8 + 8 = 87	55 + 8 + 8 + 8 + 8 = 87	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	
				2	Jumlah obyek pemajuan	7 + 9 +2 = 18	7 + 9 +2 = 18	Dinas	

No	Urusan	No	IKK OUTCOME	No	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
						2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penataan keberagaman			Pendidikan dan kebudayaan	
				3	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya,dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	3	3	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	
				4	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	119 + 7 + 21 + 21 + 8 = 176	119 + 0 + 31 + 32 + 8 = 190	Dinas Pendidikandan kebudayaan	
				5	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan,pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	76 - 23 = 53	76 - 23 = 53	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	
				6	Perlindungan cagar budaya kabupaten/kota (penyelamatan,zonasi, pemeliharaan danpemugaran)	52 + 1 + 10 + 52 + 0 = 115	52 + 1 + 10 + 52 + 0 = 115	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	
				7	Layanan perijzinan membawa cagarbudaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	Belum ada	Belum ada	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	
				8	Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian,	Belum Terdata	0+0+6= 6	Dinas Pendidikan dan	

No	Urusan	No	IKK OUTCOME	No	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
						2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					revitalisasi,adaptasi)			kebudayaan	
				9	Pemanfaatan cagar budaya Provinsi(dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	Belum terdata	Belum terdata	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	
				10	Pengelolaan, pengamanan,pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	64 + 65 + 0 + 64 = 193	64 + 65 + 0 + 64 = 193	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	
				11	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.	50 Kunjungan/bulan	50 Kunjungan/bulan	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	
				12	Pengelolaan,pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	64	64	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	
				13	Pembentukan tim pendaftarancagar budaya	14	14	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	
				14	Pembentukan tim ahli cagar budayaprovinsi	7	5	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	
				15	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagarbudaya	7	7	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	
				16	Pemetaan sdm cagar budaya danpermuseuman	4 + 4 = 8	4 + 4 = 8	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	

No	Urusan	No	IKK OUTCOME	No	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
						2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				17	Peningkatan kompetensi sdm cagarbudaya dan permuseuman	4 + 4 = 8	4 + 3 = 7	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	
				18	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	0 + 2 = 2	0 + 2 = 2	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	
				19	Penyelenggaraan kegiatan museumyang melibatkan masyarakat	7	7	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	
23	Perpustakaan	1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	1	Rasio ketercukupan koleksiperpustakaan dengan penduduk	1.787.054 --------- x 100 % 823.681 = 214 %	2.773.831 --------- x 100 % 847.724 = 327 %	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
				2	Persentase pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	47.419 ------ X 100% 833.601 = 5,69 %	56.868 --------- x 100 % 847.724 = 6,70 %	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
				3	Rasio ketercukupantenaga perpustakaan dengan penduduk	583 ----- X 100% 833601 = 0,07%	1.153 -------- x 100 % 847.724.681 = 0,13 %	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
				4	Persentaseperpustakaan sesuaistandar nasional perpustakaan	507 ------ X 100% 670 = 75,67 %	619 ------ X 100% 721 = 85,85 %	Dinas Perpustakaan dan Arsip	

No	Urusan	No	IKK OUTCOME	No	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
						2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				5	Jumlahpemasyarakatan gemarmembaca di masyarakat	478 Kegiatan	679 Kegiatan		
		2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	1	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	-	-	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
				2	Jumlah naskah kuno yang dialihaksara dan dialih bahasa	-	-	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
				3	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atauterdaftar yang ada di wilayahnya(item)	-	-	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
24	Kearsipan	1	Tingkat ketersediaan arsipsebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1	Persentase arsip aktif yang telahdibuatkan daftar arsip	177.389 / 177.389 X 100% = 100 %	1.808 / 1.808 x100% = 100 %	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
				2	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	93.456 / 93.456 X 100% = 100 %	118.157 / 118.157 x 100 % = 100 %	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
				3	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	10.232 / 10.232 x 100 %	11.520 / 11.520 x 100 %	Dinas Perpustakaan dan Arsip	

No	Urusan	No	IKK OUTCOME	No	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
						2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						= 100 %	= 100 %		
				4	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	6000 / 10.232 X 100% = 59 %	11.520 / 15.342 X 100% = 75 %	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
		2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	1	Pemusnahan arsip yang sesuaiNSPK	100 %	100 %	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
				2	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuaiNSPK	100 %	100 %	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
				3	Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di provinsi	100 %	100 %	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
				4	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota yang sesuai NSPK	100 %	100 %	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
				5	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip	100 %	100 %	Dinas Perpustakaan dan Arsip	

No	Urusan	No	IKK OUTCOME	No	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
						2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					yang sesuai NSPK				
				6	Penerbitan izin penggunaan arsipyang bersifat tertutup yangdisimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK	100 %	100 %	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
25	Kelautan dan Perikanan	1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kota di (sumber data: onedata KKP)	1	Jumlah rumah tangga nelayan yangmelakukan diversifikasi usaha(RTP)	2.309 orang	2.456 orang	Dinas Perikanan dan Pangan	
				2	Jumlah rumah tangga nelayan yangmelakukan diversifikasi usaha(RTP)	Kota Padang memiliki 2 TPI 1 milik pemerintah dan 1 milik swasta. Dan TPI tidak beroperasional.	Kota Padang memiliki 2 TPI 1 milik pemerintah dan 1 milik swasta. Dan TPI tidak beroperasional.	Dinas Perikanan dan Pangan	
				3	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) dibidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	-	-	Dinas Perikanan dan Pangan	
				4	Jumlah pembudidaya ikan yangmemperoleh kegiatanPemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/ dan penguatankelembagaan)	Ada	Ada	Dinas Perikanan dan Pangan	

No	Urusan	No	IKK OUTCOME	No	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
						2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				5	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	27.035.530 ekor	31.449.810 ekor	Dinas Perikanan dan Pangan	
26	Pariwisata	1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	1	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	68 Objek Wisata - Pemerintah: 6 - Swasta : 62	67 Objek Wisata - Pemerintah: 6 - Swasta : 61	Dinas Pariwisata	
				2	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	143 fasilitas umum dan fasilitas pariwisata	158 fasilitas umum dan fasilitas pariwisata • Fasilitas umum 44 • Fasilitas pariwisata 144	Dinas Pariwisata	
				3	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata persub jenis usaha di kabupaten/kota	1.609 tanda daftar usaha pariwisata	2.474 tanda daftar usaha pariwisata	Dinas Pariwisata	
				4	Jumlah wisatawan mancanegaraper kebangsaan	455.698 Wisman	191.632 Wisman	Dinas Pariwisata	
				5	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	9 event	11 event	Dinas Pariwisata	
				6	Jumlah event luar negeri yang Diikuti kabupaten/kota	Tidak Ada	Tidak Ada	Dinas Pariwisata	
				7	Jumlah industri pariwisata daerahyang berpartisipasi pada even promosi pariwisata didalam negeri	Tidak Ada	Tidak Ada	Dinas Pariwisata	
				8	Persentase tenaga kerja disektorparwisata yang disertifikasi	1.121 / ------ X 100%	401 / ------ X 100%	Dinas Pariwisata	

No	Urusan	No	IKK OUTCOME	No	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
						2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						3.417 = 32,81 %	2.823 = 14,20 %		
				9	Persentase SDMpeserta pembekalan sektor kepariwisataan	504 ----- - X 100% 504 = 100 %	630 ----- - X 100% 630 = 100 %	Dinas Pariwisata	- Pelatihan tataboga (15 org) - Pelatihan Cake(15 org) - Pelatihan Masakan Jepang(15 org) - Pengelolaan homestay (40org) - Pelatihan peningkatan higienitas sajiankuliner (40 org) - Pelatihan brandimg (40 org) - Pelatihan outbond (40 org) - Pelatihan keamanan, keselamatan di destinasi wisata(40 org) - Pelatihan kebersihan, sanitasi lingkungan di destinasi wisata(40 org) - Pelatihan tata kelola bisnis dan pemasaran destinasi (40 org)
				10	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat danpembinaan kemitraan usaha masyarakat	43 Pokdarwis	32 Pokdarwis	Dinas Pariwisata	
		2	Persentase peningkatan	1	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan	30,74 %	47,34 %	Dinas Pariwisata	

No	Urusan	No	IKK OUTCOME	No	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
						2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kota		nusantara yang datang ke kota				
		3	Tingkat hunian akomodasi	1	Tingkat hunian akomodasi	48,81 %	50,71 %	Dinas Pariwisata	
		4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	1	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	1,37 %	1,35 %	Dinas Pariwisata	
		5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	1	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	20,77 %	21,16 %	Dinas Pariwisata	
27	Pertanian	1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	1	Jumlah Sarana dan prasarana pertanian yang diberikan	42 (pupuk, alsintan, UPPO, Irigasi, Dam Parit, Jalan Usaha Tani)	49 (pembangunan RMU, peralatan RMU,pembangunan lantai jemur RMU, alat dan mesin rumah jamur, normalisasi saluran irigasi dan parit, pembangunan jaringan irigasi tersier, alsintan)	Dinas Pertanian	
				2	Prasarana pertanian yang digunakan	3 Irigasi , 1 Dam Parit, 1 Jalan Usaha Tani	2 Normalisasi saluran irigasi, 1 dam parit, 4 pembangunan jaringan irigasi tersier	Dinas Pertanian	

No	Urusan	No	IKK OUTCOME	No	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
						2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				3	Penerbitan izin usaha pertanian	951 Izin Usaha	158 Izin Usaha	Dinas Pertanian	
				4	Persentase prasarana yang digunakan	5 -------- x 100% 5 = 100 %	7 ---- x 100 %7 = 100 %	Dinas Pertanian	
				5	Persentase jumlah usulan izinusaha pertanian kab/kota	951/951 x 100% = 100 %	158 ---- x 100 % 158 = 100 %	Dinas Pertanian	
		2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	1	Persentase fasilitas ipenanggulangan bencana (bencana yang dimaksud adalah bencana pertanian dan hewan menular)	11,75 Ha / 11,75 Ha x 100% = 100%	139,95 Ha ---- x 100 % 139,95 Ha = 100 %	Dinas Pertanian	
28	Kehutanan	1	Kehutanan	1	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	Ada	Ada	Dinas Pertanian	
				2	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	Tidak ada	Tidak ada	Dinas Pertanian/BPBD	
				3	Pemulihan ekosistem pada Tahura	240 Ha	240 Ha	Dinas Pertanian	
				4	Menurunnya gangguan kawasanTAHURA	Tidak ada tindak pidana	0	Dinas Pertanian	
29	Energi Sumber Daya	1	Persentase perusahaan pemanfaatan	1	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerahkab/kota	0	-	Disnakerin	

No	Urusan	No	IKK OUTCOME	No	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
						2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Mineral		panas bumi yang memiliki izin di kab/kota						
30	Perdagangan	1	Persentase pelakuusaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	1	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan	16 / 16 x 100 % = 100 % 523 / 523 x 100 % = 96,69 %	46 / 46 x 100 % = 100 % 73 / 73 x 100 % = 100%	Dinas Perdagangan	
				2	Persentase penerbitan TDG	8 / 8 X 100% = 100 %	18 / 18 X 100% = 100 %	Dinas Perdagangan	
				3	Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	78 / 15 X 100% = 50,3 %	78 / 15 X 100% = 50,3 %	Dinas Perdagangan	
				4	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk : a. Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	0 / 0 x 100 % = 0%	0 / 0 x 100 % = 0%	Dinas Perdagangan	

No	Urusan	No	IKK OUTCOME	No	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
						2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					b. Penerima waralaba lanjutandari waralaba dalam negeri c. Penerima waralaba lanjutandari waralaba luar negeri	0 ---- x 100 % 0 = 0%	0 ---- x 100 % 0 = 0%		
						0 ---- x 100 % 0 = 0%	0 ---- x 100 % 0 = 0%		
				5	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	10 ---- -- 10 X 100% = 100 %	9 ---- -- 9 X 100% = 100 %	Dinas Perdagangan	
				6	Persentase penerbitan SKA yangtepat waktu	..... -------- x 100 % ..... = %	..... -------- x 100 % ..... = %	Dinas Perdagangan	
				7	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan diwilayah kerjanya	K=(0,5+0,5) x100% K = 100	K=(0,5+0,5) x100% K = 100	Dinas Perdagangan	
				8	Persentase koefisien variasi hargaantar waktu	-1,08903	2,61	Dinas Perdagangan	
		2	Persentase kinerjarealisasi pupuk	1	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	0	3.146,94 ton -------- x 100 % 45.023,80 ton	Dinas Pertanian	

No	Urusan	No	IKK OUTCOME	No	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
						2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
							= 62,64 %		
		3	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda	1	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	4.239 -------- x 100 % 4.774 = 89,79 %	4.341 -------- x 100 % 4.970 = 87,34 %	Dinas Perdagangan	
				2	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yangberlaku	21 ------ x 100 %21 = 100 %	25 ------ x 100 % 21 = 119 %	Dinas Perdagangan	
31	Perindusrian	1	Pertambahan jumlah industri Kecil dan Menengah di kota	1	Persentase jumlah penetapan izinusaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri(IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	0 ------ x 100 %0 = 0 %	Tidak ada	Disnakerin	
		2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasukturunan indikator pembangunan industry dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	1	Persentase terselesaikannyadokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	30 % + 20 % + 25 % + 15 % + 10 % = 100 %	30 % + 20 % + 25 % + 15 % + 10 % = 100 %	Disnakerin	
		3	Persentase jumlahhasil pemantauan dan pengawasan	1	Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yangditerbitkan	8.403 ---- x 100 % 9.342	1.414 ---- x 100 % 2.038	Disnakerin	

No	Urusan	No	IKK OUTCOME	No	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
						2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			dengan jumlah IzinUsaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengahyang dikeluarkan oleh instansi terkait			= 89,95 %	= 69,38 %		
		4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IzinPerluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengahyang dikeluarkan oleh instansi terkait	1	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecildan menengah yang diterbitkan	0 ---- x 100 %0 = 0 %	1.414 ---- x 100 % 2.038 = 69,38 %	Disnakerin	
		5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IzinUsaha Kawasan Industri (IUKI) danIzin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di DaerahKota	1	-	-	Tidak ada	-	Tidak Perlu diisi
		6	Tersedianya informasi industri secara	1	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri	121 ------	266 ------	Disnakerin	

No	Urusan	No	IKK OUTCOME	No	IKK OUTPUT	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
						2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			lengkap dan terkini		di Kabupaten/Kota yang masuk dalamSIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil,menengah dan perusahaankawasan industri di Kabupaten/Kota	8.403 X 100 % = 1, 439 %	5.956 X 100 % = 1,677 %		
32	Transmigrasi	1	Transmigrasi	1	Jumlah kawasan transmigrasi yangdifasilitasi penetapannya	....	Tidak Ada	Disnakerin	
				2	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	....	Tidak Ada	DIsnakerin	
				3	Jumlah satuan permukiman yangdibina	....	Tidak Ada	Disnakerin	

Sumber: Pemendagri Nomor 18 Tahun 2020

2.1.5.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

Tabel II- 78 Indikator Kinerja Kunci Hasil

No	Urusan	No	IKK HASIL	Capaian Kinerja		SumberData	Ket
				2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Pendidikan	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yangberpartisipasi dalam PAUD	25.202 -------- x 100 % 32.050 = 78,63%	19.837 -------- x100% 32.238 = 61,53%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

No	Urusan	No	IKK HASIL	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
				2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
		2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yangberpartisipasi dalam pendidikan dasar	90.548 -------- x 100 % 99.051 = 91,42%	91.562 --------x100 % 98.741 = 92,72%	Dinas Pendidikan	
		3	Tingkat partisipasi warganegara usia 13-15 tahunyangberpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	48.415 -------- x 100 % 48.814 = 99,18%	46.522 -------- x100% 49.645 = 93,70 %	Dinas Pendidikan	
		4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yangbelum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	1481 -------- x 100 % 964 = 153,63%	1.684 --------x100% 1.337 = 125,95 %	Dinas Pendidikan	
2	Kesehatan	1	Rasio daya tampung RSRujukan	2981 -------- x 100 % 934.847 = 0,32 %	2997 --------x100% 946.982 = 0,32 %	Dinas Kesehatan	
		2	Persentase RS RujukanTingkat Kota yang terakreditasi	26 -------- x 100 % 27 = 96,29 %	27 -------- x100% 27 = 100 %	Dinas Kesehatan	

No	Urusan	No	IKK HASIL	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
				2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
		3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanankesehatan ibu hamil	13.070 -------- x 100 % 13.183 = 99,1 %	6.316 -------- x 100% 6.316 = 100 %	Dinas Kesehatan	
		4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayananpersalinan	13.173 -------- x 100 % 13.183 = 99,9 %	6.316 -------- x100% 6.316 = 100 %	Dinas Kesehatan	
		5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	12.650 -------- x 100 % 13.190 = 95,9 %	5.997 --------x100% 5.997 = 100 %	Dinas Kesehatan	
		6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuaistandar	58.615 -------- x 100 % 58.615 = 100 %	29.443 -------- x 100% 29.443 = 100 %	Dinas Kesehatan	
		7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	165.646 -------- x 100 % 165.646 = 100 %	132.567 -------- x 100% 148.386 = 100 %	Dinas Kesehatan	

No	Urusan	No	IKK HASIL	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
				2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
		8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	442.661 -------- x 100 % 447.255 = 98,97 %	605.655 -------- x100 % 600.662 = 100,83 %	Dinas Kesehatan	
		9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	60.042 -------- x 100 % 60.042 = 100 %	92.344 -------- x 100% 114.201 = 80,86 %	Dinas Kesehatan	
		10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	105.148 -------- x 100 % 106.737 = 98,51 %	71.574 -------- x 100% 71.574 = 100 %	Dinas Kesehatan	
		11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar	13.433 -------- x 100 % 13.433 = 100 %	17.727 -------- x100 % 17.850 = 99,3 %	Dinas Kesehatan	
		12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	2.235 -------- x 100 % 2.235 = 100 %	2.353 -------- x 100 % 2.353 = 100 %	Dinas Kesehatan	

No	Urusan	No	IKK HASIL	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
				2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
		13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	3.659 -------- x 100 % 3.659 = 100 %	26.790 -------- x 100 % 26.790 = 100 %	Dinas Kesehatan	
		14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	24.407 -------- x 100 % 24.407 = 100 %	23.640 -------- x 100 % 23.640 = 100 %	Dinas Kesehatan	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kota	86,3148 Ha -------- x 100 % 109,4332 Ha = 78,87 %	0 Ha -------- x 100 % 1 Ha = 0 %	Dinas PUPR	
		2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kota	0. m -------- x 100 % 0 m = 0	0. m -------- x 100 % 0 m = 0	Dinas PUPR	Kewenangan Balai Wilayah Sungai Sumatera V Kementerian PUPR

No	Urusan	No	IKK HASIL	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
				2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
		3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	3.022 hektar -------- x 100 % 4.239,75 hektar = 71,3 %	3.290 hektar -------- x 100 % 4.239,75 hektar = 77,6 %	Dinas PUPR	
		4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kota	232.570 -------- x 100 % 238.362 = 97,57 %	235.083 -------- x 100 % 239.828 = 98,02 %	DPRKP	
		5	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	238.362 -------- x 100 % 238.362 = 100. %	239.828 -------- x 100 % 239.828 = 100. %	DPRKP	
		6	Rasio kepatuhan IMB kota	165.873 -------- x 100 % 165.873 = 100 %	1.399 -------- x 100 % 1.399 = 100 %	DPUPR	Sejak tahun 2021 DPUPR mengeluarkan rekomendasi teknis atas pemohonan PBG/IMB sedangkan PBG dan IMG

No	Urusan	No	IKK HASIL	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
				2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
							diterbitkan oleh DPMPTSP.
		7	Tingkat kemantapan jalankota	531,050 Km -------- x 100 % 624,691 Km =85,01 %	511,371 Km -------- x 100 % 624,691 Km =81,86 %	Dinas PUPR	
		8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	367 -------- x 100 % 367 = 100 %	9 -------- x 100 % 9 = 100 %	Dinas PUPR	
		9	Rasio proyek yang menjadikewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	95 Paket -------- x 100 % 95 Paket = 100 %	55 Paket -------- x 100 % 55 Paket = 100 %	Dinas PUPR	
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permuki	1	Penyediaan dan rehabilitasirumah layak huni bagi korban bencana kota	3 -------- x 100 % 3 = 100. %	3 -------- x 100 % 3 = 100. %	DPRKP	

No	Urusan	No	IKK HASIL	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
				2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
	man	2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kota	1 -------- x 100 % 1 = 100 %	0 -------- x 100 % 1 = 0 %	DPRKP	
		3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	192,58 ha -------- x 100 % 230,29ha = 83,62. %	230,29 ha -------- x 100 % 230,29ha = 100. %	DPRKP	
		4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	7.314 -------- x 100 % 238.362 = 3,07 %	7.080 -------- x 100 % 239.828 = 2,95 %	DPRKP	
		5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	232.570 -------- x 100 % 238.362 = 97,57 %	1.088 -------- x 100 % 1.088 = 100 %	DPRKP	

No	Urusan	No	IKK HASIL	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
				2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapatdiselesaikan	2.121 -------- x 100 % 2.121 = 100 %	37 -------- x 100 % 37 = 100 %	Satpol PP	
		2	Persentase Peraturan Daerahdan Perkada yang ditegakkan	65 -------- x 100 % 76 = 85,52 %	21 -------- x 100 % 21 = 85,52 %	Satpol PP	
		3	Jumlah warga negara yangmemperoleh layanan informasi rawan bencana	14.694 ..... x 100% 928.541 = 1,58 %	553.622 ..... x 100% 641.385 = 86,32 %	BPBD	
		4	Jumlah warga negara yangmemperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	3.619 ..... x 100% 928.541 = 0,39 %	7.925 ..... x 100% 918.851 = 0,86 %	BPBD	
		5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1.363 -------- x 100 % 381.587 = 0,035%	8.337 -------- x 100 % 8.337 = 0,035%	BPBD	

No	Urusan	No	IKK HASIL	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
				2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
		6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasikorban bencana	186 -------- x 100 % 186 = 100 %	243 -------- x 100 % 243 = 100 %	Dinas Damkar	
		7	Waktu tanggap (responsetime) penanganan kebakaran	6,8 Menit	7,7 Menit	Dinas Damkar	
6	Sosial	1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luarpanti (Indikator SPM)	975 -------- x 100 % 2.689 = 36,26 %	4.647 -------- x 100 % 2.952 = 157,41 %	Dinas Sosial	
		2	Persentase korban bencanaalam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	3.940 -------- x 100 % 3.940 = 100 %	528 -------- x 100 % 528 = 100 %	Dinas Sosial	
7	Tenaga Kerja	1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacuke rencana tenaga kerja	6 -------- x 100 % 16 = 37,5 %	5 -------- x 100 % 18 = 27,78 %	Disnakerin	

No	Urusan	No	IKK HASIL	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
				2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
		2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	647 -------- x 100 % 426.765 = 0,015 %	15 -------- x 100 % 1.228 = 1,22 %	Disnakerin	
		3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	47.158,10 -------- x 100 % 426.765 = 11,05 %	51.611.55 -------- x 100 % 104.071 = 49,593 %	Disnakerin	
		4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	3.298 -------- x 100 % 3.518 = 93.75%	68 -------- x 100 % 72 = 94,44 %	Disnakerin	
		5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kota	701 -------- x 100 % 3.601 = 19,46 %	1.130 -------- x 100 % 1.589 = 71,1 %	Disnakerin	

No	Urusan	No	IKK HASIL	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
				2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD	253.729.680.361 ---------- x 100 % 2.564.284.317.307 = 9,87 %	301.309.131.303 ---------- x 100 % 2.553.196.488.158 = 11,80 %	DP3AP2KB	
		2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kota	74 -------- x 100 %74 = 100 %	78 ------ x 100 %78 = 100 %	DP3AP2KB	
		3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO(per 100.000 penduduk perempuan)	27 ------- x 100.000 330.290 = 8,17. per 100.000	31 ------- x 100.000 335.463 = 9,24 per 100.000	DP3AP2KB	
9	Pangan	1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	65.877,14 ton ---------- x 100 % 100.955 ton = 65,254 %	111,99 ton ---------- x 100 % 81,46 ton = 137,48 %	Dinas Perikanan dan Pangan	
10	Pertanahan	1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	1.085.214 m2 -------- x 100 % 1.149.178m2 = 94,4%	785.367 m2 -------- x 100 % 787.037 m2 = 96,357 %	Dinas Pertanahan	
		2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	1 lokasi -------- x 100 %	2 lokasi -------- x 100 %	Dinas Pertanahan	1. Penetapan lokasi jalan samudera

No	Urusan	No	IKK HASIL	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
				2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
				1 lokasi = 100 %	2 lokasi = 100 %		2. Penetapan lokasi jalan purus-BIM (ujung jembatan hotel pangeran beach-transito)
		3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangkapenanaman modal	254.306 M2 ---------- x 100 % 1.149.178 M2 = 22,13 %	787.037 M2 --------- x 100 % 787.037 M2 = 22,13 %	DPUPR	DPMPTSP Tidak Lagi Menerbitkan Izin Lokasi
		4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah KelebihanMaksimum dan Tanah Absentee	342 -------- x 100 % 342 = 100 %	1 -------- x100% 150 = 0,67 %	Dinas Pertanahan	No 528/2024 Tentang penetapan subjek redistribusi tanah di kelurahan batu gadang kec. Liubuk kilangan sebanyak 150 objek redidtribusi tanah

No	Urusan	No	IKK HASIL	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
				2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
		5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	0 M2 ---------- x 100 % 0 M2 = 0 %	0 M2 ---------- x 100 % 0 M2 = 0 %	Dinas Pertanahan	Pada saat ini Dinas Pertanahan belum ada melaksanakan kegiatan izin Membuka Tanah
		6	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	15 kasus ---------- x 100 % 15 kasus = 100 %	9 kasus ---------- x 100 % 9 kasus = 100 %	Dinas Pertanahan	
11	Lingkungan Hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota	IKLH = 72.28 IKA = 69.77 IKU = 74.11 IKL = 73.20	IKLH = 77.26 IKA = 69.09 IKU = 87,80 IKL = 71,78	DLH	
		2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kota	225.602 ton/tahun -------- x 100 % 236.296.62 ton/tahun = 95.47 %	232.327,64 -------- x 100 % 240.131,93 = 96.75 %	DLH	

No	Urusan	No	IKK HASIL	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
				2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
		3	Ketaatan penanggung jawabusaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota	101 -------- x 100 % 453 = 22.29 %	0 -------- x 100 % 52 = 0 %	DLH	
12	Administrasi Kependudukandan Penatatan Sipil	1	Perekaman KTP Elektronik	668.275 -------- x 100 % 674.106 = 99,14 %	679.303 -------- x 100 % 682.014 = 99,60 %	Disdukcapil	
		2	Persentase anak usia 0-17tahun kurang 1 (satu) hariyang memiliki KIA	125.606 -------- x 100 % 260.741 = 48,17 %	153.675 -------- x 100 % 256.125 = 60 %	Disdukcapil	
		3	Kepemilikan akta kelahiran	272.077 -------- x 100 % 272.803 = 99,73 %	272.411 -------- x100% 273.663 = 99,54 %	Disdukcapil	
		4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	33 -------- x 100 % 39 = 84,62%	4 --------x100% 42 = 9,52%	Dsdukcapil	

No	Urusan	No	IKK HASIL	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
				2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	Persentase pengentasan desa tertinggal	-		Bag. Tata Pemerintahan	
		2	Persentase peningkatan status desa mandiri	-		Bag. Tata Pemerintahan	
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,27	2,21	DP3AP2KB	
		2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	63.714 -------- x 100 % 91.900 = 69,33 %	63.237 -------- x100% 91.545 = 69,07 %	DP3AP2KB	
		3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	8657 -------- x 100 % 91900 = 9,42 %	5.861 -------- x100% 91.545 = 6,40 %	DP3AP2KB	

5	Perhubungan	1	Rasio konektivitas Kota	74 x 1 ---- x 100 IK 1= 93 = 0,80% IK 2 = 0. RKK = (0,80 x 1) + 0 = 0,80	93 x 1 ---- x 100 IK 1= 93 = 100% IK 2 = 0. RKK = (1 x 1) + 0 = 1	Dishub	

No	Urusan	No	IKK HASIL	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
				2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
		2	V/C Rasio di jalan Kota	2.778,3 -------- x 100 % 1.322,6 = 0,47 %	1.318 -------- x 100 % 2.778,3 = 0,46 %	Dishub	
16	Komunikasidan Informatika	1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD)yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	245 -------- x 100 % 245 =100%	42 -------- x 100 % 42 =100%	Diskominfo	
		2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secaraonline dan terintegrasi	54 -------- x 100 % 97 =56 %	8 -------- x 100 % 15 =53,33 %	Diskominfo	
		3	Persentase masyarakat yangmenjadi sasaran penyebaraninformasi publik, mengetahuikebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kota	612.927 ---------x 100 % 612.927 = 100%	641.385 ---------x 100 % 641.385 = 100%	Diskominfo	
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1	Meningkatnya Koperasi yangberkualitas	360 -------- x 100 %	370 -------- x 100 %	Dinas Koperasidan UKM	

No	Urusan	No	IKK HASIL	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
				2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
				411 = 87,59 %	440 = 84,09 %		
		2	Meningkatnya Usaha Mikroyang menjadi wirausaha	6.815 -------- x 100 % 43.282 = 15,74 %	10.196 -------- x 100 % 47.692 = 21,13 %	Dinas Koperasidan UKM	
18	Penanaman Modal	1	Persentase peningkataninvestasi di Kota	1.431.310.804.191-1.291.248.545.000 -------- x 100 % 1.291.248.545.000 = 10,85 %	3.650.616.831.415-1.431.310.804.191 -------- x 100 % 1.431.310.804.191 = 5 %	DPMPTSP	
19	Kepemudaandan Olahraga	1	Tingkat partisipasi pemudadalam kegiatan ekonomi mandiri	750 -------- x 100 % 222.646 = 0,34 %	1.455 -------- x 100 % 225.698 = 0,64 %	Dispora	
		2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	20.708 -------- x 100 % 222.646	20.738 -------- x 100 % 225.698	Dispora	

No	Urusan	No	IKK HASIL	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
				2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
				= 9.03 %	= 9.18 %		
		3	Peningkatan prestasi olahraga	95 Medali	110 Medali	Dispora	
20	Statistik	1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	51 ------ x 100 %51 = 100 %	42 ------ x 100 %42 = 100 %	Diskominfo	
		2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	51 -------- x 100 %51 = 100 %	42 ------- x 100 %42 = 100 %	Diskominfo	
21	Persandian	1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	430 ------ x 100 % 645 = 66,7 %	430 ------ x 100 % 645 = 66,7 %	Diskominfo	
22	Kebudayaan	1	Terlestarikannya Cagar Budaya	55 ------ x 100 %55 = 100 %	81 ------ x 100 %81 = 100 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
23	Perpustakaan	1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	72,34	70,01	Dinas Perpustakaan dan Arsip	

No	Urusan	No	IKK HASIL	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
				2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
		2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	72,49	85,47	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
24	Kearsipan	1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	T = (a+i+s+j) /4 T = (100%+100%+100%+59) /4 T = 89,75%	T = (a+i+s+j) /4 T = (100%+100%+100%+75%) /4 T = 93,75%	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
		2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	T = (m + b + g + a + c + i)/6 T = (100%+100%+100%+100%+100%+100%)/6 T = 100%	T = (m + b + g + a + c + i)/6 T = (100%+100%+100%+100%+100%+100%)/6 T = 100%	Dinas Perpustakaan dan Arsip	

No	Urusan	No	IKK HASIL	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
				2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
25	Kelautan dan Perikanan	1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kota di (sumberdata: one data KKP)	26.016,76 Ton -------- x 100 % 21.520.3 = 120.89%	32.924,29 Ton -------- x 100 % 23.497,35 = 140.12%	Dinas Perikanandan Pangan	
26	Pariwisata	1	Persentase pertumbuhanjumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	455.698 - 22.995 -------- x 100 % 22.995 = 1.881,73%	191.632-455.698 -------- x 100 % 455.698 = - 57,95 %	Dinas Pariwisata	
		2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kota	3.702.838 – 2.832.140 -------- x 100 % 2.832.140 = 30,74%	5.455.685 - 3.702.842 -------- x 100 % 3.702.842 = 47,34%	Dinas Pariwisata	
		3	Tingkat hunian akomodasi	1.748.181 -------- x 100 % 1.804.560 = 96,88%	696.326 -------- x 100 % 1.370.575 = 50,81%	Dinas Pariwisata	

No	Urusan	No	IKK HASIL	Capaian Kinerja		SumberData	Ket
				2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
		4	Kontribusi sektor pariwisatat erhadap PDRB harga berlaku	3.440,9 -------- x 100 % 79.704,67 = 4,31 %	1.440,19 -------- x 100 % 84.182,56 = 1,35 %	Dinas Pariwisata	
		5	Kontribusi sektor pariwisataterhadap PAD	136.788.804.408 -------- x 100 % 658.718.550.804 ,50 = 20,77 %	140.213.296.706 -------- x 100 % 662.549.854.335 = 21,16 %	Dinas Pariwisata	
27	Pertanian	1	Produktivitas pertanian perhektar per tahun	53.477 Ton -------- x 100 % 10.584 Ha = 5,05 ton/Ha	46.940,20 Ton -------- x 100 % 10.122 Ha = 4,64 ton/Ha	Dinas Pertanian	
		2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasuspenyakit hewan menular	(115-190) -------- x 100 % 190 = (39,47)%	(13 - 115) -------- x 100 % 115 = - 88,69 %	Dinas Pertanian	

No	Urusan	No	IKK HASIL	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
				2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
28	Energi Sumber Daya Mineral	1	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumiyang memiliki izin di kab/kota	1 ----- x 100 %1 = 100 %	0 ----- x 100 % 0 = 100 %	Disnakerin	
29	Perdagangan	1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuaidengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	540 ------ x 100 %4540 = 100 %	73 ------ x 100 % 73 = 100 %	Dinas Perdagangan	
		2	Persentase kinerja realisasipupuk	2.678,182 Ton -------- x 100 % 4.446,395To n = 60,23 %	3.146,94 Ton -------- x 100 % 8.568,324 Ton = 36,72 %	Dinas Pertanian	
		3	Persentase alat – alat ukur,takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	4.239 -------- x 100 % 4.774 = 89,79 %	4.341 -------- x 100 % 4.970 = 87 %	Dinas Perdagangan	
30	Perindusrian	1	Pertambahan jumlah industriKecil dan Menengah di kota	8.403-5.868 -------- x 100 % 5.868 = 43,20 %	9.817 - 8.403 -------- x 100 % 8.403 = 16,83 %	Disnakerin	

No	Urusan	No	IKK HASIL	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
				2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
		2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industry dalam RIPIN yangditetapkan dalam RPIK	100 %	100 %	Disnakerin	
		3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlahIzin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan olehinstansi terkait	153 -------- x 100 % 8.403 = 1,82 %	0 -------- x 100 % 0 = 0 %	Disnakerin	
		4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlahIzin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkanoleh instansi terkait	0 ---- x 100 %0 = 0 %	0 ---- x 100 %0 = 0 %	Disnakerin	
		5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlahIzin Usaha Kawasan Industri(IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kota	0 ----- x 100 %0 = 0 %	0 ----- x 100 %0 = 0 %	Disnakerin	
		6	Tersedianya informasi industri secara lengkap danterkini	(50 % + 25 %) = 75 %	(50 % + 20 %) = 70 %	Disnakerin	

Sumber: Permendagri Nomor 19 Tahun 2024

2.1.5.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Tabel II- 79 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

NO	URUSAN	NO	IKK	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KET
				2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Perencanaan dan Keuangan	1	Rasio Belanja Pegawai Di LuarGuru dan Tenaga Kesehatan	336.571.010.936,00 ---------- x 100 % 2.324.646.982.105,46 = 14,48 %	471.372.863.410, ------- x 100 % 2.444.666.033.218,96 = 19,28 %	BPKAD	
		2	Rasio PAD	658.735.710.804,50 ---------- x 100 % 2.310.394.234.288,50 = 28,51 %	662.549.854.334,82 ----------x100% 2.531.275.045.504,82 = 26,17 %	BPKAD	
		3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	Level 3	Inspektorat	
		4	Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	Level 3	Inspektorat	
		5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	(1.924.955.364.669,97 – 234.271.025.241,17) -------- x 100 % 2.324.646.982.105,46 = 72,73 %	(2.217.373.065.460,08 -153.488.963.524,00) -------- x 100 % 2.444.666.033.218,96 = 84,42 %	BPKAD	
		6	Opini Laporan Keuangan	2014: WTP 2015: WTP 2016: WTP 2017: WTP 2018: WTP 2019: WTP	2014: WTP 2015: WTP 2016: WTP 2017: WTP 2018: WTP 2019: WTP	Inspektorat/ BPKAD	

NO	URUSAN	NO	IKK	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KET
				2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
				2020: WTP 2021: WTP 2022: WTP 2023: WTP	2020: WTP 2021: WTP 2022: WTP 2023: WTP 2024: Belum rilis		
2	Pengadaan	1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahunberikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	0 ----- x 100 % 114 = 0 %	0 ----- x 100 % 1.392 = 0 %	BPBJ	
		2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metodekompetitif	114 ------ x 100 % 11.384 = 1,001 %	22.204 ------ x 100 % 23.610 = 94,04 %	BPBJ	
		3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	383.157.002.876,74 ---------- x 100 % 2.324.667.326.747,46 = 16, 48 %	441.331.075.323,75 ---------- x 100 % 2.546.665.464.130 = 17,32 %	BPBJ	
		4	Peningkatan Penggunaan ProdukDalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	762.903.685.258 - 653.816.618.268 ---------- x 100 % 653.816.618.268 = 16,68 %	403.122.285.439 - 403.220.305.503 ---------- x 100 % 403.220.305.503 = 0,0242 %	BPBJ	
3	Kepegawaian	1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggidan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenagakesehatan)	2.205 -------- x 100 % 2.996 = 73,60 %	2.012 -------- x 100 % 2.706 = 74,35 %	BKPSDM	
		2	Rasio Pegawai Fungsional(%)(PNS tidak termasuk guru dantenagakesehatan)	456 -------- x 100 % 3.006 = 15,17 %	483 -------- x 100 % 2.706 = 17,84 %	BKPSDM	

NO	URUSAN	NO	IKK	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KET
				2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
		3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%)(PNS tidak termasuk guru dantenaga kesehatan)	246 ------- x 100 % 456 = 53,95 %	273 ------- x 100 % 483 = 56,52 %	BKPSDM	
4	Manajemen Keuangan	1	Deviasi realisasi belanja terhadapbelanja total dalam APBD	2.324.646.982.105,46 ----------x 100 % 2.499.903.575.679,00 = 92,99 %	2.444.666.033.218,96 ----------x 100 % 2.565.006.041.510 = 4,69 %	BPKAD	
		2	Deviasi realisasi PAD terhadapanggaran PAD dalam APBD	658.735.710.804,50 ---------- x 100 % 729.911.859.086,00 = 90,25 %	662.549.854.334,82 ---------- x 100 % 706.838.011.883,00 = 6,26 %	BPKAD	
		3	Assets management	1. Ya 2. Ya 3. Ya 4. Ya	1. Ya 2. Ya 3. Ya 4. Ya	BPKAD	
		4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahunsebelumnya	60.067.499.426,12 -------- x 100 % 2.224.959.294.893,7 = 2,7 %	135.996.915.773,12 -------- x 100 % 2.565.006.041.510 = 5,3 %	BPKAD	
5	Transparansi dan PartisipasiPublik	1	Informasi tentang sumber dayayang tersedia untuk pelayanan	3.600.000.000 ---------- x 100 % 3.600.000.000 = 100 %	2.137.229.920.816,96 ---- x 100 % 2.260.716.99.605 = 94,54%	Diskominfo / BPKAD	

NO	URUSAN	NO	IKK	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KET
				2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
		2	Akses public terhadap informasi keuangan daerah	12 ------- x 100 % 12 = 100%	12 ------- x 100 % 12 =100%	Diskominfo / BPKAD	
6	Pendidikan dan Pelatihan	1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan				
		2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal				
		3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural				
7	Penelitian dan Pengembangan	1	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	2 ------x100% 2 =100%	1 -----x100% 1 =100%	Bappeda	

Sumber: Permendagri Nomor 19 Tahun 2024

2.2 Gambaran Keuangan Daerah

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan berjalan secara optimal apabila perencanaan program pembangunan daerah disertai dengan pemberian sumber penerimaan yang cukup kepada daerah (*money follow programs*). Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam mengelola keuangan daerah dengan berpedoman pada asas umum pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat terhadap peraturan perundang-undangan, serta dilakukan secara efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, serta manfaat bagi masyarakat. Selain itu, pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan setiap tahunnya dalam peraturan daerah.

Untuk memberikan gambaran mengenai pengelolaan keuangan daerah Kota Padang Tahun 2025–2030, bagian ini akan memaparkan hasil analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah serta rencana kerangka pendanaan pembangunan. Analisis pengelolaan keuangan daerah mencakup kajian terhadap potensi, kapasitas, dan kemampuan keuangan Kota Padang dalam mendanai pembangunan. Saat ini, Kota Padang mengacu pada berbagai regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah, di antaranya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selain itu, pengelolaan keuangan daerah juga berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Untuk memperoleh gambaran pola atau tren pengelolaan keuangan daerah, dilakukan analisis *timeseries* terhadap data lima tahun terakhir. Sementara itu, analisis rencana kerangka pendanaan pembangunan dilakukan dengan memperkirakan kemampuan pendanaan daerah berdasarkan hasil proyeksi dari pola pengelolaan keuangan daerah selama lima tahun terakhir.

2.2.1 Kinerja Keuangan Daerah Masa Lalu

Evaluasi kinerja keuangan dari periode sebelumnya menjadi dasar utama bagi Pemerintah Kota Padang dalam menyusun rencana pembangunan daerah ke depan, khususnya dalam menyusun proyeksi

keuangan pemerintah daerah. Dengan melakukan analisis menyeluruh terhadap data historis, dapat diidentifikasi pola pertumbuhan rata-rata serta kontribusi dari tiga aspek utama keuangan daerah, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pemahaman yang mendalam mengenai tren dan pola ini memungkinkan pemerintah menyusun proyeksi yang lebih akurat serta merumuskan strategi yang lebih efektif. Untuk menilai kapasitas keuangan daerah secara menyeluruh, berbagai indikator dapat digunakan, termasuk aspek kemandirian, efisiensi, efektivitas, dan pertumbuhan.

Perkembangan APBD Kota Padang dalam lima tahun terakhir (2020-2024) disajikan dalam tabel berikut. Rata-rata Pendapatan Daerah sebesar 2.454,11 Miliar Rupiah, dengan nilai rata-rata pertumbuhan sebesar 1,75%. Trend nilai pendapatan cenderung meningkat kecuali pada tahun 2022 terjadi penurunan. Sementara rata-rata belanja daerah sebesar 2.595,73 Miliar Rupiah dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,97%. Trend belanja daerah dan pembiayaan daerah memiliki pola yang serupa, yaitu turun dari tahun 2022. Nilai rata-rata pembiayaan daerah sebesar 49,86 Miliar Rupiah dengan pertumbuhan rata-rata sebesar (23,16%).

Tabel II- 80 Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2020-2024 (Rp)

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	RATA_RATA PERTUM-BUHAN (%)
A	**PENDAPATAN DAERAH**	**2.384.064.726.834**	**2.519.934.973.332**	**2.378.293.522.274**	**2.431.902.343.228**	**2.556.346.295.847**	**1,76%**
1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**664.266.307.878**	**808.184.679.649**	**733.347.779.600**	**729.911.859.086**	**706.838.011.883**	1,57%
1.1	Pajak Daerah	492.017.178.000	640.526.276.598	554.385.936.163	571.804.687.930	541.844.117.219	2,44%
1.2	Retribusi Daerah	66.192.533.286	69.307.060.256	52.911.290.667	45.136.239.965	122.330.706.129	16,60%
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.463.632.245	12.747.769.449	17.555.318.019	20.067.188.004	22.137.335.408	13,24%
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	92.592.964.346	85.603.573.346	108.495.234.751	92.903.743.187	20.525.853.127	-31,38%
2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.586.797.998.956**	**1.575.943.393.683**	**1.620.196.297.636**	**1.697.892.484.142**	**1.845.776.283.964**	**3,85%**
2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.496.727.352.692	1.467.289.885.817	1.513.542.789.770	1.560.517.771.223	1.714.524.331.525	3,45%
2.1.1	Dana Perimbangan	1.452.277.917.692	1.441.907.890.817	1.489.178.793.770	1.555.195.621.223	1.706.245.653.525	4,11%
2.1.1.1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	98.766.682.715	57.312.473.817	70.288.914.000	92.234.148.864	76.667.744.000	-6,14%
2.1.1.2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.068.755.501.000	1.044.871.535.000	1.035.030.667.770	1.103.586.048.484	1.240.351.499.000	3,79%
2.1.1.3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)	284.755.733.977	339.724.064.000	383.859.212.000	359.375.423.875	389.226.410.525	8,13%
2.1.2	Insentif Fiskal	44.449.435.000	25.381.995.000	24.363.996.000	5.322.150.000	8.278.678.000	-34,31%
2.1.2.1	Insentif Fiskal	44.449.435.000	25.381.995.000	24.363.996.000	5.322.150.000	8.278.678.000	-34,31%
2.1.3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	90.070.646.264	108.653.507.866	106.653.507.866	137.374.712.919	131.251.952.439	9,87%

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	RATA_RATA PERTUM-BUHAN (%)
2.1.3.1	Pendapatan Bagi Hasil	89.870.646.264	106.653.507.866	106.653.507.866	132.794.837.487	129.551.952.439	9,57%
2.1.3.2	Bantuan Keuangan	200.000.000	2.000.000.000	-	4.579.875.432	1.700.000.000	70,75%
3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**133.000.420.000**	**135.806.900.000**	**24.749.445.038**	**4.098.000.000**	**3.732.000.000**	-59,07%
3.1	Pendapatan Hibah	133.000.420.000	135.806.900.000	24.749.445.038	4.098.000.000	3.732.000.000	-59,07%
B	**BELANJA DAERAH**	**2.401.183.162.045**	**2.590.820.702.112**	**2.432.047.873.684**	**2.499.903.575.679**	**2.595.734.199.335**	1,97%
4	**BELANJA OPERASI**	**1.877.730.145.986**	**2.134.017.653.643**	**1.956.291.586.423**	**2.060.126.171.675**	**2.338.143.451.546,25**	5,64%
4.1	Belanja Pegawai	1.147.531.149.208	1.158.261.397.656	1.048.841.616.566	1.045.359.849.326	1.282.569.246.434	2,82%
4.2	Belanja Barang dan Jasa	654.598.717.358	821.633.754.066	725.795.977.907	762.027.674.416	892.190.446.097	8,05%
4.3	Belanja Bunga	1.619.535.715	274.240.551	1.648.725.547	2.616.295.538	1.828.640.289	3,08%
4.4	Belanja Subsidi	-	17.208.143.843	19.678.032.800	30.544.086.437	43.590.096.932	100,00%
4.5	Belanja Hibah	71.436.856.600	126.378.517.527	146.868.022.603	197.791.983.200	109.006.841.794	11,14%
4.6	Belanja Bantuan Sosial	1.655.578.000	10.261.600.000	13.459.211.000	21.786.282.758	8.958.180.000	52,52%
4.7	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah/Parti Politik	888.309.104	-	-	-	-	-100,00%
5	**BELANJA MODAL**	**324.388.683.836**	**437.231.034.807**	**473.684.400.091**	**433.877.641.134**	**243.964.970.489**	**-6,88%**
5.1	Belanja Modal Tanah	628.955.038	4.256.216.859	5.113.620.068	-	206.178.400	-24,33%
5.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	101.743.171.210	84.942.355.164	78.910.180.751	62.837.800.611	74.434.739.817	-7,52%
5.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	41.411.898.043	210.471.322.802	259.543.607.018	266.818.055.811	68.240.289.842	13,30%
5.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	178.268.918.795	124.321.683.656	118.334.475.048	92.862.497.906	87.330.324.177	-16,34%

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	RATA_RATA PERTUM-BUHAN (%)
5.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.936.062.100	12.477.536.806	10.823.787.206	10.721.286.806	13.106.438.358	61,30%
5.6	Belanja Modal Aset Lainnya	399.678.650	761.919.520	958.730.000	638.000.000	220.485.000	-13,82%
6	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**199.064.332.222**	**19.572.013.662**	**2.071.887.170**	**5.899.762.870**	**13.625.777.300**	**-48,85%**
6.1	Belanja Tidak Terduga	199.064.332.222	19.572.013.662	2.071.887.170	5.899.762.870	13.625.777.300	-48,85%
7	**BELANJA TRANSFER**	**-**	**-**	**-**	**150.000.000**	**-**	0,00%
7.1	Transfer Bagi Hasil	-	-	-	150.000.000	-	0,00%
C	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**17.118.435.211**	**70.885.728.780**	**53.754.351.410**	**68.151.232.451**	**39.387.903.488**	**23,16%**
8	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**53.947.672.274**	**102.486.728.780**	**83.308.992.492**	**89.801.232.451**	**60.159.381.300**	2,76%
8.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	53.947.672.274	44.824.375.310	25.646.639.022	89.801.232.451	60.159.381.300	2,76%
8.2	Penghematan Belanja	-	-	-	-	38.000.000.000	0,00%
8.3	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	-	57.662.353.470	57.662.353.470	-	-	0,00%
8.4	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	0,00%
9	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**36.829.237.063**	**31.601.000.000**	**29.554.641.082**	**21.650.000.000**	**20.771.477.812**	-13,34%
9.1	Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000	31.601.000.000	24.749.445.038	8.300.000.000	10.000.000.000	0,00%
9.2	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	26.829.237.063		4.805.196.044	13.350.000.000	10.771.477.812	-20,40%

Sumber : BPKAD Kota Padang, tahun 2020-2024

2.2.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD Kota Padang dapat dievaluasi melalui struktur dan akurasi pendapatan, belanja daerah, serta neraca daerah. Neraca daerah mencerminkan perkembangan aset yang dimiliki Kota Padang, kondisi kewajiban pemerintah daerah, serta ekuitas dana yang tersedia. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terdapat perubahan dalam struktur APBD. Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 27 ayat (1), struktur APBD terdiri dari tiga komponen utama, yaitu Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah, yang merupakan satu kesatuan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Secara umum, perkembangan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah Kota Padang menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun. Peningkatan ini mencerminkan adanya pertumbuhan ekonomi daerah, efektivitas pengelolaan keuangan, serta optimalisasi sumber daya untuk mendukung pembangunan. Perkembangan ini dapat dilihat lebih lanjut pada gambar berikut.

Gambar II- 73 Realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Pembiayaan Daerah Kota Padang Tahun 2020-2024

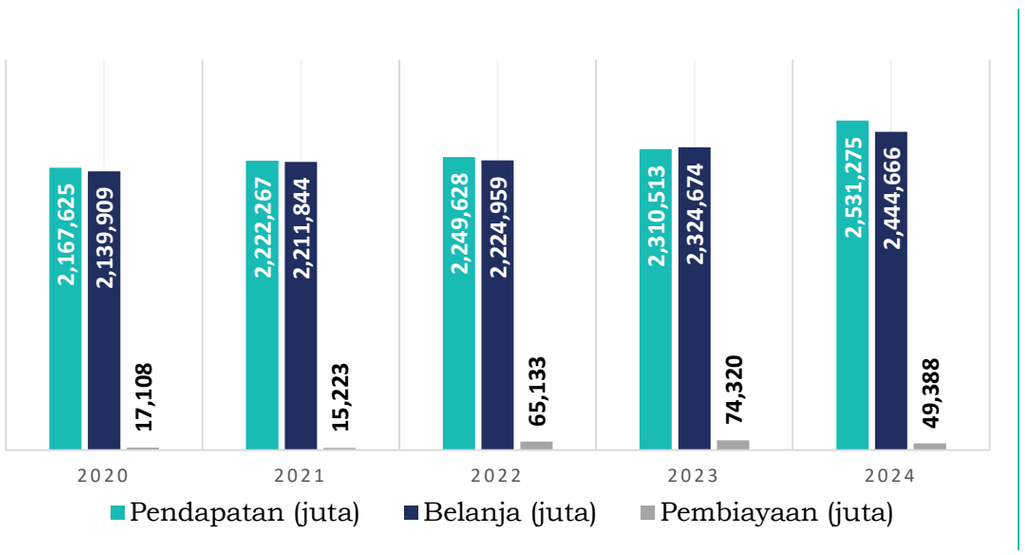

Sumber : BPKAD Kota Padang, 2020-2024

Analisis grafik keuangan daerah Kota Padang selama periode 2020-2024 menunjukkan dinamika yang beragam. Pada tahun 2020, pendapatan daerah tercatat lebih tinggi dibandingkan belanja daerah, menghasilkan surplus keuangan. Surplus ini terjadi sebagai akibat dari efisiensi dalam pengelolaan belanja serta adanya beberapa pos belanja yang tidak terealisasi sepenuhnya.

Namun, pada tahun 2023 terjadi pergeseran, di mana belanja daerah melampaui pendapatan, mengakibatkan defisit keuangan. Defisit ini dapat diatasi dengan memanfaatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dari tahun sebelumnya, sehingga stabilitas fiskal tetap terjaga.

Pola perubahan ini mencerminkan evolusi strategi pengelolaan keuangan Kota Padang, dari pendekatan konservatif yang berorientasi pada surplus ke arah manajemen defisit yang lebih proaktif namun tetap terkendali. Hal ini menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam menyeimbangkan kehati-hatian fiskal dengan kebutuhan investasi pembangunan yang lebih besar, guna mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kualitas layanan publik secara berkelanjutan.

2.2.1.2 Kinerja Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai faktor yang meningkatkan nilai kekayaan bersih. Selama periode 2020–2024, realisasi Pendapatan Daerah Kota Padang mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dari Rp 2.167,63 miliar pada tahun 2020 menjadi sekitar Rp 2.531,3 miliar pada tahun 2024. Perkembangan Pendapatan Daerah secara rinci, beserta perbandingannya dengan target yang telah ditetapkan, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II- 81 Target dan Realisasi Serta Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Pencapaian %	Pertumbuhan Anggaran %	Pertumbuhan Realisasi %
2020	2.384.064.726.834	2.167.625.242.572	90,92%	-11,02%	-7,77%
2021	2.519.934.973.332	2.222.266.851.375	88,19%	5,70%	2,52%
2022	2.378.293.522.274	2.249.627.970.195	94,59%	-5,62%	1,23%
2023	2.431.902.343.228	2.310.513.101.363	95,01%	2,25%	2,71%
2024	2.556.346.295.847	2.531.275.045.504	99,02%	5,12%	9,55%
RATA-RATA			**93,55%**	**-0,71%**	**1,65%**

Sumber : BPKAD Kota Padang, 2020-2024

Analisis terhadap realisasi pencapaian target pendapatan daerah Kota Padang selama periode 2020-2024 menunjukkan kinerja yang cukup baik, dengan rata-rata realisasi mencapai 93,55%. Tingkat realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2020, yaitu sebesar 90,92%, sementara pencapaian terendah terjadi pada tahun 2024 dengan angka 99,55%. Meskipun angka realisasi cenderung tinggi, rata-rata pertumbuhan realisasi mengalami tren penurunan sebesar -0,71% selama lima tahun terakhir. Penurunan tertinggi terjadi pada tahun 2020, yang sejalan dengan kontraksi pada APBD di tahun tersebut.

Jika ditinjau dari kontribusi setiap komponen pembentuk pendapatan daerah, realisasi pendapatan Kota Padang selama periode 2020-2024 didominasi oleh pendapatan transfer dengan rata-rata porsi sebesar 72,00%. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyumbang rata-rata 25,58%, sementara Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah berkontribusi

sebesar 2,16%. Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah mengalami tren peningkatan, di mana pada tahun 2020 tercatat sebagai yang terendah dan terus mengalami kenaikan hingga mencapai 26,17% pada tahun 2024.

Tren ini menunjukkan bahwa Kota Padang masih sangat bergantung pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat, meskipun terdapat upaya peningkatan PAD dari tahun ke tahun. Optimalisasi sumber pendapatan daerah, khususnya PAD, perlu terus didorong agar ketergantungan terhadap pendapatan transfer dapat dikurangi dan kemandirian fiskal daerah semakin meningkat. Berikut disajikan kontribusi masing-masing komponen dalam pendapatan daerah Kota Padang selama periode 2020-2024 dalam tabel di bawah ini.

Tabel II- 82 Kontribusi Komponen Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024 (%)

No	Uraian	Kontribusi Komponen Realisasi Pendapatan Daerah (%)					
		2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata
1	Pendapatan Asli Daerah	23,06%	24,25%	27,24%	28,51%	26,17%	**25,85%**
2	Pendapatan Transfer	71,60%	70,73%	72,61%	71,36%	73,68%	**72,00%**
3	Lain-lain Pendapatan Daerah	5,34%	5,00%	0,15%	0,15%	0,15%	**2,16%**

Sumber : BPKAD Kota Padang, 2020-2024

Gambar II- 74 Rata-Rata Proporsi Sumber Pendapatan Daerah Kota Padang Tahun 2020-2024 (%)

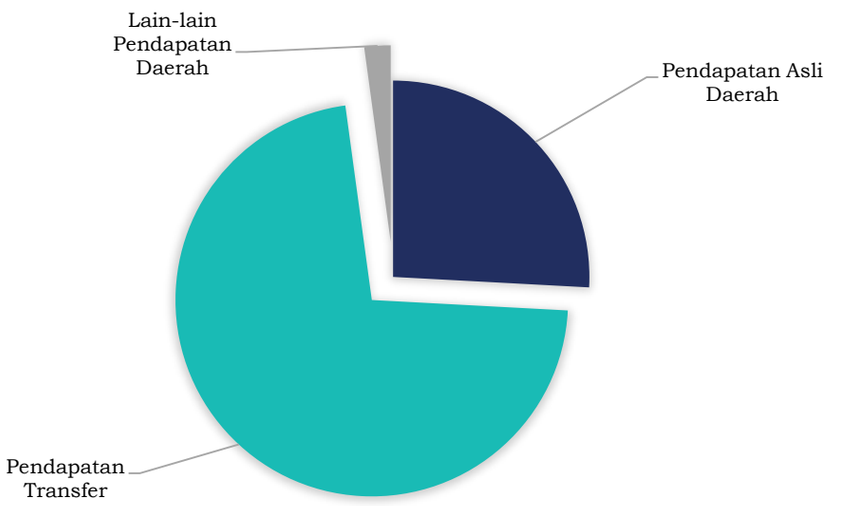

Sumber : BPKAD Kota Padang, 2020-2024

Berdasarkan Gambar diatas, struktur pendapatan daerah Kota Padang periode 2020-2024 didominasi oleh pendapatan transfer yang mencapai 72%, menunjukkan ketergantungan tinggi terhadap dana

dari pemerintah pusat maupun provinsi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkontribusi sebesar 26%, mencerminkan upaya daerah dalam mengoptimalkan sumber pendapatan dari pajak daerah, retribusi, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah. Sementara itu, lain-lain pendapatan daerah hanya menyumbang 2%, yang kemungkinan berasal dari hibah atau sumber lainnya di luar PAD dan pendapatan transfer. Komposisi ini menegaskan bahwa meskipun Kota Padang telah mengembangkan sumber PAD, masih diperlukan strategi lebih lanjut untuk meningkatkan kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan pada pendapatan transfer.

Adapun realisasi penerimaan pendapatan daerah Kota Padang selama Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel II- 83 Realisasi Pendapatan Daerah Kota Padang Tahun 2020-2024 (rupiah)

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
A	**PENDAPATAN DAERAH**	**2.167.625.242.572**	**2.222.266.851.375**	**2.249.627.970.195**	**2.310.513.101.363**	**2.531.275.045.504**
1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**499.895.722.726**	**538.933.660.166**	**612.831.641.868**	**658.744.322.507**	**662.549.854.335**
1.1	Pajak Daerah	344.743.143.377	376.220.701.318	438.181.440.175	487.629.583.762	493.756.839.959
1.2	Retribusi Daerah	37.174.849.443	433.513.638.900	41.262.274.570	48.690.194.076	119.024.207.740
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.326.936.083	12.768.407.022	16.537.326.409	20.067.188.003	22.137.335.408
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	105.650.802.823	106.430.912.926	116.850.600.714	102.357.356.665	27.631.471.228
2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.551.955.503.097**	**1.571.901.286.209**	**1.633.364.328.327**	**1.648.795.781.756**	**1.864.993.191.170**
2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.458.585.538.356	1.448.514.771.740	1.504.669.293.991	158.562.466.174	1.733.125.087.487
2.1.1	Dana Perimbangan	1.414.136.103.356	1.423.132.776.740	1.480.305.297.991	153.240.316.174	1.724.846.409.487
2.1.1.1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	71.560.281.155	91.114.437.180	93.546.692.771	86.267.056.378	99.579.994.000
2.1.1.2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.061.387.887.000	1.044.871.353.000	1.035.030.667.770	1.115.601.209.484	1.266.301.334.000
2.1.1.3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)	279.432.166.491	287.146.986.560	351.727.937.450	330.772.050.312	361.058.619.078
2.1.2	Insentif Fiskal	44.449.435.000	25.381.995.000	24.363.996.000	5.322.150.000	8.278.678.000
2.1.2.1	Insentif Fiskal	44.449.435.000	25.381.995.000	24.363.996.000	5.322.150.000	8.278.678.000
2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	93.369.964.741	123.386.514.469	128.695.034.336	110.833.315.582	131.868.103.683
2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	93.169.964.741	121.386.514.469	128.695.034.336	106.253.440.150	130.531.730.050
2.2.2	Bantuan Keuangan	200.000.000	2.000.000.000	-	4.579.875.432	1.336.373.633
3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**115.774.016.749**	**111.143.195.000**	**3.432.000.000**	**2.972.997.100**	**3.732.000.000**
3.1	Pendapatan Hibah	115.774.016.749	111.143.195.000	3.432.000.000	2.972.997.100	3.732.000.000
3.1.1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	115.774.016.749	111.143.195.000	3.432.000.000	2.972.997.100	3.732.000.000

Sumber : BPKAD Kota Padang tahun 2020-2024

Untuk memahami dinamika keuangan daerah secara lebih komprehensif, penting untuk menganalisis perkembangan realisasi Pendapatan Daerah berdasarkan sumber-sumbernya. Evaluasi ini mencakup berbagai komponen utama yang membentuk Pendapatan Daerah, seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

2.2.1.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Secara rata-rata, kontribusi PAD terhadap total Pendapatan Daerah dalam periode 2020–2024 tergolong cukup baik, dengan rata-rata kontribusi sebesar 25,85%. Hingga tahun 2024, PAD menunjukkan tren peningkatan, sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut :

Gambar II- 75 Perkembangan Item Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Tahun 2020-2024

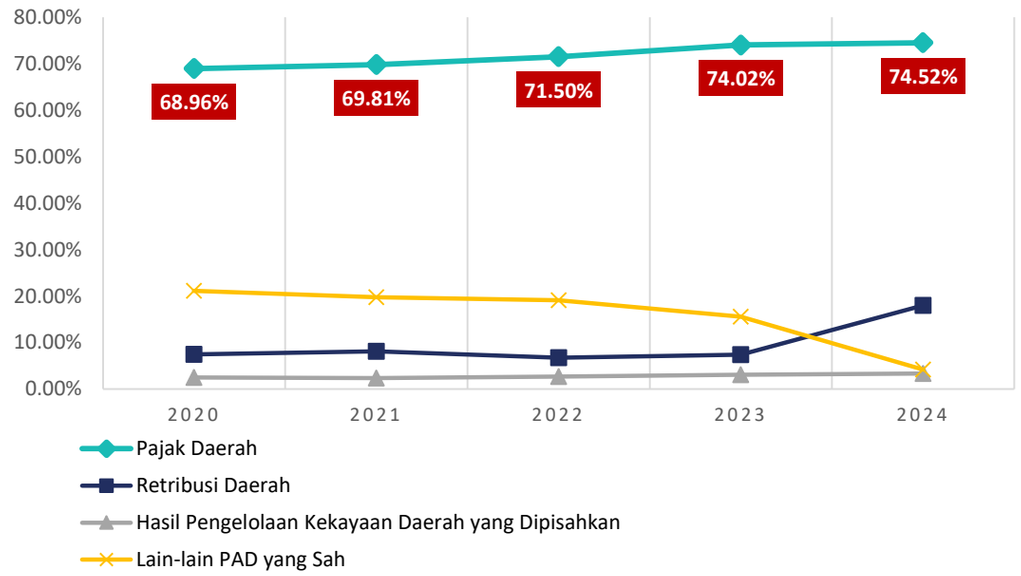

Sumber : BPKAD Kota Padang tahun 2020-2024

Tabel II- 84 Proporsi Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Tahun 2020-2024 (%)

No	Anggaran	Proporsi					Rata-Rata Proporsi
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	**Pendapatan Asli Daerah**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
1.1	Pajak Daerah	68,96%	69,81%	71,50%	74,02%	74,52%	**71,76%**
1.2	Retribusi Daerah	7,44%	8,07%	6,73%	7,39%	17,96%	**9,52%**
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2,47%	2,37%	2,70%	3,05%	3,34%	**2,78%**
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	21,13%	19,75%	19,07%	15,54%	4,17%	**15,93%**

Sumber : BPKAD Kota Padang, tahun 2020-2024

Proporsi terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang dalam lima tahun terakhir berasal dari Pajak Daerah, yang menyumbang rata-rata 71,76% dari total PAD. Sumber terbesar berikutnya adalah lain-lain PAD yang sah, dengan rata-rata kontribusi 15,93%. Sementara itu, Retribusi Daerah memiliki rata-rata proporsi sebesar 9,52%, dan Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan memberikan sumbangsih terkecil dengan rata-rata 2,78% dalam lima tahun terakhir. Secara rinci, realisasi dan pertumbuhan masing-masing komponen PAD akan dibahas lebih lanjut dalam setiap kategori terkait.

1. Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan pendapatan yang berasal dari kontribusi wajib dari orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Potensi pungutan pajak daerah lebih banyak memberikan peluang bagi daerah untuk dimobilisasi secara maksimal bila dibandingkan dengan komponen-komponen penerimaan PAD lainnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, terutama karena potensi pungutan pajak daerah mempunyai sifat dan karakteristik yang jelas, baik ditinjau dari tataran teoritis, kebijakan, maupun dalam tataran implementasinya. Nilai pajak daerah di Kota Padang memiliki sumbangsih yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada setiap tahunnya. Pajak daerah di Kota Padang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga tahun 2024. Pertumbuhan realisasi Pajak Daerah terlihat cukup baik cenderung meningkat. Lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Gambar II- 76 Realisasi dan Pertumbuhan Pajak Daerah Kota Padang Tahun 2020-2024 (juta rupiah)

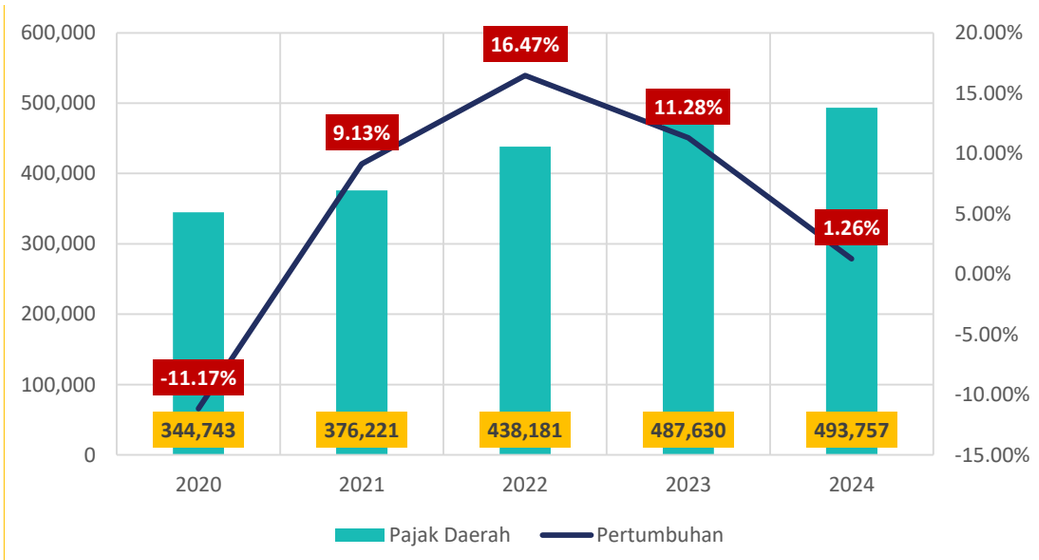

Sumber : BPKAD Kota Padang, 2020-2024

Berdasarkan grafik di atas, realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kota Padang menunjukkan tren pertumbuhan yang positif selama periode 2020-2024, meskipun mengalami beberapa tantangan. Pada tahun 2020, realisasi pajak daerah tercatat sebesar Rp 344,743 juta, mengalami penyesuaian sebesar -11,17% akibat dampak pandemi COVID-19 yang mempengaruhi aktivitas ekonomi. Namun, pada tahun 2021, pajak daerah mulai menunjukkan pemulihan dengan pertumbuhan sebesar 9,13%, mencapai Rp 376,221 juta, yang mencerminkan bangkitnya perekonomian daerah.

Momentum pertumbuhan terus berlanjut pada tahun 2022, dengan pencapaian tertinggi dalam periode ini sebesar 16,47%, meningkatkan realisasi pajak daerah menjadi Rp 438,181 juta. Tren positif tetap berlanjut pada tahun 2023, dengan pertumbuhan 11,28%, mencapai Rp 487,630 juta. Pada tahun 2024, meskipun pertumbuhan melambat menjadi 1,26%, realisasi pajak daerah tetap meningkat menjadi Rp493,757 juta, menunjukkan ketahanan ekonomi daerah yang semakin kuat. Dengan pencapaian ini, Pemerintah Kota Padang memiliki potensi besar untuk terus meningkatkan optimalisasi pendapatan pajak daerah melalui inovasi kebijakan, perluasan basis pajak, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak terutama dari sektor pajak hotel dan wisata. Keberlanjutan tren positif ini menjadi peluang untuk memperkuat stabilitas fiskal dan mendukung pembangunan daerah yang lebih baik di masa depan.

2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pendapatan yang berasal dari pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Berikut merupakan realisasi dan pertumbuhan Retribusi Daerah Kota Padang tahun 2020-2024:

Gambar II- 77 Realisasi dan Pertumbuhan Retribusi Daerah Kota Padang Tahun 2020-2024 (juta rupiah)

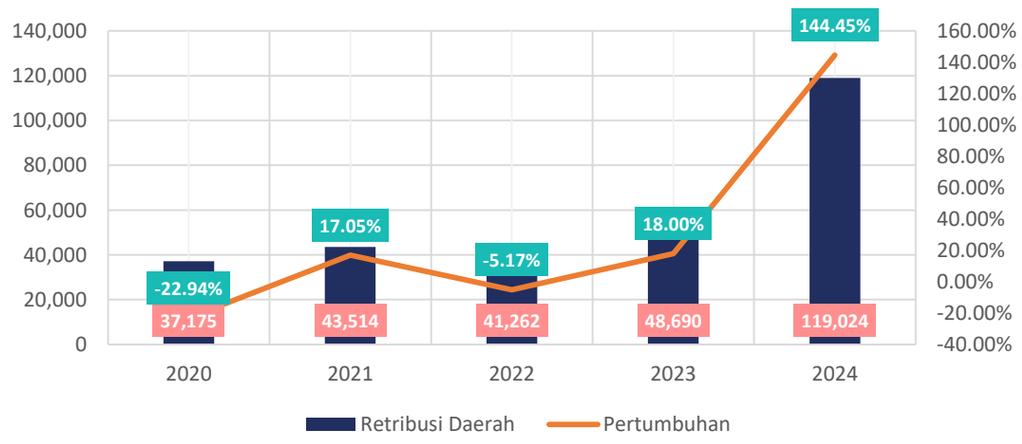

Sumber : BPKAD Kota Padang, Tahun 2020-2024

Berdasarkan grafik di atas, Pendapatan Retribusi Daerah Kota Padang mengalami fluktuasi selama periode 2020-2024, dengan tren pertumbuhan yang signifikan pada tahun terakhir. Pada tahun 2020, realisasi retribusi daerah tercatat sebesar Rp37,845 miliar, mengalami penurunan sebesar -22,94% dibandingkan tahun sebelumnya, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19. Namun, pada tahun 2021, terjadi pemulihan dengan pertumbuhan 17,05%, meningkatkan realisasi menjadi Rp43,12 miliar.

Tahun 2022 menunjukkan sedikit penurunan sebesar -5,17%, dengan realisasi mencapai Rp41,02 miliar, sebelum kembali mengalami kenaikan pada tahun 2023 dengan pertumbuhan 18%, mencapai Rp.48,49 miliar. Puncak pertumbuhan terjadi pada tahun 2024, dengan lonjakan tajam sebesar 144,45%, mencapai realisasi tertinggi dalam periode ini sebesar Rp.119,21 miliar dengan kontribusi terbesar berasal dari retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp.77,31 miliar. Lonjakan ini menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan dari retribusi, kemungkinan melalui optimalisasi tarif retribusi, peningkatan kepatuhan wajib retribusi, serta pengembangan layanan berbasis retribusi yang lebih efektif. Tren positif ini berpotensi menjadi pendorong utama bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang di masa mendatang.

3. Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Berikut merupakan realisasi dan pertumbuhan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kota Padang tahun 2020 hingga 2024 :

Gambar II- 78 Realisasi dan Pertumbuhan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Kota Padang Tahun 2020-2024 (juta rupiah)

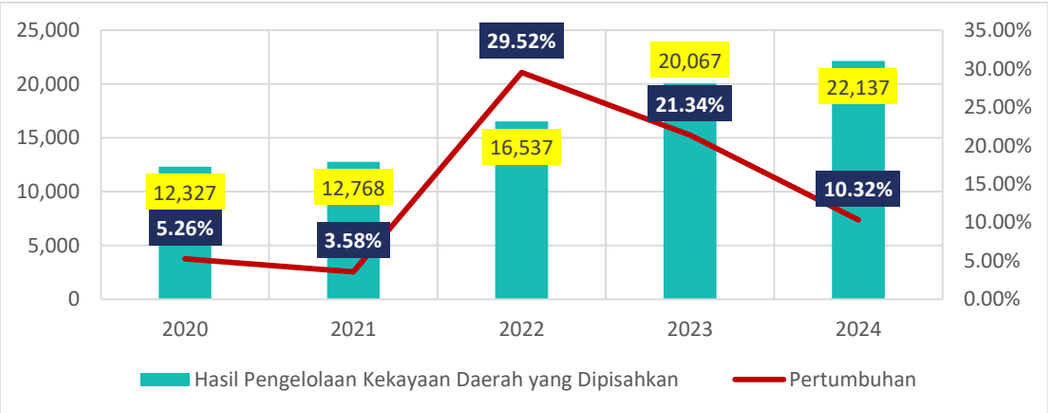

Sumber : BPKAD Kota Padang, Tahun 2020-2024

Berdasarkan grafik di atas, Realisasi dan Pertumbuhan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di Kota Padang menunjukkan perkembangan positif selama periode 2020-2024. Pada

tahun 2020, realisasi pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah mencapai Rp12,327 juta dengan pertumbuhan 5,26%. Pada tahun 2021, realisasi pendapatan meningkat menjadi Rp12,768 juta, meskipun dengan pertumbuhan sebesar 3,58%.

Perkembangan signifikan terjadi pada tahun 2022, di mana realisasi pendapatan meningkat pesat menjadi Rp16,537 juta dengan pertumbuhan tertinggi dalam periode ini, yaitu 29,52%. Tren positif berlanjut pada tahun 2023, dengan realisasi mencapai Rp20,067 juta dan pertumbuhan 21,34%. Pada tahun 2024, realisasi pendapatan terus meningkat menjadi Rp22,137 juta, dengan pertumbuhan sebesar 10,32%. Secara keseluruhan, tren ini mencerminkan adanya peningkatan yang berkelanjutan dalam optimalisasi aset daerah yang dipisahkan, menunjukkan pengelolaan kekayaan daerah yang semakin efektif di Kota Padang.

4. Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah merupakan pendapatan asli daerah dari berbagai sumber yang sah dan bersifat tidak tetap. Berikut merupakan realisasi dan pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Kota Padang pada 2020 hingga 2024:

Gambar II- 79 Realisasi dan Pertumbuhan Lain-lain PAD yang Sah Kota Padang Tahun 2020-2024 (juta rupiah)

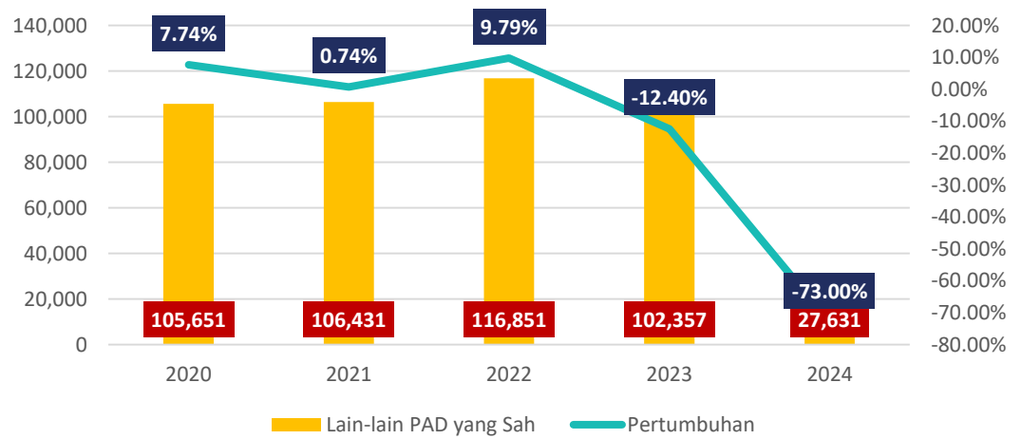

Sumber : BPKAD Kota Padang, Tahun 2020-2024

Berdasarkan grafik di atas, realisasi dan pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah di Kota Padang menunjukkan tren yang fluktuatif selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020, realisasi pendapatan mencapai Rp105,651 juta dengan tingkat pertumbuhan sebesar 7,74%. Tahun berikutnya, 2021, realisasi mengalami sedikit peningkatan menjadi Rp106,431 juta, tetapi dengan pertumbuhan yang lebih kecil, yaitu 0,74%.

Pada tahun 2022, pendapatan meningkat signifikan menjadi Rp116,851 juta, dengan pertumbuhan tertinggi dalam periode ini sebesar 9,79%. Namun, pada 2023, terjadi penurunan pendapatan menjadi Rp102,357 juta, dengan tingkat pertumbuhan negatif sebesar

-12,40%. Tren penurunan ini berlanjut secara drastis pada 2024, di mana realisasi PAD yang Sah turun tajam menjadi Rp27,631 juta, dengan pertumbuhan negatif mencapai -73,00%.

2.2.1.2.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan sumber utama penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dalam bentuk dana perimbangan, dana bagi hasil, dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK). Pendapatan ini memiliki peran krusial dalam mendukung pembiayaan program pembangunan daerah serta operasional pemerintahan.

Di Kota Padang, pendapatan transfer memiliki porsi dominan dalam struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebagaimana terlihat dalam berbagai tahun anggaran. Berikut merupakan realisasi dan pertumbuhan pendapatan transfer Kota Padang pada tahun 2020 hingga 2024 :

Gambar II- 80 Realisasi dan Pertumbuhan Pendapatan Transfer Kota Padang Tahun 2020-2024 (juta rupiah)

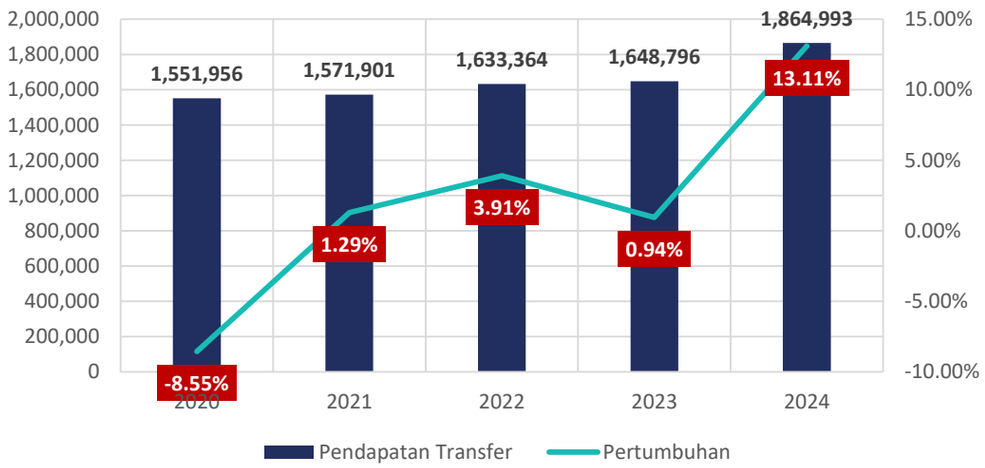

Sumber : BPKAD Kota Padang, tahun 2020-2024

Berdasarkan gambar di atas, pendapatan transfer Kota Padang mengalami fluktuasi dalam periode 2020-2024. Pada tahun 2020, terjadi penurunan sebesar 8,55%, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 terhadap alokasi dana transfer dari pemerintah pusat. Namun, pada tahun 2021, pendapatan transfer mengalami pertumbuhan sebesar 1,29%, diikuti dengan peningkatan signifikan sebesar 9,91% pada tahun 2022.

Meskipun pertumbuhan sedikit melambat menjadi 0,94% pada tahun 2023, pendapatan transfer kembali mengalami lonjakan sebesar 13,11% pada tahun 2024, mencapai Rp1.864.993 juta. Kenaikan ini mencerminkan peningkatan dukungan fiskal dari pemerintah pusat dan provinsi, yang dapat digunakan untuk memperkuat program pembangunan daerah.

Pendapatan transfer bersumber dari tiga komponen yaitu pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer daerah. Berikut merupakan proporsi masing-masing komponen pendapatan transfer pada 5 tahun terakhir:

Tabel II- 85 Proporsi Sumber Pendapatan Transfer Kota Padang Tahun 2020-2024 (%)

No	Anggaran	Proporsi					Rata-Rata Proporsi
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	**PENDAPATAN TRANSFER**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
1.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	93,98%	92,15%	92,12%	9,62%	92,93%	76,16%
1.1.1	Dana Perimbangan	91,12%	90,54%	90,63%	9,29%	92,49%	74,81%
1.1.1.1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	4,61%	5,80%	5,73%	5,23%	5,34%	5,34%
1.1.1.2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	68,39%	66,47%	63,37%	67,66%	67,90%	66,76%
1.1.1.3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)	18,01%	18,27%	21,53%	20,06%	19,36%	19,45%
1.1.2	Insentif Fiskal	2,86%	1,61%	1,49%	0,32%	0,44%	1,35%
1.1.2.1	Insentif Fiskal	2,86%	1,61%	1,49%	0,32%	0,44%	1,35%
1.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	6,02%	7,85%	7,88%	6,72%	7,07%	7,11%
1.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	6,00%	7,72%	7,88%	6,44%	7,00%	7,01%
1.2.2	Bantuan Keuangan	0,01%	0,13%	0,00%	0,28%	0,07%	0,10%

Sumber : BPKAD Kota Padang, tahun 2020-2024

Pendapatan transfer dari pemerintah pusat mendominasi dengan rata-rata proporsi sebesar 96,16%, sedangkan transfer antar daerah berkontribusi sebesar 3,17%. Di dalam komponen pendapatan transfer pemerintah pusat, Dana Perimbangan menjadi sumber utama dengan rata-rata kontribusi sebesar 87,18%. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum, yang mencakup Dana Bagi Hasil (DBH) dengan proporsi rata-rata 5,72% dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 67,66%. Sementara itu, Dana Transfer Khusus, yang mencakup Dana Alokasi Khusus (DAK), memiliki kontribusi rata-rata sebesar 19,52%. Insentif Fiskal juga menjadi bagian dari pendapatan transfer pusat, meskipun dengan proporsi yang lebih kecil, yaitu 1,47%.

Di sisi lain, Pendapatan Transfer Antar Daerah, yang mencakup Dana Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan, berkontribusi dalam kisaran 3%-4% setiap tahunnya. Dana Bagi Hasil dari pemerintah daerah lain menyumbang sekitar 7,83%, sementara Bantuan Keuangan memiliki proporsi yang sangat kecil, berkisar di bawah 1%.

2.2.1.2.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut merupakan realisasi dan pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Padang pada tahun 2020 hingga 2024 :

Gambar II- 81 Realisasi dan Pertumbuhan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Padang Tahun 2020-2024 (juta rupiah)

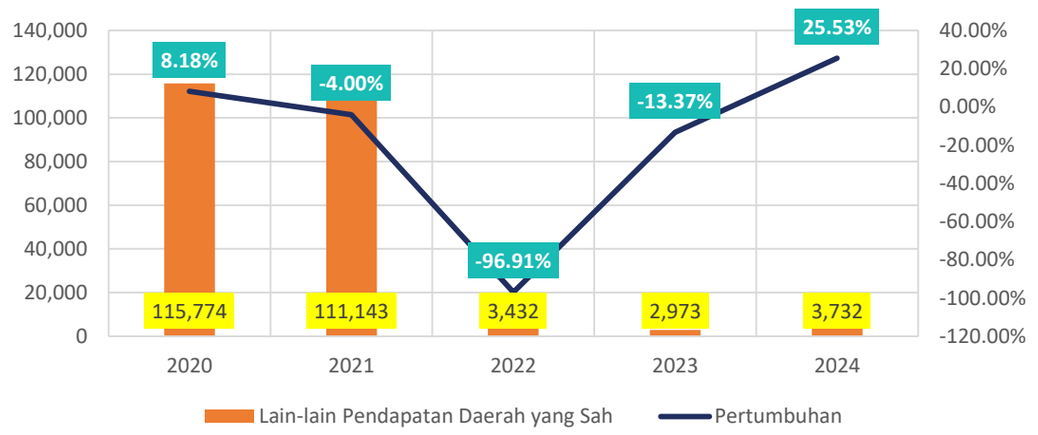

Sumber : BPKAD Kota Padang, tahun 2020-2024

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Padang mengalami fluktuasi yang signifikan dalam periode 2020-2024. Pada tahun 2020, realisasi pendapatan mencapai Rp.115,77 miliar dengan pertumbuhan positif sebesar 8,18%. Namun, pada tahun 2021, terjadi sedikit penurunan menjadi Rp.111,14 miliar dengan pertumbuhan negatif sebesar -4,00%.

Tren penurunan berlanjut secara drastis pada tahun 2022, di mana realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah turun tajam menjadi Rp.3,43 miliar, mencatatkan pertumbuhan negatif sebesar -96,91%. Meski demikian, pada tahun 2023, mulai terjadi pemulihan dengan peningkatan realisasi menjadi Rp.2,97 miliar, meskipun pertumbuhan masih berada di angka negatif sebesar -13,37%.

Pada tahun 2024, tren pemulihan semakin kuat dengan peningkatan realisasi menjadi Rp3,73 miliar, mencatatkan pertumbuhan positif yang cukup signifikan sebesar 25,53%. Data ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi penurunan drastis di tengah periode, terdapat tanda-tanda pemulihan pada tahun 2023 dan 2024. Lain-lain pendapatan yang sah disumbang terbesar oleh pendapatan hibah.

2.2.1.2.4 Kinerja Belanja Daerah

Belanja daerah untuk mendanai urusan yang ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang meliputi urusan wajib pelayanan dasar, urusan non wajib pelayanan dasar dan urusan penunjang pemerintahan. Belanja daerah

diprioritaskan mendanai pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Belanja daerah dibedakan menjadi dua, yakni Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung merupakan komponen belanja daerah yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan Belanja Langsung merupakan komponen belanja daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Gambar II- 82 Realisasi dan Pertumbuhan Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2020-2024 (juta rupiah)

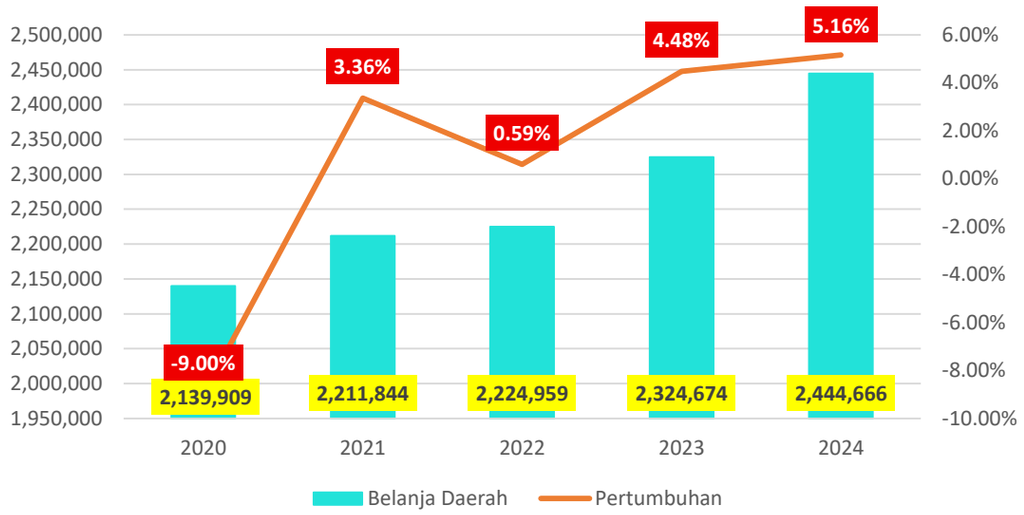

Sumber : BPKAD Kota Padang, Tahun 2020-2024

Realisasi dan pertumbuhan Belanja Daerah Kota Padang menunjukkan tren peningkatan dalam periode 2020-2024. Pada tahun 2020, realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp2,14 triliun dengan pertumbuhan negatif sebesar -9,00%, yang menunjukkan adanya pengurangan belanja dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2021, terjadi peningkatan realisasi menjadi Rp2,21 triliun dengan pertumbuhan positif sebesar 3,36%, menandakan pemulihan dalam pengeluaran daerah.

Tren peningkatan terus berlanjut pada tahun 2022 dengan realisasi belanja sebesar Rp2,22 triliun, meskipun pertumbuhannya relatif kecil, yakni 0,59%. Pada tahun 2023, belanja daerah mengalami kenaikan lebih signifikan menjadi Rp2,32 triliun dengan pertumbuhan 4,48%. Puncak peningkatan terjadi pada tahun 2024, di mana realisasi belanja daerah mencapai Rp2,44 triliun dengan pertumbuhan tertinggi dalam periode ini, yaitu 5,16%. Berikut disajikan kontribusi masing-masing komponen dalam belanja daerah Kota Padang selama periode 2020-2024 dalam tabel di bawah ini.

Tabel II- 86 Proporsi Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2020-2024

No	Anggaran	Proporsi					Rata-Rata Proporsi (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	**BELANJA DAERAH**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
1.2	Belanja Operasi	79,19%	85,88%	82,29%	82,77%	90,48%	84,12%
1.3	Belanja Modal	9,57%	13,47%	17,66%	17,19%	9,30%	13,44%
1.4	Belanja Tidak Terduga	6,56%	0,65%	0,04%	0,25%	0,22%	1,55%
1.5	Belanja Transfer	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Sumber : BPKAD Kota Padang, tahun 2020-2024

Gambar II- 83 Rata-Rata Proporsi Pos – pos Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2020-2024 (%)

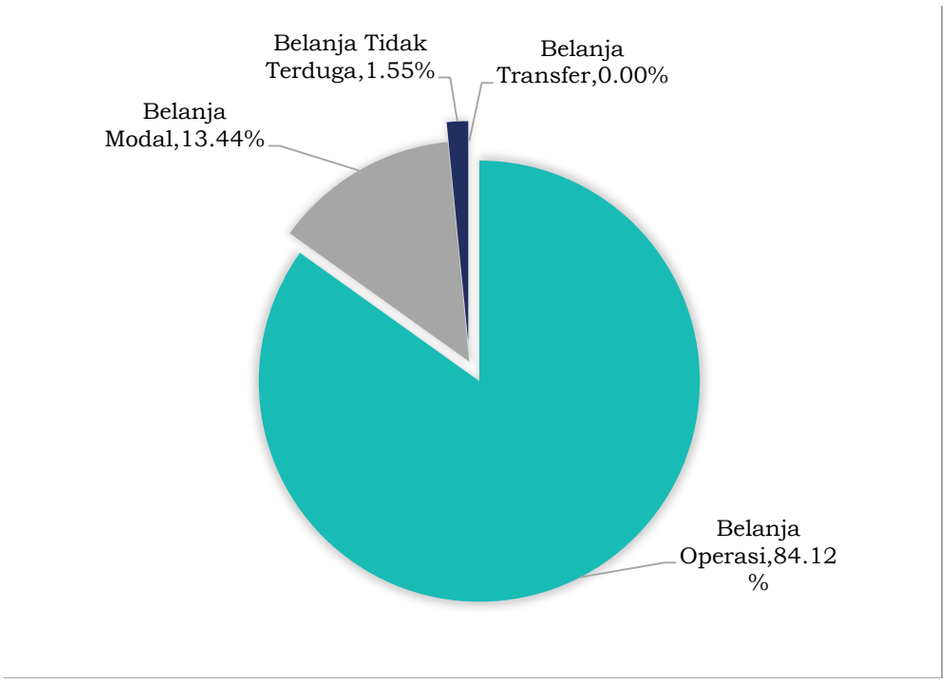

Sumber : BPKAD Kota Padang, Tahun 2020-2024 (data diolah)

Struktur Belanja Daerah Kota Padang pada periode 2020-2024 didominasi oleh Belanja Operasi dengan rata-rata proporsi sebesar 84,12%. Belanja Operasi mencakup pengeluaran rutin pemerintah daerah untuk mendukung pelayanan publik, seperti belanja pegawai, barang dan jasa, serta subsidi. Belanja Modal memiliki rata-rata proporsi sebesar 13,44%, yang mencerminkan investasi pemerintah daerah dalam aset jangka panjang, seperti infrastruktur dan pengadaan barang modal. Meskipun lebih kecil dibandingkan Belanja Operasi, alokasi ini tetap penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah.

Belanja Tidak Terduga memiliki porsi rata-rata 1,55%, yang dialokasikan untuk pengeluaran darurat atau kejadian tidak terduga, seperti bencana alam dan keadaan darurat lainnya. Sementara itu, Belanja Transfer tidak memiliki alokasi selama periode 2020-2024

dengan rata-rata 0,00%. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengeluaran yang dialokasikan untuk transfer ke pemerintah desa atau daerah lain dalam kurun waktu tersebut.

Adapun realisasi penggunaan belanja daerah Kota Padang selama Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel II- 87 Realisasi Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2020-2024 (rupiah)

No	Anggaran	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertum-Buhan (%)
B	**BELANJA DAERAH**	**2.139.909.477.473**	**2.211.843.587.663**	**2.224.959.294.893**	**2.324.673.967.306**	**2.444.666.033.219**	**3,38%**
1	**BELANJA OPERASI**	**1.694.645.158.582**	**1.899.598.872.546**	**1.831.000.944.817**	**1.924.093.923.572**	**2.212.037.177.578**	6,89%
1.1	Belanja Pegawai	1.022.368.138.151	1.033.458.342.914	971.124.928.491	966.108.721.300	1.232.855.581.482	4,79%
1.2	Belanja Barang dan Jasa	608.187.037.289	737.179.812.650	695.309.669.939	724.492.347.985	831.028.520.454	8,12%
1.3	Belanja Bunga	1.619.535.715	-	1.522.987.359	2.496.004.487	1.828.640.289	3,08%
1.4	Belanja Subsidi	-	15.093.006.902	17.769.976.422	29.446.327.138	36.019.946.021	#DIV/0!
1.5	Belanja Hibah	60.941.524.426	106.666.010.080	135.566.193.405	185.058.844.688	105.358.577.032	14,67%
1.6	Belanja Bantuan Sosial	664.500.000	7.201.700.000	9.797.189.200	16.491.678.000	4.945.912.300	65,17%
1.7	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah/Partai Politik	864.423.000	-	-	-	-	-100,00%
2	**BELANJA MODAL**	**204.791.762.148**	**297.909.227.312**	**392.983.750.076**	**399.691.617.435**	**227.292.967.759**	**2,64%**
2.1	Belanja Modal Tanah	181.848.057	515.427.620	5.058.493.600	-	-	-100,00%
2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	96.874.674.881	70.245.877.237	71.448.379.294	54.517.581.855	71.383.544.680	-7,35%
2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	39.506.970.655	109.316.940.233	217.383.087.437	254.375.266.684	62.320.986.679	12,07%
2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	166.031.302.777	109.999.890.323	90.711.257.078	77.850.106.979	79.789.212.355	-16,74%
2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.877.988.276	7.078.108.565	7.753.403.641	12.479.569.567	13.248.778.687	62,97%
2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	318.977.500	752.938.332	629.129.025	469.092.350	169.184.000	-14,66%
3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**140.472.556.742**	**14.335.487.804**	**974.600.000**	**5.899.762.870**	**5.335.887.882**	**-55,85%**
3.1	Belanja Tidak Terduga	140.472.556.742	14.335.487.804	974.600.000	5.899.762.870	5.335.887.882	-55,85%
4	**BELANJA TRANSFER**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	0,00%
4.1	Transfer Bagi Hasil	-	-	-	-	-	0,00%

Sumber : BPKAD Kota Padang, tahun 2020-2024

2.2.1.3 Kinerja Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah meliputi Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Transfer dari Dana Cadangan (DCD), Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi, Penghematan Belanja, dan Penerimaan Piutang Daerah. Sedangkan kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah timbul karena ada surplus/ kelebihan anggaran. Pengeluaran Pembiayaan daerah diantaranya diperuntukkan bagi Pembentukan Dana Cadangan, Investasi (penyertaan modal dan pembelian surat berharga/ saham), Pembayaran Pokok Utang, Pemberian Pinjaman Daerah, dan Sisa Lebih Perhitungan.

Pembiayaan daerah Kota Padang selama periode 2020-2024 menunjukkan tren yang berfluktuasi dalam penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan daerah sebagian besar berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), yang mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 2,77% per tahun. SiLPA merupakan saldo anggaran yang belum terpakai dari tahun sebelumnya, yang kemudian digunakan untuk menyeimbangkan anggaran tahun berjalan. Selain itu, terdapat penerimaan pembiayaan dari pinjaman dalam negeri (obligasi) pada tahun 2022 sebesar Rp 43,09 miliar dan pada tahun 2024 sebesar Rp 21,54 miliar, sementara penerimaan dari pelepasan aset daerah atau pengembalian piutang tidak mengalami pertumbuhan selama periode ini.

Di sisi lain, pengeluaran pembiayaan Kota Padang menunjukkan tren penurunan dengan rata-rata -26,46% per tahun. Komponen utama dalam pengeluaran pembiayaan ini adalah penyertaan modal daerah, yang hanya terjadi pada tahun 2020 dan 2021 sebelum mengalami penurunan signifikan pada tahun-tahun berikutnya. Selain itu, terdapat pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, yang sempat menurun pada tahun 2021 dan 2022 tetapi kembali meningkat pada tahun 2023 dan 2024.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Kota Padang mengalami peningkatan signifikan selama periode ini, terutama pada tahun 2024 yang mencapai Rp 135,997 miliar, dengan rata-rata pertumbuhan 31,82%. Kenaikan SiLPA ini menunjukkan adanya kelebihan anggaran yang belum terserap, yang bisa disebabkan oleh efisiensi belanja atau adanya penerimaan yang lebih besar dari yang direncanakan. Secara keseluruhan, dinamika pembiayaan daerah Kota Padang mencerminkan adanya keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran, dengan peningkatan signifikan dalam SiLPA yang

menunjukkan potensi efisiensi dalam pengelolaan anggaran daerah. Berikut disajikan tabel kinerja pembiayaan daerah tahun 2020-2024 :

Tabel II- 88 Kinerja Komponen Pembiayaan Kota Padang Tahun 2020-2024 (rupiah)

NO	ANGGARAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**53.937.672.274**	**44.824.375.309**	**68.732.557.148**	**89.801.232.451**	**60.159.381.300**
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	53.937.672.274	44.824.375.309	25.646.639.022	89.801.232.451	60.159.381.300
1.2	Penghematan Belanja	-	-	-	-	29.000.000.000
1.3	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	-	-	43.085.918.126	-	-
1.4	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-
2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**36.829.237.063**	**29.601.000.000**	**3.600.000.000**	**15.480.985.208**	**10.771.477.812**
2.1	Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000	29.601.000.000	3.600.000.000	8.300.000.000	-
2.2	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	26.829.237.063	-	-	7.180.985.208	10.771.477.812
	PEMBIAYAAN NETTO	17.108.435.211	15.223.375.309	65.132.557.148	74.320.247.243	49.387.903.488
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	44.824.200.310	25.646.639.021	89.801.232.450	60.159.381.300	135.996.915.774

Sumber : BPKAD Kota Padang Tahun 2020-2024

Agar lebih jelas dapat dianalisis dan dijelaskan proporsi komponen pembiayaan daerah sebagai berikut :

Tabel II- 89 Proporsi Komponen Pembiayaan Kota Padang Tahun 2020-2024 (%)

NO	ANGGARAN	2020	2021	2022	2023	2024	RATA-RATA PROPORSI (%)
1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	100,00%	100,00%	37,31%	100,00%	100,00%	86,43%
1.2	Penghematan Belanja	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	48,21%	45,68%
1.3	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00%	0,00%	62,69%	0,00%	0,00%	33,93%
1.4	Penerimaan Piutang Daerah	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
2.1	Penyertaan Modal Daerah	27,15%	100,00%	100,00%	53,61%	0,00%	53,49%

NO	ANGGARAN	2020	2021	2022	2023	2024	RATA-RATA PROPORSI (%)
2.2	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	72,85%	0,00%	0,00%	46,39%	100,00%	77,52%

Sumber : BPKAD Kota Padang, tahun 2020-2024

Proporsi komponen pembiayaan Kota Padang selama periode 2020-2024, yang terdiri dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan selalu mencapai 100%, yang berarti seluruh kebutuhan pembiayaan Kota Padang selama periode ini selalu terpenuhi.

Komponen utama penerimaan pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), dengan rata-rata proporsi sebesar 86,43%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar dana pembiayaan Kota Padang berasal dari saldo anggaran yang belum terpakai dari tahun sebelumnya. Selain itu, penghematan belanja mulai memberikan kontribusi pada tahun 2023 dengan proporsi 48,21%, yang mencerminkan upaya efisiensi dalam pengeluaran daerah. Pinjaman dalam negeri (obligasi) juga mulai berkontribusi pada tahun 2022 dengan proporsi 62,69%, meskipun tidak ada lagi pinjaman pada tahun 2023 dan 2024. Sementara itu, penerimaan dari piutang daerah tidak berkontribusi sama sekali selama periode ini.

Di sisi lain, pengeluaran pembiayaan Kota Padang juga 100% terpenuhi setiap tahunnya. Komponen utama pengeluaran terdiri dari penyertaan modal daerah, dengan rata-rata proporsi 53,49%, yang menunjukkan bahwa lebih dari separuh pengeluaran pembiayaan digunakan untuk investasi pemerintah daerah. Selain itu, pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo memiliki proporsi rata-rata 77,52%, yang mencerminkan prioritas pembayaran kewajiban utang dalam struktur pembiayaan daerah.

2.2.1.4 Neraca Daerah

Neraca Daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah. Neraca Daerah menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah pada tanggal tertentu. Neraca Daerah merupakan salah satu komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diharapkan mampu memberikan peranan penting dalam mendukung kegiatan manajemen keuangan pemerintahan daerah, untuk keperluan perencanaan, pengendalian, serta pengambilan kebijakan desentralisasi fiskal. Neraca daerah dianalisis dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas.

Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari: Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/ atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/ atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Sedangkan kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dan ekuitas dapat didefinisikan sebagai kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Rata-rata pertumbuhan neraca daerah Kota Padang selama periode 2020-2024 menunjukkan peningkatan sebesar 9,09% secara keseluruhan. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh kenaikan signifikan pada aset lancar, yang mengalami lonjakan sebesar 74,67%. Hal ini mencerminkan peningkatan likuiditas daerah yang kemungkinan berasal dari peningkatan kas dan setara kas, piutang daerah, atau persediaan aset.

Sementara itu, investasi jangka panjang juga mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi, yaitu 16,66%, yang dapat mengindikasikan adanya peningkatan investasi dalam bentuk penyertaan modal atau aset tetap yang bertujuan untuk pembangunan jangka panjang. Sedangkan disisi lain, aset tetap mencatatkan pertumbuhan yang relatif lebih rendah sebesar 3,76%, menunjukkan bahwa investasi dalam infrastruktur dan properti tetap mengalami kenaikan, namun dalam skala yang lebih moderat dibandingkan aset lancar. Aset lainnya tumbuh 0,58%, yang mencerminkan pertumbuhan yang stabil namun tidak signifikan dalam komponen aset non-likuid lainnya.

Dari sisi kewajiban, total kewajiban mengalami kenaikan rata-rata 12,51%, dengan kewajiban jangka pendek tumbuh sebesar 2,23%, sedangkan kewajiban jangka panjang tidak mengalami pertumbuhan atau tetap pada posisi sebelumnya (0,00%). Hal ini dapat mengindikasikan bahwa peningkatan kewajiban lebih banyak terjadi dalam bentuk utang jangka pendek dibandingkan utang jangka panjang.

Dalam hal ekuitas, terjadi pertumbuhan sebesar 4,26%, yang mencerminkan peningkatan kepemilikan aset bersih oleh pemerintah daerah. Secara keseluruhan, kombinasi pertumbuhan kewajiban dan ekuitas menghasilkan pertumbuhan total sebesar 9,09%, yang selaras dengan pertumbuhan aset. Pertumbuhan neraca ini menunjukkan bahwa Kota Padang mengalami peningkatan dalam kapasitas keuangan daerah, terutama dalam aspek aset lancar dan investasi

jangka panjang, dengan kewajiban yang masih dalam batas wajar dan terkendali.

Tabel berikut menyajikan rata-rata pertumbuhan neraca daerah Kota Padang dalam lima tahun terakhir (2020-2024):

Tabel II- 90 Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Padang Tahun 2020-2024

No	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan
1	A S E T	9,09%
1.1	Aset Lancar	74,67%
1.2	Investasi Jangka Panjang	16,66%
1.3	Aset Tetap	3,76%
1.4	Aset Lainnya	0,58%
2	Kewajiban	12,51%
2.1	Kewajiban Jangka Pendek	2,23%
2.2	Kewajiban Jangka Panjang	0,00%
3	Ekuitas	4,26%
	Kewajiban & Ekuitas	9,09%

Sumber : BPKAD Kota Padang Tahun 2020-2024

Berikutnya disajikan nilai neraca daerah Kota Padang selama lima tahun terakhir, yaitu tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

Tabel II- 91 Neraca Kota Padang Tahun 2020-2024 (rupiah)

No.	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	RATA- RATA PERTUMBUHAN (%)
1	**A S E T**						
1.1	**ASET LANCAR**						
1.1.2	Kas di Kas Daerah	2.743.146.589	407.954.721	68.363.264.413	45.844.960.190	126.554.886.518	160,62%
1.1.3	Setara Kas	0	0	-	-	0	0,00%
1.1.4	Kas di Kas BLUD	38.554.724.626	23.151.382.902	20.849.886.617	11.570.388.247	4.755.391.022	-40,74%
1.1.5	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	102.770.201		80.655.824	0	0,00%
1.1.6	Kas di Bendahara Penerimaan	71.239.988	840.000	2.288.000	8.731.000	1.771.000	-60,29%
1.1.7	Kas Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	3.455.264.107	1.986.461.398	585.793.420	447.383.745	418.872.247	-40,99%
1.1.8	Kas Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	0	0	-	2.208.390.947	4.265.994.986	100,00%
1.1.9	Piutang Pajak	241.379.426.820	256.671.127.416	244.539.528.330	258.848.490.618	209.395.133.917	-3,49%
1.1.10	Piutang Retribusi	10.628.897.474	11.352.729.851	11.042.534.826	12.119.149.713	16.441.565.419	11,52%
1.1.11	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	11.253.135.557	32.416.386.600	8.960.479.708	7.430.435.236	3.431.055.873	-25,69%
1.1.12	Piutang Pendapatan Transfer	35.144.605.712	18.036.391.197	17.824.060.977	40.245.049.089	27.785.355.178	-5,70%
1.1.13	Piutang Lainnya	1.094.702.373		-	-	0	-100,00%
1.1.14	Penyisihan Piutang Pajak	-166.205.013.059	-178.651.974.158	-210.853.973.785	-216.847.328.090	-177.562.280.409	1,67%
1.1.15	Penyisihan Piutang Retribusi	-8.334.502.010	-9.082.189.335	-8.526.301.995	-8.594.227.086	-9.330.604.314	2,86%
1.1.16	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	-1.297.536.325	-1.745.991.332	-1.953.869.175	-2.010.109.387	-2.621.343.150	19,22%

No.	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	RATA- RATA PERTUMBUHAN (%)
1.1.17	Penyisihan Piutang Lainnya	0	0	-	-	0	0,00%
1.1.18	Beban Dibayar Dimuka	472.665.204	223.001.300	3.177.859.150	3.522.182.474	4.297.907.204	73,65%
1.1.19	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	11.283.750	0	-	-	0	-100,00%
1.1.20	Persediaan	48.106.352.086	41.459.610.275	32.724.649.315	25.038.385.812	26.980.385.737	-13,46%
	Jumlah Aset Lancar	**217.078.392.891**	**196.328.501.037**	**186.736.199.802**	**179.912.538.332**	**2.020.686.048.635**	**74,67%**
1.2	**INVESTASI JANGKA PANJANG**						
1.2.1	Investasi Non Permanen	0	0	0	0	0	0,00%
1.2.1.1	Investasi Dana Bergulir	865.335.120	884.111.620	888.875.620	883.581.670	893.598.670	0,81%
1.2.2	**Investasi Permanen**						
1.2.2.1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	203.106.979.286	301.631.718.067	340.173.892.351	359.323.893.529	376.883.650.246	16,71%
1.2.2.2	Investasi Permanen Lainnya			-	-	0	0,00%
	Jumlah Investasi Jk. Panjang	**203.972.314.406**	**302.515.829.687**	**341.062.767.971**	**360.207.475.199**	**377.777.248.916**	**16,66%**
1.3	**ASET TETAP**						
1.3.1	Tanah	4.249.173.691.776	4.455.573.278.269	4.549.193.448.236	4.608.104.401.536	4.570.007.390.152	1,84%
1.3.2	Peralatan dan Mesin	896.267.262.147	968.596.158.337	1.005.854.857.527	974.196.597.680	1.036.372.189.603	3,70%
1.3.3	Gedung dan Bangunan	1.678.350.612.954	1.760.342.820.312	1.899.497.863.613	2.226.858.584.554	2.336.337.973.691	8,62%
1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.997.862.011.059	3.109.300.961.779	3.208.507.992.096	3.296.051.445.914	3.374.180.079.077	3,00%
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	143.342.612.273	151.299.360.810	157.366.029.360	125.265.986.904	129.917.882.374	-2,43%
1.3.6	Konstruksi dalam Pengerjaan	93.284.819.274	147.430.904.880	200.225.779.828	99.017.970.170	103.622.207.656	2,66%
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	-3.190.643.404.903	-3.488.782.067.141	-3.279.033.104.022	-3.436.380.714.834	-3.674.757.310.059	3,59%

No.	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	RATA- RATA PERTUMBUHAN (%)
	Jumlah Aset Tetap	**6.867.637.604.981**	**7.103.761.417.248**	**7.741.612.866.638**	**7.893.114.271.926**	**7.961.089.938.495**	**3,76%**
1.3.8	**Dana Cadangan**						
1.3.8.1	Dana Cadangan	-	-	-	-		0,00%
	Jumlah Dana Cadangan	-	-	**-**	**-**		0,00%
1.4	**ASET LAINNYA**						
1.4.1	Tuntutan Perbendaharaan	274.571.345	274.571.345	274.571.345	274.571.345	274.571.345	0,00%
1.4.2	Tuntutan Ganti Rugi	389.847.431	395.584.960	238.842.460	237.842.460	236.842.460	-11,71%
1.4.3	Aset Tak Berwujud	3.189.687.704	3.001.578.517	2.254.873.264	1.533.729.378	13.792.137.638	44,20%
1.4.5	Aset Lain-lain	155.340.374.009	155.149.111.662	167.057.681.255	286.488.358.297	301.165.445.450	18,00%
1.4.6	Kas yang Dibatasi Penggunaannya	946.928.664	135.440.416	74.631.766	23.018.453.130	0	-100,00%
1.4.7	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	54.312.026.000	54.312.026.000	54.312.026.000	54.312.026.000	0	-100,00%
	Jumlah Aset Lainnya	**214.453.435.154**	**213.268.312.900**	**224.212.626.091**	**365.861.908.746**	**219.451.663.790**	**0,58%**
	JUMLAH ASET	**7.503.141.747.432**	**7.815.874.060.872**	**8.493.624.460.503**	**8.799.096.194.203**	**10.627.692.388.735**	**9,09%**
2	**KEWAJIBAN**						
2.1	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**						
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	-	2.770.201	-	1.128.653	0	0,00%
2.1.2	Utang Bunga	-	-	-	-	0	0,00%
2.1.3	Utang Belanja	27.892.641.633	36.187.356.225	25.677.864.187	13.526.425.648	12.501.385.971	-18,18%
2.1.4	Pendapatan Diterima Dimuka	21.833.333	-	5.860.690.275	5.800.479.896	7.435.100.579	329,58%

No.	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	RATA- RATA PERTUMBUHAN (%)
2.1.5	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-	12.185.000	53.609.500	48.741.766	100,00%
2.1.6	Utang Jaminan	242.175.000	135.440.416	62.446.766	52.521.766	0	-100,00%
2.1.7	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-	10.771.477.813	10.771.477.812	100,00%
	Jumlah Kewajiban Jk. Pendek	**28.156.649.966**	**36.325.566.842**	**31.613.186.179**	**30.205.643.275**	**30.756.706.128**	**2,23%**
2.2	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**						
2.2.1	Utang Dalam Negeri	-	-	43.085.918.127	25.133.455.107	14.361.977.295	100,00%
2.2.2	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-	0	0,00%
	Jumlah. Kewajiban Jk. Panjang	**0**	**0**	**43.085.918.127**	**25.133.455.107**	**14.361.977.295**	**100,00%**
	JUMLAH KEWAJIBAN	**28.156.649.966**	**36.325.566.842**	**74.699.104.306**	**55.339.098.382**	**45.118.683.423**	**12,51%**
3	**EKUITAS**						**0,00%**
3.1	Ekuitas	7.474.985.097.466	7.779.548.494.030	8.418.925.356.196	8.743.757.095.821	8.832.327.623.214	4,26%
	Jumlah Ekuitas	**7.474.985.097.466**	**7.779.548.494.030**	**8.418.925.356.196**	**8.743.757.095.821**	**8.832.327.623.214**	**4,26%**
	JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS	**7.503.141.747.432**	**7.815.874.060.872**	**8.493.624.460.503**	**8.799.096.194.203**	**10.627.692.388.735**	**9,09%**

Sumber : BPKAD Kota Padang, tahun 2020-2024

Berdasarkan analisis data neraca daerah Kota Padang periode 2020-2024, secara keseluruhan aset mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 9,09%. Peningkatan ini terutama didorong oleh lonjakan signifikan pada aset lancar yang tumbuh sebesar 74,67%, mencerminkan peningkatan likuiditas yang signifikan. Hal ini menunjukkan adanya pengelolaan kas dan setara kas yang lebih optimal, kemungkinan berasal dari peningkatan pendapatan daerah atau efisiensi dalam pengeluaran. Selain itu, investasi jangka panjang juga mengalami pertumbuhan sebesar 16,66%, menandakan adanya komitmen pemerintah daerah dalam berinvestasi untuk jangka panjang, baik dalam bentuk penyertaan modal maupun investasi lainnya.

Di sisi lain, aset tetap mengalami pertumbuhan yang lebih moderat, hanya sebesar 3,76%, yang menunjukkan bahwa belanja modal untuk pembangunan infrastruktur dan aset fisik cenderung stabil. Sementara itu, aset lainnya hanya tumbuh 0,58%, mengindikasikan bahwa pos ini tidak mengalami perubahan yang signifikan selama lima tahun terakhir.

Dari sisi kewajiban, terjadi peningkatan sebesar 12,51%, yang menunjukkan adanya kenaikan beban utang atau kewajiban daerah. Kewajiban jangka pendek naik sebesar 2,23%, yang kemungkinan besar berasal dari peningkatan utang operasional seperti utang belanja dan pendapatan diterima di muka. Namun, kewajiban jangka panjang tetap stabil tanpa adanya perubahan berarti (0,00%), menandakan bahwa pemerintah daerah tidak menambah utang jangka panjang baru atau telah berhasil mengelola utang yang ada dengan baik.

Ekuitas daerah mengalami pertumbuhan sebesar 4,26%, yang mengindikasikan adanya peningkatan aset bersih dan posisi keuangan yang tetap kuat. Secara keseluruhan, pertumbuhan kewajiban dan ekuitas yang mencapai 9,09% selaras dengan pertumbuhan total aset daerah.

Berdasarkan data ini, dapat disimpulkan bahwa neraca daerah Kota Padang menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dalam lima tahun terakhir. Peningkatan signifikan pada aset lancar menunjukkan likuiditas yang kuat, sementara pertumbuhan investasi jangka panjang menandakan adanya perencanaan keuangan yang baik untuk pembangunan jangka panjang. Kewajiban daerah masih dalam batas yang terkendali, dengan utang jangka panjang yang tidak mengalami peningkatan signifikan.

Berdasarkan data neraca selanjutnya dapat dilakukan perhitungan dan analisis rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas yang secara keseluruhan tersaji dalam tabel berikut:

Tabel II- 92 Rasio Likuiditas dan Rasio Solvabilitas Kota Padang Tahun 2020-2024

NO	RASIO KEUANGAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	**RASIO LIKUIDITAS**					
1	*Current Rasio*	7,7097	5,4047	5,9069	5,9563	65,6990
2	*Quick Rasio*	6,0011	4,2634	4,8718	5,1273	64,8218
3	*Cash Rasio*	1,5920	0,7061	2,8406	1,9917	4,4217
B	**RASIO SOLVABILITAS**					
1	Rasio Total Hutang thd Total Aset	0,0038	0,0046	0,0088	0,0063	0,0042
2	Rasio Hutang thd Modal	0,0038	0,0047	0,0089	0,0063	0,0051

Sumber : BPKAD Kota Padang, Tahun 2020-2024

Berdasarkan data pada tabel diatas mengenai Rasio Likuiditas dan Rasio Solvabilitas Kota Padang periode 2020-2024, dapat dianalisis bahwa secara umum kondisi keuangan daerah menunjukkan tren yang cukup positif dalam hal likuiditas dan stabilitas solvabilitas.

1. Analisis Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Current Rasio menunjukkan tren yang relatif stabil dari tahun 2020 hingga 2023, berkisar antara 5 hingga 7, namun pada tahun 2024 terjadi lonjakan signifikan hingga mencapai 65,6990. Hal ini menunjukkan peningkatan besar dalam aset lancar dibandingkan dengan kewajiban jangka pendek, yang dapat disebabkan oleh peningkatan kas atau piutang yang lebih tinggi dibandingkan dengan utang jangka pendek.

Quick Rasio, yang mengukur aset likuid tanpa memperhitungkan persediaan, menunjukkan pola serupa dengan current rasio, dengan peningkatan tajam pada tahun 2024 mencapai 64,8218. Ini mengindikasikan bahwa aset likuid yang dimiliki, seperti kas dan piutang, meningkat secara signifikan. Sementara itu, Cash Rasio, yang hanya memperhitungkan kas dalam membayar kewajiban jangka pendek, mengalami fluktuasi sepanjang periode 2020-2023, sebelum meningkat tajam pada 2024 menjadi 4,4217. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kas yang cukup besar untuk memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa harus bergantung pada aset lancar lainnya.

Secara keseluruhan, rasio likuiditas yang meningkat drastis pada 2024 menunjukkan bahwa pemerintah daerah berada dalam kondisi keuangan yang sangat likuid, dengan lebih dari cukup aset lancar untuk menutupi kewajiban jangka pendek. Namun, peningkatan yang terlalu tajam juga bisa mengindikasikan adanya idle cash yang belum dimanfaatkan secara optimal.

2. Analisis Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Rasio total utang terhadap total aset tetap rendah sepanjang periode, dengan nilai di bawah 1% (tertinggi 0,0088 pada tahun 2022). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan terhadap utang sangat rendah dan aset daerah didanai sebagian besar dari ekuitas, bukan utang.

Demikian pula, rasio utang terhadap modal menunjukkan pola yang serupa, tetap rendah di bawah 1% sepanjang periode. Stabilitas rasio ini mengindikasikan bahwa struktur permodalan Kota Padang sangat kuat dengan risiko keuangan yang rendah akibat utang yang minimal.

2.2.2 Kebijakan Keuangan Masa Lalu

Pemahaman terhadap kinerja belanja daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa mendatang. Dalam analisis kebijakan pengelolaan keuangan daerah pada periode sebelumnya ini beberapa hal yang perlu dipahami antara lain mencakup proporsi realisasi belanja daerah terhadap anggaran, analisis proporsi belanja, analisis belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

2.2.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

1. Proporsi Belanja Pegawai terhadap Total Belanja

Proporsi ini memperlihatkan postur belanja pegawai terhadap belanja daerah. Semakin tinggi angka proporsinya maka semakin besar proporsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja pegawai. Sebaliknya, semakin kecil angka proporsi belanja pegawai maka semakin kecil pula proporsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja pegawai. Rasio belanja pegawai terhadap total belanja daerah Kota Padang pada tahun 2020 hingga 2024 secara lebih jelas dapat disajikan pada grafik di bawah ini:

Gambar II- 84 Proporsi Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Daerah Kota Padang 2020-2024 (juta rupiah

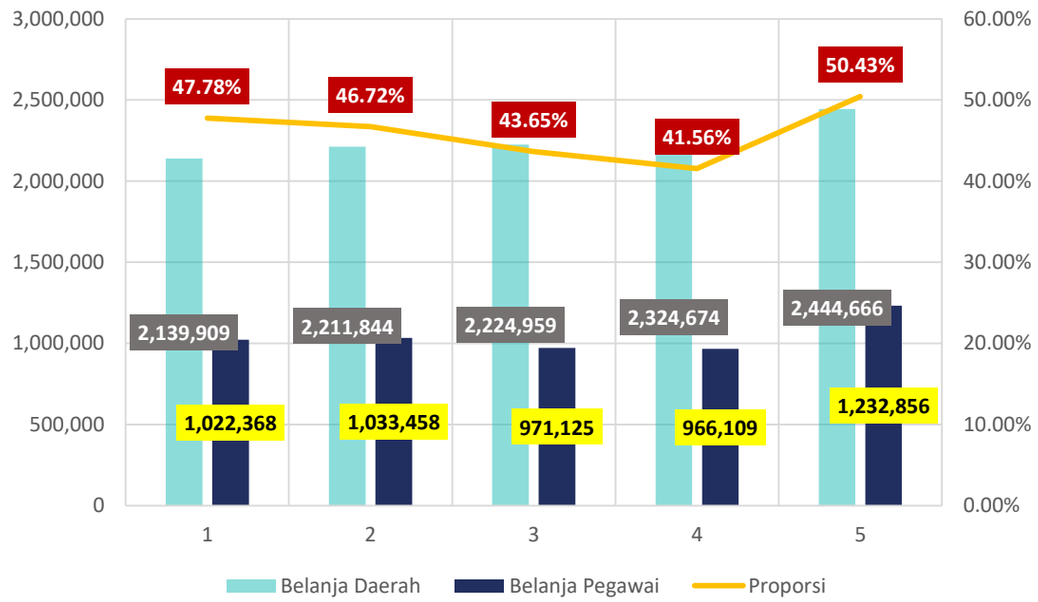

Sumber : BPKAD Kota Padang, Tahun 2020-2024

Berdasarkan Gambar diatas mengenai Proporsi Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Daerah Kota Padang periode 2020-2024, dapat dilihat bahwa belanja pegawai masih memiliki porsi yang cukup besar dalam total belanja daerah setiap tahunnya, meskipun mengalami fluktuasi.

Proporsi belanja pegawai terhadap total belanja daerah menunjukkan tren menurun dari tahun 2020 hingga 2023, namun kembali meningkat pada tahun 2024. Pada tahun 2020, proporsi belanja pegawai mencapai 47,78% dari total belanja daerah sebesar Rp 2,139 triliun, dengan belanja pegawai sebesar Rp 1,022 triliun. Persentase ini sedikit turun pada tahun 2021 menjadi 46,72%, dengan belanja daerah sebesar Rp 2,211 triliun dan belanja pegawai sebesar Rp 1,033 triliun.

Tren penurunan ini terus berlanjut hingga tahun 2023, di mana proporsi belanja pegawai mencapai titik terendah pada 41,56%, dengan total belanja daerah Rp 2,324 triliun dan belanja pegawai Rp 966 miliar. Namun, pada tahun 2024, terjadi lonjakan proporsi belanja pegawai menjadi 50,43%, dengan belanja daerah sebesar Rp 2,444 triliun dan belanja pegawai yang meningkat menjadi Rp 1,232 triliun.

2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dapat dilihat dari kemandirian keuangan daerah tersebut. Tingkat kemandirian keuangan daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai rumah tangganya sendiri dengan mengandalkan penerimaan pajak daerah sebagai

sumbernya tanpa bergantung kepada dana yang diberikan pemerintah pusat. Rasio kemandirian keuangan daerah dicerminkan oleh rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjaman. Berikut disajikan data Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Padang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dan kriteria dari rasio tersebut.

Gambar II- 85 Rasio Kemandirian Daerah Kota Padang Tahun 2020-2024

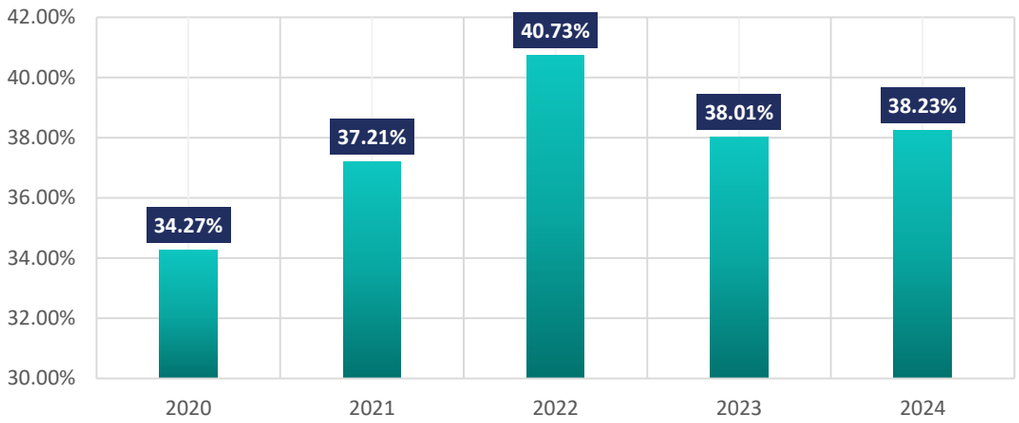

Sumber : BPKAD Kota Padang, data diolah

Pada gambar dapat dijelaskan bahwa Rasio Kemandirian Daerah ada kecenderungan meningkat ke tahun 2022 kemudian turun di tahun 2023. Namun capaian di tahun 2024 yakni sebesar 38,23% masih lebih lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 sampai dengan 2021.

Tabel II- 93 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 – 25	Instruktif
Rendah	25 – 50	Konsultatif
Sedang	50 – 75	Partisipatif
Tinggi	75 – 100	Delegatif

Sumber : BPKAD Kota Padang

Rasio Kemandirian Daerah Kota Padang pada tahun 2020–2024 menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2020, rasio kemandirian daerah tercatat sebesar 34,27%. Angka ini mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 37,21%, dan terus meningkat hingga mencapai puncaknya pada tahun 2022 dengan nilai 40,73%. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 38,01%. Meskipun demikian, angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2024, rasio kemandirian daerah kembali mengalami sedikit peningkatan menjadi 38,23%.

Dari tren ini, dapat disimpulkan bahwa secara umum terdapat peningkatan kemandirian daerah dalam lima tahun terakhir, meskipun terdapat sedikit penurunan pada tahun 2023. Jika dikaitkan dengan Tabel III.12 yang menjelaskan pola hubungan dan tingkat kemampuan daerah, dapat diketahui bahwa Kota Padang masih berada dalam kategori "Rendah" (25%–50%), di mana pola hubungan yang terbentuk adalah konsultatif. Artinya, daerah masih membutuhkan bimbingan dan arahan dari pemerintah pusat dalam mengelola keuangannya, meskipun terdapat indikasi peningkatan kemandirian seiring waktu.

3. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Tingkat Desentralisasi Fiskal adalah ukuran menunjukan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Rasio desentralisasi fiskal menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Peran Pendapatan Asli Daerah dalam keuangan daerah menunjukkan ukuran keberhasilan suatu daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Semakin tinggi PAD terhadap total penerimaan daerah, maka semakin tinggi kemampuan keuangan daerah dalam membiayai urusan pembangunan, pelayanan, dan pemerintahannya. Berikut disajikan data mengenai Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Padang dalam kurun waktu 5 tahun beserta kriterianya.

Gambar II- 86 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Padang Tahun 2020-2024 (juta rupiah)

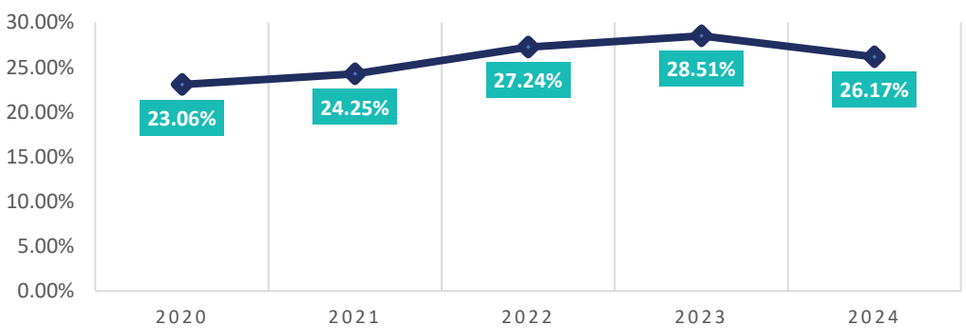

Sumber : BPKAD Kota Padang, tahun 2020-2024

Tabel II- 94 Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal

Prosentase PAD terhadap Total Pendapatan Daerah	Tingkat Desentralisasi Fiskal
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik

Prosentase PAD terhadap Total Pendapatan Daerah	Tingkat Desentralisasi Fiskal
>50	Sangat Baik

Sumber : BPKAD Kota Padang

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Padang pada tahun 2020–2024 menunjukkan tren yang cenderung meningkat hingga tahun 2023, namun mengalami sedikit penurunan pada tahun 2024. Pada tahun 2020, rasio ini berada pada angka 23,06%, kemudian mengalami peningkatan berturut-turut pada tahun 2021 dan 2022 menjadi 24,25% dan 27,24%. Puncaknya terjadi pada tahun 2023, di mana rasio desentralisasi fiskal mencapai 28,51%. Namun, pada tahun 2024 rasio ini turun menjadi 26,17%.

Jika dikaitkan dengan Tabel 2-75 mengenai kriteria penilaian tingkat desentralisasi fiskal, Kota Padang selama periode 2020–2024 berada dalam kategori "Sedang" (20,01% – 30%). Artinya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih memiliki kontribusi yang terbatas terhadap total pendapatan daerah, sehingga ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih cukup tinggi.

4. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah adalah ukuran tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktivitas pembangunan daerah melalui optimalisasi PAD. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan/ atau pemerintah provinsi. Berikut tersaji data Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kota Padang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir beserta kriterianya.

Gambar II- 87 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kota Padang Tahun 2020-2024

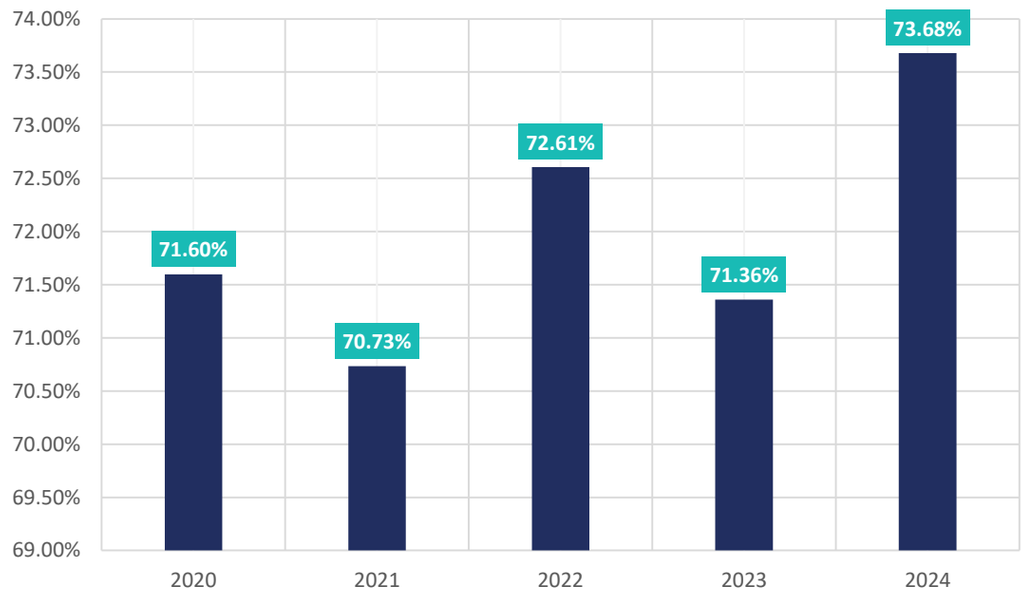

Sumber : BPKAD Kota Padang, tahun 2020-2024

Tabel II- 95 Kriteria Penilaian Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Persentase	Ketergantungan Keuangan Daerah
0,00 – 10,00	Sangat Rendah
10,01 – 20,00	Rendah
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Tinggi
>50	Sangat Tinggi

Sumber : BPKAD Kota Padang

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kota Padang pada tahun 2020–2024 menunjukkan tren fluktuatif, namun cenderung meningkat dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, rasio ketergantungan keuangan daerah tercatat sebesar 71,60%, kemudian mengalami sedikit penurunan pada tahun 2021 menjadi 70,73%. Pada tahun 2022, angka ini meningkat cukup signifikan hingga mencapai 72,61%, namun kembali turun pada tahun 2023 menjadi 71,36%. Pada tahun 2024, rasio ketergantungan keuangan daerah kembali meningkat dan mencapai nilai tertinggi dalam lima tahun terakhir, yaitu 73,68%.

Jika dikaitkan dengan Tabel 3-15 mengenai kriteria penilaian rasio ketergantungan keuangan daerah, Kota Padang selama periode 2020–2024 berada dalam kategori "Sangat Tinggi" (di atas 50%). Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan Kota Padang masih sangat

bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi, sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih relatif rendah dalam struktur pendapatan daerah.

5. Rasio Efektivitas

Efektivitas pelaksanaan anggaran suatu daerah dapat menjadi indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan roda pemerintahan. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Berikut tersaji data Rasio Efektivitas Kota dalam kurun waktu 5 tahun terakhir beserta kriteria dari hasil perhitungannya.

Gambar II- 88 Rasio Efektivitas Kota Padang Tahun 2020-2024 (juta rupiah)

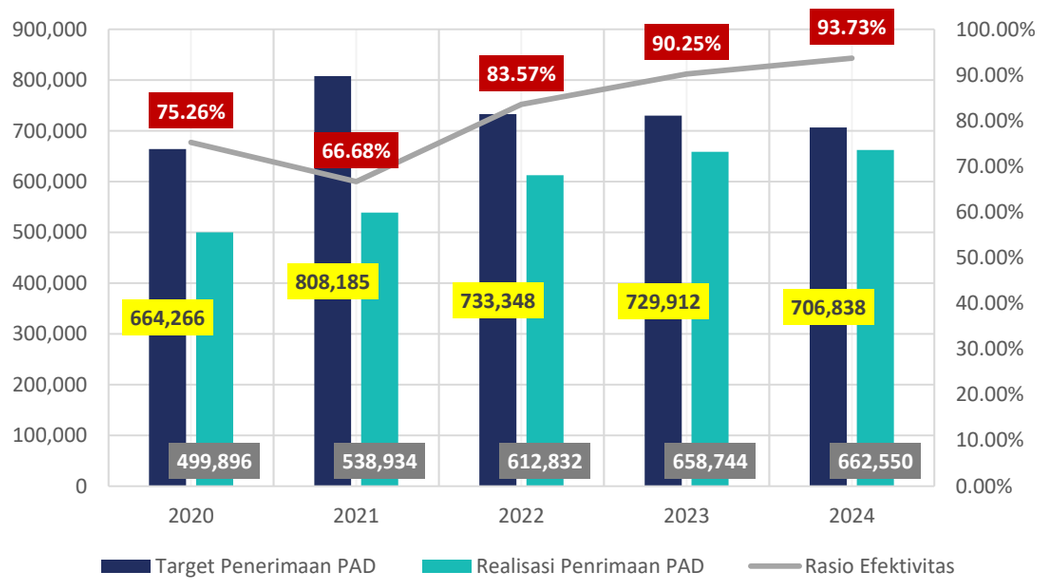

Sumber : BPKAD Kota Padang, tahun 2020-2024

Tabel II- 96 Kriteria Penilaian Rasio Efektivitas

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
< 75%	Tidak Efektif

Sumber : BPKAD Kota Padang

Rasio Efektivitas Kota Padang pada tahun 2020–2024 menunjukkan tren yang meningkat, menandakan adanya perbaikan dalam pencapaian target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada

tahun 2020, rasio efektivitas berada di angka 75,26%, yang menurut Tabel 2-77 masuk dalam kategori "Kurang Efektif". Namun, pada tahun 2021 terjadi penurunan cukup signifikan menjadi 66,68%, yang bahkan masuk dalam kategori "Tidak Efektif", menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PAD sangat jauh dari target yang telah ditetapkan.

Tren positif mulai terlihat pada tahun 2022, di mana rasio efektivitas meningkat menjadi 83,57%, meskipun masih dalam kategori "Kurang Efektif". Kinerja penerimaan PAD semakin membaik pada tahun 2023 dengan rasio 90,25%, yang telah masuk ke kategori "Cukup Efektif". Puncaknya terjadi pada tahun 2024, di mana rasio efektivitas mencapai 93,73%, tetap dalam kategori "Cukup Efektif", namun mendekati tingkat "Efektif" (100%).

Peningkatan rasio efektivitas ini menunjukkan bahwa strategi optimalisasi PAD mulai menunjukkan hasil positif, meskipun masih terdapat selisih antara target dan realisasi penerimaan PAD. Untuk meningkatkan efektivitas ke tingkat "Efektif" atau bahkan "Sangat Efektif" (>100%), diperlukan upaya peningkatan potensi pajak dan retribusi daerah, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta inovasi dalam strategi pengelolaan dan pemungutan PAD.

2.2.2.2 Analisis Pembiayaan

Untuk menyalurkan surplus dan menutup defisit, dalam penganggaran dikenal adanya pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Begitu pula dengan pengeluaran pembiayaan yaitu pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/ defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

2.2.2.3 Analisis Sumber Penutup Defisit Riil

Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran Pemerintah Daerah. Langkah awal yang dilaksanakan terkait dengan analisis tersebut adalah membuat tabel Penutup Defisit Riil Anggaran. Berdasarkan tabel analisis di atas, kemudian disusun tabel analisis untuk mengetahui gambaran komposisi penutup defisit riil.

Untuk mengetahui secara lebih jelas terkait dengan hasil perhitungan dan komposisi penutup defisit riil anggaran Pemerintah Kota Padang pada tahun 2020 hingga 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II- 97 Defisit Riil Anggaran Kota Padang Tahun 2020-2024

No	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
		Juta (Rp.)	Juta (Rp.)	Juta (Rp.)	Juta (Rp.)	Juta (Rp.)
1	Realisasi pendapatan daerah	2.167.625	2.222.267	2.249.628	2.310.513	2.531.275
	Dikurangi realisasi :					
2	Belanja daerah	2.139.909	2.211.844	2.224.959	2.324.674	2.444.666
3	Pengeluaran pembiayaan daerah	36.829	29.601	3.600	15.481	10.771
A	Defisit riil	-9.113	-19.178	21.069	-29.642	75.838
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan :					
4	Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya	53.938	44.824	25.647	89.801	60.159
5	Pencairan dana cadangan	0	0	0	0	0
6	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0	0	0	0	0
7	Penerimaan pinjaman dalam Negeri – Obligasi	0	0	0	0	0
8	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	0	0	43.086	0	0
9	Penerimaan piutang daerah	0	0	0	0	0
B	Total realisasi penerimaan pembiayaan daerah	53.938	44.824	68.733	89.801	60.159
A-B	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	44.824	25.647	89.801	60.159	135.997

Sumber : BPKAD Kota Padang, 2025 (data diolah)

Tabel II- 98 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Padang Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	Proporsi dari Total Defisit Riil				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya	-591,85%	-233,73%	121,73%	-302,95%	79,33%
2	Pencairan dana cadangan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4	Penerimaan pinjaman dalam Negeri – Obligasi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

NO	URAIAN	Proporsi dari Total Defisit Riil				
		2020	2021	2022	2023	2024
5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	0,00%	0,00%	204,50%	0,00%	0,00%
6	Penerimaan piutang daerah	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	-591,85%	-233,73%	326,23%	-302,95%	79,33%

Sumber : BPKAD Kota Padang, data diolah

2.2.3 Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat, prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu kerangka pendanaan dialokasikan untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas. Suatu kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya.

2.2.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Secara keseluruhan proyeksi anggaran pendapatan belanja daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2025-2030 disajikan pada tabel berikut:

Tabel II- 99 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Kota Padang Tahun 2025-2030 (rupiah)

URAIAN	Baseline	Proyeksi				
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
PENDAPATAN DAERAH	**2.825.928.928.391**	**3.003.751.563.070**	**5.512.919.000.000**	**5.479.320.000.000**	**5.479.800.000.000**	**5.480.250.000.000**
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**897.692.136.639**	**1.126.332.239.115**	**3.635.500.000.000**	**3.602.000.000.000**	**3.602.500.000.000**	**3.603.000.000.000**
Pajak Daerah	695.363.731.133	907.833.417.715	1.594.000.000.000	1.618.000.000.000	1.619.000.000.000	1.620.000.000.000
Retribusi Daerah	114.519.363.316	132.153.503.116	1.896.500.000.000	1.834.000.000.000	1.835.000.000.000	1.835.500.000.000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.290.287.153	27.290.287.150	39.500.000.000	41.000.000.000	41.500.000.000	42.500.000.000
Lain-lain PAD yang Sah	64.518.755.037	59.055.031.134	105.500.000.000	109.000.000.000	107.000.000.000	105.000.000.000
PENDAPATAN TRANSFER	**1.928.236.791.752**	**1.877.419.323.955**	**1.877.419.000.000**	**1.877.320.000.000**	**1.877.300.000.000**	**1.877.250.000.000**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**1.838.227.774.000**	**1.794.708.513.809**	**1.797.419.000.000**	**1.799.320.000.000**	**1.801.300.000.000**	**1.802.250.000.000**
Pendapatan Transfer Antar Daerah	**90.009.017.752**	**82.710.810.146**	**80.000.000.000**	**78.000.000.000**	**76.000.000.000**	**75.000.000.000**
PENDAPATAN LAIN-LAIN DAERAH YANG SAH	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-	-
BELANJA DAERAH	**2.988.580.736.106**	**3.319.009.510.295**	**5.398.000.000.000**	**5.378.000.000.000**	**5.378.480.000.000**	**5.463.250.000.000**
BELANJA OPERASI	**2.509.385.615.393**	**2.882.067.032.172**	**2.722.000.000.000**	**2.692.000.000.000**	**2.687.000.000.000**	**2.628.000.000.000**
Belanja Pegawai	1.434.861.372.790	1.796.867.552.538	1.826.000.000.000	1.819.000.000.000	1.818.000.000.000	1.818.000.000.000
Belanja Barang dan Jasa	926.647.896.941	918.992.805.334	760.000.000.000	746.000.000.000	737.000.000.000	700.000.000.000
Belanja Bunga	2.240.643.397	14.269.096.750	21.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000	-
Belanja Subsidi	52.129.785.815	62.000.000.000	55.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
Belanja Hibah	70.587.373.450	65.324.609.000	35.000.000.000	40.000.000.000	45.000.000.000	35.000.000.000
Belanja Bantuan Sosial	22.918.543.000	24.612.968.550	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000
BELANJA MODAL	**473.218.456.564**	**429.598.832.541**	**2.673.000.000.000**	**2.683.000.000.000**	**2.688.480.000.000**	**2.832.250.000.000**
Belanja Modal Tanah	27.402.315.470	22.119.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	160.702.480.351	69.679.849.284	565.000.000.000	569.000.000.000	600.000.000.000	611.250.000.000
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	138.540.718.222	144.402.209.008	1.862.000.000.000	1.861.000.000.000	1.833.480.000.000	1.956.000.000.000
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	134.095.161.960	185.919.153.268	230.000.000.000	238.000.000.000	240.000.000.000	250.000.000.000
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11.998.309.561	7.478.620.981	6.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
Belanja Modal Aset Lainnya	479.471.000	-	-	-	-	-
BELANJA TAK TERDUGA	**5.976.664.149**	**7.343.645.583**	**3.000.000.000**	**3.000.000.000**	**3.000.000.000**	**3.000.000.000**
Belanja Tidak Terduga	5.976.664.149	7.343.645.583	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
BELANJA TRANSFER	-	-	-	-	-	-
Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-	-	-
Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-	-
SURPLUS/(DEFISIT)	**(162.651.807.715)**	**(315.257.947.225)**	**114.919.000.000**	**101.320.000.000**	**101.320.000.000**	**17.000.000.000**
PEMBIAYAAN DAERAH	**162.651.807.715**	**315.257.947.225**	**-114.919.000.000**	**-101.320.000.000**	**-101.320.000.000**	**-17.000.000.000**
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**173.423.285.527**	**340.500.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	135.999.235.677	81.000.000.000	-	-	-	-
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
Penghematan Belanja	-	-	-	-	-	-
Pinjaman Dalam Negeri	37.424.049.850	259.500.000.000	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**10.771.477.812**	**25.242.052.775**	**114.919.000.000**	**101.320.000.000**	**101.320.000.000**	**17.000.000.000**

URAIAN	Baseline	Proyeksi				
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
Penyertaan Modal Daerah	-	5.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000	17.000.000.000
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	10.771.477.812	10.771.477.812	93.448.425.037	79.849.425.037	79.849.425.037	-
Pembayaran Pembiayaan Utang Daerah	-	9.470.574.963	9.470.574.963	9.470.574.963	9.470.574.963	-
PEMBIAYAAN NETTO	**162.651.807.715**	**315.257.947.225**	**-114.919.000.000**	**-101.320.000.000**	**-101.320.000.000**	**-17.000.000.000**
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)	**-**	-	-	-	-	-

Sumber : BPKAD Kota Padang, data diolah tahun 2025

Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Kota Padang diproyeksikan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Untuk tahun 2025 dan 2026, target pendapatan telah ditetapkan melalui KUA-PPAS yang disetujui bersama DPRD Kota Padang, yakni sebesar Rp2.825.928.928.391 pada tahun 2025 dan Rp3.003.751.563.070 pada tahun 2026. Selanjutnya, hingga tahun 2030, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp5.480.250.000.000 dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 14,16% melalui strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama yang bersumber dari retribusi BLUD.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan meningkat menjadi sebesar Rp3.603.000.000.000 pada tahun 2030. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar Rp2.705.307.863.361 dibandingkan dengan PAD pada tahun 2025 yang sebesar Rp897.692.136.639. Rata-rata pertumbuhan PAD per tahun selama periode tersebut diproyeksikan sebesar 26,06%. Dengan item sebagai berikut :

Pajak Daerah

Pajak daerah ditargetkan mencapai sebesar Rp1.620.000.000.000 pada tahun 2030. Angka ini meningkat sebesar Rp924.636.268.867 dibandingkan dengan tahun 2025, di mana penerimaan pajak daerah tercatat sebesar Rp695.363.731.133.

Rata-rata pertumbuhan tahunan (Compound Annual Growth Rate/CAGR) diproyeksikan sebesar 15,14%. Pertumbuhan ini akan didorong oleh berbagai inovasi dalam sistem perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah secara signifikan.

Optimalisasi penerimaan pajak mulai dilakukan dengan diberlakukannya opsen pajak tertunggak yang berlaku sejak tahun 2025, serta dukungan stimulus dari Pemerintah Provinsi berupa penghapusan denda dan pokok pajak. Kebijakan-kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong kesadaran wajib pajak sekaligus meningkatkan realisasi pendapatan pajak daerah secara berkelanjutan.

Retribusi Daerah

Retribusi Daerah juga ditargetkan mengalami peningkatan yang signifikan, di mana pada tahun 2030 diproyeksikan mencapai sebesar Rp1.835.500.000.000. Nilai ini meningkat sebesar Rp1.720.980.636.682 dibandingkan tahun 2025, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 58,79%. Peningkatan tersebut didorong oleh optimalisasi penerimaan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), baik dari rumah sakit maupun puskesmas, melalui peningkatan kualitas pelayanan, pengadaan peralatan, serta pengembangan infrastruktur BLUD.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ditargetkan mencapai Rp42.500.000.000 pada tahun 2030. Jumlah ini meningkat sebesar Rp19.209.712.847 dibandingkan dengan tahun 2025, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 10,54%.

Peningkatan ini diharapkan dapat dicapai melalui kebijakan strategis berupa penambahan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Melalui penguatan permodalan tersebut, diharapkan kinerja BUMD dapat semakin optimal, sehingga mampu memberikan kontribusi deviden yang lebih besar bagi Pemerintah Kota Padang. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari strategi peningkatan pendapatan daerah secara berkelanjutan melalui pengelolaan aset yang produktif dan akuntabel.

Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah diproyeksikan meningkat menjadi sebesar Rp105.000.000.000 pada tahun 2030. Angka ini mengalami kenaikan sebesar Rp40.481.244.963 dibandingkan dengan target tahun 2025 yang sebesar Rp64.518.755.037. Rata-rata pertumbuhan per tahun diperkirakan sebesar 8,46%.

Peningkatan ini diharapkan berasal dari optimalisasi berbagai sumber pendapatan sah lainnya yang belum tergarap secara maksimal, termasuk pendapatan dari jasa giro, pendapatan bunga, klaim asuransi, dan sumber-sumber sah lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat diproyeksikan mengalami penurunan sebesar 0,33% per tahun selama periode 2025 hingga 2030. Pada tahun 2030, pendapatan transfer ditargetkan sebesar Rp1.802.250.000.000, atau menurun sebesar Rp35.977.774.000 dibandingkan dengan target tahun 2025 yang sebesar Rp1.838.227.774.000.

Penurunan ini mencerminkan kecenderungan penyesuaian alokasi dana transfer dari pemerintah pusat, serta semakin ditekankannya kemandirian fiskal daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Padang optimis meningkatkan kapasitas pendapatan asli daerah (PAD) guna mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat.

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah

Penurunan ini mencerminkan laju penurunan rata-rata (Compound Annual Growth Rate/CAGR) sebesar -2,99% per tahun. Salah satu faktor utama yang menyebabkan penurunan ini adalah implementasi kebijakan opsen pajak kendaraan bermotor, di mana penerimaan dari pajak tersebut langsung ditransfer ke pemerintah kota. Kebijakan ini

mengubah skema alokasi dana dari pemerintah pusat, sehingga mengurangi jumlah transfer yang diterima oleh pemerintah daerah. Dimana pada pada tahun 2025 pendaptan transfer daerah sebesar Rp90.009.017.752 menurun menjadi sebesar Rp75.000.000.000 pada tahun 2030.

Belanja Daerah

Belanja daerah diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar Rp2.474.669.263.894 pada tahun 2030, dengan target belanja sebesar Rp5.463.250.000.000. Angka ini meningkat dari realisasi belanja tahun 2025 sebesar Rp2.988.580.736.106, atau meningkat rata-rata sebesar 10,58% per tahun.

Proyeksi belanja daerah tersebut telah mengakomodir ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Harmonisasi Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan demikian, perencanaan anggaran daerah disusun secara sinergis untuk mendukung kesinambungan fiskal dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan.

Belanja Operasi

Belanja operasi di proyeksikan turun rata-rata 0,77% dari total belanja operasi sebesar Rp2.509.385.615.393 pada tahun 2025 menjadi Rp2.628.000.000 pada tahun 2030 dengan semangat efisiensi dalam penggunaan anggaran yang tepat sasaran.

Belanja Pegawai

Belanja pegawai pada tahun 2030 diperkirakan akan mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2025. Namun, dibandingkan dengan tahun 2027, belanja pegawai diproyeksikan mengalami penurunan.

Adapun belanja pegawai dialokasikan sebesar 1.826.000.000.000 pada tahun 2027 dan terus turun hingga angka 1.818.000.000.000 pada tahun 2030. Hal ini dilakukan dalam rangka efisiensi anggaran dimana belanja pegawai dialokasikan maksimal sebesar 30% dari total belanja APBD sesuai dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa diproyeksikan mengalami tren penurunan selama periode 2025 hingga 2030. Penurunan ini sejalan dengan pelaksanaan *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025* tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pada tahun 2030, belanja barang dan jasa diperkirakan mencapai Rp700.000.000.000, menurun sebesar Rp37.000.000.000 dibandingkan tahun sebelumnya. Secara rata-rata, penurunan belanja barang dan jasa diproyeksikan sebesar -4,57% per tahun. Kebijakan

ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendorong efisiensi anggaran serta peningkatan kualitas belanja daerah.

Belanja Bunga

Belanja bunga atas pinjaman yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang diproyeksikan akan selesai pada tahun 2029. Pada tahun 2025, belanja bunga tercatat sebesar Rp2.240.643.397 dan secara bertahap akan terus menurun hingga pembayaran terakhir pada tahun 2029 sebesar Rp12.000.000.

Setelah tahun 2029, tidak terdapat lagi alokasi anggaran untuk belanja bunga, menandai berakhirnya kewajiban pembayaran bunga atas pinjaman yang ada. Hal ini menunjukkan langkah konsolidasi fiskal dan pengelolaan utang yang bertanggung jawab oleh Pemerintah Kota Padang.

Belanja Subsidi

Belanja subsidi diproyeksikan mengalami penurunan secara bertahap selama periode 2025 hingga 2030, dengan rata-rata penurunan sebesar -0,69% per tahun. Pada tahun 2025, belanja subsidi tercatat sebesar Rp52.129.785.815 dan diperkirakan menurun menjadi Rp50.000.000.000 pada tahun 2030.

Penurunan ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan efisiensi belanja serta mengarahkan subsidi secara lebih tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah.

Belanja Hibah

Belanja hibah diproyeksikan mengalami pola yang fluktuatif selama periode 2025 hingga 2030. Fluktuasi ini terutama disebabkan oleh adanya alokasi khusus pada tahun 2028 dan 2029 untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), yang memerlukan pendanaan hibah kepada lembaga penyelenggara pemilu di daerah.

Meskipun terdapat lonjakan pada tahun-tahun tertentu, secara keseluruhan belanja hibah menunjukkan tren penurunan dengan rata-rata sebesar -11,03% per tahun selama periode tersebut. Penurunan ini mencerminkan upaya penyesuaian belanja hibah agar lebih selektif dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.

Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial diproyeksikan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 1,46% per tahun selama periode 2025 hingga 2030. Pada tahun 2025, belanja bantuan sosial tercatat sebesar Rp22.918.543.000 dan diperkirakan meningkat menjadi Rp25.000.000.000 pada tahun 2030, atau mengalami kenaikan sebesar Rp2.081.457.000.

Kenaikan ini mencerminkan komitmen Pemerintah Daerah dalam memperkuat jaring pengaman sosial serta memberikan dukungan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan secara lebih berkelanjutan dan tepat sasaran.

Belanja Transfer

Pemerintah Kota Padang tidak menganggarkan belanja transfer ke desa pada periode tahun 2025 sampai dengan 2030 karena secara administratif wilayah Kota Padang tidak memiliki desa, melainkan seluruhnya berstatus kelurahan. Dengan demikian, tidak terdapat kewajiban penyaluran dana transfer desa sebagaimana diatur untuk pemerintah daerah yang memiliki wilayah pemerintahan desa. Kebijakan ini sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bahwa belanja transfer ke desa hanya dialokasikan bagi pemerintah daerah yang membawahi desa secara administratif.

Belanja Modal

Belanja modal diproyeksikan meningkat dengan rata-rata keniakan sebesar 34,74%. Hal ini sebagai wujud kepatuhan terhadap Undang-Undang no 1 tahun 2022 pasal 147 dimana daerah diwajibkan mengalokasikan belanja infrasrtuktur pelayanan publik paling rendah 40% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa.

Belanja Modal Tanah

Belanja modal untuk pengadaan tanah diproyeksikan mengalami penurunan rata-rata sebesar -15,47% per tahun selama periode 2025 hingga 2030. Pada tahun 2025, alokasi belanja modal tanah tercatat sebesar Rp27.402.315.470, dan diperkirakan menurun menjadi Rp10.000.000.000 pada tahun 2030.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal untuk peralatan dan mesin diproyeksikan mengalami peningkatan yang signifikan selama periode 2025 hingga 2030. Peningkatan ini terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur pelayanan publik, khususnya pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) seperti rumah sakit dan puskesmas.

Pada tahun 2030, belanja modal peralatan dan mesin diperkirakan mencapai Rp611.250.000.000, meningkat sebesar Rp450.547.519.649 dibandingkan dengan alokasi pada tahun 2025. Secara rata-rata, belanja ini tumbuh sebesar 24,94% per tahun.

Peningkatan ini mencerminkan komitmen Pemerintah Daerah dalam memperkuat layanan dasar masyarakat melalui modernisasi sarana dan prasarana kesehatan serta mendukung operasional BLUD secara optimal.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal untuk gedung dan bangunan diproyeksikan mengalami peningkatan yang sangat signifikan selama periode 2025 hingga 2030, dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 55,46% per tahun. Pada tahun 2030, belanja gedung dan bangunan ditargetkan mencapai Rp1.956.000.000.000, meningkat sebesar Rp1.817.459.281.778 dibandingkan dengan alokasi pada tahun 2025.

Peningkatan anggaran ini akan difokuskan untuk pembangunan dan perluasan fasilitas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), seperti rumah sakit dan puskesmas, serta pengembangan kawasan perkantoran Pemerintah Kota Padang guna mendukung pelayanan publik yang lebih optimal.

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Belanja modal untuk jalan, jaringan, dan irigasi diproyeksikan mengalami peningkatan rata-rata sebesar 10,94% per tahun selama periode 2025 hingga 2030. Pada tahun 2030, belanja modal untuk sektor ini diperkirakan mencapai Rp250.000.000.000, meningkat sebesar Rp115.904.838.040 dibandingkan dengan tahun 2025.

Peningkatan anggaran ini diarahkan untuk mendukung pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar yang krusial bagi kelancaran aktivitas ekonomi serta peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah Pemerintah Kota Padang.

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja modal untuk aset tetap lainnya diproyeksikan mengalami penurunan pada tahun 2030 dibandingkan dengan tahun 2025, dengan tingkat penurunan rata-rata sebesar -13,57% per tahun. Pada tahun 2030, belanja modal untuk aset tetap lainnya diperkirakan sebesar Rp3.000.000.000, turun sebesar Rp6.998.309.561 dibandingkan dengan alokasi pada tahun 2025.

Penurunan ini menunjukkan adanya pengurangan kebutuhan investasi pada aset tetap selain yang telah diprioritaskan, sebagai bagian dari upaya pengelolaan anggaran yang lebih efisien dan fokus pada sektor-sektor prioritas.

Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja modal untuk aset lainnya hanya dianggarkan pada tahun 2025. Sedangkan untuk periode tahun 2026 hingga 2030, belanja modal aset lainnya tidak dianggarkan.

Belanja Tak Terduga

Belanja tak terduga diproyeksikan mengalami penurunan selama periode 2025 hingga 2030, dengan rata-rata penurunan sebesar -10,85% per tahun. Pada tahun 2025, belanja tak terduga diperkirakan

sebesar Rp5.976.664.149, dan menurun menjadi Rp3.000.000.000 pada tahun 2030.

Penurunan ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan perencanaan anggaran serta meningkatkan efisiensi pengelolaan dana cadangan untuk menghadapi kondisi yang tidak terduga.

Belanja Transfer

Belanja transfer diproyeksikan tidak dialokasikan sepanjang periode tahun 2025 hingga 2030.

Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan daerah pada tahun 2025 dan 2026 berasal dari pinjaman dalam negeri yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan strategis di Kota Padang. Pada tahun 2025, Pemerintah Kota Padang diproyeksikan menerima pinjaman sebesar Rp37.424.049.850. Kemudian, pada tahun 2026, penerimaan pembiayaan meningkat signifikan dengan rencana pinjaman sebesar Rp259.000.000.000 sesuai ketetapan KUA-PPAS.

Namun demikian, untuk periode tahun 2027 hingga 2030, tidak terdapat proyeksi penerimaan pembiayaan daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa mulai tahun 2027, Pemerintah Kota Padang berupaya mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan utang, serta mengarahkan kebijakan fiskal ke arah yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

Pengeluaran pembiayaan Pemerintah Kota Padang diproyeksikan mencakup dua komponen utama, yaitu penyertaan modal daerah dan pembayaran cicilan pokok utang.

Pertama, penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ditargetkan mencapai total sebesar Rp58.000.000.000 hingga tahun 2030. Alokasi ini direncanakan mulai direalisasikan secara bertahap sejak tahun 2026 hingga 2030, sebagai bagian dari strategi penguatan struktur permodalan BUMD dan peningkatan kinerja pelayanan publik berbasis usaha.

Kedua, pengeluaran pembiayaan juga mencakup pembayaran cicilan pokok atas pinjaman yang berasal dari lembaga keuangan maupun non-lembaga keuangan. Pembayaran ini merupakan bentuk pemenuhan kewajiban atas penerimaan pembiayaan pada tahun-tahun sebelumnya, dan dirancang untuk tetap menjaga keberlanjutan fiskal serta menghindari tekanan yang berlebihan terhadap APBD. Seluruh kewajiban pinjaman ini diproyeksikan akan lunas pada tahun 2029.

Sebagai upaya untuk menunjang pelaksanaan pengelolaan keuangan di Kota Padang pada waktu yang akan datang, maka perlu dirumuskan beberapa kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kota

Padang untuk tahun 2025 hingga 2030 yang dapat dijadikan sebagai arahan secara umum terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Adapun kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kota Padang pada tahun 2025 hingga 2030 adalah sebagai berikut.

Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025–2030 telah disusun dengan mempertimbangkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam ketentuan tersebut, Pemerintah Daerah diwajibkan mengalokasikan belanja pegawai, di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui Transfer ke Daerah (TKD), paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Selain itu, Pemerintah Daerah juga diwajibkan mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD setelah dikurangi belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Ketentuan ini mulai berlaku secara efektif lima tahun setelah Undang-Undang tersebut ditetapkan, yaitu pada Tahun Anggaran 2027.

2.2.3.2 Kebijakan Pendapatan

1. Dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah yang mandiri dan berkelanjutan, Pemerintah Daerah perlu melakukan optimalisasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, serta sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya. Upaya ini memerlukan perbaikan tata kelola pada setiap potensi pendapatan dengan memaksimalkan seluruh sumber daya yang tersedia. Optimalisasi tersebut dilakukan melalui langkah-langkah strategis berikut:
   a. Peningkatan layanan pajak dan retribusi daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui implementasi sistem informasi berbasis online, penyederhanaan prosedur administrasi, serta peningkatan akses dan kedekatan layanan kepada masyarakat.
   b. Peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui program sosialisasi yang masif, perbaikan sistem pengendalian dan pengawasan, serta reformasi mekanisme pemungutan pajak yang lebih cepat, sederhana, dan akuntabel. Diterapkan pula sistem reward and punishment untuk mendorong kepatuhan.
   c. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengelolaan PAD, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, melalui pelatihan, peningkatan kompetensi, dan pemanfaatan teknologi informasi mempertimbangkan kajian potensi pajak daerah dan retribusi daerah Kota Padang 2022-2027 yang dilakukan oleh Bapenda.

d. Optimalisasi pajak daerah melalui opsen pajak kendaraan bermotor yang mulai dilaksanakan tahun 2025 dengan stimulus penghapusn pokok dan denda tertunggak berdasarkan kebijakan Provinsi Sumatera Barat.
e. Peningkatan penerimaan dari pajak sarang burung walet, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang selama ini belum optimal akan dilakukan melalui langkah pendataan dan penilaian kembali objek pajak secara menyeluruh, disertai dengan penagihan yang lebih intensif dan terstruktur. Upaya ini diharapkan dapat memperluas basis pajak, meminimalkan potensi kebocoran pendapatan, serta memastikan setiap wajib pajak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
f. Pendataan objek dan subjek pajak secara akurat dan berkala, termasuk pendataan ulang terhadap objek dan wajib pajak yang mengalami perubahan. Data yang lengkap, misalnya dari izin mendirikan bangunan (IMB), menjadi dasar perhitungan potensi PAD dan penggalian potensi wajib pajak yang lebih optimal.
g. Optimalisasi penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui perbaikan layanan pendaftaran objek pajak, mutasi objek/subjek PBB, pelayanan pembetulan dan salinan dokumen (SPPT/SKPD/STP), penanganan keberatan dan permohonan pengurangan pajak, serta pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi). Selain itu, kemudahan pembayaran PBB secara online juga didorong dengan menjalin kerja sama dengan bank-bank umum yang beroperasi di wilayah Kota. Tidak kalah penting juga melakukan evaluasi dan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang digunakan sebagai dasar dalam perhitungan PBB di Kota Padang.
h. Melakukan koordinasi secara rutin lintas OPD yang terkait/ memiliki peran dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Padang.
i. Melakukan penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah serta obyek pendapatan asli daerah lainnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan kondisi masyarakat.

2. Melakukan optimalisasi penerimaan pendapatan dengan pemanfaatan/ pengelolaan aset daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, termasuk pendapatan dari pihak ketiga;
3. Peningkatan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengoptimalkan pengelolaan/ kinerja BUMD termasuk upaya pengembangan BUMD dengan manajemen profesional dan berwawasan bisnis yang implementatif;

4. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam upaya peningkatan penerimaan dari Transfer Antar Daerah maupun Dana Bagi Hasil dari Provinsi;
5. Peningkatan prestasi/ kinerja Pemerintah Kota Padang sebagai indikator dalam upaya perolehan Pendapatan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), seperti: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), Bantuan Keuangan dan sejenisnya dalam setiap tahunnya.
6. Percepatan pembangunan daerah melalui pengajuan Proyek Strategis kepada Pemerintah Pusat, yang direncanakan akan didanai melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK).

2.2.3.3 Kebijakan Belanja

1. Pengelolaan belanja daerah Kota Padang diarahkan untuk memihak pada kepentingan publik, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, perlindungan, serta peningkatan kualitas hidup. Belanja diarahkan pada program prioritas berbasis hasil sebagai instrumen pencapaian target pembangunan daerah, dengan penyesuaian komponen APBD mengikuti dinamika yang berkembang.

2. Menjaga rasio belanja pegawai diluar tunjangan guru maksimal sebesar 30% dari belanja APBD setiap tahunnya dengan opsi moratorium penerimaan CPNS dan PPPK serta mutasi masuk ASN ke Kota Padang.

3. Optimalisasi belanja Modal dengan rasio minimal 40% dari APBD guna meningkatkan sarana dan prasarana perekonomian rakyat serta peningkatan pelayanan publik.

4. Tambahan penghasilan bagi pegawai diberikan dengan mempertimbangkan beban kerja, lokasi penugasan, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi, serta pertimbangan objektif lainnya yang relevan.

5. Belanja barang/jasa dianggarkan melalui program dan kegiatan yang memperhatikan skala prioritas pembangunan Kota Padang.

6. Belanja hibah dialokasikan untuk mendukung pencapaian sasaran, program, dan kegiatan Pemerintah Kota Padang, sesuai kepentingan daerah dalam mendukung fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat, dengan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, serta manfaat bagi masyarakat.

7. Belanja hibah dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan dialokasikan pada tahun anggaran 2028 dan 2029, dengan skema pembagian sebesar 40% pada tahun 2028 dan 60% pada tahun 2029. Pengaturan alokasi secara bertahap ini

dimaksudkan untuk memastikan ketersediaan dana yang memadai, mengurangi beban anggaran pada satu tahun tertentu, serta menjamin kelancaran seluruh tahapan penyelenggaraan Pilkada sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Belanja bantuan sosial difokuskan untuk memberikan jaminan dan perlindungan sosial, pemberdayaan serta rehabilitasi sosial, termasuk penanggulangan kemiskinan dan bencana di Kota Padang.

9. Belanja tidak terduga dialokasikan untuk kebutuhan darurat yang tidak terprediksi sebelumnya, keperluan mendesak, pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, serta bantuan sosial insidental.

10. Alokasi anggaran mandatory dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11. Koordinasi rutin dengan seluruh OPD Kota Padang dilakukan guna mendorong peningkatan penyerapan anggaran, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi agar belanja daerah berjalan efektif dan efisien.

2.2.3.4 Kebijakan Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan pembiayaan diutamakan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), dimana jumlahnya semakin menurun yang dialokasikan untuk menunjang optimalisasi pelaksanaan program-program prioritas pembangunan di daerah;
2. SILPA tahun berjalan dijadikan sebagai pedoman dasar untuk pengambilan kebijakan pada perhitungan anggaran. Apabila SILPA tahun berjalan yang dihasilkan positif, maka pemerintah daerah dapat memanfaatkan untuk menambah program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program, kegiatan, sub kegiatan yang telah dianggarkan, dan/ atau pengeluaran pembiayaan. Sedangkan apabila SILPA tahun berjalan terjadi negatif, maka pemerintah daerah mengurangi bahkan menghapus pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang kurang prioritas dan/ atau pengurangan volume program, kegiatan dan sub kegiatan;
3. Bila memungkinkan Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor dan/ atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan daerah, menunjang pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. Dalam rangka peningkatan kualitas dan responsibilitas pelayanan publik serta memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan pendirian BUMD-BUMD baru yang akan disertai dengan penyertaan modal.

2.2.3.5 Proyeksi Belanja Bersifat Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama dan Earmark

Pemerintah Kota Padang telah menyusun proyeksi belanja wajib dan mengikat sebagai bagian dari perencanaan keuangan daerah untuk menjamin keberlangsungan pelayanan publik dan pemenuhan kewajiban daerah. Proyeksi ini mencakup alokasi anggaran untuk pengeluaran yang bersifat rutin, tidak dapat ditunda, dan wajib dipenuhi dalam tahun anggaran berjalan, seperti belanja pegawai (gaji dan tunjangan), tambahan penghasilan ASN, penerimaan anggota DPRD, operasional kepala daerah/wakil kepala daerah, serta belanja bagi hasil kepada pihak terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Perhitungan proyeksi dilakukan dengan mempertimbangkan tren kebutuhan riil, tingkat inflasi, kebijakan penggajian nasional, serta prioritas pembangunan daerah, sehingga anggaran yang dialokasikan mampu menjamin kelancaran operasional pemerintahan dan pelayanan dasar kepada masyarakat.

URAIAN	PROYEKSI					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Belanja Pegawai	1.434.861.372.790	1.796.867.552.537	1.826.000.000.000	1.819.000.000.000	1.818.000.000.000	1.818.000.000.000
Belanja Mengikat	926.647.896.941	918.992.805.333	760.000.000.000	746.000.000.000	737.000.000.000	700.000.000.000
Belanja Mengikat Lainnya	13.012.121.209	34.511.149.525	123.919.000.000	101.320.000.000	101.320.000.000	0
Total Belanja Wajib dan Mengikat Lainnya	2.374.521.390.940	2.725.396.091.803	2.709.919.000.000	2.666.320.000.000	2.656.320.000.000	2.518.000.000.000

Belanja pegawai

Belanja Pegawai yang diproyeksikan telah mematuhi ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 Pasal 146, yang mengatur bahwa pemerintah daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai, kecuali tunjangan guru, paling tinggi sebesar 30% dari total belanja dalam APBD paling lambat dilakukan pada tahun 2027. Berikut adalah rincian alokasi belanja pegawai tersebut :

URAIAN	PROYEKSI (TAHUN)					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Total Belanja APBD	2.988.580.736.106	3.319.009.510.295	5.398.000.000.000	5.378.000.000.000	5.378.480.000.000	5.463.250.000.000
Total Belanja Pegawai	1.434.861.372.790	1.796.867.552.537	1.826.000.000.000	1.819.000.000.000	1.818.000.000.000	1.818.000.000.000
Belanja Tunjangan Guru	206.672.031.000	206.672.031.000	206.672.031.000	206.672.031.000	206.672.031.000	206.672.031.000
Belanja Pegawai diluar Tunjangan Guru	1.228.189.341.790	1.590.195.521.537	1.619.327.969.000	1.612.327.969.000	1.611.327.969.000	1.611.327.969.000

URAIAN	PROYEKSI (TAHUN)					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
% Belanja Pegawai terhadap Belanja APBD	**41,10%**	**47,91%**	**30,00%**	**29,98%**	**29,96%**	**29,49%**

Belanja infrastruktur

Belanja yang diproyeksikan telah mematuhi ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 Pasal 147, yang mengatur bahwa pemerintah daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur untuk pelayanan publik diluar belanja bagi hasil dan belanja transfer, minimal sebesar 40% dari total belanja dalam APBD paling lambat dilakukan pada tahun 2027. Berikut adalah rincian alokasi belanja insfrastruktur tersebut :

URAIAN	PROYEKSI (TAHUN)					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Total Belanja APBD	2.988.580.736.106	3.319.009.510.295	5.398.000.000.000	5.378.000.000.000	5.378.480.000.000	5.463.250.000.000
Belanja Infrastruktur	**932.458.581.014**	**855.296.674.140**	**2.901.000.000.000**	**2.906.800.000.000**	**2.909.580.000.000**	**3.042.250.000.000**
Belanja Transfer	0	0	0	0	0	0
% Belanja Infrastruktur Terhadap Belanja APBD	**31,20%**	**25,77%**	**53,74%**	**54,05%**	**54,10%**	**55,69%**

2.2.1.1 Arah Kebijakan Belanja Bersifat Wajib dan Mengikat Serta Perioritas Utama dan Earmark

Pemerintah Kota Padang, sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menetapkan bahwa belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan pengeluaran yang dibutuhkan secara berkelanjutan dan harus dialokasikan secara memadai untuk memenuhi kebutuhan setiap bulan pada tahun anggaran berjalan, seperti belanja pegawai untuk pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan, serta belanja barang dan jasa untuk pembayaran telepon, air, listrik, dan internet. Sementara itu, belanja daerah yang bersifat wajib merupakan pengeluaran yang menjamin kelangsungan pendanaan pelayanan dasar masyarakat, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan, pemenuhan kewajiban kepada pihak ketiga, pembayaran pokok dan bunga pinjaman yang jatuh tempo, serta kewajiban lain sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, Pemerintah Kota Padang juga mengelompokkan belanja periodik wajib dan mengikat, belanja prioritas utama, serta earmark sebagai pengeluaran yang tidak dapat ditunda, harus dibayarkan dalam tahun anggaran berjalan, dan tidak boleh menjadi utang pada tahun berikutnya. Jenis belanja ini mencakup prioritas utama dalam APBD seperti pembayaran gaji pegawai, belanja bagi hasil kepada pihak terkait sesuai ketentuan, serta pengeluaran rutin untuk mendukung keberlangsungan

pelayanan dasar, misalnya honorarium guru, tenaga medis, dan belanja sejenis lainnya.

Belanja Wajib yang didanai dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ditentukan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kota Padang menetapkan alokasi belanja dari beberapa sumber pendapatan yang penggunaannya telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Alokasi belanja dari Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 10% dari hasil penerimaan pendapatan Opsen PKB digunakan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan, serta peningkatan moda sarana transportasi umum.
2. Alokasi belanja dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tenaga Listrik sebesar 10% dari hasil penerimaan PBJT Tenaga Listrik diperuntukkan bagi penyediaan penerangan jalan umum, yang mencakup pengadaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum, serta pembayaran biaya konsumsi tenaga listriknya.
3. Alokasi belanja dari Pajak Air Tanah (PAT) sebesar 10% dari hasil penerimaan PAT digunakan untuk kegiatan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, termasuk penanaman pohon, pembuatan lubang atau sumur resapan, pelestarian hutan atau pepohonan, dan pengelolaan limbah.
4. Alokasi belanja dari pendapatan bagi hasil Pajak Rokok sebesar 50% dari target penerimaan Pajak Rokok, dengan proporsi 75% (atau 37,5% dari total penerimaan) digunakan untuk pembiayaan jaminan sosial melalui BPJS, dan 25% (atau 12,5% dari total penerimaan) dialokasikan untuk kegiatan penegakan hukum.

Pemerintah Kota Padang hingga saat ini tidak menetapkan kebijakan pembentukan Dana Cadangan serta tidak memiliki kontrak sewa-menyewa jangka panjang. Oleh karena itu, komponen pengeluaran periodik wajib dan mengikat, prioritas utama, serta earmark terbatas pada belanja operasi, meliputi gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan ASN, penerimaan anggota DPRD, operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta belanja bagi hasil kepada pihak terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiadaan Dana Cadangan juga berarti Pemerintah Kota Padang tidak dapat memanfaatkan sumber pembiayaan tersebut. Dengan demikian, penerimaan pembiayaan utama Kota Padang bersumber dari pemanfaatan SILPA tahun anggaran sebelumnya dan khusus tahun 2025 dan 2026 Pemerintah Kota Padang akan melakukan pinjaman daerah yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah

dengan jangka waktu tidak melebihi jangka waktu periode masa jabatan kepala daerah.

2.2.1.2 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk mendanai pembangunan

Penghitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk memberikan gambaran hasil perhitungan kapasitas riil keuangan daerah yang diperlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan. Kapasitas riil keuangan Daerah dihitung dengan mengurangi total penerimaan Daerah yang meliputi Pendapatan, Pencairan Dana Cadangan (sesuai Perda), serta Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran dengan pengeluaran pembiayaan dan belanja tidak langsung.

Berdasarkan pada hasil proyeksi terhadap pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah sebagaimana yang telah disajikan pada sub bab sebelumnya, maka selanjutnya dilakukan perhitungan dan dapat diketahui nilai kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kota Padang untuk tahun 2025 hingga 2030. Berikut ini hasil proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kota Padang pada tahun 2025 hingga 2030 :

Tabel II- 100 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Padang Tahun 2025-2030 (rupiah)

URAIAN	PROYEKSI					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Pendapatan	**2.825.928.928.391**	**3.003.751.563.070**	**5.512.919.000.000**	**5.479.320.000.000**	**5.479.800.000.000**	**5.480.250.000.000**
Penerimaan Pembiayaan	**173.423.285.527**	**340.500.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total Penerimaan Daerah	2.999.352.213.918	3.344.251.563.070	5.512.919.000.000	5.479.320.000.000	5.479.800.000.000	5.480.250.000.000
dikurangi :						
Belanja Pegawai	1.434.861.372.790	1.796.867.552.537	1.826.000.000.000	1.819.000.000.000	1.818.000.000.000	1.818.000.000.000
Belanja Mengikat	926.647.896.941	918.992.805.333	760.000.000.000	746.000.000.000	737.000.000.000	700.000.000.000
Total Belanja Wajib dan Mengikat	13.012.121.209	34.511.149.525	123.919.000.000	101.320.000.000	101.320.000.000	0
Belanja Mengikat Lainnya	2.374.521.390.940	2.725.396.091.803	2.709.919.000.000	2.666.320.000.000	2.656.320.000.000	2.518.000.000.000
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	**627.071.466.375**	**618.855.471.267**	**2.824.000.000.000**	**2.825.000.000.000**	**2.835.480.000.000**	**2.962.250.000.000**

Sumber : BPKAD Kota Padang, data diolah tahun 2025

Kapasitas riil kemampuan keuangan tersebut akan digunakan untuk membiayai program prioritas I, II, dan III sesuai Peraturan Pemerintah No 86 Tahun 2017 pasal 158. Yang dimaksud Prioritas I, antara lain membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar, Prioritas II adalah membiayai pemenuhan visi dan misi kepala daerah, sedangkan Prioritas III meliputi belanja alokasi lainnya, berupa belanja penyelenggaraan urusan pemerintah lainnya.

2.3 Permasalahan dan Isu Strategis

2.3.1 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan Kota Padang dalam hal ini dimaknai sebagai perbedaan antara kondisi yang dicapai (dialami) saat ini dibandingkan dengan kondisi yang seharusnya; atau dapat juga dimaknai sebagai kelemahan atau ancaman yang harus diselesaikan dan diatasi untuk mencapai tujuan atau cita – cita pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Secara umum, tujuan utama pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pembangunan yang adil dan merata dengan indikator antara lain kualitas hidup yang lebih baik, berkurangnya kesenjangan antar wilayah, pertumbuhan ekonomi ramah lingkungan secara merata.

Adapun indikasi permasalahan pembangunan berdasarkan aspeknya adalah sebagai berikut:

2.3.1.1 Permasalahan Aspek Sosial

Sasaran pokok dan hakekat konsep pembangunan pada aspek sosial pada dasarnya adalah mengupayakan peningkatan kesejahteraan sosial dan kualitas sumber daya manusia. Sejalan dengan itu, pengidentifikasian masalah RPJMD Kota Padang tahun 2025-2029 khususnya terkait dengan pembangunan sumber daya manusia tentu perlu dimulai dengan mengevaluasi kinerja tersebut pada RPJMD yang lalu. Parameter pembangunan manusia yang sering digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), walaupun ada indikator lain namun masih jarang digunakan, seperti indeks kebahagiaan, indeks ketaatan, indeks kesejahteraan sosial, dan lain-lain.

RPJMD Kota Padang tahun 2025-2029 meletakkan sasaran pokok pembangunan manusia sebagai prioritas pertama dalam Pembangunan, karena sumberdaya manusia bukan lagi hanya objek, tetapi juga subjek yang akan menentukan ketercapaian tujuan pembangunan daerah. Untuk Kota Padang, sumberdaya manusia yang diharapkan terlibat adalah warga kota yang berpotensi meningkatkan kualitas pembangunan, tidak hanya sekedar mengikuti proses Musrenbang, akan tetapi lebih dari itu, yaitu ikut merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program pembangunan yang ada di lingkungan mereka. Aspek ini penting karena selama ini keterlibatan masyarakat cenderung formalitas saja, tanpa melibatkan mereka secara substantif.

Cita-cita pembangunan manusia yang ditetapkan dimulai dengan mewujudkan kualitas pendidikan keluarga dan masyarakat yang lebih baik. Dalam implementasinya IPM Kota Padang sudah berhasil menunjukkan peningkatan dan bahkan melebihi target yang ditetapkan. Pada tahun 2023, capaian nilai IPM pada RPJMD IV (periode 2020-2025) tercatat mencapai 83,98. Nilai IPM ini tergolong tinggi berdasarkan skala 0-100 yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-

Bangsa (PBB) dalam konsep pembangunan manusia. Namun berdasarkan unsur atau komponen pembentuk IPM, masih terlihat aspek–aspek pembangunan sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan yaitu:

a) Angka harapan hidup Kota Padang tahun 2023 adalah 74,94 namun secara rata – rata selama 20 tahun terakhir adalah 73,48 tahun. Artinya masih diperlukan upaya agar dapat meningkatkan angka ini dengan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dari waktu ke waktu.

b) Rata – rata lama sekolah menunjukan adanya peningkatan selama RPJMD 2019-2024, dan capaian pada tahun 2023 adalah 11,62 tahun. Angka ini menunjukan bahwa penduduk usia di atas 15 tahun secara rata-rata belum tamat Sekolah Lanjutan Atas (SLA), karena untuk menamatkan SLTA angka standarnya adalah 12 tahun.

c) Angka harapan lama sekolah tahun 2023 sebesar 16,56 tahun memperlihatkan bahwa anak-anak usia 7 tahun masih punya peluang (harapan) untuk melanjutkan pendidikannya sampai tingkat sarjana (pendidikan tinggi). Hal ini tentunya memerlukan upaya yang sangat serius untuk mencapainya, dengan memperhatikan angka rata – rata lama sekolah yang belum mencapai 12 tahun.

d) Pengeluaran perkapita penduduk Kota Padang tahun 2023 sebesar Rp15.089.00/tahun atau setara dengan Rp1.257.000/ bulan. Namun demikian, jumlah penduduk miskin di Kota Padang masih tercatat sebanyak 41.970 orang tahun 2023. Ini mengindikasikan bahwa pemerataan pendapatan belum optimal. Jumlah penduduk miskin Kota Padang adalah jumlah terbanyak dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, karena jumlah penduduk Kota Padang juga terbanyak.

e) Permasalahan terkait tumbuh kembang anak dan remaja. Kota Padang menghadapi masalah mulai maraknya tawuran, balap liar, serta penggunaan rokok pada anak menjadi tantangan serius yang memerlukan perhatian bersama. Tawuran dan balap liar tidak hanya membahayakan keselamatan diri sendiri, tetapi juga mengganggu ketertiban umum dan meningkatkan angka kriminalitas. Selain itu, masih minimnya pendidikan seks bagi anak turut menyebabkan meningkatnya risiko seks bebas, kehamilan di luar nikah, dan pernikahan dini. Ditambah lagi, meskipun telah ada regulasi terkait larangan peredaran rokok bagi anak, masih ditemukan warung atau gerai yang menjual rokok secara bebas kepada anak-anak. Di sisi lain, kurangnya infrastruktur ramah anak dan wadah pengisian waktu luang juga menjadi masalah yang perlu segera diatasi, karena anak-

anak membutuhkan ruang yang aman dan nyaman untuk beraktivitas positif. Jika permasalahan ini tidak segera ditangani, dampaknya akan semakin besar terhadap masa depan generasi muda dan masa depan masyarakat Kota Padang.

2.3.1.2 Permasalahan Aspek Ekonomi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Dalam mendukung tercapainya Indonesia Emas 2045, diperlukan upaya yang benar-benar focus dan tepat dalam pemecahan masalah Pembangunan. Hal ini disebabkan oleh semakin dinamisnya perubahan aktivitas ekonomi masyarakat sementara daya dukung lingkungan sangat terbatas, untuk itu diperlukan pengelolaan sumberdaya alam yang penuh kehati-hatian. Terkait dengan hal ini Kota Padang menghadapi beberapa permasalahan Pembangunan. berikut ini adalah beberapa permasalahan perekonomian yang dihadapi oleh Kota Padang.

a) Permasalahan perekonomian makro

1. Perlambatan pertumbuhan ekonomi; lebih dari satu dekade yakni sejak tahun 2014, telah terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi di Kota Padang. Hal ini disebabkan oleh menurunnya pertumbuhan lapangan usaha transportasi dan pergudangan. Sebagai kota jasa dan perdagangan, sektor ini merupakan sektor pendukung yang sangat penting. Untuk itu, pemerintah daerah Kota Padang bersama masyarakat dan pelaku usaha harus mampu menemukan sumber pengungkit ekonomi baru melalui pertumbuhan sektor-sektor lain, seperti industri manufaktur, jasa, dan peningkatan kemampuan teknologi pelaku usaha.
2. Tingginya Tingkat Pengangguran: hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak sejalan dengan penciptaan lapangan kerja yang memadai, sehingga terjadi peningkatan pengangguran. Diperlukan kebijakan dan program yang mendorong investasi dan pengembangan sektor-sektor ekonomi yang dapat menciptakan lebih banyak peluang kerja bagi penduduk Kota Padang.
3. Kesenjangan Ekonomi dan Sosial: Kota Padang memiliki angka ketimpangan yang berada di atas rata-rata Provinsi Sumatera Barat, hal ini diantaranya disebabkan oleh masih adanya ketimpangan pendapatan, akses terhadap layanan publik, dan kesempatan ekonomi yang terbatas. Untuk itu, pada Pembangunan lima tahun mendatang Pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang mendorong peningkatan inklusivitas ekonomi, pemerataan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.
4. Terbatasnya akses terhadap sumber pembiayaan dan modal usaha: Usaha mikro dan kecil masih memiliki masalah dalam

mendapatkan sumber pembiayaan akibat keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan administrasi maupun jaminan lainnya. Akibatnya keterbatasan sumber dana usaha ini menjadi kendala dalam mengembangkan dan memperluas usaha pelaku usaha skala mikro dan kecil. Untuk itu, dalam Pembangunan mendatang diperlukan upaya untuk meningkatkan akses ke pembiayaan bagi pelaku usaha dengan melakukan pendekatan perbankan yang inklusif, koperasi yang sehat serta program dukungan keuangan untuk UMKM, dan fasilitasi akses ke pasar dan jejaring bisnis baik lokal, regional maupun internasional.

5. Peningkatan Persaingan dan Globalisasi: Persaingan yang semakin ketat dan penetrasi pasar global menjadi tantangan dan permasalahan bagi pelaku usaha di Kota Padang. Pengusaha lokal dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perubahan pasar yang bergerak semakin cepat dan dinamis. Dibutuhkan dukungan kebijakan pemerintah untuk dapat meningkatkan daya saing produk, dan memperkuat inovasi agar pelaku usaha lokal mampu bersaing di pasar global.

b) Permasalahan Lapangan Usaha Industri Pengolahan

1. Penurunan kontribusi dan laju pertumbuhan industri: lapangan usaha industri Kota Padang didominasi oleh Industri Kecil dan Mikro yang rentan terhadap fluktuasi ekonomi, untuk itu upaya penguatan melalui peningkatan diversifikasi usaha industri menjadi penting untuk menciptakan ekonomi yang beragam, tangguh, dan berkelanjutan

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia Terampil: Keterbatasan tenaga kerja terampil dan kurangnya keterampilan dan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan industri menjadi penghambat pertumbuhan dan inovasi industri di Kota Padang. Diperlukan upaya untuk meningkatkan pelatihan dan pendidikan vokasional yang relevan dengan kebutuhan industri.

3. Kurangnya Keterampilan Manajerial: Kurangnya keterampilan manajerial dan keahlian dalam mengelola usaha industri menjadi hambatan bagi perkembangan dan keberlanjutan usaha. Pengelolaan yang efektif meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengambilan keputusan yang baik. Diperlukan kebijakan pemerintah untuk peningkatan keterampilan manajerial dan pengetahuan bisnis untuk meningkatkan kinerja usaha industri di Kota Padang.

4. Kurangnya Inovasi dan R&D: Kurangnya investasi dalam penelitian dan pengembangan (R&D) serta kurangnya inovasi dapat menghambat pertumbuhan dan daya saing usaha dan produk hasil usaha pelaku usaha di Kota Padang. Diperlukan dukungan kebijakan untuk mendorong kemampuan

perusahaan mengembangkan inovasi baru, meningkatkan efisiensi proses produksi, dan mengadopsi teknologi baru guna meningkatkan kualitas produk dan efisiensi operasional untuk dapat bertahan di tengah persaingan global.

5. Kurang optimalnya implementasi Rencana Pengembangan Industri: Pelaksanaan perencanaan pengembangan industri belum optimal hal ini berdampak pada belum dapat diwujudkannya pengelolaan usaha yang sesuai dengan standar di Kota Padang. Tanpa mempedomani perencanaan yang telah dibuat maka pengembangan tidak berjalan secara efisien dan terkoordinasi.

c) Permasalahan Lapangan Usaha Perdagangan

1. Terbatasnya Infrastruktur Perdagangan: terbatasnya fasilitas dan infrastruktur perdagangan yang memadai, seperti pusat perbelanjaan modern yang nyaman, pasar tradisional yang efisien, menjadi hambatan bagi perkembangan usaha perdagangan di Kota Padang. Infrastruktur yang terbatas dapat menghambat efisiensi operasional dan memberikan pengalaman belanja yang kurang memadai bagi konsumen. Untuk itu pada Pembangunan lima tahun ke depan, perlu diupayakan peningkatan kualitas infrastruktur perdagangan kota agar kota Padang dapat menjadi pusat perdagangan yang mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan perekonomian daerah.

2. Perubahan Pola Konsumsi dan Tren Belanja: terjadinya perubahan pola konsumsi dan tren belanja masyarakat menjadi tantangan bagi pelaku usaha perdagangan di Kota Padang. Perkembangan teknologi dan pergeseran preferensi konsumen mengharuskan pelaku usaha untuk beradaptasi dan menyesuaikan model bisnis mereka. Usaha yang tidak mampu mengikuti tren konsumen dapat kehilangan daya saing dan pelanggan.

3. Perkembangan Teknologi dan *E-commerce*: Perkembangan teknologi dan penetrasi *e-commerce* memiliki dampak signifikan pada pelaku usaha perdagangan di Kota Padang. Perusahaan yang tidak mengadopsi atau beradaptasi dengan perubahan teknologi dan tren *e-commerce* dapat tertinggal dalam persaingan dan kehilangan pangsa pasar. Perlu dukungan kebijakan akan pelaku usaha perdagangan kota Padang

4. Masih terbatasnya pemahaman tentang Prilaku Pasar: Kurangnya pemahaman tentang perilaku pasar, kebutuhan konsumen, dan tren bisnis menjadi penghambat dalam pengelolaan usaha perdagangan di Kota Padang. Pengetahuan yang terbatas menangani perubahan perilaku dalam pasar

akan menyulitkan dalam pengambilan keputusan strategis dan pengembangan pemasaran yang efektif.

5. Terbatasnya Kemampuan/Keahlian Manajerial: Kurangnya keahlian manajerial pelaku usaha dalam pengelolaan usaha perdagangan menjadi kendala pengembangan usaha ini di Kota Padang. Manajemen yang efektif diperlukan dalam hal pengelolaan stok, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia. Kurangnya keahlian ini dapat mempengaruhi efisiensi operasional dan pertumbuhan usaha.

d) Permasalahan Lapangan Usaha Pariwisata

1. Belum optimalnya Pengelolaan Destinasi Wisata: Pengelolaan yang tidak memadai terhadap destinasi wisata, termasuk kurangnya perencanaan pengembangan, regulasi yang tidak efektif, dan pengelolaan yang tidak terkoordinasi, dapat mempengaruhi pengalaman wisatawan. Kurangnya optimalnya pengelolaan destinasi wisata dapat berakibat juga terhadap kerusakan lingkungan, peningkatan konflik sosial, dan ketidakseimbangan antara kebutuhan pariwisata dan masyarakat lokal.

2. Keterbatasan Infrastruktur Pariwisata: masih terbatasnya kualitas dan kuantitas serta pemerataan infrastruktur pariwisata yang memadai, seperti keterbatasan fasilitas transportasi, fasilitas akomodasi atau kurangnya sarana dan prasarana pendukung pariwisata, dapat menghambat pengembangan pariwisata di Kota Padang. Kurangnya infrastruktur yang memadai dapat membatasi jumlah wisatawan yang dapat ditampung dan mengurangi kenyamanan pengalaman wisatawan.

3. Kurangnya Kesadaran akan Keberlanjutan Lingkungan: Kurangnya kesadaran dan upaya dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dalam pengelolaan pariwisata dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Ketidakpedulian terhadap lingkungan dapat merusak daya tarik pariwisata alam di Kota Padang dan berdampak negatif pada kunjungan wisata ke destinasi wisata di kota Padang.

4. Kurangnya kesadaran dan Keterlibatan Masyarakat Lokal: Kurangnya kesadaran dan keterlibatan serta partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata menyulitkan dalam mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Masyarakat lokal memiliki berperan dan kepentingan dalam pengelolaan destinasi wisata, untuk itu pemahaman tentang nilai-nilai kepariwisataan serta keterampilan dalam melayani akan dapat meningkatkan kualitas keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan dan

manfaat ekonomi yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan pariwisata secara keseluruhan.

5. Terbatasnya kemampuan manajerial, Pendidikan, dan Pelatihan dalam Industri Pariwisata: Kurangnya kemampuan manajerial karena keterbatasan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dalam industri pariwisata menjadi hambatan dalam pengelolaan pariwisata di Kota Padang. Tenaga kerja yang kurang terlatih dalam bidang pariwisata dapat mengurangi kualitas pelayanan dan pengalaman wisatawan.

Selanjutnya beberapa permasalahan dalam pengelolaan sumber daya alam yang dihadapi oleh Kota Padang:

1. Terbatasnya kapasitas dalam pengelolaan Kualitas lingkungan: Pertumbuhan perkotaan yang pesat dan aktivitas manusia yang intensif dapat menyebabkan kualitas lingkungan di Kota Padang mengalami degradasi. Pembangunan kawasan permukiman yang sulit dikendalikan, polusi udara, pencemaran air, dan akumulasi sampah menjadi faktor yang merusak ekosistem alam dan mengancam keberlanjutan lingkungan.
2. Konflik pemanfaatan Sumber Daya Alam: Adanya persaingan dan konflik terkait penggunaan sumber daya alam antara berbagai pihak, seperti masyarakat lokal, perusahaan, dan pemerintah, konflik mengenai akses dan pengelolaan lahan, konflik agraria terkait tanah, dan konflik terkait pemanfaatan sumber daya perikanan. Konflik semacam ini menjadi faktor yang menghambat pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
3. Terbatasnya kesadaran dan Pemberdayaan Masyarakat: Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam, kurangnya akses masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan dan kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan menjadi penyebab terjadinya penggunaan yang tidak bertanggung jawab dan penyalahgunaan sumber daya alam.
4. Perubahan Iklim dan Bencana Alam: Kota Padang memiliki kerentanan yang tinggi terhadap permasalahan perubahan iklim dan berbagai jenis bencana alam, seperti banjir, longsor, cuaca ekstrim, dan gempa bumi. Dampak perubahan iklim berpengaruh serius terhadap sektor-sektor strategis seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata. Selain itu, hal tersebut diperburuk dengan permasalahan lainnya seperti peningkatan emisi gas rumah kaca, degradasi kawasan pesisir, alih fungsi lahan, lemahnya pengendalian tata ruang, serta kerusakan

daerah aliran sungai (DAS). Tanpa kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang responsif terhadap perubahan iklim, risiko terhadap masyarakat dan infrastruktur akan terus meningkat. Maka, integrasi antara aspek lingkungan, mitigasi risiko bencana, dan penguatan kelembagaan, serta dokumen perencanaan, menjadi kebutuhan mendesak dalam strategi pembangunan Kota Padang.

5. Pencemaran Air dan Sungai: Kegiatan industri, pertambangan, dan permukiman yang tidak terkendali telah menyebabkan pencemaran air dan sungai di Kota Padang. Pencemaran ini dapat merusak ekosistem air, mengurangi kualitas air minum, dan berdampak negatif pada kesehatan masyarakat.

2.3.1.3 Permasalahan Aspek Lingkungan dan Wilayah

Cakupan pembangunan infrastruktur dan lingkungan mencakup berbagai aspek yang berhubungan dengan pengembangan dan peningkatan sistem fisik yang mendukung kehidupan manusia serta upaya menjaga dan melindungi lingkungan alam. Beberapa bidang yang termasuk dalam cakupan tersebut adalah

1. Infrastruktur Transportasi: meliputi pembangunan jalan, jembatan, rel kereta api, pelabuhan, bandara, dan sistem transportasi umum lainnya;
2. Infrastruktur Air: meliputi pembangunan dan pengelolaan sistem penyediaan air bersih, pengelolaan air limbah, bendungan, saluran irigasi, dan sistem drainase;
3. Infrastruktur Telekomunikasi: melibatkan pembangunan jaringan telekomunikasi seperti telepon seluler, internet, dan penyediaan akses komunikasi yang cepat dan terjangkau;
4. Infrastruktur Publik: termasuk pembangunan fasilitas publik seperti rumah sakit, sekolah, Ruang Terbuka Hijau, prasarana dan sarana umum lainnya, gedung pemerintahan; Pembangunan Perumahan: meliputi pembangunan hunian, permukiman, dan fasilitas pendukungnya seperti jalan lingkungan, saluran air, dan sistem sanitasi;
5. Perlindungan Lingkungan: melibatkan upaya pelestarian dan rehabilitasi lingkungan alam, pengelolaan limbah, perlindungan sumber daya alam, pengendalian polusi udara dan air, serta pengelolaan taman nasional dan kawasan konservasi.

Permasalahan yang termasuk aspek fisik lingkungan yang berhasil diidentifikasi secara umum adalah sebagai berikut:

a) Permasalahan transportasi berkelanjutan;

Permasalahan transportasi di Kota Padang mengakibatkan berbagai masalah yang mempengaruhi mobilitas, efisiensi, kualitas udara, dan

kehidupan sehari-hari penduduk perkotaan. Berikut adalah beberapa permasalahan umum dalam transportasi perkotaan:

1. Kemacetan lalu lintas: Kemacetan lalu lintas merupakan permasalahan yang umum di kota-kota besar. Jumlah kendaraan yang tinggi, kurangnya infrastruktur jalan yang memadai, dan kepadatan populasi menyebabkan kemacetan yang semakin parah. Kemacetan berdampak pada waktu tempuh yang lebih lama, meningkatkan konsumsi bahan bakar, polusi udara, dan stres bagi pengendara yang berdampak terhadap penurunan kualitas hidup.

2. Keterbatasan aksesibilitas: Tidak semua penduduk perkotaan memiliki akses yang sama terhadap transportasi yang terjangkau dan efisien. Kawasan-kawasan tertentu, terutama yang di wilayah pinggiran, tak jarang akan mengalami keterbatasan dalam akses ke layanan transportasi publik yang memadai. Hal ini dapat menyebabkan ketimpangan sosial dan ekonomi. Meskipun demikian, Kota Padang sudah mengarahkan penyediaan transportasi angkutan umum massal yang terintegrasi.

   Berdasarkan pola pelayanan angkutan umum, maka dapat dilihat bahwa rute angkutan umum di Kota Padang bersifat radial konsentris, yang artinya semua pelayanan masih terpusat pada satu titik saja sehingga dapat menimbulkan kemacetan di daerah perkotaan. Selain itu, sistem pengelolaan angkutan umum yang ada menjadi tantangan tersendiri dalam memberikan pelayanan angkutan umum sehingga menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat, kinerja pelayanan yang rendah, keselamatan, kenyamanan, keamanan, dan kecelakaan lalu lintas.

   Untuk itu, sangatlah penting untuk membangun infrastruktur yang mendukung integrasi angkutan umum, seperti stasiun transfer, terminal intermoda, dan fasilitas yang memungkinkan transfer yang lancar antara mode transportasi. Jaringan jalan dan jalur yang terhubung dengan baik, termasuk jalur sepeda dan trotoar yang aman, juga penting dalam mendukung integrasi angkutan umum.

   Pengguna angkutan umum perlu memiliki akses mudah ke informasi mengenai jadwal, rute, tarif, dan mode transportasi yang tersedia. Pengembangan aplikasi atau platform teknologi yang memungkinkan pengguna untuk melacak dan merencanakan perjalanan mereka dengan mudah sehingga dapat meningkatkan keterjangkauan dan kenyamanan pengguna. Sistem pembayaran elektronik yang terintegrasi juga dapat memfasilitasi penggunaan berbagai mode transportasi dengan satu kartu atau aplikasi integrasi angkutan umum

membutuhkan kerjasama yang baik antara operator transportasi yang berbeda. Ini melibatkan koordinasi jadwal, integrasi tarif, dan pertukaran informasi operasional antara operator bus, kereta, dan transportasi lainnya. Kerjasama juga dapat melibatkan pengembangan layanan transfer yang efisien dan penggunaan bersama infrastruktur yang ada.

Pemerintah dapat memainkan peran penting dalam menciptakan kebijakan dan regulasi yang mendukung integrasi angkutan umum. Ini meliputi penyusunan kebijakan tarif yang terkoordinasi, pengaturan lisensi dan perizinan yang memungkinkan kerjasama antara operator, dan insentif untuk mendorong kolaborasi dalam penyediaan layanan terintegrasi.

Integrasi angkutan umum memiliki potensi untuk meningkatkan mobilitas, mengurangi kemacetan, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan meningkatkan kualitas hidup di perkotaan. Namun, upaya integrasi ini membutuhkan kerjasama aktif antara pemerintah, operator transportasi, dan pemangku kepentingan terkait untuk mencapai sistem transportasi yang terpadu, efisien, dan ramah pengguna.

3. Ketergantungan pada kendaraan pribadi: Banyak penduduk perkotaan mengandalkan kendaraan pribadi untuk mobilitas mereka. Ketergantungan ini mengakibatkan peningkatan volume kendaraan di jalan-jalan perkotaan, hal ini menyebabkan kemacetan dan polusi udara. Selain itu, keberadaan kendaraan pribadi yang berlebihan juga menyebabkan kekurangan ruang parkir dan penggunaan lahan yang tidak efisien. Hal ini juga berkaitan dengan penyediaan angkutan umum massal yang handal sehingga masyarakat mau beralih dalam menggunakan angkutan umum.
4. Infrastruktur transportasi yang tidak memadai: Infrastruktur transportasi yang kurang memadai, termasuk jaringan jalan yang terbatas, sistem transportasi publik yang tidak efisien, dan kurangnya aksesibilitas bagi pejalan kaki dan pesepeda, menyebabkan permasalahan mobilitas di perkotaan. Penduduk seringkali mengalami kesulitan dalam mencapai tujuan dengan mudah dan efisien.
5. Polusi udara dan dampak kesehatan: Lalu lintas perkotaan merupakan sumber utama polusi udara, dengan emisi gas buang kendaraan yang mengandung zat berbahaya. Paparan terhadap polusi udara perkotaan dapat menyebabkan masalah kesehatan serius, termasuk gangguan pernapasan, alergi, penyakit kardiovaskular, dan risiko kanker.
6. Ketidakberlanjutan energi dan emisi gas rumah kaca: Transportasi perkotaan juga berkontribusi terhadap perubahan

iklim melalui emisi gas rumah kaca. Penggunaan bahan bakar fosil dalam kendaraan berkontribusi pada peningkatan emisi CO2, yang mempercepat pemanasan global. Kurangnya transportasi berkelanjutan dan efisiensi energi dalam sistem transportasi perkotaan menjadi permasalahan yang perlu diatasi.

b) Permasalahan Pengembangan Infrastruktur berkelanjutan

Infrastruktur merujuk kepada rangkaian fasilitas fisik yang dibangun dan diperlukan untuk mendukung berbagai kegiatan dan fungsi masyarakat. Infrastruktur berperan sebagai tulang punggung ekonomi dan kehidupan masyarakat. Investasi yang tepat dalam infrastruktur yang memadai dan terpelihara dengan baik dapat menghasilkan efisiensi ekonomi, pertumbuhan, dan peningkatan kualitas hidup. Infrastruktur yang baik juga berperan penting dalam menghadapi tantangan modern, seperti urbanisasi yang pesat, perubahan iklim, dan kebutuhan akan teknologi yang canggih.

Infrastruktur meliputi aspek Sumber Daya Air (Bangunan Pantai, Sungai, irigasi), Jalan Jembatan, Perumahan dan Permukiman, Darinase dan Prasarana Umum, Sanitasi dan Pengelolaan Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah, Air Minum, Sumber Daya Energi Terbarukan dan Kelistrikan.

Adapun Permasalahan masing-masing aspek infrastruktur adalah:

1) Sumber Daya Air (Bangunan Pantai, Irigasi, Sungai); Permasalahan sumber daya air perkotaan adalah isu yang signifikan di banyak kota di seluruh dunia, termasuk kota Padang sebagai ibukota provinsi Sumatera Barat. Permasalahan terkait dengan sumber daya air perkotaan antara lain:

   a. Kekurangan pasokan air: Kepadatan dan peningkatan jumlah populasi yang tinggi di perkotaan seringkali melebihi kapasitas infrastruktur air yang ada. Hal ini mengakibatkan kekurangan pasokan air bersih bagi penduduk perkotaan. Ketika pasokan air tidak mencukupi, masyarakat bisa mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti air minum, sanitasi, dan kebersihan.

   b. Pencemaran air: Pertumbuhan perkotaan yang cepat juga berkontribusi terhadap pencemaran air. Hal ini juga terjadi di kota Padang, dimana penyebab pencemaran air diantaranya adalah adanya limbah industri, limbah rumah sakit, dan pembuangan sampah yang tidak tepat dapat. Pencemaran ini berdampak negatif pada kualitas air dan dapat menyebabkan masalah kesehatan bagi masyarakat yang mengandalkan sumber air tersebut.

   c. Infrastruktur air yang tidak memadai: Sistem infrastruktur air

yang belum memadai untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang terus berkembang. Saluran air yang tua dan rusak, jaringan distribusi yang buruk, dan sistem penyediaan air yang tidak efisien menyebabkan kerugian air yang signifikan dan ketidakmerataan akses air bersih di berbagai daerah perkotaan.

d. Pengelolaan air yang tidak efisien: Kurang efisiennya pengelolaan sumber daya air seperti belum adanya pengaturan yang jelas terkait pemanfaatan air, kehilangan air yang tinggi akibat kebocoran, serta belum optimalnya upaya konservasi sumber daya air.

e. Perubahan iklim: Peningkatan suhu dan intensitas hujan ekstrim, serta periode kekeringan yang lebih panjang berdampak signifikan terhadap sumber daya air. Kondisi ini mengganggu ketersediaan air bersih dan meningkatkan risiko banjir, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki risiko iklim tinggi, sementara di sisi lain, infrastruktur pengelolaan air belum memadai.

2) Perumahan dan Permukiman; Permasalahan perumahan dan permukiman perkotaan adalah hal yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek. Adapun permasalahan yang terkait dengan perumahan dan permukiman di kota Padang adalah:

3) Kekurangan perumahan terjangkau: Harga perumahan yang tinggi akibat tingginya permintaan menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak. Hal ini dapat mengakibatkan konsekuensi sosial dan ekonomi, seperti meningkatnya jumlah tunawisma atau penduduk yang tinggal dalam kondisi perumahan yang buruk.

4) Permasalahan air minum: masalah air minum di Kota Padang meliputi beberapa isu , sebagai berikut:

a) Akses Terbatas: Salah satu permasalahan utama adalah akses terbatas terhadap pasokan air minum yang bersih dan aman. Beberapa daerah di Kota Padang masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan pasokan air yang memadai dan berkualitas. Hal ini diantaranya disebabkan adanya ketidakmerataan infrastruktur, terutama di daerah perkotaan yang padat penduduk.

b) Kualitas Air: Kualitas air minum juga menjadi perhatian di Kota Padang. Standar kualitas air minum yang tidak terpenuhi dapat berpotensi menyebabkan masalah kesehatan bagi penduduk yang mengkonsumsinya.

c) Sanitasi yang Buruk: Praktik sanitasi yang buruk, termasuk sanitasi yang tidak memadai di rumah tangga dan sistem pembuangan limbah yang tidak efisien, dapat berkontribusi

terhadap pencemaran sumber air. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan kualitas air minum dan risiko terhadap kesehatan masyarakat.

d) Kerentanan terhadap Bencana: Kota Padang juga memiliki kerentanan terhadap bencana alam seperti banjir dan gempa bumi. Bencana-bencana ini dapat merusak infrastruktur penyediaan air minum dan mengganggu distribusi air minum kepada masyarakat. Pasokan air minum yang terputus dapat berdampak negatif pada kesehatan dan kesejahteraan penduduk.

e) Keberlanjutan Sumber Daya Air: Pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan haarus menjadi perhatian di Kota Padang. Pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan perubahan iklim dapat memberikan tekanan tambahan pada pasokan air. Keberlanjutan sumber daya air memerlukan manajemen yang baik, perlindungan terhadap daerah tangkapan air, dan penggunaan yang efisien serta adil.

5) Masalah Pengelolaan Lingkungan dan Kebencanaan; Permasalahan lingkungan di Kota Padang mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi kualitas hidup manusia dan ekosistem di sekitarnya. Berikut adalah beberapa permasalahan lingkungan umum yang terjadi di Kota Padang:

a) Pencemaran udara: Pencemaran udara merupakan salah satu dampak lingkungan serius yang timbul dari berbagai aktivitas antropogenik, termasuk sektor energi (pembakaran bahan bakar fosil), industri, pertanian, kehutanan dan perubahan penggunaan lahan (land use change), serta pengelolaan limbah yang tidak optimal. Aktivitas-aktivitas ini menghasilkan berbagai polutan berbahaya, seperti Karbon Dioksida (CO2), Dinitrogen Oksida (N2o), dan Metana (CH4) yang dapat terakumulasi di atmosfer dan memperburuk kualitas udara. Peningkatan konsentrasi polutan tersebut berisiko menimbulkan dampak kesehatan yang signifikan, antara lain gangguan saluran pernapasan, iritasi mata dan tenggorokan, serta peningkatan prevalensi penyakit kronis seperti asma, bronkitis, dan penyakit paru obstruktif kronik.

b) Pencemaran air: Pencemaran air di perkotaan umumnya disebabkan oleh pembuangan limbah industri dan domestik yang tidak terkelola dengan baik. Limbah kimia dan zat berbahaya lainnya mencemari sumber air permukaan dan tanah, mengancam kehidupan akuatik dan kesehatan manusia yang mengandalkan air tersebut. Selain itu, aliran permukaan yang buruk dan saluran pembuangan yang tidak memadai dapat menyebabkan banjir dan genangan air yang membawa polutan.

c) Pengelolaan limbah: Pertumbuhan aktivitas masyarakat perkotaan menghasilkan volume limbah yang besar. Jika pengelolaan limbah tidak efisien, limbah dapat menumpuk di tempat pembuangan akhir yang tidak memadai atau bahkan dibuang secara ilegal, menyebabkan masalah pencemaran lingkungan dan kesehatan masyarakat.

d) Kehilangan habitat dan keragaman hayati: Perkembangan perkotaan seringkali mengakibatkan konversi lahan yang luas menjadi kawasan perkotaan, yang mengakibatkan hilangnya habitat alami dan berkurangnya keragaman hayati. Kehilangan habitat mengancam kelangsungan hidup spesies-spesies tanaman dan hewan, serta menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem perkotaan.

e) Efisiensi energi dan emisi gas rumah kaca: Kurangnya perhatian terhadap efisiensi energi di wilayah perkotaan menjadi salah satu permasalahan utama dalam pengendalian emisi gas rumah kaca. Sektor energi dan produksi industri merupakan kontributor signifikan terhadap emisi Gas Rumah Kaca. Ketergantungan yang tinggi terhadap sumber energi berbasis bahan bakar fosil, tanpa diimbangi oleh upaya konservasi energi dan pemanfaatan energi terbarukan dapat mempercepat laju emisi karbon dan memperburuk dampak perubahan iklim global. Permasalahan ini menunjukkan perlunya transformasi sistem energi kota menuju model yang lebih efisien, rendah karbon, dan berkelanjutan.

f) Ketidakseimbangan ekosistem perkotaan: Pertumbuhan perkotaan seringkali menyebabkan ketidak-seimbangan ekosistem, dengan semakin berkurangnya ruang terbuka hijau, keterbatasan akses ke taman dan area rekreasi, serta degradasi lingkungan alami. Kurangnya ruang terbuka dan lingkungan yang buruk dapat berdampak negatif pada kesehatan dan kesejahteraan penduduk perkotaan.

Dalam upaya mewujudkan kota Padang sebagai kota Pintar (*Smart City*) maka upaya mengatasi permasalahan di atas diperlukan pendekatan sosial ekonomi dan lingkungan, dengan menerapkan pendekatan ini diharapkan akan dapat ditemukan solusi yang holistik, berkelanjutan, dan mempertimbangkan kepentingan semua pemangku kepentingan. Hal ini dapat mengarah pada pembangunan yang lebih seimbang dan berkelanjutan, di mana keberlanjutan ekonomi tidak dikorbankan untuk kepentingan lingkungan dan sosial, demikian juga sebaliknya.

2.3.1.4 Permasalahan Aspek Kelembagaan dan Tata Kelola Pemerintahan

Dalam aspek kelembagaan dan tata kelola Pemerintah Kota Padang senantiasa mengikuti kebijakan Pemerintah Pusat. Setiap kali ada

perubahan regulasi, maka Pemerintah Kota Padang senantiasa mengimplementasikannya di daerah dalam upaya menghasilkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Salah satunya adalah melaksanakan agenda reformasi birokrasi yang telah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan. Reformasi birokrasi menjadi program yang sangat penting dan wajib dilaksanakan oleh seluruh pemerintah daerah. Reformasi birokrasi merupakan suatu kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik akan mempercepat perputaran roda pembangunan nasional dan daerah. Reformasi birokrasi ditandai dengan adanya grand design sejak tahun 2010 dalam upaya menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (world class bureaucracy) yang bercirikan diantaranya pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola organisasi yang semakin efisien dan efektif.

Pemerintahan di Kota Padang telah mengarah pada praktik paradigma New Public Management yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan efektifitas, efisiensi, pemerintahan berorientasi pada hasil serta New Public Service (Governance) yang ditunjukkan dengan adanya keterlibatan aktor lain di luar pemerintah dalam kedudukan yang sama seperti dunia usaha, masyarakat sipil dan media masa. Selain itu kinerja pelayanan publik cenderung meningkat dan responsif terhadap perubahan melalui inovasi daerah berbasis kebutuhan masyarakat dan teknologi informasi.

Namun demikian masih terdapat beberapa persoalan daerah terkait dengan kelembagaan dan reformasi birokrasi yang harus mendapat perhatian dalam Pembangunan lima tahun mendatang, yakni:

1) Pelaksanaan reformasi birokrasi belum maksimal hal ini karena belum terkoordinasi secara baik antar SKPD. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Padang pada tahun 2022 mencapai nilai 75,1 (BB) namun di tahun 2023 turun menjadi 73,6 (BB). Berbagai upaya seperti penggunaan E-Government dalam pelayanan publik dan adanya Mall Pelayanan Publik (MPP) telah dan harus terus dilakukan serta ditingkatkan kualitasnya.
2) Penyederhanaan organisasi dan deregulasi kebijakan di daerah terkait dengan reformasi birokrasi masih cenderung sentralistik kepada kebijakan pemerintah daerah. Penataan sumber daya manusia aparaturur, kelembagaan, regulasi organisasi berdampak pada lambatnya perubahan mindset dan budaya kinerja di lingkungan organisasi pemerintah daerah.

Kuantitas dan kualitas aparaturur serta budaya kerja masih belum optimal dan tidak terdistribusi dengan merata. Hal ini berdampak pada kegiatan-kegiatan pemberdayaan dan pembangunan khususnya pada

tingkat kelurahan. Akselerasi pembangunan pada tingkat kelurahan kurang berjalan dengan baik

2.3.1.5 Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Kota Padang Tahun 2019-2024

Perumusan permasalahan juga tidak lepas dari capaian kinerja RPJMD sebelumnya yang digunakan sebagai *input* tambahan. Berikut terlampir tabel ketercapaian dan evaluasi RPJMD Kota Padang Tahun 2019-2024.

Tabel II- 101 Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Kota Padang Tahun 2019-2024

Misi / Tujuan/ Sasaran Strategis		Indikator		Kondisi Awal (2019)	Target Akhir (2024)	Target RPJMD pada RKPD					Realisasi RPJMD pada Pelaksanaan RKPD						Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)	Ket.
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19
MISI 1 : Meningkatkan Kualitas Pendidikan untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Kreatif, Inovatif dan Berdaya Saing																			
	Mewujudkan SDM Kota Padang yang beriman kreatif, inovatif dan berdaya saing		Indeks Pembangunan Manusia (nilai)	82,68	84,65	82,4	82,15	83.43	84,11	84,65	82,82	82,9		83,98	84,38		84,38	102,06	nilai tinggi itu baik
1	Meningkatnya kualitas pendidikan dasar	1	Rata-rata lama sekolah (tahun)	11,34	12,01	11,45	11,45	11,72	11,77	12,01	11,58	11,59	11,6	11,62	11,63		11,63	102,56	nilai tinggi itu baik
		2	Harapan lama sekolah	16,51	17,35				16,56	17,35	16,52	16,53	16,54	16,56	16,57		16,57	100,36	nilai tinggi itu

Misi / Tujuan/ Sasaran Strategis		Indikator		Kondisi Awal (2019)	Target Akhir (2024)	Target RPJMD pada RKPD					Realisasi RPJMD pada Pelaksanaan RKPD						Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)	Ket.
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19
			(tahun)																baik
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	3	Angka Harapan Hidup (tahun)	73,57	73,68				74,94	74,1	73,65	74,47	73,71	74,94	75,2		75,2	102,22	nilai tinggi itu baik
		4	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (SSGI)	-	14	-	-	-	15	-	-	-	19,5 (SSGI),	24,2	belum rilis		belum rilis	belum bisa dihitung	nilai semakin rendah semakin baik
		5	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (E-PPGBM)	-	6,5	-	-	-	7	6,5	9,1	7,09	4,69 (e-PPGBM)	2,65	2,5		2,5	tidak ada target kondisi awal	nilai semakin rendah semakin baik
3	Meningkatnya kesetaraan gender	6	Indeks pembangunan gender (nilai)	93,48	94,3	94,82	93,77	93,85	93,88	94,3	93,64	93,81	93,85	93,94	94,04		94,04	100,6	nilai tinggi itu baik
4	Meningkat	7	Pengeluara	14.728	15.302	14.48	14.8	14.728	14.987	15.302	14.481	1.454	14.889	15.089	15.458		15.458	104,96	nilai

Misi / Tujuan/ Sasaran Strategis		Indikator		Kondisi Awal (2019)	Target Akhir (2024)	Target RPJMD pada RKPD					Realisasi RPJMD pada Pelaksanaan RKPD						Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)	Ket.
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19
	nya Kesejahteraan Masyarakat		n Perkapita (Rp ribu)																tinggi itu baik
MISI 2 : Mewujudkan Kota Padang Yang Unggul, Aman, Bersih, Tertib, Bersahabat dan Menghargai Kearifan Lokal																			
	Terwujudnya Kota Padang yang layak huni		Indeks Kota Layak Huni / Liveable city Index (nilai)	56,5	68,3	57	68,03	68,08	68,15	68,3	67,98	65,13	68,2	68,28	68,92		68,92	121,98	nilai tinggi itu baik
5	Meningkatnya layanan transportasi perkotaan.	8	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perhubungan (nilai)	82	84,7	83	84	83,5	84	84,7	79	77,24	83,5	78,6	86,36		86,36	105,32	nilai tinggi itu baik
6	Meningkatnya permukiman layak huni	9	Persentase perumahan dan permukiman yang layak (persen)	73,2	81,16		75,37	76,58	78,95	81,16	74,16	74,08	76,58	77,82	97,05		97,05	132,58	nilai tinggi itu baik

Misi / Tujuan/ Sasaran Strategis		Indikator		Kondisi Awal (2019)	Target Akhir (2024)	Target RPJMD pada RKPD					Realisasi RPJMD pada Pelaksanaan RKPD						Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)	Ket.
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19
7	Meningkatnya ketentraman, ketertiban dan keamanan didalam masyarakat.	10	Angka Kriminalitas (angka)	3.5	1.875	3.300,00	3.150,00	2.175,00	2.045,00	1.875,00	3.300,00	1.104,00	1.291,00	1.968,00	1.789		1.789	195,64	nilai rendah itu baik
8	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan sanitasi	11	Indeks kualitas lingkungan hidup (nilai)	68	68,6	68,2	68,3	68,5	71,32	68,6	68,41	70,07	70,82	72,28	77,26		77,26	113,62	nilai tinggi itu baik
		12	Luas Kawasan kumuh yang ditangani (Ha)	27,18	122,33	6,12	34,76	63,95	83,95	122,33	10,29	39,68	63,95	84,62	122,33		122,33	450,07	nilai tinggi itu baik
MISI 3 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang yang Inklusif																			
	Terwujudnya Pertumbuhan		Pertumbuhan ekonomi (%)	5,65	4,43	6,15	2,5	3,14	4,43	4,77	-1,86	3,66	4,33	4,54	4,65		4,65	82,3	nilai tinggi itu baik

Misi / Tujuan/ Sasaran Strategis		Indikator		Kondisi Awal (2019)	Target Akhir (2024)	Target RPJMD pada RKPD					Realisasi RPJMD pada Pelaksanaan RKPD						Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)	Ket.
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19
	Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan		Gini Rasio (nilai)	0,31	308	0,33	0,31	309	308	307	0,31	343	354	312	324		324	104,52	nilai rendah itu baik
9	Meningkatnya kesempatan kerja	13	Tingkat Penganggguran Terbuka (%)	8,76	12,86	9,1	11,01	13,3	10,74	10,16	13,64	13,37	11,69	10,86	9,88		9,88	112,79	nilai rendah itu baik
10	Meningkatnya tingkat perekonomian penduduk	14	Tingkat kemiskinan (%)	4,68	4,1	4,65	4,6	4,33	4,22	4,1	4,4	4,94	4,26	4,17	4,06		4,06	115,27	nilai rendah itu baik
		15	PDRB per-kapita (ADHB) (Rp) ribu	65	82.040,00	67.500,00	65.000,00	73.000,00	77.230,00	82.04	64.660,00	71.360,00	79.379,91	84.530,00	84.182,56		84.182,56	129,51	nilai tinggi itu baik
11	Meningkatnya investasi	16	nilai PMA (Rp.x 1000)	223.221.600		322.142.968	250.000.000	245.719.178	253.424.658	253.424.662.400	699.969.600	559.530.400	829.159.345	821.981.804	225.119.940		225.119.940	100,85	nilai tinggi itu baik
			Nilai PMA (US$)	15.082.541	17.123.287,67				17.123.287,67		47.295.243	37.806.108	56.024.280	55.539.311	15.007.995		15.007.995	99,51	nilai tinggi itu

Misi / Tujuan/ Sasaran Strategis		Indikator	Kondisi Awal (2019)	Target Akhir (2024)	Target RPJMD pada RKPD					Realisasi RPJMD pada Pelaksanaan RKPD						Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)	Ket.
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19
																			baik
			% Peningkatan								**213,58**	**-20,06**	**48**	**-0,87**					
			nilai PMDN (Rp. x 1000)	1.415.336.600	1.000.000.000	859.857.000	950.000.000	950.000.000	1.000.000.000	750.000.000.000	435.150.200	886.614.600	462.089.200	609.329.000	3.425.496.892		3.425.496.892	242,03	nilai tinggi itu baik
			% Peningkatan								**-69,25**	**104**	**-48**	**31,86**					

2.3.2 Isu Strategis Pembangunan Daerah

2.3.2.1 Isu Strategis Global

Isu strategis yang berkembang dalam masyarakat global yang akan turut mempengaruhi tatanan kehidupan masyarakat antara lain:

1) Megatrend Dunia

Tantangan global ke depan akan semakin kompleks seiring dengan perubahan yang sangat cepat di segala bidang atau yang dikenal sebagai *megatrend global*. Perubahan global tersebut merupakan perubahan transformative berskala besar, berjangka waktu panjang, dan bersifat sangat masif terutama disebabkan oleh kemajuan teknologi digital dan komputasi termasuk kecerdasan buatan (*artificial intelligence*).

Terdapat sepuluh megatrend global yang akan dihadapi menuju 2045. Megatrend global memiliki dua sisi, yaitu memberikan potensi kemajuan bagi kondisi sosial ekonomi global, tetapi di sisi lain juga memberikan disrupsi. Perubahan-perubahan tersebut meliputi (i) perkembangan demografi global, (ii) geopolitik dan geoekonomi, (iii) perkembangan teknologi, (iv) peningkatan urbanisasi dunia, (v) konstelasi perdagangan global, (vi) tata kelola keuangan global, (vii) pertumbuhan kelas menengah (middle class), (viii) peningkatan persaingan pemanfaatan sumber daya alam, (ix) perubahan iklim, dan (x) pemanfaatan luar angkasa (*space economy*), dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar II- 89 Megatrend Global 2045

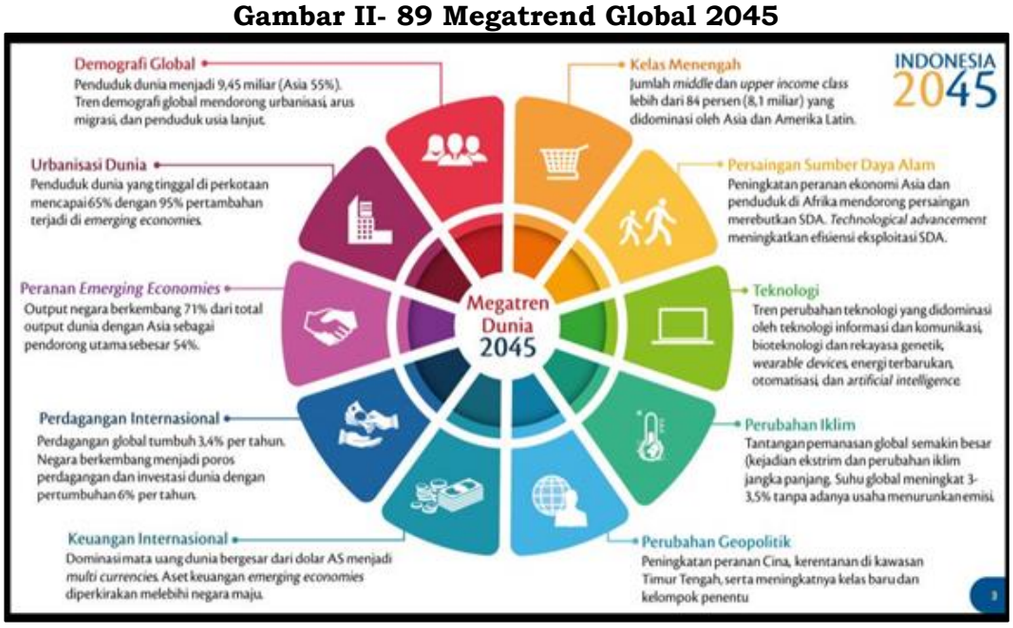

Sumber: RPJPN Tahun 2025-2045

Dalam upaya menghadapi megatrend dunia ini, maka pemerintah, perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya harus secara berhati-hati dalam merespon, mendiagnosa, menganalisis, mendesain strategi masa depan dan proses perencanaan yang konsisten dan

berkelanjutan agar perubahan ini berdampak positif dan berkelanjutan.

2) Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (SDGs) yang selanjutnya disingkat TPB adalah agenda pembangunan global untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan melindungi planet, melalui pencapaian 17 (tujuh belas) tujuan sampai Tahun 2030. Ketujuh belas tujuan TPB tersebut, yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; dan (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Pelaksanaan TPB di Indonesia diatur melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang memuat tujuan TPB, yaitu untuk 1) menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan; 2) menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat; 3) menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif; dan 4) terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Komitmen pencapaian TPB melibatkan berbagai pihak, tidak hanya pemerintah tetapi juga non-pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah hingga desa. Komitmen pelaksanaan di tingkat nasional dilaksanakan melalui penyusunan Peta Jalan TPB 2030, Metadata Indikator TPB, Rencana Aksi Nasional (RAN), laporan tahunan, dan laporan kepada PBB yang disampaikan melalui *Voluntary National Review* (VNR). Sementara itu, komitmen pelaksanaan TPB di tingkat daerah terwujud dengan Rencana Aksi Daerah tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dan untuk keterlibatan pemangku kepentingan nonpemerintah terwujud melalui SDGs Center/Network/Hub di perguruan tinggi, serta perusahaan/asosiasi yang memiliki program/kegiatan berdasarkan empat pilar utama.

Penyusunan kebijakan, rencana dan perlu memperhatikan dan mempertimbangkan dampak dan/atau risiko lingkungan yang tidak diinginkan, yang telah dikaji secara mendalam sewaktu menyusun KLHS RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2030. Analisis pencapaian

TPB/SDGs di Kota Padang dilakukan dengan menyandingkan antara target indikator TPB/SDGs yang tertuang dalam Peraturan Presiden RI Nomor 59 Tahun 2017 dengan data TPB/SDGs Kota Padang sehingga diperoleh klasifikasi penilaian capaian indikator TPB/SDGs yang terbagi dalam 4 (empat) kategori: a. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target/SS b. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target/SB c. Indikator TPB yang tidak ada/belum ada data/NA d. Indikator TPB yang bukan kewenangan/BK

Setelah dilakukan crosscutting dan pengurutan prioritas, maka ditetapkan isu PB Strategis KLHS RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2030 adalah sebagai berikut:

1. Masih tingginya angka kemiskinan
2. Tingginya Kenakalan Remaja, Degradasi Moral
3. Belum optimalnya pelayanan Kesehatan
4. Belum optimalnya pengelolaan persampahan dan rendahnya kesadaran / partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah
5. Belum tersedianya drainase yang memadai dan berdaya guna untuk separasi limbah dan air hujan
6. Belum terpenuhinya sanitasi layak
7. Tingginya Frekuensi dan intensitas Kebencanaan (Gempa, Tsunami, Kekeringan, Cuaca Ekstrim, dll)
8. Alih Fungsi lahan

2.3.2.2 Isu Strategis Nasional

Isu-isu Nasional menjadi perhatian dalam setiap proses perencanaan pembangunan di daerah maupun nasional. Bagaimanapun isu-isu yang dirumuskan kedepannya berusaha untuk menjawab serta mengantisipasi tantangan serta ancaman dalam jangka panjang. Dalam pembangaunan di Kota Padang berikut isu strategis nasional yang menjadi perhatian dalam perumusan masalah Pembangunan lima tahun adalah tantangan Pembangunan yang telah dirumuskan di dalam dokumen RPJMN 2025-2029.

RPJM Nasional adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 dan telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025. Selanjutnya, pembangunan nasional ke depan akan berpedoman pada RPJMN 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program pasangan Presiden dan Wakil Presiden dan disusun berdasarkan RPJP Nasional 2025-2045.

RPJM Nasional memuat strategi Pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/lembaga dan lintas

kementerian/lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dokumen ini akan menjadi panduan strategis dalam mencapai target pembangunan nasional demi mewujudkan Indonesia yang maju, inklusif, dan berkelanjutan.

Adapun Tantangan Pembangunan Nasional menurut RPJMN 2025-2029 adalah:

1) Rendahnya produktivitas; Tingkat produktivitas masih rendah di tengah persaingan global yang semakin meningkat. Mengacu pada rilis laporan *Asian Productivity Organization* (2024), rata-rata produktivitas Indonesia yang tercermin dari *Total Factor Productivity* selama tahun 2015-2022 hanya tumbuh positif sebesar 60 basis poin dari periode sebelumnya tahun 2010-2015 (-0,9 persen ke -0,3 persen). Kondisi produktivitas yang rendah di antaranya disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia yang masih tertinggal, terlebih pada perempuan, produktivitas sektor ekonomi yang rendah, kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang tertinggal, serta kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi, dan kepastian hukum yang masih lemah. Rendahnya produktivitas tenaga kerja perempuan dipengaruhi oleh lingkungan kerja yang belum mendukung mereka untuk masuk dan bertahan di pasar kerja, antara lain norma sosial budaya yang membebankan peran pengasuhan dan tugas domestik pada perempuan, jam kerja yang kurang fleksibel, serta minimnya akses layanan daycare berkualitas yang terjangkau.

2) Rendahnya kualitas sumber daya manusia; Rendahnya kualitas sumber daya manusia antara lain dicerminkan dari capaian rata-rata nilai *Programme for International Student Assessment* siswa Indonesia untuk semua aspek (membaca, matematika, dan sains) masih tertinggal dibandingkan siswa negara OECD. Selain itu, juga terdapat tantangan rendahnya daya saing tenaga kerja yang tercermin dari rendahnya pendidikan tenaga kerja. Data Survei Angkatan Kerja Nasional 2024 menunjukkan bahwa 52,32 persen penduduk yang termasuk angkatan kerja merupakan lulusan pendidikan rendah (SMP/MTs ke bawah).

3) Pergeseran struktur kelas masyarakat; Calon kelas menengah merupakan kelompok sosial ekonomi terbesar di Indonesia yang jumlahnya cenderung meningkat. Disisi lain, jumlah warga yang rentan miskin juga meningkat. Risiko pergeseran status dari kelas menengah menjadi calon kelas menengah dan rentan miskin,disebabkan oleh tingginya angka pemutusan hubungan

kerja. Salah satu faktor yang memicu terjadinya pemutusan hubungan kerja adalah rendahnya daya beli masyarakat.

4) Kebutuhan hidup tinggi pada usia produktif; Berdasarkan data BPS (2023), jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) diproyeksikan mencapai 147,71juta jiwa. Hal ini menjadi tantangan pembangunan, yaitu tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam (pangan, energi, dan air) serta lahan. Selain itu, terdapat kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial, jaminan kesehatan, pendidikan, dan pembukaan lapangan pekerjaan.

5) Krisis lingkungan; Perkembangan dunia saat ini dihadapkan dengan tiga krisis lingkungan yang mengancam masa depan bumi dan manusia, yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan kerusakan lingkungan akibat penggunaan energi fosil secara masif.

6) Geopolitik dan geoekonomi; Perkembangan risiko geopolitik dapat berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan dan tatanan global. Salah satu tantangan geopolitik yang perlu diantisipasi Indonesia adalah eskalasi persaingan antar negara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru. Kemunculan berbagai kekuatan baru telah memengaruhi perkembangan kondisi di kawasan maupun tatanan global, serta sikap Indonesia dalam dunia internasional.

7) Tata kelola dan akuntabilitas pemerintah; Pemberantasan korupsi merupakan isu strategis yang membutuhkan sinergi dari semua pemangku kepentingan. Hal ini menjadi prasyarat upaya percepatan pencapaian sasaran pembangunan nasional. Selanjutnya, tata kelola data memainkan peran kunci dalam mendukung pembangunan nasional, terutama dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat, efektif, dan berkelanjutan. Tingkat keamanan data privasi dan siber untuk data pemerintah dan nasional belum sepenuhnya dapat mengantisipasi terjadinya risiko peretasan dan pembajakan yang dapat menciptakan potensi pelanggaran privasi dan ancaman keamanan.

Selanjutnya RPJMN Tahun 2025-2029 memuat delapan Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Asta Cita sebagai Prioritas Nasional tersebut selaras dengan agenda transformasi RPJPN Tahun 2025-2045. Keterkaitan erat Prioritas Nasional dan strategi transformasi RPJPN Tahun 2025-2045 menjadi integrasi kebijakan yang tangguh untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka perencanaan Pembangunan Kota Padang periode 2025-2029 harus memperhatikan dan terintegrasi serta selaras dengan prioritas Pembangunan nasional. Prioritas Nasional adalah struktur pokok seluruh rencana pembangunan RPJMN Tahun 2O25-2O29. Untuk pencapaian sasarannya, setiap prioritas Nasional diterjemahkan dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas yang memiliki sasaran terukur untuk memudahkan pelaksanaannya di Kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha (BUMN, Swasta). Setiap Prioritas Nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025-2029.

Gambar II- 90 Program Prioritas Pembangunan Nasional RPJMN 2025-2029

Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029

2.3.2.3 Isu Strategis Regional

Dalam konteks pembangunan yang selaras antara tingkat kota dan provinsi, identifikasi isu strategis Kota Padang juga mempertimbangkan isu strategis regional, yang dalam hal ini merupakan isu yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029. Hal ini penting untuk memastikan sinkronisasi arah pembangunan, pemanfaatan potensi wilayah secara optimal, serta penguatan peran kota dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh.

1) Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat

a. Pengurangan Kesenjangan pendidikan antara daerah urban dan rural.
b. Hal ini dapat dilihat dari fasilitas, tenaga pengajar, dan ketersediaan sarana pendidikan yang masih terbatas di daerah rural .yang pada akhirnya menyebabkan perbedaan yang nyata terhadap hasil pendidikannya.
c. Memberikan kesempatan bagi anak-anak di Sumatera Barat yang putus sekolah atau tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi, dimana banyak keluarga yang tidak mampu membiayai pendidikan anak-anaknya.
d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan. Banyak guru yang masih belum memiliki kualifikasi yang memadai dan kurangnya pelatihan yang diberikan kepada guru-guru tersebut, disamping pemenuhan dan distribusi guru yang merata pada setiap sekolah.
e. Peningkatan Sarana dan prasarana pendidikan yang memenuhi akreditasi pendidikan dan penerapan IT dalam proses pembelajaran
f. Peningkatan Pendidikan berkarakter

2) Ketahanan Pangan Daerah dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan
   a. Ketahanan dan keberlanjutan produksi pangan
      - Perluasan dan perlindungan lahan pertanian dari ancaman alih fungsi
      - Peningkatan produktivitas dengan teknologi pertanian
      - Pengembangan sistem pertanian berbasis agroforestri dan pertanian berkelanjutan
      - Diversifikasi komoditas pangan untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas tertentu
   b. Ketersediaan dan Efisiensi Input Pertanian
      - Ketersediaan pupuk, benih unggul, dan sarana produksi lainnya
      - Efektivitas subsidi dan bantuan pemerintah terhadap petani
      - Optimalisasi sistem irigasi dan pengelolaan air untuk mendukung produktivitas
      - Pengawasan terhadap penggunaan pestisida dan bahan kimia di sektor pertanian
   c. Efisiensi Rantai Pasok dan Pemasaran
      - Perbaikan rantai distribusi untuk mengurangi biaya logistik dan disparitas harga
      - Pemberdayaan kelembagaan petani
   d. Pengembangan Industri Pengolahan Pangan
      - Meningkatkan nilai tambah produk melalui pengolahan pangan local

- Promosi dan branding produk pangan Sumatera Barat di tingkat nasional dan internasional

e. Kebijakan Terintegrasi antara Pusat dan Daerah
   - Penyelarasan kebijakan nasional dengan kebijakan daerah untuk mendukung kedaulatan Pangan
   - Penguatan regulasi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan

f. Ketahanan Pangan dan Krisis Global
   - Strategi menghadapi ketidakpastian cuaca dan perubahan iklim
   - Cadangan pangan daerah untuk mengantisipasi krisis pangan
   - Penguatan sistem informasi pangan berbasis digital

g. Regenerasi Petani dan Daya Tarik Sektor Pertanian
   - Mendorong keterlibatan generasi muda
   - Pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas petani dan nelayan
   - Peningkatan kesejahteraan petani dan akses keuangan bagi pelaku usaha pangan

3) Membangun Urban-rural Linkage

a. Pengembangaan sumber daya manusia masyarakat desa secara berkelanjutan, melalui program pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat desa.

b. Pengembangan ekonomi lokal dalam mendukung kemandirian desa, melalui dukungan dan bantuan dalam bentuk modal usaha, pelatihan kewirausahaan, serta akses ke pasar yang lebih luas.

c. Peningkatan partisipasi aktif masyarakat desa dalam meningkatkan pencapaian desa mandiri.

d. Mendorong kemandirian dan kemakmuran masyarakat Nagari/ desa di Sumatera Barat.

e. Pengembangan dan optimalisasi Nagari kreatif Hub dengan melibatkan seluruh potensi nagari/desa

f. Isu Strategis Air Siap Minum Perpipaan
   - Rendahnya kesadaran, peran partisipasi dan permintaan Masyarakat
   - Minimnya pendanaan yang teralokasikan untuk layanan penyediaan air minum
   - Kesenjangan sarana dan prasarana (infrastruktur) antar kabupaten kota
   - Pasokan air baku secara kuantitas dan kualitas mulai berkurang

g. Isu Strategis Akses Sanitasi Aman
   - Belum terpenuhi dan meratanya penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur layanan sanitasi

- Kurangnya kesadaran peran, partisipasi dan permintaan Masyarakat terhadap sanitasi layak dan aman yang berkelanjutan
- Koordinasi sinergi dan sinkronisasi program dan kegiatan antar OPD belum optimal.

4) Perdagangan dan Industri sebagai Lapangan Usaha Unggulan
   a. Terbatasnya infrastruktur logistik, persaingan dengan produk impor, digitalisasi usaha yang masih rendah, pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) masih mengandalkan metode konvensional, sehingga sulit bersaing di pasar yang semakin digital
   b. Konektivitas antarwilayah yang belum optimal menyebabkan distribusi barang tidak merata, terutama ke daerah terpencil.
   c. Perkuatan promosi produk lokal dan membangun ekosistem perdagangan yang lebih modern agar sektor ini dapat berkembang dan memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian daerah.
5) Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar yang Berkelanjutan
   a. Resiliensi Bencana dan Perubahan Iklim
      - Bangunan dan infrastruktur yang belum dirancang sesuai standar ketahanan gempa
      - Kondisi drainase yang belum dioptimalkan sesuai dengan kapasitas tampungan air saat maksimal, sehingga menyebabkan luapan air di daerah tertentu
      - Permukiman di Zona Merah Gunung Api yang belum dapat dipindahkan dengan alasan ekonomi (Pertanian, dan lain-lain)
      - Sistem Peringatan Dini (EWS) tidak berfungsi Optimal di beberapa titik akibat kurangnya perawatan
      - Rendahnya partisipasi masyarakat dan penyediaan infrastruktur yang berkaitan dengan pelatihan, simulasi, dan program kesiapsiagaan bencana
      - Belum optimalnya integrasi risiko bencana dalam perencanaan yang dapat mengedepankan pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan ramah lingkungan.
      - Potensi megathrust di Mentawai mencapai 8,5 magnitudo.
   b. Perhubungan dan Jalan
      - Sektor transportasi menjadi enabler utama dalam perekonomian Sumatera Barat
      - Penuntasan jalan tol menjadi strategis dalam membangun koneksi Sumatera Barat ke jaringan tol trans sumatera;
      - Kualitas dan dan kuantitas infrastruktur pertanian dan perikanan dan akses ke sentra produksi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan;
      - Waktu tempuh pada lintas utama jalan provinsi di Sumatera Barat masih tinggi dibandingkan dengan rata-rata secara Nasional yaitu 2,2 jam/100 km, sementara

rata-rata waktu tempuh di jalan provinsi berada pada angka 3,07 jam/100 km.
- Peningkatan infrastruktur ini dapat meningkatkan efisiensi biaya logistik yang dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing hasil pertanian;
- Pembangunan dan peningkatan jalan menuju kawasan pariwisata menjadi strategis dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisata sekaligus menggerakkan sektor perekonomian

c. Pengelolaan Sumber Daya Air
- Optimalisasi penyediaan infrastruktur air baku dengan peningkatan kapasitas tampungan agar ketersediaan air berkelanjutan.
- Pembangunan dan rehabilitasi serta pemeliharaan sistem irigasi, termasuk pemulihan daerah irigasi yang rusak serta modernisasi jaringan irigasi berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi distribusi air.
- Mitigasi kerusakan akibat daya rusak air melalui penguatan infrastruktur pengendali banjir, rehabilitasi sungai dan daerah aliran sungai, pengembangan peringatan dini bencana hidrometeorologi serta adaptasi infrastruktur terhadap perubahan iklim.

d. Gas Rumah Kaca (GRK)
- Kenaikan permukaan laut Indonesia sekitar 0,7-0,9 cm per tahun berdampak pada perkiraan peningkatan potensi kerugian akibat bencana dan perubahan iklim jika tidak dibangun ketahanan ekologi yang memadai.
- Kelangkaan dan persaingan dalam mengakses sumber daya alam (terutama di sektor energi, air, dan pangan) menjadi tantangan dalam memenuhi kebutuhan manusia di masa depan.
- Komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi GRK sebesar 29% dengan kemampuan sendiri dan sebesar 41% dengan dukungan internasional pada 2030.
- Transisi ke energi baru terbarukan yang diperlukan untuk mengurangi peningkatan efek gas rumah kaca akibat penggunaan energi fosil yang berlebihan, misalnya penggunaan energi berkelanjutan untuk sektor transportasi dan industri.
- Rehabilitasi dan restorasi hutan diperlukan untuk mengatasi degradasi lingkungan yang disebabkan deforetasi dan alih fungsi lahan.
- Perlindungan wilayah pesisir dan kenaikan air laut yang mencapai 0,7-0,9 cm/tahun meningkatkan resiko banjir, erosi dan hilangnya wilayah pesisir
- Teknologi ramah iklim untuk ketahanan pangan sebagai bentuk pengembangan inovasi pertanian berkelanjutan

guna mengurangi dampak gas rumah kaca dari sektor pertanian dan perikanan.

e. Isu penting strategis terkait lingkungan yang memperoleh perhatian, yakni:
   - Rehabilitasi DAS dan hutan kritis dengan pendekatan partisipatif karena tingginya alih fungsi lahan
   - Penggunaan teknologi inovatif dalam pengolahan sampah serta peningkatan investasi untuk sektor persampahan.
   - Mitigasi bencana karena kerusakan lingkungan.

f. Isu Strategis Air Siap Minum Perpipaan
   - Rendahnya kesadaran, peran partisipasi dan permintaan Masyarakat
   - Minimnya pendanaan yang teralokasikan untuk layanan penyediaan air minum
   - Kesenjangan sarana dan prasarana (infrastruktur) antar kabupaten kota
   - Pasokan air baku secara kuantitas dan kualitas mulai berkurang

g. Isu Strategis Akses Sanitasi Aman
   - Belum terpenuhi dan meratanya penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur layanan sanitasi
   - Kurangnya kesadaran peran, partisipasi dan permintaan Masyarakat terhadap sanitasi layak dan aman yang berkelanjutan
   - Koordinasi sinergi dan sinkronisasi program dan kegiatan antar OPD belum optimal.

6) Perwujudan Kehidupan Beradat, Berbudaya, sesuai dengan Kearifan Lokal

a. Perubahan nilai adat dan budaya akibat pengaruh globalisasi serta modernisasi menyebabkan menurunnya pemahaman dan pengamalan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat.

b. Kurangnya integrasi nilai-nilai adat, budaya, dan agama dalam sistem pendidikan, baik formal maupun informal, berkontribusi terhadap semakin lemahnya pemahaman generasi muda mengenai identitas budaya dan norma sosial yang berlaku.

c. Melemahnya peran keluarga sebagai institusi utama dalam membentuk karakter dan moral generasi muda disebabkan oleh meningkatnya angka perceraian, pernikahan usia dini, serta tekanan ekonomi yang menghambat pola pengasuhan yang berkualitas.

d. Berkurangnya fungsi surau dan lembaga adat sebagai pusat pendidikan dan bimbingan masyarakat mengakibatkan terbatasnya ruang bagi pembelajaran nilai-nilai keagamaan dan adat secara menyeluruh.

e. Minimnya keterlibatan generasi muda dalam pelestarian seni, budaya, dan tradisi lokal berisiko mengakibatkan hilangnya warisan budaya yang menjadi bagian dari identitas daerah.
f. Kurangnya kebijakan dan regulasi yang mendukung keberlanjutan adat serta budaya, ditambah dengan belum optimalnya sinergi antara pemerintah, lembaga adat, dan masyarakat, menghambat upaya pelestarian nilai-nilai budaya lokal.
g. Semakin beragamnya latar belakang sosial di beberapa daerah menuntut adanya pendekatan moderasi beragama agar nilai-nilai ABS-SBK tetap menjadi pedoman dalam menjaga harmoni dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.

2.3.2.4 Isu Strategis Daerah

Tabel II- 102 Identifikasi Isu Strategis Daerah Kota Padang

No.	Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
				Global	Nasional	Regional	
	1	2	3	4	5	6	7
1	Tersedianya infrastruktur pelayanan publik	Belum optimalnya pengelolaan platform pelayanan publik			Lemahnya tata kelola dan akuntabilitas pemerintahan		Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif, dan Partisipatif
2	Cakupan layanan informasi dan digitalisasi	Belum optimalnya pemanfaatan informasi dan digitalisasi	Belum optimalnya pelayanan kesehatan	Tren perubahan teknologi yang didominasi oleh teknologi informasi dan komunikasi			Belum Optimalnya Perwujudan Kota Padang menjadi kota pintar dan kota sehat
3	Sarana Pendidikan dan budaya	Ketimpangan akses, kualitas SDM belum merata antar nagari	1) Kesenjangan kualitas pendidikan 2) Tingginya kenakalan remaja dan degradasi moral		1) Rendahnya produktivitas dan kualitas sumber daya manusia terhadap perekonomian global 2) Adanya program pemerintah pusat dalam melakukan percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun Pendidikan prasekolah dan 12 tahun Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah)	1) Kesenjangan pendidikan antara kota dan pedesaan 2) Penurunan apresiasi terhadap budaya lokal 3) Terbatasnya pemahaman dan penerapan terkai nilai ABS-SBK	Optimalisasi pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, kreatif dan inovatif, berkarakter, dan berbudaya
4	Tersedianya infrastruktur kemudahan berusaha dan berinvestasi	Masih rendahnya investasi dan tingkat kewirausahaan		Pertumbuhan investasi yang berporos pada negara berkembang	Penciptaan danantara sebagai mesin pertumbuhan ekonomi nasional		Meningkatkan kemudahan berinvestasi untuk menciptakan lapangan kerja

No.	Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
				Global	Nasional	Regional	
	1	2	3	4	5	6	7
5	Tersedianya sarana dan prasarana kota	Belum meratanya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana	1) Belum optimalnya sarana persampahan 2) Belum optimalnya drainase yang memadai dan berdaya guna untuk separasi limbah dan air hujan 3) Belum terpenuhinya sanitasi layak	Terjadinya krisis lingkungan global dalam tiga krisis lingkungan ; perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan kerusakan lingkungan	Transisi energi, pengelolaan sampah dan emisi	Tingginya timbunan sampah dan titik rawan banjir	Belum Optimalnya Pembangunan dan Revitalisasi Sarana dan Prasarana Yang Berkelanjutan
6	Tersedianya sarana dan prasarana tanggap bencana	Belum optimalnya partisipasi dan kesadaran masyarakat	Tingginya frekuensi dan intensitas kebencanaan	Tantangan pemanasan global jangka panjang		Belum optimalnya infrastruktur dan mitigasi terhadap bencana dan perubahan iklim	Optimalisasi sistem ketahanan bencana dan perubahan iklim melalui peningkatan partisipasi dan kesadaran masyarakat
7	Sarana dan Prasarana Perdagangan dan Jasa	Belum optimalnya penataan dan pengelolaan sarana perdagangan dan jasa		Ketidakstablian geopolitik dan ekonomi yang disebabkan oleh perang antar dunia, konflik timur tengah, pelemahan ekonomi cina, dan proteksi ekonomi yang ketat dari AS	Melemahnya ekonomi nasional akibat dari proteksionisme ekonomi global	Terbatasnya infrastruktur logistik dan belum optimalnya konektivitas antarwilayah	Belum Optimalnya Peningkatan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif dan Kondusif
8	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Belum optimalnya pengelolaan destinasi dan infrastruktur penunjang usaha mikro	Penurunan kualitas lingkungan wisata dan keterbatasan pengembangan usaha mikro	Globalisasi budaya, tantangan konservasi alam	Pengembangan wisata unggulan nasional dan daerah	Belum optimal pengelolaan wisata alam & sejarah	Optimalisasi Pengembangan potensi ekonomi kreatif dan pariwisata berkelanjutan

Berdasarkan tabel di atas, telah diidentifikasikan potensi daerah, permasalahan, isu KLHS, isu lingkungan dinamis baik secara global, nasional dan regional (Provinsi Sumatera Barat), dan mempertimbangkan isu strategis Kota Padang yang tertuang dalam dokumen rancangan teknokratik RPJMD Kota Padang, maka dirumuskan isu strategis Kota Padang untuk pembangunan lima tahun ke depan sebagai berikut:

1) Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, responsif, Inovatif, dan Partisipatif

   Isu Strategisnya adalah:

   a. Transparansi dan akuntabilitas

b. Inovasi Teknologi dalam Pelayanan Publik
c. Partisipasi masyarakat
d. Pemberantasan korupsi
e. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia
f. Penggunaan teknologi informasi
g. Pemantauan kinerja dan evaluasi program
h. Perlindungan hak asasi manusia

2) Belum Optimalnya Perwujudan Kota Padang menjadi Kota Pintar dan Kota Sehat

a. Peningkatan Akses Teknologi Informasi
b. Penyediaan Fasilitas Pendidikan dan Kesehatan yang Merata
c. Pemberdayaan digital dan inovasi teknologi
d. Peningkatan kemudahan layanan publik berbasis teknologi

3) Optimalisasi Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Kreatif dan Inovatif, Berkarakter, dan Berbudaya

Isu Strategisnya adalah:

a. Pengembangan Pendidikan berkualitas
b. Penyiapan sarana dan prasarana Pendidikan pra sekolah
c. Pelatihan dan pengembangan kompetensi
d. Pengembangan lingkungan kreatif
e. Pengembangan budaya inovasi
f. Pemberdayaan masyarakat

4) Meningkatkan Kemudahan Berinvestasi untuk Menciptakan Lapangan Kerja

a. Promosi investasi dan kemitraan pemerintah dan swasta
b. Peningkatan kemudahan izin investasi dan berusaha

5) Optimalisasi Pembangunan dan Revitalisasi Sarana dan Prasarana Kota yang Berkualitas dan Berkelanjutan

Isu Strategisnya adalah:

a. Pengembangan Infrastruktur Berkualitas
b. Peningkatan Kualitas Bangunan Publik
c. Penyediaan Ruang Terbuka Publik
d. Pengelolaan Sampah dan Limbah yang Berkelanjutan
e. Pemberdayaan Transportasi Berkelanjutan
f. Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan
g. Pengembangan Pusat-Pusat Pelayanan
h. Pemantapan Transportasi Publik
i. Konservasi Lingkungan dan Kearifan Lokal

6) Optimalisasi Sistem Ketahanan Bencana dan Rencana Aksi Iklim *(Climate Action Plan)* dan Optimalisasi Sistem Ketahanan Bencana

a. Sinergisasi rencana aksi iklim daerah dengan rencana aksi nasional adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
b. Resiliensi kota terhadap perubahan iklim

c. Optimalisasi sistem pemantauan dan evaluasi terpadu untuk mengukur kinerja program berbasis iklim dalam perencanaan pembangunan.
d. Peningkatan penanganan krisis dan bencana
e. Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan bencana
f. Pengembangan infrastruktur ramah lingkungan di seluruh wilayah

7) Menjaga Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum Daerah dengan Melibatkan Organisasi Kemasyarakatan Lokal

Isu Strategisnya adalah:

a. Peningkatan keamanan dan ketertiban umum
b. Optimalisasi sistem keamanan
c. Penanggulangan kejahatan
d. Pengelolaan lalu lintas dan transportasi publik
e. Pemberdayaan Masyarakat dalam Keamanan
f. Perdamaian Sosial

8) Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan dan Jasa

a. Peningkatan Sarana Prasarana perdagangan
b. Peningkatan daya saing ekonomi
c. Peningkatan kualitas produk ekspor

9) Optimalisasi Pengembangan Potensi Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Usaha Mikro yang Berkualitas dan Berkelanjutan

Isu Strategisnya adalah:

a. Partisipasi Masyarakat dan Pemberdayaan Lokal
b. Pemberdayaan Ekonomi yang Inklusif
c. Pemberdayaan ekonomi lokal melalui usaha kecil mikro dan pariwisata
d. Pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan
e. Peningkatan usaha mikro dalam bentuk usaha koperasi

Isu strategis ini perlu didukung dengan empat transformasi yang menjadi program nasional, sebagai berikut:

A. Transformasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam (pembangunan Ekonomi Hijau); dengan memperhatikan isu strategis:

1. Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan
2. Keadilan dan Pemerataan Ekonomi
3. Pengembangan Industri dan Inovasi
4. Liberalisasi Perdagangan dan peningkatan daya saing produk
5. Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan

6. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan

B. Transformasi dalam pembangunan sumber daya manusia dan pelestarian sosial budaya ini dengan isu strategis:
   1. Peningkatan Mutu Pelayanan Pendidikan
   2. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat berbasis keluarga
   3. Pemberdayaan Masyarakat berbasis kelurahan
   4. Pemajuan Kebudayaan dan Tatanan sosial berbasis budaya lokal
   5. Pelestarian warisan budaya dan sejarah

C. Transformasi dalam Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan; dengan isu strategis
   1. Infrastruktur yang Berkelanjutan
   2. Konektivitas dan Aksesibilitas
   3. Pengelolaan Risiko dan mitigasi bencana
   4. Adaptasi Perubahan Iklim dan Lingkungan
   5. Partisipasi Masyarakat dan Pemberdayaan

D. Transformasi dalam pembangunan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan dengan isu strategis
   1. Transparansi dan Akuntabilitas
   2. Anti Korupsi dan Etika Pemerintahan
   3. Kolaborasi Antar lembaga/institusi pemerintah
   4. Perubahan Budaya Organisasi dan Inovasi
   5. Peningkatan Kapasitas dan kualitas SDM

Tabel II- 103 Identifikasi Isu Strategis Daerah Menurut Potensi, Permasalahan dan Isu KLHS Kota Padang

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
Kelautan dan Perikanan	Pengelolaan belum optimal, keterbatasan infrastruktur dan akses	Rendahnya daya saing dan ketahanan ekonomi pesisir	Perubahan iklim, degradasi ekosistem laut, overfishing	Ketahanan pangan dan perikanan berkelanjutan	Potensi laut besar, tapi pengelolaan belum optimal	Pengelolaan SDA berkelanjutan, pengembangan sektor kelautan dan perikanan
Pertanian dan Kehutanan	Alih fungsi lahan, degradasi hutan	Menurunnya produktivitas pertanian, risiko	Perubahan iklim global, degradasi	Alih fungsi lahan, krisis air dan	Konflik lahan, konversi sawah, dan	Ketahanan pangan dan ekologi, pelestarian

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
	lindung, konflik agraria	bencana ekologis	lahan pertanian	degradasi hutan	bencana longsor	kawasan lindung
Pariwisata	Belum optimalnya pengelolaan destinasi dan infrastruktur	Penurunan kualitas lingkungan wisata	Globalisasi budaya, tantangan konservasi alam	Pengembangan wisata unggulan nasional dan daerah	Belum optimal pengelolaan wisata alam & sejarah	Pengembangan pariwisata berkelanjutan, pelestarian lingkungan dan budaya
Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Kurangnya keterampilan manajerial, keterbatasan akses pasar dan inovasi	Kesenjangan ekonomi, tekanan pada usaha mikro	E-commerce global, perdagangan digital	Digitalisasi UMKM dan perdagangan lokal	Pasar tradisional belum modern, daya saing rendah	Penguatan IKM, peningkatan daya saing dan inovasi
Pertambangan	Dampak lingkungan, degradasi kawasan lindung, konflik ruang	Peningkatan pencemaran dan degradasi lahan	Krisis air bersih dan sanitasi global	Akses air bersih, sanitasi, dan perumahan layak	Distribusi air bersih belum merata antar wilayah	Pengelolaan pertambangan berwawasan lingkungan, penataan ruang
Perdagangan dan Logistik	Akses distribusi terbatas, konektivitas pelabuhan dan pasar lemah	Distribusi ekonomi tidak merata	Pergeseran struktur tenaga kerja, industri 4.0	Rendahnya produktivitas tenaga kerja dan SDM	Rendahnya daya saing SDM, terbatasnya pelatihan	Penguatan sektor perdagangan dan logistik berbasis digital
Pendidikan Tinggi	Ketimpangan akses, kualitas SDM belum merata	Kesenjangan kualitas pendidikan	Polusi udara global, krisis energi fosil	Transisi energi, pengelolaan sampah dan emisi	Tingginya timbunan sampah dan titik rawan banjir	Pemerataan akses pendidikan tinggi, pengembangan SDM unggul

Sumber: Bappeda Kota Padang, data diolah 2025

2.4 Capaian Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam sistem otonomi daerah telah terjadi perpindahan sebagian kewenangan pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah otonom. Implementasi otonomi daerah ini terwujud pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar merupakan urusan pemerintahan

yang wajib diprioritaskan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Urusan pemerintahan tersebut meliputi:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
6. Sosial.

Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Kebutuhan dasar warga negara diartikan sebagai barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak. Dalam rangka menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara sebagaimana dimaksud, maka pelaksanaan pelayanan dasar oleh pemerintah daerah agar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran dan ketepatan sasaran. Dengan keberadaan SPM, maka masyarakat dapat mengukur sejauh mana pemerintah daerah dapat memenuhi kewajibannya dalam menyediakan pelayanan publik khususnya yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Sebaliknya bagi pemerintah daerah, SPM dapat dijadikan sebagai alat akuntabilitas pemerintah daerah terhadap upaya peningkatan aksesibilitas, kualitas, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat. Dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat, setiap tahunnya pemerintah pusat melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPM oleh pemerintah daerah.

Pelaksanaan SPM diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, yang juga merupakan penyempurnaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Disamping itu juga mempedomani peraturan teknis terkait SPM yang diterbitkan oleh Kementerian terkait setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun

2018 serta Peraturan Walikota Padang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal.

2.4.1 Bidang Pendidikan

2.4.1.1 Jenis pelayanan dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang Pendidikan sebagai berikut :

1. Pendidikan Anak Usia Dini,
2. Pendidikan Dasar
3. Pendidikan Kesetaraan

2.4.1.2 Realisasi SPM

Target Capaian kinerja Pemerintah Kota Padang dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan, sebagai berikut:

Tabel II- 104 Realisasi SPM Bidang Pendidikan

NO	INDIKATOR KINERJA JENIS LAYANAN SPM	CAPAIAN (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1 .	Pendidikan Dasar Usia Dini	100%	100%	100%	100%	100%
2 .	Pendidikan Dasar	100%	100%	100%	100%	100%
3 .	Pendidikan Kesetaraan	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM Kota Padang Tahun 2024, Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Padang

2.4.2 Bidang Kesehatan

2.4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang kesehatan sebagai berikut :

a. Pelayanan kesehatan ibu hamil
b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin
c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
d. Pelayanan kesehatan balita
e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
i. Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus (DM)
j. Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat
k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus melemahkan daya tahan tubuh (HIV)

2.4.2.1 Realisasi SPM

Target capaian kinerja Pemerintah Kota Padang dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan sebagai berikut:

Tabel II- 105 Realisasi SPM Bidang Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100	100	100	100
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100	100	100	100
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100	100	100	100
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100	100	100	100
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia pendidikan yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100	100	100	100
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100	100	100	100
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100	100	100	100
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100	100	100	100
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100	100	100	100
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat (ODGJ) yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100	100	100	100
11	Pelayanan Kesehatan Orang	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis	100	100	100	100	100

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Terduga Tuberkulosis	yang mendapatkan layanan kesehatan					
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100	100	100	100

Sumber : Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM Kota Padang Tahun 2024, Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Padang

2.4.3 Bidang Pekerjaan Umum

2.4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum sebagai berikut :

1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

2.4.3.2 Realisasi SPM

Capaian kinerja Pemerintah Kota Padang dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum sebagai berikut:

Tabel II- 106Target Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari- hari	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	100	100	100	100	100
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	100	100	100	100	100

Sumber : Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM Kota Padang Tahun 2024, Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Padang

2.4.4 Bidang Perumahan Rakyat

2.4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Bidang Urusan diisi dengan bidang urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah.

2.4.4.2 Realisasi SPM

Target Capaian kinerja Pemerintah Kota Padang dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat, sebagai berikut :

Tabel II- 107 SPM Bidang Perumahan Rakyat

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	100	100	100	100

Sumber : Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM Kota Padang Tahun 2024, Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Padang

2.4.5 Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)

2.4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagai berikut :

a. Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Satpol-PP)
b. Pelayanan Informasi Rawan Bencana (BPBD)
c. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (BPBD)
d. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (BPBD)
e. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Damkar)

2.4.5.2 Realisasi SPM

2.4.5.2.1 SATPOL PP

Target Capaian kinerja Pemerintah Kota Padang dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sub bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) sebagai berikut :

Tabel II- 108 Realisasi SPM Satpol PP

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Peraturan DaerahSesuai Mutu dan Pelayanan Ganti Rugi	Persentase pencapaian penerima layanan dasar	100	100	100	100	100

Sumber : Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM Kota Padang Tahun 2024, Ba2020gian Tata Pemerintahan Setda Kota Padang

2.4.5.2.2 KEBENCANAAN (BPBD)

Target capaian kinerja Pemerintah Kota Padang dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sub bidang Kebencanaan, sebagai berikut:

Tabel II- 109 Target Pencapaian SPM Kebencanaan (BPBD)

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	100	100	100	100
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100	100	100	100
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100	100	100	100

Sumber : Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM Kota Padang Tahun 2024, Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Padang

2.4.5.2.3 DAMKAR

Target capaian kinerja Pemerintah Kota Padang dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sub bidang Pemadam Kebakaran, sebagai berikut:

Tabel II- 110 Target Pencapaian SPM Damkar

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)		100	100	100	100	100

Sumber : Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM Kota Padang Tahun 2024, Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Padang

2.4.6 Bidang Sosial

2.4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial, terdapat 5 jenis layanan Bidang Sosial yang harus dilaksanakan, dimana kewenangan Kabupaten / Kota adalah layanan keterlantaran diluar panti yaitu :

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar diluar panti.
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Anak terlantar diluar panti.
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Lanjut Usia terlantar diluar panti.
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti.
5. Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota.

2.4.6.2 Realisasi SPM

Target capaian kinerja Pemerintah Kota Padang dalam pemberian Standar Layanan Minimal (SPM) bidang Sosial sebagai berikut :

Tabel II- 111 Realisasi SPM Bidang Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Realisasi (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	100	100	100	100	100
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	100	100	100	100	100
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	100	100	100	100	100
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	100	100	100	100	100
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Pasca Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100

Sumber : Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM Kota Padang Tahun 2024, Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Padang

2.5 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

2.5.1 Pelaksanaan TPB Menurut Kategori Capaian

Pada Perpres No. 59 Tahun 2017 telah ditetapkan target pelaksanaan TPB secara nasional. Kategori evaluasi capaian TPB adalah sebagai Berikut:

1. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS);
2. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target (SB);
3. Indikator TPB yang belum dikerjakan dan belum tercapai (BB); dan
4. Indikator TPB yang sudah dikerjakan dan tidak ada data (NA).

Berdasarkan hasil perhitungan dan pengolahan data menunjukkan bahwa indikator TPB di Kota Padang yang telah dilaksanakan dan mencapai target (SS) adalah 55,98% (117 dari total 209 indikator). Capaian SS ini mengalami peningkatan sebesar 9% dari tahun 2021, yaitu sebesar 46%. Bila dilihat dari 4 kategori di atas, proporsi pelaksanaan TPB Kota Padang secara umum didominasi dengan kategori SS, sedangkan untuk kategori SB dan BB berturut-turut

adalah 32% dan 3,83%. Komposisi pelaksanaan TPB Kota Padang dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar II- 91 Grafik Persentase Capaian Indikator TPB Kota Padang

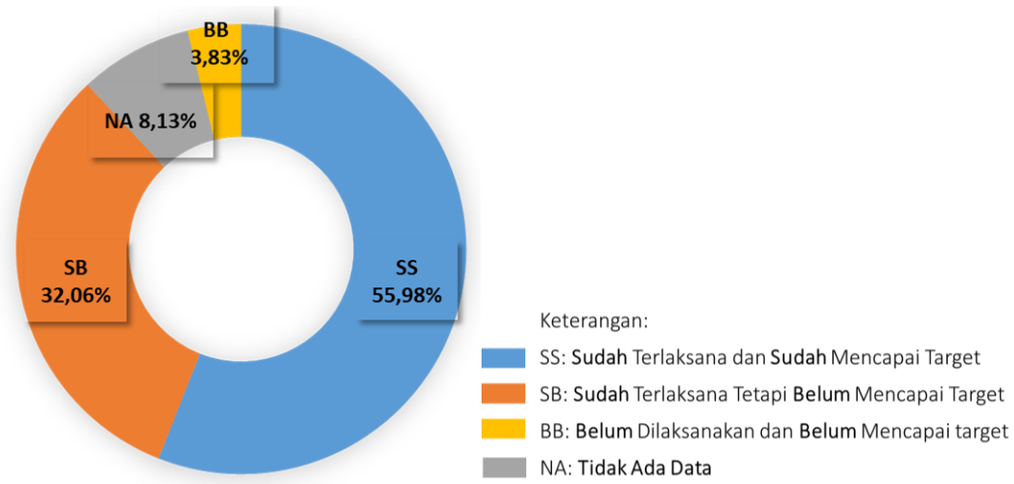

Sumber : Dokumen KLHS RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029

Terdapat 117 indikator TPB dengan kategori yang sudah terlaksana dan sudah mencapai target (SS). TPB dengan capaian tertinggi adalah TPB 3 yaitu kehidupan sehat dan sejahtera yakni 16 indikator seperti terlihat pada tabel II-110. Terdapat 67 indikator yang masuk kategori TPB yang sudah terlaksana namun belum mencapai target (SB). TPB dengan capaian tertinggi untuk kategori SB ini juga merupakan TPB 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera) dengan 14 indikator, dan disusul dengan TPB 1 Tanpa Kemiskinan dengan 12 indikator. Rincian masing-masing indikator TPB dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel II- 112 Capaian Indikator TPB Berdasarkan TPB Kota Padang

No	Nama TPB	Jumlah Indikator	Capaian			
			SS	SB	NA	BB
1	Tanpa Kemiskinan	25	13	12		
2	Tanpa Kelaparan	11	7	2	2	
3	Kehidupan sehat dan sejahtera	34	16	14	3	1
4	Pendidikan berkualitas	13	9	4		
5	Kesetaraan gender	14	7	4	2	1
6	Air bersih dan sanitasi layak	17	11	5		1
7	Menjamin akses energi					
8	Pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan layak	19	14	3	2	
9	Infrastruktur,industri dan inovasi	9	2	4	3	
10	Mengurangi kesenjangan	6	3	2		1
11	Kota dan permukiman berkelanjutan	14	11	2		1
12	Pola produksi dan konsumsi berkelanjutan	5	2	3		

No	Nama TPB	Jumlah Indikator	Capaian			
			SS	SB	NA	BB
13	Penanganan perubahan iklim	2	2			
15	Pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat	4	2	1		1
16	Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh	21	11	7	3	
17	Kemitraan untuk mencapai tujuan	15	7	4	2	2
Total		**209**	**117**	**67**	**17**	**8**
Persentase			**55,9%**	**32,1%**	**8,2%**	**3,8%**

Sumber : Dokumen KLHS RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029

2.5.2 Pelaksanaan TPB Menurut Kategori Pilar

Menurut pilar, capaian TPB Kota Padang terlihat padaTabel II-111. Pilar dengan capaian tertinggi adalah pilar sosial (52 indikator dengan kategori SS), diikuti dengan pilar lingkungan (28 indikator dengan kategori SS) dan pilar ekonomi (26 indikator dengan kategori SS). Kategori SB dan NA tertinggi juga berada pada pilar sosial dengan 35 indikator dengan capaian SB, dan 7 indikator dengan capaian NA. Rincian masing-masing indikator TPB dapat dilihat pada Lampiran 1.

Tabel II- 113 Capaian Indikator TPB Berdasarkan Pilar

No	Nama TPB	Jumlah Indikator	Capaian			
			SS	SB	NA	BK
1	Ekonomi	49	26	13	7	3
2	Hukum & tata kelola	21	11	7	3	0
3	Lingkungan	42	28	11	0	3
4	Sosial	97	52	36	7	2
Total		**209**	**117**	**67**	**17**	**8**
Persentase			**55,9%**	**32,1%**	**8,2%**	**3,8%**

Sumber : Dokumen KLHS RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029

Gambar II- 92 Grafik Persentase Capaian Indikator TPB Kota Padang Berdasarkan Pilar

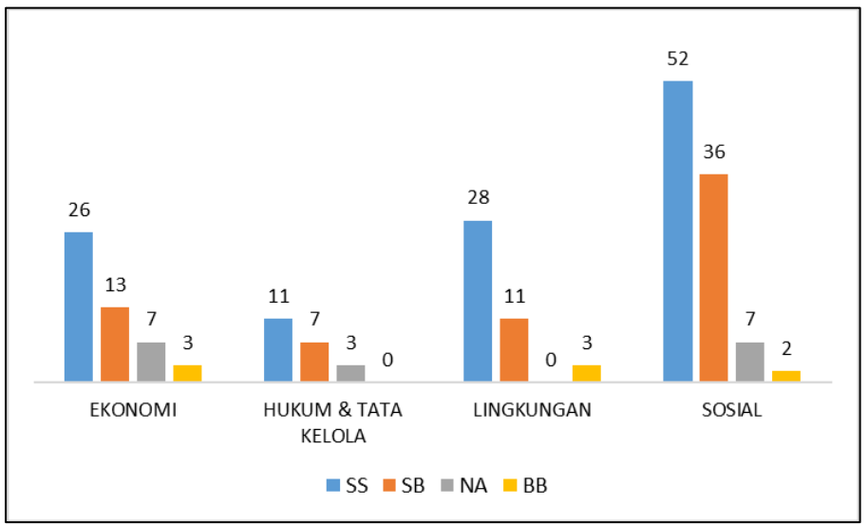

Sumber : Dokumen KLHS RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029

2.5.3 Pelaksanaan TPB Menurut Kategori Urusan

Evaluasi TPB menurut kategori urusan diklasifikasikan kepada beberapa kategori yaitu: absolut, penunjang, pilihan, wajib pelayanan dasar, dan wajib non pelayanan dasar. Kategori urusan wajib pelayanan dasar mempunyai capaian indikator SS sebanyak 67 indikator, diikuti dengan urusan wajib non pelayanan dasar dengan capaian kategori SS 40 indikator. Kedua jenis urusan ini juga mempunyai capaian indikator SB terbanyak yaitu masing-masing 40 indikator dan 23 indikator. Capaian pelaksanaan TPB Kota Padang menurut kategori urusan dapat dilihat pada Tabel II-112. Rincian masing-masing indikator TPB dapat dilihat pada Lampiran 1

Tabel II- 114 Capaian Indikator TPB Berdasarkan Kategori Jenis Urusan Kota Padang

No	Nama TPB	Jumlah Indikator	Capaian			
			SS	SB	NA	BK
1	Absolut	1			1	
2	Penunjang	11	6	3		2
3	Pilihan	12	5	2	3	
4	Wajib Non Pelayanan Dasar	79	39	22	8	4
5	Wajib Pelayanan Dasar	119	67	40	5	8
Total		**209**	**117**	**67**	**17**	**8**
Persentase			**55,9%**	**32,1%**	**8,2%**	**3,8%**

Sumber : Dokumen KLHS RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029

Gambar II- 93 Grafik Persentase Capaian Indikator TPB Kota Padang Berdasarkan Kategori Jenis Urusan

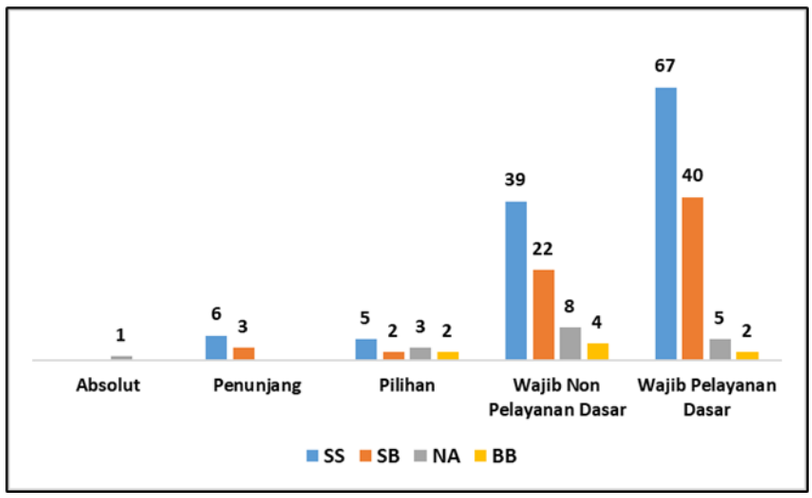

Sumber : Dokumen KLHS RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa RPJMD disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN untuk menjamin konsistensi arahan pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Visi dalam RPJMD adalah Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024. Visi Misi pembangunan Kota Padang tahun 2025-2029 juga merupakan penjabaran dari visi misi Presiden dan Wakil Presiden yang terangkum dalam kerangka Asta Cita dan telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Selain itu juga akan merujuk kepada Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat yang dituangkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029.

Visi dan Misi ini akan menjadi arahan pembangunan Kota Padang selama lima tahun mendatang dan terjabarkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang lebih khusus, fokus dan terukur kinerjanya. Perumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sangat penting dalam menentukan arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang terpilih.

3.1 Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang Tahun 2025-2045

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Tahun 2025-2045 telah selaras dan berpedoman kepada RPJPN Tahun 2025-2045 terutama terkait arah kebijakan kewilayahan, arah pembangunan, dan kinerja/indikator yang sesuai dengan kewenangan, karakteristik, inovasi, dan pengembangan daerah.

RPJPD Kota Padang Tahun 2025-2045 mendukung sepenuhnya upaya pencapaian Indonesia Emas 2045, untuk itu RPJPD Kota Padang 2025-2045 mempedomani sepenuhnya arahan RPJPN 2025-2045 dalam mewujudkan Transformasi Ekonomi, Transformasi Sosial dan Transformasi Kelembagaan dengan memperhatikan aspek landasan transformasi dan kerangka implementasi transformasi di daerah.

3.1.1.Visi dan Sasaran Visi RPJPD Kota Padang Tahun 2025-2045

Berdasarkan analisis terhadap kondisi umum daerah Kota Padang, permasalahan daerah dan isu strategis serta sinkronisasi dengan visi pembangunan pada RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2045 dan RPJP Nasional Tahun 2025-2045, maka Visi Pembangunan Kota Padang Tahun 2025-2045 adalah

“KOTA PADANG MAJU, BERBUDAYA, DAN BERKELANJUTAN MENUJU KOTA JASA TERKEMUKA”

Kata kunci yang menunjukkan arah pembangunan jangka panjang Kota Padang dalam visi tersebut dijelaskan sebagai berikut:

MAJU

Menunjukkan tujuan untuk mencapai kemajuan yang pesat dan Kota Padang yang tangguh dan maju dalam segala hal seperti ekonomi yang tangguh, berkualitas dan beradab, infrastruktur sebagai Kota Modern, Sumber Daya Manusia yang berkualitas, masyarakat sejahtera, Kota Padang sebagai pusat pertumbuhan Sumatera Barat dan telah menerapkan penggunaan teknologi dalam seluruh aspek.

BERBUDAYA

Menunjukkan dan menegaskan pembangunan Kota Padang tetap senantiasa dalam rangka memperkaya dan melestarikan warisan budaya kota, menciptakan identitas yang kuat dan beragam terhadap peningkatan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal yang berfalsafah adat basandi syara’ dan syara’ basandi kitabullah. Kota Padang diarahkan menjadi pusat kebudayaan dan pendidikan serta mempunyai ketahanan sosial, budaya dan ekologi yang baik.

BERKELANJUTAN

Menunjukkan dan menekankan pada komitmen terhadap perlindungan kualitas lingkungan hidup, tata kelola yang baik, dan penggunaan sumber daya alam yang keberlanjutan dalam pembangunan yang seimbang dalam seluruh aspek.

KOTA JASA TERKEMUKA

Menunjukkan arah perkembangan kota sebagai pusat pelayanan unggulan dengan kualitas terbaik dan terkemuka, baik dalam hal infrastruktur yang menunjang sektor perdagangan, pendidikan, kesehatan, dan sektor jasa lainnya.

Visi "Kota Padang Maju, Berbudaya, dan Berkelanjutan menuju Kota Jasa Terkemuka" merangkum aspirasi kota untuk tumbuh dan berkembang secara holistik, menggabungkan kemajuan ekonomi dengan pelestarian budaya dan ketahanan lingkungan. Dengan fokus pada keseimbangan antara pertumbuhan dan keberlanjutan, kota ini diharapkan menjadi pusat layanan yang unggul, menjunjung tinggi nilai-nilai lokal dan meningkatkan kualitas hidup penduduknya.

Berikut disajikan sasaran visi Kota Padang Tahun 2025-2045 seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel III- 1 Sasaran Visi Kota Padang 2025-2045

Sasaran Visi	Indikator Kinerja	Target				
		2025	2030	2035	2040	2045
Meningkatkan Pendapatan Per Kapita	PDRB per Kapita ADHB (Rp.Juta)	87,57	213,45	339,56	465,55	503,53
	Kontribusi PDRB Sub sektor Perikanan	3,34	3,49	3,69	4,36	4,5
	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	11,01	12,36	13,71	15,05	16,40
Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	Tingkat Kemiskinan (%)	3,14-3,55	2,68-3,14	2,04-2,53	1,17-1,70	0,05-0,61
	Rasio Gini (indeks)	0,332	0,330	0,329	0,328	0,327
	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,48	5,8	5,98	5,4	4,92
Meningkatkan Kualitas Penyenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3,30	3,55	3,80	4,05	4,3
Meningkatkan Daya saing sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	84,0	84,5	85,0	85,5	86
	Tingkat produktivitas tenaga kerja	0,25	0,63	0,67	0,72	0,75
Peningkatan Kualitas Lingkung an Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77,36	78,42	79,48	80,54	81,6

Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang Tahun 2025-2045

3.1.2.Misi RPJPD Kota Padang Tahun 2025-2045

Misi pembangunan Kota Padang tahun 2025-2045 merupakan upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. Dalam mewujudkan visi dari pembangunan Kota Padang yang sudah dijelaskan pada bagian diatas, maka ditempuh melalui penjabaran dalam bentuk misi pembangunan Kota Padang sebagai berikut:

Misi 1: Mewujudkan Transformasi Sosial dalam Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Kreatif, Inovatif dan Bertakwa

Dalam menjalankan misi ini dilakukan melalui upaya:

1) Pengembangan Pendidikan Berkualitas

Meningkatkan sistem pendidikan guna memberikan akses yang merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat khususnya Pendidikan PAUD dan Wajib belajar 12 tahun. Hal ini mencakup peningkatan fasilitas pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pendidik, dan penyediaan program pendidikan yang relevan dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi.

2) Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Program pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi tenaga kerja, baik yang telah bekerja maupun yang baru memasuki pasar kerja. Dengan demikian, SDM Kota Padang dapat terus meningkatkan keterampilan mereka sesuai dengan tuntutan pasar kerja yang terus berkembang.

3) Fasilitasi Lingkungan Kreatif Menciptakan lingkungan yang merangsang kreativitas. Ini termasuk dukungan terhadap industri kreatif, peningkatan ruang publik yang mendukung seni dan inovasi, serta pelibatan masyarakat dalam kegiatan budaya dan seni.

4) Budaya Inovasi

Mendorong terciptanya lingkungan yang mendukung inovasi, baik dalam sektor bisnis maupun masyarakat umum. Dukungan kepada riset dan pengembangan serta kolaborasi antara sektor swasta, komunitas, pemerintah, dan perguruan tinggi menjadi kunci dalam memicu inovasi.

5) Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan dan memberikan wadah bagi masyarakat untuk turut serta dalam berbagai kegiatan yang meningkatkan kualitas hidup dan kreativitas mereka.

6) Peningkatan Akses Teknologi dan Informasi Peningkatan akses masyarakat terhadap teknologi dan informasi dengan melibatkan pembangunan infrastruktur teknologi, penyediaan akses internet yang merata, dan peningkatan literasi digital guna mendukung kemajuan pendidikan dan inovasi.

Misi 2: Mewujudkan Transformasi Perekonomian yang Berkualitas dan Berkelanjutan

Misi yang fokus pada upaya meningkatkan kualitas dan keberlanjutan perekonomian dilaksanakan melalui upaya sebagai tersebut:

1) Diversifikasi Sektor Ekonomi

Mengurangi ketergantungan pada sektor ekonomi tertentu dan mendorong diversifikasi untuk memperkuat sektor-sektor ekonomi yang berpotensi dan mendukung pertumbuhan yang seimbang.

2) Pemberdayaan UMKM dan Ekonomi Lokal

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta mendukung ekonomi local dengan memberikan dukungan finansial, pelatihan, dan akses pasar, RPJPD berusaha meningkatkan kontribusi UMKM dalam menciptakan lapangan kerja dan memperkuat ekonomi daerah.

3) Infrastruktur yang Mendukung Perekonomian

Pembangunan infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi, termasuk transportasi, listrik, air bersih, dan teknologi informasi. Infrastruktur yang baik menjadi landasan penting bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

4) Promosi Investasi dan Kemitraan Publik-Swasta

Meningkatkan iklim investasi dengan menyediakan insentif dan mempromosikan investasi di berbagai sektor. Kemitraan publik swasta juga didorong untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan proyek ekonomi strategis.

5) Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan

Memperhatikan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam melalui kebijakan untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan bijaksana, meminimalkan dampak lingkungan, dan menjaga keseimbangan ekosistem.

6) Peningkatan Daya Saing

Peningkatan daya saing ekonomi kota. Melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, inovasi, dan efisiensi operasional, Kota Padang bertujuan menjadi pusat ekonomi yang kompetitif di tingkat regional maupun nasional.

7) Pemberdayaan Digital dan Inovasi Teknologi

Meningkatkan peran transformasi digital dan inovasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi bisnis, meningkatkan akses pasar global bagi pelaku usaha, dan menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih dinamis dan terkini.

Melalui pencapaian misi ini, RPJPD Kota Padang berupaya menciptakan perekonomian yang tidak hanya berkualitas tetapi juga berkelanjutan, melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang merata dan berdaya tahan.

Misi 3: Mewujudkan Tranformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Misi khusus yang menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dilaksanakan melalui upaya sebagai berikut:

1) Transparansi dan Akuntabilitas

Meningkatkan tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini melibatkan penyediaan informasi yang mudah diakses oleh publik, serta perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

2) Partisipasi Masyarakat

Komitmen untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Melalui mekanisme partisipatif, seperti konsultasi publik dan forum partisipatif, pemerintah berusaha memperkuat peran masyarakat dalam menyusun kebijakan dan memonitor pelaksanaannya.

3) Pemberantasan Korupsi

Pemberantasan korupsi melalui Langkah-langkah preventif dan penegakan hukum yang tegas diimplementasikan untuk menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.

4) Peningkatan Kapasitas SDM

Meningkatkan kapasitas dan integritas SDM. Pelatihan, pengembangan kompetensi, dan pembinaan etika menjadi fokus utama dalam upaya menciptakan birokrasi yang profesional dan melayani masyarakat dengan baik.

5) Penggunaan Teknologi Informasi

Penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, seperti sistem e-government. Penggunaan teknologi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi potensi praktik korupsi, dan memberikan pelayanan publik yang lebih cepat dan efektif.

6) Pemantauan Kinerja dan Evaluasi Program

Pemantauan kinerja dan evaluasi program Pembangunan yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap program dan kebijakan pemerintah mencapai hasil yang diinginkan, serta memberikan ruang untuk perbaikan berkelanjutan.

7) Perlindungan Hak Asasi Manusia

Pemerintah Kota Padang berkomitmen untuk melindungi hak asasi manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi ini mencakup upaya perlindungan dan pemajuan hak-hak warga kota serta menciptakan lingkungan yang adil dan inklusif.

Dengan mencapai misi-misi ini, RPJP Kota Padang tidak hanya menetapkan standar tinggi untuk tata kelola pemerintahan yang baik, tetapi juga mendorong kepercayaan masyarakat dan partisipasi aktif dalam proses pembangunan kota.

Misi 4: Mewujudkan Keamanan Daerah Tangguh, Masyarakat Damai, Demokratis, dan Inklusif, serta Stabilitas Ekonomi Makro Daerah

Misi yang menitikberatkan pada pencapaian keamanan daerah tangguh, demokratis, dan inklusif serta stabilitas ekonomi makro dilaksanakan melalui upaya sebagai berikut.

1) Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Umum

Meningkatkan keamanan dan ketertiban umum di seluruh wilayah Kota Padang. Implementasi kebijakan yang mendukung kerja sama antara aparat keamanan, pemerintah, dan masyarakat bertujuan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh penduduk.

2) Optimalisasi Sistem Keamanan

perencanaan strategis, dan peningkatan kapasitas aparat keamanan. Tujuan utama adalah memastikan respons cepat terhadap potensi ancaman dan kejadian yang dapat mengganggu ketertiban umum.

3) Penanggulangan Kejahatan

Misi ini menetapkan langkah-langkah konkret untuk penanggulangan kejahatan, termasuk penguatan penegakan hukum, patroli keamanan, dan pengembangan program rehabilitasi sosial untuk membantu mengurangi tingkat kejahatan.

4) Pengelolaan Lalu Lintas dan Transportasi Publik

Meningkatkan pengelolaan lalu lintas dan transportasi publik. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan sistem transportasi yang efisien, aman, dan teratur, sehingga berkontribusi pada ketertiban umum dan kenyamanan warga.

5) Penanganan Krisis dan Bencana

Penyusunan rencana tanggap darurat dan penanganan krisis untuk menghadapi potensi bencana alam atau insiden luar biasa lainnya. Upaya pencegahan dan persiapan yang matang diimplementasikan untuk memastikan stabilitas dan ketertiban dalam situasi darurat.

6) Pemberdayaan Masyarakat dalam Keamanan

Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan melalui Program-program sosial dan pendidikan diarahkan untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya berkontribusi dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum.

7) Fasilitasi Perdamaian Sosial

Fasilitasi perdamaian sosial melalui dialog antar kelompok masyarakat, pemahaman antaragama, dan program-program rekonsiliasi untuk mencegah potensi konflik dan meningkatkan harmoni di tengah masyarakat.

Dengan mewujudkan misi tersebut, RPJPD Kota Padang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang stabil, damai, dan tertib, di mana setiap warga dapat hidup dengan aman dan nyaman. Stabilitas ketentraman dan ketertiban umum menjadi dasar yang esensial untuk pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Misi 5: Mewujudkan Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi

Misi ini untuk mencapai ketahanan dalam tiga dimensi utama: sosial, budaya, dan ekologi. Hal ini dilakukan melalui upaya:

1) Ketahanan Sosial

Membangun ketahanan sosial di antara warga dengan fokusnya termasuk penguatan jaringan sosial, peningkatan kapasitas

masyarakat dalam menghadapi perubahan, dan pengembangan program kesejahteraan sosial untuk mendukung kelompok yang rentan.

2) Pelestarian dan Pemberdayaan Budaya Lokal

Pelestarian dan pemberdayaan budaya lokal sebagai bagian integral dari keberlanjutan kota. Misi ini mencakup upaya untuk melestarikan tradisi, seni, dan warisan budaya kota, serta memberikan dukungan kepada pelaku seni dan budaya.

3) Ketahanan Ekologi

Peningkatan ketahanan ekologi Kota Padang yang mencakup pelestarian lingkungan alam, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, dan upaya untuk mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem melalui kebijakan lingkungan yang bijaksana.

4) Peningkatan Kualitas Hidup dan Pemerataan Pembangunan

Peningkatan kualitas hidup semua warga dan memastikan pemerataan Pembangunan yang mencakup redistribusi sumber daya dan layanan untuk meminimalkan kesenjangan antar kelompok masyarakat dan memastikan bahwa seluruh warga dapat menikmati manfaat pembangunan.

5) Penanganan Ketidaksetaraan dan Kemiskinan

Misi ini bertujuan untuk mengatasi ketidaksetaraan dan kemiskinan melalui program-program yang mendukung akses pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi bagi kelompok masyarakat yang lebih rentan.

6) Pengembangan Infrastruktur Ramah Lingkungan

Pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan yang mencakup investasi dalam transportasi berkelanjutan, pengelolaan limbah yang baik, dan penyediaan fasilitas umum yang mendukung gaya hidup berkelanjutan.

7) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan

Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dengan melibatkan pendidikan lingkungan, partisipasi dalam proyek-proyek pelestarian alam, dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam.

Melalui implementasi misi ini, RPJPD Kota Padang berusaha mencapai ketahanan holistik yang melibatkan aspek-aspek sosial, budaya, dan ekologi. Dengan demikian, kota ini diharapkan mampu menghadapi tantangan masa depan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Misi 6: Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan

Misi ini untuk mencapai pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan. Untuk itu perlu dilakukan berbagai upaya sebagai berikut.

1) Pengembangan Infrastruktur di Seluruh Wilayah

Pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah Kota Padang dengan fokus utama adalah memastikan bahwa setiap bagian kota memiliki akses yang setara terhadap fasilitas transportasi, air bersih, listrik, dan layanan dasar lainnya.

Pengembangan infrastruktur harus mengacu kepada RDTR Kota Padang dengan zona-zona yang sudah ditetapkan, dengan maksud memberikan kepastian kepada publik untuk mentaati perencanaan pengembangan, dan untuk menjamin pengembangan yang seimbang dan berkelanjutan. Pengembangan infrastruktur mesti sejalan dengan arah pengembangan wilayah Sumatera, dan arah pengembangan Kota Padang. Arah pengembangan infrastruktur ini dimaksudkan untuk memberikan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi yang berbasis jasa dan perdagangan, disesuaikan dengan daya dukung Kota Padang, mempertimbangkan mitigasi terhadap bencana, serta pertumbuhan dan perkembangan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana, arah pertumbuhan ini tidak boleh merusak hulu DAS (Daerah Aliran Sungai) yang mesti dijaga sebagai konservasi, yaitu hulu DAS Batang Arau, Kuranji, Air Dingin, Pisang, dan Kandis.

2) Pemberdayaan Ekonomi Lokal

Peningkatan ekonomi di seluruh wilayah dengan mendorong pemberdayaan ekonomi lokal termasuk dukungan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta industri lokal guna menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemberdayaan ekonomi lokal perlu bersinergi dengan sektor pendidikan. Hal ini didukung oleh keberadaan banyak sekolah dan perguruan tinggi di Kota Padang. Hal ini sekaligus memberikan wahana pelatihan bagi siswa/mahasiswa, wadah penelitian dan pengabdian masyarakat bagi perguruan tinggi. Perguruan tinggi dapat menjadi incubator bagi pengembangan produk, promosi, pemasaran, dan pelatihan bagi UMKM. Di samping itu, perguruan tinggi dapat menjadi pemecah masalah berupa aplikasi teknologi terapan bagi UMKM. UMKM Kota Padang harus berbasis teknologi supaya dapat meningkatkan efisiensi produksi sehingga semakin kompetitif.

3) Penyediaan Fasilitas Pendidikan dan Kesehatan Merata

Peningkatan akses dan kualitas fasilitas pendidikan dan kesehatan di setiap daerah bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh warga memiliki akses yang setara dan merata terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Karena itu, pengembangan

sarana dan fasilitas pendidikan dan kesehatan mengikuti arah pertumbuhan penduduk, dengan tetap memperhatikan akses bagi kelompok marginal. Perhatian khusus diberikan pada pemerataan pendidikan dasar yang merata dan berkualitas, sehingga seluruh warga kota memiliki akses.

4) Pengembangan Pusat-Pusat Pelayanan

Pembangunan pusat-pusat pelayanan yang merata di seluruh wilayah yang mencakup pusat perbelanjaan, pusat kegiatan sosial, dan pusat layanan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup di semua bagian kota. Pemerintah Kota Padang perlu melakukan revitalisasi terhadap pusat-pusat perbelanjaan tradisional, dan melakukan penataan terhadap pusat perbelanjaan yang tumbuh di tengah masyarakat seperti di pinggir jalan, untuk tidak menimbulkan dampak negative seperti kemacetan, sampah, dan bau yang mengganggu masyarakat di sekitarnya. Pusat kegiatan social didorong melalui partisipasi masyarakat yang berbasis komunitas local. Pusat layanan masyarakat dapat ditingkatkan berbasis layanan dari level paling bawah, yaitu kelurahan.

5) Pemantapan Transportasi Publik

Pemantapan sistem transportasi publik untuk memudahkan mobilitas penduduk di seluruh wilayah Kota Padang. Infrastruktur transportasi yang baik akan membuka aksesibilitas dan memperkuat konektivitas antar-daerah. Transportasi public berbasis transportasi masal, yaitu bus dan kereta. Pertumbuhan jalan rel mengikuti pertumbuhan penduduk di sepanjang jalan bypass dan kemungkinan pertumbuhan di sekitar jalan tol PadangSicincin.

Ini untuk mendukung pengembangan wilayah ke arah Padang-Pariaman, mengingat ketersediaan lahan dan factor pendukung seperti air baku dan jalan. Transportasi bus diutamakan untuk koridor jalan utama ke tengah kota dan pusat perbelanjaan, pusat pendidikan, perkantoran, yang tidak dapat diakses jalan rel, dan sebagai feeder transportasi kereta dalam konsep pengembangan sistim transportasi yang terintegrasi. Di akses bus dan kereta, perlu disediakan kantong parkir untuk mendorong penggunaan transportasi public, mengurangi kemacetan di tengah kota, dan mengurangi polusi udara dan suara. Transportasi dengan kendaraan kecil dibatasi untuk kebutuhan local dan jarak pendek dari satu kawasan ke kawasan lain. Transportasi ke kawasan wisata andalan perlu disediakan.

6) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Pengelolaan ruang terbuka hijau yang merata di seluruh kota, lapangan, dan ruang terbuka lainnya menjadi bagian penting dari pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Lahan yang dimiliki Pemerintah Kota Padang

menjadi contoh pemanfaatan lahan untuk kepentingan konservasi dan paru-paru kota. RTH dibangun sebagai kawasan multi fungsi, yaitu sebagai paru-paru kota, kawasan resapan air, taman bermain dan rekreasi keluarga, dan lapangan olah raga. Untuk itu RTH mesti menyediakan fasilitas olah raga public seperti jogging track, peralatan kebugaran, sumur resapan, fasilitas sampah. RTH bisa memanfaatkan kawasan di pinggir sungai seperti kanal banjir, kawasan Pantai Padang, kawasan Balaikota Air Pacah.

7) Konservasi Lingkungan dan Kearifan Lokal

Konservasi lingkungan dan pemanfaatan kearifan lokal di setiap wilayah dalam upaya melestarikan ekosistem alam dan mengintegrasikan pengetahuan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam. Pelestarian lingkungan terutama diperlukan untuk kawasan hulu DAS dan pantai yang memiliki mangrove. Kawasan hulu DAS Kuranji, DS Batang Arau, DAS Air Dingin, DAS Pisang, DAS Kandis, serta pantai mangrove di Bungus Teluk Kabung dan nipah di Koto Tangah, merupakan ekosistim yang perlu dilindungi. Pengembangan wilayah tidak boleh merusak lingkungan ini. Pemanfaatan kawasan harus berbasis ekowisata dengan aktivitas seperti penanaman pohon, outbound pecinta alam, susur sungai, susur pantai, yang berbasis komunitas local seperti pokdarwis, masyarakat peduli sungai. Kearifan local seperti memelihara ikan larangan, mesti digiatkan dengan membina komunitas masyarakat dan bekerja sama dengan instansi lain seperti Balai Wilayah Sungai dan BKSDA.

8) Peningkatan Akses Teknologi Informasi

Peningkatan akses teknologi informasi di seluruh wilayah yang mencakup penyediaan akses internet yang merata dan fasilitas teknologi informasi untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat terlibat dalam era digital. Pemerintah Kota memastikan layanan serat optic menjangkau sebagian besar wilayah Kota Padang. Wilayah dengan akses yang sulit dapat diakses dengan BTS. Akses diprioritaskan untuk kawasan wisata strategis, kawasan pengembangan industri kreatif, dan kawasan perdagangan. Pemerintah kota dapat memperluas jangkauan internet dengan access point di titik-titik strategis seperti RTH dan bangunan public. Fasilitas ini ditujukan untuk mendukung perwujudan Kota Padang sebagai smart city, yang mampu memberikan data real time.

Misi 7: Mewujudkan Sarana dan Prasarana Kota yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Misi ini untuk mencapai sarana dan prasarana kota yang berkualitas dan ramah lingkungan. Hal ini dilakukan melalui upaya sebagai berikut:

1) Pengembangan Infrastruktur Berkualitas

Pengembangan infrastruktur yang berkualitas, termasuk jaringan jalan, transportasi publik, sistem air bersih, sanitasi, dan energi listrik. Fokus pada konstruksi dan pemeliharaan infrastruktur yang baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengembangan jaringan jalan diutamakan untuk jalan dengan tingkat kepadatan yang tinggi, baik jalan-jalan utama maupun jalan sekunder untuk mengurangi waktu tempuh dan memberikan alternative untuk mengurangi kemacetan. Akses jalan diprioritaskan untuk kawasan pariwisata strategis, dan kawasan industri. Jalan mesti memperhatikan sistim drainase yang mencukupi, dengan merevitalisasi sistim drainase jalan, dan berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai untuk sistim drainase primer. Untuk kawasan dengan kepadatan penduduk yang sangat tinggi seperti Jati, Ulak Karang, Tunggul Hitam, Belimbing, drainase kawasan mesti menjadi prioritas. Daerah yang sering terdampak banjir seperti kawasan Air Pacah memerlukan sistim drainase baru untuk mengantisipasi pengembangan wilayah dan pertumbuhan kawasan akibat pembangunan jalan tol Padang-Sicincin. Sistim air bersih perlu ditingkatkan sehingga layanan bisa mencapai 100%. Untuk itu perlu mencari sumber air baku seperti dari Batang Kuranji, Air Dingin, Batang Arau, dan alternative dari Batang Anai untuk pengembangan ke arah Koto Tangah. Masyarakat perlu diedukasi untuk mengurangi pemakaian air tanah, baik untuk rumah tangga maupun untuk keperluan komersil. Masyarakat perlu diedukasi untuk memiliki septic tank sendiri yang memenuhi persyaratan.

2) Peningkatan Kualitas Bangunan Publik

Peningkatan kualitas bangunan publik, seperti pusat perbelanjaan, sekolah, pusat kesehatan, dan fasilitas umum lainnya melalui desain yang ramah pengguna dan efisien energi menjadi pertimbangan utama dalam pembangunan. Mengingat posisi Kota Padang yang berada di zona gempa, dekat dengan pantai, dan memiliki curah hujan yang tinggi, bangunan public di Kota Padang mesti memenuhi beberapa persyaratan. Bangunan dirancang dengan periode ulang gempa sesuai ketentuan, memiliki sirkulasi udara yang baik untuk mengatasi suhu dan kelembaban yang tinggi, dan memiliki sistim drainase yang ramah lingkungan. Seluruh bangunan mesti memiliki akses untuk pengguna disabilitas, dan meminimalkan penggunaan energy. Pusat perbelanjaan tradisional perlu direhabilitasi dengan memperhatikan penataan perparkiran sehingga tidak mengganggu pengguna jalan, terutama pusat perbelanjaan yang berada di dekat persimpangan. Bangunan sekolah dan fasilitas kesehatan mesti gi limpasan air, berupa sumur resapan atau reservoir air hujan yang dapat digunakan sebagai cadangan air.

3) Penyediaan Ruang Terbuka Publik

Penyediaan ruang terbuka publik yang berkualitas di seluruh kota termasuk Taman, lapangan, dan area terbuka lainnya dirancang untuk memenuhi kebutuhan rekreasi, sosial, dan kegiatan publik lainnya. Ruang terbuka public dapat memanfaatkan kawasan konservasi yang berada di zona sempadan sungai dan pantai, lahan fasilitas umum di perumahan, lahan perkantoran pemerintah yang belum dimanfaatkan. Ruang terbuka selain untuk kebutuhan rekreasi, juga dimanfaatkan untuk olah raga dengan membangun fasilitas seperti jogging track dan alat kebugaran. Selain itu, di ruang terbuka perlu disediakan wahana belajar untuk meningkatkan kesadaran akan lingkungan, seperti percontohan untuk sumur resapan, pemeliharaan tanaman. Selain fasilitas yang sudah ada seperti di Kawasan Imam Bonjol, GOR Agus Salim, perlu dibangun kawasan serupa di Air Pacah, Kuranji, Lubuk Begalung dan kawasan yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi.

4) Inovasi Teknologi dalam Pelayanan Publik

Penggunaan inovasi teknologi untuk meningkatkan pelayanan publik termasuk penggunaan sistem e-government, smart city solutions, dan teknologi lainnya untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan kota. Penggunaan layanan e-government perlu diperluas dengan meningkatkan layanan menggunakan mobile. Smart city mulai diterapkan untuk sistem informasi perparkiran, informasi kemacetan, informasi banjir yang real time dan dapat diakses secara mobile.

5) Pengelolaan Sampah dan Limbah yang Berkelanjutan

Pengelolaan sampah dan limbah yang berkelanjutan dengan program daur ulang, peningkatan sistem pengelolaan sampah, dan penggunaan energi terbarukan, sehingga tercipta lingkungan yang bersih dan sehat. Pengelolaan sampah mesti dimulai dari rumah tangga, dengan program kampanye 3R (reduce, reuse, recycle) yang terus menerus. Pemerintah Kota mesti menggalakkan pemisahan sampah dari rumah tangga berupa program insentif bank sampah. Fasilitas pengolahan sampah mini bisa didorong di tingkat kelurahan. Daerah yang berada jauh dari pemukiman bisa digunakan untuk pengolahan sampah setempat. Pengumpulan dan pengolahan sampah harus berbasis komunal, yaitu sekelompok masyarakat seperti lingkungan RT atau RW atau kompleks perumahan tertentu.

6) Pemberdayaan Transportasi Berkelanjutan

Mendorong transportasi berkelanjutan dengan melibatkan pengembangan sistem transportasi umum, jalur sepeda, dan promosi kendaraan beremisi rendah untuk mengurangi dampak lingkungan dan kemacetan. Pengembangan transportasi terpadu dan berkelanjutan dilakukan dengan memperluas rute bus dan terintegrasi dengan moda transportasi rel. Pemerintah dapat membangun kantong-kantong parkir di sekitar stasiun kereta atau

halte bus. Rute kereta dan bus diutamakan untuk mendukung pengembangan kota ke arah Koto Tangah dan Kabupaten PadangPariaman, serta jalan tol Padang-Sicincin. Peningkatan transportasi umum juga perlu di dorong di kawasan dengan mobilitas tinggi seperti kawasan pendidikan dan perkantoran, kawasan produksi pertanian, dan kawasan wisata. Pemerintah secara bertahap mesti mengurangi penggunaan kendaraan umum berbahan bakar solar ke bahan bakar listrik dan gas yang lebih rendah emisi. Jalan-jalan sekunder atau jalan local diperbaiki sebagai jalur alternative untuk mengurangi kemacetan di jalur utama.

7) Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan

Penghijauan dan pelestarian lingkungan kota melalui Penanaman pohon, pembentukan taman kota, dan upaya pelestarian area hijau menjadi prioritas untuk menjaga keseimbangan ekosistem perkotaan. Penghijauan dan penanaman pohon dapat dilakukan di kawasan sempadan sungai dan pantai, yaitu di sepanjang Batang arau, Batang Kuranji, Batang Air Dingin beserta anak-anak sungainya. Selain itu, peremajaan dan penanaman pohon baru juga dilakukan di trotoar, median jalan, di sekitar bangunan pemerintah dan pelayanan public, di taman-taman kota. Kawasan penanaman ini juga bisa dilengkapi dengan sumur resapan, dan terintegrasi dengan taman rekreasi dan olah raga.

8) Peningkatan Daya Tahan Terhadap Bencana

Sebagai salah satu yang paling rentan di Indonesia terhadap bencana hidrometeorologi dan gempa bumi, Kota Padang menghadapi tantangan serius dalam membangun resiliensi. Pola curah hujan ekstrem, peningkatan suhu, degradasi daerah tangkapan air, permukiman di zona merah, dan infrastruktur EWS yang belum optimal memperparah dampak bencana. Oleh karena itu, rencana peningkatan daya tahan harus mencakup rehabilitasi kawasan pesisir dan DAS, peningkatan standar bangunan tahan gempa, serta perluasan ruang terbuka hijau untuk meredam efek iklim ekstrem. Integrasi rencana aksi iklim ke dalam perencanaan pembangunan Kota Padang menjadi penting agar seluruh kebijakan sektoral, baik di bidang transportasi, energi, tata ruang, maupun pengelolaan limbah, mampu menjawab tantangan perubahan iklim secara terpadu dan berkelanjutan.

Dalam konteks perencanaan, diperlukan sinkronisasi antara dokumen pembangunan daerah (seperti RPJMD dan RTRW) dengan Rencana Aksi Iklim (Climate Action Plan), agar seluruh program sektoral memiliki kontribusi nyata terhadap mitigasi emisi dan adaptasi iklim. Pendekatan ini juga harus diperkuat dengan sistem peringatan dini yang berfungsi baik, edukasi publik, serta skema pembiayaan yang mendukung inisiatif iklim berbasis pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

Misi 8: Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan

Misi ini untuk mencapai kesinambungan pembangunan dengan beberapa upaya dilakukan sebagai berikut:

1) Integrasi Pembangunan Berkelanjutan

integrasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam setiap aspek kebijakan dan keputusan pembangunan dengan mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan, sehingga tercapai keseimbangan Pembangunan yang berkelanjutan.

2) Pemanfaatan Sumber Daya secara Bijaksana

Pemanfaatan sumber daya alam dan manusia secara bijaksana yang mencakup kebijakan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, penghematan energi, dan penggunaan sumber daya secara efisien.

3) Peningkatan Kualitas Hidup

Peningkatan kualitas hidup Masyarakat dengan upaya peningkatan kesejahteraan, akses terhadap layanan dasar, dan penciptaan lingkungan yang mendukung kehidupan yang sehat dan produktif.

4) Pemberdayaan Ekonomi yang Inklusif

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif diciptakan melalui upaya pelibatan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), penciptaan lapangan kerja, dan penyediaan peluang ekonomi bagi semua lapisan masyarakat.

5) Adopsi Teknologi Hijau dan Inovasi

Misi ini mendorong adopsi teknologi hijau dan inovasi dalam setiap sektor. Dengan memanfaatkan solusi berkelanjutan, diharapkan dapat mengurangi risiko dampak lingkungan dan meningkatkan efisiensi dalam berbagai aktivitas pembangunan.

6) Partisipasi Masyarakat dan Pemberdayaan Lokal

Partisipasi masyarakat dan pemberdayaan lokal sebagai elemen kunci dalam pencapaian kesinambungan pembangunan. Program-program melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan proyek pembangunan yang berdampak positif.

7) Resilien Kota terhadap Perubahan Iklim

Misi ini mencakup peningkatan ketahanan Kota Padang terhadap perubahan iklim. Perencanaan tata ruang yang mempertimbangkan risiko perubahan iklim, pengelolaan air yang berkelanjutan, dan upaya mitigasi dampak perubahan iklim.

8) Peningkatan Literasi Lingkungan dan Sosial

Misi ini menekankan peningkatan literasi lingkungan dan sosial dalam kehidupan sosial Masyarakat yang dapat diwujudkan melalui edukasi dan kampanye kesadaran, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang peduli terhadap lingkungan dan sosial. Dengan

menjalankan misi ini, Kota Padang mengarah pada pembangunan yang tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang, memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan yang akan datang. Kesinambungan pembangunan menjadi pondasi untuk mencapai keseimbangan antara kemakmuran ekonomi, keadilan sosial, dan konservasi lingkungan.

3.1.3. Arah dan Sasaran Pembangunan RPJPD Kota Padang Tahun 2025-2045

Arah kebijakan merupakan suatu rumusan kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah serta menindaklanjuti RPJPD Kota Padang 2005-2025. Guna menentukan tahapan dan prioritas pembangunan Kota Padang selama 20 tahun dan mencapai target kinerja secara terukur dan konsisten maka arah kebijakan dalam mencapai visi dan misi pada RPJPD Tahun 2025-2045 dibagi menjadi 4 tahapan yakni:

1. Tahap Pertama (tahun 2025-2029) adalah Penguatan Pondasi Transformasi Kota Padang Menuju Kota Jasa Terkemuka.
2. Tahap Kedua (tahun 2030-2034) adalah Percepatan Pembangunan Kota Jasa Terkemuka yang Inklusif Berbasis Budaya.
3. Tahap Ketiga (tahun 2035-2039) adalah Penguatan Daya Saing yang Inklusif Menuju Kota Jasa Terkemuka.
4. Tahap Keempat (tahun 2040-2045) adalah Perwujudan Kota Padang Menjadi Kota Jasa Terkemuka.

Berikut diuraikan arah dan tema pembangunan berdasarkan periodesasi RPJMD selama RPJPD Kota Padang Tahun 2025-2045.

Periode Tahun 2025-2029

PENGUATAN PONDASI TRANSFORMASI KOTA PADANG MENUJU KOTA JASA TERKEMUKA

Arah kebijakan pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
2. Percepatan hilirisasi SDA dan produktifitas tenaga kerja serta penguatan riset inovasi hilirisasi SDA.
3. Penciptaan kelembagaan efisien, tepat fungsi; peningkatan kualitas ASN; penyediaan regulasi yang efektif; optimalisasi digitalisasi pelayanan publik.
4. Penguatan supremasi hukum, demokratisasi dan stabilitas ekonomi makro dan daerah, daya saing daerah.
5. Penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.

6. Pembangunan wilayah dan pusat-pusat pertumbuhan berkeadilan.
7. Pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana dasar masyarakat serta infrastruktur dasar dan ekonomi daerah yang berkeadilan.
8. Reformasi tata kelola fiskal dan sinergi pembiayaan pembangunan non pemerintah

Periode Tahun 2030-2034

PERCEPATAN PEMBANGUNAN KOTA JASA TERKEMUKA YANG INKLUSIF BERBASIS BUDAYA

Arah kebijakan pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Percepatan pembangunan SDM berkualitas dan inklusif.
2. Peningkatan produktivitas produk secara masif serta perluasan sumber pertumbuhan ekonomi.
3. Penguatan kelembagaan kolaboratif dan SDM ASN kompetitif; serta digitalisasi dan pelayanan publik berbasis teknologi-informatif.
4. Pemantapan supremasi hukum, demokratisasi stabilitas ekonomi makro dan daya saing daerah.
5. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai pendorong pembangunan sosial ekonomi daerah.
6. Percepatan dan pemerataan pembangunan wilayah dan pusat-pusat pertumbuhan
7. Percepatan dan pemerataan ketersediaan sarana dan prasarana serta infrastruktur dasar dan ekonomi daerah yang berkeadilan
8. Optimalisasi sumber pendanaan pemerintah, dan pengembangan sumber pendanaan non pemerintah

Periode Tahun 2035-2039

PENGUATAN DAYA SAING YANG INKLUSIF MENUJU KOTA JASA TERKEMUKA

Arah kebijakan pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Penguatan daya saing SDM dan keberlanjutan kesejahteraan.
2. Integrasi perekonomian daerah dengan perekonomian regional, domestik dan global.
3. Mewujudkan kelembagaan pemerintahan yang kolaboratif dan adaptif
4. Mewujudkan supremasi hukum: demokratisasi, stabilitas perekonomian dan daya saing daerah.
5. Mewujudkan ketangguhan dan ketahanan sosial budaya dan ekologi dalam menghadapi berbagai perubahan dan pembangunan.
6. Pemantapan pembangunan wilayah dan pusat-pusat pertumbuhan potensial daerah.

7. Pemantapan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta infrastruktur dasar dan ekonomi daerah.
8. Perluasan cakupan sektor yang menggunakan sumber pendanaan non pemerintah di daerah

Periode Tahun 2040-2045

PERWUJUDAN KOTA PADANG MENJADI KOTA JASA TERKEMUKA

Arah kebijakan pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat yang Unggul, Sejahtera dan Berdaya Saing.
2. Mewujudkan kemandirian dan penguatan perekonomian daerah yang berkelanjutan.
3. Penciptaan Birokrasi yang berintegritas, responsive dan adaptif.
4. Penciptaan daerah yang aman, demokrasi, mandiri dan berdaya saing.
5. Penciptaan daerah yang tangguh serta mempunyai ketahanan terhadap perubahan dan dampak pembangunan.
6. Mewujudkan pembangunan wilayah yang maju dan berkelanjutan.
7. Mewujudkan daerah maju dan terintegrasi.
8. Peningkatan sinergi pendanaan pemerintah dan non pemerintah

Arah kebijakan pembangunan berdasarkan misi pembangunan

Dalam menjalankan 8 misi pembangunan daerah maka ditetapkan arah kebijakan pembangunan untuk setiap periodesasi RPJMD. Berikut disajikan dalam bentuk tabel arah kebijakan berdasarkan pada misi pembangunan Kota Padang tahun 2025-2045 dan arah kebijakan dalam menunjang 17 arah pembangunan nasional

Tabel III- 2 Arah Kebijakan Kota Padang Berdasarkan Misi Pembangunan Tahun 2025-2045

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		I	II	III	IV
		2025-2029 Penguatan Pondasi	**2030-2034 Akselerasi Transformasi**	**2035-2039 Ekspansi Transformasi**	**2040-2045 Kota Padang Emas**
		Tema Pembangunan: Penguatan Pondasi Transformasi Kota Padang Menuju Kota Jasa Terkemuka	Tema Pembangunan : Percepatan Pembangunan Kota Jasa yang Inklusif Berbasis Budaya	Tema Pembangunan: Penguatan Daya Saing yang Inklusif Menuju Kota Jasa Terkemuka	Tema Pembangunan: Perwujudan Kota Padang menjadi Kota Jasa Terkemuka
Kota Padang Maju, Berbudaya, dan Berkelanjutan Menuju Kota Jasa Terkemuka	**TRANSFORMASI**				
	Misi 1 : Mewujudkan Transformasi Sosial dalam menghasilkan Sumber Daya manusia yang berkualitas, kreatif dan Inovatif	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial	Percepatan pembangunan SDM berkualitas dan inklusif	Penguatan daya saing SDM dan keberlanjutan kesejahteraan	Mewujudkan masyarakat yang Unggul, Sejahtera dan Berdaya Saing
	Misi 2 : Mewujudkan transformasi perekonomian yang berkualitas dan berkelanjutan	Percepatan hilirisasi SDA dan produktifitas tenaga kerja serta penguatan riset inovasi hilirisasi SDA	Peningkatan produktivitas produk secara masif serta perluasan sumber pertumbuhan ekonomi	Integrasi perekonomian daerah dengan perekonomian regional, domestik dan global	Mewujudkan kemandirian dan penguatan perekonomian daerah yang berkelanjutan
	Misi 3 : Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Penciptaan kelembagaan efisien, tepat fungsi; peningkatan kualitas ASN; penyediaan regulasi yang efektif; optimalisasi digitalisasi pelayanan publik.	Penguatan kelembagaan kolaboratif dan SDM ASN kompetitif; serta digitalisasi dan pelayanan publik berbasis teknologi-informatif.	Mewujudkan kelembagaan pemerintahan yang kolaboratif dan adaptif	Penciptaan Birokrasi yang berintegritas, responsive dan adaptif
	LANDASAN TRANSFORMASI				
	Misi 4 : Mewujudkan Keamanan Daerah Tangguh,Masyarakat Damai, Demokratis, dan Inklusif, serta Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Penguatan supremasi hukum, demokratisasi dan stabilitas ekonomi makro dan daerah, daya saing daerah	Pemantapan supremasi hukum: demokratisasi stabilitas ekonomi makro dan daya saing daerah	Mewujudkan supremasi hukum: demokratisasi , stabilitas perekonomian dan daya saing daerah	Penciptaan daerah yang aman, demokrasi, mandiri dan berdaya saing
	Misi 5 : Mewujudkan ketahanan sosial, budaya dan ekologi	Penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan	Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai pendorong pembangunan sosial ekonomi daerah	Mewujudkan ketangguhan dan ketahanan sosial budaya dan ekologi dalam menghadapi berbagai perubahan dan pembangunan	Penciptaan daerah yang tangguh serta mempunyai ketahanan terhadap perubahan dan dampak pembangunan

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		I	II	III	IV
		2025-2029 Penguatan Pondasi	**2030-2034 Akselerasi Transformasi**	**2035-2039 Ekspansi Transformasi**	**2040-2045 Kota Padang Emas**
		Tema Pembangunan: Penguatan Pondasi Transformasi Kota Padang Menuju Kota Jasa Terkemuka	Tema Pembangunan : Percepatan Pembangunan Kota Jasa yang Inklusif Berbasis Budaya	Tema Pembangunan: Penguatan Daya Saing yang Inklusif Menuju Kota Jasa Terkemuka	Tema Pembangunan: Perwujudan Kota Padang menjadi Kota Jasa Terkemuka
	KERANGKA IMPLEMENTASI TRANSFORMASI				
	Misi 6 : Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	Pembangunan wilayah dan pusat- pusat pertumbuhan berkeadilan	Percepatan dan pemerataan pembangunan wilayah dan pusat- pusat pertumbuhan	Pemantapan pembangunan wilayah dan pusat- pusat pertumbuhan potensial daerah	Mewujudkaan pembangunan wilayah yang maju dan berkelanjutan
	Misi 7 : Mewujudkan sarana dan prasarana kota yang berkualitas **lingkungan**	Pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana dasar masyarakat serta infrastruktur dasar dan ekonomi daerah yang berkeadilan	Percepatan dan pemerataan ketersediaan sarana dan prasarana serta infrastruktur dasar dan ekonomi daerah yang berkeadilan	Pemantapan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta infrastruktur dasar dan ekonomi daerah .	Mewujudkan daerah maju dan terintegrasi
	Misi 8 : Mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah	Reformasi tata kelola fiscal dan sinergi pembiayaan pembangunan non pemerintah	Optimalisasi sumber pendanaan pemerintah, dan pengembangan sumber pendanaan non pemerintah.	Perluasan cakupan sektor yang menggunakan sumber dana non pemerintah di daerah.	Peningkatan sinergi pendanaan pemerintah dan non pemerintah.

Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok dan Indikator Utama Pembangunan

Terdapat tiga hal pokok yang menjadi acuan pembangunan Indonesia, yakni stabilitas bangsa yang terjaga, keberlanjutan dan kesinambungan, serta sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk memastikan tercapainya tujuan tersebut, penyusunan RPJPD Kota Padang Tahun 2025-2045 mengacu sepenuhnya RPJPN 2025-2045 dimana di tahun 2045, bangsa Indonesia kita harapkan akan menjadi negara dengan pendapatan per kapita setara negara maju, negara yang diperkirakan, kita akan mencapai USD 30.300 per kapita, memiliki kepemimpinan dan pengaruh yang kuat di dunia internasional, dengan kemiskinan mendekati 0% dan ketimpangan berkurang. Untuk mewujudkan target tersebut, RPJPN 2025-2045 telah merumuskan 8 Agenda Pembangunan, 17 Arah Pembangunan yang diukur melalui 45 Indikator Utama Pembangunan.

45 Indikator Utama Pembangunan digunakan dan diselaraskan sepenuhnya oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Pemerintah Kota se-Indonesia. Juga telah ditetapkan target lima-tahunan dari 45 indikator utama pembangunan tersebut

3.2. Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029

RPJMN Tahun 2025-2029 merupakan implementasi tahap pertama RPJPN Tahun 2025- 2045. Untuk itu di dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dirumuskan upaya-upaya transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan dalam Tahap I RPJPN Tahun 2025-2045. RPJMN Tahun 2025-2029 mengelaborasi substansi dari pendekatan perencanaan teknokratik dan politis. Prioritas pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029 disusun dengan memadupadankan Visi Misi Presiden dan kebijakan RPJPN Tahun 2025-2045. Delapan prioritas pembangunan nasional diarahkan secara konkret untuk mencapai sasaran pembangunan.

3.2.1.Visi RPJMN Tahun 2025-2029

Visi Presiden periode 2025-2029 yaitu "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita.

3.2.2.Misi RPJMN Tahun 2025-2029

RPJMN Tahun 2025-2029 memuat delapan Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Setiap Prioritas Nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025-2029. Prioritas Nasional adalah struktur pokok seluruh rencana pembangunan RPJMN Tahun 2025–2029. Untuk pencapaian sasarannya, setiap Prioritas Nasional diterjemahkan dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas yang memiliki sasaran yang terukur untuk memudahkan pelaksanaannya di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha (BUMN, Swasta). Adapun Misi RPJMN Tahun 2025-2029 yang juga menjadi Prioritas Nasional, yakni sebagai berikut :

Misi 1 : Memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

Misi 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Misi 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

Misi 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

Misi 5 : Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Misi 6 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

Misi 7 : Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

Misi 8 : Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

3.2.3.Sasaran Pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029

RPJMN Tahun 2025-2029 dilengkapi dengan sasaran pembangunan yang terukur. Sasaran pembangunan menggambarkan kondisi yang diharapkan dalam mencapai penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi tinggi berkelanjutan. Kondisi yang diharapkan juga diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan. Pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2025-2029 merupakan manifestasi dari penguatan transformasi menuju Indonesia Emas 2045.

Representasi keberhasilan pembangunan tahun 2025-2029 tergambar pada pencapaian sasaran pembangunan nasional sebagai berikut :

1. Sasaran Pembangunan 1 Meningkatkan Pendapatan per Kapita menuju setara Negara Maju yang ditandai dengan :
   a. Pertumbuhan ekonomi dari 5,05 (2024) menjadi 5,3 (2025) dan menuju 8% (2029)
   b. GNI per kapita meningkat dari 4.870 USD (2023) menjadi 5.410 USD (2025) dan 8.000 USD (2029)
   c. Kontribusi PDB Maritim meningkat dari 7,9% (2022) menjadi 8,1% (2025) dan 9,1% (2029)
   d. Kontribusi PDB Manufaktur meningkat dari 18,67% (2023) menjadi 20,8% (2025) dan 21,9% (2029)
2. Sasaran Pembangunan 2 Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat ditandasi dengan Global Power Index meningkat dari peringkat 34 (2023) menjadi peringkat 33 (2025) dan peringkat 29 (2029)
3. Sasaran Pembangunan 3 Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang yang ditandai dengan :

a. Tingkat Kemiskinan turun dari 9,03% (Mar 2024) menjadi 7,0-8% (2025) dan 4,5-5,0% (2029) serta kemiskinan ekstrem (2,15 PPP) hingga <0,5% (2026)
b. Rasio gini turun dari 0,379 (Mar 2024) menjadi 0,378-0,382 (2025) dan 0,372-0,375 (2029)
c. Kontribusi PDRB KTI meningkat dari 20,9% (2023) menjadi 21,4% (2025) dan 22,4% (2029)

4. Sasaran Pembangunan 4 Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat yang ditandai dengan Indeks Modal Manusia (IMM) meningkat dari 0,54 (2020) menjadi 0,56 (2025) dan 0,59 (2029)
5. Sasaran Pembangunan 5 Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission yang ditandai dengan :
   a. Penurunan intensitas emisi GRK dari 34,09% (2022) menjadi 35,53% (2025) dan 45,17% (2029)
   b. Indeks kualitas lingkungan hidup meningkat dari 72,54 (2023) menjadi 76,49 (2025) dan 77,20 (2029)

3.3. Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

Pembangunan Daerah Sumatera Barat Tahun 2025-2030 merupakan gambaran penjabaran visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 5 (lima) tahun kedepan. Visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2025-2029 kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk dapat diimplementasikan dalam program/kegiatan prioritas pembangunan daerah, dengan tetap memperhatikan isu strategis dan lingkungan strategis dan pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang daerah.

3.3.1.Visi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

Dalam rangka menyongsong periode pembangunan jangka menengah tahun 2025–2029, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan arah pembangunan daerah yang dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025–2045. RPJMD ini menjadi pedoman strategis dan operasional bagi seluruh perangkat daerah dalam perumusan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan selama lima tahun ke depan.

Sebagai dokumen perencanaan yang bersifat politis-teknokratis, RPJMD harus mencerminkan cita-cita kolektif dan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan untuk membawa Provinsi Sumatera Barat ke arah kemajuan yang lebih baik, dengan menjawab berbagai tantangan global dan nasional, serta memanfaatkan potensi dan kekuatan lokal.

Oleh karena itu, visi pembangunan yang dirumuskan tidak hanya dilahirkan serta mencerminkan harapan jangka menengah Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, tetapi juga selaras dengan arah pembangunan jangka panjang dan nilai-nilai luhur yang hidup dalam masyarakat Sumatera Barat. Visi pembangunan merupakan gambaran ideal tentang kondisi masa depan daerah yang ingin diwujudkan, sebagai arah utama bagi perencanaan strategis di semua sektor pembangunan serta menjadi komitmen semua unsur pembangunan baik Pemerintah Daerah, DPRD, dunia usaha serta masyarakat seluruhnya. Setelah melalui proses perumusan yang melibatkan analisis strategis, pemetaan isu utama pembangunan, dan masukan dari berbagai unsur masyarakat, maka ditetapkanlah Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029, yaitu:

"SUMATERA BARAT MADANI YANG MAJU DAN BERKEADILAN"

Tabel III- 3 Visi RPJMN Tahun 2025-2029

NO	SASARAN VISI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			2025	2030
1	Peningkatan pendapatan per kapita	1. PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (Rp Juta)	58,32	142.65
		2. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	25,19	36,41
		3. Kontribusi PDRB Sektor Industri (%)	8,53	9,38
2	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	1. Tingkat Kemiskinan (%)	4,50 – 5,10	3,39 – 3,96
		2. Rasio Gini (indeks)	0,274	0.266
		3. Kontribusi PDRB Provinsi (%)	1,49	1,51
		4. Kontribusi PDRB Kab.Kep Mentawai terhadap PDRB Provinsi (%)	1,94	2,00
		5. Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,40	5,90
3	Peningkatan daya saing daerah	1. Indeks Daya Saing Daerah	3,58	3,94
4	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	1. Indeks Modal Manusia	0,58	0,63
5	Penurunan emisi Gas Rumah Kaca menuju zero emission	1. Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	52,62	62,27
		2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,95	79,00

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

3.3.2.Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

Untuk mewujudkan visi "Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan", Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyadari pentingnya arah kebijakan pembangunan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dapat diterjemahkan secara operasional ke dalam berbagai strategi dan program yang terukur serta berdampak nyata bagi masyarakat. Visi tersebut merupakan cerminan dari

harapan masyarakat terhadap kondisi ideal masa depan Sumatera Barat, yang memadukan nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat (madani), dorongan kemajuan di segala bidang pembangunan (maju), serta jaminan atas perlakuan yang setara dan hasil pembangunan yang merata bagi seluruh warga daerah (berkeadilan).

Dalam rangka menjabarkan visi tersebut ke dalam arah kebijakan yang lebih aplikatif dan sistematis, disusunlah 8 (delapan) misi pembangunan. Misi ini menjadi penjabaran operasional dari visi, yang menggambarkan langkah-langkah strategis yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah untuk menjawab tantangan dan permasalahan pembangunan daerah, sekaligus menangkap peluang dan potensi strategis yang dimiliki Sumatera Barat.

Setiap misi disusun berdasarkan prinsip kesinambungan pembangunan daerah, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah secara berkelanjutan. Selain itu, perumusan misi juga memperhatikan relevansinya dengan prioritas nasional, isu-isu strategis regional dan global, serta nilai-nilai lokal yang menjadi karakter khas masyarakat Minangkabau.

Melalui delapan misi inilah arah dan kebijakan pembangunan daerah akan diarahkan selama periode 2025–2029. Masing-masing misi akan menjadi dasar dalam perumusan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas, hingga pengalokasian anggaran daerah, yang seluruhnya bermuara pada tercapainya visi pembangunan daerah. Adapun 8 (delapan) misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1) Misi 1. Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas
2) Misi 2. Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan
3) Misi 3. Nagari/Desa sebagai basis Kemajuan
4) Misi 4. Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat
5) Misi 5. Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana
6) Misi 6. Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasiskan Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga Yang Berkualitas
7) Misi 7. Tingkatkan Daya Saing Pariwisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk UKM
8) Misi 8. Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif

Adapun penjelasan pada masing-masing Misi yakni sebagai berikut:

Misi Pertama, “Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas” bertujuan untuk mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing, diperlukan perbaikan menyeluruh

terhadap akses dan kualitas pendidikan serta layanan Kesehatan, yang difokuskan pada pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan di semua jenjang, penguatan layanan kesehatan dasar dan rujukan yang merata dan terjangkau serta percepatan penurunan stunting dan angka kematian ibu.

Misi Kedua, "Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan" terkait dengan Provinsi Sumatera Barat yang memiliki potensi besar sebagai lumbung pangan, namun masih menghadapi tantangan produktivitas, keberlanjutan, dan ketahanan pangan. Transformasi sektor pertanian melalui inovasi, digitalisasi, dan modernisasi alat produksi, dan pengembangan kawasan sentra produksi pangan, hilirisasi hasil pertanian serta peningkatan pengelolaan SDA yang ramah lingkungan dan lestari berbasis ekonomi hijau dan biru harus dipercepat untuk menciptakan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Misi Ketiga, "Nagari/Desa sebagai Basis Kemajuan" yang menekankan bahwa pembangunan berbasis nagari/desa menjadi hal penting untuk pemerataan kesejahteraan. Kemandirian ekonomi lokal harus diperkuat melalui pemanfaatan potensi daerah, perbaikan infrastruktur dasar, serta penguatan kapasitas kelembagaan nagari dan desa. Dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi nagari, lebih ditekankan kepada digitalisasi di nagari dengan memperkuat aktivitas ekonomi saat ini. Secara natural pertumbuhan daerah akan bertumpu pada pusat-pusat kegiatan yang berada di kawasan perkotaan. Share ekonomi perkotaan diprediksi akan meningkat dari 38% menjadi 40% di tahun 2030 mendatang. Dengan adanya potensi ekonomi di kawasan perdesaan, maka yang perlu dibangun adalah urban-rural linkage yang baik dan saling mendukung satu sama lain.

Misi Keempat, "Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat" merupakan misi yan bertujuan untuk menjadikan Sumatera Barat sebagai simpul ekonomi di pesisir barat Sumatera, sehingga perlu dilakukan penguatan sektor industri, perdagangan, dan investasi. Ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif dan dorongan terhadap UKM harus ditingkatkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kompetitif.

Misi Kelima, "Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana" yang menekankan bahwa Pembangunan infrastruktur harus menjawab tantangan keberlanjutan dan ketangguhan terhadap bencana. Diperlukan investasi infrastruktur yang merata dan responsif terhadap risiko bencana serta integrasi TIK untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi Pembangunan

Misi Keenam, "Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasis Agama dan Kearifan Lokal" yang menekan pada penguatan jati diri masyarakat Sumatera Barat yang religius dan

berbudaya menjadi fondasi pembangunan. Pelestarian nilai-nilai adat, budaya, dan penguatan keluarga berkualitas penting untuk mewujudkan masyarakat harmonis dan berkarakter.

Misi Ketujuh, "Tingkatkan Daya Saing Pariwisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif untuk UKM", yang bertujuan untuk mendorong Pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif yang memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi masa depan yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Penguatan branding destinasi, pengembangan SDM pariwisata, dan fasilitasi pelaku kreatif menjadi prioritas untuk meningkatkan kontribusi sektor ini terhadap PDRB daerah.

Misi Kedelapan, "Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif", yang bertujuan untuk terbentuknya Pemerintahan yang bersih dan layanan publik yang efisien merupakan pondasi pembangunan daerah. Reformasi birokrasi berbasis digital, perbaikan pelayanan, dan optimalisasi PAD akan memperkuat kapasitas fiskal dan kepercayaan publik.

3.3.3.Sasaran Pembangunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

Tujuan pembangunan daerah merupakan turunan langsung dari visi dan misi Kepala Daerah, yang menggambarkan arah kinerja lima tahunan secara bertahap dan terukur. Setiap tujuan dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik, yang menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan memperhatikan indikator hasil dan capaian. Merujuk Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, penjabaran tujuan dan sasaran tidak hanya berupa daftar indikator dan target, tetapi juga perlu disertai narasi yang menggambarkan ikhtisar kinerja yang ingin dicapai. Narasi ini menjelaskan hubungan antara visi, misi, tujuan, sasaran, indikator, dan target sehingga membentuk cascading kinerja yang utuh dan mudah dipahami.

Tabel III- 4 Tujuan Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

TUJUAN/SASARAN PER MISI	INDIKATOR KINERJA	BASELINE (2025)	TARGET				
			2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	5	6	7	8	9
MISI 1. PENDIDIKAN MERATA, KESEHATAN BERKUALITAS							
Tujuan : Terwujudnya kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	77,19	77,98	78,77	79,6	80,4	81,1
	Indeks Modal Manusia	0,58	0,59	0,6	0,61	0,62	0,63
Sasaran 1 Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan untuk mendukung daya saing sumber daya manusia	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,91	10,05	10,18	10,32	10,45	10,59
	Harapan Lama Sekolah	14,39	14,47	14,55	14,63	14,71	14,79
	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke	13,38	19,51	25,63	31,76	37,88	13,87
	Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi						
Sasaran 2 Meningkatnya kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat untuk mendukung produktivitas	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,26	74,54	74,82	75,1	75,38	75,66
	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	130	121	112	103	94	85
	Prevalansi *Stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) SSGI	20,5	19,62	18,74	17,87	16,99	16,11
	Prevalansi *Stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) EPPGBM	2,55	2,53	2,51	2,50	2,50	2,47
	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis *(treatment coverage)*	71	75,45	79,9	84,35	88,8	93,25

TUJUAN/SASARAN PER MISI	INDIKATOR KINERJA	BASELINE (2025)	TARGET				
			2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	5	6	7	8	9
	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis *(treatment success rate) (%)*	92,11	92,34	92,57	92,79	93,02	93,25
	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)	94,07	94,89	95,7	96,52	97,33	98,15
MISI 2. LUMBUNG PANGAN NASIONAL DAN EKONOMI BERKELANJUTAN							
Tujuan : Terwujudnya ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Indeks Ketahanan Pangan	84,01	84,81	85,6	86,39	87,18	87,98
	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,4	5,5	5,6	5,7	5,8	5,9
Sasaran 1 Meningkatnya produktivitas dan cadangan pangan yang berkualitas dan berdaya saing serta keberlanjutan dengan transformasi sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan dan peternakan	Produktivitas PDRB lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan (Rp)	77.574.909	81.970.058	86.365.206	90.760.354	95.155.502	99.550.650
	Prevalansi ketidakcukupan konsumsi pangan *(Prevalence of Undernourishment)* (%)	6,84	6,51	6,18	5,86	5,53	5,2
Sasaran 2 Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan	Indeks Ekonomi Hijau	68,69	69,51	70,33	71,15	71,97	72,79
	Indeks Ekonomi Biru	25,19	27,43	29,68	31,92	34,17	36,41
	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	0,613	0,615	0,617	0,618	0,62	0,622
	Proporsi EBT dalam Bauran Energi Primer	51,7	53,61	55,52	57,44	59,35	61,27

TUJUAN/SASARAN PER MISI	INDIKATOR KINERJA	BASELINE (2025)	TARGET				
			2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	5	6	7	8	9
MISI 3. NAGARI/DESA SEBAGAI BASIS KEMAJUAN							
Tujuan : Nagari/Desa Sebagai Basis Kemajuan Yang Mandiri Dan Berdaya Saing Untuk Mendukung Kota Sebagai Pusat Pertumbuhan	Indeks Desa	7,83	8,38	8,97	9,84	10,84	11,83
	Proporsi kontribusi PDRB Kota terhadap Provinsi	39,22	39,4	39,58	39,76	39,94	40,12
	Persentase rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten (%)	4,16	5,63	6,87	6,94	7,35	5,96
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,37 - 5,76	5,18 - 5,66	4,99 - 5,56	4,81 - 5,47	4,62 - 5,37	4,43 - 5,28
Sasaran 1 Meningkatnya kemandirian desa/nagari berbasis potensi lokal	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	1,24	1,35	1,46	1,57	1,68	1,79
	Tingkat Pengangguran Perdesaan (%)	4,6	4,48	4,42	4,3	4,24	4,14
	Tingkat Kemiskinan Perdesaan (%)	6,31	5,94	5,49	5,08	4,64	4,21
Sasaran 2 Meningkatnya kualitas infrastruktur dan layanan dasar untuk mendukung kesejahteraan masyarakat desa/nagari/kelurahan	Rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	64	66	67,9	69,8	71,7	73,77
	Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman	8,57	10,57	12,57	14,57	16,57	18,57
	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	41,23	44,168	47,106	50,044	52,982	55,92
	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	29	32,532	36,064	39,596	43,128	46,66
	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	11	14,966	18,932	22,898	26,864	30,83
MISI 4. SUMATERA BARAT PUSAT PERDAGANGAN DAN BISNIS SUMATERA BAGIAN BARAT							
Tujuan	Indeks Daya Saing Daerah	3,58	3,65	3,72	3,8	3,87	3,94

TUJUAN/SASARAN PER MISI	INDIKATOR KINERJA	BASELINE (2025)	TARGET				
			2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	5	6	7	8	9
Terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan melalui penguatan perdagangan, investasi, industri, dan inovasi	Koefisien Variasi Harga Antar wilayah Tingkat Provinsi	4,63	4,576	4,522	4,468	4,414	4,36
	Tingkat Inflasi (%)	2,8 - 3,6	2,71 - 3,56	2,61 - 3,53	2,51 - 3,49	2,42 - 3,46	2,33 - 3,43
	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	29,79	30,154	30,518	30,882	31,246	31,61
	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	16,5	16,658	16,816	16,974	17,132	17,29
	Indeks Inovasi Daerah	72,5	72,876	73,252	73,628	74,004	74,38
Sasaran 1 Meningkatkan investasi, perdagangan, dan daya saing industri daerah	Rasio PDRB Industri Pengolahan (% PDRB)	8,46 - 8,53	8,61 - 8,70	8,76 - 8,87	8,92 - 9,04	9,07 - 9,21	9,23 - 9,38
	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	18,01	19,814	21,618	23,422	25,226	27,03
	Total Kredit/PDRB (%)	24,4	25,736	27,072	28,408	29,744	31,08
	Nilai Transaksi Saham Per Kapita (Rupiah)	2.926.183	4.129.523	5.332.863	6.536.203	7.739.543	8.942.883
	Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,92	1,28	1,64	2	2,36	2,72
	Konsumsi listrik per kapita	707	801,85	896,7	991,55	1086,4	1181,25
	Intensitas Energi Primer	160	158,5	157	155,5	154	152,5
Sasaran 2 Memperkuat ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif dan berkualitas	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	75,31	75,794	76,278	76,762	77,246	77,73
	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	32,2	34,506	36,812	39,118	41,424	43,73
	Persentase Penyandang Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal (%)	15	16,5	18	19,5	21	22,5
	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	38	39,6	41,2	42,8	44,4	46
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	59,41	60,104	60,798	61,492	62,186	62,88

TUJUAN/SASARAN PER MISI	INDIKATOR KINERJA	BASELINE (2025)	TARGET				
			2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	5	6	7	8	9
Sasaran 3 Mendorong pertumbuhan UKM dan industri kecil-menengah sebagai pilar ekonomi daerah	~~Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non-pertanian pada level provinsi (%)~~	11,15	11,248	11,346	11,444	11,542	11,64
	~~Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level provinsi (%)~~	3,53	3,608	3,686	3,764	3,842	3,92
	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	-	-	-	-	-	-
	Tingkat Inklusi Keuangan Provinsi (%)	86,72	87,35	87,98	88,61	89,24	89,87
MISI 5. MEMBANGUN INFRASTRUKTUR BERKEADILAN DAN SIAP TANGGAP BENCANA							
Tujuan Terwujudnya infrastruktur yang inklusif, tangguh bencana, dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pariwisata, kesejahteraan masyarakat dan mitigasi bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)	155,96	167,982	165,454	162,926	160,398	164,19 - 157,87
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77,95	78,16	78,37	78,58	78,79	79
	Indeks Kinerja Infrastruktur	-	-	-	-	-	-
	Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	52,62	54,55	56,48	58,41	60,34	62,27
Sasaran 1 Meningkatnya Resiliensi Daerah Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Persentase Penurunan Emisi GRK (%) (kumulatif)	18,08	18,972	19,864	20,756	21,648	22,54
	Persentase Penurunan Emisi GRK (%) (tahunan)	28,05	29,764	31,478	33,192	34,906	36,62
	Indeks Ketahanan Daerah						
Sasaran 2 Terwujudnya pengelolaan sumber daya air yang produktif dan berkelanjutan	Kapasitas Air Baku (m^3/detik)	1,08	1,428	1,776	2,124	2,472	2,82
	IKSI (Indeks Kinerja Sistem Irigasi)	-	-	-	-	-	-

TUJUAN/SASARAN PER MISI	INDIKATOR KINERJA	BASELINE (2025)	TARGET				
			2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	5	6	7	8	9
Sasaran 3 Memperkuat konektivitas dan aksesibilitas wilayah, kawasan pariwisata, serta pemanfaatan teknologi dalam pembangunan infrastruktur	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6,1	6,162	6,224	6,286	6,348	6,41
	Rata-rata Waktu Tempuh pada Lintas Utama Jalan Provinsi	2,95	2,85	2,75	2,66	2,58	2,5
MISI 6. MEMBANGUN KEHIDUPAN BERADAT DAN BERBUDAYA BERBASISKAN AGAMA, KEARIFAN LOKAL MELALUI DUKUNGAN KELUARGA YANG BERKUALITAS							
Tujuan : Terwujudnya masyarakat beradat dan berbudaya yang harmonis, religius, serta berbasis keluarga berkualitas	Indeks Demokrasi Indonesia	76,27	76,61	76,96	77,31	77,662	78,01 (Sedang)
	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	69,53 - 69,54	69,78 - 69,79	70,03 - 70,04	70,28 - 70,29	70,53 - 70,54	70,78 - 70,80
Sasaran 1 Memperkuat nilai adat, budaya, dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	60,58 - 60,65	61,06 - 61,15	61,54 - 61,66	62,02 - 62,16	62,5 - 62,67	62,98 – 63,18
	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan	3,06	3,064	3,068	3,072	3,076	3,08
Sasaran 2 Meningkatnya perlindungan hak asasi manusia dan kesetaraan	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	72,23 - 72,31	72,55 - 72,67	72,87 - 73,04	73,19 - 73,39	73,51 - 73,75	76,9
	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,405 - 0,390	0,39 - 0,37	0,38 - 0,36	0,37 - 0,35	0,36 - 0,34	0,350 - 0,330
	Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	73,16	73,908	74,656	75,404	76,152	0,350 - 0,330

TUJUAN/SASARAN PER MISI	INDIKATOR KINERJA	BASELINE (2025)	TARGET				
			2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	5	6	7	8	9
Sasaran 3 **Terwujudnya lingkungan sosial yang aman dan harmonis berbasis keluarga berkualitas**	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	57,76	58,63	59,5	60,37	61,24	62,11
	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	66,15	66,25	66,35	66,45	66,55	66,65
	Persentase penanganan pelanggaran Perda yang diselesaikan	94	94,3	94,6	94,9	95,2	95,5
MISI 7. TINGKATKAN DAYA SAING PARIWISATA DAN AKSELERASI EKONOMI KREATIF UNTUK UKM							
Tujuan : Pariwisata yang berdaya saing dan akselerasi ekonomi kreatif untuk pertumbuhan yang berkelanjutan	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	1,43	1,48	1,53	1,58	1,63	1,68
Sasaran 1 Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi daerah	Jumlah tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu orang)	43,08	46,31	49,54	52,78	56,01	59,24
	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara (orang)	21.104.516	23.214.968	25.536.464	28.090.111	30.899.122	30.899.122
Sasaran 2 Memperkuat peran ekonomi kreatif dalam mendukung pertumbuhan UKM	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Kreatif Nasional (%)	1,11	1,11	1,12	1,12	1,13	1,13
	Rasio kewirausaahan Provinsi (%)	3,59	3,88	4,17	4,46	4,75	5,04
MISI 8. TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERSIH DAN PELAYANAN PUBLIK YANG EFEKTIF							

TUJUAN/SASARAN PER MISI	INDIKATOR KINERJA	BASELINE (2025)	TARGET				
			2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	5	6	7	8	9
Tujuan : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan pelayanan publik yang efektif berbasis digital	Indeks Integritas Nasional	73,16	73,91	74,66	75,4	76,15	76,9
Sasaran 1 Efisiensi dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,9	3,96	4,01	4,07	4,12	4,18
	Indeks Reformasi Hukum	70	71,53	73,06	74,59	76,12	77,65
Sasaran 2 Meningkatnya kualitas layanan publik	Indeks Pelayanan Publik	3,84	3,9	3,96	4,01	4,07	4,13
	Persentase kerjasama wajib yang dilaksanakan	37,5	40,63	43,75	46,88	50	53,13
Sasaran 3 Meningktanya Pendapatan Daerah	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	1,17	1,2	1,22	1,25	1,27	1,3
	Return on Aset (ROA) BUMD (%)	1,92	2,06	2,21	2,35	2,5	2,64

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

3.4. Visi dan Misi RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029

Visi dan misi pembangunan merupakan gambaran kondisi yang akan dicapai dan diwujudkan sebagai arah perencanaan strategis di semua sektor pembangunan Kota Padang yang melibatkan seluruh unsur pemerintah dan masyarakatnya. Berikut merupakan visi dan misi serta penjabarannya yang telah ditetapkan untuk Kota Padang Tahun 2025-2029.

3.4.1.Visi RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029

a. Pernyataan Visi

RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran tahapan pembangunan periode pertama RPJPD Kota Padang Tahun 2025-2045. Tema pembangunan RPJPD periode pertama menjadi salah satu rujukan kepala daerah dalam menyusun Visi dan Misi Kota Padang tahun 2025-2029. Visi pembangunan Kota Padang Tahun 2025-2029 berdasarkan Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang adalah sebagai berikut:

“Menggerakkan Segala Potensi Untuk Mewujudkan Kota Padang Sebagai Kota Pintar (Smart City) dan Kota Sehat, Berlandaskan Agama dan Budaya, Menuju Kota Maju dan Sejahtera”

b. Penjelasan Kata-Kata Kunci Visi

Visi tersebut mengandung maksud SATUJUAN yakni satu tujuan, bersama (basamo), efektif, kolaboratif, dan memiliki tujuan yang sama. Selain itu juga menjadikan Kota Padang sebagai Kota Pintar (Smart City) dan Kota Sehat dengan kebijakan berlandaskan pada agama dan budaya dengan tujuan yakni kota maju dan sejahtera untuk kejayaan Kota Padang. Dimensi agama dan budaya ini secara tidak langsung juga merefleksikan falsafah hidup etnis Minangkabau.

Visi ini memuat kata kunci yang menjadi dasar pijakan arah pembangunan lima tahun ke depan, yaitu :

Kota Pintar : Menunjukkan suat konsep pengembangan sebuah kota dengan menerapkan dan mengimplementasikan teknologi secara inovatif, efektif dan efisien. Kota pintar menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi layanan publik, meningkatkan partisipasi warga, dan menciptakan kehidupan perkotaan yang lebih baik. Kota Padang dalam hal ini berupaya meningkatkan penerapan smart government dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis digital.

Kota Sehat : Kota sehat adalah kota yang terus menciptakan dan memperbaiki lingkungan fisik dan sosial serta memperluas

sumber daya komunitas agar masyarakat dapat saling mendukung dalam menjalankan semua fungsi kehidupan dan berkembang secara maksimal. Fokus utamanya adalah tercapainya kondisi lingkungan hidup yang bersih, nyaman, aman dan kualitas hidup sehat Masyarakat Kota Padang.

Agama : Sesuai dengan falsafah etnis minangkabau ”Adaik Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah”, kehidupan masyarakat Kota Padang dipengaruhi oleh nilai-nilai keagamaan. Agama berperan penting dalam membentuk identitas kolektif, solidaritas sosial, serta pedoman nilai dalam kehidupan masyarakat. Pemerintah Kota Padang terus memperkuat fungsi keagamaan melalui dukungan terhadap lembaga pendidikan agama, rumah ibadah, serta program pembinaan karakter masyarakat.

Budaya : Kota Padang memiliki kekayaan budaya Minangkabau yang khas dan berperan besar dalam pembentukan jati diri kota. Sesuai dengan definisi budaya menurut Edward B. Taylor (1871), unsur pengetahuan, adat istiadat, seni, dan norma sosial masyarakat Minangkabau menjadi dasar pembangunan sosial yang berakar kuat.

Kota Maju : Menurut teori pembangunan Kota maju adalah kota yang menunjukkan tingkat perkembangan ekonomi, infrastruktur, pelayanan publik, dan kualitas hidup yang tinggi. Menurut modernisasi teori Rostow, kota maju berada pada tahap “high mass consumption,” yaitu tahap tertinggi dalam pembangunan ekonomi, ditandai dengan: Pendapatan tinggi, Infrastruktur lengkap, Inovasi teknologi tinggi, Kualitas pendidikan dan kesehatan yang baik.

Kota Sejahtera : Menurut teori pembangunan Kota maju adalah kota yang menunjukkan tingkat perkembangan ekonomi, infrastruktur, pelayanan publik, dan kualitas hidup yang tinggi. Menurut modernisasi teori Rostow, kota maju berada pada tahap “high mass consumption,” yaitu tahap tertinggi dalam pembangunan ekonomi, ditandai dengan: Pendapatan tinggi, Infrastruktur lengkap, Inovasi teknologi tinggi, Kualitas pendidikan dan kesehatan yang baik.

c. Sasaran Visi

Visi "Kota Padang Maju, Berbudaya, dan Berkelanjutan menuju Kota Jasa Terkemuka" merangkum aspirasi kota untuk tumbuh dan berkembang secara holistik, menggabungkan kemajuan ekonomi dengan pelestarian budaya dan ketahanan lingkungan. Dengan fokus pada keseimbangan antara pertumbuhan dan

keberlanjutan, Kota Padang diharapkan menjadi pusat layanan yang unggul, menjunjung tinggi nilai-nilai lokal dan meningkatkan kualitas hidup penduduknya. Berikut disajikan sasaran visi Kota Padang Tahun 2029 seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel III- 5 Sasaran Visi Kota Padang Tahun 2025-2029

No	Sasaran Visi	Indikator Kinerja	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatkan Pendapat an Per Kapita	PDRB per Kapita ADHB (Rp.Juta)	90,42	92,62	94,82	97,02	99,22	101,42
		Kontribusi PDRB Sub sektor Perikanan	3,34	3,39	3,4	3,43	3,46	3,49
		Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	11,01	11,27	11,53	11,79	12,05	12,36
2	Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	Tingkat Kemiskinan (%)	3,66	3,34	3,12	2,91	2,71	2,53
		Rasio Gini (indeks)	0,332	0,331	0,331	0,33	0,33	0,33
		Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,83	5,01	5,19	5,37	5,55	5,73
3	Meningkatkan Kualitas Penyenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3,3	3,35	3,39	3,45	3,49	3,55
4	Meningkatkan Daya saing sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	84,4	84,42	84,44	84,46	84,48	84,5
		Tingkat produktivitas tenaga kerja	178,29	183,59	188,89	194,19	199,49	204,79
5	Peningkatan Kualitas Lingkung an Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77,26	77,27	77,28	77,29	77,3	77,31

Kemudian untuk mewujudkan visi pembangunan, maka dirumuskan misi sebagai upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan visi sehingga membantu memperjelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya yang harus dilakukan. Untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Padang tahun 2025-2029, maka dirumuskan 8 (delapan) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

3.4.2.Misi RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029

Untuk mewujudkan visi pembangunan, maka dirumuskan misi sebagai upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan visi sehingga membantu memperjelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya yang harus dilakukan. Untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Padang tahun 2025-2029, maka dirumuskan 8 (delapan) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Menguatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif, dan Partisipatif
2. Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar dan Kota Sehat
3. Menguatkan Masyarakat Yang Beragama dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter dan Pemberdayaan
4. Mendorong kemudahan berinvestasi demi terbukanya lapangan pekerjaan

5. Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum Yang Hijau dan Berkualitas
6. Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana
7. Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan dan Jasa
8. Menggerakkan Potensi Kota Untuk Terwujudnya Industri Kreatif dan Pariwisata Berkelanjutan

Berikut penjelasan masing-masing misi RPJMD Kota Padang:

a. Misi 1: Menguatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif, dan Partisipatif

Pembangunan diprioritaskan dalam untuk mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi, peningkatan tata kelola keuangan dan optimalsiasi aset daerah, pemerintahan berintegritas dan bebas korupsi, optimalisasi pelayanan publik berbasis teknologi, dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah yang produktif dan berintegritas serta penguatan pembangunan masyarakat tingkat RW

b. Misi 2: Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar dan Kota Sehat

Dalam wujudkan visi pembangunan Kota Padang sebagai Kota Pintar dan Kota Sehat, pembangunan diprioritaskan pada penerapan *smart governance* melalui kota cerdas pada layanan dasar, khususnya dalam layanan pendidikan, layanan kesehatan, layanan perumahan dan rakyat dan kawasan pemukiman, layanan transportasi publik, layanan pekerjaan umum dan penataan ruang dan layanan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Dalam upaya mewujudkan kota sehat, pembangunan diprioritaskan pada meningkatkan kehidupan masyarakat sehat dan mandiri, peningkatan kualitas sarana prasarana kesehatan, peningkatan kualitas layanan kesehatan serta peningkatan kawasan pemukiman dan fasilitas umum berkondisi baik dan sehat.

c. Misi 3: Menguatkan Masyarakat Yang Beragama dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter dan Pemberdayaan

Pembangunan diprioritaskan dalam upaya menghasilkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan bertakwa melalui pendidikan berkualitas untuk semua dan program smart surau dengan mensinergikan peran Tungku Tigo Sajarangan dalam pemberdayaan serta ormas keagamaan, cendikiawan dan adat.

d. Misi 4: Mendorong Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan

Pembangunan diprioritaskan dalam membangun ekosistem berinvestasi dan kemudahan berusaha di Kota Padang serta

mengembangkan hilirisasi industri berbasis produk potensial sehingga akan menciptakan nilai tambah dan meningkatkan kesempatan kerja.

e. Misi 5: Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum Yang Hijau dan Berkualitas

Pembangunan diarahkan pada mewujudkan Kota Padang sebagai Kota Layak Huni, peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan aksesibilitas infrastruktur dan fasilitas umum, pengolahan persampahan, taman kota tematik, serta peningkatan kualitas transportasi publik.

f. Misi 6: Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana

Pembangunan diprioritaskan pada upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko bencana, peningkatan infrastruktur untuk migitasi bencana, penguatan sistem peringatan dini, peningkatan aparatur yang sigap bencana dan penguatan perencanaan tata ruang berbasis risiko sehingga terbentuk masyarakat yang tangguh bencana.

g. Misi 7: Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan dan Jasa

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan indeks daya saing daerah, peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan daya saing produk daerah dengan memperkuat sektor perdagangan dan jasa sebagai basis perekonomian dan penguatan koperasi dan usaha mikro guna menumbuhkan wirausaha muda di Kota Padang.

h. Misi 8: Menggerakkan Potensi Kota Untuk Terwujudnya Industri Kreatif dan Pariwisata Berkelanjutan

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan daya tarik Kota Padang sebagai destinasi utama pariwisata, peningkatan produktivitas industri kreatif

3.4.3. Keterkaitan antara Visi dan Misi RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029 dengan Visi dan Misi RPJPD Kota Padang Tahun 2025-2045

Tabel III- 6 Keterkaitan antara Visi dan Misi RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029 dengan Visi dan Misi RPJPD Kota Padang Tahun 2025-2045

Visi RPJMD	Visi RPJPD
Menggerakkan segala potensi untuk mewujudkan Kota Padang sebagagai Kota Pintar (Smart City) dan Kota Sehat, berlandaskan agama dan budaya, menuju kota yang maju dan sejahtera.	Kota Padang maju, berbudaya dan berkelanjutan menuju kota jasa terkemuka.
Misi RPJMD	**Misi RPJPD**
1) Menguatkan tata kelola pemerintah yang berintegritas, responsif, inovatif dan partisipatif	3) Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
2) Menguatkan pencapaian indikator Kota Pintar dan Kota Sehat	1) Mewujudkan transformasi sosial dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, kreatif, inovatif dan bertakwa
3) Menguatkan masyarakat yang beragama dan berbudaya melalui pendidikan karakter dan pemberdayaan	5) Mewujudkan ketahanan sosial, budaya dan ekologi
4) Mendorong kemudahan berinvestasi demi terbukanya lapangan pekerjaan	2) Mewujudkan transformasi perekonomian yang berkualitas dan berkelanjutan
5) Mewujudkan pembangunan dan merevitalisasi sarana dan prasarana umum yang hijau dan berkualitas	7) Mewujudkan sarana dan prasarana kota yang berkualitas dan ramah lingkungan
6) Menguatkan jaringan ketahanan bencana	1) Mewujudkan keamanan daerah tangguh, masyarakat damai, demokratis, dan inklusif, serta stabilitas ekonomi makro daerah
7) Mengembangkan perekonomian masyarakat yang adaptif dan kondusif melalui penguatan sektor perdagangan dan jasa	2) Mewujudkan transformasi perekonomian yang berkualitas dan berkelanjutan
8) Menggerakkan potensi kota untuk terwujudnya industri kreatif dan pariwisata berkelanjutan	2) Mewujudkan transformasi perekonomian yang berkualitas dan berkelanjutan

3.4.4 Keterkaitan antara Visi dan Misi RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029 dengan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat dan RPJMN Tahun 2025-2029

Dalam rangka keselarasan pembangunan, maka perencanaan pembangunan Kota Padang mengacu pada perencanaan pembangunan regional dan nasional. Keterkaitan antara RPJMD Kota Padang dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat dan RPJMN Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III- 7 Keterkaitan antara Visi dan Misi RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029 dengan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat dan RPJMN Tahun 2025-2029

Visi RPJMD Kota Padang	Visi RPJMD Provinsi Sumatera Barat	Visi RPJMN
Menggerakkan segala potensi untuk mewujudkan Kota Padang sebagai Kota Pintar (Smart City) dan Kota Sehat, berlandaskan agama dan budaya, menuju kota yang maju dan sejahtera.	Sumatera Barat Madani Yang Maju Dan Berkeadilan	Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045
Misi RPJMD Kota Padang	**Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat**	**Misi RPJMN**
1. Menguatkan tata kelola pemerintah yang berintegritas, responsif, inovatif dan partisipatif	8. Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyeludupan
2. Menguatkan pencapaian indikator Kota Pintar dan Kota Sehat	1. Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas	
3. Menguatkan masyarakat yang beragama dan berbudaya melalui pendidikan karakter dan pemberdayaan	3. Nagari/Desa sebagai basis Kemajuan 6. Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasiskan Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga Yang Berkualitas	1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak asasi manusia 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan, gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
4. Mendorong kemudahan berinvestasi demi terbukanya lapangan pekerjaan		3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
5. Mewujudkan pembangunan dan merevitalisasi sarana dan prasarana umum yang hijau dan berkualitas	5. Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana	
6. Menguatkan jaringan ketahanan bencana		
7. Mengembangkan perekonomian masyarakat yang adaptif dan kondusif melalui penguatan sektor perdagangan dan jasa	2. Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan 4. Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat	2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru

		5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
8. Menggerakkan potensi kota untuk terwujudnya industri kreatif dan pariwisata berkelanjutan	Tingkatkan Daya Saing Pariwisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk UKM	

3.4.5 Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

Mengacu kepada visi dan misi yang telah ditetapkan, selanjutnya ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan selama lima tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun strategi dan arah pembangunan. Perumusan tujuan adalah tahap perumusan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan yang memiliki titik kritis dalam penyusunan RPJMD.

Tujuan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Pengembangan rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja baik impact (dampak), outcomes (hasil), maupun output dari suatu program, kegiatan dan sub kegiatan. Perumusan terhadap tujuan dari visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih juga akan menjadi landasan dalam perumusan tujuan dan sasaran serta program pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun sesuai dengan masa periode RPJMD.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi yang telah ditetapkan dengan menjawab permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah Kota Padang. Rumusan tujuan merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Berdasarkan pada visi dan misi pembangunan daerah Kota Padang tahun 2025-2029, maka berikut disajikan tujuan pembangunan Kota Padang tahun 2025-2029

a. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif dan Partisipatif

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas, responsif, inovatif dan partisipatif merupakan tujuan pertama dari misi pertama, yaitu misi menguatkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, responsif, inovatif dan partisipatif. Keberhasilan pencapaian tujuan ini akan diukur dengan indikator meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi. Sasaran yang ingin dicapai yaitu :

1) Meningkatnya kualitas integrasi pembangunan dari sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang diukur melalui meningkatnya nilai evaluasi SAKIP;
2) Meningkatnya tata kelola keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien dan akuntabel yang diukur melalui opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan pemerintah daerah;
3) Meningkatnya kualitas pemetaan regulasi, regulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi daerah.
4) Peningkatan Pelayanan Publik yang profesional, responsif dan bebas korupsi
5) Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan berbasis digitalisasi dalam wujudkan smart city
6) Meningkatnya pengawasan arsip daerah
7) Meningkatnya pencegahan perilaku korupsi
8) Meningkatnya sumber daya aparatur yang profesional dan berintegritas.

b. Terwujudnya Penguatan Pencapaian Indikator Kota Pintar dan Kota Sehat

Kota Padang sebagai Smart City merupakan kota yang memanfaatkan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) untuk mengatasi masalah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Mewujudkan penguatan implementasi kota pintar merupakan tujuan pertama pada misi kedua yakni meningkatkan penerapan smart government dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis digital dalam wujudkan smart city. Adapun Kota sehat adalah kondisi suatu daerah yang bersih, aman, nyaman, dan sehat untuk dihuni penduduk Kota Padang. Mewujudkan peningkatan implementasi kota sehat merupakan tujuan kedua pada misi kedua yakni Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar dan Kota Sehat. Keberhasilan tujuan ini diukur melalui peningkatan nilai evaluasi kota sehat. Sasaran yang ingin dicapai dengan tujuan ini yaitu tercapainya kondisi lingkungan hidup yang bersih, nyaman, aman dan kualitas hidup sehat yang diukur melalui hasil evaluasi kota sehat.

c. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul

Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang unggul merupakan tujuan pertama dari misi ketiga yaitu Menguatkan Masyarakat Yang Beragama dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter dan Pemberdayaan. Keberhasilan tujuan ini diukur melalui indeks pembangunan manusia dan evaluasi program smart surau yang juga merupakan program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang. Sasaran yang ingin dicapai pada tujuan ini yakni peningkatan akses dan pemerataan serta kualitas pendidikan kesehatan, keagamaan dan perlindungan perempuan dan anak.

d. Meningkatnya Stabilitas Sosial Dan Politik Daerah

Meningkatnya stabilitas sosial dan politik daerah merupakan tujuan kedua dari misi ketiga yaitu Menguatkan Masyarakat Yang Beragama dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter dan Pemberdayaan. Tujuan ini diukur melalui indeks rasa aman. Sasaran yang ingin dicapai pada tujuan ini yaitu meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, meningkatnya toleransi beragama dan partisipasi politik, meningkatnya kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan peran surau dalam membangun karakter pemuda.

e. Terwujudnya Perekonomian Masyarakat yang adaptif dan kondusif

Mewujudkan perekonomian masyarakat yang adaptif dan kondusif yang ditandai dengan meningkatnya realisasi investasi dan meningkatnya tingkat kesempatan kerja. Tujuan ini diukur melalui indeks daya saing daerah. Sasaran yang ingin dicapai yaitu peningkatan realisasi investasi dan penambahan tingkat kesempatan kerja.

f. Terwujudnya Kota Layak Huni

Mewujudkan kota layak huni merupakan tujuan dari pelaksanaan misi kelima pada RPJMD yakni Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum Yang Hijau dan Berkualitas. Tujuan ini akan diukur melalui Indeks Kota Layak Huni. Sasaran yang ingin dicapai dengan tujuan ini yaitu:

1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang diukur melalui indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
2) Terwujudnya hunian layak dan terjangkau;
3) Pengembangan dan revitalisasi sarana serta prasarana umum yang ramah lingkungan dan hijau;
4) Peningkatan kualitas transportasi publik yang diukur melalui rasio konektivitas daerah.

g. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Kota Padang, sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat, terletak di wilayah pesisir yang rentan terhadap berbagai dampak perubahan iklim. Seiring dengan meningkatnya suhu global dan perubahan pola curah hujan, Kota Padang telah mengalami sejumlah bencana alam yang berkaitan dengan iklim, seperti banjir, tanah longsor, dan gelombang pasang yang semakin intensif dalam dekade terakhir. Perubahan iklim yang menyebabkan peningkatan intensitas hujan ekstrem, kenaikan permukaan laut, dan perubahan pola cuaca, turut memperburuk kerentanannya terhadap bencana alam Selain itu, berdasarkan hasil proyeksi dalam beberapa tahun ke depan, Kota Padang akan mengalami peningkatan suhu dan curah hujan yang dapat mempengaruhi perekonomian, pertanian, dan aktivitas masyarakat lainnya. Adanya kejadian besar tersebut membuat pemerintah lokal menjadikan isu kebencanaan terkait iklim sebagai salah satu hal yang serius untuk ditangani.

Maka dari itu, resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim merupakan tujuan dari misi keenam pada RPJMD yakni Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana. Tujuan ini akan diukur melalui indeks risiko bencana. Sasaran yang ingin dicapai dengan tujuan ini yaitu penguatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana dan perubahan iklim yang diukur melalui Indeks Ketahanan Daerah (IKD) termasuk dalam hal ini upaya melalui :

1) Terintegrasinya isu perubahan iklim dan kebencanaan dalam dokumen perencanaan daerah yang sesuai dengan rencana aksi nasional
2) Penyediaan infrastruktur yang berkelanjutan dan ramah lingkungan
3) Peningkatan penguatan kebijakan dan kelembagaan
4) Perencanaan penanggulangan bencana
5) Pengembangan sistem informasi dan logistik
6) Penanganan tematik kawasan rawan bencana, migitasi bencana
7) Penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana
8) Pengembangan sistem pemulihan bencana
9) Peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.

h. Terwujudnya Sektor Perdagangan dan Jasa serta UMKM Yang Tangguh

Terwujudnya sektor perdagangan dan jasa serta UMKM yang tangguh merupakan tujuan kedua dari misi ketujuh pada RPJMD yakni mengembangkan perekonomian masyarakat yang adaptif dan kondusif melalui penguatan sektor perdagangan dan jasa. Tujuan ini akan diukur melalui Kontribusi

Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB. Sasaran yang ingin dicapai dengan tujuan ini yaitu:

a) Meningkatnya kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan
b) Peningkatan lapangan usaha perdagangan diukur melalui kontribusi lapangan usaha perdagangan terhadap PDRB;
c) Meningkatnya daya saing produk daerah
d) Peningkatan Lapangan Usaha Perdagangan;
e) Meningkatnya daya saing produk daerah dan transaksi perdagangan.
f) Meningkatkan perekonomian daerah dari sektor koperasi dan usaha mikro

i. Terwujudnya Peningkatan Perekonomian Daerah Dari Sektor Industri Kreatif dan Pariwisata

Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah dari sektor industri kreatif dan pariwisata merupakan tujuan pertama pada misi kedelapan yakni Menggerakkan Potensi Kota Untuk Terwujudnya Industri Kreatif dan Pariwisata Berkelanjutan. Indikator yang digunakan pada tujuan ini adalah Pertumbuhan PDRB sektor industri kreatif dan pariwisata. Sasaran yang ingin dicapai pada tujuan ini yaitu:

a) Meningkatnya kontribusi industri kreatif terhadap perekonomian daerah yang diukur melalui rasio PDRB dari sektor ekonomi kreatif;
b) Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah yang diukur melalui rasio PDRB dari sektor pariwisata;

Tujuan pembangunan daerah dan sasaran pembangunan daerah diatas akan menjadi acuan dalam penetapan tujuan dan sasaran perangkat daerah serta dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan selama 5 tahun. Berikut disajikan dalam tabel hubungan visi, misi, tujuan dan sasaran jangka menengah Kota Padang tahun 2025-2029.

Tabel III- 8 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kota Padang Tahun 2025-2029

Visi : Menggerakkan Segala Potensi Untuk Mewujudkan Kota Padang Sebagai Kota Pintar (Smart City) Dan Kota Sehat, Berlandaskan Agama Dan Budaya, Menuju Kota Yang Maju Dan Sejahtera

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Misi 1 : Menguatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas profesional, responsif, kolaboratif, dan partisipatif**		Indeks Reformasi Birokrasi	86,00	86,25	86,50	86,75	87,00	87,25	
		Meningkatnya kualitas integrasi pembangunan dari sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan kinerja	Nilai SAKIP	79,00	79,50	80,00	80,50	81,00	81,50	
		Meningkatkan Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Opini atas laporan keuangan pemerintah daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
		Meningkatnya kualitas pemetaan regulasi,	Indeks Reformasi Hukum	91	91	92	93	94	96	

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		regulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi daerah								
		Meningkatkan Pelayanan Publik yang profesional, responsif dan bebas korupsi	Indeks Pelayanan Publik	3,54	3,55	3,56	3,57	3,8	4,55	
		Meningkatnya pengawasan arsip daerah	Indeks Pengawasan Arsip	84	85	86	87	88	89	
		Meningkatnya pencegahan perilaku korupsi	Indeks Pencegahan Korupsi Daerah	95,20	95,25	95,50	95,75	96,00	96,25	
		Meningkatnya sumber daya aparatur yang profesional dan berintegritas	Indeks Sistem Merit	0,71	0,73	0,75	0,78	0,82	0,83	
Misi 2 : Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	**Mewujudkan Meningkatkan Implementasi Kota Pintar dan Kota Sehat**		Smart City Index	3,2	3,4	3,5	3,6	3,8	4,0	
		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan berbasis digitalisasi	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	4	-	-	-	-	-	SPBE digunakan s/d 2025, selanjutnya mulai tahun 2026 diganti

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		dalam wujudkan smart city								dengan indeks transformasi digital pilar pemerintahan
			Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintahan	-	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	
		Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	0,84	0,84	0,85	0,85	0,85	0,86	
		Tercapainya kondisi lingkungan hidup yang bersih, nyaman, aman dan kualitas hidup sehat.	Meningkatkan Penilaian Hasil Evaluasi Kota Sehat	0.01	-	0.01	-	0.08	-	Data dipublikasikan tiap 2 tahun
Misi 3 : Menguatkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya dengan Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul**		Indeks Pembangunan Manusia	84,51	84,82	85,14	85,53	85,93	86,33	Imperatif dari Prov Sumbar
		Meningkatnya literasi masyarakat Kota	Indeks pembangunan Literasi masyarakat	86	86	86	86	86	88	
		Meningkatkan pendidikan	Indeks Pendidikan	0,849	0,849	0,850	0,850	0,851	0,852	

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		masyarakat								
		Meningkatnya pelestarian dan pembangunan kebudayaan daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	61,2	61,3	61,4	61,6	61,8	62,0	
		Meningkatnya Peran Pemuda dalam pembangunan sumber daya manusia unggul	Indeks Pembangunan Pemuda	56,5	56,8	57,0	57,2	57,3	57,5	
		Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan daerah	Indeks Pembangunan Gender	94,16	94,26	94,37	94,58	94,69	94,77	
	Meningkatkan stabilitas sosial dan politik daerah		Indeks Rasa Aman	11	10,8	10,6	10,4	10,2	10,00	Penurunan Angka Kriminalitas (RPJPD)
		Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Indeks Penyelenggaran Trantibumlinmas	65,0	65,5	66,0	66,5	67,0	67,5	
		Meningkatnya Toleransi beragama dan partisipasi politik	Indeks Kerukunan Umat Beragama	77,37	77,82	78,27	78,72	78,73	78,92	
		Meningkatnya Kesejahteraan	Indeks Kesejahteraan	53,89	54,29	54,69	55,09	55,49	55,89	

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Masyarakat	Sosial							
Misi 4 : Mendorong Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	**Mewujudkan Perekonomian Masyarakat yang adaptif dan kondusif**		Indeks daya saing daerah	4,27	4,3	4,35	4,4	4,45	4,5	
		Meningkatkan Realisasi Investasi	Nilai PMTB terhadap PDRB	29,94	29,97	30,00	30,03	30,06	30,09	
		Meningkatkan Tingkat Kesempatan Kerja	Perbandingan orang yang bekerja thd angkatan kerja	90,12%	90,85%	91,15%	91,30%	91,84%	92,01%	
Misi 5 : Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	**Mewujudkan Kota Layak Huni**		Indeks Kota Layak Huni	69,16	69,39	69,63	69,86	70,10	70,33	
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	77,26	77,27	77,28	77,29	77,30	77,31	
		Meuwujudkan hunian layak dan terjangkau	Persentase Hunian Layak dan terjangkau	73,50	74,74	75,98	77,22	78,46	79,70	
		Mengembangkan dan	Indeks Infrastruktur	66,12	66,65	67,03	67,42	67,8	68,18	

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		merevitalisasi sarana serta prasarana umum yang ramah lingkungan dan hijau								
		Meningkatnya Kualitas Transportasi Publik	Rasio Konektivitas Wilayah	60,0	60,2	60,4	60,6	60,8	70,0	
Misi 6 : Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana	**Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim**		Indeks Risiko Bencana (IRB)	154,87	154,00	151,07	147,72	143,71	139,32	
		Penguatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana dan perubahan iklim	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,52	0,53	0,55	0,57	0,59	0,61	
Misi 7 : Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif dengan Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	Mewujudkan Sektor perdagangan dan jasa yang tangguh		PDRB sektor perdagangan dan jasa (Miliar Rupiah)	30.744,63	32.622,65	34.500,68	36.378,70	38.256,72	40.134,74	Mencakup Lapangan Usaha G, K, M ,N, P. Q, R, S, T, U
		Meningkatnya kemampuan	Kontribusi PAD terhadap	0,32	0,34	0,36	0,38	0,39	0,40	

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan	pendapatan daerah							
		Meningkatnya Kontribusi Sektor perdagangan dan jasa terhadap perekonomian Daerah	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan dan jasa	5,48	5,76	6,05	6,35	6,67	7,00	Mencakup Lapangan Usaha G, K, M ,N, P. Q, R, S, T, U
		Meningkatnya daya saing produk daerah	Persentase Pertumbuhan Net Ekspor	9,29	9,38	9,48	9,57	9,67	9,76	
		Meningkatkan Lapangan Usaha Perdagangan	Kontribusi Lapangan usaha Perdagangan Terhadap PDRB	17,99	18,30	18,61	18,92	19,23	19,54	
		Meningkatnya daya saing produk daerah dan transaksi perdagangan	Kontribusi Ekspor terhadap PDRB	7,108	7,123	7,138	7,153	7,168	7,185	Dihitung berdasarkan data PDRB Pengeluaran
		Meningkatkan perekonomian daerah dari sektor Koperasi dan UMKM (Usaha Mikro)	Nilai omset sektor koperasi dan UMKM (usaha mikro) (Rp Juta)	1.852.392,88	1.937.602,95	2.038.358,31	2.156.583,09	2.294.604,41	2.455.226,71	
Misi 8 : Menggerakkan Potensi Kota untuk Terwujudnya	**Terwujudnya Meningkatkan perekonomian daerah dari sektor**		PDRB sektor industri kreatif dan pariwisata (Miliar Rupiah)	1218,19	1296,19	1374,19	1452,19	1530,19	1608,19	

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Industri Kreatif dan Pariwisata Berkelanjutan	**Industri Kreatif dan Pariwisata**									
		Meningkatnya Kontribusi Industri Kreatif terhadap Perekonomian Daerah	Persentase Pertumbuhan Sektor PDRB Ekonomi Kreatif	7,43	7,48	7,54	7,67	8,07	8,37	
		Meningkatnya Kontribusi sektor pariwisata terhadap Perekonomian Daerah	Persentase Pertumbuhan sektor pariwisata	7,12	7,22	8,98	9,08	9,11	9,14	

I.5 Arah Kebijakan Daerah, Strategi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Padang Tahun 2025-2029

3.5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Padang Tahun 2025-2029

Dalam penyusunan RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029 juga dirumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis, masalah dan potensi yang ada di Kota Padang dan tertuang dalam dokumen KLHS RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029. Strategi juga merupakan pengejawantahan dari program Kepala Daerah (9 program unggulan Wali Kota - Wakil Wali Kota Padang).

Arah kebijakan merupakan penjabaran dan rangkaian kerja dari misi RPJMD yang serasi atau selaras dengan strategi, dengan mempertimbangkan program Kepala Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD. Keterkaitan Strategi dan Arah kebijakan dalam konsep penyusunan RPJMD dapat dilihat pada gambar dibawah ini;

Gambar III- 1 Keterkaitan Strategi dan Arah Kebijakan dalam Konsep Penyusunan RPJMD

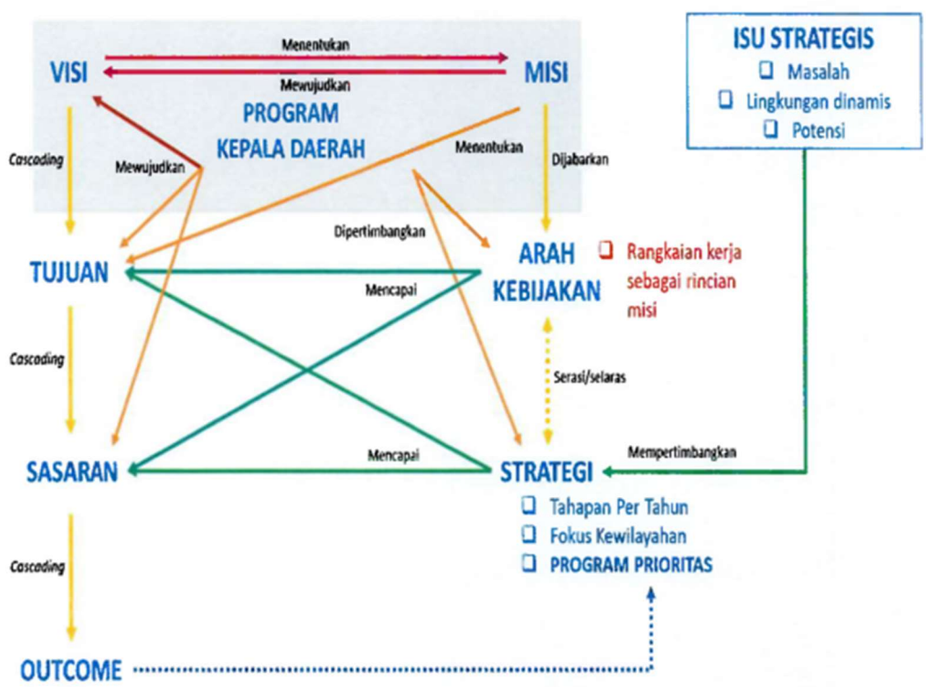

Sumber: Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

Strategi dan Arah kebijakan yang dirumuskan mempertimbangkan 9 (sembilan) Program Unggulan dan 40 (empat puluh) aktivasi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang 2025-2029 yaitu sebagai berikut:

1. **Padang Amanah**

   Padang Amanah diwujudkan dalam bentuk aktivasi berupa:

   a) Pemerintahan berintegritas dan bebas pungli;

b) Optimalisasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi;
c) Pembangunan Masyarakat Tingkat RW.
d) Pemanfaatan aset untuk peningkatan pendapatan asli daerah.

2. Padang Juara

Padang Juara diwujudkan dalam bentuk aktivasi berupa:

a) Kartu Padang Juara;
b) Revisi kurikulum dan sertifikasi Guru PAUD;
c) Revisi kurikulum dan sertifikasi TPQ/MDTA bagi siswa SD, MDTW/TQA bagi siswa SMP,
d) Madrasah Diniyah Wustho (MDW) bagi siswa SMP;
e) LKS dan seragam sekolah gratis bagi siswa kurang mampu;
f) Padang Balomba.

3. Smart Surau

Smart Surau diwujudkan dalam bentuk aktivasi berupa:

a) Subuh mubarokah;
b) Remaja mesjid reborn;
c) Fasilitasi rumah tahfidz;
d) Ruang pembelajaran digital mesjid dan Wifi gratis.

4. Sinergi Nagari

Sinergi Nagari diwujudkan dalam bentuk aktivasi berupa:

a) Optimalisasi peran *Tungku Tigo Sajarangan* dalam pemberdayaan masyarakat;
b) Sinergi pemerintah kota dengan organisasi masyarakat keagamaan, cendikiawan, dan adat.

5. Padang Melayani

Padang Melayani diwujudkan dalam bentuk aktivasi berupa:

a) BPJS kesehatan gratis;
b) BPJS ketenagakerjaan untuk pekerja rentan;
c) Bantuan pemerintah untuk kelompok pertanian dan perikanan;
d) Fasilitasi/insentif keluarga pasien kurang mampu;
e) Peduli “Warga Emas” pada sektor kesehatan, transportasi, dan pelayanan publik;
f) Perlindungan anak dan perempuan terhadap kekerasan;
g) Kemudahan izin investasi dan berusaha;
h) Peningkatan skill kepemudaan;

6. Padang Rancak

Padang Rancak diwujudkan dalam bentuk aktivasi berupa:

a) Taman tematik per kecamatan;
b) Pengendalian banjir terpadu;
c) Pengelolaan sampah terpadu dan penataan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) modern;
d) Perbaikan jalan dan drainase kota;
e) Trotoar ramah pejalan kaki;
f) Transportasi publik dan pemberhentian ramah warga.
g) Revitalisasi Pasar Raya dan pasar satelit

7. Padang Sigap

Padang Sigap diwujudkan dalam bentuk aktivasi berupa:

a) Dubalang kota;
b) Sigap Call Center;
c) Dokter warga.

8. UMKM Naik Kelas

UMKM Naik Kelas diwujudkan dalam bentuk aktivasi berupa:

a) Rumah wirausaha untuk Usaha mikro;
b) Koperasi berjaya.

9. Jelajah Padang

Jelajah Padang diwujudkan dalam bentuk aktivasi berupa:

a) Penataan kawasan pinggir pantai;
b) Pengembangan sektor wisata dan ekonomi kreatif;
c) Revitalisasi dan aktivasi wisata tematik
d) Toilet bersih di area publik.

Berdasarkan program unggulan dan 40 aktivasi Kepala Daerah, maka dirumuskan 40 (empat puluh) Arah Kebijakan dalam RPJMD Kota Padang Tahun 2025 – 2029 sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang Berintegritas dan Bebas Pungutan Liar

   Untuk meningkatkan kredibilitas aparatur pemerintah kota Padang perlu dilakukan upaya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan menjunjung tinggi integritas, serta memberantas praktik pungutan liar di seluruh layanan publik.

2. Meningkatkan Kemudahan Layanan Publik Berbasis Teknologi

   Menerapkan sistem digitalisasi untuk mempermudah akses, mempercepat proses, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

3. Meningkatkan Pembangunan Masyarakat Tingkat RW, dengan Menggalakan Kembali Gotong Royong di Tingkat RT dan RW.

   Pembangunan masyarakat tingkat RW adalah proses partisipatif yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat wilayah Rukun Warga melalui penguatan kelembagaan, pemanfaatan potensi lokal, dan penyediaan pelayanan dasar secara berkelanjutan, inklusif, dan berbasis kearifan lokal. Pembangunan masyarakat di tingkat RW merupakan bagian integral dari pembangunan wilayah kelurahan dan kecamatan yang berfokus pada keterlibatan langsung warga dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi berbagai program pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

4. Meningkatkan Pelayanan kepada warga lanjut usia dan penyandang Disabilitas “Warga Emas” pada Sektor Kesehatan, Transportasi, & Pelayanan Publik

   Memberikan perhatian khusus dan layanan prioritas kepada warga lanjut usia dan penyandang disabilitas agar memperoleh kemudahan akses di bidang kesehatan, transportasi, dan layanan publik. Untuk bidang kesehatan pelayanan diberikan dalam satu ruangan (one stop service).

5. Meningkatkan pemerataan pendidikan dengan kartu Padang Juara

   Kartu Padang Juara dimaksudkan untuk kemudahan akses Pendidikan bagi pelajar kurang mampu dikota Padang. Kartu Padang Juara diberikan kepada warga kurang mampu tingkat SD / SMP sederajat (bantuan Pendidikan Baju Seragam dan LKS) serta memberikan Beasiswa ke Perguruan Tinggi bagi lulusan SMA/ SMK.

6. Meningkatkan Kualitas kurikulum PAUD dan Kompetensi melalui Sertifikasi Guru PAUD

   Revisi Kurikulum PAUD bertujuan untuk mengoptimalkan perkembangan Anak melalui kegiatan pengembangan model pembelajaran Innovatif bermuatan lokal. Sedangkan sertifikasi guru bertujuan untuk memastikan guru PAUD memiliki kompetensi yang dibutuhkan melalui pemberian biaya bantuan pendidikan bagi guru PAUD.

7. Mengurangi beban biaya Pendidikan bagi Warga Kurang Mampu dengan Penyediaan LKS & Seragam Sekolah

   Salah satu arah kebijakan untuk meningkatkan Pemerataan Pendidikan di Kota Padang yakni melalui bantuan pendidikan melalui Penyediaan lembar kerja siswa (LKS) dan seragam sekolah Gratis kepada Warga Kota Padang yang kurang mampu (siswa kelas satu SD dan kelas 7 SMP).

8. Mengurangi beban biaya kesehatan dengan BPJS Kesehatan Gratis bagi warga kota Padang

   Memberikan jaminan kesehatan gratis melalui BPJS Kesehatan kepada warga Kota Padang, dengan syarat terdaftar dengan KTP Padang. Hal ini dilakukan agar warga kota Padang memperoleh akses layanan kesehatan yang layak dan terjangkau

9. Meningkatkan Kualitas Kurikulum & Sertifikasi TPQ/MDTA bagi Siswa SD, MDTW/TQA bagi Siswa SMP yang Beragama Islam dan Pembinaan Kerohanian Siswa Pada Agama Lainnya (Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu) dengan tetap Bersinergi dengan Kementerian Agama.

Meningkatkan Kualitas kurikulum dan memberikan sertifikasi bagi tenaga pendidik keagamaan islam di TPQ/ MDTA/ MDTW/ TQA yang bersinergi dengan Kementrian Agama, guna meningkatkan kualitas pendidikan agama di tingkat SD dan SMP, serta Pembinaan Kerohanian Siswa Pada Agama Lainnya (Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu). Diharapkan nantinya akan tercipta kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Kota Padang

10. Meningkatkan nilai Keagamaan siswa SMP dengan Pelaksanaan Madrasah Diniyah Wustho (MDTW) bagi Siswa SMP

    Pendidikan Agama merupakan pondasi penting guna mewujudkan generasi yang berkualitas dan berakhlak. Program pendidikan agama berbasis Madrasah Diniyah Wustho sebagai salah satu upaya dari pembinaan karakter dan pendalaman ilmu agama bagi siswa SMP yang dilaksanakan di luar pendidikan formal disekolah.

11. Meningkatkan Peran aktif warga kota dalam pembangunan dengan penyelenggaraan event perlombaan “Padang Balomba”

    Padang Balomba dirancang untuk mendorong warga kota Padang khususnya generasi muda berkompetisi dalam bidang akademis, olahraga, seni dan bidang lainnya serta menstimulus masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan di kota Padang.

12. Meningkatkan suasana keagamaan di kota Padang dengan “penggalakan Subuh Mubarokah”

    Menghidupkan kembali tradisi dan aktivitas keagamaan pada waktu subuh sebagai sarana mempererat ukhuwah dan meningkatkan keimanan masyarakat warga kota Padang.

13. Meningkatkan Peran Kepemudaan dalam menghidupkan suasana keagamaan di rumah Ibadah dengan “Remaja Masjid Reborn”

    Merupakan konsep untuk menghidupkan dan meramaikan aktifitas kepemudaan yang berpusat dimesjid/ surau, melalui kegiatan keagamaan dan positif lainnya.

14. Memberikan dukungan pada pusat pembelajaran non formal Rumah Tahfidz

    Menyediakan dukungan sarana dan prasarana bagi rumah tahfidz untuk mendukung kegiatan belajar menghafal Al-Qur’an secara optimal.

15. Meningkatkan akses pembelajaran di rumah ibadah dengan Penyediaan Ruang Pembelajaran Digital di rumah ibadah / Masjid & WiFi Gratis

Meningkatkan fungsi rumah ibadah dalam mendukung kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang didukung oleh fasilitas ruang belajar digital dan akses WiFi gratis di rumah ibadah. Fasilitas ruang belajar digital dan akses WiFi gratis ini dapat diakses seluruh masyarakat di lingkungan rumah ibadah tersebut.

16. Meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui Dokter Warga

    Dokter warga adalah tenaga kesehatan yang memberikan layanan kesehatan langsung ke rumah warga yang mengalami kendala mengakses fasilitas kesehatan. Dengan keberadaan dokter ini diharapkan masyarakat yang memiliki keterbatasan akses ke fasilitas kesehatan mendapatkan pelayanan langsung ke rumah.

17. Menyediakan insentif bagi Keluarga Pasien Kurang Mampu

    Insentif bagi keluarga pasien yang menunggu pasien yang di rawat di ruang rawatan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rasidin diberikan berupa makan gratis.

18. Mengoptimalisasikan Peran Tungku Tigo Sajarangan dalam Pemberdayaan Masyarakat

    Tungku Tigo Sajarangan merupakan konsep sinergi antara Niniak Mamak, alim ulama, dan cadiak pandai dalam memberdayakan masyarakat.

19. Mensinergikan Peran Pemerintah Kota dengan Organisasi Masyarakat Keagamaan, Cendekiawan & Adat

    Membangun sinergi yang harmonis antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan keagamaan, tokoh intelektual, serta adat untuk mendukung pembangunan daerah.

20. Mengoptimalkan Unsur Kelembagaan Masyarakat dalam menjaga Ketertiban dan Keamanan dalam bentuk peran Dubalang Kota

    Dubalang Kota Padang merupakan unsur gabungan Lembaga Masyarakat, Babinsa dan Babinkamtibmas dalam upaya menjaga ketertiban, keamanan masyarakat kota. Peran dubalang menjadi sangat penting dalam penegakan perda dan antisipasi prilaku sosial yang mengganggu ketertiban umum seperti : Tawuran, Balap Liar dan pelanggaran lainnya. Bentuk kegiatan dubalang kota berupa : Patroli rutin di titik rawan dan merespon cepat gangguan, kolaborasi Satuan polisi Pamong Praja dan aparat hukum dengan tetap mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis, sesuai nilai Minangkabau.

21. Meningkatkan layanan Perlindungan Anak & Perempuan terhadap Kekerasan

Peningkatan layanan Perlindungan Anak & Perempuan terhadap Kekerasan dilakukan melalui penyediaan layanan dan program perlindungan khusus untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di masyarakat berupa pendampingan terhadap korban kekerasan.

22. Meningkatkan Kemudahan Izin Investasi & Berusaha

    Peningkatan kemudahan izin investasi dan berusaha dilakukan dengan menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan usaha dan investasi untuk menarik minat pelaku ekonomi serta mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Padang. Serta mendorong pengembangan kewilayahan sebagaimana yang telah dirancang dalam RPJMN 2025-2029 yakni Pengembangan dan Penataan Kawasan Perkotaan Padang-Pariaman dengan fokus pengembangan koridor industry rintisan Padang-Pariaman (sektor industry prioritas : hilirisasi kelapa, hilirisasi kelapa sawit, industri makanan dan minuman dan industri transportasi laut dan galangan kapal).

23. Meningkatkan Skill Kepemudaan

    Menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi generasi muda agar siap bersaing dan berkontribusi dalam pembangunan Kota Padang.

24. Meningkatkan aksesibilitas dan utilitas Kota dengan Perbaikan Jalan & Drainase Kota

    Melaksanakan perbaikan infrastruktur jalan dan sistem drainase untuk meningkatkan kenyamanan, keselamatan, dan mengurangi risiko banjir di wilayah perkotaan.

    Beberapa yang menjadi prioritas untuk pembangunan dan perbaikan jalan dan jembatan seperti

    a. Pengembangan dan Pembangunan Jaringan Jalan Lintas Barat Kota Padang – Kab Padang Pariaman – Kota Pariaman
    b. Pembukaan dan Pembangunan Jalan Lingkar Timur Kota Padang yaitu Jalan Padang By Pass -Air Dingin - Lubuk Minturun - Gunung Sariak - Limau Manis - Bandar Buat - Baringin – Bungus
    c. Pelebaran Jalan Raya Anak Aie Menuju Terminal Bus Type A Anak Aie
    d. Pembangunan aksesibilitas dan Pemeliharaan Jalan menuju ke Kawasan-kawasan strategis seperti Kawasan wisata seperti Padang Mandeh melalui Sungai Pisang - Sungai Pinang - Mandeh (Pesisir Selatan)
    e. Pembangunan aksesibilitas menuju ke fasilitas Pendidikan dan Perguruan Tinggi di Kota Padang
    f. Pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani atau akses ke Kawasan pertanian

g. Pemindahan Jalan Umum yang melewati Komplek PT. Palindo Pelabuhan Teluk Bayur
h. Pembangunan dan Penggantian Jembatan untuk meningkatkan aksesibilitas, memperkuat konektivitas wilayah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi
i. Pembukaan Jalan baru dan Jembatan SMKN 11
j. Penggantian Jembatan Lansano di Sungai Pisang
k. Pembangunan Jembatan Baringin Lubuk Kilangan
l. Pembangunan Jembatan Lubuk Sarik Lubuk Kilangan

25. Meningkatkan fungsi Ruang Terbuka Hijau dengan optimalisasi Taman Tematik per Kecamatan

Mengembangkan dan memanfaatkan taman tematik di setiap kecamatan sebagai ruang terbuka hijau. Taman tematik yang tersebar di masing-masing kecamatan nantinya akan mendukung fungsi ruang terbuka sekaligus sarana rekreasi dan interaksi sosial warga. Serta merevitalisasi dan menyediakan Ruang Terbuka Hijau Kota guna mendukung aktivitas dan interaksi sosial yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

26. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan Pengelolaan Sampah Terpadu & Penataan TPA Modern

Pengelolaan sampah terpadu di Kota Padang dilakukan dengan Menerapkan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dan modern dengan penataan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang ramah lingkungan dengan arah kebijakan :

a. Operasional tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) berkelanjutan pada TPA Anak Aie
b. Pembangunan TPST dan TPS3R pada beberapa lokasi permukiman
c. Pengolahan sampah dengan penerapan ekonomi sirkular yang dilakukan sebagai inisiatif bersama oleh masyarakat untuk menciptakan sistem yang lebih berkelanjutan, seperti :

    i. Digitalisasi sistem Bank Sampah
    ii. Optimalisasi Lembaga Pengelola Sampah
    iii. Kolaborasi Penthahelix dalam Budidaya Maggot
    iv. Mengubah sampah menjadi emas bersama FORSEPSI
    v. Nabung Sarok dengan pengolahan sampah anorganik bernilai ekonomi

27. Meningkatkan Aksesibilitas Publik dengan Penyediaan Trotoar Ramah Pejalan Kaki

Membangun dan memperbaiki trotoar yang aman dan nyaman untuk memudahkan mobilitas pejalan kaki di area perkotaan. Serta pengembangan koridor connecting wisata yang berkualitas, merata, ramah lingkungan dan disabilitas.

28. Meningkatkan Transportasi Publik & Pemberhentian Ramah Warga

    Menyediakan layanan transportasi umum yang efisien serta halte pemberhentian yang nyaman dan mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat. Arah kebijakan sektor transportasi publik :

    a. Penyediaan Transportasi Massal (Trans-Padang) yang melayani 6 koridor yang ke depannya akan bergeser dari bahan bakar fosil ke rendah karbon/listrik
    b. Pembangunan dan Peningkatan Kualitas tempat pemberhentian Trans Padang yang ramah warga serta memperhatikan aksesibilitas bagi lansia, ibu hamil, anak-anak, dan penyandang disabilitas
    c. Pembangunan Halte Intergrasi Intra Moda (Trans Padang - KA)
    d. Penguatan rute-rute strategis untuk transportasi publik, serta dukungan sistem digital untuk informasi dan pembayaran menjadi bagian dari transformasi ini.
    e. Pengadaan Command center manajemen lalu lintas dan operasional angkutan massal trans Padang

29. Meningkatkan Responsivitas Layanan Kepada Masyarakat dengan “Sigap Call Center”

    Meningkatkan kapasitas dan responsivitas layanan darurat terpadu Sigap Call Center untuk penanganan cepat kejadian kecelakaan, kebakaran, bencana alam, dan keadaan darurat lainnya.

30. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman melalui “Pengendalian Banjir Terpadu”

    Kota Padang memiliki kondisi topografi kemiringan lahan dan Indeks curah hujan yang cukup tinggi. Oleh karena itu perlu perhatian khusus terhadap lingkungan perumahan dan drainase kota untuk mencegah timbulnya genangan yang berakibat pada potensi banjir. Arah kebijakan untuk meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman melalui pengendalian banjir dilakukan dalam bentuk kegiatan, yaitu :

    a. Normalisasi pada beberapa sungai yang ada di Kota Padang seperti Sungai Batang Maransi dan Sungai Batang Timbalun
    b. Pembangunan Kolam Retensi pada Kawasan aie pacah dan rencana penempatan pompa pada lokasi rawan genangan dan banjir untuk mempercepat aliran air ketika terjadi banjir
    c. Pembangunan dan peningkatan drainase perkotaan dan drainase lingkungan terutama pada daerah rawan genangan dan banjir.

31. Meningkatkan Perlindungan Tenaga Kerja Rentan dengan "Penyediaan BPJS Ketenagakerjaan untuk Pekerja Rentan"

    Tenaga kerja rentan adalah kelompok pekerja yang memiliki risiko tinggi mengalami kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, atau masalah kesehatan lainnya, serta memiliki kondisi kerja yang tidak aman atau tidak terlindungi. Tenaga kerja Rentan ini sebagian besar belum memiliki jaminan sosial atau pendapatan yang tidak stabil.

32. Meningkatkan Potensi dan Produktivitas Petani dan Nelayan dengan "Penyediaan Bantuan untuk Kelompok Pertanian & Perikanan"

    Untuk meningkatkan produktivitas petani dan nelayan di Kota Padang, Pemerintah Kota Padang memberikan bantuan kepada kelompok pertanian dan perikanan. Bantuan perikanan diantaranya benih dan calon indukan ikan, peralatan budidaya, pelatihan dan pendampingan sedangkan untuk bantuan pertanian diantaranya bantuan penumbuhan benih bersertifikat, bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), pupuk dan pestisida, pelatihan dan penyuluhan, modal usaha dan infrastruktur.

33. Meningkatkan Aksesibilitas Perdagangan dengan "Revitalisasi Pasar Raya & Pasar Satelit"

    Sektor Perdagangan merupakan sektor yang dominan dalam menggerakkan perekonomian kota Padang. Untuk mengoptimalkan peran sektor perdagangan diperlukan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif dengan melakukan pembenahan dan pengembangan Pasar Raya dan pasar-pasar satelit agar menjadi pusat perdagangan yang modern dan nyaman.

34. Meningkatkan Produktivitas Usaha Mikro dengan Penciptaan Inkubator Bisnis

    Usaha mikro adalah jenis usaha ekonomi produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha perorangan dengan kriteria, modal usaha maksimal 2 Milyar atau dan omset usaha maksimal sebesar 1,5 Milyar Pertahun. Dalam meningkatkan / mewujudkan usaha mikro yang naik kelas, perlu dilakukan pembinaan di Inkubator bisnis yang dinamakan Rumah Wirausaha.

35. Meningkatkan Ekonomi Masyarakat dengan "Koperasi Berjaya"

    Koperasi berkontribusi dalam membangun perekonomian yang lebih inklusif dan berkelanjutan dengan melibatkan berbagai lapisan masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Koperasi melibatkan partisipasi aktif anggota dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan usaha, meliputi penguatan akses permodalan, pelatihan, dan pendampingan. Koperasi Berjaya

bertujuan untuk mendorong dan menginkubasi koperasi aktif yang menjalankan tata kelola sesuai AD/ART serta menghasilkan keuntungan dan manfaat bagi anggota setiap tahun. Penguatan peran koperasi menjadi "Koperasi Berjaya" selaras dengan Program Nasional yaitu Pengembangan Koperasi Merah Putih.

36. Meningkatkan Kemampuan Pendapatan daerah dengan "Pemanfaatan Aset Daerah"

    Pemanfaatan aset daerah adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah atau optimalisasi aset daerah tanpa mengubah status kepemilikannya. Bentuk pemanfaatan ini bisa berupa sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna, dan kerja sama penyediaan infrastruktur. Pemanfaatan Aset Daerah bertujuan untuk Memastikan aset daerah yang tidak terpakai dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial guna peningkatan pendapatan daerah sehingga dapat mendukung pembiayaan pembangunan. Mengoptimalkan penggunaan Aset daerah seperti tanah, bangunan, dan sumber daya alam untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

37. Meningkatkan Kualitas Destinasi Pariwisata dengan Penataan Kawasan Wisata Terpadu Gunung Padang (Pengembangan Legenda Batu Malin Kundang dengan Pantai Air Manis, Legenda Siti Nurbaya dengan Gunung Padang, Kota Tua, dan Pantai Padang)

    Melaksanakan penataan dan pengelolaan kawasan destinasi prioritas di Wilayah Sumatera Barat, maka perlu dilakukan pengembangan destinasi wisata secara terencana untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan fungsi wisata dan ekonomi. Penataan kawasan yang menjadi fokus dalam pembangunan lima tahun ini yakni Kawasan Wisata Terpadu Gunung Padang yakni Pantai Padang, Pantai Air Manis dan Kawasan Kota Tua Padang. Kegiatan yang dilakukan antara lain penataan pedagang di sekitar pantai, pembangunan sarana prasarana di destinasi wisata seperti fasilitas olah raga di Muaro Lasak dan pembangunan pedestrian di segmen Olo Ladang selanjutnya peningkatan kualitas ruang publik dikawasan Kota Tua Padang. Pengembangan DTW Pantai Air Manis melalui Penataan pedagang di sekitar Pantai Air Manis, Pembangunan Ampitheather, Pembangunan Gerbang masuk, dan Melaksanakan Event Pariwisata di Pantai Air Manis.

38. Pengembangan Potensi Perekonomian Daerah dengan Sektor Wisata & Ekonomi Kreatif

    Mengembangkan potensi wisata dan ekonomi kreatif melalui inovasi produk, peningkatan kualitas layanan, dan promosi efektif, dengan menonjolkan destinasi wisata heritage atau kota tua sebagai daya tarik utama. Dalam rangka mewujudkan

Padang menuju Kota Gastronomy yang diakui oleh UNESCO, pemerintah Kota Padang menunjukkan komitmen dalam mempromosikan budaya dan kreatifitas sebagai pendorong pembangunan berkelanjutan. Pelaksanaan Kegiatan yang menunjang "Padang Menuju Kota Gastronomy" dalam bentuk Festival Ekonomi Kreatif, Pameran dan Kegiatan Pendukung lainnya baik itu berupa event berskala besar , menengah dan kecil.

39. Meningkatkan Destinasi Wisata Unggulan dengan Revitalisasi & Aktivasi Wisata Tematik

    Menghidupkan kembali dan mengembangkan destinasi wisata tematik yang berpotensi untuk dikembangkan dengan mengangkat potensi wilayah, budaya, sejarah, religi, pendidikan, kesehatan dan keunikan lokal agar menjadi daya tarik wisata yang berkelanjutan. Program ini diwujudkan melalui revitalisasi *tradisi elo pukek* yakni tradisi menangkap ikan secara kolektif ini dijadikan atraksi wisata interaktif, di mana wisatawan bisa ikut serta dan membawa pulang hasil tangkapan dan penataan Zona Khas Halal di Pujasera Pantai Padang dengan menyediakan kuliner halal sebagai bagian dari branding wisata "Jelajah Padang". Didukung dengan pengembangan koridor connecting wisata yang ramah lingkungan dan disabilitas serta sesuai kebutuhan lintas generasi.

40. Meningkatkan Fasilitas Sanitasi Publik dengan Penyediaan Toilet Bersih di Area Publik

    Untuk meningkatkan kualitas sanitasi di destinasi wisata prioritas Kota Padang yakni dengan menyediakan toilet yang bersih, sehat, aman, dan nyaman di area publik agar pengunjung baik lokal maupun mancanegara merasakan pengalaman yang menyenangkan.

    Hal ini diwujudkan dengan membangun toilet bersih dan memberikan pelatihan bagi petugas toilet bersih di area publik baik di kawasan destinasi wisata maupun di area publik lainnya. Khusus di kawasan destinasi wisata diarahkan pada destinasi seperti Pantai Padang, Pantai Air Manis, Kawasan Kota Tua dan Pasir Jambak. Program ini juga sejalan dengan Gerakan Wisata Bersih, yang menekankan pentingnya kebersihan dan keselamatan sebagai bagian dari daya tarik wisata Indonesia

Keterkaitan antara arah kebijakan terhadap visi dan misi RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III- 9 Visi, Misi, dan Arah Kebijakan RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029

Visi : Menggerakkan Segala Potensi Untuk Mewujudkan Kota Padang Sebagai Kota Pintar (Smart City) Dan Kota Sehat, Berlandaskan Agama Dan Budaya, Menuju Kota Yang Maju Dan Sejahtera

No	Misi	Arah Kebijakan		Ket
1	Misi 1 : Menguatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang Berintegritas dan Bebas Pungutan Liar	
		2	Meningkatkan Pembangunan Masyarakat Tingkat RW, dengan Menggalakan Kembali Gotong Royong di Tingkat RT dan RW	
		3	Meningkatkan Pelayanan kepada warga lanjut usia dan penyandang Disabilitas “Warga Emas” pada Sektor Kesehatan, Transportasi, & Pelayanan Publik	
2	Misi 2 : Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	4	Meningkatkan Kemudahan Layanan Publik Berbasis Teknologi	
		5	Meningkatkan akses pembelajaran di rumah ibadah melalui Penyediaan Ruang Pembelajaran Digital di rumah ibadah / Masjid & WiFi Gratis	
		6	Mengurangi beban biaya kesehatan dengan BPJS Kesehatan Gratis bagi warga kota Padang	
		7	Meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan Dokter Warga	
		8	Menyediakan insentif bagi Keluarga Pasien Kurang Mampu	
3	Misi 3 : Menguatkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	9	Meningkatkan pemerataan pendidikan dengan kartu Padang Juara	
		10	Mengurangi beban biaya Pendidikan bagi Warga Kurang Mampu dengan Penyediaan LKS & Seragam Sekolah	
		11	Meningkatkan Kualitas Kurikulum & Sertifikasi TPQ/MDTA bagi Siswa SD, MDTW/TQA bagi Siswa SMP yang Beragama Islam dan Pembinaan Kerohanian Siswa Pada Agama Lainnya (Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu) dengan tetap Bersinergi dengan Kementerian Agama	
		12	Meningkatkan nilai Keagamaan siswa SMP dengan Pelaksanaan Madrasah Diniyah Wustho (MDTW) bagi Siswa SMP	
		13	Meningkatkan Kualitas kurikulum dan Kompetensi dengan Sertifikasi Guru PAUD	
		14	Meningkatkan Peran aktif warga kota dalam pembangunan dengan penyelenggaraan event perlombaan “Padang Balomba”	
		15	Meningkatkan suasana keagamaan di kota Padang dengan “penggalakan Subuh Mubarokah”	
		16	Meningkatkan Peran Kepemudaan dalam menghidupkan suasana keagamaan di rumah Ibadah dengan pengembangan “Remaja Masjid”	
		17	Pemberian dukungan pada pusat pembelajaran non formal Rumah Tahfidz	

No	Misi	Arah Kebijakan		Ket
		18	Mengoptimalkan Peran Tungku Tigo Sajarangan dalam Pemberdayaan Masyarakat	
		19	Mensinergikan Peran Pemerintah Kota dengan Organisasi Masyarakat Keagamaan, Cendekiawan & Adat	
		20	Mengoptimalkan Unsur Kelembagaan Masyarakat dalam menjaga Ketertiban dan Keamanan dalam bentuk peran Dubalang Kota	
		21	Meningkatkan layanan Perlindungan Anak & Perempuan terhadap Kekerasan	
4	Misi 4 : Mendorong Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	22	Meningkatkan Kemudahan Izin Investasi dan Berusaha	
		23	Meningkatkan Skill Kepemudaan	
		24	Meningkatkan Kemampuan Pendapatan daerah melalui “Pemanfaatan Aset Daerah”	
5	Misi 5 : Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	25	Meningkatkan aksesibilitas dan utilitas Kota dengan Perbaikan Jalan & Drainase Kota	
		26	Meningkatkan fungsi Ruang Terbuka Hijau dengan optimalisasi Taman Tematik per Kecamatan	
		27	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan Pengelolaan Sampah Terpadu & Penataan TPA Modern	
		28	Meningkatkan Aksesibilitas Publik dengan Penyediaan Trotoar Ramah Pejalan Kaki	
		29	Meningkatkan Transportasi Publik & Pemberhentian Ramah Warga	
6	Misi 6 : Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana	30	Meningkatkan Responsibitas Layanan Kepada Masyarakat dengan “Sigap Call Center”	
		31	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman melalui “Pengendalian Banjir Terpadu”	
7	Misi 7 : Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	32	Meningkatkan Perlindungan Tenaga Kerja Rentan dengan “Penyediaan BPJS Ketenagakerjaan untuk Pekerja Rentan”	
		33	Mengembangkan Potensi dan Produktivitas Petani dan Nelayan dengan “Penyediaan Bantuan untuk Kelompok Pertanian & Perikanan”	
		34	Meningkatkan Fasilitas dan Aksesibilitas Perdagangan dengan “Revitalisasi Pasar Raya & Pasar Satelit”	
		35	Meningkatkan Produktivitas Usaha Mikro dengan “Penguatan Inkubator Bisnis”	
		36	Meningkatkan Ekonomi Masyarakat dengan “Penguatan Koperasi Berjaya”	
	Misi 8 : Menggerakkan Potensi Kota untuk Terwujudnya Industri Kreatif dan Pariwisata Berkelanjutan	37	Meningkatkan Kualitas Destinasi Pariwisata dengan “Penataan Kawasan Wisata Terpadu Gunung Padang Pengembangan Legenda Batu Malin Kundang dengan Pantai Air Manis, Legenda Siti Nurbaya dengan Gunung Padang, Kota Tua, dan Pantai Padang	

No	Misi	Arah Kebijakan		Ket
		38	Mengembangkan Potensi Perekonomian Daerah dengan Sektor Wisata & Ekonomi Kreatif	
		39	Meningkatkan Destinasi Wisata Unggulan dengan Revitalisasi & Aktivasi Wisata Tematik	
		40	Meningkatkan Fasilitas Sanitasi Publik dengan Penyediaan Toilet Bersih di Area Publik	

Kemudian, dalam rangka keberhasilan mencapai pembangunan tersebut, maka visi dan misi serta program pembangunan akan dikerjakan berdasarkan arah kebijakan pembangunan tahunan yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III- 10 Arah Kebijakan Pembangunan Kota Padang Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan Pembangunan Tahunan Kota Padang				
2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Peningkatan tata kelola pemerintahan yang Berintegritas dan Bebas Pungutan Liar	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang Berintegritas dan Bebas Pungutan Liar	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang Berintegritas dan Bebas Pungutan Liar	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang Berintegritas dan Bebas Pungutan Liar	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang Berintegritas dan Bebas Pungutan Liar
	Peningkatan Kemudahan Layanan Publik Berbasis Teknologi	Peningkatan Kemudahan Layanan Publik Berbasis Teknologi	Peningkatan Kemudahan Layanan Publik Berbasis Teknologi	Peningkatan Kemudahan Layanan Publik Berbasis Teknologi
Peningkatan Pembangunan Masyarakat Tingkat RW, dengan Menggalakan Kembali Gotong Royong di Tingkat RT dan RW.	Peningkatan Pembangunan Masyarakat Tingkat RW, dengan Menggalakan Kembali Gotong Royong di Tingkat RT dan RW.	Peningkatan Pembangunan Masyarakat Tingkat RW, dengan Menggalakan Kembali Gotong Royong di Tingkat RT dan RW.	Peningkatan Pembangunan Masyarakat Tingkat RW, dengan Menggalakan Kembali Gotong Royong di Tingkat RT dan RW.	Peningkatan Pembangunan Masyarakat Tingkat RW, dengan Menggalakan Kembali Gotong Royong di Tingkat RT dan RW.
Peningkatan Pelayanan kepada warga lanjut usia dan penyandang Disabilitas "Warga Emas" pada Sektor Kesehatan, Transportasi, & Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan kepada warga lanjut usia dan penyandang Disabilitas "Warga Emas" pada Sektor Kesehatan, Transportasi, & Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan kepada warga lanjut usia dan penyandang Disabilitas "Warga Emas" pada Sektor Kesehatan, Transportasi, & Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan kepada warga lanjut usia dan penyandang Disabilitas "Warga Emas" pada Sektor Kesehatan, Transportasi, & Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan kepada warga lanjut usia dan penyandang Disabilitas "Warga Emas" pada Sektor Kesehatan, Transportasi, & Pelayanan Publik
Peningkatan pemerataan pendidikan melalui kartu Padang Juara	Peningkatan pemerataan pendidikan melalui kartu Padang Juara	Peningkatan pemerataan pendidikan melalui kartu Padang Juara	Peningkatan pemerataan pendidikan melalui kartu Padang Juara	Peningkatan pemerataan pendidikan melalui kartu Padang Juara
	Peningkatan Kualitas kurikulum dan Kompetensi melalui	Peningkatan Kualitas kurikulum dan Kompetensi melalui	Peningkatan Kualitas kurikulum dan Kompetensi melalui	Peningkatan Kualitas kurikulum dan Kompetensi melalui

Arah Kebijakan Pembangunan Tahunan Kota Padang				
2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
	Sertifikasi Guru PAUD.	Sertifikasi Guru PAUD.	Sertifikasi Guru PAUD.	Sertifikasi Guru PAUD.
Pengurangan beban biaya Pendidikan bagi Warga Kurang Mampu melalui Penyediaan LKS & Seragam Sekolah	Pengurangan beban biaya Pendidikan bagi Warga Kurang Mampu melalui Penyediaan LKS & Seragam Sekolah	Pengurangan beban biaya Pendidikan bagi Warga Kurang Mampu melalui Penyediaan LKS & Seragam Sekolah	Pengurangan beban biaya Pendidikan bagi Warga Kurang Mampu melalui Penyediaan LKS & Seragam Sekolah	Pengurangan beban biaya Pendidikan bagi Warga Kurang Mampu melalui Penyediaan LKS & Seragam Sekolah
Pengurangan beban biaya kesehatan melalui BPJS Kesehatan Gratis bagi warga kota Padang	Pengurangan beban biaya kesehatan melalui BPJS Kesehatan Gratis bagi warga kota Padang	Pengurangan beban biaya kesehatan melalui BPJS Kesehatan Gratis bagi warga kota Padang	Pengurangan beban biaya kesehatan melalui BPJS Kesehatan Gratis bagi warga kota Padang	Pengurangan beban biaya kesehatan melalui BPJS Kesehatan Gratis bagi warga kota Padang
	Peningkatan Kualitas Kurikulum & Sertifikasi TPQ/MDTA bagi Siswa SD, MDW/TQA bagi Siswa SMP dengan tetap Bersinergi dengan Kementerian Agama			
Peningkatan nilai Keagamaan siswa SMP melalui Pelaksanaan Madrasah Diniyah Wustho (MDW) bagi Siswa SMP	Peningkatan nilai Keagamaan siswa SMP melalui Pelaksanaan Madrasah Diniyah Wustho (MDW) bagi Siswa SMP	Peningkatan nilai Keagamaan siswa SMP melalui Pelaksanaan Madrasah Diniyah Wustho (MDW) bagi Siswa SMP	Peningkatan nilai Keagamaan siswa SMP melalui Pelaksanaan Madrasah Diniyah Wustho (MDW) bagi Siswa SMP	Peningkatan nilai Keagamaan siswa SMP melalui Pelaksanaan Madrasah Diniyah Wustho (MDW) bagi Siswa SMP
Peningkatan Peran aktif warga kota dalam pembangunan melalui penyelenggaraan event perlombaan “Padang Balomba”	Peningkatan Peran aktif warga kota dalam pembangunan melalui penyelenggaraan event perlombaan “Padang Balomba”	Peningkatan Peran aktif warga kota dalam pembangunan melalui penyelenggaraan event perlombaan “Padang Balomba”	Peningkatan Peran aktif warga kota dalam pembangunan melalui penyelenggaraan event perlombaan “Padang Balomba”	Peningkatan Peran aktif warga kota dalam pembangunan melalui penyelenggaraan event perlombaan “Padang Balomba”
Peningkatan suasana keagamaan di kota Padang melalui “penggalakan Subuh Mubarokah”	Peningkatan suasana keagamaan di kota Padang melalui “penggalakan Subuh Mubarokah”	Peningkatan suasana keagamaan di kota Padang melalui “penggalakan Subuh Mubarokah”	Peningkatan suasana keagamaan di kota Padang melalui “penggalakan Subuh Mubarokah”	Peningkatan suasana keagamaan di kota Padang melalui “penggalakan Subuh Mubarokah”

Arah Kebijakan Pembangunan Tahunan Kota Padang				
2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Peningkatan Peran Kepemudaan dalam menghidupkan suasana keagamaan di rumah Ibadah melalui “Remaja Masjid Reborn”	Peningkatan Peran Kepemudaan dalam menghidupkan suasana keagamaan di rumah Ibadah melalui “Remaja Masjid Reborn”	Peningkatan Peran Kepemudaan dalam menghidupkan suasana keagamaan di rumah Ibadah melalui “Remaja Masjid Reborn”	Peningkatan Peran Kepemudaan dalam menghidupkan suasana keagamaan di rumah Ibadah melalui “Remaja Masjid Reborn”	Peningkatan Peran Kepemudaan dalam menghidupkan suasana keagamaan di rumah Ibadah melalui “Remaja Masjid Reborn”
Pemberian dukungan pada pusat pembelajaran non formal Rumah Tahfidz	Pemberian dukungan pada pusat pembelajaran non formal Rumah Tahfidz	Pemberian dukungan pada pusat pembelajaran non formal Rumah Tahfidz	Pemberian dukungan pada pusat pembelajaran non formal Rumah Tahfidz	Pemberian dukungan pada pusat pembelajaran non formal Rumah Tahfidz
Peningkatan akses pembelajaran di rumah ibadah melalui Penyediaan Ruang Pembelajaran Digital di rumah ibadah / Masjid & WiFi Gratis	Peningkatan akses pembelajaran di rumah ibadah melalui Penyediaan Ruang Pembelajaran Digital di rumah ibadah / Masjid & WiFi Gratis	Peningkatan akses pembelajaran di rumah ibadah melalui Penyediaan Ruang Pembelajaran Digital di rumah ibadah / Masjid & WiFi Gratis	Peningkatan akses pembelajaran di rumah ibadah melalui Penyediaan Ruang Pembelajaran Digital di rumah ibadah / Masjid & WiFi Gratis	Peningkatan akses pembelajaran di rumah ibadah melalui Penyediaan Ruang Pembelajaran Digital di rumah ibadah / Masjid & WiFi Gratis
Peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui Dokter Warga	Peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui Dokter Warga	Peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui Dokter Warga	Peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui Dokter Warga	Peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui Dokter Warga
Penyediaan insentif bagi Keluarga Pasien Kurang Mampu	Penyediaan insentif bagi Keluarga Pasien Kurang Mampu	Penyediaan insentif bagi Keluarga Pasien Kurang Mampu	Penyediaan insentif bagi Keluarga Pasien Kurang Mampu	Penyediaan insentif bagi Keluarga Pasien Kurang Mampu
Optimalisasi Peran Tungku Tigo Sajarangan dalam Pemberdayaan Masyarakat		Optimalisasi Peran Tungku Tigo Sajarangan dalam Pemberdayaan Masyarakat		
	Mensinergikan Peran Pemerintah Kota dengan Organisasi Masyarakat Keagamaan, Cendekiawan & Adat	Mensinergikan Peran Pemerintah Kota dengan Organisasi Masyarakat Keagamaan, Cendekiawan & Adat	Mensinergikan Peran Pemerintah Kota dengan Organisasi Masyarakat Keagamaan, Cendekiawan & Adat	Mensinergikan Peran Pemerintah Kota dengan Organisasi Masyarakat Keagamaan, Cendekiawan & Adat
Mengoptimalkan Unsur Kelembagaan	Mengoptimalkan Unsur	Mengoptimalkan Unsur	Mengoptimalkan Unsur	Mengoptimalkan Unsur

Arah Kebijakan Pembangunan Tahunan Kota Padang				
2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Masyarakat dalam menjaga Ketertiban dan Keamanan dalam bentuk peran Dubalang Kota	Kelembagaan Masyarakat dalam menjaga Ketertiban dan Keamanan dalam bentuk peran Dubalang Kota	Kelembagaan Masyarakat dalam menjaga Ketertiban dan Keamanan dalam bentuk peran Dubalang Kota	Kelembagaan Masyarakat dalam menjaga Ketertiban dan Keamanan dalam bentuk peran Dubalang Kota	Kelembagaan Masyarakat dalam menjaga Ketertiban dan Keamanan dalam bentuk peran Dubalang Kota
Peningkatan layanan Perlindungan Anak & Perempuan terhadap Kekerasan	Peningkatan layanan Perlindungan Anak & Perempuan terhadap Kekerasan	Peningkatan layanan Perlindungan Anak & Perempuan terhadap Kekerasan	Peningkatan layanan Perlindungan Anak & Perempuan terhadap Kekerasan	Peningkatan layanan Perlindungan Anak & Perempuan terhadap Kekerasan
Peningkatan Kemudahan Izin Investasi dan Berusaha	Peningkatan Kemudahan Izin Investasi dan Berusaha	Peningkatan Kemudahan Izin Investasi dan Berusaha	Peningkatan Kemudahan Izin Investasi dan Berusaha	Peningkatan Kemudahan Izin Investasi dan Berusaha
Peningkatan Skill Kepemudaan	Peningkatan Skill Kepemudaan	Peningkatan Skill Kepemudaan	Peningkatan Skill Kepemudaan	Peningkatan Skill Kepemudaan
		Peningkatan aksesibilitas dan utilitas Kota Melalui Perbaikan Jalan & Drainase Kota	Peningkatan aksesibilitas dan utilitas Kota Melalui Perbaikan Jalan & Drainase Kota	Peningkatan aksesibilitas dan utilitas Kota Melalui Perbaikan Jalan & Drainase Kota
	Peningkatan fungsi Ruang Terbuka Hijau melalui optimalisasi Taman Tematik per Kecamatan	Peningkatan fungsi Ruang Terbuka Hijau melalui optimalisasi Taman Tematik per Kecamatan	Peningkatan fungsi Ruang Terbuka Hijau melalui optimalisasi Taman Tematik per Kecamatan	Peningkatan fungsi Ruang Terbuka Hijau melalui optimalisasi Taman Tematik per Kecamatan
		Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui Pengelolaan Sampah Terpadu & Penataan TPA Modern	Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui Pengelolaan Sampah Terpadu & Penataan TPA Modern	Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui Pengelolaan Sampah Terpadu & Penataan TPA Modern
		Peningkatan Aksesibilitas Publik melalui Penyediaan Trotoar Ramah Pejalan Kaki	Peningkatan Aksesibilitas Publik melalui Penyediaan Trotoar Ramah Pejalan Kaki	Peningkatan Aksesibilitas Publik melalui Penyediaan Trotoar Ramah Pejalan Kaki
Peningkatan Transportasi Publik & Pemberhentian Ramah Warga	Peningkatan Transportasi Publik & Pemberhentian Ramah Warga	Peningkatan Transportasi Publik & Pemberhentian Ramah Warga	Peningkatan Transportasi Publik & Pemberhentian Ramah Warga	Peningkatan Transportasi Publik & Pemberhentian Ramah Warga

Arah Kebijakan Pembangunan Tahunan Kota Padang				
2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
		Peningkatan Responsivitas Layanan Kepada Masyarakat melalui ”Sigap Call Center”	Peningkatan Responsivitas Layanan Kepada Masyarakat melalui ”Sigap Call Center”	Peningkatan Responsivitas Layanan Kepada Masyarakat melalui ”Sigap Call Center”
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman melalui ”Pengendalian Banjir Terpadu”	Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman melalui ”Pengendalian Banjir Terpadu”	Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman melalui ”Pengendalian Banjir Terpadu”
Peningkatan Perlindungan Tenaga Kerja Rentan melalui ”Penyediaan BPJS Ketenagakerjaan untuk Pekerja Rentan”	Peningkatan Perlindungan Tenaga Kerja Rentan melalui ”Penyediaan BPJS Ketenagakerjaan untuk Pekerja Rentan”	Peningkatan Perlindungan Tenaga Kerja Rentan melalui ”Penyediaan BPJS Ketenagakerjaan untuk Pekerja Rentan”	Peningkatan Perlindungan Tenaga Kerja Rentan melalui ”Penyediaan BPJS Ketenagakerjaan untuk Pekerja Rentan”	Peningkatan Perlindungan Tenaga Kerja Rentan melalui ”Penyediaan BPJS Ketenagakerjaan untuk Pekerja Rentan”
	Peningkatan Potensi dan Produktivitas Petani dan Nelayan melalui ”Penyediaan Bantuan untuk Kelompok Pertanian & Perikanan”	Peningkatan Potensi dan Produktivitas Petani dan Nelayan melalui ”Penyediaan Bantuan untuk Kelompok Pertanian & Perikanan”	Peningkatan Potensi dan Produktivitas Petani dan Nelayan melalui ”Penyediaan Bantuan untuk Kelompok Pertanian & Perikanan”	Peningkatan Potensi dan Produktivitas Petani dan Nelayan melalui ”Penyediaan Bantuan untuk Kelompok Pertanian & Perikanan”
	Peningkatan Aksesibilitas Perdagangan melalui ”Revitalisasi Pasar Raya & Pasar Satelit”	Peningkatan Aksesibilitas Perdagangan melalui ”Revitalisasi Pasar Raya & Pasar Satelit”	Peningkatan Aksesibilitas Perdagangan melalui ”Revitalisasi Pasar Raya & Pasar Satelit”	Peningkatan Aksesibilitas Perdagangan melalui ”Revitalisasi Pasar Raya & Pasar Satelit”
Peningkatan Produktivitas Usaha Mikro melalui Penciptaan Inkubator Bisnis	Peningkatan Produktivitas Usaha Mikro melalui Penciptaan Inkubator Bisnis	Peningkatan Produktivitas Usaha Mikro melalui Penciptaan Inkubator Bisnis	Peningkatan Produktivitas Usaha Mikro melalui Penciptaan Inkubator Bisnis	Peningkatan Produktivitas Usaha Mikro melalui Penciptaan Inkubator Bisnis
	Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui ”Koperasi Berjaya”	Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui ”Koperasi Berjaya”	Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui ”Koperasi Berjaya”	Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui ”Koperasi Berjaya”
Peningkatan Kemampuan Pendapatan	Peningkatan Kemampuan Pendapatan	Peningkatan Kemampuan Pendapatan	Peningkatan Kemampuan Pendapatan	Peningkatan Kemampuan Pendapatan

Arah Kebijakan Pembangunan Tahunan Kota Padang				
2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
daerah melalui ”Pemanfaatan Aset Daerah”	daerah melalui ”Pemanfaatan Aset Daerah”	daerah melalui ”Pemanfaatan Aset Daerah”	daerah melalui ”Pemanfaatan Aset Daerah”	daerah melalui ”Pemanfaatan Aset Daerah”
		Peningkatan Kualitas Destinasi Pariwisata melalui ”Penataan Kawasan Pinggir Pantai”	Peningkatan Kualitas Destinasi Pariwisata melalui ”Penataan Kawasan Pinggir Pantai”	Peningkatan Kualitas Destinasi Pariwisata melalui ”Penataan Kawasan Pinggir Pantai”
Pengembangan Potensi Perekonomian Daerah melalui Sektor Wisata & Ekonomi Kreatif	Pengembangan Potensi Perekonomian Daerah melalui Sektor Wisata & Ekonomi Kreatif	Pengembangan Potensi Perekonomian Daerah melalui Sektor Wisata & Ekonomi Kreatif	Pengembangan Potensi Perekonomian Daerah melalui Sektor Wisata & Ekonomi Kreatif	Pengembangan Potensi Perekonomian Daerah melalui Sektor Wisata & Ekonomi Kreatif
	Peningkatan Destinasi Wisata Unggulan melalui Revitalisasi & Aktivasi Wisata Tematik			
	Meningkatkan Fasilitas Sanitasi Publik melalui Penyediaan Toilet Bersih di Area Publik	Meningkatkan Fasilitas Sanitasi Publik melalui Penyediaan Toilet Bersih di Area Publik	Meningkatkan Fasilitas Sanitasi Publik melalui Penyediaan Toilet Bersih di Area Publik	Meningkatkan Fasilitas Sanitasi Publik melalui Penyediaan Toilet Bersih di Area Publik

Untuk memfokuskan pelaksanaan RPJMD Kota Padang, maka perencanaan pembangunan dilakukan secara bertahap. Adapun penahapan pembangunan RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut;

Tabel III- 11 Tahapan Pembangunan RPJMD Kota Padang

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	**2**	**3**	**4**	**5**
Penguatan pondasi transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan dasar	Penguatan Pondasi Transformasi ekonomi dan Sumber Daya Manusia yang Unggul, inklusif dan berkelanjutan	Penguatan pondasi transformasi infrastruktur Kota untuk peningkatan daya saing daerah	Penguatan pondasi transformasi lingkungan hidup dan transformasi digital kota pintar dan kota sehat	Pemantapan kinerja pondasi transformasi kota pintar dan kota sehat

3.5.2. Strategi Pembangunan Kota Padang Tahun 2025-2029

Penyesuaian strategi berdasarkan misi pembangunan jangka menengah Kota Padang untuk tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III- 12 Perumusan Strategi Berdasarkan Misi Pembangunan Kota Padang Tahun 2025-2029

Misi	Strategi
1) Menguatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif, dan Partisipatif	1) Mewujudkan **Padang Amanah** dan **Padang Melayani** Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Baik dan Bersih.
2) Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar dan Kota Sehat	2) Mewujudkan Kota Pintar dan Kota Sehat melalui peningkatan dan pemerataan digitalisasi pelayanan publik
3) Menguatkan Masyarakat Yang Beragama dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter dan Pemberdayaan	3) Mewujudkan **Padang Juara** melalui peningkatan ketahanan sosial budaya, dan ekologi serta pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, berbudaya, kreatif, inovatif, berakhlak dan tertib berbasis **Smart Surau**
4) Mendorong kemudahan berinvestasi demi terbukanya lapangan pekerjaan	4) Mewujudkan peningkatan kualitas investasi melalui Kemudahan Berusaha dalam rangka penciptaan lapangan kerja
5) Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum Yang Hijau dan Berkualitas	5) Mewujudkan **Padang Rancak** melalui pembangunan dan revitalisasi sarana prasarana umum serta infrastruktur yang berkelanjutan
6) Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana	6) Mewujudkan **Padang Sigap** melalui peningkatan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim yang berkualitas dengan peningkatan kapasitas masyarakat, kelembagaan, dan **Sinergi Nagari**
7) Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan dan Jasa	7) Mewujudkan ketahanan ekonomi masyarakat melalui penguatan sektor perdagangan dan jasa
8) Menggerakkan Potensi Kota Untuk Terwujudnya Industri Kreatif dan Pariwisata Berkelanjutan	8) Mewujudkan **UMKM Naik Kelas**, ekonomi kreatif, dan pariwisata berkelanjutan melalui **Jelajah Padang** dan pengembangan usaha mikro berbasis sumber daya lokal

8 (delapan) Strategi yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Padang Tahun 2025- 2029 adalah sebagai berikut;

1) Mewujudkan Padang Amanah dan Padang Melayani Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Baik dan Bersih.

   Strategi ***"Mewujudkan Padang Amanah dan Padang Melayani Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Baik, dan Bersih"*** dijabarkan secara taktis melalui penguatan sistem transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam setiap aspek pemerintahan. Pemerintah daerah perlu mengimplementasikan mekanisme pengawasan internal yang ketat dan independen, termasuk pengembangan aplikasi digital

untuk pelaporan dan pemantauan kinerja aparatur secara real time. Pendidikan dan pelatihan integritas bagi seluruh pegawai negeri dan pejabat publik harus rutin dilakukan untuk membangun budaya kerja yang jujur dan profesional. Selain itu, pemberdayaan masyarakat melalui forum konsultasi dan pengawasan publik memperkuat fungsi kontrol sosial dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penegakan aturan dan sanksi tegas terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme juga menjadi prioritas utama. Dengan pendekatan ini, tata kelola pemerintahan di Kota Padang diharapkan semakin transparan, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas serta berintegritas tinggi. Adapun strategi taktis dapat dijabarkan pada poin-poin dibawah ini.

1. Penguatan Sistem Integritas dan Anti-Korupsi

    a. Penerapan **Zona Integritas (ZI)** menuju WBK/WBBM di seluruh OPD.
    b. Pembentukan dan penguatan **unit pengendalian gratifikasi (UPG)** dan whistleblowing system (WBS).
    c. Pendidikan antikorupsi dan **internalisasi nilai ASN BerAKHLAK.**

2. Digitalisasi dan Transparansi Tata Kelola

    a. Pengembangan **dashboard kinerja dan keuangan OPD** berbasis digital.
    b. **Open Data Padang**: publikasi data perencanaan, penganggaran, dan capaian kinerja.
    c. Optimalisasi **SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)** lintas OPD.

3. Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme ASN

    a. Pendidikan dan pelatihan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural dengan menganggarkan beasiswa ASN.
    b. Penerapan sistem merit dalam rekrutmen, promosi, dan mutasi ASN.
    c. Penilaian kinerja berbasis e-Kinerja yang terintegrasi.

4. Pelayanan Publik yang Adaptif, Cepat, dan Berbasis Masyarakat

    a. Reformasi birokrasi layanan melalui **Mal Pelayanan Publik (MPP).**
    b. Pemanfaatan **aplikasi pengaduan publik (LAPOR, Call Center Kota Padang, SP4N)** yang terintegrasi.
    c. Pengukuran rutin **IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)** dan tindak lanjut keluhan.

5. Perencanaan dan Penganggaran yang Partisipatif dan Akuntabel

    a. Penguatan **Musrenbang tematik dan inklusif,** berbasis kelompok rentan dan pemuda.
    b. Penerapan **e-Planning dan e-Budgeting** terintegrasi.

2) Mewujudkan Kota Pintar dan Kota Sehat melalui Peningkatan dan Pemerataan Digitalisasi Pelayanan Publik

    Strategi ***"Mewujudkan Kota Pintar dan Kota Sehat melalui Peningkatan dan Pemerataan Digitalisasi Pelayanan Publik"*** Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, Pemerintah Kota Padang secara strategis menetapkan arah kebijakan untuk mewujudkan Kota Pintar (Smart City) dan Kota Sehat. Dua konsep ini saling melengkapi untuk menciptakan pelayanan publik yang inklusif, adaptif, dan berbasis teknologi.

    Cakupan Kota Pintar tidak hanya melalui optimalisasi pelayanan public berbasis teknologi, tetapi juga mengedepankan integrasi data, efisiensi birokrasi, dan partisipasi warga secara aktif. Sementara Kota Sehat menekankan pentingnya lingkungan hidup yang bersih, layanan kesehatan yang mudah diakses, dan gaya hidup sehat yang didukung oleh kebijakan serta sarana publik yang memadai. Kota Padang juga memberikan jaminan kesehatan gratis bagi warganya melalui program BPJS Kesehatan Gratis, Jaminan Keselamatan Kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan, menyiapkan dokter warga untuk melayani masyarakat Kota Padang yang tidak bisa mengakses fasilitas kesehatan.

3) Mewujudkan Padang Juara Berketahanan Sosial Melalui Peningkatan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi Melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berbudaya, Kreatif dan Inovatif, Berakhlak, dan Tertib Berbasis Smart Surau

    Strategi ***"Mewujudkan Padang Juara Berketahanan Sosial Melalui Peningkatan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi Melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berbudaya, Kreatif dan Inovatif, Berakhlak, dan Tertib Berbasis Smart Surau"*** diarahkan untuk membentuk ekosistem pengembangan SDM yang berdaya saing tinggi, adaptif terhadap perubahan zaman, serta memiliki semangat berinovasi. Langkah taktisnya mencakup penyediaan akses pendidikan yang merata dan berkualitas sejak usia dini hingga pendidikan tinggi, didukung dengan kurikulum yang mendorong keterampilan abad ke 21 seperti berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan literasi digital serta didukung oleh ekosistem Pendidikan yang berkearifan lokal, seperti Pendidikan agama (Madrasah Diniyah Wustho), mengaktifkan smart surau, mengembalikan aktivitas kepemudaan di rumah ibadah (remaja masjid *reborn* untuk yang beragama islam dan kegiatan lain yang disesuaikan dengan aktivitas rumah

ibadah umat agama lainnya) dan pembelajaran digital. Pemerintah Kota Padang juga memberikan bantuan Pendidikan pada warga kurang mampu dalam bentuk Kartu Padang Juara (LKS dan seragam sekolah gratis).

Pembangunan kebudayaan Kota Padang dilakukan melalui pengembangan beberapa komponen :

1. Pelestarian Warisan Budaya
   Meliputi upaya pelestarian cagar budaya, sejarah, museum, tradisi, bahasa daerah, dan seni tradisional.
2. Pengembangan Kreativitas
   Mendorong masyarakat dan pelaku seni untuk mengembangkan inovasi dan kreativitas dalam bidang kebudayaan.
3. Akses dan Partisipasi Masyarakat
   Memperluas akses masyarakat ikut berpartisipasi dalam kegiatan budaya.
4. Pendidikan Kebudayaan
   Integrasi pendidikan kebudayaan dalam sistem pendidikan formal maupun nonformal.

Untuk peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas, maka perlu memperluas program pelatihan vokasional berbasis potensi lokal dan kebutuhan pasar kerja, serta mengembangkan inkubasi kewirausahaan bagi generasi muda. Kolaborasi dengan dunia usaha, perguruan tinggi, dan komunitas kreatif juga didorong untuk menciptakan ruang-ruang inovasi dan ekspresi, seperti Rumah Wirausaha, kelas industri, dan program magang terintegrasi. Di samping itu, insentif dan apresiasi bagi talenta berprestasi turut diberikan untuk menumbuhkan semangat kompetitif dan kebanggaan terhadap daerah. Dengan strategi ini, Kota Padang diharapkan mampu melahirkan sumber daya manusia unggul yang menjadi pilar utama dan mewujudkan visi Wali Kota Padang. Adapun strategi taktis dapat dijabarkan pada poin-poin dibawah ini.

1. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan di Semua Jenjang
   a. Program beasiswa daerah untuk siswa/mahasiswa berprestasi dan kurang mampu.
   b. Revitalisasi sekolah dan fasilitas pendidikan, termasuk laboratorium, perpustakaan, dan ruang praktik.
   c. Peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidik melalui pelatihan digital, pedagogik, dan sertifikasi profesional.
   d. Penguatan pendidikan karakter dan budaya lokal di kurikulum.
2. Pengembangan Keterampilan dan Daya Saing Tenaga Kerja Lokal
   a. Pelatihan vokasi dan keterampilan kerja berbasis potensi daerah (pariwisata, maritim, ekonomi kreatif, pertanian, dll).

b. Inkubator wirausaha muda dan UMKM digital untuk mencetak pelaku usaha baru.

c. Kursus gratis bersertifikat berbasis teknologi dan industri kreatif (desain grafis, coding, digital marketing, dll).

3. Mendorong Ekosistem Inovasi dan Kreativitas di Kalangan Muda

a. Pendirian "Rumah Wirausaha" atau ruang kolaborasi di kecamatan atau kawasan strategis.

b. Kompetisi inovasi dan festival ide kreatif bagi pelajar, mahasiswa, dan komunitas lokal.

c. Kemitraan dengan universitas dan startup untuk riset terapan dan hilirisasi inovasi.

d. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sebagai Fondasi SDM Berkualitas

e. Program pencegahan stunting dan gizi seimbang sejak kehamilan hingga usia dini.

f. Layanan kesehatan primer berbasis digital dan peningkatan fasilitas Puskesmas.

g. Pelatihan kader kesehatan dan penyuluhan keluarga sehat berbasis komunitas.

4. Penguatan Peran Keluarga dan Masyarakat dalam Pembangunan SDM

a. Pemberdayaan keluarga dan parenting edukatif, khususnya dalam pengasuhan usia emas.

b. Gerakan literasi keluarga (literasi baca, finansial, dan digital).

c. Kolaborasi dengan tokoh masyarakat, agama, dan adat dalam membentuk karakter generasi muda.

5. Transformasi Digital dalam Layanan Pendidikan dan SDM

a. Platform digital yang mengintegrasikan layanan beasiswa, pelatihan, dan mentoring.

b. Digitalisasi sistem pendidikan dan pelatihan kerja, termasuk monitoring berbasis data.

c. Pelatihan literasi digital menyeluruh bagi guru, siswa, dan tenaga kerja.

4) Mewujudkan Peningkatan Kualitas Investasi Melalui Kemudahan Berusaha Dalam Rangka Penciptaan Lapangan Kerja

Strategi ***"Mewujudkan Peningkatan Kualitas Investasi Melalui Kemudahan Berusaha Dalam Rangka Penciptaan Lapangan***

Kerja” adalah meningkatkan integrase sistem pelayanan perizinan dan informasi usaha (OSS daerah) dan mengembangkan Dashboard Ekonomi Kota Padang (real-time data UMKM, wisata, perdagangan) serta menyiapkan sektor-sektor yang berpotensi untuk membuka peluang kerja sama dengan pihak swasta, baik dari ketersediaan lahan, aksesibilitas, dan perizinan terkait.

5) Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Masyarakat Melalui Penguatan Sektor Perdagangan dan Jasa

Strategi ***"Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Masyarakat Melalui Penguatan Sektor Perdagangan dan Jasa"*** diarahkan pada penciptaan iklim usaha yang kondusif dan pelayanan publik yang proaktif untuk mendorong pertumbuhan sektor perdagangan. Langkah taktis meliputi penyederhanaan perizinan usaha melalui sistem digital yang terintegrasi, pendampingan usaha berbasis klaster ekonomi lokal, serta penyediaan data dan informasi pasar secara real time melalui platform daring. Untuk sektor perdagangan, difokuskan pada penguatan jaringan distribusi, revitalisasi pasar satelit, termasuk optimalisasi Pasar Raya Padang Fase VII sebagai pusat perdagangan modern yang representatif dan strategis, serta promosi produk unggulan daerah melalui pameran maupun kerja sama antar daerah.

Adapun strategi taktis dalam Penguatan Ekosistem Perdagangan Lokal yang Modern dan Terintegrasi yaitu :

a. Revitalisasi dan digitalisasi pasar rakyat
b. Pengembangan sistem distribusi logistik kota (pasar induk, gudang, cold storage)
c. Fasilitasi sertifikasi halal, SNI, dan legalitas usaha bagi pelaku perdagangan

6) Mewujudkan Padang Rancak Melalui Pembangunan dan Revitalisasi Sarana Prasarana Umum Serta Infrastruktur yang Berkelanjutan

Strategi ***“Mewujudkan Padang Rancak Melalui Pembangunan dan Revitalisasi Sarana Prasarana Umum Serta Infrastruktur yang Berkelanjutan”*** merupakan gerakan kolaboratif lintas sektor yang menyasar perbaikan wajah Kota Padang secara menyeluruh, mulai dari kebersihan lingkungan, ketertiban ruang publik, tata keindahan kota, hingga pembentukan perilaku masyarakat yang peduli terhadap kota tempat tinggalnya. Setiap elemen program dirancang untuk menjawab kebutuhan aktual masyarakat, sekaligus membangun karakter kota yang lebih berdaya saing, berbudaya, dan berkelanjutan.

Upaya yang dilakukan dalam mewujudkan Padang Rancak antara lain; perbaikan taman tematik per kecamatan, pengendalian banjir terpadu, pengelolaan sampah terpadu dan penataan Tempat Pembuangan Sampah (TPA) modern, perbaikan jalan dan drainase

kota, trotoar ramah pejalan kaki, serta transportasi public dan pemberhentian ramah warga.

7) Mewujudkan Padang Sigap Melalui Peningkatan Ketahanan Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim yang Berkualitas Dengan Peningkatan Kapasitas Masyarakat, Kelembagaan, dan Sinergi Nagari

   Strategi ***"Mewujudkan Padang Sigap Melalui Peningkatan Ketahanan Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim yang Berkualitas Dengan Peningkatan Kapasitas Masyarakat, Kelembagaan, dan Sinergi Nagari"*** bertujuan untuk membangun ketangguhan masyarakat melalui pendekatan integratif yang menggabungkan nilai-nilai lokal, pemanfaatan teknologi, dan penguatan peran komunitas. Padang Sigap difungsikan sebagai sistem kewaspadaan dan respon cepat masyarakat terhadap isu sosial, kebencanaan, maupun kerusakan lingkungan, dengan melibatkan kelompok pemuda, tokoh masyarakat, dan aparat kewilayahan secara sinergis. Peningkatan kapasitas komunitas dilakukan melalui pelatihan tanggap darurat, penyusunan peta risiko partisipatif, dan penguatan jejaring komunikasi berbasis aplikasi lokal. Dengan pendekatan ini, masyarakat didorong untuk menjadi aktor utama dalam menjaga harmoni sosial, merawat warisan budaya, serta melestarikan lingkungan secara adaptif dan berkelanjutan. Program unggulan "Padang Sigap" merupakan satu inisiatif utama Walikota Padang untuk meningkatkan pelayanan publik, terutama dalam bidang kesehatan dan penanggulangan bencana. Program ini didukung oleh tim "Dubalang" yang bertugas di berbagai tingkatan, mulai dari kelurahan hingga kota. Selain itu, Padang Sigap juga terintegrasi dengan layanan "Dokter Warga" dan Sigap Call Center 112 untuk memudahkan akses layanan kesehatan darurat.

   Adapun Sinergi Nagari dijabarkan melalui penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, perangkat nagari, serta unsur adat dan budaya lokal, termasuk peran strategis Dubalang Kota sebagai penjaga adat dan ketertiban. Pemerintah daerah perlu memfasilitasi pembentukan dan penguatan peran Dubalang Kota sebagai mitra aktif dalam menjaga keamanan berbasis kearifan lokal, melalui pelatihan, pembekalan hukum dasar, dan integrasi dengan sistem pengamanan formal seperti Satpol PP dan Linmas.

8) Mewujudkan UMKM Naik Kelas, Ekonomi Kreatif, dan Pariwisata Berkelanjutan Melalui Jelajah Padang dan Pengembangan Usaha Mikro Berbasis Sumber Daya Lokal

   Strategi ***"Mewujudkan UMKM Naik Kelas, Ekonomi Kreatif, dan Pariwisata Berkelanjutan Melalui Jelajah Padang dan Pengembangan Usaha Mikro Berbasis Sumber Daya Lokal"*** Dalam upaya pengembangan UMKM naik kelas, disiapkan akses yang lebih luas terhadap pembiayaan, pelatihan manajemen usaha, dan fasilitasi sertifikasi produk serta pemasaran digital.

Pendekatan kolaboratif antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan komunitas juga menjadi kunci dalam memastikan pembangunan ekonomi yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan di Kota Padang. Terkait bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif, peningkatan daya tarik pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif dilakukan melalui digitalisasi layanan destinasi, peningkatan kapasitas SDM pariwisata, dan pengembangan paket wisata tematik berbasis budaya dan alam.

Kota Padang dikenal luas sebagai pusat budaya Minangkabau yang kaya akan tradisi dan keindahan alamnya. Namun, salah satu kekayaan terbesar yang dimiliki Padang adalah warisan kulinernya yang tak tertandingi. Dari rendang yang sudah mendunia, sate Padang, hingga gulai dan sambal lado yang menggoda selera, kuliner Padang bukan hanya sekadar makanan, tapi juga cerita, sejarah, dan identitas masyarakat Minangkabau.

Melihat potensi besar ini, pemerintah Kota Padang mengambil langkah strategis untuk mengembangkan Padang menjadi Kota Gastronomi, sebuah pengakuan internasional yang diinisiasi oleh UNESCO bagi kota-kota yang memiliki kekayaan kuliner dan budaya makanan sebagai bagian dari identitas dan perekonomiannya.

Upaya tersebut dimulai dengan revitalisasi kawasan kota tua yang tidak hanya sarat akan nilai sejarah, tetapi juga menjadi sentra kuliner yang menghidupkan suasana tradisional dan modern secara harmonis. Kawasan ini menjadi ruang bagi para pelaku usaha kuliner lokal untuk menunjukkan keunikan rasa dan cara penyajian makanan khas Minangkabau kepada wisatawan domestik maupun mancanegara.

Program unggulan seperti Jelajah Padang diinisiasi untuk memperkenalkan kekayaan budaya dan kuliner Padang secara luas. Festival kuliner dan pelatihan peningkatan kualitas bagi pelaku usaha menjadi bagian penting dari upaya memperkuat daya saing dan kualitas produk kuliner.

Adapun strategi taktis dapat dijabarkan pada poin-poin dibawah ini.

1. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Berbasis Keunggulan Lokal dan Berkelanjutan.

    a. Penataan kawasan wisata prioritas (pantai, religi, heritage)
    b. Peningkatan kapasitas SDM pariwisata (guide, homestay, pelaku jasa wisata)
    c. Promosi pariwisata digital & event berskala nasional
    d. Penguatan pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya

2. Transformasi UMKM Menuju Bisnis Produktif, Inovatif dan Digital.

a. Inkubasi UMKM naik kelas: manajemen, kemasan, branding, pembukuan
b. Fasilitasi e-commerce dan digital marketing bagi pelaku UMKM
c. Bantuan peralatan dan modal usaha berbasis potensi kelurahan/kecamatan.

3.5.3. Program-Program Prioritas Daerah Untuk Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

Program Prioritas Kota Padang dihasilkan cascading kinerja yang dimulai dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang ada dalam RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029, berikut disajikan Tabel berikut ini;

Tabel III- 13 Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Prioritas RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket
Misi 1 : Menguatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas profesional, responsif, kolaboratif, dan partisipatif**			Indeks Reformasi Birokrasi		
		Meningkatnya kualitas integrasi pembangunan dari sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan kinerja		Nilai SAKIP		
			Meningkatkan kualitas pendampingan dan asistensi	1. Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	INSPEKTORAT
				2. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	BAPPEDA
				2. Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah		

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPEDA
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		BAPPEDA
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam		BAPPEDA
					Program Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah Kabupaten/Kota	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Padang
		Meningkatkan Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel		Opini atas laporan keuangan pemerintah daerah		
			Meningkatnya tata kelola anggaran	1. Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	program pengelolaan keuangan daerah	BPKAD

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket
				2. Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik		
		Meningkatnya kualitas pemetaan regulasi, regulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi daerah		Indeks Reformasi Hukum		
			Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Bagian Hukum
		Peningkatan Pelayanan Publik yang profesional, responsif dan bebas korupsi		Indeks Pelayanan Publik		Kecamatan, Rsud, Pupr, Dishub, Capil, DPMPTSP, Bapenda
					program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	1. Jumlah Kematian Ibu	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	DKK, RSUD dan Puskesmas
				2. Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita		
			Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase peningkatan investor yang berinvestasi	program pelayanan penanaman modal	DPMPTSP
			Meningkatnya kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk	1. Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan catatan Sipil

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket
				2. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak		
		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan berbasis digitalisasi dalam wujudkan smart city		Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintahan (2026-2030)		
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks SPBE	program pengelolaan aplikasi informatika	DISKOMINFO
		Meningkatnya pengawasan arsip daerah		Indeks Pengawasan Arsip		
			Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat ketersediaan arsip	program pengelolaan arsip	DISPERPUSIP

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket
			Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip	program perlindungan dan penyelamatan arsip	
		Meningkatnya pencegahan perilaku korupsi		Indeks Pencegahan Korupsi Daerah		
			Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindaklanjut rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	program penyelenggaraan pengawasan	Inspektorat
		Meningkatnya sumber daya aparatur yang profesional dan berintegritas		Indeks Sistem Merit		
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi	program kepegawaian daerah	BKPSDM
			Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya		
			Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya		
			Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase pegawai dengan SKP bernilai baik		

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket
Misi 2 : Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	**Mewujudkan Peningkatan Implementasi Kota Pintar dan Kota Sehat**			Smart City Index		
		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan berbasis digitalisasi dalam wujudkan smart city		SPBE (2025) dan Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintahan (2026-2030)		
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks SPBE	program pengelolaan aplikasi informatika	DISKOMINFO
				Indeks Masyarakat Digital Indonesia		
			Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei)	program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	DISKOMINFO
		Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		Indeks Kesehatan		
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	1. Angka Kematian Ibu (AKI)	program pemenuhan upaya kesehatan perorangan (ukp) dan upaya kesehatan masyarakat (ukm)	DINKES
				2. Prevalensi Stuntig (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita		

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket
			Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	program sediaan farmasi alat kesehatan dan makanan minuman	DINKES
		Tercapainya kondisi lingkungan hidup yang bersih, nyaman, aman dan kualitas hidup sehat.		Peningkatan Penilaian Hasil Evaluasi Kota Sehat		
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	1. Angka Kematian Ibu (AKI)	program pemenuhan upaya kesehatan perorangan (ukp) dan upaya kesehatan masyarakat (ukm)	DINKES
				2. Prevalensi Stuntig (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita		
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	DINKES
Misi 3 : Menguatkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul**			Indeks Pembangunan Manusia		
		Meningkatnya literasi masyarakat Kota		Indeks pembangunan Literasi masyarakat		

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket
			Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	program pembinaan perpustakaan	DISPERPUSIP
		Meningkatkan pendidikan masyarakat		Indeks Pendidikan		
			Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	1. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	program pengelolaan pendidikan	DISDIKBUD
				2. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar		
				3. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama		
				4. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraanf		

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket
		Meningkatnya pelestarian dan Pembangunan kebudayaan daerah		Indeks Pembangunan Kebudayaan		
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat terhadap pengembangna kebudayaan	Program Pengembangan kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Presentase kesenian tradisional (seni musik, seni tari, seni perfileman, seni rupa) yang dilestarikan dan dikembangkan	Pengembangan kesenian tradisional	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap tinjauan sejarah lokal	Pembinaan Sejarah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	1. persentase warisan budaya yang dilestarikan 2. Persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan	Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Meningkatnya tata kelola museum	Persentase kunjungan wisatawan ke museum	Pengelolaan Permuseuman	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket
		Meningkatnya Peran Pemuda dalam pembangunan sumber daya manusia unggul		Indeks Pembangunan Pemuda		
			Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda	program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	DISPORA
		Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan daerah		Indeks Pembangunan Gender		
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	1. Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) 2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	DP3AP2KB
			Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	Program Perlindungan Perempuan	
			Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	1. Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif 2. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Program Perlindungan Khusus Anak	
	Meningkatkan stabilitas sosial dan politik			Indeks Rasa Aman		

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket
	daerah					
		Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat		Indeks Penyelenggaran Trantibumlinmas	program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	SATPOLPP
			Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerahdan Perkada	Persentase Peraturan Daerahdan Perkada yang ditegakkan	program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	SATPOLPP
			Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase penyelenggaraan Tibumtransmas		
			Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase cakupan perlindungan masyarakat		
			Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya		
		Meningkatnya Toleransi beragama dan partisipasi politik		Indeks Kerukunan Umat Beragama		

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket
			Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan	program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	BAKESBANGPOL
		Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat		Indeks Kesejahteraan Sosial		
			Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	1. Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	program perlindungan dan jaminan sosial	DINSOS
				2. Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi		
				3. Persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin		
				4. Peningkatan indeks kebutuhan dasar		
				5. Peningkatan indeks keberdayaan ekonomi		

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket
				6. Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan		
			Meningkatnya rehabilitasi sosial	1. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	program rehabilitasi sosial	Dinas Sosial
				2. Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya		
				3. Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya		
				4. Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi		
Misi 4 : Mendorong Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	**Mewujudkan Perekonomian Masyarakat yang adaptif dan kondusif**			Indeks daya saing daerah		
		Meningkatkan Realisasi Investasi		Nilai PMTB terhadap PDRB		

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket
			Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase peningkatan investor yang berinvestasi	program promosi penanaman modal	DPMPTSP
		Meningkatkan Tingkat Kesempatan Kerja		Perbandingan orang yang bekerja thd angkatan kerja		
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	program penempatan tenaga kerja	DISNAKERIN
			Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya	program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	DISNAKERIN
Misi 5 : Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	**Mewujudkan Kota Layak Huni**			Indeks Kota Layak Huni		
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		
			Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	1. Indeks Kualitas Air	program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	DLH

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket
				2. Indeks Kualitas Udara		
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH	program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)	DLH
			Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH	program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	DLH
			Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelola Sampah	program pengelolaan persampahan	DLH
			Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkunan hidup	Persentase penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	program penanganan pengaduan lingkungan hidup	DLH
		Meuwujudkan hunian layak dan terjangkau		Persentase Hunian Layak dan terjangkau		
			Meningkatnya kualitas kawasan permukian	Perentase luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani	program kawasan permukiman	Perkim
			Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	Perkim
			Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena	1. Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	program pengembangan perumahan	Perkim

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket
			relokasi akibat program pemerintah	2. Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni		
		Mengembangkan dan merevitalisasi sarana serta prasarana umum yang ramah lingkungan dan hijau		Indeks Infrastruktur		
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase peningkatan kapasitas yang terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas Kabupaten/Kota	program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	PUPR
			Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase peningkatan sampah yang dikelola di TPA/TPST Regional	program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	PUPR
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase peningkatakan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (Air limbah domestik layak dan aman)	program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	PUPR
			Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase cakupan drainase yang baik	program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	PUPR

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket
			Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase penataan bangunan dan lingkungan	program penataan bangunan dan lingkungannya	PUPR
			Meningkatnya aksesbilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat kemantapan jalan	program penyelenggaraan jalan	PUPR
		Meningkatnya Kualitas Transportasi Publik		Rasio Konektivitas Wilayah		
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	1. Konektivitas Darat 2. Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (llaj)	DISHUB
Misi 6 : Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana	Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim			Indeks Risiko Bencana (IRB)		
		Penguatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana dan perubahan iklim		Indeks Ketahanan Daerah (IKD)		
			Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukas rawan bencana	program penanggulangan bencana	BPBD
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap	Persentase penanganan tanggap darurat bencana		

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket
			darurat			
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase penanganan pasca bencana		
			Meningkatnya perlindungan sosial koban bencana	1. Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	program penanganan bencana	Dinas Sosial
				2. Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya		
				3. Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial		
			Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran
			Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran		

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket
Misi 7 : Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	Mewujudkan Sektor perdagangan dan jasa yang tangguh			PDRB sektor perdagangan dan jasa		
		Meningkatnya kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan		Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah		
			Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	program pengelolaan pendapatan daerah	BAPENDA; DISHUB; DISDAG; DINAS PERIKANAN, PARIWISATA, PERTANIAN; DLH; PUPR; PERKIM; BPKAD; DINKES; RSUD; DISPORA; DAMKAR (14 OPD)
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Hortikultura	program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Dinas Pertanian
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Persentase prasarana pertanian yang disediakan dan dikembangkan	program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket
			Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Stategis (PHMS)	program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Dinas Pertanian
			Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya	Indeks Keanekaragaman Hayati	program konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya	Dinas Pertanian
			Meningkatnya Produksi perikanan budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	program pengelolaan perikanan budidaya	Dinas Perikanan Pangan
			Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	angka konsumsi ikan	program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Dinas Perikanan Pangan
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Dinas Pariwisata
			Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi batang yang efisien	Persentase Sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Dinas Perdagangan
		Meningkatnya Kontribusi Sektor perdagangan dan jasa terhadap perekonomian Daerah		Persentase Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan dan jasa		
			Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi batang yang efisien	Persentase Sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Dinas Perdagangan
		Meningkatnya daya saing produk daerah		Persentase Petumbuhan Net Ekspor		
			meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi	Nilai Ekspor barang	program pengembangan ekspor	Dinas Perdagangan

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket
			ekspor			
		Peningkatan Lapangan Usaha Perdagangan		Kontribusi Lapangan usaha Perdagangan Terhadap PDRB		
			Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi batang yang efisien	Persentase Sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Dinas Perdagangan
		Meningkatnya daya saing produk daerah dan transaksi perdagangan		Kontribusi Ekspor terhadap PDRB		
			Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi/dilaksanakan	program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Dinas Perdagangan
			Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase realisasi Investasi sektor industri dan kawasan industri	program perencanaan dan pembangunan industri	DISNAKERIN
		Meningkatkan perekonomian daerah dari sektor Koperasi dan Usaha mikro		Nilai omset sektor koperasi dan usaha mikro		
			Meningkatnya Produktivitas koperasi	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Dinas Koperasi dan UKM

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket
			Meningkatnya Kapasitas UMKM (Usaha Mikro) yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro	Dinas Koperasi dan UKM
				Pertumbuhan wirausaha	program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro	Dinas Koperasi dan UKM
			Meningkatnya Dayasaing Usaha Mikro	Proporsi Usaha Mikro menjalin Kemitraaan dan Ekspor	program pengembangan umkm	Dinas Koperasi dan UKM
Misi 8 : Menggerakkan Potensi Kota untuk Terwujudnya Industri Kreatif dan Pariwisata Berkelanjutan	Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah dari sektor Industri Kreatif dan Pariwisata			PDRB sektor industri kreatif dan pariwisata		
		Meningkatnya Kontribusi Industri Kreatif terhadap Perekonomian Daerah		Persentase Pertumbuhan Sektor PDRB Ekonomi Kreatif		
			Meningkatnya Kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi	program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Dinas Pariwisata
		Meningkatnya Kontribusi sektor pariwisata terhadap Perekonomian		Persentase Pertumbuhan sektor pariwisata		

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket
		Daerah				
			Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata	program pemasaran pariwisata	Dinas Pariwisata
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Dinas Pariwisata

Terkait dengan Padang menuju Kota Gastronomy, merupakan bagian dari Misi 8 : Menggerakkan Potensi Kota Untuk Terwujudnya Industri Kreatif dan Pariwisata Berkelanjutan yang akan dilaksanakan melalui program-program prioritas sebagai berikut:

1. program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif
2. program pemasaran pariwisata
3. program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata
4. program pemberdayaan dan perlindungan koperasi
5. program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro
6. program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro
7. program pengembangan umkm

3.5.4. Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029 terhadap Fokus Prioritas RPJMN Tahun 2025-2029

A. Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah untuk Penurunan Tingkat Kemiskinan

Dalam dokumen RPJMN Tahun 2025-2029, Pemerintah pusat berkomitmen untuk memberantas kemiskinan yang mencakup berbagai dimensi, tidak hanya terkait keterbatasan ekonomi tetapi juga kesenjangan sosial, marginalisasi kelompok rentan, maupun keterbatasan akses terhadap layanan dasar. Secara visual kerangka pikir penurunan tingkat kemiskinan nasional ditampilkan sebagai berikut :

Gambar III- 2 Arah Kebijakan dan Target Penurunan Kemiskinan Nasional Tahun 2025-2029

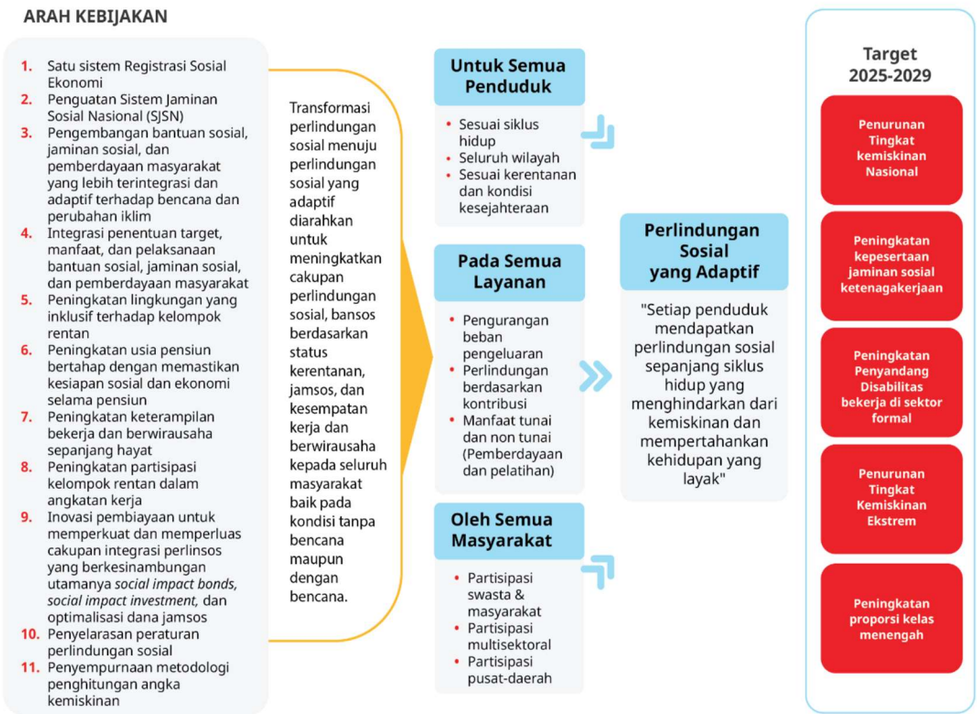

Sumber : RPJMN Tahun 2025-2029

Untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan, Pemerintah Kota Padang menetapkan arah kebijakan dan program pembangunan daerah sebagai berikut :

Arah Kebijakan		Program Pembangunan
1	Pengurangan beban biaya kesehatan melalui BPJS Kesehatan Gratis bagi warga kota Padang	Penyediaan Jaminan Pelayanan Kesehatan Gratis melalui BPJS Bagi Warga Kota Padang
2	Peningkatan pemerataan pendidikan melalui kartu Padang Juara bagi warga kurang mampu	Penyediaan Beasiswa bagi Warga Kota Padang untuk melanjutkan ke Pendidikan Tinggi

Arah Kebijakan		Program Pembangunan
3	Pengurangan beban biaya Pendidikan bagi Warga Kurang Mampu melalui Penyediaan LKS & Seragam Sekolah	Penyediaan LKS dan Seragam Sekolah Gratis bagi Siswa Kota Padang yang Kurang Mampu
4	Peningkatan Perlindungan Tenaga Kerja Rentan melalui ”Penyediaan BPJS Ketenagakerjaan untuk Pekerja Rentan”	
5	Peningkatan Potensi dan Produktivitas Petani dan Nelayan melalui ”Penyediaan Bantuan untuk Kelompok Pertanian & Perikanan” Peningkatan Aksesibilitas Perdagangan melalui ”Revitalisasi Pasar Raya & Pasar Satelit”	
6	Peningkatan Produktivitas Usaha Mikro melalui Penciptaan Inkubator Bisnis	
7	Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui ”Koperasi Berjaya”	

Tabel III- 14 Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah untuk Mencapai Target Penurunan Kemiskinan

Arah Kebijakan		Program Pembangunan
1	Pengurangan beban biaya kesehatan melalui BPJS Kesehatan Gratis bagi warga kota Padang	Penyediaan Jaminan Pelayanan Kesehatan Gratis melalui BPJS Bagi Warga Kota Padang
2	Peningkatan pemerataan pendidikan melalui kartu Padang Juara bagi warga kurang mampu	Penyediaan Beasiswa bagi Warga Kota Padang untuk melanjutkan ke Pendidikan Tinggi
3	Pengurangan beban biaya Pendidikan bagi Warga Kurang Mampu melalui Penyediaan LKS & Seragam Sekolah	Penyediaan LKS dan Seragam Sekolah Gratis bagi Siswa Kota Padang yang Kurang Mampu
4	Peningkatan Perlindungan Tenaga Kerja Rentan melalui ”Penyediaan BPJS Ketenagakerjaan untuk Pekerja Rentan”	
5	Peningkatan Potensi dan Produktivitas Petani dan Nelayan melalui ”Penyediaan Bantuan untuk Kelompok Pertanian & Perikanan” Peningkatan Aksesibilitas Perdagangan melalui ”Revitalisasi Pasar Raya & Pasar Satelit”	

Arah Kebijakan		Program Pembangunan
6	Peningkatan Produktivitas Usaha Mikro melalui Penciptaan Inkubator Bisnis	
7	Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui ”Koperasi Berjaya”	

Sejalan dengan arah kebijakan kota dalam penurunan angka kemiskinan melalui pelaksanaan program unggulan tersebut, untuk percepatan penanggulangan kemiskinan, perlu dilakukan dengan pendekatan graduasi multi dimensi dan terintegrasi. Pendekatan graduasi merupakan serangkaian intervensi dalam jangka waktu tertentu, menyeluruh, terpadu dan adaptif berbasis data, hingga kondisi dimana penduduk miskin berdaya, berhasil memperbaiki tingkat kesejahteraan (graduasi kesejahteraan) untuk keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan. Pencapaian kesejahteraan merupakan peningkatan status kesejahteraan penerima manfaat yang ditunjukkan melalui peningkatan pendapatan atau konsumsi, serta kapasitas sosial-ekonomi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri dan berkelanjutan.

Untuk itu terdapat 4 pilar strategis dalam peningkatan kesejahteraan melalui peran graduasi :

a. Pilar 1. Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.
b. Pilar 2. Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat melalui Pelaksanaan Perlindungan Sosial Adaptif dan Inklusif.
c. Pilar 3. Peningkatan Pendapatan Masyarakat melalui Keterampilan Kerja dan Kewirausahaan.
d. Pilar 4. Peningkatan Akses Kualitas Pelayanan dan Infrastruktur Dasar Melalui Pengembangan Wilayah

B. Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah untuk Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Dalam dokumen RPJMN Tahun 2025-2029, Dengan memprioritaskan pembangunan manusia diperlukan membangun fondasi yang kuat untuk kemajuan ekonomi, sosial, dan politik yang berkelanjutan. Pembangunan manusia seutuhnya bertumpu pada pemenuhan layanan dasar, pembangunan modal manusia dan pembangunan modal sosial budaya.

Lebih lanjut, ilustrasi kerangka pikir pembangunan manusia digambarkan berikut ini.

Gambar III- 3 Kerangka Pikir Pembangunan Manusia

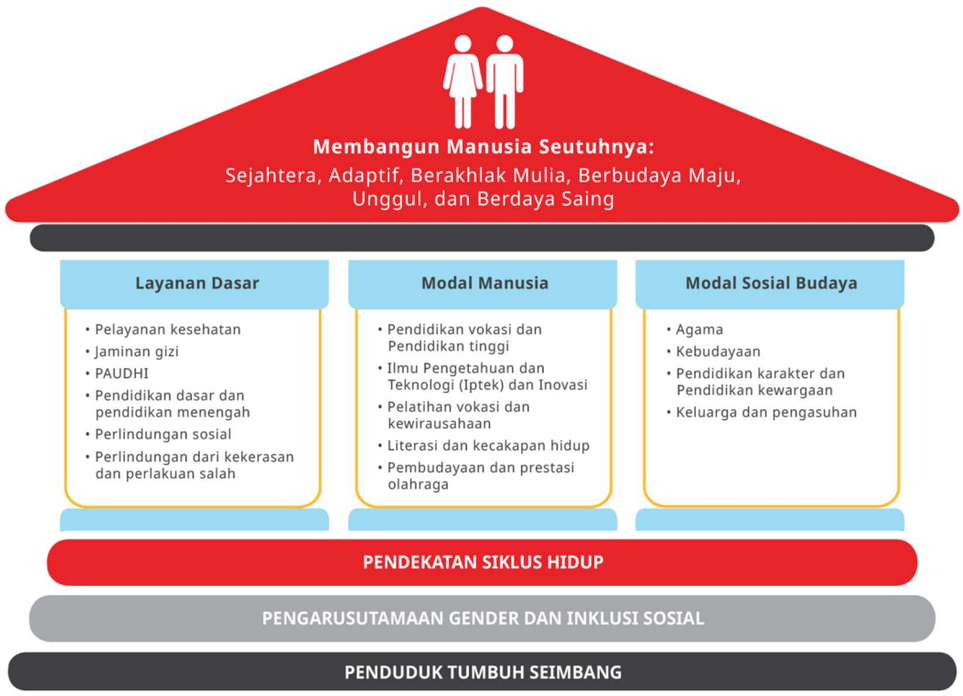

Sumber : RPJMN Tahun 2025-2029

Untuk mencapai peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemerintah Kota Padang menetapkan arah kebijakan dan program pembangunan daerah sebagai berikut :

Tabel III- 15 Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah untuk Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Arah Kebijakan		Program Pembangunan
1	Peningkatan Pelayanan kepada warga lanjut usia dan penyandang Disabilitas "Warga Emas" pada Sektor Kesehatan, Transportasi, & Pelayanan Publik	Penyediaan sarana prasarana untuk pelayanan khusus bagi "warga emas" (lansia dan disabilitas) Kota Padang
2	Peningkatan Kemudahan Layanan Publik Berbasis Teknologi	Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Layanan Publik melalui Pemanfaatan Teknologi
3	Peningkatan akses pembelajaran di rumah ibadah melalui Penyediaan Ruang Pembelajaran Digital di rumah ibadah / Masjid & WiFi Gratis	Penyediaan Fasilitas WIFI Gratis pada Rumah Ibadah untuk Peningkatan Akses Pembelajaran Digital
4	Pengurangan beban biaya kesehatan melalui BPJS Kesehatan Gratis bagi warga kota Padang	Penyediaan Jaminan Pelayanan Kesehatan Gratis melalui BPJS Bagi Warga Kota Padang
5	Peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui Dokter Warga	Penyediaan Pelayanan Kesehatan langsung ke rumah warga Melalui Dokter Warga
6	Peningkatan pemerataan pendidikan melalui kartu Padang Juara	Penyediaan Beasiswa bagi warga Kota Padang untuk melanjutkan ke Pendidikan Tinggi
7	Pengurangan beban biaya Pendidikan bagi Warga Kurang Mampu melalui	Penyediaan LKS dan Seragam Sekolah Gratis bagi Siswa Kota Padang yang

Arah Kebijakan		Program Pembangunan
	Penyediaan LKS & Seragam Sekolah	Kurang Mampu
8	Peningkatan Kualitas Kurikulum & Sertifikasi TPQ/MDTA bagi Siswa SD, MDW/TQA bagi Siswa SMP dengan tetap Bersinergi dengan Kementerian Agama	Peningkatan Mutu Pembelajaran Bidang Agama melalui Peningkatan Kualitas Kurikulum dan Sertifikasi TPQ/MDTA bagi Siswa SD serta MDW/TQA bagi Siswa SMP
9	Peningkatan nilai Keagamaan siswa SMP melalui Pelaksanaan Madrasah Diniyah Wustho (MDW) bagi Siswa SMP Peningkatan Kualitas kurikulum dan Kompetensi melalui Sertifikasi Guru PAUD	Pengembangan Pendidikan Keagamaan Berbasis Madrasah Diniyah Wustho (MDW) untuk Siswa SMP Pengembangan Kurikulum serta Peningkatan Kualitas Guru PAUD melalui Sertifikasi
10	Peningkatan Peran aktif warga kota dalam pembangunan melalui penyelenggaraan event perlombaan “Padang Balomba”	Peningkatan kompetensi dan Kreativitas Warga Kota Padang
11	Peningkatan suasana keagamaan di kota Padang melalui “penggalakan Subuh Mubarokah”	Pengembangan Sikap Disiplin dan Aktivitas Keagamaan Warga Kota Padang melalui Subuh Mubarokah
12	Peningkatan Peran Kepemudaan dalam menghidupkan suasana keagamaan di rumah Ibadah melalui “Remaja Masjid Reborn”	Pengembangan potensi remaja dalam berbagai bidang baik keagamaan, sosial, maupun keterampilan di rumah Ibadah melalui “Remaja Masjid Reborn”
13	Pemberian dukungan pada pusat pembelajaran non formal Rumah Tahfidz	Pengembangan Kapasitas Rumah Tahfidz sebagai Pusat Pembelajaran Non Formal
14	Optimalisasi Peran Tungku Tigo Sajarangan dalam Pemberdayaan Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Adat Tungku Tigo Sajarangan
15	Peningkatan layanan Perlindungan Anak & Perempuan terhadap Kekerasan	Penyediaan Pelayanan pendampingan kasus bagi Anak dan Perempuan korban kekerasan
16	Peningkatan Skill Kepemudaan	Peningkatan Kualitas Keterampilan Pemuda
17	Peningkatan Perlindungan Tenaga Kerja Rentan melalui ”Penyediaan BPJS Ketenagakerjaan untuk Pekerja Rentan”	
18	Meningkatkan Fasilitas Sanitasi Publik melalui Penyediaan Toilet Bersih di Area Publik	

C. Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Dalam dokumen RPJMN Tahun 2025-2029, Pertumbuhan ekonomi yang inklusif berkelanjutan merupakan kesatuan wujud yang saling terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penurunan kemiskinan. Ketiga ujung tombak ini bekerja secara sinergis. Pertumbuhan ekonomi menciptakan sumber daya untuk mengatasi kemiskinan, sementara peningkatan modal manusia berkualitas mendorong pertumbuhan yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Dalam kondisi ini, pembangunan tidak hanya bertumpu

pada angka statistik, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup seluruh masyarakat.

Secara konkret terdapat delapan strategi dalam RPJM Nasional 2025-2029 untuk pertumbuhan tinggi berkelanjutan, dilengkapi dengan pengungkit utama yakni deregulasi perizinan serta kebijakan fiskal dan moneter pro-growth. Lebih lanjut disampaikan pada infografis di bawah ini.

Gambar III- 4 Strategi dan Deregulasi Perizinan serta Kebijakan Fiskal dan Moneter *Pro-Growth*

Sumber : RPJMN Tahun 2025-202

Untuk mencapai peningkatan Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, Pemerintah Kota Padang menetapkan arah kebijakan dan program pembangunan daerah sebagai berikut :

Tabel III- 16 Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

No	Arah Kebijakan	Program Pembangunan
1	Peningkatan Kemudahan Izin Investasi dan Berusaha	Fasilitasi Temu dialog bisnis dengan calon investor domestik
		Pengembangan inovasi pelayanan publik untuk mendukung kemudahan berusaha
		Penyusunan regulasi daerah utuk Kemudahan dan Insentif investasi
		Penyusunan dan pengembangan IPRO (Investment Project Ready to Offer) dalam rangka promosi investasi daerah
		Kolaborasi strategis dengan Influencer dan Konten Kreator untuk rebranding Citra Investasi Daerah

No	Arah Kebijakan	Program Pembangunan
		Pendampingan akademisi untuk rekomendasi kebijakan dan pengukuran indeks kemudahan investasi Daerah
2	Peningkatan aksesibilitas dan utilitas Kota Melalui Perbaikan Jalan & Drainase Kota	Peningkatan aktivitas Jalan
		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Kawasan Perumahan
		Peningkatan operasional dan pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
		Program Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh
		Pelaksanaan pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
3	Peningkatan Aksesibilitas Publik melalui Penyediaan Trotoar Ramah Pejalan Kaki	Pembangunan dan pemeliharaan trotoar untuk mendukung mobilitas perkotaan
4	Peningkatan Transportasi Publik & Pemberhentian Ramah Warga	Peningkatan layanan pengoperasian Trans Padang
		Pengembangan jaringan transportasi melalui pengoperasian Feeder Trans Padang
		Pembangunan Tempat Pemberhentian Bus (TPB) Trans Padang
5	Peningkatan Potensi dan Produktivitas Petani dan Nelayan melalui ”Penyediaan Bantuan untuk Kelompok Pertanian & Perikanan”	Penyediaan benih unggul bersertifikat dalam rangka peningkatan produktivitas pertanian
		Penyediaan alat dan mesin pertanian untuk peningkatan efisiensi usaha tani
		Penyediaan bibit perkebunan untuk peningkatan produksi perkebunan
		Penyediaan sistem pertanian hidroponik
		Penyediaan bantuan pupuk untuk meningkatkan kesuburan lahan
		Penyediaan bibit dan pakan ternak dalam rangka pengembangan usaha ternak
		Penyediaan sarana produksi ternak bagi kelompok Peternak
		Peningkatan infrastruktur pertanian melalui bantuan irigasi
		Penyediaan sarana dan prasarana peternakan
		Pengendalian organisme pengganggu tanaman
		Pengadaan tanah untuk pengembangan fasilitas pertanian
		Penyediaan alat pengolahan hasil pangan

No	Arah Kebijakan	Program Pembangunan
		Penyediaan bantuan untuk kelompok nelayan
		Penguatan perikanan budidaya melalui bantuan bibit dan pakan ikan
		Pengendalian hama dan penyakit ikan melalui bantuan alat/bahan pencegahan
		Penyediaan sarana dan prasarana perikanan budidaya
6	Peningkatan Aksesibilitas Perdagangan melalui ”Revitalisasi Pasar Raya & Pasar Satelit”	Revitalisasi jalan dan trotoar di lingkungan Pasar Raya
		Penyediaan kawasan air mancur dan landmark
		Penyediaan jembatan penghubung antar gedung di Pasar Raya
		Penyediaan Jalan Sandang Pangan Pasar Raya
		Penyediaan Fasade Pasar Raya padang teater dan sarana pendukung
		Relokasi Pedagang Pasar jalan Sandang Pangan
		Revitalisasi dan Rehabilitasi Pasar Raya dan Pasar Satelit
		Penyediaan Pintu Pengaman pada Gedung Pasar Raya Fase VII
		Penataan terpadu kawasan Pasar Raya dan Pasar Satelit
		Revitalisasi fasilitas perdagangan melalui rehabilitasi bangunan IWAPI
		Penyediaan sarana bermain anak di Kawasan Pasar Raya
		Pemeliharaan berkala Pasar Raya dan Pasar Satelit untuk menjaga fungsi dan keamanan bangunan
		Penyediaan Intalasi Pengolahan Air Limbah di lingkungan Pasar Satelit dalam rangka pemenuhan pasar ber SNI
		Pengadaan Alat Listrik untuk Pasar Raya dan Pasar Satelit
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan Pasar
		Penggalian Sendimen Pasar Raya dan Pasar Satelit
		Penyediaan seragam dan perlengkapan petugas Trantib dan Kebersihan dalam rangka peningkatan ketertiban pasar
		Peningkatan Kapasitas dan pemberdayaan pedagang serta pengelola pasar

No	Arah Kebijakan	Program Pembangunan
7	Peningkatan Produktivitas Usaha Mikro melalui Penciptaan Inkubator Bisnis	Penyediaan rumah wirausaha untuk mendukung penciptaan Inkubator Bisnis
8	Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui ”Koperasi Berjaya”	Penyediaan akses pembiayaan usaha mikro melalui program subsidi margin
		Penguatan kelembagaan koperasi melalui program inkubasi koperasi berjaya
		Peningkatan Digitalisasi Koperasi dan Tata Kelola Koperasi berjaya
		Pelaksanaan penilaian dan pengawasan Koperasi berjaya
9	Peningkatan Kualitas Destinasi Pariwisata melalui ”Penataan Kawasan Pinggir Pantai”	Pemasangan Marka Jalan dan Marka Parkir serta pemeliharaannya di sepanjang pinggir pantai
		Pemasangan *gate* parkir untuk parkir off street di kawasaan Muaro Lasak dan pemeliharaannya
		Pemasangan Rambu Lalu Lintas di sepanjang Kawasan Pinggir Pantai
		Pemasangan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ) di sepanjang pinggir pantai
		Pemasangan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum di lingkungan wisata
		Penyusunan rencana pengembangan destinasi wisata
		Rehabilitasi Destinasi Wisata
10	Pengembangan Potensi Perekonomian Daerah melalui Sektor Wisata & Ekonomi Kreatif	Penyelenggaran festival dan event daerah untuk meningkatkan daya tarik wisata dan ekonomi kreatif
		Pemeliharaan sarana kepemudahaan melalui pemeliharaan Gedung BAC Youth Center
11	Peningkatan Destinasi Wisata Unggulan melalui Revitalisasi & Aktivasi Wisata Tematik	Rehabilitasi Bangunan Pujasera Pantai Padang untuk peningkatan destinasi wisata unggulan

D. Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah untuk Transformasi Sektor Publik

Transformasi sektor publik sebagai pengungkit mewujudkan strategi penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta berkelanjutan. Penguatan tata kelola pemerintah digital menjadi langkah utama.

Untuk itu, diperlukan transformasi digital layanan publik dalam pemerintah digital, yang diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas

dan kualitas layanan kepada masyarakat, terutama pada sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan perizinan berusaha. Layanan ini dirancang agar cepat, tepat, dan terjangkau. Upaya ini didukung oleh penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data pemerintah. Data yang terintegrasi dan saling terhubung antar-instansi menjadi dasar pengambilan kebijakan berbasis bukti, perencanaan pembangunan yang lebih efektif, dan pengawasan anggaran yang lebih ketat. Lebih lanjut disampaikan pada infografis di bawah ini.

Gambar III- 5 Upaya Pengoptimalan Transformasi Digital Layanan Publik dalam Pemerintah Digital

Sumber : RPJMN Tahun 2025-2029

Untuk mencapai peran pemerintah digital sebagai pengungkit pembangunan, Pemerintah Kota Padang menetapkan arah kebijakan dan program pembangunan daerah sebagai berikut :

Tabel III- 17 Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah untuk Peningkatan Transformasi Sektor Publik

No	Arah Kebijakan	Program Pembangunan
1	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang Berintegritas dan Bebas Pungutan Liar	Pengelolaan dan pengawasan internal pemerintah yang berintegritas dan bebas terhadap pungutan liat
2	Peningkatan Pelayanan kepada warga lanjut usia dan penyandang Disabilitas "Warga Emas" pada Sektor Kesehatan, Transportasi, & Pelayanan Publik	Penyediaan serta pengembangan fasilitas sarana prasarana puskesmas untuk pelayanan lansia dan warga emas
		Pengelolaan serta peningkatan sistem layanan air minum
		Pembangunan sarana prasarana dan penataan sistem air limbah berkelanjutan
3	Peningkatan Kemudahan Layanan Publik Berbasis Teknologi	Penguatan kapasitas dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan

No	Arah Kebijakan	Program Pembangunan
		Peningkatan partisipasi wajib pajak dalam pembangunan daerah dengan apresiasi penghargaan pada 'Malam Anugrah Pajak'
		Penyuluhan apresiasi insentif fiskal (diskon) bagi wajib pajak penggunaan sistem pajak digital (tapping box)
		Pemutakhiran data dan potensi pajak daerah pasca Undang-Undang HKPD
		Pengelolaan layanan aplikasi pajak daerah
		Penyelesaian tunggakan pajak daerah berbasis kolaborasi yustisial
		Penguatan operasional satuan tugas pajak daerah
		Peningkatan pendapatan daerah melalui Opsi Pemungutan (OpSen) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
		Penyediaan mobil operasional satuan tugas pajak
		Penguatan sarana prasarana teknologi digital, konten literasi digital (*e-book*), dan kerjasama kelembagaan dengan Perpustakaan Nasional dalam inovasi pelayanan perpustakaan daerah
		Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang Daerah
		Pengelolaan dan pengembangan infrastruktur jaringan Teknologi Informasi Daerah
		Pengembangan server untuk pusat data daerah
		Pengoptimalisasian inovasi layanan publik melalui Mobile Government (m-Government)
		Pengembangan infrastruktur digital untuk mendukung pelayanan publik terintegrasi dalam rangka *Smart City*
		Pengendalian dan pengawasan implementasi tata kelola *Smart City*
		Peningkatan kualitas penyelenggaraan SPBE
		Pengembangan digitalisasi dokumen serta peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan keamanan informasi daerah dan ketahanan dari ancaman serangan cyber
		Penguatan sistem komunikasi publik melalui inventarisasi dan penataan kanal media milik Pemerintah
		Pengelolaan konten komunikasi publik secara sistematis
4	Peningkatan akses pembelajaran di rumah ibadah melalui Penyediaan Ruang Pembelajaran Digital di rumah ibadah / Masjid & WiFi Gratis	Penyediaan akses internet gratis di fasilitas keagamaan
		Penyediaan sarana teknologi informasi di lingkungan keagamaan
		Pemanfaatan akses pembelajaran daring untuk peningkatan kualitas pendidikan
		Pengembangan platform teknologi informasi untuk pengelolaan sarana ibadah
		Pengembangan konten pembelajaran digital
		Penguatan edukasi *Smart Surau* kepada stakeholder
5	Peningkatan Kemudahan Izin Investasi dan Berusaha	Penguatan jejaring kemitraan dalam promosi investasi untuk pengembangan peluang ekonomi daerah
		Penguatan kemitraan strategis antara pemerintah daerah dan dunia usaha
		Penguatan ekosistem kemudahan berusaha melalui pelayanan satu pintu
		Penguatan regulasi daerah untuk kemudahan berusaha dan pemberian insentif
		Penyiapan proyek potensial untuk promosi investasi (IPRO)

No	Arah Kebijakan	Program Pembangunan
		Penguatan branding investasi daerah melalui kemitraan digital strategis
		Pendampingan akademis dalam peningkatan iklim investasi daerah
6	Peningkatan Responsibitas Layanan Kepada Masyarakat melalui ”Sigap Call Center	Pengembangan dan pengelolaan infrastruktur, sarana, dan prasarana *Area Traffic Control System* (ATCS)
		Penguatan infrastruktur ramah lingkungan dan keberlanjutan
		Penertiban dan pengawasan kegiatan parkir liar
		Penguatan sarana dan prasarana untuk mengatasi bencana banjir
		Penyediaan dan pemeliharaan prasarana pendukung kesiapsiagaan bencana
		Penguatan ketangguhan komunitas dalam menghadapi bencana tsunami
		Penguatan jejaring bisnis antar komunitas
		Penguatan sistem logistik penanggulangan bencana
		Pengembangan sarana prasarana pencegahan, penanggulangan, dan alat pelindung diri pada bencana kebakaran
		Peningkatan aksesibilitas pelayanan publik melalui *Call Center* terintegrasi
		Penguatan kompetensi sumber daya manusia dalam layanan respons cepat berbasis digital

E. Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah untuk Pembangunan Kewilayahan

Mengacu pada RPJMN 2025-2029, Kota Padang dirancang sebagai pusat pertumbuhan dalam Pengembangan dan Penataan Kawasan perkotaan Padang-Pariaman dengan highlight indikasi intervensi :

a. Pengembangan dan Penatan Kawasan perkotaan melalui :
   - Penyusunan masterplan penataan Kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu
   - Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan Ruang Terbuka Hijau
   - Penyediaan dan peningkatan layanan Pendidikan/ pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan
   - Penatan permukiman kumuh terpadu dengan sektor ketenagakerjaan

b. Pengembangan Koridor idustri rintisan Padang (sektor industry prioritas, hilirisasi kelapa, hilirisasi kelapa sawit, industry makanan dan minuman, dan industri transportasi laut dan galangan kapal)

c. Penguatan Pendidikan dan pelatihan vokasi, serta produktivitas tenaga kerja melalui Pembangunan/

pengambangan/ peningkatan Balai Latihan Kerja sesuai kebutuhan industry wilayah

d. Pengembangan Pelabuhan Perikanan PPS Bungus
e. Pembangunan SPAM Regional
f. Pembangunan TPST Regional
g. Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi MBR, Gen Z, dan milenial di Kawasan Perkotaan Padang (PHTC)
h. Peningkatan Ketangguhan terhadap banjir di Kota Padang.

3.2 Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029 terhadap Program Strategis Nasional (ProSN) RPJMN Tahun 2025-2029

Proyek Strategis Nasional (PSN) adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis dan berdampak signifikan untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Program Strategis Nasional (ProSN) adalah penerjemahan program/proyek yang tercantum dalam RPJMN dan RKP yang mencakup Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), Proyek Prioritas (ProP), dan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang memiliki sifat strategis dan menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia serta menjaga keamanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel III- 18 Arah Kebijakan, dan Bentuk Kegiatan Daerah terhadap Program Strategis Nasional

NO	Program Strategis Nasional/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Arah Kebijakan	Bentuk Kegiatan	Justifikasi
I	PENANGGULANGAN KEMISKINAN				
1	Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	01 - Tingkat Kemiskinan	Peningkatan Perlindungan Tenaga Kerja Rentan melalui ”Penyediaan BPJS Ketenagakerjaan untuk Pekerja Rentan”		
		02 - Tingkat Kemiskinan Ekstrem		Pemberian seragam sekolah bagi siswa SD dan	mengurangi beban pengeluaran

NO	Program Strategis Nasional/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Arah Kebijakan	Bentuk Kegiatan	Justifikasi
				SMP (16.914 siswa)	
				Pemberian LKS Gratis bagi siswa SD dan SMP (15.142 siswa)	mengurangi beban pengeluaran
				Bantuan Bulog (148 ton)	mengurangi beban pengeluaran
				Peningkatan Skill Kepemudaan(pemagangan)	meningkatkan pendapatan
				Koperasi Berjaya	meningkatkan pendapatan
				Rumah Wirausaha untuk UMKM	meningkatkan pendapatan
				Perbaikan Jembatan Kalampaian	mengurangi kantong-kantong kemiskinan
				Penyediaan Air minum (pamsimas) di Luki, pauh, Bungus	mengurangi kantong-kantong kemiskinan
				Penyediaan Sanitasi Aman	mengurangi kantong-kantong kemiskinan
				Perbaikan Rumah Tidak Layah Huni (	mengurangi kantong-kantong kemiskinan
				Pemeliharaan jalan tersebar di kota padang	mengurangi kantong-kantong kemiskinan
2	Sekolah Rakyat	01 - Jumlah Sekolah Rakyat			
				pengadaan tanah untuk sekolah rakyat	Fasilitasi Sekolah Rakyat
3	Pembangunan 3 Juta Rumah	01 - Jumlah Unit Rumah Baru yang Terbangun			
				Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	

NO	Program Strategis Nasional/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Arah Kebijakan	Bentuk Kegiatan	Justifikasi
				Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
				Penyelenggaraan Peneribitkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKSG) Rencana Teknis Pembongkoran Bangunan Gedung (RTB) Tim Profesi Ahli (TPA) Tim Penilai Teknis (TPT) Pemilik dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	
II	**KETAHANAN PANGAN**				
4	Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah	01 – Jumlah Pengelolaan Cadangan Pangan Beras			
				Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pengelolaan cadangan pangan Beras
III	**KESEHATAN UNTUK SEMUA**				
5	Jaminan Kesehatan Nasional	01 - Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional			

NO	Program Strategis Nasional/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Arah Kebijakan	Bentuk Kegiatan	Justifikasi
			Pengurangan beban biaya kesehatan melalui BPJS Kesehatan Gratis bagi warga kota Padang	pembayaran Premi JKN	Progul Walikota BPJS Kesehatan Gratis
6	Makan Bergizi Gratis	01 - Persentase ibu hamil dan ibu menyusui yang mendapatkan bantuan makanan bergizi		Makan Bergizi Gratis terdiri dari perserta didik dan bumil , busui dan balita	mengurangi beban pengeluaran
		02 - Persentase anak balita yang mendapatkan bantuan makanan bergizi			
		03 - Persentase siswa dan santri yang mendapatkan bantuan makanan bergizi			
IV	**PERLUASAN AKSES PENDIDIKAN**				
7	Pembangunan dan revitalisasi Pendidikan dasar dan menengah	01 - Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif			
				Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Infrastruktur Pendidikan
				Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Infrastruktur Pendidikan
				Pembangunan Perpustakaan	Infrastruktur

NO	Program Strategis Nasional/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Arah Kebijakan	Bentuk Kegiatan	Justifikasi
				Sekolah	Pendidikan
				Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah	Infrastruktur Pendidikan
				Pengadaan Mebel	Infrastruktur Pendidikan
				Pemeliharaan Rutin Sarana Prasarana dan utilitas Sekolah	Infrastruktur Pendidikan
				Pembangunan Ruang Kelas Baru	Infrastruktur Pendidikan
				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Infrastruktur Pendidikan
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Infrastruktur Pendidikan
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Infrastruktur Pendidikan
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Infrastruktur Pendidikan
					Infrastruktur Pendidikan
				Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Infrastruktur Pendidikan
				Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Infrastruktur Pendidikan
				Pembangunan Laboratorium	Infrastruktur Pendidikan
				Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Infrastruktur Pendidikan
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Infrastruktur Pendidikan
				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Infrastruktur Pendidikan
				Pengadaan Mebel Sekolah	Infrastruktur

NO	Program Strategis Nasional/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Arah Kebijakan	Bentuk Kegiatan	Justifikasi
					Pendidikan
				Pemeliharaan Rutin Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Infrastruktur Pendidikan
				Pemeliharaan Mebel Sekolah	Infrastruktur Pendidikan
				Pembangunan Ruang Kelas Baru	Infrastruktur Pendidikan
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Infrastruktur Pendidikan
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Infrastruktur Pendidikan
					Infrastruktur Pendidikan
				Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas PAUD	Infrastruktur Pendidikan
				Pengadaan Mebel PAUD	Infrastruktur Pendidikan
				Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Infrastruktur Pendidikan
				Pemeliharaan Rutin Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Infrastruktur Pendidikan
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Infrastruktur Pendidikan
					Infrastruktur Pendidikan
				Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Infrastruktur Pendidikan
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Infrastruktur Pendidikan
		02 - Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan			

NO	Program Strategis Nasional/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Arah Kebijakan	Bentuk Kegiatan	Justifikasi
		satuan pendidikan keagamaan yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif			
V	**PERTUMBUHAN EKONOMI**				
8	Pengendalian Inflasi	01 - Tingkat Inflasi			
				Monitoring ketersedian Bahan Pokok Penting	Pengendalian Inflasi
				Pelaksanaan Operasi Pasar	Pengendalian Inflasi
				Pengawasan ke distributor pupuk dan pestisida	mengatasi kelangkaan atau lonjakan harga pupuk dan pestisida
				Rapat koordinasi PPID	sekretariat PPID
				Pendampingan terhadap keluarga penerima bantuan sosial bersyarat	Peningkatan kesejahteraan masyarakat
				Pengembangan usaha ekonomi produktif dan kelompok usaha bersama	Peningkatan ekonomi masyarakat
				Pendataan masyarakat miskin	Meningkatnya akurasi data kemiskinan
				Pendataan masyarakat miskin	Meningkatnya akurasi data kemiskinan

NO	Program Strategis Nasional/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Arah Kebijakan	Bentuk Kegiatan	Justifikasi
				Pemberian makanan terhadap korban bencana	Terpenuhiny a kebutuhan dasar makanan korban bencana
				Pemberian sandang terhadap korban bencana	Terpenuhiny a kebutuhan dasar sandang korban bencana
				Penanganan khusus kelompok rentan korban bencana	Meningkatka n keberfungsia n sosial korban bencana
				Pembinaan terhadap pelaku usaha mikro/ Pendampingan dan Bantuan Alat Penunjang Produksi	Pelaku Usaha Mikro naik kelas
				Kegiatan Koordinasi dengan Stakeholder terkait (lembaga pembiayaan, mitra pemasaran, legalitas perizinan produk,	Pelaku Usaha Mikro naik kelas
				Subsidi margin usaha mikro	Pelaku Usaha Mikro naik kelas
				Pemasangan Rambu dan Marka Jalan	Kelancaran arus lalulintas untuk komoditi barang dan jasa
				Rekayasa Lalu Lintas	Kelancaran arus lalulintas untuk komoditi barang dan jasa

NO	Program Strategis Nasional/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Arah Kebijakan	Bentuk Kegiatan	Justifikasi
				Subsidi Tarif angkutan	Menjaga stabilisasi tarif angkutan
				Pemantauan harga oleh petugas pasar dan	Pengendalian inflasi
				Pelatihan untuk kelompok pengolahan pangan lokal	Pengendalian inflasi
				Rapat koordinasi terkait penyusunan Neraca Bahan Makanan	Pengendalian inflasi
				Pengadaan cadangan pangan pemerintah yang dtitipkan di BULOG	Pengendalian inflasi
				Pemberian bantuan sarana dan prasarana pembudidaya ikan	Pengendalian inflasi
				Pemberian bantuan sarana dan prasarana pembudidaya ikan	Pengendalian inflasi
				Pemberian bantuan sarana dan prasarana pembudidaya ikan	Pengendalian inflasi
				Pemberian bantuan dan pelatihan kepada pembudidaya ikan	Pengendalian inflasi
				- Pengembangan Areal Perkebunan - Rehab Tanaman Perkebunan - Bantuan Alat Pasca Panen Perkebunan	Sarana pendukung pertanian yang dimanfaatkan sesuai peruntukan, teknologi, dan kondisi lokasi agar

NO	Program Strategis Nasional/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Arah Kebijakan	Bentuk Kegiatan	Justifikasi
					efektif meningkatkan produktivitas.
				- Pengadaan alsintan - Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) - Pupuk (kaji terap POC Kevier)	Meningkatkan keterampilan petani dalam pemakaian saprodi dan teknologi tepat guna.
				-Pemeriksaan bahan pakan ternak yang beredar di Kota Padang	pemeriksaan bahan pakan ternak yang beredar di pasaran akan menjamin bahwa pakan tersebut sesuai dengan yang tertera dikemasan, dan masih layak untuk dikonsumsi oleh ternak
				Bantuan Ternak/pakan	Menambah populasi dan meningkatkan kualitas genetik ternak lokal
				- Pembuatan lantai jemur - Pembuatan gudang penyimpanan benih - Pemeliharaan Brigade Alsintan - Pembuatan Rumah Bibit - Rehab Kandang Ternak	Mendukung peningkatan produksi pertanian, penanganan pascapanen guna menjaga kualitas dan nilai tambah hasil pertanian
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT)	Memperbaiki distribusi air ke lahan usaha tani untuk meningkatkan produktivitas.

NO	Program Strategis Nasional/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Arah Kebijakan	Bentuk Kegiatan	Justifikasi
				Pendataan lahan pertanian yang dikelola oleh petani by name by address,	penetapan lahan pertanian sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dan dibuatkan regulasinya menjadi perda LP2B
				- Pengembangan dan penumbuhan penangkar benih - pengadaan benih unggul bersertifikat	Meningkatkan produktivitas tanaman pangan.
				Peningkatan kompetensi penyuluh pertanian pada masing-masing BPP	Peningkatan kompetensi penyuluh pertanian diharapkan dalam menyuluh petani
				Pembinaan kelompok tani dalam bentuk bimbingan teknis untuk petani	peningkatan kemampuan petani dalm berusaha tani
				Pengadaan sarana dan prasarana penyuluhan	ketersediaan sarana dan prasarana penyuluhan yang lengkap memudahkan dalam kegiatan penyuluhan
9	Percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	01 - Jumlah koperasi Merah Putih	Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui ”Koperasi Berjaya”	Bantuan Pengurusan Badan Hukum (notaris) Koperasi Berjaya	dukungan terhadap terbentukanya Koperasi Berjaya per kelurahan
10	Kemudahan Perizinan di Daerah	01 - Nilai PMA dan PMDN	Peningkatan Kemudahan Izin Investasi dan Berusaha	12 Pertemuan, 50 Video/reels, 30 Flyer	Rapat dengan Pelaku Usaha Kota Padang, Pembuatan Video dan flyer Promosi Investasi,
				penyusunan dokumen IPRO (Investment Project Ready to Offer),	Proposal Penawaran Investasi

NO	Program Strategis Nasional/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Arah Kebijakan	Bentuk Kegiatan	Justifikasi
				Kunjungan ke pelaku usaha (anggaran untuk makan dan minum petugas monitoring kegiatan penanaman modal)	memberikan edukasi guna kepatuhan pelaporan perkembangan usaha penanaman modal
		02 - Nilai Realisasi Penanaman Modal di Bidang Hilirisasi			

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Program Perangkat Daerah merupakan kumpulan seluruh program yang akan menjadi acuan dan dimuat dalam Bab IV Renstra Perangkat Daerah serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Perangkat Daerah. Program ini mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Padang tahun 2025 – 2029. Rumusan Program Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja Pembangunan daerah dimulai Tahun 2025 hingga tahun 2030. Program Tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab Kepala Daerah periode 2030-2034.

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Padang berpedoman kepada indikator kinerja yang juga tertuang dalam dokumen perencanaan Kota dan mengacu kepada dokumen perencanaan nasional dan provinsi Sumatera Barat. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

4.1 Program Perangkat Daerah

Rincian program dan pendanaan dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel IV- 1 Rencana Program dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					991.796.528.542,00		968.024.000.000,00		988.855.850.000,00		1.014.098.769.500,00		1.058.699.046.450,00	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					788.604.251.689,13		787.751.137.277,00		799.569.344.141,00		811.562.208.231,00		835.908.829.054,00	
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	100	100	788.604.251.689,13	100	787.751.137.277,00	100	799.569.344.141,00	100	811.562.208.231,00	100	835.908.829.054,00	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					203.092.276.852,87		180.072.862.723,00		189.076.505.859,00		202.311.861.269,00		222.543.047.396,00	
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah					203.092.276.852,87		180.072.862.723,00		189.076.505.859,00		202.311.861.269,00		222.543.047.396,00	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					100.000.000,00		100.000.000,00		105.000.000,00		112.350.000,00		123.585.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan					100.000.000,00		100.000.000,00		105.000.000,00		112.350.000,00		123.585.000,00	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					0,00		100.000.000,00		105.000.000,00		112.350.000,00		123.585.000,00	
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan					0,00		100.000.000,00		105.000.000,00		112.350.000,00		123.585.000,00	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN														
Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan														1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA														
Terlestarinya bahasa dan sastra daerah														1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					505.230.935.543,98		2.723.519.000.000,00		2.544.079.000.000,00		2.428.150.000.000,00		2.337.008.600.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					373.700.224.327,98		2.614.238.590.257,00		2.429.334.569.769,00		2.305.373.459.653,00		2.201.954.405.619,00	
Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah (%)	100	100	100	317.030.952.712,98	100	353.744.590.257,00	100	358.513.069.769,00	100	363.367.964.653,00	100	372.002.961.119,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah (%)	100	100	100	56.669.271.615,00	100	2.260.494.000.000,00	100	2.070.821.500.000,00	100	1.942.005.495.000,00	100	1.829.951.444.500,00	1.02.0.00.0.00.01.0001 - RSUD Dr. RASIDIN
	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0001 - RSUD Dr. RASIDIN
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					128.477.594.001,00		107.380.143.252,00		112.749.150.415,00		120.641.590.944,00		132.705.750.038,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	88,7	80,00	85,00	102.980.143.252,00	90,00	102.580.143.252,00	93,00	107.709.150.415,00	95,00	115.248.790.944,00	95,00	126.773.670.038,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Cakupan penemuan kasus TB (%)	89	96,00	96,00		96,00		96,00		96,00		96,00		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%)	-	36	46		55		61		70		80		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	-	0,96	1,92		2,88		3,84		4,80		5,70		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	75	25	30		35		40		45		50		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (%)	12,4	12,4	11,4		10,4		9,4		8,4		7,4		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Puskesmas dan RSUD yang melaksanakan pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	81	81,02	81,05		81,10		81,15		81,20		81,25		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	94	75	77		79		81		83		85		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	1,40	1,40	1,40		1,40		1,40		1,40		1,40		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	23,4	23,4	23,4		23,4		23,4		23,4		23,4		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	63	64,30	66,10		67,90		69,70		72,00		74,30		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Puskesmas dan RSUD yang melaksanakan pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat (%)	100	100	100	25.497.450.749,00	100	4.800.000.000,00	100	5.040.000.000,00	100	5.392.800.000,00	100	5.932.080.000,00	1.02.0.00.0.00.01.0001 - RSUD Dr. RASIDIN
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					1.047.581.000,00		657.312.000,00		690.177.600,00		738.490.032,00		812.339.035,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Puskesmas dan RSUD dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100	1.047.581.000,00	100	627.312.000,00	100	658.677.600,00	100	704.785.032,00	100	775.263.535,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi (Angka)	1,3	1,3	1,36		1,4		1,5		1,57		1,6		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Puskesmas dan RSUD dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100	0,00	100	30.000.000,00	100	31.500.000,00	100	33.705.000,00	100	37.075.500,00	1.02.0.00.0.00.01.0001 - RSUD Dr. RASIDIN
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					331.153.000,00		217.028.000,00		227.879.400,00		243.830.958,00		268.214.054,00	
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Puskesmas dan RSUD yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan (%)	100	100	100	331.153.000,00	100	217.028.000,00	100	227.879.400,00	100	243.830.958,00	100	268.214.054,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan (%)	70	80	80		80		80		80		80		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu (%)	78	80	80		80		80		80		80		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPPIRT sesuai standar (%)	40	80	80		80		80		80		80		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan (%)	40	80	80		80		80		80		80		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					1.674.383.215,00		1.025.926.491,00		1.077.222.816,00		1.152.628.413,00		1.267.891.254,00	
Meningkatnya kualitas perberdayaan masyarakat di bidang kesehatan	Persentase UKBM yang aktif (%)	100	100	100	1.674.383.215,00	100	1.025.926.491,00	100	1.077.222.816,00	100	1.152.628.413,00	100	1.267.891.254,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase kecamatan yang menetapkan kebijakanÃ Germas (%)	85	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					223.327.773.231,00		214.275.000.000,00		298.369.000.000,00		305.800.000.000,00		315.388.400.000,00	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					23.711.888.150,00		23.711.888.150,00		24.067.566.472,00		24.428.579.969,00		25.161.437.368,00	
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	100	100	23.711.888.150,00	100	23.711.888.150,00	100	24.067.566.472,00	100	24.428.579.969,00	100	25.161.437.368,00	1.03.1.04.0.00.02.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					9.790.479.000,00		24.040.000.000,00		110.225.000.000,00		119.500.000.000,00		121.700.000.000,00	
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi (%)	80	82,35	83,72	9.790.479.000,00	85,26	24.040.000.000,00	87,1	110.225.000.000,00	88,1	119.500.000.000,00	87,27	121.700.000.000,00	1.03.1.04.0.00.02.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Persentase Perlindungan Kawasan Rawan Banjir (%)	70	72	73		75		77,2		78,6		79		1.03.1.04.0.00.02.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					3.267.500.000,00		2.800.000.000,00		2.940.000.000,00		3.145.800.000,00		3.460.380.000,00	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase peningkatan kapasitas yang terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/ kota (%)	50	55	60	3.267.500.000,00	62	2.800.000.000,00	66	2.940.000.000,00	68	3.145.800.000,00	70	3.460.380.000,00	1.03.1.04.0.00.02.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					0,00		404.192.910,00		424.402.556,00		454.110.734,00		499.521.808,00	
Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional (Persentase)	0	25	0	0,00	33	404.192.910,00	36	424.402.556,00	42	454.110.734,00	45	499.521.808,00	1.03.1.04.0.00.02.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					3.850.000.000,00		3.000.000.000,00		3.150.000.000,00		3.370.500.000,00		3.707.550.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (Persentase)	0,075	0,5	2,5	3.850.000.000,00	3,5	3.000.000.000,00	4	3.150.000.000,00	4,25	3.370.500.000,00	4,5	3.707.550.000,00	1.03.1.04.0.00.02.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					25.277.817.500,00		8.000.000.000,00		8.400.000.000,00		8.988.000.000,00		9.886.800.000,00	
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	74,5	75	78	25.277.817.500,00	80	8.000.000.000,00	81,2	8.400.000.000,00	82,6	8.988.000.000,00	83	9.886.800.000,00	1.03.1.04.0.00.02.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN														
Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman														1.03.1.04.0.00.02.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					47.700.000.000,00		13.450.000.000,00		17.450.000.000,00		17.450.000.000,00		17.450.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase)	80	80	80	47.700.000.000,00	80	13.450.000.000,00	80	17.450.000.000,00	80	17.450.000.000,00	80	17.450.000.000,00	1.03.1.04.0.00.02.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					13.727.991.427,00		1.345.001.150,00		1.412.251.208,00		1.511.108.792,00		1.662.219.671,00	
Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase penataan bangunan dan lingkungan (%)	80	80	80	13.727.991.427,00	80	1.345.001.150,00	80	1.412.251.208,00	80	1.511.108.792,00	80	1.662.219.671,00	1.03.1.04.0.00.02.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					95.702.097.154,00		136.751.555.755,00		129.488.799.627,00		126.084.151.759,00		130.905.967.532,00	
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)	78,02	79	80	95.702.097.154,00	83,9	136.751.555.755,00	84,6	129.488.799.627,00	85,2	126.084.151.759,00	85,86	130.905.967.532,00	1.03.1.04.0.00.02.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					0,00		272.362.035,00		285.980.137,00		305.998.746,00		336.598.621,00	
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (Persentase)	0	0	0	0,00	30	272.362.035,00	32	285.980.137,00	35	305.998.746,00	39	336.598.621,00	1.03.1.04.0.00.02.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					300.000.000,00		500.000.000,00		525.000.000,00		561.750.000,00		617.925.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang (%)	68	70	70	300.000.000,00	75	500.000.000,00	76	525.000.000,00	77	561.750.000,00	79	617.925.000,00	1.03.1.04.0.00.02.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					84.892.681.898,00		55.415.000.000,00		57.765.000.000,00		66.450.000.000,00		77.229.000.000,00	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					12.739.584.832,00		12.004.297.242,00		12.183.762.104,00		12.367.391.231,00		12.738.130.355,00	
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah					12.739.584.832,00		12.004.297.242,00		12.183.762.104,00		12.367.391.231,00		12.738.130.355,00	1.04.1.03.0.00.02.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					2.241.888.600,00		3.350.902.758,00		3.518.447.896,00		3.764.739.249,00		4.141.213.173,00	
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah					2.241.888.600,00		3.350.902.758,00		3.518.447.896,00		3.764.739.249,00		4.141.213.173,00	1.04.1.03.0.00.02.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					33.322.091.492,00		18.000.000.000,00		18.900.000.000,00		20.223.000.000,00		27.245.300.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman					33.322.091.492,00		18.000.000.000,00		18.900.000.000,00		20.223.000.000,00		27.245.300.000,00	1.04.1.03.0.00.02.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					5.622.000.000,00		5.059.800.000,00		5.312.790.000,00		5.684.685.300,00		6.253.153.830,00	
Persentase Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh diluar Kawasan Kumuh yang ditingkatkan kualitasnya					5.622.000.000,00		5.059.800.000,00		5.312.790.000,00		5.684.685.300,00		6.253.153.830,00	1.04.1.03.0.00.02.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					30.967.116.974,00		17.000.000.000,00		17.850.000.000,00		24.410.184.220,00		26.851.202.642,00	
Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) permukiman					30.967.116.974,00		17.000.000.000,00		17.850.000.000,00		24.410.184.220,00		26.851.202.642,00	1.04.1.03.0.00.02.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.06 - PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN														

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU tingkat kemampuan menengah														1.04.1.03.0.00.02.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					102.642.193.243,00		102.740.000.000,00		104.719.000.000,00		107.015.000.000,00		111.211.000.000,00	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					90.196.978.443,00		90.196.419.685,00		91.548.240.669,00		92.922.287.517,00		95.709.016.268,00	
Meningkatnya efektivitas dan efisien pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	100	100	53.640.392.932,00	100	53.639.959.235,00	100	54.444.557.197,00	100	55.261.616.201,00	100	56.918.777.821,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Meningkatnya efektivitas dan efisien pelaksanaan urusan pemerintahan daerah					10.964.494.082,00		10.964.460.450,00		11.128.683.472,00		11.295.171.316,00		11.634.488.447,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya efektivitas dan efisien pelaksanaan urusan pemerintahan daerah					25.592.091.429,00		25.592.000.000,00		25.975.000.000,00		26.365.500.000,00		27.155.750.000,00	1.05.0.00.0.00.03.0000 - DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					2.097.553.000,00		2.108.040.765,00		2.213.442.803,00		2.368.383.799,00		2.605.222.179,00	
Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum (Nilai)	0	65	65,50	2.097.553.000,00	66	2.108.040.765,00	66,50	2.213.442.803,00	67	2.368.383.799,00	67,50	2.605.222.179,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					3.106.022.600,00		5.435.539.550,00		5.707.316.528,00		6.106.828.684,00		6.717.511.553,00	
Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (Orang)	0,44	0,48	0,52	1.000.000.000,00	0,55	1.000.000.000,00	0,59	1.000.000.000,00	0,63	1.000.000.000,00	0,65	1.000.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat					1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana					1.106.022.600,00		3.435.539.550,00		3.707.316.528,00		4.106.828.684,00		4.717.511.553,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					7.241.639.200,00		5.000.000.000,00		5.250.000.000,00		5.617.500.000,00		6.179.250.000,00	
Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran					6.121.639.200,00		4.153.000.000,00		4.367.000.000,00		4.777.500.000,00		5.339.250.000,00	1.05.0.00.0.00.03.0000 - DINAS PEMADAM KEBAKARAN
Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran					1.120.000.000,00		847.000.000,00		883.000.000,00		840.000.000,00		840.000.000,00	1.05.0.00.0.00.03.0000 - DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					24.321.322.185,00		21.165.000.000,00		21.801.000.000,00		22.654.000.000,00		24.049.000.000,00	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					12.415.126.937,00		12.064.341.000,00		12.245.308.049,00		12.429.409.614,00		12.801.950.574,00	
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintah daerah	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	100	100	12.415.126.937,00	100	12.064.341.000,00	100	12.245.308.049,00	100	12.429.409.614,00	100	12.801.950.574,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					7.322.524.150,00		5.481.362.650,00		5.755.430.783,00		6.158.310.937,00		6.774.142.031,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya partisipasi aktif PSKS dan LKS dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial dan tertanganinya warga migran korban tindak kekerasan	Persentase SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial (%)	0	0	55	7.322.524.150,00	60	5.481.362.650,00	65	5.755.430.783,00	70	6.158.310.937,00	75	6.774.142.031,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
	Persentase lembaga bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial (%)	0	0	55		60		65		70		75		1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani (Persentase)	0	0	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN														
Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan														1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					2.333.163.000,00		1.647.098.600,00		1.729.453.530,00		1.850.515.277,00		2.035.566.805,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kemandirian sosial Disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan dan pengemis serta PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Napza	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	-	-	49,50	2.333.163.000,00	54,40	1.647.098.600,00	57,10	1.729.453.530,00	57,36	1.850.515.277,00	60,20	2.035.566.805,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
	Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	-	-	55		60		65		70		75		1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	-	-	49,40		54,33		59,74		65,70		72,25		1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	-	-	63,5		57		70,3		72,9		76,3		1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	-	-	57,00		59,00		62,00		65,00		68,00		1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					1.331.599.998,00		1.107.050.950,00		1.162.403.498,00		1.243.771.742,00		1.368.148.917,00	
Terlindunginya masyarakat kurang mampu dari resiko sosial dan ekonomi serta memiliki akses terhadap pemenuhan dasar yang layak	Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin yang Dilaksanakan (%)	0	0	100	1.331.599.998,00	100	1.107.050.950,00	100	1.162.403.498,00	100	1.243.771.742,00	100	1.368.148.917,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonominya (%)	0	0	50		55		60		65		70		1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
	Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan (%)	0	0	1,38		1,42		1,46		1,5		1,54		1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	0	0	50		51		52		53		54		1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					760.062.700,00		760.061.800,00		798.064.890,00		853.929.432,00		939.322.376,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan non alam serta mengurangi dampak bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (%)	-	-	100	760.062.700,00	100	760.061.800,00	100	798.064.890,00	100	853.929.432,00	100	939.322.376,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial (%)	0	0	10,2		14,3		16,6		20,5		25,1		1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					158.845.400,00		105.085.000,00		110.339.250,00		118.062.998,00		129.869.297,00	
Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	Cakupan Layanan Taman Makam Pahlawan (Persentase)	100	100	100	158.845.400,00	100	105.085.000,00	100	110.339.250,00	100	118.062.998,00	100	129.869.297,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					19.153.365.482,00		19.887.287.100,00		20.469.801.455,00		21.245.467.557,00		22.522.014.313,00	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					12.005.830.682,00		11.764.662.600,00		11.941.045.730,00		12.119.698.931,00		12.483.668.825,00	
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	100	100	12.005.830.682,00	100	11.764.662.600,00	100	11.941.045.730,00	100	12.119.698.931,00	100	12.483.668.825,00	2.07.3.31.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA														
Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja (%)	0	0	0		0		0		0		0		2.07.3.31.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					3.578.037.700,00		2.947.101.000,00		3.094.456.050,00		3.311.067.974,00		3.642.174.771,00	
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya (%)	0	0	0	3.578.037.700,00	0	2.947.101.000,00	0	3.094.456.050,00	0	3.311.067.974,00	0	3.642.174.771,00	2.07.3.31.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					438.459.400,00		1.143.523.500,00		1.200.699.675,00		1.284.748.652,00		1.413.223.517,00	
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase)	10	13	14	438.459.400,00	15	1.143.523.500,00	16	1.200.699.675,00	17	1.284.748.652,00	18	1.413.223.517,00	2.07.3.31.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					3.131.037.700,00		4.032.000.000,00		4.233.600.000,00		4.529.952.000,00		4.982.947.200,00	
Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang)	22,8	25,26	24,14	3.131.037.700,00	23,20	4.032.000.000,00	21,89	4.233.600.000,00	21,65	4.529.952.000,00	19,65	4.982.947.200,00	2.07.3.31.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					12.753.203.768,00		11.438.540.441,00		11.662.017.463,00		11.923.878.685,00		12.400.066.554,00	
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					10.722.440.868,00		9.934.772.263,00		10.083.060.877,00		10.234.395.139,00		10.541.634.654,00	
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	100	100	10.722.440.868,00	100	9.934.772.263,00	100	10.083.060.877,00	100	10.234.395.139,00	100	10.541.634.654,00	2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					314.135.400,00		512.626.005,00		538.257.305,00		575.935.316,00		633.528.848,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan Peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	11,80	11,80	12,90	314.135.400,00	13,80	512.626.005,00	14,75	538.257.305,00	15,80	575.935.316,00	16,50	633.528.848,00	2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					246.305.000,00		139.813.590,00		146.804.270,00		157.080.568,00		172.788.625,00	
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	100	100	246.305.000,00	100	139.813.590,00	100	146.804.270,00	100	157.080.568,00	100	172.788.625,00	2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					705.753.100,00		360.068.100,00		378.071.505,00		404.536.510,00		444.990.161,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Kualitas Keluarga Dalam Mendukung Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak, serta perlindungan Perempuan dan Anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)	1	1	1	705.753.100,00	1	360.068.100,00	1	378.071.505,00	1	404.536.510,00	1	444.990.161,00	2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					30.263.100,00		30.414.416,00		31.935.136,00		34.170.596,00		37.587.655,00	
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	23	25	30	30.263.100,00	35	30.414.416,00	40	31.935.136,00	45	34.170.596,00	50	37.587.655,00	2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					190.611.300,00		171.464.357,00		180.037.574,00		192.640.205,00		211.904.225,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terjaminnya Pemenuhan Hak Semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	61,14	61,14	61,34	190.611.300,00	62,12	171.464.357,00	62,23	180.037.574,00	62,34	192.640.205,00	62,45	211.904.225,00	2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					543.695.000,00		289.381.710,00		303.850.796,00		325.120.351,00		357.632.386,00	
Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	82,22	82,22	82,72	543.695.000,00	83,22	289.381.710,00	83,62	303.850.796,00	85,32	325.120.351,00	85,72	357.632.386,00	2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					17.951.194.905,35		17.911.877.067,00		18.255.620.921,00		18.654.584.384,00		19.385.342.822,00	
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					15.746.194.905,35		15.746.102.067,00		15.981.557.171,00		16.221.336.172,00		16.708.769.788,00	
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	100	100	15.746.194.905,35	100	15.746.102.067,00	100	15.981.557.171,00	100	16.221.336.172,00	100	16.708.769.788,00	2.09.3.25.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN														
Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan														2.09.3.25.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					1.803.500.000,00		1.762.267.500,00		1.850.380.875,00		1.979.907.536,00		2.177.898.290,00	
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)	86	86,30	87	1.803.500.000,00	87,80	1.762.267.500,00	88,50	1.850.380.875,00	89,20	1.979.907.536,00	90	2.177.898.290,00	2.09.3.25.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					351.500.000,00		353.257.500,00		370.920.375,00		396.884.801,00		436.573.281,00	
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	1	1	1	351.500.000,00	1	353.257.500,00	1	370.920.375,00	1	396.884.801,00	1	436.573.281,00	2.09.3.25.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					50.000.000,00		50.250.000,00		52.762.500,00		56.455.875,00		62.101.463,00	
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	92,85	95,5	96,00	50.000.000,00	96,4	50.250.000,00	96,6	52.762.500,00	96,8	56.455.875,00	97,00	62.101.463,00	2.09.3.25.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					6.534.831.979,00		6.452.000.000,00		6.583.000.000,00		6.738.000.000,00		7.017.000.000,00	
2.10.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.476.888.379,00		5.636.032.000,00		5.717.547.200,00		5.742.190.350,00		5.861.676.800,00	
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	100	100	5.476.888.379,00	100	5.636.032.000,00	100	5.717.547.200,00	100	5.742.190.350,00	100	5.861.676.800,00	2.10.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERTANAHAN
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					108.002.500,00		101.420.000,00		106.491.000,00		113.945.300,00		125.339.900,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan (%)	10	10	10	108.002.500,00	10	101.420.000,00	10	106.491.000,00	10	113.945.300,00	10	125.339.900,00	2.10.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERTANAHAN
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					200.000.000,00		200.000.000,00		206.500.000,00		283.716.450,00		312.019.000,00	
Meningkatnya Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (%)	10	10	25	200.000.000,00	25	200.000.000,00	25	206.500.000,00	25	283.716.450,00	25	312.019.000,00	2.10.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERTANAHAN
2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					136.499.800,00		85.632.000,00		88.290.000,00		90.032.000,00		94.036.200,00	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	Persentase Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee (%)	100	100	100	136.499.800,00	100	85.632.000,00	100	88.290.000,00	100	90.032.000,00	100	94.036.200,00	2.10.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERTANAHAN
2.10.07 - PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT					44.616.300,00		50.889.300,00		53.433.700,00		57.174.100,00		62.891.500,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya tata kelola tanah ulayat	Persentase Penetapan Tanah Ulayat (%)	10	10	10	44.616.300,00	10	50.889.300,00	10	53.433.700,00	10	57.174.100,00	10	62.891.500,00	2.10.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERTANAHAN
2.10.08 - PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG					533.825.000,00		327.800.000,00		358.000.000,00		394.512.000,00		498.964.000,00	
Meningkatnya Pengelolaan tanah kosong	Persentase Tanah Kosong yang (Berhasil) Difasilitasi (%)	10	10	10	533.825.000,00	10	327.800.000,00	10	358.000.000,00	10	394.512.000,00	10	498.964.000,00	2.10.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERTANAHAN
2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH					35.000.000,00		50.226.700,00		52.738.100,00		56.429.800,00		62.072.600,00	
Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Jumlah Dokumen Penatagunaan Tanah yang Terdata (Dokumen)	2	1	1	35.000.000,00	1	50.226.700,00	1	52.738.100,00	1	56.429.800,00	1	62.072.600,00	2.10.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERTANAHAN
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					183.592.635.421,00		175.908.000.000,00		181.917.000.000,00		190.208.000.000,00		210.956.000.000,00	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					78.641.384.133,00		79.598.789.584,00		80.792.329.063,00		82.004.602.097,00		84.463.929.456,00	
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	100	100	78.641.384.133,00	100	79.598.789.584,00	100	80.792.329.063,00	100	82.004.602.097,00	100	84.463.929.456,00	2.11.0.00.1.04.03.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					0,00		0,00		300.000.000,00		0,00		0,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (%)	100	100	100	0,00	100	0,00	100	300.000.000,00	100	0,00	100	0,00	2.11.0.00.1.04.03.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					1.294.213.400,00		1.294.213.400,00		1.358.924.070,00		1.454.048.755,00		1.599.453.630,00	
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (Indeks)	69,09	79,70	79,71	1.294.213.400,00	79,72	1.294.213.400,00	79,73	1.358.924.070,00	79,74	1.454.048.755,00	79,75	1.599.453.630,00	2.11.0.00.1.04.03.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Indeks Kualitas Udara (Indeks)	87,80	73,17	73,18		73,19		73,20		73,21		73,22		2.11.0.00.1.04.03.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					15.095.581.300,00		10.000.000.000,00		10.500.000.000,00		11.235.000.000,00		17.358.500.000,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)	Persentase RTH (Persentase)	9,9700	10,1708	10,1708	15.095.581.300,00	10,1709	10.000.000.000,00	10,1710	10.500.000.000,00	10,1711	11.235.000.000,00	10,1711	17.358.500.000,00	2.11.0.00.1.04.03.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)														

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)														2.11.0.00.1.04.03.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					226.579.000,00		208.223.750,00		218.634.938,00		233.939.383,00		257.333.321,00	
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang ditertibkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	100	100	100	226.579.000,00	100	208.223.750,00	100	218.634.938,00	100	233.939.383,00	100	257.333.321,00	2.11.0.00.1.04.03.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH														

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH														2.11.0.00.1.04.03.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					85.575.700,00		89.854.485,00		94.347.209,00		100.951.514,00		111.046.665,00	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	33	37,5	50	85.575.700,00	62,5	89.854.485,00	75	94.347.209,00	100	100.951.514,00	100	111.046.665,00	2.11.0.00.1.04.03.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					1.538.367.100,00		1.317.500.055,00		1.383.375.058,00		1.480.211.312,00		1.628.232.443,00	
Menigkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	100	100	100	1.538.367.100,00	100	1.317.500.055,00	100	1.383.375.058,00	100	1.480.211.312,00	100	1.628.232.443,00	2.11.0.00.1.04.03.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					184.257.000,00		98.892.938,00		103.837.585,00		111.106.216,00		122.216.837,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya penyelesaian sengketa / kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (%)	100	100	100	184.257.000,00	100	98.892.938,00	100	103.837.585,00	100	111.106.216,00	100	122.216.837,00	2.11.0.00.1.04.03.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					86.526.677.788,00		83.300.525.788,00		87.165.552.077,00		93.588.140.723,00		105.415.287.648,00	
Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	64	65	65,5	86.526.677.788,00	65,8	83.300.525.788,00	66	87.165.552.077,00	66,2	93.588.140.723,00	66,3	105.415.287.648,00	2.11.0.00.1.04.03.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					12.397.816.068,00		12.640.000.000,00		12.928.000.000,00		13.285.000.000,00		13.905.000.000,00	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.872.862.322,00		9.822.142.614,00		9.969.249.745,00		10.119.137.227,00		10.422.550.951,00	
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	100	100	9.872.862.322,00	100	9.822.142.614,00	100	9.969.249.745,00	100	10.119.137.227,00	100	10.422.550.951,00	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					1.149.758.046,00		1.897.100.776,00		1.991.955.815,00		2.131.392.722,00		2.344.531.994,00	
meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	32,70	30	30	1.149.758.046,00	30	1.897.100.776,00	30	1.991.955.815,00	30	2.131.392.722,00	30	2.344.531.994,00	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	60	60,05	60,08		60,10		60,12		60,15		60,18		2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					75.308.800,00		162.192.000,00		170.301.600,00		182.222.712,00		200.444.983,00	
meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase anak berusia 0 - 4 tahun yang memiliki akta kelahiran (Persentase)	96	97	97,5	75.308.800,00	98	162.192.000,00	98,5	170.301.600,00	99	182.222.712,00	99,5	200.444.983,00	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	Persentase kepemilikan akta kematian bagi penduduk yang meninggal (Persentase)	20	20	25		30		35		40		45		2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	Persentase penduduk yang memiliki akta perkawinan bagi penduduk yang menikah (Persentase)	19	20	25		30		35		40		45		2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	Persentase penduduk yang memiliki akta cerai bagi penduduk yang bercerai (Persentase)	20	20	25		30		35		40		45		2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					1.228.643.600,00		687.321.310,00		721.687.375,00		772.205.491,00		849.426.040,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan (Persentase)	97	98	98	1.228.643.600,00	98,20	687.321.310,00	98,40	721.687.375,00	98,60	772.205.491,00	98,80	849.426.040,00	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					71.243.300,00		71.243.300,00		74.805.465,00		80.041.848,00		88.046.032,00	
meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (Persentase)	97	98,5	100	71.243.300,00	100	71.243.300,00	100	74.805.465,00	100	80.041.848,00	100	88.046.032,00	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					7.488.565.900,00		7.430.459.559,00		7.801.982.537,00		8.348.121.315,00		9.182.933.446,00	
2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah														2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02 - PROGRAM					468.400.000,00		340.092.000,00		357.096.600,00		382.093.362,00		420.302.698,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
PENGENDALIAN PENDUDUK														
Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun (Rata-rata Anak per Wanita)	2,2	2,2	2,19	468.400.000,00	2,19	340.092.000,00	2,19	357.096.600,00	2,18	382.093.362,00	2,18	420.302.698,00	2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	5,9	5.9-5.7	5.7-5.4		5.4-5.2		5.2-5.1		5.1-4.9		4.9-4.7		2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					3.524.469.000,00		3.559.713.690,00		3.737.699.375,00		3.999.338.331,00		4.399.272.164,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)	69,07	69,07	69,26	3.524.469.000,00	69,33	3.559.713.690,00	69,56	3.737.699.375,00	69,67	3.999.338.331,00	69,89	4.399.272.164,00	2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	6,40	6,40	6,30		6,27		6,21		6,19		6,19		2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					3.495.696.900,00		3.530.653.869,00		3.707.186.562,00		3.966.689.622,00		4.363.358.584,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera (KS)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase)	0	45	50	3.495.696.900,00	55	3.530.653.869,00	57	3.707.186.562,00	58	3.966.689.622,00	60	4.363.358.584,00	2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					159.658.926.057,00		153.244.000.000,00		159.797.000.000,00		169.214.000.000,00		183.851.000.000,00	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					31.882.599.089,00		31.682.363.906,00		32.157.282.101,00		32.639.501.848,00		33.619.052.033,00	
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	100	100	31.882.599.089,00	100	31.682.363.906,00	100	32.157.282.101,00	100	32.639.501.848,00	100	33.619.052.033,00	2.15.1.03.0.00.02.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					127.776.326.968,00		121.561.636.094,00		127.639.717.899,00		136.574.498.152,00		150.231.947.967,00	
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Konektivitas Darat (Persentase)	0	0	98	127.776.326.968,00	98	121.561.636.094,00	98	127.639.717.899,00	98	136.574.498.152,00	98	150.231.947.967,00	2.15.1.03.0.00.02.0000 - DINAS PERHUBUNGAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					28.724.179.176,00		22.369.107.432,00		23.081.262.804,00		24.048.801.200,00		25.615.481.319,00	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.616.136.876,00		11.615.554.110,00		11.790.031.816,00		11.967.184.043,00		12.325.702.446,00	
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah					11.616.136.876,00		11.615.554.110,00		11.790.031.816,00		11.967.184.043,00		12.325.702.446,00	2.16.2.20.2.21.03.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					3.720.042.000,00		2.765.888.876,00		2.904.183.320,00		3.107.476.152,00		3.418.223.768,00	
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah					3.720.042.000,00		2.765.888.876,00		2.904.183.320,00		3.107.476.152,00		3.418.223.768,00	2.16.2.20.2.21.03.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					13.388.000.300,00		7.987.664.446,00		8.387.047.668,00		8.974.141.005,00		9.871.555.105,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika					13.388.000.300,00		7.987.664.446,00		8.387.047.668,00		8.974.141.005,00		9.871.555.105,00	2.16.2.20.2.21.03.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					34.027.753.904,00		30.889.000.000,00		31.774.000.000,00		32.948.000.000,00		34.885.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					18.823.754.107,00		18.823.700.153,00		19.105.435.161,00		19.392.635.622,00		19.974.099.184,00	
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	100	100	18.823.754.107,00	100	18.823.700.153,00	100	19.105.435.161,00	100	19.392.635.622,00	100	19.974.099.184,00	2.17.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM														
Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (Persentase)	0	0	0		0		0		0		0		2.17.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					400.000.000,00		100.000.000,00		105.000.000,00		112.350.000,00		123.585.000,00	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	100	100	100	400.000.000,00	100	100.000.000,00	100	105.000.000,00	100	112.350.000,00	100	123.585.000,00	2.17.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					100.000.000,00		100.000.000,00		105.000.000,00		112.350.000,00		123.585.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	52	52	52	100.000.000,00	60	100.000.000,00	62	105.000.000,00	65	112.350.000,00	68	123.585.000,00	2.17.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					925.000.000,00		300.000.000,00		315.000.000,00		337.050.000,00		370.755.000,00	
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)	10	0	10	925.000.000,00	10	300.000.000,00	10	315.000.000,00	10	337.050.000,00	10	370.755.000,00	2.17.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					2.720.000.000,00		2.884.500.000,00		3.028.725.000,00		3.240.735.750,00		3.564.809.325,00	
Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	25	25	26,16	2.720.000.000,00	26,84	2.884.500.000,00	36,69	3.028.725.000,00	57,97	3.240.735.750,00	65	3.564.809.325,00	2.17.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					8.168.000.197,00		6.213.900.207,00		6.524.595.217,00		6.981.316.882,00		7.679.448.571,00	
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	5,2	5,2	5,2	8.168.000.197,00	5,2	6.213.900.207,00	5,2	6.524.595.217,00	5,2	6.981.316.882,00	5,2	7.679.448.571,00	2.17.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	30	30	32		37		43		48		53		2.17.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					2.890.999.600,00		2.466.899.640,00		2.590.244.622,00		2.771.561.746,00		3.048.717.920,00	
Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	1	1	1	2.890.999.600,00	1	2.466.899.640,00	1	2.590.244.622,00	1	2.771.561.746,00	1	3.048.717.920,00	2.17.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					11.552.485.714,94		11.767.000.000,00		11.991.000.000,00		12.250.000.000,00		12.726.000.000,00	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					10.395.179.714,94		10.395.132.075,00		10.550.538.679,00		10.708.706.386,00		11.030.577.025,00	
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	100	100	10.395.179.714,94	100	10.395.132.075,00	100	10.550.538.679,00	100	10.708.706.386,00	100	11.030.577.025,00	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL														

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	363,8	100	100		100		100		100		100		2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					551.988.000,00		715.400.000,00		751.170.000,00		803.751.900,00		884.127.090,00	
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	0,47	0,31	0,25	551.988.000,00	0,19	715.400.000,00	0,16	751.170.000,00	0,14	803.751.900,00	0,12	884.127.090,00	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					305.933.000,00		355.986.000,00		373.785.300,00		399.950.271,00		439.945.298,00	
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelajaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) (%)	89,90	88,82	88,85	305.933.000,00	88,88	355.986.000,00	88,90	373.785.300,00	88,92	399.950.271,00	88,95	439.945.298,00	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					219.385.000,00		220.481.925,00		231.506.021,00		247.711.443,00		272.482.587,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	100	100	100	219.385.000,00	100	220.481.925,00	100	231.506.021,00	100	247.711.443,00	100	272.482.587,00	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					80.000.000,00		80.000.000,00		84.000.000,00		89.880.000,00		98.868.000,00	
Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	100	100	100	80.000.000,00	100	80.000.000,00	100	84.000.000,00	100	89.880.000,00	100	98.868.000,00	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					26.201.482.522,00		20.253.000.000,00		20.981.000.000,00		21.995.000.000,00		23.607.000.000,00	
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.144.711.258,47		8.143.993.344,00		8.266.543.012,00		8.390.531.022,00		8.642.084.125,00	
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	100	100	8.144.711.258,47	100	8.143.993.344,00	100	8.266.543.012,00	100	8.390.531.022,00	100	8.642.084.125,00	2.19.8.01.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					1.716.000.000,00		914.389.244,00		960.108.706,00		1.027.316.316,00		1.130.047.947,00	
Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	50	60	70	1.716.000.000,00	80	914.389.244,00	85	960.108.706,00	90	1.027.316.316,00	100	1.130.047.947,00	2.19.8.01.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					15.340.771.263,53		10.042.617.412,00		10.544.748.282,00		11.282.880.662,00		12.411.168.728,00	
Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas (Persentase)	60	65	70	15.340.771.263,53	75	10.042.617.412,00	80	10.544.748.282,00	85	11.282.880.662,00	90	12.411.168.728,00	2.19.8.01.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					1.000.000.000,00		1.152.000.000,00		1.209.600.000,00		1.294.272.000,00		1.423.699.200,00	
Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	50	60	70	1.000.000.000,00	80	1.152.000.000,00	85	1.209.600.000,00	90	1.294.272.000,00	100	1.423.699.200,00	2.19.8.01.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					369.895.100,00		107.642.568,00		113.024.696,00		120.936.425,00		133.030.068,00	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					369.895.100,00		107.642.568,00		113.024.696,00		120.936.425,00		133.030.068,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tercapainya kolaborasi, intregrasi dan standarisasi dalam pneyelenggaraan sistem statistikNasional (SSN)					369.895.100,00		107.642.568,00		113.024.696,00		120.936.425,00		133.030.068,00	2.16.2.20.2.21.03.00 00 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					825.000.000,00		429.250.000,00		450.712.500,00		482.262.375,00		530.488.613,00	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					825.000.000,00		429.250.000,00		450.712.500,00		482.262.375,00		530.488.613,00	
Meningkatnya keamanan siber dan sandi linfkungan Pemerintah Daerah					825.000.000,00		429.250.000,00		450.712.500,00		482.262.375,00		530.488.613,00	2.16.2.20.2.21.03.00 00 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					3.167.594.200,00		763.000.000,00		801.150.000,00		857.230.500,00		942.953.550,00	
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					3.107.595.300,00		700.000.000,00		735.000.000,00		786.450.000,00		865.095.000,00	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan					3.107.595.300,00		700.000.000,00		735.000.000,00		786.450.000,00		865.095.000,00	1.01.2.22.0.00.01.00 00 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL														

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional														1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH														
Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah														1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					29.999.000,00		33.000.000,00		34.650.000,00		37.075.500,00		40.783.050,00	
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan					29.999.000,00		33.000.000,00		34.650.000,00		37.075.500,00		40.783.050,00	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					29.999.900,00		30.000.000,00		31.500.000,00		33.705.000,00		37.075.500,00	
Meningkatnya tata kelola museum					29.999.900,00		30.000.000,00		31.500.000,00		33.705.000,00		37.075.500,00	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					10.083.611.757,00		10.028.150.000,00		10.204.857.500,00		10.401.377.525,00		10.773.015.277,00	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					9.278.473.257,00		9.277.650.000,00		9.416.832.500,00		9.558.190.775,00		9.845.509.852,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	100	100	9.278.473.257,00	100	9.277.650.000,00	100	9.416.832.500,00	100	9.558.190.775,00	100	9.845.509.852,00	2.23.2.24.0.00.02.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					805.138.500,00		750.500.000,00		788.025.000,00		843.186.750,00		927.505.425,00	
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Indeks pembangunan literasi masyarakat (Indeks)	85,47	86	86,5	805.138.500,00	87	750.500.000,00	87,5	788.025.000,00	88	843.186.750,00	88,5	927.505.425,00	2.23.2.24.0.00.02.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	70,01	74	76		77		78		80		81		2.23.2.24.0.00.02.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					262.472.800,00		305.850.000,00		321.142.500,00		343.622.475,00		377.984.723,00	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					237.471.500,00		210.900.000,00		221.445.000,00		236.946.150,00		260.640.765,00	
Meningkatnya Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah (Nilai)	83,91	84	85	237.471.500,00	86	210.900.000,00	87	221.445.000,00	88	236.946.150,00	89	260.640.765,00	2.23.2.24.0.00.02.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					25.001.300,00		76.950.000,00		80.797.500,00		86.453.325,00		95.098.658,00	
Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip sesuai NSPK	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah (Nilai)	83,91	84	85	25.001.300,00	86	76.950.000,00	87	80.797.500,00	88	86.453.325,00	89	95.098.658,00	2.23.2.24.0.00.02.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.04 - PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP					0,00		18.000.000,00		18.900.000,00		20.223.000,00		22.245.300,00	
Meningkatnya Akses masyarakat terhadap penggunanaan arsip yang bersifat tertutup	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah (Nilai)	83,91	84	85	0,00	86	18.000.000,00	87	18.900.000,00	88	20.223.000,00	89	22.245.300,00	2.23.2.24.0.00.02.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					5.374.509.736,65		5.565.122.933,00		5.843.379.079,00		6.252.415.616,00		6.877.657.178,00	
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah														
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN					2.572.205.336,65		2.585.066.363,00		2.714.319.681,00		2.904.322.059,00		3.194.754.265,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
PERIKANAN TANGKAP														
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	30.258,94	32.522,42	33.518,35	2.572.205.336,65	34.456,91	2.585.066.363,00	35.524,63	2.714.319.681,00	36.341,63	2.904.322.059,00	37.654,45	3.194.754.265,00	2.09.3.25.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					1.765.343.200,00		1.937.910.564,00		2.034.806.092,00		2.177.242.519,00		2.394.966.771,00	
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	2.665,35	2.752,95	2.768,98	1.765.343.200,00	2.798,53	1.937.910.564,00	2.820,29	2.034.806.092,00	2.836,63	2.177.242.519,00	2.870,73	2.394.966.771,00	2.09.3.25.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					35.000.000,00		35.175.000,00		36.933.750,00		39.519.113,00		43.471.024,00	
Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati	Jumlah luas kawasan konservasi perairan Laut (Km2)	21,89	21,89	21,89	35.000.000,00	21,89	35.175.000,00	21,89	36.933.750,00	21,89	39.519.113,00	21,89	43.471.024,00	2.09.3.25.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					1.001.961.200,00		1.006.971.006,00		1.057.319.556,00		1.131.331.925,00		1.244.465.118,00	
meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	47,86	50,25	52,77	1.001.961.200,00	55,40	1.006.971.006,00	58,17	1.057.319.556,00	61,08	1.131.331.925,00	64,13	1.244.465.118,00	2.09.3.25.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					29.029.435.445,00		27.229.000.000,00		27.989.000.000,00		28.988.000.000,00		30.648.000.000,00	
3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					18.203.657.492,84		17.186.104.077,00		17.443.959.281,00		17.704.806.431,00		18.236.487.074,00	
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	100	100	18.203.657.492,84	100	17.186.104.077,00	100	17.443.959.281,00	100	17.704.806.431,00	100	18.236.487.074,00	3.26.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					4.705.936.652,16		4.550.996.019,00		4.778.545.820,00		5.113.044.027,00		5.624.348.430,00	
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	10	10	10	4.705.936.652,16	10	4.550.996.019,00	10	4.778.545.820,00	10	5.113.044.027,00	10	5.624.348.430,00	3.26.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					3.598.950.400,00		3.634.939.904,00		3.816.686.899,00		4.083.854.982,00		4.492.240.480,00	
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	10	10	10	3.598.950.400,00	10	3.634.939.904,00	10	3.816.686.899,00	10	4.083.854.982,00	10	4.492.240.480,00	3.26.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL														
Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif														3.26.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					2.520.890.900,00		1.856.960.000,00		1.949.808.000,00		2.086.294.560,00		2.294.924.016,00	
Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	10	10	10	2.520.890.900,00	10	1.856.960.000,00	10	1.949.808.000,00	10	2.086.294.560,00	10	2.294.924.016,00	3.26.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					43.466.291.401,00		43.329.782.000,00		43.493.321.100,00		45.027.883.577,00		47.569.871.935,00	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					25.800.916.644,00		25.800.111.671,00		26.187.167.254,00		26.580.298.962,00		27.377.528.858,00	
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	75	100	100	25.800.916.644,00	100	25.800.111.671,00	100	26.187.167.254,00	100	26.580.298.962,00	100	27.377.528.858,00	3.27.3.28.0.00.02.0000 - DINAS PERTANIAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					6.194.228.400,00		4.955.382.720,00		5.203.151.856,00		5.567.372.486,00		6.124.109.735,00	
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)	90	92	94	6.194.228.400,00	96	4.955.382.720,00	98	5.203.151.856,00	100	5.567.372.486,00	100	6.124.109.735,00	3.27.3.28.0.00.02.0000 - DINAS PERTANIAN
	Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase)	90	92	94		96		98		100		100		3.27.3.28.0.00.02.0000 - DINAS PERTANIAN
	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (%)	5,14	5,4	5,7		6		6,3		6,6		6,9		3.27.3.28.0.00.02.0000 - DINAS PERTANIAN
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					10.094.042.957,00		9.589.340.809,00		10.068.807.850,00		10.773.624.399,00		11.850.986.839,00	
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	2.500	2.500	2.500	10.094.042.957,00	2.500	9.589.340.809,00	2.500	10.068.807.850,00	2.500	10.773.624.399,00	2.500	11.850.986.839,00	3.27.3.28.0.00.02.0000 - DINAS PERTANIAN
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					432.731.800,00		1.346.185.440,00		1.363.494.712,00		1.388.939.342,00		1.427.833.276,00	
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen)	50	45	40	432.731.800,00	35	1.346.185.440,00	30	1.363.494.712,00	25	1.388.939.342,00	20	1.427.833.276,00	3.27.3.28.0.00.02.0000 - DINAS PERTANIAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase)	25	26,3	27,6		28,9		30,4		31,9		33,5		3.27.3.28.0.00.02.0000 - DINAS PERTANIAN
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					276.850.000,00		221.480.000,00		232.554.000,00		248.832.780,00		273.716.058,00	
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	90	90	90	276.850.000,00	90	221.480.000,00	90	232.554.000,00	90	248.832.780,00	90	273.716.058,00	3.27.3.28.0.00.02.0000 - DINAS PERTANIAN
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan (Persentase)	50	51	52	0,00	53	0,00	54	0,00	55	0,00	56	0,00	3.27.3.28.0.00.02.0000 - DINAS PERTANIAN
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					667.521.600,00		1.417.281.360,00		438.145.428,00		468.815.608,00		515.697.169,00	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	30	40	50	667.521.600,00	60	1.417.281.360,00	70	438.145.428,00	80	468.815.608,00	90	515.697.169,00	3.27.3.28.0.00.02.0000 - DINAS PERTANIAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi (Persentase)	50	75	80		85		90		95		95		3.27.3.28.0.00.02.0000 - DINAS PERTANIAN
3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					139.816.000,00		1.169.218.000,00		1.177.678.900,00		1.190.116.423,00		1.209.128.065,00	
3.28.04 - PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA					139.816.000,00		1.169.218.000,00		1.177.678.900,00		1.190.116.423,00		1.209.128.065,00	
Meingkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya	Indeks Keanekaragaman Hayati (Angka)	0	0	0	139.816.000,00	0	1.169.218.000,00	0	1.177.678.900,00	0	1.190.116.423,00	0	1.209.128.065,00	3.27.3.28.0.00.02.0000 - DINAS PERTANIAN
3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL														
3.29.05 - PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN														
Meningkatnya tata kelola energi baru terbarukan														
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					57.950.889.597,00		52.977.000.000,00		54.188.000.000,00		55.689.000.000,00		58.296.000.000,00	
3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					36.820.666.426,00		41.072.821.463,00		41.688.612.537,00		42.314.655.413,00		43.584.220.955,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	100	100	36.820.666.426,00	100	41.072.821.463,00	100	41.688.612.537,00	100	42.314.655.413,00	100	43.584.220.955,00	3.30.5.02.0.00.01.0000 - DINAS PERDAGANGAN
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					40.000.000,00		32.000.000,00		33.600.000,00		35.952.000,00		39.547.200,00	
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	100	100	100	40.000.000,00	100	32.000.000,00	100	33.600.000,00	100	35.952.000,00	100	39.547.200,00	3.30.5.02.0.00.01.0000 - DINAS PERDAGANGAN
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					16.082.102.998,00		7.865.682.398,00		8.258.966.518,00		8.837.094.175,00		9.720.803.592,00	
Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan dan Distibusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	100	100	100	16.082.102.998,00	100	7.865.682.398,00	100	8.258.966.518,00	100	8.837.094.175,00	100	9.720.803.592,00	3.30.5.02.0.00.01.0000 - DINAS PERDAGANGAN
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					326.717.800,00		261.374.240,00		274.442.952,00		293.653.959,00		323.019.355,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	100	100	100	326.717.800,00	100	261.374.240,00	100	274.442.952,00	100	293.653.959,00	100	323.019.355,00	3.30.5.02.0.00.01.0000 - DINAS PERDAGANGAN
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					50.000.000,00		40.000.000,00		42.000.000,00		44.940.000,00		49.434.000,00	
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang (Nilai)	2.575,25	2.675,25	2.775,25	50.000.000,00	2.775,25	40.000.000,00	2.785,25	42.000.000,00	2.875,25	44.940.000,00	2.875,25	49.434.000,00	3.30.5.02.0.00.01.0000 - DINAS PERDAGANGAN
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					589.176.347,00		471.341.078,00		494.908.131,00		529.551.701,00		582.506.871,00	
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	100	100	100	589.176.347,00	100	471.341.078,00	100	494.908.131,00	100	529.551.701,00	100	582.506.871,00	3.30.5.02.0.00.01.0000 - DINAS PERDAGANGAN
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					4.042.226.026,00		3.233.780.821,00		3.395.469.862,00		3.633.152.752,00		3.996.468.027,00	
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)	100	100	100	4.042.226.026,00	100	3.233.780.821,00	100	3.395.469.862,00	100	3.633.152.752,00	100	3.996.468.027,00	3.30.5.02.0.00.01.0000 - DINAS PERDAGANGAN
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					789.545.000,00		929.712.900,00		976.198.545,00		1.044.532.443,00		1.148.985.687,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					789.545.000,00		884.712.900,00		928.948.545,00		993.974.943,00		1.093.372.437,00	
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)	2	2,2	2,6	789.545.000,00	2,85	884.712.900,00	3,1	928.948.545,00	3,25	993.974.943,00	3,42	1.093.372.437,00	2.07.3.31.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					0,00		20.000.000,00		21.000.000,00		22.470.000,00		24.717.000,00	
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)	45	56	60	0,00	65	20.000.000,00	68	21.000.000,00	72	22.470.000,00	75	24.717.000,00	2.07.3.31.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					0,00		25.000.000,00		26.250.000,00		28.087.500,00		30.896.250,00	
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (Persentase)	6	8,5	12	0,00	15,6	25.000.000,00	21	26.250.000,00	25	28.087.500,00	28,8	30.896.250,00	2.07.3.31.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					119.393.878.435,13		94.468.000.000,00		97.782.000.000,00		102.380.000.000,00		109.716.000.000,00	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					76.539.328.143,00		76.210.495.102,00		78.611.619.856,00		81.867.693.247,00		87.152.462.571,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	100	100	40.248.942.936,00	100	40.248.658.043,00	100	40.851.690.944,00	100	41.464.569.311,00	100	42.709.026.242,00	4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	100	100	680.000.000,00	100	575.000.000,00	100	603.750.000,00	100	646.012.500,00	100	710.613.750,00	4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	100	100	32.630.385.207,00	100	31.711.837.059,00	100	33.297.428.912,00	100	35.628.248.936,00	100	39.191.073.829,00	4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	100	100	2.980.000.000,00	100	3.675.000.000,00	100	3.858.750.000,00	100	4.128.862.500,00	100	4.541.748.750,00	4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					41.857.843.292,13		17.200.493.925,00		18.060.518.622,00		19.324.754.925,00		21.257.230.418,00	
meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (%)	0	100	100	1.003.240.100,00	100	1.003.240.100,00	100	1.053.402.105,00	100	1.127.140.252,00	100	1.239.854.278,00	4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (%)	0	100	100	39.849.612.292,13	100	14.966.281.235,00	100	15.714.595.297,00	100	16.814.616.968,00	100	18.496.078.664,00	4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (%)	0	100	100	685.170.900,00	100	873.022.590,00	100	916.673.720,00	100	980.840.880,00	100	1.078.924.968,00	4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (%)	0	100	100	319.820.000,00	100	357.950.000,00	100	375.847.500,00	100	402.156.825,00	100	442.372.508,00	4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					996.707.000,00		1.057.010.973,00		1.109.861.522,00		1.187.551.828,00		1.306.307.011,00	
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang di tindaklanjuti	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti (%)	0	100	100	204.000.000,00	100	342.010.973,00	100	359.111.522,00	100	384.249.328,00	100	422.674.261,00	4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang di tindaklanjuti	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti (%)	0	100	100	644.228.000,00	100	515.000.000,00	100	540.750.000,00	100	578.602.500,00	100	636.462.750,00	4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang di tindaklanjuti	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti (%)	0	100	100	148.479.000,00	100	200.000.000,00	100	210.000.000,00	100	224.700.000,00	100	247.170.000,00	4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					88.413.119.568,00		79.430.000.000,00		81.626.000.000,00		84.508.000.000,00		89.301.000.000,00	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					52.847.227.076,52		50.728.879.364,00		51.489.823.332,00		52.262.290.965,00		53.830.720.061,00	
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	100	100	52.847.227.076,52	100	50.728.879.364,00	100	51.489.823.332,00	100	52.262.290.965,00	100	53.830.720.061,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					35.565.892.491,48		28.701.120.636,00		30.136.176.668,00		32.245.709.035,00		35.470.279.939,00	
meningkatnya kualitas persidangan dan kajian perundang-undangan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)	100	100	100	35.565.892.491,48	100	28.701.120.636,00	100	30.136.176.668,00	100	32.245.709.035,00	100	35.470.279.939,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase)	50	50	50		50		50		50		50		4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan pengawasan														
5.01 - PERENCANAAN					16.474.688.822,00		16.447.327.492,00		16.761.693.368,00		17.052.859.293,00		17.808.865.922,00	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					13.146.160.322,00		13.146.157.317,00		13.342.965.184,00		13.542.672.746,00		13.949.040.021,00	
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	100	100	13.146.160.322,00	100	13.146.157.317,00	100	13.342.965.184,00	100	13.542.672.746,00	100	13.949.040.021,00	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					2.403.353.500,00		2.375.070.000,00		2.446.323.000,00		2.519.713.000,00		2.745.305.000,00	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan sasaran RKPD dengan RPJMD (%)	0	0	100	2.403.353.500,00	100	2.375.070.000,00	100	2.446.323.000,00	100	2.519.713.000,00	100	2.745.305.000,00	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					925.175.000,00		926.100.175,00		972.405.184,00		990.473.547,00		1.114.520.901,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase keselarasan sasaran RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia (%)	0	0	100	365.175.000,00	100	355.000.000,00	100	372.000.000,00	100	372.000.000,00	100	406.000.000,00	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase keselarasan sasaran RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada bidang infrastruktur dan kewilayahan (%)	0	0	100	400.000.000,00	100	400.000.000,00	100	400.000.000,00	100	418.000.000,00	100	458.000.000,00	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase keselarasan sasaran RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada bidang perekonomian dan sumber daya alam (%)	0	0	100	160.000.000,00	100	171.100.175,00	100	200.405.184,00	100	200.473.547,00	100	250.520.901,00	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.02 - KEUANGAN					139.940.931.629,62		151.901.000.000,00		166.087.000.000,00		186.728.000.000,00		206.616.000.000,00	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					83.933.028.204,62		97.384.169.297,00		108.967.811.653,00		125.824.815.447,00		140.087.180.534,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya efektivitas dan efisien pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	100	100	20.038.287.422,62	100	18.837.593.117,00	100	19.119.972.773,00	100	19.407.650.867,00	100	19.989.015.954,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Meningkatnya efektivitas dan efisien pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	100	100	63.894.740.782,00	100	78.546.576.180,00	100	89.847.838.880,00	100	106.417.164.580,00	100	120.098.164.580,00	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					25.194.341.221,00		34.681.836.306,00		36.415.928.121,00		38.965.043.090,00		42.861.547.399,00	
Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)	43,95	41,10	51,57	1.806.721.688,00	30	2.463.921.800,00	30	2.552.119.454,00	30	2.643.677.031,00	30	2.722.987.342,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)	11,87	31,20	35,60		40		40		40		40		5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase Penurunan SILPA (Persentase)	33,33	33,33	33,33	22.532.768.833,00	33,33	31.347.696.811,00	33,33	32.849.376.797,25	33,33	35.278.893.165,00	33,33	39.048.963.521,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	96,20	96,25	96,35		96,37		96,39		96,40		96,41		5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	100	100	100	854.850.700,00	100	870.217.695,00	100	1.014.431.869,75	100	1.042.472.894,00	100	1.089.596.536,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					19.704.663.854,00		15.390.570.577,00		16.160.099.106,00		17.291.306.043,00		19.020.436.647,00	
Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	3,09	6,06	3,20	19.704.663.854,00	3,00	15.390.570.577,00	3,00	16.160.099.106,00	3,00	17.291.306.043,00	3,00	19.020.436.647,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					11.108.898.350,00		4.444.423.820,00		4.543.161.120,00		4.646.835.420,00		4.646.835.420,00	
Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase Peningkatan PAD (%)	0,58	26,94	12,37	4.440.979.800,00	91,72	3.352.948.670,00	2,35	3.422.783.270,00	2,66	3.496.109.770,00	1,07	3.496.109.770,00	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH
Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (Persentase)	0	100	100	6.478.259.050,00	100	573.529.150,00	100	576.534.550,00	100	579.690.250,00	100	579.690.250,00	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (Persentase)	0	100	100	189.659.500,00	100	517.946.000,00	100	543.843.300,00	100	571.035.400,00	100	571.035.400,00	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.03 - KEPEGAWAIAN					13.585.292.967,00		15.150.000.000,00		15.769.000.000,00		16.607.000.000,00		17.463.000.000,00	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					10.415.080.067,00		11.495.000.000,00		11.884.000.000,00		12.488.500.000,00		13.180.500.000,00	
Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	100	100	10.415.080.067,00	100	11.495.000.000,00	100	11.884.000.000,00	100	12.488.500.000,00	100	13.180.500.000,00	5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					3.170.212.900,00		3.655.000.000,00		3.885.000.000,00		4.118.500.000,00		4.282.500.000,00	
Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase)	90	90	90	1.304.393.900,00	90	1.380.000.000,00	90	1.380.000.000,00	90	1.390.000.000,00	90	1.522.500.000,00	5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	30	35	35	1.260.000.000,00	35	1.575.000.000,00	40	1.825.000.000,00	40	2.026.000.000,00	40	2.035.000.000,00	5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (Persentase)	50	60	65	296.647.500,00	70	310.000.000,00	70	310.000.000,00	75	312.500.000,00	75	325.000.000,00	5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Meningkanya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)	95	95	98	309.171.500,00	98	390.000.000,00	98	370.000.000,00	98	390.000.000,00	100	400.000.000,00	5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					5.249.999.850,00		4.515.000.000,00		4.515.000.000,00		4.515.000.000,00		5.020.000.000,00	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					5.249.999.850,00		4.515.000.000,00		4.515.000.000,00		4.515.000.000,00		5.020.000.000,00	
Persentase pegawai yang pemahamannya meningkat setelah mengikuti diklat/pelatihan/e-learning	Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional (Persentase)	18	20	25	5.249.999.850,00	25	4.515.000.000,00	30	4.515.000.000,00	30	4.515.000.000,00	35	5.020.000.000,00	5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan (Persentase)	0	0	0		0		0		0		0		5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi (Persentase)	0	0	0		0		0		0		0		5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Teknis (Persentase)	0	0	0		0		0		0		0		5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					331.654.000,00		362.672.508,00		428.306.632,00		606.140.707,00		668.134.078,00	
5.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah														5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					331.654.000,00		231.654.000,00		281.654.000,00		331.654.000,00		331.654.000,00	
Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase rekomendasi kelitbangan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	331.654.000,00	100	231.654.000,00	100	281.654.000,00	100	331.654.000,00	100	331.654.000,00	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan														5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah														5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah														5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					0,00		131.018.508,00		146.652.632,00		274.486.707,00		336.480.078,00	
Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan														5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan daerah														5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah														5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	Persentase Fasilitasi Pembinanaan Bimbingan, dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah (%)	0	0	0	0,00	80	131.018.508,00	83	146.652.632,00	85	274.486.707,00	87	336.480.078,00	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					23.302.556.527,42		21.140.000.000,00		21.517.000.000,00		21.938.000.000,00		22.730.000.000,00	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					21.132.543.427,42		19.437.204.438,00		19.729.064.660,00		20.024.909.186,00		20.625.600.104,00	
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B (%)	88,95	86	87	21.132.543.427,42	88	19.437.204.438,00	89	19.729.064.660,00	90	20.024.909.186,00	91	20.625.600.104,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					1.512.447.800,00		1.259.930.560,00		1.322.927.088,00		1.415.531.984,00		1.557.085.183,00	
Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	89	90	91	1.512.447.800,00	92	1.259.930.560,00	93	1.322.927.088,00	94	1.415.531.984,00	95	1.557.085.183,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
proses dan kewenangan														
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					657.565.300,00		442.865.002,00		465.008.252,00		497.558.830,00		547.314.713,00	
Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)	Terkelola dan Terukur	Terkelola dan Terukur	Terkelola dan Terukur	657.565.300,00	Terkelola dan Terukur	442.865.002,00	Terkelola dan Terukur	465.008.252,00	Terkelola dan Terukur	497.558.830,00	Terkelola dan Terukur	547.314.713,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT
	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	Dikelola (Managed)	Dikelola (Managed)	Dikelola (Managed)		Dikelola (Managed)		Dikelola (Managed)		Dikelola (Managed)		Dikelola (Managed)		6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT
7.01 - KECAMATAN					293.082.681.070,00		281.447.000.000,00		289.643.000.000,00		300.545.000.000,00		318.492.000.000,00	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					170.974.989.048,27		168.023.655.698,00		172.801.635.485,00		174.428.634.444,00		178.721.333.383,00	
Meningkatnya efektivitas dan efesiensi pelaksanaan urusan pemerintah daerah	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	100	100	14.825.014.494,19	100	14.528.631.707,00	100	14.746.763.292,00	100	14.968.356.723,00	100	15.416.792.395,00	7.01.2.13.0.00.01.0000 - KECAMATAN PADANG BARAT

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya efektivitas dan efesiensi pelaksanaan urusan pemerintah daerah	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	100	100	16.129.993.779,08	100	16.147.865.972,00	100	16.389.709.270,00	100	16.635.548.919,00	100	17.134.703.811,00	7.01.2.13.0.00.02.0000 - KECAMATAN PADANG TIMUR
Meningkatnya efektivitas dan efesiensi pelaksanaan urusan pemerintah daerah	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	100	100	13.737.402.637,00	100	13.500.565.496,00	100	13.702.743.772,00	100	13.908.715.836,00	100	14.326.287.419,00	7.01.2.13.0.00.03.0000 - KECAMATAN PADANG UTARA
Meningkatnya efektivitas dan efesiensi pelaksanaan urusan pemerintah daerah	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	100	100	17.953.370.931,00	100	17.399.552.304,00	100	17.660.129.919,00	100	17.924.659.013,00	100	18.463.324.915,00	7.01.2.13.0.00.04.0000 - KECAMATAN PADANG SELATAN
Meningkatnya efektivitas dan efesiensi pelaksanaan urusan pemerintah daerah	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	100	100	11.869.128.620,00	100	11.833.278.210,00	100	12.010.942.120,00	100	12.191.208.070,00	100	12.556.628.876,00	7.01.2.13.0.00.05.0000 - KECAMATAN NANGGALO
Meningkatnya efektivitas dan efesiensi pelaksanaan urusan pemerintah daerah	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	100	100	16.042.295.545,00	100	16.165.852.070,00	100	18.665.891.677,00	100	17.981.088.567,00	100	17.579.732.919,00	7.01.2.13.0.00.06.0000 - KECAMATAN KURANJI
Meningkatnya efektivitas dan efesiensi pelaksanaan urusan pemerintah daerah	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	100	100	22.435.412.178,00	100	21.703.728.407,00	100	22.028.764.827,00	100	22.359.188.365,00	100	23.030.507.201,00	7.01.2.13.0.00.07.0000 - KECAMATAN LUBUK BEGALUNG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya efektivitas dan efesiensi pelaksanaan urusan pemerintah daerah	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	100	100	13.309.120.674,00	100	12.361.274.598,00	100	12.547.188.328,00	100	12.734.651.511,00	100	13.117.616.662,00	7.01.2.13.0.00.08.0000 - KECAMATAN LUBUK KILANGAN
Meningkatnya efektivitas dan efesiensi pelaksanaan urusan pemerintah daerah	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	100	100	13.837.711.024,00	100	13.768.339.216,00	100	13.975.006.177,00	100	14.184.376.610,00	100	14.609.514.271,00	7.01.2.13.0.00.09.0000 - KECAMATAN PAUH
Meningkatnya efektivitas dan efesiensi pelaksanaan urusan pemerintah daerah	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	100	100	20.253.380.988,00	100	20.071.010.950,00	100	20.372.411.497,00	100	20.677.970.302,00	100	21.297.767.332,00	7.01.2.13.0.00.10.0000 - KECAMATAN KOTO TANGAH
Meningkatnya efektivitas dan efesiensi pelaksanaan urusan pemerintah daerah	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	100	100	10.582.158.178,00	100	10.543.556.768,00	100	10.702.084.606,00	100	10.862.870.528,00	100	11.188.457.582,00	7.01.2.13.0.00.11.0000 - KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					2.697.623.598,00		2.305.654.897,00		2.416.187.643,00		2.578.670.777,00		2.827.037.855,00	
meningkatnya pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai SOP	Persentase terlaksananya penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	100	100	100	242.222.798,00	100	197.831.520,00	100	207.723.096,00	100	222.263.713,00	100	244.490.084,00	7.01.2.13.0.00.01.0000 - KECAMATAN PADANG BARAT

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
meningkatnya pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai SOP	Persentase terlaksananya penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	100	100	100	380.670.200,00	100	76.861.980,00	100	80.705.079,00	100	86.354.435,00	100	94.989.878,00	7.01.2.13.0.00.02.0000 - KECAMATAN PADANG TIMUR
meningkatnya pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai SOP	Persentase terlaksananya penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	100	100	100	177.994.400,00	100	191.360.700,00	100	200.928.735,00	100	214.993.746,00	100	236.493.121,00	7.01.2.13.0.00.03.0000 - KECAMATAN PADANG UTARA
Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai SOP	Persentase terlaksananya penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	100	100	100	401.552.000,00	100	276.156.900,00	100	289.964.745,00	100	310.262.277,00	100	341.288.505,00	7.01.2.13.0.00.04.0000 - KECAMATAN PADANG SELATAN
Meningkatnya pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai SOP	Persentase terlaksananya penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	100	100	100	274.255.200,00	100	161.827.200,00	100	169.918.560,00	100	181.812.859,00	100	199.994.145,00	7.01.2.13.0.00.05.0000 - KECAMATAN NANGGALO
Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai SOP	Persentase terlaksananya penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	100	100	100	94.952.100,00	100	95.000.000,00	100	95.000.000,00	100	95.000.000,00	100	95.000.000,00	7.01.2.13.0.00.06.0000 - KECAMATAN KURANJI
meningkatnya pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai SOP	Persentase terlaksananya penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	100	100	100	501.542.500,00	100	729.473.220,00	100	765.946.881,00	100	819.563.163,00	100	901.519.479,00	7.01.2.13.0.00.07.0000 - KECAMATAN LUBUK BEGALUNG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
meningkatnya pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai SOP	Persentase terlaksananya penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	100	100	100	91.553.600,00	100	92.469.136,00	100	97.092.593,00	100	103.889.074,00	100	114.277.982,00	7.01.2.13.0.00.08.0000 - KECAMATAN LUBUK KILANGAN
meningkatnya pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai SOP	Persentase terlaksananya penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	100	100	100	197.866.100,00	100	199.844.761,00	100	209.836.999,00	100	224.525.589,00	100	246.978.148,00	7.01.2.13.0.00.09.0000 - KECAMATAN PAUH
meningkatnya pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai SOP	Persentase terlaksananya penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	100	100	100	214.999.500,00	100	214.499.350,00	100	225.224.318,00	100	240.990.020,00	100	265.089.022,00	7.01.2.13.0.00.10.0000 - KECAMATAN KOTO TANGAH
meningkatnya pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai SOP	Persentase terlaksananya penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	100	100	100	120.015.200,00	100	70.330.130,00	100	73.846.637,00	100	79.015.901,00	100	86.917.491,00	7.01.2.13.0.00.11.0000 - KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					57.252.396.879,97		56.732.231.630,00		57.100.127.083,00		62.626.444.729,00		70.550.615.458,00	
meningktanya partisipasi swadaya kelurahan	Persentase terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan (%)	100	100	100	4.298.182.523,81	100	4.164.428.877,00	100	4.372.650.321,00	100	4.678.735.843,00	100	5.146.609.428,00	7.01.2.13.0.00.01.0000 - KECAMATAN PADANG BARAT

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
meningkatnya partisipasi swadaya masyarakat	Persentase terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan (%)	100	100	100	4.283.240.108,16	100	3.642.357.785,00	100	3.824.475.675,00	100	4.092.188.972,00	100	4.501.407.869,00	7.01.2.13.0.00.02.0000 - KECAMATAN PADANG TIMUR
meningkatnya partisipasi swadaya masyarakat	Persentase terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan (%)	100	100	100	2.175.002.650,00	100	2.169.431.975,00	100	2.277.903.573,00	100	2.437.356.823,00	100	2.681.092.506,00	7.01.2.13.0.00.03.0000 - KECAMATAN PADANG UTARA
meningktanya partisipasi swadaya masyarakat	Persentase terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan (%)	100	100	100	4.477.935.582,00	100	4.520.464.153,00	100	4.746.487.360,00	100	5.078.741.476,00	100	5.586.615.623,00	7.01.2.13.0.00.04.0000 - KECAMATAN PADANG SELATAN
meningkatnya partisipasi swadaya masyarakat	Persentase terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan (%)	100	100	100	4.343.182.582,00	100	4.386.496.036,00	100	4.605.820.838,00	100	4.928.228.296,00	100	5.421.051.126,00	7.01.2.13.0.00.05.0000 - KECAMATAN NANGGALO
meningkatnya partisipasi swadaya masyarakat	Persentase terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan (%)	100	100	100	10.732.641.473,00	100	10.763.046.031,00	100	8.832.482.204,00	100	10.980.064.711,00	100	13.739.597.436,00	7.01.2.13.0.00.06.0000 - KECAMATAN KURANJI
meningkatnya partisipasi swadaya masyarakat	Persentase terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan (%)	100	100	100	8.236.196.600,00	100	8.294.814.072,00	100	8.709.554.776,00	100	9.319.223.610,00	100	10.251.145.971,00	7.01.2.13.0.00.07.0000 - KECAMATAN LUBUK BEGALUNG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
meningkatnya partisipasi swadaya masyarakat	Persentase terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan (%)	100	100	100	2.297.334.200,00	100	2.320.307.542,00	100	2.436.322.919,00	100	2.606.865.523,00	100	2.867.552.076,00	7.01.2.13.0.00.08.0000 - KECAMATAN LUBUK KILANGAN
meningkatnya partisipasi swadaya masyarakat	Persentase terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan (%)	100	100	100	4.798.119.860,00	100	4.846.101.059,00	100	5.088.406.112,00	100	5.444.594.539,00	100	5.989.053.993,00	7.01.2.13.0.00.09.0000 - KECAMATAN PAUH
meningkatnya partisipasi swadaya masyarakat	Persentase terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan (%)	100	100	100	9.595.596.700,00	100	9.595.596.700,00	100	10.075.376.535,00	100	10.780.652.892,00	100	11.858.718.182,00	7.01.2.13.0.00.10.0000 - KECAMATAN KOTO TANGAH
meningkatnya partisipasi swadaya masyarakat	Persentase terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan (%)	100	100	100	2.014.964.601,00	100	2.029.187.400,00	100	2.130.646.770,00	100	2.279.792.044,00	100	2.507.771.248,00	7.01.2.13.0.00.11.0000 - KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					7.218.343.700,00		8.745.653.813,00		9.182.936.504,00		9.825.742.061,00		10.808.316.266,00	
persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai ketentuan	persentase terlaksananya koordinasi ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	668.450.000,00	100	802.394.500,00	100	842.514.225,00	100	901.490.221,00	100	991.639.243,00	7.01.2.13.0.00.01.0000 - KECAMATAN PADANG BARAT

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Persentase urusan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai ketentuan	persentase terlaksananya koordinasi ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	663.745.000,00	100	797.642.450,00	100	837.524.573,00	100	896.151.293,00	100	985.766.422,00	7.01.2.13.0.00.02.0000 - KECAMATAN PADANG TIMUR
Persentase urusan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai ketentuan	persentase terlaksananya koordinasi ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	554.625.000,00	100	633.068.000,00	100	664.721.400,00	100	711.251.898,00	100	782.377.088,00	7.01.2.13.0.00.03.0000 - KECAMATAN PADANG UTARA
Persentase urusan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai ketentuan	persentase terlaksananya koordinasi ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	811.823.300,00	100	941.323.333,00	100	988.389.500,00	100	1.057.576.765,00	100	1.163.334.441,00	7.01.2.13.0.00.04.0000 - KECAMATAN PADANG SELATAN
Persentase urusan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai ketentuan	persentase terlaksananya koordinasi ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	393.352.900,00	100	377.820.800,00	100	396.711.840,00	100	424.481.669,00	100	466.929.836,00	7.01.2.13.0.00.05.0000 - KECAMATAN NANGGALO
Persentase urusan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai ketentuan	persentase terlaksananya koordinasi ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	594.650.000,00	100	710.484.399,00	100	746.008.619,00	100	798.229.222,00	100	878.052.145,00	7.01.2.13.0.00.06.0000 - KECAMATAN KURANJI
Persentase urusan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai ketentuan	persentase terlaksananya koordinasi ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	1.081.104.400,00	100	1.357.672.300,00	100	1.425.555.915,00	100	1.525.344.829,00	100	1.677.879.312,00	7.01.2.13.0.00.07.0000 - KECAMATAN LUBUK BEGALUNG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Persentase urusan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai ketentuan	persentase terlaksananya koordinasi ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	484.734.900,00	100	539.597.449,00	100	566.577.321,00	100	606.237.734,00	100	666.861.507,00	7.01.2.13.0.00.08.0000 - KECAMATAN LUBUK KILANGAN
Persentase urusan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai ketentuan	persentase terlaksananya koordinasi ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	627.038.200,00	100	709.260.582,00	100	744.723.611,00	100	796.854.264,00	100	876.539.690,00	7.01.2.13.0.00.09.0000 - KECAMATAN PAUH
Persentase urusan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai ketentuan	persentase terlaksananya koordinasi ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	911.320.000,00	100	1.444.615.000,00	100	1.516.845.750,00	100	1.623.024.953,00	100	1.785.327.448,00	7.01.2.13.0.00.10.0000 - KECAMATAN KOTO TANGAH
Persentase urusan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai ketentuan	persentase terlaksananya koordinasi ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	427.500.000,00	100	431.775.000,00	100	453.363.750,00	100	485.099.213,00	100	533.609.134,00	7.01.2.13.0.00.11.0000 - KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					30.611.865.605,00		21.466.900.423,00		22.902.985.444,00		24.279.030.425,00		26.382.413.466,00	
meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai ketentuan	persentase terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan (%)	100	100	100	1.198.526.254,00	100	801.671.996,00	100	841.755.596,00	100	900.678.487,00	100	990.746.336,00	7.01.2.13.0.00.01.0000 - KECAMATAN PADANG BARAT

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai ketentuan	persentase terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan (%)	100	100	100	2.235.940.751,00	100	1.693.670.974,00	100	1.778.354.522,00	100	1.902.839.339,00	100	2.093.123.273,00	7.01.2.13.0.00.02.0000 - KECAMATAN PADANG TIMUR
meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai ketentuan	persentase terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan (%)	100	100	100	1.755.576.000,00	100	1.320.412.929,00	100	1.386.433.575,00	100	1.483.483.926,00	100	1.631.832.318,00	7.01.2.13.0.00.03.0000 - KECAMATAN PADANG UTARA
meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai ketentuan	persentase terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan (%)	100	100	100	2.194.274.900,00	100	1.396.543.010,00	100	1.466.370.161,00	100	1.569.016.072,00	100	1.725.917.679,00	7.01.2.13.0.00.04.0000 - KECAMATAN PADANG SELATAN
meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai ketentuan	persentase terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan (%)	100	100	100	1.828.650.500,00	100	1.451.725.054,00	100	1.524.311.307,00	100	1.631.013.098,00	100	1.794.114.408,00	7.01.2.13.0.00.05.0000 - KECAMATAN NANGGALO
meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai ketentuan	persentase terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan (%)	100	100	100	4.036.399.900,00	100	2.745.200.000,00	100	3.245.200.000,00	100	3.245.200.000,00	100	3.245.200.000,00	7.01.2.13.0.00.06.0000 - KECAMATAN KURANJI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai ketentuan	persentase terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan (%)	100	100	100	3.914.314.100,00	100	2.662.711.401,00	100	2.795.846.971,00	100	2.991.556.259,00	100	3.290.711.885,00	7.01.2.13.0.00.07.0000 - KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai ketentuan	persentase terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan (%)	100	100	100	2.289.860.600,00	100	1.749.138.275,00	100	1.836.595.189,00	100	1.965.156.852,00	100	2.161.672.537,00	7.01.2.13.0.00.08.0000 - KECAMATAN LUBUK KILANGAN
meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai ketentuan	persentase terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan (%)	100	100	100	2.786.509.400,00	100	2.071.236.682,00	100	2.174.798.516,00	100	2.327.034.412,00	100	2.559.737.853,00	7.01.2.13.0.00.09.0000 - KECAMATAN PAUH
meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai ketentuan	persentase terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan (%)	100	100	100	6.914.190.000,00	100	4.608.838.000,00	100	4.839.279.900,00	100	5.178.029.493,00	100	5.695.832.442,00	7.01.2.13.0.00.10.0000 - KECAMATAN KOTO TANGAH
meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai ketentuan	persentase terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan (%)	100	100	100	1.457.623.200,00	100	965.752.102,00	100	1.014.039.707,00	100	1.085.022.487,00	100	1.193.524.735,00	7.01.2.13.0.00.11.0000 - KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					24.327.462.238,76		24.172.903.539,00		25.239.127.841,00		26.806.477.564,00		29.202.283.572,00	
meningkatnya pembinaan dan pengawasan	Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan di Kecamatan (%)	100	100	100	1.646.419.500,00	100	1.631.041.400,00	100	1.712.593.470,00	100	1.832.475.013,00	100	2.015.722.514,00	7.01.2.13.0.00.01.0000 - KECAMATAN PADANG BARAT
meningkatnya pembinaan dan pengawasan	Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan di Kecamatan (%)	100	100	100	2.172.600.838,76	100	2.172.600.839,00	100	2.281.230.881,00	100	2.440.917.042,00	100	2.685.008.747,00	7.01.2.13.0.00.02.0000 - KECAMATAN PADANG TIMUR
meningkatnya pembinaan dan pengawasan	Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan di Kecamatan (%)	100	100	100	1.822.160.900,00	100	1.822.160.900,00	100	1.913.268.945,00	100	2.047.197.771,00	100	2.251.917.548,00	7.01.2.13.0.00.03.0000 - KECAMATAN PADANG UTARA
meningkatnya pembinaan dan pengawasan	Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan di Kecamatan (%)	100	100	100	1.973.960.300,00	100	1.973.960.300,00	100	2.072.658.315,00	100	2.217.744.397,00	100	2.439.518.837,00	7.01.2.13.0.00.04.0000 - KECAMATAN PADANG SELATAN
meningkatnya pembinaan dan pengawasan	Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan di Kecamatan (%)	100	100	100	1.468.852.700,00	100	1.468.852.700,00	100	1.542.295.335,00	100	1.650.256.008,00	100	1.815.281.609,00	7.01.2.13.0.00.05.0000 - KECAMATAN NANGGALO

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
meningkatnya pembinaan dan pengawasan	Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan di Kecamatan (%)	100	100	100	2.848.417.500,00	100	2.848.417.500,00	100	2.848.417.500,00	100	2.848.417.500,00	100	2.848.417.500,00	7.01.2.13.0.00.06.0000 - KECAMATAN KURANJI
meningkatnya pembinaan dan pengawasan	Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan di Kecamatan (%)	100	100	100	3.633.781.200,00	100	3.534.600.600,00	100	3.711.330.630,00	100	3.971.123.774,00	100	4.368.236.152,00	7.01.2.13.0.00.07.0000 - KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
meningkatnya pembinaan dan pengawasan	Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan di Kecamatan (%)	100	100	100	1.360.213.000,00	100	1.360.213.000,00	100	1.428.223.650,00	100	1.528.199.306,00	100	1.681.019.236,00	7.01.2.13.0.00.08.0000 - KECAMATAN LUBUK KILANGAN
meningkatnya pembinaan dan pengawasan	Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan di Kecamatan (%)	100	100	100	1.420.217.700,00	100	1.420.217.700,00	100	1.491.228.585,00	100	1.595.614.586,00	100	1.755.176.045,00	7.01.2.13.0.00.09.0000 - KECAMATAN PAUH
meningkatnya pembinaan dan pengawasan	Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan di Kecamatan (%)	100	100	100	5.108.440.000,00	100	5.108.440.000,00	100	5.363.862.000,00	100	5.739.332.340,00	100	6.313.265.574,00	7.01.2.13.0.00.10.0000 - KECAMATAN KOTO TANGAH
meningkatnya pembinaan dan pengawasan					872.398.600,00		832.398.600,00		874.018.530,00		935.199.827,00		1.028.719.810,00	7.01.2.13.0.00.11.0000 - KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					15.527.770.849,00		14.977.000.000,00		15.482.000.000,00		16.176.000.000,00		17.290.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.979.328.649,00		6.978.557.800,00		7.083.635.690,00		7.189.750.189,00		7.405.125.208,00	
Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	100	100	6.979.328.649,00	100	6.978.557.800,00	100	7.083.635.690,00	100	7.189.750.189,00	100	7.405.125.208,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					2.588.335.600,00		2.388.335.600,00		2.507.752.380,00		2.683.295.047,00		2.951.624.551,00	
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	PERSENTASE TERLAKSANANYA PENINGKATAN PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN (Persentase)	100	100	100	2.588.335.600,00	100	2.388.335.600,00	100	2.507.752.380,00	100	2.683.295.047,00	100	2.951.624.551,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					2.267.708.000,00		2.117.708.000,00		2.223.593.400,00		2.379.244.938,00		2.617.169.432,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya etika dan budaya politik	PERSENTASE TERLAKSANANYA PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK (Persentase)	100	100	100	2.267.708.000,00	100	2.117.708.000,00	100	2.223.593.400,00	100	2.379.244.938,00	100	2.617.169.432,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					446.926.400,00		446.926.400,00		469.272.720,00		502.121.810,00		552.333.991,00	
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakat	PERSENTASE TERLAKSANANYA PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN (Persentase)	100	100	100	446.926.400,00	100	446.926.400,00	100	469.272.720,00	100	502.121.810,00	100	552.333.991,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					989.507.500,00		789.507.500,00		828.982.875,00		887.011.676,00		975.712.844,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)	100	100	100	989.507.500,00	100	789.507.500,00	100	828.982.875,00	100	887.011.676,00	100	975.712.844,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					2.255.964.700,00		2.255.964.700,00		2.368.762.935,00		2.534.576.340,00		2.788.033.974,00	
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	PERSENTASE TERLAKSANANYA PENINGKATAN KEWASPADAAN DINI TERHADAP MASYARAKAT DAN PENANGANAN KONFLIK (Persentase)	100	100	100	2.255.964.700,00	100	2.255.964.700,00	100	2.368.762.935,00	100	2.534.576.340,00	100	2.788.033.974,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TOTAL KESELURUHAN					3319009510295.09		5398000000000.00		5378000000000.00		5376480000000.00		5463250000000.00	

4.2 Indikator Kinerja Makro

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Pepres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa kinerja adalah keluaran atau hasil dari program/kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi pemerintah yang memiliki tujuan: 1) Menemukan informasi penting dari kinerja yang diperlukan dalam menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan tantangan pembangunan yang sedang dihadapi, dan 2) Menemukan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang relevan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Padang berpedoman kepada indikator kinerja yang juga tertuang dalam dokumen perencanaan Kota dan mengacu kepada dokumen perencanaan nasional dan provinsi Sumatera Barat. Indikator Kinerja Makro Pembangunan Kota Padang untuk Tahun 2025-2030 sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel IV- 2 Target Indikator Makro Pembangunan Daerah Kota Padang

NO	INDIKATOR	SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ket
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	4,16	5,73	6,88	7,02	7,09	6,04	Imperatif dari Prov Sumbar
2	PDRB Per Kapita ADHB (Rp. Juta)	Rp. Juta	97,52	109,85	122,87	136,9	152,33	168,93	Imperatif dari Prov Sumbar
3	PDRB Per Kapita ADHK (Rp. Juta)	Rp. Juta	55,71	58,27	61,64	65,33	69,32	72,86	Imperatif dari Prov Sumbar
4	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	84,51	84,82	85,14	85,53	85,93	86,33	Imperatif dari Prov Sumbar
5	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Tahun	75,37	75,57	75,78	75,98	76,19	76,39	Imperatif dari Prov Sumbar
6	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Tahun	16,59	16,6	16,61	16,63	16,64	16,66	Imperatif dari Prov Sumbar
7	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	Tahun	11,69	11,74	11,76	11,79	11,88	11,98	Imperatif dari Prov Sumbar
8	Pengeluaran Per Kapita (Rp. Ribu)	Rp. Ribu	15.689	15.928	16.175	16.431	16.695	16.968	Imperatif dari Prov Sumbar
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Persentase	9,88	9,45	9,04	8,73	8,43	8,24	Imperatif dari Prov Sumbar
10	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	Jiwa	3.531	3.258	3072	2.892	2.724	2.562	Imperatif dari Prov Sumbar

NO	INDIKATOR	SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ket
11	Tingkat Kemiskinan (%)	Persentase	3,66	3,34	3,12	2,91	2,71	2,53	Imperatif dari Prov Sumbar
12	Gini Ratio	Indeks	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31	Imperatif dari Prov Sumbar

Sumber: Hasil Evaluasi Provinsi Sumatera Barat terhadap Ranperda RPJMD Kota Padang tahun 2025-2029

4.3 Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, IKU adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan I-3 Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa indikator kinerja utama diambil dari indikator sasaran strategik RPJMD.

Indikator Kinerja Utama Pembangunan Kota Padang untuk tahun 2025-2030 sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini;

Tabel IV- 3 Indikator Kinerja Utama Kota Padang Tahun 2025-2030

Indikator Kinerja Utama berdasarkan pada Cascading Misi, Tujuan dan Sasaran pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025 – 2029.

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Misi 1 : Menguatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas profesional, responsif, kolaboratif, dan partisipatif**		Indeks Reformasi Birokrasi	86	86,25	86,5	86,75	87	87,25	
		Meningkatnya kualitas integrasi pembangunan dari sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan kinerja	Nilai SAKIP	79	79,5	80	80,5	81	81,5	
		Meningkatkan Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Opini atas laporan keuangan pemerintah daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
		Meningkatnya kualitas pemetaan regulasi, regulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi daerah	Indeks Reformasi Hukum	91	91	92	93	94	96	
		Meningkatkan Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4	

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		yang profesional, responsif dan bebas korupsi								
		Meningkatnya pengawasan arsip daerah	Indeks Pengawasan Arsip	84	85	86	87	88	89	
		Meningkatnya pencegahan perilaku korupsi	Indeks Pencegahan Korupsi Daerah	95,2	95,25	95,5	95,75	96	96,25	
		Meningkatnya sumber daya aparatur yang profesional dan berintegritas	Indeks Sistem Merit	0,71	0,73	0,75	0,78	0,82	0,83	
Misi 2 : Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	**Mewujudkan Meningkatkan Implementasi Kota Pintar dan Kota Sehat**		Smart City Index	3,2	3,4	3,5	3,6	3,8	4	
		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan berbasis digitalisasi dalam wujudkan smart city	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	4	-	-	-	-	-	SPBE digunakan s/d 2025, selanjutnya mulai tahun 2026 diganti dengan indeks transformasi digital pilar pemerintahan
			Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintahan	-	1,6	1,7	1,8	1,9	2	

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	0,84	0,84	0,85	0,85	0,85	0,86	
		Tercapainya kondisi lingkungan hidup yang bersih, nyaman, aman dan kualitas hidup sehat.	Meningkatkan Penilaian Hasil Evaluasi Kota Sehat	0.01	-	0.01	-	0,008	-	Data dipublikasikan tiap 2 tahun
Misi 3 : Menguatkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya dengan Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul**		Indeks Pembangunan Manusia	84,51	84,82	85,14	85,53	85,93	86,33	Imperatif dari Prov Sumbar
		Meningkatnya literasi masyarakat Kota	Indeks pembangunan Literasi masyarakat	86	86	86	86	86	88	
		Meningkatkan pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	0,849	0,849	0,85	0,85	0,851	0,852	
		Meningkatnya Pelestarian dan Pembangunan Kebudayaan Daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	61,2	61,3	61,4	61,6	61,8	62	
		Meningkatnya Peran Pemuda dalam pembangunan sumber daya manusia unggul	Indeks Pembangunan Pemuda	56,5	56,8	57	57,2	57,3	57,5	
		Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan daerah	Indeks Pembangunan Gender	94,16	94,26	94,37	94,58	94,69	94,77	

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Meningkatkan stabilitas sosial dan politik daerah		Indeks Rasa Aman	11	10,8	10,6	10,4	10,2	10	Penurunan Angka Kriminalitas (RPJPD)
		Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Indeks Penyelenggaran Trantibumlinmas	65	65,5	66	66,5	67	67,5	
		Meningkatnya Toleransi beragama dan partisipasi politik	Indeks Kerukunan Umat Beragama	77,37	77,82	78,27	78,72	78,73	78,92	
		Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Indeks Kesejahteraan Sosial	58,89	59,29	59,69	60,09	60,49	60,89	
Misi 4 : Mendorong Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	**Mewujudkan Perekonomian Masyarakat yang adaptif dan kondusif**		Indeks daya saing daerah	4,27	4,3	4,35	4,4	4,45	4,5	
		Meningkatkan Realisasi Investasi	Nilai PMTB terhadap PDRB	29,94	29,97	30	30,03	30,06	30,09	
		Meningkatkan Tingkat Kesempatan Kerja	Perbandingan orang yang bekerja thd angkatan kerja	90,12%	90,85%	91,15%	91,30%	91,84%	92,01%	
Misi 5 : Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	**Mewujudkan Kota Layak Huni**		Indeks Kota Layak Huni	69,16	69,39	69,63	69,86	70,1	70,33	

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	77,26	77,27	77,28	77,29	77,3	77,31	
		Mewujudkan hunian layak dan terjangkau	Persentase Hunian Layak dan terjangkau	73,5	74,74	75,98	77,22	78,46	79,7	
		Mengembangkan dan merevitalisasi sarana serta prasarana umum yang ramah lingkungan dan hijau	Indeks Infrastruktur	66,12	66,65	67,03	67,42	67,8	68,18	
		Meningkatnya Kualitas Transportasi Publik	Rasio Konektivitas Wilayah	60	60,2	60,4	60,6	60,8	70	
Misi 6 : Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana	**Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim**		Indeks Risiko Bencana (IRB)	154,68	154,67 - 153,4	153,39 - 152,12	152,11 - 150,84	150,83 - 149,56	149,55 - 148,28	Imperatif dari Prov Sumbar
		Penguatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana dan perubahan iklim	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,52	0,53	0,55	0,57	0,59	0,61	
Misi 7 : Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif dengan Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	Mewujudkan Sektor perdagangan dan jasa yang tangguh		PDRB sektor perdagangan dan jasa (Miliar Rupiah)	30.744,63	32.622,65	34.500,68	36.378,70	38.256,72	40.134,74	Mencakup Lapangan Usaha G, K, M ,N, P. Q, R, S, T, U
		Meningkatnya kemampuan keuangan daerah	Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	0,32	0,34	0,36	0,38	0,39	0,4	

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		dalam pembiayaan pembangunan								
		Meningkatnya Kontribusi Sektor perdagangan dan jasa terhadap perekonomian Daerah	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan dan jasa	5,48	5,76	6,05	6,35	6,67	7	Mencakup Lapangan Usaha G, K, M ,N, P. Q, R, S, T, U
		Meningkatnya daya saing produk daerah	Persentase Pertumbuhan Net Ekspor	9,29	9,38	9,48	9,57	9,67	9,76	
		Meningkatkan Lapangan Usaha Perdagangan	Kontribusi Lapangan usaha Perdagangan Terhadap PDRB	17,99	18,3	18,61	18,92	19,23	19,54	
		Meningkatnya daya saing produk daerah dan transaksi perdagangan	Kontribusi Ekspor terhadap PDRB	7,108	7,123	7,138	7,153	7,168	7,185	Dihitung berdasarkan data PDRB Pengeluaran
Misi 8 : Menggerakkan Potensi Kota untuk Terwujudnya Industri Kreatif dan Pariwisata Berkelanjutan	**Terwujudnya Meningkatkan perekonomian daerah dari sektor Industri Kreatif dan Pariwisata**		PDRB sektor industri kreatif dan pariwisata (Miliar Rupiah)	1218,19	1296,19	1374,19	1452,19	1530,19	1608,19	
		Meningkatnya Kontribusi Industri Kreatif terhadap Perekonomian Daerah	Persentase Pertumbuhan Sektor PDRB Ekonomi Kreatif	7,43	7,48	7,54	7,67	8,07	8,37	
		Meningkatnya Kontribusi sektor pariwisata terhadap	Persentase Pertumbuhan sektor pariwisata	7,12	7,22	8,98	9,08	9,11	9,14	

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Perekonomian Daerah								
		Meningkatkan perekonomian daerah dari sektor Koperasi dan UMKM (Usaha Mikro)	Nilai omset sektor koperasi dan UMKM (usaha mikro) (Rp Juta)	1.852.392,88	1.937.602,95	2.038.358,31	2.156.583,09	2.294.604,41	2.455.226,71	

4.4 Indikator Kinerja Daerah

Penentuan target penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui indikator kinerja daerah (IKD). Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan *(outcome)* atau kompositnya *(impact)*. Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program *(outcome)* terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian Indikator Kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025–2030 yang telah direncanakan. Dalam proses perencanaan, ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan publik dalam rangka perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Selanjutnya, indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial. Aspek Pelayanan Umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial. Aspek daya saing daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Untuk target kinerja Tahun 2025-2030, indikator kinerja daerah Kota Padang tersebut secara rinci disajikan pada tabel berikut :

Tabel IV- 4 Indikator Kinerja Daerah 2025 – 2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**									
1	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	86	86,3	87	87,8	88,5	89,2	90	
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	8,57	5,82	5,46	5,1	4,73	4,01	3,66	Imperatif dari Prov Sumbar
3	Kapasitas Air Baku	m3/detik	2,025	2,225	2,264	2,303	2,362	2,391	2,42	Imperatif dari Prov Sumbar
4	Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh/kapita	2.384	2093	2300,6	2508,2	2715,8	2923,4	3131	Imperatif dari Prov Sumbar
5	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	%	50,92	50	52,5	55	57,5	60	62,5	Imperatif dari Prov Sumbar
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Daerah	Angka	77,26	77,36	77,65	77,75	78	78,25	78,42	Imperatif dari Prov Sumbar
7	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	14,3	20,46	22,79	23,17	24,56	25,64	26	Imperatif dari Prov Sumbar
8	Timbulan Sampah terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	persen	21,57	29,88	31,4	33,26	34,85	37,1	35,08	Imperatif dari Prov Sumbar
9	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	73,6	38,01	41,72	45,37	49	52,6	48,12	Imperatif dari Prov Sumbar
10	Indeks Resiko Bencana (IRB)	Angka	155,96	154,87	154,00	151,07	147,72	143,71	139,32	Imperatif dari Prov Sumbar
11	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	
12	Rasio Penduduk	%	46,28	46,28	46,79	47,32	47,83	48,35	48,85	
13	Kepadatan Penduduk	Orang/Km2	1373	1389	1404	1418	1432	1445	1458	
14	Indeks Tutupan Lahan, diganti dengan indeks kualitas lahan	Angka	-	80,44	80,46	80,47	80,49	80,5	80,5	
15	Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Sumber Air Siap Minum Perpipaan (%)	Persentase		50	52,5	55	57,5	60	62,5	Imperatif dari Prov Sumbarve

NO	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks		154,68	154,67 - 153,4	153,39 - 152,12	152,11 - 150,84	150,83 - 149,56	149,55 - 148,28	Imperatif dari Prov Sumbar
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**									
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,16	5,73	6,88	7,02	7,09	6,04	4,16	Imperatif dari Prov Sumbar
2	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	Jiwa		3.531	3.258	3072	2.892	2.724	2.562	Imperatif dari Prov Sumbar
3	Tingkat Kemiskinan	%	4,1	3,66	3,34	3,12	2,91	2,71	2,53	Imperatif dari Prov Sumbar
4	PDRB Per Kapita (Rp Juta)	Rp Juta	88,22	87,57	91,57	95,57	99,57	113,57	213,45	Imperatif dari Prov Sumbar
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	9,88	9,88	9,45	9,04	8,73	8,43	8,24	Imperatif dari Prov Sumbar
6	Gini Ratio	Angka	0,324	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31	Imperatif dari Prov Sumbar
7	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	84,38	84,51	84,82	85,14	85,53	85,93	86,33	Imperatif dari Prov Sumbar
8	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja		172,99	178,29	183,59	188,89	194,19	199,49	204,79	
9	Angka Harapan Hidup	Tahun	75,2	75,37	75,57	75,78	75,98	76,19	76,39	Imperatif dari Prov Sumbar
10	Prevalansi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) SSGI	%	20,6	17,90	16,65	15,40	14,15	12,90	11,65	Imperatif dari Prov Sumbar
	Prevalansi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) EPPGBM	%	2,53	2,55	2,53	2,51	2,50	2,50	2,47	
11	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	98,06	99	99,10	99,20	99,30	100	100	Imperatif dari Prov Sumbar
13	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	%	89	80	83,2	86,4	89,6	92,8	96	Imperatif dari Prov Sumbar
14	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	%	90	94	94	94	95	95	95	Imperatif dari Prov Sumbar
15	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	11,63	11,69	11,74	11,76	11,79	11,88	11,98	Imperatif dari Prov Sumbar

NO	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Harapan Lama Sekolah	Tahun	16.57	16,59	16,6	16,61	16,63	16,64	16,66	Imperatif dari Prov Sumbar
17	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional	%		65.00	70.09	75.15	80.27	85.36	87.48	Imperatif dari Prov Sumbar
18	Angka Literasi dan Numerasi									
a	Angka Literasi SD	%	83,59	65	70,09	75,18	80,27	85,36	87,48	Imperatif dari Prov Sumbar
b	Angka Numerasi SD	%	71,84	20	24,16	28,32	32,48	32,64	38,24	Imperatif dari Prov Sumbar
c	Angka Literasi SMP	%	80,9	63	63,88	64,76	65,64	66,52	67,4	Imperatif dari Prov Sumbar
d	Angka Numerasi SMP	%	45,55	55	56,11	57,22	58,33	59,44	60,55	Imperatif dari Prov Sumbar
19	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	85,47	86	86	86	86	86	88	
20	Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)	Angka	52,71	53	54	55	56	57	58	
21	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	27,83	32,55	33,05	33,55	34,05	34,55	35,05	Imperatif dari Prov Sumbar
22	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	76,92	77,37	77,82	78,27	78,72	78,73	78,92	
23	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	-	61,2	61,3	61,4	61,6	61,8	62,0	
24	Indeks Perlindungan Anak	Angka	-	66,35	66,536	66,722	66,908	67,094	67,28	Imperatif dari Prov Sumbar
25	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Angka	64,62	64,82	64,95	65,23	65,34	65,62	65,82	
26	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,172	0,172	0,172	0,171	0,171	0,17	0,169	Imperatif dari Prov Sumbar
27	Indeks Pembangunan Gender	Angka	94,04	94,16	94,26	94,37	94,58	94,69	94,77	
28	Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	56,33	56,5	56,8	57	57,2	57,3	57,5	
29	Jumlah Kematian Ibu	Orang	14	13	13	12	11	10	10	
	Angka Kematian Ibu	Angka	86	85	85	84	83	82	81	

NO	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Ke atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	23,61	18	18,14	18,28	18,42	18,55	18,68	Imperatif dari Prov Sumbar
31	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi Yang Bekerja Di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	%	73,52	68,13	68,81	69,49	70,16	70,84	71,52	Imperatif dari Prov Sumbar
32	Persentase Penyandang Disabilitas Yang Bekerja Di Sektor Formal	%	0,55	45,63	46,13	47,63	49,13	50,63	52,13	Imperatif dari Prov Sumbar
33	Jumlah Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di tingkat kab/kota/provinsi	Unit Layanan	1	1	1	1	1	1	1	Imperatif dari Prov Sumbar
34	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan/atau dari Dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan	Orang		408	537	666	789	903	1021	Imperatif dari Prov Sumbar
35	Jumlah Kematian Bayi	Orang	116	114	112	110	108	106	104	
	Angka Kematian Bayi	Angka	8,3	8,2	8,1	8	7,9	7,8	7,8	
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**									
1	Angka Ketergantungan	%	45,7	46,28	46,79	47,32	47,83	48,35	48,85	
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	10,68	8,83	9,1675	9,505	9,8425	10,18	12,36	Imperatif dari Prov Sumbar
3	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	1,35	1,5	1,52	1,54	1,56	1,58	1,65	Imperatif dari Prov Sumbar
4	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%	3,23	3,02	3,25	3,27	3,29	3,32	3,35	

NO	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	4,08	3,82	3,95	4,09	4,22	4,35	4,51	Imperatif dari Prov Sumbar
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	67,18	67,24	67,31	67,37	67,43	67,5	67,56	
7	Indeks Inovasi Daerah	Angka	63,72	64,23	65,84	67,44	69,05	70,65	72,26	Imperatif dari Prov Sumbar
8	Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan	Angka	4,95	5,06	5,14	5,16	5,22	5,28	5,34	
9	Rasio PDRB Sektor Perikanan	Angka	3,28	3,34	3,39	3,4	3,43	3,46	3,49	
10	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Angka	-	53	53,2	53,4	53,6	53,8	54	
11	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	% PDRB	28,52	29,94	29,97	30	30,03	30,06	30,09	Imperatif dari Prov Sumbar
12	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	% PDRB	7,92	65,61	66,048	66,486	66,924	67,362	71,85%	Imperatif dari Prov Sumbar
13	Indeks Infrastruktur/Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Angka	-	66,12	66,65	67,03	67,42	67,8	68,18	
14	Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	%	-	74,5	75,93	77,36	78,79	81,97	82,84	Imperatif dari Prov Sumbar
15	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,69	0,71	0,76	0,8	0,85	0,9	0,95	Imperatif dari Prov Sumbar
16	Tingkat Inflasi	%	1,38	2,80 - 3,60	2,45 - 3,55	2,10 - 3,52	1,75 - 3,51	1,40 - 3,50	1,35 -3,45	Imperatif dari Prov Sumbar
17	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Indeks	5,54	5.55	5.56	5.57	5.58	5.59	5.60	Surat bappenas nomor. 07727/D.03/PP.02.01/05/2025 tanggal 20 Mei 2025 tentang Penyampain informasi mengenai Indikator Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) 2025 - 2030
18	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Ribu Orang	191632 (OPD/Telkomsel)	32,174	33,174	34,174	35,174	36,174	42.188	Imperatif dari Prov Sumbar

NO	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB	%	3,45	3,265	3,307	3,349	3,391	3,433	3,72	Imperatif dari Prov Sumbar
20	Return on Asset (ROA) BUMD	%	6,17	8,01	8,04	8,08	8,11	8,15	8,18	Imperatif dari Prov Sumbar
21	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	%	58,08	55,65	56,85	58,05	59,25	60,45	62,03	Imperatif dari Prov Sumbar
22	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	54,25	54,25-55,63	54,56-56,17	54,86-56,71	55,17-57,25	55,47-57,79	55,78-58,33	Imperatif dari Prov Sumbar
23	Indeks Literasi Digital	Angka	52,71	53	54	55	56	57	58	Indeks literasi Digital terakhir dilakukan oleh Kementrian Kominfo pd thn 2023, setelah itu diganti menjadi indeks masyarakat digital indonesia
24	Total Dana Pihak Ketiga / PDRB	%	36,78	25,41	28,15	30,88	33,62	36,36	39,1	Imperatif dari Prov Sumbar
25	Nilai Transaksi Saham per Kapita	Rupiah	7.448.960	19.155.489	23.121.911	27.088.333	31.054.755	35.021.177	38.987.599	Imperatif dari Prov Sumbar
26	Total Kredit / PDRB	%	36,98	15,3	17,93	20,56	23,19	25,82	28,45	Imperatif dari Prov Sumbar
27	Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan	%	5,29	5,3	5,34	5,38	5,42	5,46	5,5	
28	Proporsi jumlah Industri Kecil dan Menengah	%	2,79	4,63	4,71	4,79	4,86	4,94	5,02	Imperatif dari Prov Sumbar
29	Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	%		4.686	4.706	4.726	4.746	4.766	4.786	Imperatif dari Prov Sumbar
30	Persentase kerjasama wajib yang dilaksanakan	%	-	87	87,5	88,5	89,5	90	91	
31	Proporsi jumlah Usaha Kecil dan Menengah non pertanian	%	83,9	4,69	4,71	4,73	4,75	4,77	13,636	Imperatif dari Prov Sumbar
32	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok	%	-	10-Feb	2,7-9,8	2,5-9,4	9-Feb	1,5-8,5	8-Jan	
33	Proporsi kontribusi PDRB Kota terhadap Provinsi	%	25,34	25,45	25,73	25,81	25,88	25,95	26,02	Imperatif dari Prov Sumbar

NO	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Jumlah warisan budaya benda yang dilestarikan	Angka	-	2	2	2	2	2	2	
35	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	Angka	-	2	2	2	2	2	2	
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**									
1	Indeks Reformasi Hukum	Angka	98,7	91	91	92	93	94	96	
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	3,96	3,96	4,02	4,08	4,13	4,19	4,25	Imperatif dari Prov Sumbar
3	Indeks Pemerintahan Digital	Indeks		-	1.6	1.7	1.8	1.9	2	Imperatif dari Prov Sumbar
4	Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintahan		-	-	1,6	1,6	1,8	1,8	2	
5	Indeks Pelayanan Publik	Angka	-	3,54	3,55	3,56	3,57	3,8	4,55	Imperatif dari Prov Sumbar
6	Survei Penilaian Integritas KPK	Angka	-	72	73	74	75	76	77	Kota Padang menggunakan Survei Penilaian Integritas KPK sebagai pengganti indeks integritas nasional
7	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda (Penegakan Perda)	%	100	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase Capaian Aksi HAM	%	-	-	-	-	-	-	-	
9	Tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu	%	73,72	-	-	-	-	-	74	Kota padang menggunakan indeks ini sebagai pengganti indeks demokrasi indonesia
10	Penurunan Angka Kriminalitas	Angka	-	11	10,8	10,6	10,4	10,2	10	Kota Padang menggunakan indikator Penurunan Angka Kriminalitas sebagai pengganti indeks rasa aman
11	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Angka	-	65	65,5	66	66,5	67	67,5	
12	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	4,21	4,27	4,3	4,35	4,4	4,45	4,5	

NO	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Indeks Zakat Nasional (IZN)	Indeks		0.71	0.73	0.75	0.77	0.79	0.81	Imperatif dari Prov Sumbar

4.5 Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 Tentang Peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat EPPD adalah evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dimana indikator kinerja kunci (IKK) merupakan Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK adalah indikator keberhasilan kinerja yang menggambarkan penyelenggaraan pemerintahan.

1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)

Tabel IV- 5 Indikator Kinerja Kunci Keluaran 2025 - 2029

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA (2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Pendidikan	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	1	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	Jumlah PAUD: 540	485	495	500	507	507	507	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				2	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	18.164/600	500	500	500	500	500	500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA (2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				3	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	-	456	456	456	456	456	456	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	1.783	1691	1696	1701	1706	1711	1716	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				5	Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	1.783	1691	1696	1701	1706	1711	1716	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				6	Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D- IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	1.393	1290	1369	1448	1527	1606	1685	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				7	Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non- formal dari lembaga pemerintah	429	498	498	498	498	498	498	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA (2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	1	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	Jumlah SD/MI : 362 Jumlah SMP/MTs : 122	SD A :146 B :180 c : 15 SMP A : 57 B : 34 C : 9	SD A :148 B :182 c : 11 SMP A : 58 B : 36 C : 7	SD A :156 B :180 c : 6 SMP A : 62 B : 35 C : 4	SD A :160 B :185 c : 3 SMP A : 65 B : 33 C : 3	SD A :165 B :163 c : 0 SMP A : 68 B : 32 C : 1	SD A :176 B :172 c : 0 SMP A : 70 B : 31 C : 0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				2	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	93.735 / 5047	Baju 4385 LKS 4385	Baju 4385 LKS 8770	Baju 4385 LKS 13155	Baju 4385 LKS 17540	Baju 4385 LKS 21925	Baju 4385 LKS 26310	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	45.151 / 2779	Baju 2797 LKS 2797	Baju 2797 LKS 5594	Baju 2797 LKS 8391	Baju 2797 LKS 8391	Baju 2797 LKS 8391	Baju 2797 LKS 8391	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				4	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	72.235 /31	72235	72235	72235	72235	72235	72235	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				5	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	36.367 / 24	36367	36367	36367	36367	36367	36367	Dinas Pendidikan dan	

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA (2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
					yang menerima pembebasan biaya pendidikan								Kebudayaan	
				6	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	5.892	5502	5777	5639	5612	5639	5639	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				7	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	3.389	2653	2785	2719	2706	2719	2719	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				8	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	5.892	5502	5777	5639	5612	5639	5639	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				9	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama(Negeri dan Swasta)	3.389	2653	2785	2719	2706	2719	2719	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				10	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	1.283	1227	1288	1257	1251	1257	1257	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				11	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	1.351	585	614	599	596	599	599	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA (2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				12	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	1.283	1227	1288	1257	1251	1257	1257	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				13	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	1.351	585	614	599	596	599	599	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				14	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	5.572	3423	3508	3491	3491	3491	3491	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	3.344	1569	1600	1600	1600	1600	1600	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				16	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	319	263	265	267	269	267	267	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				17	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat	117	75	83	85	87	89	91	Dinas Pendidikan dan	

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA (2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
					tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah								Kebudayaan	
				18	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat	1.189	403	393	383	373	363	353	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				19	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat	665	198	195	192	185	180	170-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yangberpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	1	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi (Jumlah sekolah terakreditasi yang dimaksud adalah seluruh sekolah yang sudah terakreditasi, baik A, B atau C (dibuat terpisah))	Jumlah SD/MI : 362 Jumlah SMP/MTs : 122	SD A :146 B :180 c : 15 SMP A : 57 B : 34 C : 9	SD A :148 B :182 c : 11 SMP A : 58 B : 36 C : 7	SD A :156 B :180 c : 6 SMP A : 62 B : 35 C : 4	SD A :160 B :185 c : 3 SMP A : 65 B : 33 C : 3	SD A :165 B :163 c : 0 SMP A : 68 B : 32 C : 1	SD A :176 B :172 c : 0 SMP A : 70 B : 31 C : 0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				2	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	93.735 / 5047	Baju 4385 LKS 4385	Baju 4385 LKS 8770	Baju 4385 LKS 13155	Baju 4385 LKS 17540	Baju 4385 LKS 21925	Baju 4385 LKS 26310	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA (2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	45.151 / 2779	Baju 2797 LKS 2797	Baju 2797 LKS 5594	Baju 2797 LKS 8391	Baju 2797 LKS 8391	Baju 2797 LKS 8391	Baju 2797 LKS 8391	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				4	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	72.235 / 31	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				5	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	36.367 / 34	36367	36367	36367	36367	36367	36367	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				6	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	5.892	5502	5777	5639	5612	5639	5639	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				7	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	3.389	2653	2785	2719	2706	2719	2719	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				8	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	5.892	5502	5777	5639	5612	5639	5639	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA (2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				9	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	3.389	2653	2785	2719	2706	2719	2719	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				10	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	1.283	1227	1288	1257	1251	1257	1257	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				11	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	1.351	585	614	599	596	599	599	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				12	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	1.283	1227	1288	1257	1251	1257	1257	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				13	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	1.351	585	614	599	596	599	599	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				14	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	5.752	3423	3508	3491	3491	3491	3491	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma	3.344	1569	1600	1600	1600	1600	1600	Dinas Pendidikan dan	

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA (2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
					empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik								Kebudayaan	
				16	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki jazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	319	263	265	267	269	267	267	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				17	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	117	75	83	85	87	89	91	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				18	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki jazah SMA/sederajat	1.189	403	393	383	373	363	353	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				19	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/sederajat	665	198	195	192	185	180	170-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	1	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	Jumlah : 29	A : 5 B : 17 C : 5	A : 5 B : 19 C : 5	A : 6 B : 20 C : 3	A : 5 B : 20 C : 3	A : 6 B : 23 C : 0	A : 6 B : 23 C : 0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA (2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				2	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	4.467 / 470	380	385	390	395	400	400	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				3	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	4.467 / 0	362	365	370	375	380	385	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	203	215	227	239	251	263	275	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				5	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	203	215	227	239	251	263	275	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				6	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	169	169	179	189	199	209	219	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				7	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				8	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan	22	24	26	28	30	32	34	Dinas Pendidikan dan	

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA (2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
					(Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1								Kebudayaan	
2	Kesehatan	1	Rasio daya tampung RS Rujukan	1	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	27 RS	22	23	25	25	25	25	Dinas Kesehatan	
		2	Persentase RS Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasi	1	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	27 RS	0	4	18	0	0	0	Dinas Kesehatan	
		3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Daftar logistik pelayanan kesehatan ibu hamil (588.020)	59.472	126.958	131.603	136.248	139.344	139.344	Dinas Kesehatan	
				2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	Daftar SDM pelayanan kesehatan ibu hamil (75)	75	75	75	75	75	75	Dinas Kesehatan	
		4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Daftar logistik pelayanan kesehatan ibu bersalin (18.948)	19.824	45.932	46.964	47.996	49.028	49.028	Dinas Kesehatan	
				2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	Daftar SDM pelayanan kesehatan ibu bersalin (48)	72	72	72	72	72	72	Dinas Kesehatan	
		5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Daftar logistik pelayanan kesehatan bayi baru lahir	69.256	163.650	165.429	167.208	168.987	168.987	Dinas Kesehatan	

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA (2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						(35.982)								
				2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	Daftar SDM pelayanan kesehatan bayi baru lahir (72)	72	72	72	72	72	72	Dinas Kesehatan	
		6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Daftar logistik pelayanan kesehatan balita (254.190)	131.478	145.438	151.428	157.418	163.408	163.408	Dinas Kesehatan	
				2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Daftar SDM pelayanan kesehatan balita (16.333)	16.333	16.333	16.333	16.333	16.333	16.333	Dinas Kesehatan	
		7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Daftar logistik pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar (68.423)	68.423	155.553	171.889	196.394	212.730	212.730	Dinas Kesehatan	
				2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	Daftar SDM pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar (7.950)	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950	Dinas Kesehatan	
		8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Daftar logistik pelayanan kesehatan usia 15-59 tahun (2.431.262)	605.858	617.975	630.335	642.941	655.800	668.916	Dinas Kesehatan	

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA (2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Daftar SDM pelayanan kesehatan usia 15-59 tahun (924)	924	924	924	924	924	924	Dinas Kesehatan	
		9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Daftar logistik pelayanan kesehatan usia 60 tahun (277.032)	87.063	189.024	206.208	223.392	240.576	257.760	Dinas Kesehatan	
				2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Daftar SDM pelayanan kesehatan usia 60 tahun (120)	120	120	120	120	120	120	Dinas Kesehatan	
		10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Daftar logistik pelayanan kesehatan penderita hipertensi (71.780)	61.133	61.744	62.361	62.984	63.613	64.249	Dinas Kesehatan	
				2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Daftar SDM pelayanan kesehatan penderita hipertensi (924)	924	924	924	924	924	924	Dinas Kesehatan	
		11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Daftar logistik pelayanan kesehatan penderita DM (531.956)	17.571	17.747	17.925	18.104	18.285	18.468	Dinas Kesehatan	
				2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Daftar SDM pelayanan kesehatan penderita DM (924)	924	924	924	924	924	924	Dinas Kesehatan	

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA (2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Daftar logistik pelayanan kesehatan ODGJ (2.393)	2.027	2.052	2.077	2.102	2.127	2.152	Dinas Kesehatan	
				2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Daftar SDM pelayanan kesehatan ODGJ (48)	48	48	48	48	48	48	Dinas Kesehatan	
		13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Daftar logistik pelayanan kesehatan orang terduga TBC (127.308)	23.468	21.185	18.279	16.211	14.634	13.414	Dinas Kesehatan	
				2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Daftar SDM pelayanan kesehatan orang terduga TBC (500)	1.069	1.069	1.069	1.069	1.069	1.069	Dinas Kesehatan	
		14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Daftar logistik pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV (70.965)	21.000	22.000	22.000	23.000	23.000	24.000	Dinas Kesehatan	
				2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Daftar SDM pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV (270)	245	245	245	245	245	245	Dinas Kesehatan	

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA (2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kota	1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	Tidak ada	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR	Merupakan kewenangan pemerintah pusat
				2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	Tidak ada	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR	Merupakan kewenangan pemerintah pusat
				3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	Tidak ada	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR	Merupakan kewenangan pemerintah pusat
				4	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	Tidak ada	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR	Merupakan kewenangan pemerintah pusat
				5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR	Merupakan kewenangan pemerintah pusat

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA (2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR	Merupakan kewenangan pemerintah pusat
				7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota i. Bangunan perkuatan tebing (m) ii. Tanggul sungai (m) iii. Kanal banjir (m) iv. Pintu air/bendung pengendali banjir (Unit)	Jumlah i. Bangunan perkuatan tebing meter ii. Tanggul sungai …….. iii. Kanal banjir……. (m) iv. Pintu air/bendung pengendali banjr 2 (Unit)/124,5 meter v. Pompa banjir (Unit dan Kapasitas) vi. Polder/Kolam Retensi……(Unit) vii. Breakwater …(m) viii. Seawall dan Bangunan pengaman pantai lainnya …..(m)							Dinas PUPR	Merupakan kewenangan pemerintah pusat
		2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang	1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	……							Dinas PUPR	Merupakan kewenangan

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA (2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kota											pemerintah pusat
				2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	.....							Dinas PUPR	Merupakan kewenangan pemerintah pusat
				3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	.....							Dinas PUPR	Merupakan kewenangan pemerintah pusat
				4	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	.....							Dinas PUPR	Merupakan kewenangan pemerintah pusat
				5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	Ada							Dinas PUPR	Merupakan kewenangan pemerintah pusat
				6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana	ada							Dinas PUPR	Merupakan kewena

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA (2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
					pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota									ngan pemerintah pusat
				7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota i. Bangunan perkuatan tebing (m) ii. Tanggul sungai (m) iii. Kanal banjir (m) iv. Pintu air/bendung pengendali banjir (Unit) v. Pompa banjir (Unit dan Kapasitas) vi. Polder/Kolam Retensi (Unit) vii. Breakwater (m) viii. Seawall dan Bangunan pengaman pantai lainnya (m)	Jumlah i. Bangunan perkuatan tebing (m) ii. Tanggul sungai … Unit iii. Kanal banjir……. (m) iv. Pintu air/bendung pengendali banjir (Unit) v. Pompa banjir (Unit dan Kapasitas) vi. Polder/Kolam Retensi…… (Unit) vii. Breakwater ……(m) viii. Seawall dan Bangunan pengaman pantai lainnya …..(m)							Dinas PUPR	Merupakan kewenangan pemerintah pusat
		3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	1	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	30.200 meter -------- x 100 % 37.750 m	81.66 %	83.26 %	85.06 %	87.27 %	88.6 %	87,27 %	Dinas PUPR	

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA (2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						= 80 %								
				2	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	43.688 meter -------- x 100 % 53.360 m = 80%	83.05 %	84.18 %	85.47 %	87.02 %	87.79 %	87,27 %	Dinas PUPR	
				3	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	501,60 -------- x 100 % 501,60 = 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas pertanian	
		4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kota	1	Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada (Revisi)	Ada (Revisi)	Ada (Revisi)	Dinas Perkim	
				2	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada (Revisi)	Ada (Revisi)	Ada (Revisi)	DLH Dinas Perkim	

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA (2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				3	Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggaran SPAM	3	3	3	3	3	3	3	Dinas Perkim	
				4	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	15	18	21	24	27	30	33	Dinas Perkim	
				5	Jumlah kerja sama penyelenggaran SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Perkim	
		5	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	1	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	185.049 rumah	185.249 rumah	185.450 rumah	185.700 rumah	185.950 rumah	186.200 rumah	186.500 rumah	Dinas Perkim	
				2	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	2.099 rumah	2.299 rumah	2.500 rumah	2.720 rumah	2.950 rumah	3.200 rumah	3.500 rumah	Dinas Perkim	
				3	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	187.148 rumah	187.548 rumah	187.950 rumah	188.420 rumah	188.900 rumah	189.400 rumah	190.000 rumah	Dinas Perkim	
				4	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	34.356 rumah	36.985 rumah	39.792 rumah	45.108 rumah	50.521 rumah	60.220 rumah	65.866 rumah	Dinas Perkim	

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA (2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				5	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	34.356 rumah	36.985 rumah	39.792 rumah	45.108 rumah	50.521 rumah	60.220 rumah	65.866 rumah	Dinas Perkim	
				6	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	34.356 rumah	36.985 rumah	39.792 rumah	45.108 rumah	50.521 rumah	60.220 rumah	65.866 rumah	Dinas Perkim	
				7	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	9.680 -------- x 100% 10.309 = 93,90%	94,00%	94,15%	94,30%	94,50%	94,71%	94,93%	Dinas Perkim	
				8	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	33.72 -------- x 100% 229.519 = 14,69%	14,80%	14,90%	15,02%	15,17%	15,33%	15,48%	Dinas Perkim	
				9	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	2.099 -------- x 100% 11.991 = 17,50%	17,55%	17,65%	17,77%	17,89%	18,05%	18,20%	Dinas Perkim	
				10	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	185.049 -------- x100% 227.873 = 81,22%	81,35%	81,50%	81,65%	81,80%	81,96%	81,14%	Dinas Perkim	
				11	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	18 -------- x 100% 20 = 90%	90%	95%	95%	95%	100%	100%	Dinas Perkim	

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA (2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				12	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	81,6 -------- x 100% 200 = 40,80%	41,5 %	45%	50%	50%	50%	50%	Dinas Perkim	
				13	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	2.099 -------- x 100 % 11.991 = 17,50%	17,5 5%	17,6 5%	17,7 7%	17,89 %	18,05 %	18,20 %	Dinas Perkim	
				14	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	34.356 -------- x 100 % 227.837 = 15,08 %	15,1 3%	15,1 8%	15,2 4%	15,30 %	15,36 %	15,43 %	Dinas Perkim	
		6	Rasio kepatuhan IMB kota	1	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR	
				2	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	5.194	1.00 0	1.00 0	1.00 0	1.000	1.000	1.000	DPUPR	
				3	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dinas PUPR	
				4	Penetapan Keputusan Bupati/Wali Kota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dinas PUPR	
				5	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Wali	54	54	54	54	54	54	54	Dinas Pendidikan dan	

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA (2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
					Kota untuk dilindungi dan dilestarikan								Kebudayaan	
				6	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	-	-	-	-	-	-	-	BPKAD/Dinas Pariwisata	
				7	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	702 unit	702	702	702	702	702	702	BPKAD	
				8	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	702 unit	702	702	702	702	702	702	BPKAD	
		7	Tingkat kemantapan jalan kota	1	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota	624.691 Km	637.210,26 Km	637.210,26 Km	637.210,26 Km	637.210,26 Km	637.210,26 Km	637.210,26 Km	Dinas PUPR	
				2	Panjang jalan yang dibangun	2.775 meter	0,5 Km	2,37 km	0,5 km	0.5 KM	0,5 KM	0,5 KM	Dinas PUPR	
				3	Panjang jembatan yg dibangun	39 meter	2 unit	2 unit	2 unit	1 unit	0	0	Dinas PUPR	Target jembatan berdasarkan unit
				4	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	5.791 meter	0,6 KM	2,6 Km	0,7 Km	0,7 Km	0,7 Km	07 Km	Dinas PUPR	
				5	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	260,1 m	3 unit	4 unit	9 unit	8 unit	12 unit	12 unit	Dinas PUPR	Target jembatan berdasa

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA (2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
														rkan unit
				6	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	18.875,25 m	2, 9 Km	1.7 KM	1.6 Km	1,2 Km	0 km	0 km	Dinas PUPR	
				7	Panjang jembatan yang direhabilitasi	35 meter	0	2 Unit	1 Unit	2 Unit	1 Unit	0	Dinas PUPR	
				8	Panjang jalan yang dipelihara	27.439,3 meter	4,0 Km	4,6 Km	4,6 KM	4.0 Km	4,0 KM	4,0 KM	Dinas PUPR	
				9	Panjang jembatan yang dipelihara	1.181,55 meter	30 unit	20 unit	20 unit	20 unit	20 unit	20 unit	Dinas PUPR	Target jembatan berdasarkan unit
		8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	1	Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analis di wilayah kabupaten/kota	Tidak ada	Tidak	Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Dinas PUPR	
				2	Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Ada	Dinas PUPR	
				3	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analis di wilayah kabupaten/kota	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Ada	Dinas PUPR	
				4	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan	Ada	ada	ada	ada	ada	ada	Ada	Dinas PUPR	

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA (2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
					kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir									
				5	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	tidak	tidak	tidak	tidak	tidak	tidak	Tidak	Dinas PUPR	
				6	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Dinas PUPR	
				7	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Dinas PUPR	
				8	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaskanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dinas PUPR	
				9	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	Ada	Ada	ada	ada	ada	ada	Ada	Dinas PUPR	
				10	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau	Ada	ada	ada	ada	ada	ada	Ada	Dinas PUPR	

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA (2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
					melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.									
				11	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analis	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dinas PUPR	
				12	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analis di wilayah kab/kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dinas PUPR	
				13	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	-	-	-	-	-	-	-		
				14	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	-	-	-	-	-	-	-		Kewenangan Pemerintah Pusat
				15	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi	Ada	ada	ada	ada	ada	ada	Ada	Dinas PUPR	

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA (2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
					usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya									
				16	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada	ada	ada	ada	ada	ada	Ada	Dinas PUPR	
				17	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada	ada	ada	ada	ada	ada	Ada	DPMPTSP/ DPUPR/Disnakerin	
				18	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	55	-	-	-	-	-	-		
				19	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	0	-	-	-	-	-	-		
				20	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	55	-	-	-	-	-	-		
				21	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	-	-	-	-	-		-		
				22	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	-	-	-	-	-	-	-		

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA (2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				23	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	55	60	65	70	75	75	80	Dinas PUPR	
				24	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	-	-	-	-	-	-	-		
				25	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	55	60	65	70	75	75	80	Dinas PUPR	
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kota	1	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	11.304	11.304	11.304	11.304	11.304	11.304	11.304	11.304	
				2	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	3	3	3	3	3	3	3	3	
				3	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	3 RT, 5 KK dan 13 jiwa	3 RT, 5 KK dan 13 jiwa	3	3	3	3	3	3	
				4	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	3 UNIT	3 UNIT	3	3	3	3	3	3	

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA (2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				5	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	-	-	1	1	1	1	1		
				6	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	0	0	1	1	1	1	1		
				7	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0	1	1	1	1	1	1	Dinas Perkim	
				8	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	3 RT, 5 KK dan 13 jiwa	3	3	3	3	3	3	Dinas Perkim	
				9	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	26,3 Ha	26,3 Ha	26,3 Ha	26,3 Ha	26,3 Ha	26,3 Ha	26,3 Ha	Dinas Perkim	
		2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kota	1	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	1	1	1	1	1	1	Dinas Perkim	
				2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencanapemenuhan SPM	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perkim	
				3	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	1	1	1	1	1	1	Dinas Perkim	

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA (2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				4	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	1	1	1	1	1	1	Dinas Perkim	
				5	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perkim	
				6	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	0	0	0	0,5	0,5	0,5	0,5	Dinas Perkim	
		3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	1	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	230,29 Ha	426,74 Ha	426,74 Ha	426,74 Ha	426,74 Ha	426,74 Ha	436,75 Ha	Dinas Perkim	
				2	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	9.428 unit	9.528 unit	9.628 unit	9.730 unit	9.845 unit	9.975 unit	10.125 unit	Dinas Perkim	
				3	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	230,29 Ha	240,29 Ha	285,29 Ha	335,29 Ha	385,29 Ha	426,74 Ha	436,75 Ha	Dinas Perkim	
		4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	1	Jumlah rumah di kab/kota	239.828 unit	241.262 unit	243.676 unit	246.089 unit	248.503 unit	250.916 unit	253.330 unit	Dinas Perkim	
				2	Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	9.428 unit	9.528 unit	9.628 unit	9.730 unit	9.845 unit	9.975 unit	10.125 unit	Dinas Perkim	
				3	Jumlah rumah tidak layak huni	7.080 unit	6.980 unit	6.880 unit	6.778 unit	6.663 unit	6.533 unit	6.383 unit	Dinas Perkim	

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA (2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				4	Jumlah rumah yang tidak dihuni	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perkim	
				5	Rasio rumah dan KK	291.127 -------- x 100 % 239.828 = 1,21 %	1,20 %	1,19 5%	1,19 3%	1,191 %	1,189 %	1,187 %	Dinas Perkim	
				6	Jumlah rumah pembangunan baru	6.551 unit	7.550 unit	8.550 unit	9.550 unit	10.550 unit	11.650 unit	12.700 unit	Dinas Perkim	
		5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	1	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	235.083 rumah	236.436 rumah	238.802 rumah	241.167 rumah	243.532 rumah	245.897 rumah	248.263 rumah	Dinas Perkim	
				2	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	235.083 rumah	236.436 rumah	238.802 rumah	241.167 rumah	243.532 rumah	245.897 rumah	248.263 rumah	Dinas Perkim	
				3	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	10.373 unit	10.580	10.795 unit	11.050 unit	11.300 unit	11.580 unit	11.840 unit	Dinas Perkim	
				4	Jumlah unit rumah yang terfasiltasi akses sanitasi (on site / off site)	187.148 rumah	187.548 rumah	187.950 rumah	188.420 rumah	188.900 rumah	189.400 rumah	190.000 rumah	Dinas Perkim	
				5	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	0	1	1	1	1	1	1	Dinas Perkim	
				6	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	8.216	8.250	8.300	8.350	8.400	8.450	8.500	Dinas Perkim/ Dishub	
				7	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	68	70	71	72	75	78	80	Dinas Perkim	
				8	Jumlah pengembang yang teregistrasi	68	70	71	72	75	78	80	Dinas Perkim	

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA (2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				9	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	19	20	25	30	35	40	50	Dinas Perkim	
5	**Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**	**1**	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	1	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	2.266	2.300	2.275	2.250	2.225	2.200	2.175	Satpol PP	
				2	Jumlah Satlinmas yang terlatihdan dikukuhkan	24 ---- x 100 % 24 = 100%	24	24	24	24	24	24	Satpol PP	
				3	Jumlah Peraturan Daerahdan Perkada yang ditegakkan	21 ---- x 100 % 21 = 100%	21	21	21	21	21	21	Satpol PP	
				4	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	10 ---- x 100 % 59 = 16,94%	10	10	10	10	10	10	Satpol PP	
				5	Tersedianya SOP dalam penegakan Peraturan Daerahdan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	Ada 10 SOP	Ada 10 SOP	Ada 10 SOP	Ada 10 SOP	Ada 10 SOP	Ada 10 SOP	Ada 10 SOP	Satpol PP	
				6	Tersedianya sarana prasarana minimal	Ada Sebanyak 8 Jenis	Ada 8 Jenis	Ada 8 Jenis	Ada 8 Jenis	Ada 8 Jenis	Ada 8 Jenis	Ada 8 Jenis	Satpol PP	
		3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	1	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengab dinyatakan sah/legal	0 -------- x 100 % 0 = 100%	0	0	1	0	0	1	BPBD	

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA (2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				2	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	665.761 -------- x 100 % 939.851 =0,709%	563.622 ------ x 641.38 = 7,8	73.622 ------ x 41.385 = 89,4	583.62 ---- --- 641.38 = 90,9	593.62 ----- x 1 641.38 =92,5	603.622 ------ x 641.385 = 9,11	613.622 ------- x 1 641.385 = 95,6	BPBD	
		4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	1 -------- x 100 % 1 = 100 %	0	0	1	0	0	1	BPBD	
				2	Persentase penyelesaian dokumen renkon sampai dinyatakan sah/lehal	0 -------- x 100 % 0 ..... %	1	1	1	1	0	0	BPBD	
				3	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan(Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana)	7.965 -------- x 100 % 939.851 = 0,85 %	8.965 ------- 641.38 = 1,34 %	9.965 -------- 641.38 = 1,55%	10.965 -------- 641.38 =1,7 %	11.965 -------- x 641.385 = 1,86	12.965 -------- x 641.385 = 2,2%	13.965 -------- x 641.385 = 2,1%	BPBD	
				4	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	7.965 -------- x 100 % 939.851 = 0,85 %	0,00 95	0,01	0,01 5	0,065	0,085	0,02	BPBD	
				5	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulan bencana dan	939.851	100	100	100	100	100	100	BPBD	

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA (2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
					sarana prasarana penanggulangan bencana	-------- x 100 % 939.851 = 100 %								
				6	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	939.851 -------- x 100 % 939.851 = 100 %	100	100	100	100	100	100	BPBD	
		5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	0 -------- x 100 % 0 = 0 %	100	100	100	100	100	100	BPBD	
				2	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	1 -------- x 100 % 1 100 %	100	100	100	100	100	100	BPBD	
				3	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	68 -------- x 100 % 68 = 100%	100	100	100	100	100	100	BPBD	
				4	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	8.337 -------- x 100 % 8.337 = 100 %	100	100	100	100	100	100	BPBD	

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA (2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	9 Jenis 1148 Kejadian	9 Jenis 1148 Kejadian	9 Jenis 1148 Kejadian	9 Jenis 1148 Kejadian	9 Jenis 1148 Kejadian	9 Jenis 1148 Kejadian	9 Jenis 1148 Kejadian	Dinas Damkar	
				2	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dinas Damkar	
				3	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dinas Damkar	
				4	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	(Dibuat dalam bentuk) a. Pos 1. b. Pos 2. WMK 1 c. Pos 3. WMK 2 d. Pos 4. WMK 3 e. Pos 5. WMK 4 f. Pos 6. Mako 113	+ Pos 7 Lubeg	+ Pos 8 Balai Kota aie Pacah	+ Pos 9 Luki	+ Pos 10 Pauh	+Pos 11 Nanggalo	+ Pos 12 Kelurahan Air Tawar	Dinas Damkar	
				5	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	607 unit	751 Unit	900 unit	950 Unit	1050	1100	1150	Dinas Damkar	

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA (2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				6	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	177 orang	196	196	196	196	196	196	Dinas Damkar	
				7	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	Nihil	104	208	213	219	225	231	Dinas Damkar	
				8	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	199 orang	196	196	196	196	196	196	Dinas Damkar	
6	**Sosial**	1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	1	Jumlah Layanan data yang dimiliki	1 Layanan (1.116 orang)	990 org	990 org	990 org	1000 org	1000 org	1000 org	Dinas Sosial	
				2	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	2.952 orang	2.977 orang	3.002orang	3.027 orang	3.052 orang	3.077 orang	3.102 orang	Dinas Sosial	
				3	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	Dinas Sosial	

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA (2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				4	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	108 orang	110 orang	110 orang	112 orang	115 orang	115 orang	120 orang	Dinas Sosial	
				5	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	Dinas Sosial	
				6	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	1.116 orang	990 org	990 org	990 org	1000 org	1000 org	1000 org	Dinas Sosial	
				7	Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	Dinas Sosial	
				8	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	1.064 orang	990 org	990 org	990 org	990 org	990 org	990 org	Dinas Sosial	
				9	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	48 orang	56 orang	56 orang	56 orang	56 orang	56 orang	56 orang	Dinas Sosial	
				10	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter	1 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	Dinas Sosial	
				11	Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	101 paket	97 paket	100 paket	100 paket	100 paket	100 paket	100 paket	Dinas Sosial	
				12	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	101 paket	97 paket	100 paket	100 paket	100 paket	100 paket	100 paket	Dinas Sosial	
				13	Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial	

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA (2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				14	Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang	Dinas Sosial	
				15	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	1.004 orang	726 orang	726 orang	726 orang	726 orang	726 orang	726 orang	Dinas Sosial	
				16	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	895 orang	726 orang	726 orang	726 orang	726 orang	726 orang	726 orang	Dinas Sosial	
				17	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	181 orang	170 orang	170 orang	170 orang	170 orang	170 orang	170 orang	Dinas Sosial	
				18	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	102 orang	150 orang	150 orang	150 orang	155 orang	155 orang	160 orang	Dinas Sosial	
				19	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	60 orang	70 orang	70 orang	70 orang	75 orang	75 orang	75 orang	Dinas Sosial	
				20	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	63 orang	70 orang	70 orang	70 orang	75 orang	75 orang	75 orang	Dinas Sosial	

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA (2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				21	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	13 orang	15 orang	15 orang	15 orang	17 orang	18 orang	20 orang	Dinas Sosial	
		2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	1	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	528 orang	550	550	550	550	550	550	Dinas Sosial	
				2	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	528 orang	550	550	550	550	550	550	Dinas Sosial	
				3	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	137 orang	140	140	140	140	140	140	Dinas Sosial	
				4	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	528 orang	550	550	550	550	550	550	Dinas Sosial	
				5	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	528 orang	550	550	550	550	550	550	Dinas Sosial	
				6	Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	168 orang	168	168	168	168	168	168	Dinas Sosial	
7	Tenaga Kerja	1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	1	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.	Ada	-	-	-	-	1	-	Disnakerin	
				2	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	((436.053+4,54+316,19+145+113+104.071) - (452.053+4,82+112.834,22+81+73.050)) ---------- x 100%	-7,40	-7,38	-7,32	-7,29	-7,25		Disnakerin	

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA (2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						436.053+4,54+49.316 ,19+145+0+104.071 = -7,56%								
				3	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/ko	Tidak ada	-	-	-	-	-	-	Disnakerin	
		2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	1	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	18 -------- x 100 % 18 = 100%	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	Disnakerin	
				2	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	230 -------- x 100 % 294 = 78,23%	221 ----- x 100 286 = 77,27%	255 ----- x 100 314 = 81,21%	270 ----- x 100 330 = 81,81%	293 ---- x 100 355 = 82,53 %	302 ---- x 100 360 = 83,88 %	332 ---- x 100 390 = 85,21 %	Disnakerin	
				3	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	230 -------- x 100 % 585 = 39, 31 %	286 ----- x 100 357 = 80, 11 %	314 ----- x 100 413 = 76, 02 %	330 ----- x 100 477 = 69, 18 %	355 ----- x 100 541 = 65, 61 %	360 ----- x 100 605 = 59, 50 %	390 ---- x 100 669 = 58,29 %	Disnakerin	
				4	Persentase LPK yang terakreditasi	37 -------- x 100 % 72 = 51,39 %	38 ---- x 100 76 = 50,00 %	45 ---- x 100 80 = 56,25 %	48 ---- x 100 84 = 57,14 %	52 ---- x 100 88 = 59,09 %	58 ---- x 100 92 = 63,04 %	62 ---- x 100 97 = 63,91 %	Disnakerin	

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA (2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				5	Persentase LPK yang memiliki perizinan	53 / 72 x 100 % = 73,61 %	58 / 76 = 76,31 %	63 / 80 = 78,75 %	65 / 84 = 79,76 %	70 / 87 = 80,45 %	74 / 90 = 81,52 %	77 / 94 = 81,91 %	Disnakerin	
				6	Jumlah penganggur yang dilatih	585	357	413	477	541	605	669	Disnakerin	
				7	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	585 / 585 x 100 % = 100 %	357 / 357 = 100 %	413 / 413 = 100 %	477 / 477 = 100 %	541 / 541 = 100 %	605 / 605 = 100 %	669 / 669 = 100 %	Disnakerin	
				8	Persentase penyerapan lulusan	65 / 81 x 100 % = 80,25 %	70 / 86 = 81,39 %	73 / 88 = 82,95 %	76 / 91 = 83,51 %	80 / 95 = 84,21 %	84 / 98 = 85,71 %	90 / 104 = 86,53 %	Disnakerin	
				9	Lulusan bersertifikat kompetensi	585 / 585 x 100 % = 100 %	357 / 357 = 100 %	413 / 413 = 100 %	477 / 477 = 100 %	541 / 541 = 100 %	605 / 605 = 100 %	669 / 669 = 100 %	Disnakerin	
				10	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	Tidak ada	-	-	-	-	-	-	Disnakerin	

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA (2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				11	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	Tidak ada	1	1	1	1	1	1	Disnakerin	
		3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	1	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	125 ------- x 100 % 3.562 = 3,51%	-	-	-	-	-	-	Disnakerin	
				2	Data tingkat produktivitas total	-	-	-	-	-	-	-		
		4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	1	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	315 -------- x 100 % 2.442 = 12,89%	330/ 2442 = 13.51%	355/ 2442 = 14.53%	375/ 2442 = 15.35%	400/ 2442 = 16.38%	420/ 2442 = 17.19%	450/ 2442 = 18.42%	Disnakerin	
				2	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	12 -------- x 100 % 123 = 9,8 %	12/ 123 = 9.8%	14/ 1235 = 11.2%	15/ 128 = 11.71%	17/ 130 = 13.07%	19/ 133 = 14.28%	22/ 135 = 16.29%	Disnakerin	
				3	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	123	123	125	128	130	133	135	Disnakerin	
				4	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	206 -------- x 100 % 327 = 62,9%	214/ 327 = 65.44%	221/ 327 = 67.58%	226/ 327 = 69.11%	233/ 327 = 71.25%	240/ 327 = 73.39%	245/ 327 = 74.92%	Disnakerin	

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA (2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				5	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebatai peserta BPJS Ketenagakerjaan	3.316 -------- x 100 % 3.562 = 93,09 %	3320/3562 = 93.20%	3324/3562 = 93.31%	3330/3562 = 93.48%	3340/3562 = 93.76%	3352/3562 = 94.10%	3370/3562 = 94.60%	Disnakerin	
				6	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	47 -------- x 100 % 3.562 = 1,32%	60/3562 = 1.68%	60/3562 = 1.68%	60/3562 = 1.68%	60/3562 = 1.68%	60/3562 = 1.68%	60/3562 = 1.68%	Disnakerin	
				7	Jumlah mogok kerja	-	-	-	-	-	-	-	Disnakerin	
				8	Jumlah penutupan perusahaan	5	5	4	4	3	3	2	Disnakerin	
				9	Jumlah perselisihan kepentingan	-	-	-	-	-	-	-	Disnakerin	
				10	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	-	-	-	-	-	-	-	Disnakerin	
				11	Jumlah perselisihan PHK	44	60	58	55	53	52	50	Disnakerin	
				12	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	164	180	175	170	160	155	150	Disnakerin	
				13	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	10	12	14	17	20	22	25	Disnakerin	
				14	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	Tidak ada	1	1	1	1	1	1	Disnakerin	
				15	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian	32	70%	72%	73%	74%	74%	75%	Disnakerin	

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA (2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
					Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	-------- x 100 % 47 = 68,08 %								
		5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kota	1	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	117	500	500	500	500	500	500	Disnakerin	
				2	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	1.589	1500	1500	1500	1500	1500	1500	Disnakerin	
				3	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	19 BKK	19	19	19	19	19	19	Disnakerin	
				4	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	16 Orang	50	50	50	50	50	50	Disnakerin	
				5	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	6 Orang	9	9	9	9	9	9	Disnakerin	
				6	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	Tidak ada	5	7	9	10	10	10	Disnakerin	
				7	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota	30 Perjanjian	30	30	30	30	30	30	Disnakerin	
				8	Jumlah penempatan tenaga kerja melaluiInformasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	-	-	-	-	-	-	-	Disnakerin	
				9	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	-	-	-	-	-	-	-	Disnakerin	
				10	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	30	30	30	30	30	30	30	Disnakerin	

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA (2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				11	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	-	-	-	-	-	-	-	Disnakerin	
				12	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yangmendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	Tidak ada	-	-	-	-	-	-	Disnakerin	
				13	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	-	-	-	-	-	-	-	Disnakerin	
				14	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentukan	-	-	-	-	-	-	-	Disnakerin	
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD	1	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	38 lembaga	40	40	40	40	40	40	DP3AP2KB	
				2	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	115 program	115	115	115	115	115	115	DP3AP2KB	
		2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kota	1	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	2 media	2	2	2	2	2	2	DP3AP2KB	

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA (2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				2	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	2 lembaga	2	2	2	2	2	2	DP3AP2KB	
				3	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	78 -------- x 100 % 78 = 100 %	100	100	100	100	100	100	DP3AP2KB	
				4	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	2 lembaga	2	2	2	2	2	2	DP3AP2KB	
				5	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	2 lembaga	2	2	2	2	2	2	DP3AP2KB	
		3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	1	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	1 organisasi	1	1	1	1	1	1	DP3AP2KB	
				2	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	104 kader	104	104	104	104	104	104	DP3AP2KB	
				3	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	2 lembaga	2	2	2	2	2	2	DP3AP2KB	
				4	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	2 lembaga	2	2	2	2	2	2	DP3AP2KB	

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA (2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				5	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	2 kebijakan	2	2	2	2	2	2	DP3AP2KB	
				6	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi	2(dua) lembaga	2	2	2	2	2	2	DP3AP2KB	
				7	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	31 ----- x 100 % 31 = 100 %	100	100	100	100	100	100	DP3AP2KB	
9	Pangan	1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	1	Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Adanya 7 infrastruktur pergudangan sebagai sarana pendukung penyimpanan cadangan pangan yaitu: 1. LDPM Cenno Pulai Kec. Koto Tangah 2. LDPM Fajar Mahkota Kec. Koto Tangah 3. LDPM Inbis Sejahtera Kec. Kuranji 4. LDPM Harapan Jaya Kec. Nanggalo	7 LDPM	7 LDPM	7 LDPM	8 LDPM	9 LDPM	10 LDPM	Dinas Perikanan dan Pangan	

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA (2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						5. LDPM Harapan Bersama Kec. Pauh 6. Lumbung Pangan Labuah Malintang Kec. Koto Tangah 7. Lumbung Pangan Lapau Munggu Kec. Kuranji								
				2	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Tidak Ada	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	Dinas Perikanan dan Pangan	
				3	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Dinas Perikanan dan Pangan	
				4	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Ada Kegiatan Pemberdayaan Melalui Kegiatan: 1. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi pangan Lokal	2 bantuan KRPL dan 29 Orang pelatihan pangan lokal	11 bantuan KRPL dan 60 Orang pelatihan pangan lokal	15 bantuan KRPL dan 60 Orang pelatihan pangan lokal	15 bantuan KRPL dan 60 Orang pelatihan pangan lokal	11 bantuan KRPL dan 60 Orang pelatihan pangan lokal	11 bantuan KRPL dan 60 Orang pelatihan pangan lokal	Dinas Perikanan dan Pangan	

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA (2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						2. Peningkatan Pelatihan Teknologi Pengolahan Pangan Lokal								
				5	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada	1 peta	1 peta	1 peta	1 peta	1 peta	1 peta	Dinas Perikanan dan Pangan	
				6	Tertanganinya kerawanan pangan	1. Penanganan Kewanan Pangan dan Gizi	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	Dinas Perikanan dan Pangan	
				7	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Ada	2 kali	2 kali	3 kali	4 kali	5 kali	5 kali	Dinas Perikanan dan Pangan	
				8	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Ada (kegiatan pengawasan keamanan pangan segar melalui uji mutu dan keamanan pangan)	26 sampel	35 sampel	45 samepl	55 sampel	65 sampel	75 sampel	Dinas Perikanan dan Pangan	

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA (2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
10	Pertanahan	1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	1	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	1.435 -------- x 100 % 1.435 = 100 %	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanahan data KPPR terkait penataan ruang di PUPR	Dinas pertanahan tidak ada mengeluarkan izin lokasi
				2	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	1 -------- x 100 % 1 = 100 %	1 SK	1 SK	2 SK	2 SK	2 SK	2 SK	Dinas Pertanahan	
				3	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	0 -------- x 100 % 0 = 0 %	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Dinas Pertanahan	
				4	Dokumen Izin membuka tanah	0 ----- x 100 % 0 = 0 %	- -	-	-	-	-	-	Dinas Pertanahan	
				5	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	95 Kapling -------- x 100 %	75 %	77 %	79 %	80 %	82 %	85 %	DPUPR	

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA (2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						133 Kapling = 71,43 %								
11	Lingkungan Hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota	1	Hasil perhitungan provinsi terhadap : a. Indeks kualitas air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) b. Indeks tutupan hutan (ITH) c. Indeks Tutupan Hutan (ITH)	IKA : 69.09 IKU : 87.80 IKL : 71.78	IKA : 79.70 IKU : 73.17 IKL : 80.44	IKA : 79.71 IKU : 73.18 IKL : 80.46	IKA : 79.72 IKU : 73.19 IKL : 80.47	IKA : 79.73 IKU : 73.20 IKL : 71.78	IKA : 69.09 IKU : 87.80 IKL : 80.49	IKA : 79.74 IKU : 73.21 IKL : 80.50	DLH	
		2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kota	1	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	232.327,64 -------- x 100 % 240.131,93 = 96,75%	95.%	96.10 %	96.88 %	96.66 %	98.00 %	99.22 %	DLH	
		3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota	1	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	36 -------- x 100 % 36 = 100 %	95	96	67	98	99	100	DLH	
				2	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang	3 -------- x 100 %	1.21	1.22	1.23	1.24	1.25	1.26	DLH	

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA (2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
					diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	289 = 1.03 %								
				3	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota	16 -------- x 100 % 16 = 100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	DLH	
				4	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	16 -------- x 100 % 16 = 100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	DLH	
				5	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	16 -------- x 100 % 16 = 100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	DLH	
				6	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani	53 -------- x 100 % 53 = 100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	DLH	
12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	1	Perekaman KTP Elektronik	1	Penerbitan akta perkawinan	225 -------- x 100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Disdukcapil	

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA (2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						225 = 100 %								
				2	Penerbitan akta perceraian	20 -------- x 100 % 20 = 100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Disdukcapil	
				3	Penerbitan akta kematian	5.967 -------- x 100 % 5.967 = 100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Disdukcapil	
				4	Penyajian data kependudukan	946.982 -------- x 100 % 946.982 = 100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Disdukcapil	
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	Persentase pengentasan desa tertinggal	1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	-	-	-	-	-	-	-	Bag. Tata Pemerintahan	Kota Padang tidak ada desa
				2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	-	-	-	-	-	-	-	Bag. Tata Pemerintahan	
				3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi	-	-	-	-	-	-	-	Bag. Tata Pemerintahan	

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA (2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
					dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan									
				4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	-	-	-	-	-	-	-	Bag. Tata Pemerintahan	
		2	Persentase peningkatan status desa mandiri	1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	-	-	-	-	-	-	-	Bag. Tata Pemerintahan	
				2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	-	-	-	-	-	-	-	Bag. Pemerintahan	
				3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	-	-	-	-	-	-	-	Bag. Tata Pemerintahan	
				4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	-	-	-	-	-	-	-	Bag. Tata Pemerintahan	
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	TFR (Angka Kelahiran Total)	1	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	DP3AP2KB	
				2	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	24,4 th	24	24	24	24	24	24	DP3AP2KB	

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA (2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				3	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15- 19)	5,9	5,7	5,4	5,2	5,1	4,9	4,7	DP3AP2KB	
				4	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	163.714+ 160.247 ----------x 100 181.305+ 181.305 = 89,34%	89,34	89,54	90	91	92	92	DP3AP2KB	
				5	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	5(lima) Stakeholder	5	5	5	5	5	5	DP3AP2KB	
		2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	1	Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	70 -----x 100% 118 = 59,32%	59,32	59,32	59,32	59,32	59,32	59,32	DP3AP2KB	
				2	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	16.848 --------- x 100% 91.545 = 18,40%	18,40	18,42	18,45	18,54	18,60	18,65	DP3AP2KB	
				3	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki	5 Kelompok (BKB, BKR, BKL, PIK R, UPPKS)	5 Kelompok (BKB	5 Kelompok (BKB	5 Kelompok (BKB	5 Kelompok (BKB,	5 Kelompok (BKB,	5 Kelompok (BKB,	DP3AP2KB	

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA (2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
					Kelompok Kerja KKBPK yang efektif		, BKR, BKL, PIK R, UPPKS)	, BKR, BKL, PIK R, UPPKS)	, BKR, BKL, PIK R, UPPKS)	BKR, BKL, PIK R, UPPKS)	BKR, BKL, PIK R, UPPKS)	BKR, BKL, PIK R, UPPKS)		
				4	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	4.008 ------- x 100% 9.325 = 42,98%	42,98	43,29	43,59	43,89	43,97	44,23	DP3AP2KB	
		3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	1	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	1. Kel. Belakang Pondok (0.81%) 2. Kel. Tanjuang Aua Nan XX (1,25%) 3. Kel. Koto Pulai (1,58%	0,81	1,5	1,8	2,8	3,6	3,8	DP3AP2KB	
				2	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	46.254 --------- x 100% 231.246 = 20,00%	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	DP3AP2KB	
15	Perhubungan	1	Rasio konektivitas Kota	1	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	4 ------ X 100% 5 = 80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	100%	100%	Dishub	

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA (2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				2	Terlaksananya pelayanan uji berkala	42.825 ------ X 100% 17.800 = 240,59 %	250 %	250 %	250 %	250%	250%	250%	Dishub	•
				3	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	4 ------ X 100% 4 = 100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dishub	
				4	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	3 ------ X 100% 3 = 100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dishub	
		3	V/C Ratio di jalan Kota	1	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalulintas untu jaringan jalan Kabupaten/Kota	3 ------ X 100% 3 = 100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dishub	
16	Komunikasi dan Informatika	1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	1	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	51 ------ X 100% 51	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Diskominfo	

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA (2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						=100 %								
				2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	51 ------ X 100% 51 =100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Diskominfo	
				3	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Diskominfo	
		2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	1	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015	51 ------ X 100% 51 = 100%	51 ------ X 100% 51 = 100 %	1 X 100% 1 = 100 %	1 X 100% 1 = 100%	1 X 100% 1 = 100%	1 X 100% 1 = 100%	51 --- X 100% 51 = 100%	
				2	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	35 ------ X 100% 51 = 68,63 %	35 ------ X 100% 51	7 X 100% 1	0 X 100% 1	2 X 100% 1	5 X 100% 1	7 X 100% 1	51 --- X 100% 51	

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA (2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
							= 68,63 %	= 72,54%	= 78,43%	= 82,35 %	= 88,23 %	= 92,15 %	= 100%	
				3	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangundangan	51 ---------- X 100% 51 = 100 %	51 -------- X 100% 51 = 100 %	1 - X 100% 1 =100 %	1 - X 100% 1 =100 %	1 - X 100% 1 =100 %	1 - X 100% 1 =100 %	1 -- X 100% 1 =100%	51 --- X - 100% 51 =100%	
				4	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	94 ------ X 100% 158 = 59.49 %	97 ------ 158 = 61,39 %	100 ------ 158 = 63,29 %	103 ------ 158 = 65,18 %	106 ------ 158 = 67,08 %	109 ------ 158 = 68,98 %	112 ------ 158 = 70,88 %	Diskominfo	
				5	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	8 ------ X 100% 158 = 5,06 %	6 %	7 %	7 %	8 %	8 %	8 %	Diskominfo	

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA (2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				6	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	82 ------ X 100% 82 = 100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Diskominfo	
				7	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	4 ------ X 100% 82 = 4,87 %	6 ------ 82 = 7,31 %	8 ------ 82 = 9,75 %	10 ------ 82 = 12,19 %	12 ------ 82 = 14,63 %	14 ------ 82 = 17,07 %	16 ------ 82 = 19,51 %	Diskominfo	
				8	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	51 ------ X 100% 51 = 100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	Diskominfo	
				9	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	51 ------ X 100% 51 = 100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Diskominfo	
				10	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya	51 X 100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Diskominfo	

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA (2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
					sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	------ 51 = 100 %								
				11	Persentase data yang dapat berbagi pakai	31 ------ X 100% 95 = 31.95 %	314 ------ 350 = 89,71 %	334 ------ 370 = 90,27 %	355 ------ 390 = 91.02 %	375 ------ 410 = 91.46 %	395 ------ 430 = 91.86 %	415 ------ 450 = 92.22 %	Diskominfo	
				12	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	51 ------ X 100% 51 = 100 %	51 ------ 51 = 100 %	51 ------ 51 = 100 %	51 ------ 51 = 100 %	51 ------ 51 = 100 %	51 ------ 51 = 100 %	51 ------ 51 = 100 %	Diskominfo	
				13	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	33 ------ X 100% 63 = 52,38 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Diskominfo	
				14	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah	Ada :	Ada :	Ada :	Ada :	Ada :	Ada :	Ada :	Diskominfo	

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA (2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
					terkait implementasi egovernment	Ada : 1. Master Plan TIK 2. Perwako Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 76 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Ada : 1. Master Plan TIK 2. Perwako Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 76 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan	Ada : 1. Master Plan TIK 2. Perwako Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 76 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan	Ada : 1. Master Plan TIK 2. Perwako Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 76 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan	Ada : 1. Master Plan TIK 2. Perwako Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 76 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan	Ada : 1. Master Plan TIK 2. Perwako Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 76 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan		

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA (2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
							Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	rintahan Berbasis Elektronik	an Berbasis Elektronik	Elektronik		
		3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kota	1	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	43 ------ X 100% 43 = 100%	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	Diskominfo	
				2	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	7.120 ------ X 100% 7.120 = 100%	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	Diskominfo	
				3	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	93 ------ X 100% 48 =193,8 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	Diskominfo	
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	1	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah	92 ------ X 100% 348	$\frac{67}{256} \times 100\%$	$\frac{40}{189} x\ 100\%$	$\frac{40}{149} x\ 100\%$	$\frac{40}{109} x\ 100\%$	$\frac{40}{69} x\ 100\%$	$\frac{29}{29} x\ 100\%$	Dinas Koperasi dan UKM	

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA (2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
					keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	= 26.43 %	= 26,17 %	= 21,16 %	= 26,84 %	= 36,69 %	= 57,97 %	= 100 %		
				2	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan ldalam daerah kabupaten/kota	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Koperasi dan UKM	
				3	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	345 ------ X 100% 440 = 78,40 %	58,01 %	58,14 %	58,15 %	58,24 %	58,29 %	58,23 %	Dinas Koperasi dan UKM	
				4	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	350 ------ X 100% 440 = 79,54 %	94,62 %	96,87 %	96%	95,23 %	95,45 %	91,66 %	Dinas Koperasi dan UKM	
				5	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	139 ------ X 100% 440 = 33,40 %	25,80 %	25%	24 %	22,85 %	21,81 %	20,37 %	Dinas Koperasi dan UKM	
				6	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	1.631 ------ X 100% 225. 090	= 1,27 %	$\frac{1500}{117.393} x 100$	$\frac{1500}{117.393} x 100$	= 1,27%	= 1,27%	= 1,27%	Dinas Koperasi dan UKM	

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA (2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						= 0,72 %		= 1,27 %	= 1,27 %					
				7	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	27 ------ X 100% 440 = 6,13%	6,4%	7,21 %	7,85 %	8,42%	8,91%	9,33%	Dinas Koperasi dan UKM	
				8	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	440 ------ X 100% 440 = 100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dinas Koperasi dan UKM	
				9	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	38 ------ X 100% 440 = 8,63 %	8,60 %	9,16 %	10%	11,42 %	12,72 %	16,66 %	Dinas Koperasi dan UKM	
				10	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	294 ------ X 100% 440 = 66,81 %	64,51 %	64,79 %	64%	61,79 %	61,49 %	60,27 %	Dinas Koperasi dan UKM	

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA (2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				11	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kielembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	294 ------ X 100% 440 = 66,81 %	57,63 %	58,75 %	59,2 %	59,23 %	61,27 %	57,16 %	Dinas Koperasi dan UKM	
				12	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	36 ------ X 100% 440 = 8,18 %	7,74 %	8,33 %	8,84 %	9,36%	9,8%	10,18 %	Dinas Koperasi dan UKM	
		2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	1	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	3.785 ------ X 100% 47.692 = 7,93%	8%	8,07 %	8,14 %	8,14%	8,14%	8,14%	Dinas Koperasi dan UKM	
				2	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	14.500 ------ X 100% 47.692 = 30,40%	30,46 %	30,52 %	30,58 %	30,58 %	30,58 %	30,58 %	Dinas Koperasi dan UKM	
				3	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	3.366 ------ X 100% 47.692	7,11 %	7,17 %	7,23 %	7,23%	7,23%	7,23%	Dinas Koperasi dan UKM	

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA (2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						= 7,05%								
				4	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	6.714 ------ X 100% 22.120 = 30,35%	16,57 %	16,76 %	16,96 %	17,15 %	17,35 %	17,35 %	Dinas Koperasi dan UKM	
				5	Persentase jumlah usaha mikro yang dberikan dukungan fasilitasi pemasaran	3.366 ------ X 100% 47.692 = 7,05%	7,11 %	7,17 %	7,23 %	7,23%	7,23%	7,23%	Dinas Koperasi dan UKM	
				6	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	2.584 ------ X 100% 47.692 = 4,41%	4,47 %	4,53 %	4,59 %	4,59%	4,59%	4,59%	Dinas Koperasi dan UKM	
				7	Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendampingan	47.692 ------ X 100% 47.692 = 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Koperasi dan UKM	
18	Penanaman Modal	1	Persentase peningkatan investasi di Kota	1	PERATURAN DAERAHmengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	5	2	2	2	2	2	2	DPMPTSP	

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA (2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				2	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Ada (78)	Ada (98)	Ada (118)	Ada (138)	Ada (158)	Ada (178)	Ada (198)	DPMPTSP	
				3	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	1	2	2	2	2	2	2	DPMPTSP	
				4	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	0	3	12	15	18	20	20	DPMPTSP	
				5	Kegiatan pameran penanaman modal	0	0	0	0	0	0	0	DPMPTSP	
				6	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	DPMPTSP	
				7	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	1.485	1517	1592	1671	1754	1841	1934	DPMPTSP	
				8	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	90.099	62.454	54.856	47.258	39.660	32.062	24.464	DPMPTSP	
				9	Laporan realisasi penanaman modal	3.650.616.831.415	2 Triliun	2,2 Triliun	2,5 Triliun	2,8 Triliun	3,1 Triliun	3,4 Triliun	DPMPTSP	
				10	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	7	624	650	685	720	745	780	DPMPTSP	
				11	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	155	540	568	574	585	600	630	DPMPTSP	

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA (2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				12	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi kabupaten/kota	19	83/83	88/88	95/95	101/101	108/108	115/115	DPMPTSP	
19	Kepemudaan dan Olahraga	1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	55	100	100	100	100	100	100	Dispora	
				2	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	0	30	30	40	50	50	50	Dispora	
		2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	1	Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	55	65	70	75	75	80	85	Dispora	
				2	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	55	55	60	60	75	80	100	Dispora	
		3	Peningkatan prestasi olahraga	1	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	494	514	534	554	574	594	619	Dispora	
				2	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	42	45	49	53	57	61	65	Dispora	
20	Statistik	1	Presentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	1	Tersedianya buku profil daerah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Diskominfo	
				2	Jumlah Survei statistik sektoral yang dilakukan	6 Kegiatan	4	4	4	4	4	4	Diskominfo	

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA (2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				3	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	7 Kegiatan	7	7	7	7	7	7	Diskominfo	
				4	Jumlah Survei statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	1 kegiatan	1	1	1	1	1	1	Diskominfo	
				5	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	3 kegiatan	1	1	1	1	1	1	Diskominfo	
				6	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	16 / 18 X 100% = 88,89 %	11 / 11	11 / 11	11 / 11	11 / 11	11 / 11	11 / 11	Diskominfo	
				7	Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	1.661 / 1.949 X 100% = 85,22 %	1.661 / 1.949	1.661 / 1.949	1.661 / 1.949	1.661 / 1.949	1.661 / 1.949	1.661 / 1.949	Diskominfo	
21	Persandian	1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	1	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	12 / 12 X 100% = 100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Diskominfo	
				2		8 / 8 X 100% = 100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Diskominfo	
				3		77 / 77 X 100%	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	Diskominfo	

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA (2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						= 100 %								
				4		61 ------ X 100% 61 =100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	Diskominfo	
22	Kebudayaan	1	Terlestarikannya Cagar Budaya	1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	55 + 8 + 8 + 8 + 8 = 87	8	8	8	8	8	8	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	
				2	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman	7 + 9 +2 = 18	7	7	7	7	7	7	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	
				3	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa,meningkatka n ketahanan budaya,dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	3	3	3	3	3	3	3	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	
				4	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	119 + 0 + 31 + 32 + 8 = 190	115	115	115	115	115	115	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	
				5	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	76 - 23 = 53	81	83	85	87	89	91	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA (2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				6	Perlindungan cagar budaya kabupaten/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	52 + 1 + 10 + 52 +0 = 115	115	115	115	115	115	115	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	
				7	Layanan perizinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	
				8	Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	0 + 0 +6 = 6	9	12	15	18	21	24	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	
				9	Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	Belum terdata	64	66	68	70	72	74	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	
				10	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	64 + 65 + 0 + 64 = 193	193	197	201	205	209	213	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	
				11	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.	50 kunjungan/bulan	50	55	60	65	70	75	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	
				12	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	64	64	66	68	70	72	74	Dinas Pendidikan dan	

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA (2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
													kebudayaan	
				13	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	14	19	20	21	22	23	24	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	
				14	Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	5	5	5	5	5	5	5	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	
				15	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	7	5	5	5	5	5	5	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	
				16	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	4 + 4 = 8	7	7	7	7	7	7	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	
				17	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	4 + 3 = 7	7	7	7	7	7	7	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	
				18	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	0 + 2 = 2	2	3	4	5	6	7	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA (2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				19	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	7	2	3	4	5	6	7	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	
23	Perpustakaan	1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	1	Rasio ketercukupan koleksiperpustakaan dengan penduduk	2.773.831 -------- x 100 % 847.724 = 327%	631.831 ----- 857.7 = 0,73	633.483 ----- 867.7 = 0,73	635.230 ----- 867.7 = 0,73	637.035 ----- 867.7 = 0,73	638.870 ----- 867.72 = 0,73	640.798 ------- 867.72 = 0,73	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
				2	Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	56.868 -------- x 100 % 847.724 = 6,70%	238.533 ----- 847.7 = 28,14%	239.200 ----- 847.7 = 28,22%	239.800 ----- 847.7 = 28,29%	240.400 ----- 847.7 = 28,36%	241.000 ----- 847.72 = 28,43%	241.610 ------- 847.72 = 28,50%	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
				3	Rasio ketercukupantenaga perpustakaan dengan penduduk	1.153 -------- x 100 % 847.724 = 0,13%	1.272 ------ 847.7 = 0,0015	1.275 ----- 847.7 = 0,0015	1.280 ----- 847.7 = 0,0015	1.285 ------ 847.7 = 0,0015	1.290 ------ 847.72 = 0,0015	1.295 ------- 847.72 = 0,0015	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
				4	Persentaseperpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	619 -------- x 100 % 721	628/721 = 87,10%	637/721 = 88,34%	646/721 = 89,59%	656/721 = 90,98%	665/721 = 92,23%	674/721 = 93,48%	Dinas Perpustakaan dan Arsip	

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA (2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						= 85,85%								
				5	Jumlahpemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	679 Kegiatan	680 Kegiatan	682 Kegiatan	684 Kegiatan	686 Kegiatan	688 Kegiatan	690 Kegiatan	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
		2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	1	Jumlah naskah kunoyang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
				2	Jumlah naskah kunoyang dialih aksara dan dialih bahasa	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
				3	Jumlah koleksibudaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
24	Kearsipan	1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	1.808 -------- x 100 % 1.808 = 100%	75%	80%	85%	90%	95%	100%	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
				2	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	118.157 -------- x 100 % 118.157	67.50 ----- 135.0	160.5 ----- 267.5	249.0 ----- 357.0	325.6 ----- 407.1	388.2 ----- 441.4	441.42 ------- 441.42	Dinas Perpustakaan dan Arsip	

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA (2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						= 100%	= 50%	= 60%	= 70%	= 80%	= 90%	= 100%		
				3	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	11.520 -------- x 100 % 11.520 = 100%	58.76 ----- 113.6 = 51,69%	70.28 ----- 113.7 = 61,81%	81.80 ----- 113.7 = 71,94%	93.32 ----- 114.0 = 81,86%	104.84 ------ 115.00 = 91,16%	115.36 ------- 116.00 = 99,44%	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
				4	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	11.520 -------- x 100 % 15.342 = 75%	37.20 ----- 155.0 = 24%	48.70 ----- 292.5 = 16%	60.20 ----- 387.0 = 15%	71.70 ----- 442.1 = 16%	83.200 ------ 481.22 = 17%	94.700 ------- 496.42 = 19%	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
		2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	1	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	100%	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
				2	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	100%	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
				3	Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di provinsi	100%	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	Dinas Perpustakaan dan Arsip	

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA (2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				4	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota yang sesuai NSPK	100%	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
				5	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	100%	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
				6	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK	100%	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
25	Kelautan dan pangan	1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kota di (sumber data: one data KKP)	1	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	2.456 orang	2.310 orang	2.315 orang	2.318 orang	2.320 orang	2.323 orang	2.325 orang	Dinas Perikanan dan Pangan	
				2	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	Kota Padang memiliki 2 TPI 1 milik pemerintah dan 1 milik swasta. Dan TPI tidak beroperasional.	Tidak beroperasional	Tidak beroperasional	Tidak beroperasional	Tidak beroperasional	Tidak beroperasional	Tidak beroperasional	Dinas Perikanan dan Pangan	
				3	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) dibidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	Tidak ada Pengeluaran Izin IUP di DPP sejak Tahun 2023 karena peizinan sudah di Dinas DPMPTSP	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Dinas Perikanan dan Pangan	

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA (2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				4	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan Pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/kemudahan akses iptek daninformasi/dan penguatan kelembagaan)	ada	234 orang	234 orang	234 orang	254 orang	254 orang	254 orang	Dinas Perikanan dan Pangan	
				5	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	31.449.810 ekor	31.604.942 ekor	32.553.090 ekor	33.529.683 ekor	34.535.573 ekor	35.571.641 ekor	36.638.790 ekor	Dinas Perikanan dan Pangan	
26	Pariwisata	1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	1.	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	67 Objek Wisata - Pemerintah: 6 - Swasta : 61	69 Objek Wisata	71 Objek Wisata	73 Objek Wisata	75 Objek Wisata	77 Objek Wisata	79 Objek Wisata	Dinas Pariwisata	
				2.	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	158 fasilitas umum dan fasilitas pariwisata - Fasilitas umum 44 - Fasilitas pariwisata 144	162 fasilitas umum dan fasilitas pariwisata	165 fasilitas umum dan fasilitas pariwisata	168 fasilitas umum dan fasilitas pariwisata	172 fasilitas umum dan fasilitas pariwisata	178 fasilitas umum dan fasilitas pariwisata	182 fasilitas umum dan fasilitas pariwisata	Dinas Pariwisata	
				3.	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata persub jenis usaha di kabupaten/kota	2.474 tanda daftar usahapariwisata	2.598	2.647	2.673	2.966	2.721	2.770	Dinas Pariwisata	

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA (2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				4.	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	191.632 wisman	193.352	195.111	196.900	198.725	200.585	202.471	Dinas Pariwisata	
				5.	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	11 event	13	15	16	17	18	20	Dinas Pariwisata	
				6.	Jumlah event luar negeri yang Diikuti kabupaten/kota	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pariwisata	
				7.	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata didalam negeri	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pariwisata	
				8.	Persentase tenaga kerja disektor parwisata yang disertifikasi	401 -------- x 100 % 2.823 = 14,20%	14.50%	15.00%	15.50%	15.80%	16.00%	16.30%	Dinas Pariwisata	
				9.	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	630 -------- x 100 % 630 = 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pariwisata	
				10.	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	32 Pokdarwis	34	36	38	40	42	44	Dinas Pariwisata	

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA (2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
27	Pertanian	1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	1	Jumlah Sarana dan prasarana pertanian yang diberikan	49 (pembangunan RMU, peralatan RMU, Pembangunan Lantai Jemur RMU, Pembangunan rumah jamur, alat dan mesin rumah jamur, normalisasi saluran irigasi, dan Parit, Pembangunan jaringan Irigasi Tersier, Alsintan)	100	53	55	52	51	51	Dinas Pertanian	
				2	Prasarana pertanian yang digunakan	2 Normalisasi Saluran irigasi, 1 Dam Parit, 4 Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier	1 Dam Pari, 6 pembangunan Jaringan Irigasi	2 Dam Pari, 9 pembangunan Jaringan Irigasi, 7 Lantai Jemur, 7 Gudang benih	2 Dam Pari, 9 pembangunan Jaringan Irigasi, 7 Lantai Jemur, 7 Gudang benih	2 Dam Pari, 9 pembangunan Jaringan Irigasi, 7 Lantai Jemur, 7 Gudang benih	1 Dam Pari, 6 pembangunan Jaringan Irigasi, 7 Lantai Jemur, 7 Gudang benih	1 Dam Pari, 6 pembangunan Jaringan Irigasi, 7 Lantai Jemur, 7 Gudang benih	Dinas Pertanian	
				3	Penerbitan izin usaha pertanian	158 Izin Usaha	200 izin Usaha	250 izin Usaha	300 izin Usaha	300 izin Usaha	300 izin Usaha	300 izin Usaha	Dinas Pertanian	
				4	Persentase prasarana yang digunakan	7 -------- x 100% 7 = 100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pertanian	

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA (2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				5	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kab/kota	158 -------- x 100% 158 = 100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pertanian	
		2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	1	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana (bencana yang dimaksud adalah bencana pertanian dan hewan menular)	139,95 Ha -------- x 100% 139,95 Ha = 100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pertanian	
28	Kehutanan	1	Kehutanan	1	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dinas Pertanian	
				2	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian/ BPBD	
				3	Pemulihan ekosistem pada Tahura	240 Ha	240 Ha	240 Ha	240 Ha	240 Ha	240 Ha	240 Ha	Dinas Pertanian	
				4	Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian	
29	Energi Sumber Daya Mineral	1	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	1	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	-	-	-	-	-	-	-	Disnakerin	
30	Perdagangan	1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	1	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan	a. 46 ------ X 100% 46 =100 % a. 73 ------ X 100% 73 = 100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dinas Perdagangan (sekarang kewenangan DPMPTSP)	

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA (2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				2	Persentase penerbitan TDG	18 -------- x 100 % 18 =100 %	12	12	12	12	12	12	Dinas Perdagangan	
				3	Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	78 -------- x 100 % 155 =50,3 %	155	155	155	155	155	155	Dinas Perdagangan	
				4	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk : a. Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri b. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri c. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perdagangan	
				5	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	9 -------- x 100 % 9	9	9	9	9	9	9	Dinas Perdagangan	

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA (2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						=100 %								
				6	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	-	-	-	-	-	-	-		
				7	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan diwilayah kerjanya	K = (0,5+0,5) x100% K = 100	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	Dinas Perdagangan	
				8	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	2,,61	8	8	8	8	8	8	Dinas Perdagangan	
		2	Persentase kinerja realisasi pupuk	1	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	3.146,94 Ton -------- x 100 % 5.023,80 Ton = 62,64 %	80%	80%	85%	85%	85%	90%	Dinas Pertanian	
		3	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	1	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	4.341 -------- x 100 % 4.970 = 87,34 %	4890	4950	4810	4980	4880	4990	Dinas Perdagangan	
				2	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	25 -------- x 100 % 21 = 119 %	24	25	25	27	27	27	Dinas Perdagangan	
31	Perindusrian	1	Pertambahan jumlah industri Kecil dan Menengah di kota	1	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk	1	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan	30 % + 20 % + 25% + 15 % +10 % =100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	Disnakerin	

NO	URUSAN	NO	IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA (2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			turunan indikator pembangunan industry dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK		ditetapkannya menjadi PERATURAN DAERAH									
		3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	1	Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	1.414 ------X 100% 2.038 = 69,38 %	10 %	12 %	13 %	15%	17 %	20 %	Disnakerin	
		4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	1	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	1	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota	266 ------ X 100% 15.956 = 1, 677 %	1,67 9%	1,68 1%	1,68 3%	1,685 %	1,687 %	1,789 %	Disnakerin	
32	Transmigrasi	1	Transmigrasi	1	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	-	-	-	-	-	-	-	-	
				3	**Jumlah satuan pemukiman yang dibina**	-	-	-	-	-	-	-	-	

3. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)

NO	URUSAN	NO	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA(2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Pendidikan	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	19.837 ------- x 100 % 32.238 = 61,53%	62%	65%	67%	70%	72%	75%	Dinas Pendidikan	
		2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	91.562 -------- x 100 % 98.741 = 92,72%	93%	94%	95%	96%	97%	98%	Dinas Pendidikan	
		3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	46.522 -------- x 100 % 49.645 = 93,70%	94%	95%	96%	97%	98%	99%	Dinas Pendidikan	
		4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar	1.684 -------- x 100 % 1.337 = 125,95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan	

NO	URUSAN	NO	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA(2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan									
2	Kesehatan	1	Rasio daya tampung RS Rujukan	2.997 -------- x 100 % 946.982 = 0,32%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	
		2	Persentase RS Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasi	27 -------- x 100 % 27 = 100%	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	
		3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	6.316 -------- x 100 % 6.316 = 100%	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	
		4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	6.316 -------- x 100 % 6.316 = 100%	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	
		5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	5.997 -------- x 100 % 5.997 = 100%	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	

NO	URUSAN	NO	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA(2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	29.443 -------- x 100 % 29.443 = 100%	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	
		7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	132.567 -------- x 100 % 148.386 = 89,34%	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	
		8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	605.655 -------- x 100 % 600.662 = 100,83%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	
		9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	92.344 -------- x 100 % 114.201 = 80,86%	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	
		10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	71.574 -------- x 100 % 71.574 = 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	
		11	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang	17.727	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	

NO	URUSAN	NO	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA(2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-------- x 100 % 17.850 = 99,3%								
		12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	2.353 -------- x 100 % 2.353 = 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	
		13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	26.790 -------- x 100 % 26.790 = 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	
		14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	23.640 -------- x 100 % 23.640 = 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kota	0 Ha ---- x 100 % 1 Ha = 0%	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR	Merupakan kewenangan pemerintah pusat
		2	Rasio luas kawasan permukiman	0 m	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR	Merupakan kewenangan pemerintah pusat

NO	URUSAN	NO	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA(2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kota	---- x 100 % 1 m = 0%								
		3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	3.290 hektar ---- x 100 % 4.239,75 hek = 77,6%	79 %	81 %	83 %	85 %	87 %	88 %	Dinas PUPR	
		4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kota	235.083 ---- x 100 % 239.828 = 98,02%	98,10%	98,20 %	98,50%	98,80%	99,50%	100%	Dinas Perkim	
		5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	239.828 ---- x 100 % 239.828 = 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Perkim	
		6	Mengukur rasio kepatuhan IMB kota	1.399 ---- x 100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DPUPR	

NO	URUSAN	NO	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA(2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				1.399 = 100%								
		7	Tingkat kemantapan jalan kota	511,371 Km ---- x 100 % 624,691 Km = 81,86%	82 %	82.6 %	83.9%	84,6%	85,2%	85,86%	Dinas PUPR	
		8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	9 ---- x 100 % 9 = 100 %	81,86%	81,86 %	81,86%	81,86%	81,86%	81,86%	Dinas PUPR	
		9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	55 Paket ---- x 100 % 55 Paket = 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas PUPR	
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kota	3 ---- x 100 % 3 = 100. %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Perkim	
		2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kota	0 -------- x 100 % 1 = 0 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Perkim	

NO	URUSAN	NO	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA(2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	230,29 Ha -------- x 100 % 230,29 Ha = 100%	56,31%	66,85 %	78,57%	90,29%	100%	100%	Dinas Perkim	
		4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	7.080 -------- x 100 % 239.828 = 2.95%	2,89%	2,82 %	2,75%	2,68%	2,60%	2,52%	Dinas Perkim	
		5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	1.088 -------- x 100 % 1.088 = 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Perkim	
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	37 ----- x 100 % 37 = 100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Satpol PP	
		2	Persentase Peraturan Daerahdan Perkada yang ditegakkan	21 -------- x 100 % 21 = 100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Satpol PP	
		3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan	553.622	72	78	82	88	95	100	BPBD	

NO	URUSAN	NO	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA(2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			informasi rawan bencana	-------- x 100 % 641.385 = 86,32%								
		4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	7.925 -------- x 100 % 918.851 = 0,86%s	72	78	82	88	95	100	BPBD	
		5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	8.337 -------- x 100 % 8.337 = 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BPBD	
		6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban Kebakaran	243 -------- x 100 % 243 = 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Damkar	
		7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	7,70 Menit	7,60	7,50	7,40	7,20	7,10	7 menit	Dinas Damkar	

NO	URUSAN	NO	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA(2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
6	Sosial	1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	4.647 -------- x 100 % 2.952 = 157,41%	38	38,50	39	39,25	39,50	39,75	Dinas Sosial	
		2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	528 -------- x 100 % 528 = 100%	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial	
7	Tenaga Kerja	1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	5 ---- x 100 % 18 = 27,78%	-	-	-	-	-	-	Disnakerin	
		2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	15 -------- x 100 % 1.228 = 1,22%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Disnakerin	

NO	URUSAN	NO	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA(2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	51.611,55 -------- x 100 % 104.071 = 49,593%							Disnakerin	
		4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	68 ---- x 100 % 72 = 94,44%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Disnakerin	
		5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kota	1.130 ---- x 100 % 1.589 = 71,1%	71,1%	71,2 %	71,3%	71,4%	71,5%	71,6%	Disnakerin	
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD	301.309.131. ---- x 100 % 2.553.196.48 = 11,80%	11,80	12,00	12,25	12,50	12,75	13,00	DP3AP2KB	
		2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kota	78 ---- x 100 % 78	100	100	100	100	100	100	DP3AP2KB	

NO	URUSAN	NO	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA(2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				= 100%								
		3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	31 ---- x 100 % 335.463 = 9,24 per 100.000	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	DP3AP2KB	
9	Pangan	1	Persentase cadangan pangan	111,99 --- x 100 % 81,46 = 137,48%	178,82	237,65	284,70	331,76	378,82	425,88	Dinas Perikanan dan Pangan	
10	Pertanahan	1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	785.367 M2 -------- x 100 % 787.037 M2 = 96.357%	1.450 permohonan	1.450 permohonan	1.450 permohonan	1.450 permohonan	1.450 permohonan	1.450 permohonan	DPUPR	
		2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	2 lokasi --- x 100 % 2 lokasi = 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pertanahan	

NO	URUSAN	NO	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA(2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	787.037 M2 ------- x 100 % 787.037 M2 = 100%	1.450 permohonan	1.450 permohonan	1.450 permohonan	1.450 permohonan	1.450 permohonan	1.450 permohonan	DPUPR	
		4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	1 ------- x 100 % 150 = 0,67%	0,5 %	0,5%	0,5 %	0,5 %	0,68 %	0,68 %	Dinas Pertanahan	
		5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanahan	
		6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	9 kasus ------- x 100 % 9 kasus = 100%	80	80	80	90	90	100	Dinas Pertanahan	
11	Lingkungan Hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota	IKLH = 77.26 IKA = 69.09 IKU = 87.80 IKL = 71.78	LH : 77.26 A : 79.70 U : 73.17 IKL : 80.44	KLH : 7.27 : 79.71 : 73.18 IKL : 80.46	H : 77.28 A : 79.72 U : 73.19 IKL : 80.47	LH : 77.29 A : 79.73 U : 73.20 IKL : 80.49	LH : 77.30 A : 79.74 U : 73.21 IKL : 80.50	LH : 77.31 A : 81.09 U : 74.67 IKL : 80.78	DLH	
		2	Terlaksananya pengelolaan sampah	232.327, 64	95.%	96.10 %	96.88%	96.66%	98.00%	99.22%	DLH	

NO	URUSAN	NO	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA(2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			di wilayah Kota Padang	-------- x 100 % 240.131, 93 = 96,75%								
		3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	DLH	
12	Administrasi Kependudukan dan Penatatan Sipil	1	Perekaman KTP Elektronik	679.303 -------- x 100 % 682.014 = 99,60%	99,60 %	99,60 %	99,61 %	99,61 %	99,62 %	99,63 %	Disdukcapil	
		2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	153.675 -------- x 100 % 256.125 = 60%	60,05%	60,08 %	60,10	60,12 %	60,15 %	60,18 %	Disdukcapil	
		3	Kepemilikan akta kelahiran	272.411 -------- x 100 % 273.663 = 99,54%	99,58 %	99,62 %	99,64%	99,68 %	99,70%	99,73%	Disdukcapil	

NO	URUSAN	NO	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA(2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	4 -------- x 100 % 42 = 9,52%	4 opd	2 opd	2 opd	2 opd	2 opd	2 opd	Disdukcapil	
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	Persentase pengentasan desa tertinggal	-	-	-	-	-	-	-		
		2	Persentase peningkatan status desa mandiri	-	-	-	-	-	-	-		
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,2	2,2	2,19	2,19	2,19	2,18	2,18	DP3AP2KB	
		2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	63.237 -------- x 100 % 91.545 = 69,07%	69,07	69,15	69,25	69,35	69,45	69,55	DP3AP2KB	
		3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	5.861 -------- x 100 % 91.545 = 6,40%	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	DP3AP2KB	

NO	URUSAN	NO	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA(2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
15	Perhubungan	1	Rasio konektivitas Kota	)3 x 1 IK 1= ---- x 100)3 = 100% IK 2 = 0 RKK = (1 x 1) + 0 = 1,00	60%	60,2 %	60,4%	60,6%	60,8%	70%	Dishub	
		2	V/C RASIO di jalan kota	1.318,0 -------- x 100 % 2.778,3 = 0,46%	0,47%	0,48 %	0,49%	0,50%	0,51%	0,52%	Dishub	
16	Komunikasi dan Informatika	1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	42 -------- x 100 % 42 = 100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Diskominfo	
		2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	8 -------- x 100 % 15 = 53,33%	9 --- x 100 % 15 = 60%	11 --- x 10 % 15	12 --- x 100 % 15 = 80%	13 --- x 100 % 15 = 86,66%	14 --- x 100 % 15 = 93,33%	15 --- x 100 % 15 = 100%	Diskominfo	

NO	URUSAN	NO	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA(2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						= 73,33 %						
		3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kota	641.385 -------- x 100 % 641.385 = 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Diskominfo	
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	92 ------- x 100 % 348 = 26,43%	26,17 %	21,16 %	26,84 %	36,69 %	57,97 %	100 %	Dinas Koperasi dan UKM	
		2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	10.196 ------- x 100 % 47.692 = 21,13%	27 %	32 %	37 %	43 %	48 %	53 %	Dinas Koperasi dan UKM	
18	Penanaman Modal	1	Persentase peningkatan investasi di Kota Padang	3.650.616.831.415 – 1.431.310.804.191	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DPMPTSP	

NO	URUSAN	NO	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA(2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				-------- x 100 % 1.431.310. 804.191 = 155 %								
19	Kepemudaan dan Olahraga	1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	1.455 -------- x 100 % 225.698 = 0,64%	0,65	0,67	0,68	0,69	0,70	0,71	Dispora	
		2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	20.738 -------- x 100 % 225.698 = 9,18%	15	15,3	15,5	15,8	16	16,3	Dispora	
		3	Peningkatan prestasi olahraga	110Medali	111	112	113	114	115	116	Dispora	
20	Statistik	1	Presentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	42 -------- x 100 % 42 =100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Diskominfo	

NO	URUSAN	NO	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA(2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	42 -------- x 100 % 42 =100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Diskominfo	
21	Persandian	1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	430 ------ x 100 % 645 = 66,7 %	68%	70%	75%	77%	80%	80%	Diskominfo	
22	Kebudayaan	1	Terlestarikannya Cagar Budaya	81 -------- x 100 % 81 = 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
23	Perpustakaan	1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	70,01	74	76	77	78	80	81	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
		2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	85,47	86	86	86	86	86	88	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
24	Kearsipan	1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59	T = a+i+s+j) '4)0%+10)%+100 %+75%) '4 T =)3,75%	50,17%	54,45 %	60,48%	66,96%	73,29%	97,61%	Dinas Perpustakaan dan Arsip	

NO	URUSAN	NO	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA(2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan									
		2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	T = (m + b + g + a + c + i)/6 T = (100%+ 100%+ 100%+ 100%+ 100%+ 100%)/ 6 T = 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
25	Kelautan dan Perikanan	1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kota di (sumber data: one data KKP)	32.924,29 To -------- x 100 23.497,35 = 140,12%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dinas Perikanan dan Pangan	
26	Pariwisata	1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	191.632 – 455. -------- x 100 % 455.698 = - 57,95%	191.632 455.698 -------- x 10 % 455.698 = 57,95%	0,89	0,9	0,91	0,92	0,93	Dinas Pariwisata	

NO	URUSAN	NO	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA(2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kota	5.455.685 – 3.702.842 -------- x 100 % 3.702.842 = 47,34 %	5.455.68 3.702.8 -------- x 10 3.702.8 = 47,34 %	2,3	2,5	2,7	2,9	3,1	Dinas Pariwisata	
		3	Tingkat hunian akomodasi	696.326 -------- x 100 % 1.370.575 = 50,81%	694.985 -------- x 100 % 1.370.575 = 50,71%	50.87	50,95	51,03	51,12	51,20	Dinas Pariwisata	
		4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	1.140,19 -------- x 100 % 84.182,56 = 1,35%	1.140,19 ----- x 100 % 84.182,56 = 1,35%	1,19	1,23	1,33	1,37	1.40	Dinas Pariwisata	
		5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	140.213.296. -------- x 100 % 662.549.854. = 21,16%	140.213.2 96.706 ---- x 100 % 662.549.8 54.335 = 21,16%	15,81	14,53	13,43	12,63	12,90	Dinas Pariwisata	

NO	URUSAN	NO	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA(2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
27	Pertanian	1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	46.940,20 To ------ x 100 % 10.122 Ha = 4,64 ton/Ha	46.940,20 Ton ----- x 100 % 10.122 Ha = 4,64 ton/Ha	4,87 ton/Ha	5,11 ton/Ha	5,37 ton/Ha	5,64 ton/Ha	5,92 ton/Ha	Dinas Pertanian	
		2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	(13 - 115) --- x 100 % 115 = - 88,69%	-90%	-90%	-90%	-90%	-90%	c	Dinas Pertanian	
28	Energi Sumber Daya Mineral	1	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kota	-	-	-	-	-	-	-	DPMPTSP	
29	Perdagangan	1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	73 -------- x 100 % 73 = 100 %	pupr	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dinas Perdagangan	

NO	URUSAN	NO	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA(2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		2	Persentase kinerja realisasi pupuk	3.146,94 Ton -------- x 100 % 8.568,324 Ton = 36,72 %	50%	60%	65%	70%	80%	90%	Dinas Pertanian	
		3	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	4.341 ------- x 100 % 4.970 = 87 %	87,50 %	87,65 %	87,7 %	87,85 %	87,90 %	88 %	Dinas Perdagangan	
30	Perindusrian	1	Pertambahan jumlah industri Kecil dan Menengah di kota	9.817 – 8.403 -------- x 100 % 8.403 = 16,83 %	16,85%	16,87 %	16,89%	16,91%	16,93%	16,95%	Disnakerin	
		2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industry dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Disnakerin	
		3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI)	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Disnakerin	

NO	URUSAN	NO	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA(2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait									
		4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI yang lokasinya lintas daerah kota dalam 1 kota yang dikeluarkan oleh instansi terkait	-	-	-	-	-	-	-	Disnakerin	
		5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kota dalam 1 kota yang dikeluarkan intansi terkait	-	-	-	-	-	-	-	Disnakerin	
		6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	(50% +20 %) =70%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	Disnakerin	

4. Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No	URUSAN	No	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA (2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Perencanaan dan Keuangan	1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan ------x 100% Jumlah APBD	471.372.863.410,00 ---- x 100 % 2.444.666.033.218,96 = 19,28%	532.075.148.867 ----- x 100 % 2.868.160.324.781 =16,43%	559.075.148.867 -------- x 100 % 3.018.027.224.989 =18,52%	564.665.900.356 -------- x 100 % 3.221.831.118.617 =17,53%	570.256.651.844 -------- x 100 % 3.377.930.538.425 =16,88%	575.847.403.333 -------- x 100 % 3.532.485.819.459 =17%	581.438.154.822 -------- x 100 % 3.642.949.934.942 =15,96%	BPKAD	
		2	Rasio PAD	Jumlah PAD ------ x 100% Jumlah Pendapatan Pada APBD	662.549.854.334,82 -------- x 100 % 2.531.275.045.504,82 = 26,17%	894.292.136.639 -------- x 100 % 2.811.296.754.925 =31,81%	1.008.185.265.967 -------- x 100 % 2.995.186.306.716 =33,66%	1.123.826.456.700 -------- x 100 % 3.189.340.690.075 =35,24%	1.238.687.820.800 -------- x 100 % 3.386.481.449.508 =36,58%	1.294.348.348.100 -------- x 100 % 3.528.384.282.298 =36,68%	1.341.441.038.300 -------- x 100 % 3.650.482.377.281 = 36,75%	BPKAD	
		3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belumdinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang	3Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Inspektorat	

No	URUSAN	No	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA (2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				dikeluarkan oleh BPKP									
		4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP (belumdinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 3	Level 3	LEvel 3	Level 3	LEvel 3	Level 3	Level 3	Inspektorat	
		5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures ------ x 100% Jumlah belanja APBD	(2.217.373.065.460,08 – 153.488.963.524,00) -------- x 100 % 2.444.666.033.218,96 = 84,42%	(2.584.853.109.431- – 112.989.386.610) -------- x 100 % 2.832.388.846.969 =87,27%	(2.610.701.640.525 - – 114.119.280.476) -------- x 100 % 3.018.027.224.989 =82,72%	(2.636.550.171.620 - – 115.249.174.342) -------- x 100 % 3.221.831.118.617 =78,26%	(2.688.247.233.808 – 116.379.068.208) -------- x 100 % 3.377.930.538.425 =75,37%	(2.662.398.702.714- – 117.508.962.074) -------- x 100 % 3.532.485.819.459 =72,77%	(2.714.095.764.903- – 118.638.855.941) -------- x 100 % 3.642.949.934.942 =71,25%	BPKAD	
		6	Opini Laporan Keuangan	Opini Laporan Keuangan (10 TahunTerakhir)	2013: WDP 2014: WTP 2015: WTP 2016: WTP 2017: WTP 2018: WTP 2019: WTP 2020: WTP 2021: WTP 2022: WTP 2023: WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Inspektorat/BPKAD	

No	URUSAN	No	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA (2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
					2024: Belum terbit								
2	Pengadaan	1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun 2024 ------ x 100% Jumlah kontrak keseluruhan tahun 2024	0 ---- x 100 % 1.392 = 0%	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	BPBJ	tidak ada paket dengan nilai besar diatas 50M
		2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif ------x 100% Jumlah seluruh pengadaan	22.204 ---- x 100 % 23.610 = 94,04%	95 %	95%	96%	96,5%	97%	97,5%	BPBJ	
		3	Rasio nilai			20%	22%	24%	25%	27%	30%	BPBJ	

No	URUSAN	No	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA (2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja operasi dan modal yang melalui pengadaan ------ x 100% Total belanja operai dan modal	441.331.075.323,75 -------- x 100 % 2.546.665.464.130,00 = 17,32%								
		4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dalam Negeri, Produk Usaho Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (2024) – Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dalamm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (2023) ------- x 100% Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk	403.122.285.439-403.220.305.503 ---- x 100 % 403.220.305.503,00 = 0,0242%	0,025%	0,030%	0,035%	0,040%	0,045%	0,050%	BPBJ	

No	URUSAN	No	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA (2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (2023)									
3	Kepegawaian	1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) ----- x 100% Seluruh Jumlah Pegawai (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	2.012 ------ x 100 % 2.706 = 74,35%	79,08 %	68,20 %	68,50 %	58,52 %	68,56 %	68,64 %	BKPSDM	
		2	Rasio Pegawai Fungsional(%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) ------x 100% Seluruh jumlah	483 ---- x 100 % 2.706 = 17,84%	23,12	20,25	20,53	20,72	20,82	21,02	BKPSDM	

No	URUSAN	No	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA (2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)									
		3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi (diluar guru dan tenaga kesehatan) ------ x 100% Seluruh jumlah pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	273 ------- x 100 % 483 = 56,52%	42,17	44,89	48,04	51,00	53,95	57,44	BKPSDM	
4	Manajemen Keuangan	1	Budget execution : Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total	{(Realisasi Belanja total belanja APBD)-1}x100%	2.444.666.033.218,96 --- - 1 x 100 % 2.565.006.041.510,00 = 4,69 %	2.832.388.846.969 -------- - 1 x 100 % 2.832.388.846.969 =4,69 %	3.018.027.224.989 ---- - 1 x 100 % 3.018.027.224.989==== = 4,69 %	3.221.831.118.618 ---- - 1 x 100 % 3.221.831.118.618==== = 4,69 %	3.377.930.538.425 ---- - 1 x 100 % 3.377.930.538.425 = 4,69 %	3.532.485.819.459 --- 1 x 100 % 3.532.485.819.459 = 4,69 %	3.642.949.934.942 -- - 1 x 100 % 3.642.949.934.942 = 4,69 %	BPKAD	

No	URUSAN	No	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA (2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			dalam APBD										
		2	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	{(Total PAD dalam realisasitotal PAD dalamA PBD)-1}x100%	6,26 %	6,26 %	6,26 %	6,26 %	6,26 %	6,26 %	6,26 %	BPKAD	
		3	Manajemen Aset	1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak) 4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)	1. Ya 2. Ya 3. Ya 4. Ya	1. Ya 2. Ya 3. Ya 4. Ya	1. Ya 2. Ya 3. Ya 4. Ya	1. Ya 2. Ya 3. Ya 4. Ya	1. Ya 2. Ya 3. Ya 4. Ya	1. Ya 2. Ya 3. Ya 4. Ya	1. Ya 2. Ya 3. Ya 4. Ya	BPKAD	

No	URUSAN	No	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA (2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		4	Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Nilai Realisasi SiLPA ------ x 100% Total Belanja Anggaran tahun sebelumnya (2023)	135.996.915.773,71 ---- - 1 x 100 % 2.565.006.041.510,00 = 5,30 %	56.863.569.856 --- - 1 x 100 % 2.560.291.241.430 =2,22%	56.863.569.856 ----- - 1 x 100 % 2.832.388.846.969 =2,01%	56.863.569.856 ----- - 1 x 100 % 3.018.027.224.989 =1,88%	56.863.569.856 ---- - 1 x 100 % 3.221.831.118.618 =1,76%	56.863.569.856 --- - 1 x 100 % 3.377.930.538.425 =1,68%	56.863.569.856 --- - 1 x 100 % 3.532.485.819.459 =1,61%	BPKAD	
5	Transparansi dan Partisipasi Publik	1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemerintah Kota Padang ------x 100% Anggaran belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemerintah Kota Padang	94,54 %	94,54 %	94,54 %	94,54 %	94,54 %	94,54 %	94,54 %	Diskominfo / BPKAD	
		2	Akses public			100%	100%	100%	100%	100%	100%	Diskominfo/	

No	URUSAN	No	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA (2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			terhadap informasi keuangan daerah	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemerintah Kota Padang ------x 100% Total jumlah dokumen yang telah dirinci	12 ---- - 1 x 100 % 12 = 100 %							BPKAD	
6	Pendidikan dan Pelatihan	1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan			20 JP/Org/Tahnu	21 JP/Org/Tahun	22 JP/Org/Tahun	23 JP/Org/Tahun	24 JP/Org/Tahun	25 JP/Org/Tahun	BKPSDM	
		2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal			3,50	5,63	2,85	3,29	3,65	3,68	BPKSDM	
		3	Persent			24,11	21,95	24,90	28,35	3,65	3,68	BPKSDM	

No	URUSAN	No	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA (2024)	TARGET						SUMBER DATA	KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			ase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural										
7	Penelitian dan Pengembangan	1	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti		1 -----x100% 1 =100%							Bappeda	

BAB V PENUTUP

5.1 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah landasan yuridis formal pelaksanaan pembangunan yang berisi isu-isu/ program–program strategis yang dilaksanakan dan dicapai dalam 5 tahun mendatang, cara mencapainya, dan langkah- langkah strategis apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan, sasaran dan target yang telah ditetapkan.

Dokumen RPJMD menempatkan program pelaksanaan pembangunan sesuai dengan prioritas yang diamanatkan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan berdasarkan skala prioritas yang dimulai dari Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, dan Urusan Pilihan.

Dokumen RPJMD ini merupakan pedoman bagi pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan Kota Padang periode Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.

Dengan adanya dokumen ini maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. RPJMD Kota Padang Tahun 2025 - 2029 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) di lingkup Pemerintah Kota Padang. Renstra PD adalah dokumen indikatif yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Renstra PD di lingkup Pemerintah Kota Padang harus konsisten dan sinergis dengan dokumen RPJMD Kota Padang Tahun 2025 - 2029. Renstra PD yang mengatur perencanaan pembangunan lima tahunan Perangkat Daerah akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).
2. RPJMD Kota Padang Tahun 2025 - 2029 merupakan perencanaan pembangunan lima tahunan di Kota Padang yang akan dijabarkan menjadi rencana pembangunan tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Padang. Selanjutnya RKPD akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
3. RPJMD harus benar-benar diperhatikan, dipedomani dan dilaksanakan oleh pemerintah kota dalam melaksanakan

pembangunan di berbagai aspek, karena setiap ketidak sesuaian, baik yang menyangkut kebijakan maupun pelaksanaannya dapat dinyatakan sebagai ketidak patuhan bahkan pelanggaran.

4. Dalam pelaksanaan program/kegiatan, selain menggunakan anggaran Pemerintah Kota Padang, dapat pula menggunakan anggaran yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, skema kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), corporate social responsibility (CSR), hibah/bantuan dalam dan luar negeri, serta swadaya masyarakat dan/atau sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.
5. Pasca penetapan RPJMD, apabila terjadi perubahan struktur organisasi Perangkat Daerah maka struktur/kelembagaan baru tersebut harus menyesuaikan antara Urusan Pemerintahan yang diampunya dengan Urusan Pemerintahan yang tercantum dalam RPJMD ini dan harus membuat Renstra baru.
6. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan program/kegiatan dalam Renstra/ Renja serta konsistensinya dengan dokumen RPJMD ini dilakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi sesuai dengan peraturan yang berlaku

5.2 Manajemen Resiko Perencanaan Pembangunan Daerah

Pemerintah Kota Padang melaksanakan penilaian risiko sebagai bagian dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam rangka pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik. Peraturan ini menegaskan bahwa setiap menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, termasuk melakukan penilaian risiko sebagaimana diatur dalam Pasal 13.

Penilaian risiko bertujuan memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan mengelola risiko secara baik dan sistematis, diharapkan penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Kota Padang dapat berjalan optimal, yang pada akhirnya akan memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, penilaian risiko dalam dokumen Rancangan Akhir RPJMD Kota Padang 2025–2029 disusun untuk mendukung pencapaian visi pembangunan daerah, yaitu:

"Menggerakkan Segala Potensi Untuk Mewujudkan Kota Padang Sebagai Kota Pintar (Smart City) dan Kota Sehat, Berlandaskan Agama dan Budaya, Menuju Kota Maju dan Sejahtera."

Manajemen risiko dalam RPJMD ini dirancang untuk mengantisipasi dan memitigasi potensi hambatan terhadap pencapaian visi tersebut. Risiko diidentifikasi berdasarkan isu strategis, tantangan pembangunan, serta kondisi eksisting Kota Padang, yang kemudian dikelompokkan ke dalam beberapa kategori utama berikut:

1. Risiko dalam Transformasi Menuju Kota Pintar (Smart City)
   a. Keterbatasan infrastruktur digital dan jaringan internet yang belum merata.
   b. Rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat dan aparatur.
2. Risiko dalam Mewujudkan Kota Sehat
   a. Kerentanan terhadap bencana seperti banjir, abrasi, dan potensi penyakit menular.
   b. Ketimpangan distribusi layanan kesehatan dan kekurangan tenaga medis.
   c. Permasalahan sanitasi dan pengelolaan sampah.
3. Risiko Sosial, Agama, dan Budaya
   a. Tergerusnya nilai-nilai agama dan budaya akibat modernisasi dan globalisasi.
   b. Ketimpangan sosial ekonomi dan meningkatnya kelompok rentan.
4. Risiko Tata Kelola dan Kelembagaan
   a. Keterbatasan kapasitas SDM dan koordinasi antar perangkat daerah.
   b. Keterlambatan dalam pengambilan keputusan, perencanaan teknis, serta pelaksanaan program lintas sektor.
5. Risiko Fiskal dan Pembiayaan Pembangunan
   a. Ketergantungan pada dana transfer pusat serta terbatasnya PAD.
   b. Risiko ketidaksesuaian alokasi anggaran terhadap prioritas pembangunan.

5.3 Tata Kelola Satu Data Indonesia Tingkat Kota Padang

Tata Kelola Satu Data Indonesia (SDI) tingkat daerah merupakan upaya strategis untuk mewujudkan data yang terpadu, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pemerintah maupun masyarakat. Di tingkat daerah, Satu Data Indonesia menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan berbasis data, perencanaan pembangunan, serta pengambilan keputusan yang efektif dan efisien. Pemerintah daerah melalui perangkat daerah dan walidata, memiliki tanggung jawab penting dalam menyelenggarakan pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data yang sesuai dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia.

Secara hukum, implementasi Satu Data Indonesia diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Perpres ini menetapkan bahwa setiap instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, wajib menghasilkan dan menyampaikan data sesuai dengan prinsip satu data, yakni: standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi serta data induk yang terstandar. Dijelaskan juga bahwa penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah terdiri atas penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat provinsi dan penyelengaraan satu data tingkat kabupaten/kota, Penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah dilaksanakan oleh Pembina data tingkat daerah, walidata tingkat daerah, walidata pendukung dan produsen data tingkat daerah dan Pembina Data tingkat daerah, Walidata tingkat daerah, dan Walidata pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah serta Forum Satu Data Indonesia tingkat kabupaten/kota dikoordinasikan oleh kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota.

Pembina Data bertugas memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan, pengumpulan data dan melakukan pembinaan penyelenggaran SDI di Kota Padang di ampu oleh Badan Pusat Statistik (BPS), walidata bertugas memeriksa kesesuaian data dari produsen data, menyebarluaskan data dan metadata di portal SDI, dan membantu pembina data tingkat daerah dalam membina produsen data tingkat daerah (Dinas Komunikasi dan Informatika), Walidata Pendukung bertugas membantu walidata yang berada di OPD (Produsen Data) serta merupakan salah satu unit kerja yang

mengkordinir data OPD (melekat pada subag program dan perencanaan SKPD) dan Produsen data bertugas untuk memberikan masukan kepada pembina data, menghasilkan data sesuai Prinsip SDI, menyampaikan data dan metadata kepada walidata tingkat Daerah (OPD /bidang-bidang di OPD).

Selain Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, regulasi pendukung lainnya adalah Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang mengamanatkan pemanfaatan data dan informasi secara sistematis dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah. SIPD menjadi salah satu platform penguatan integrasi data antar sektor dan lintas perangkat daerah. Pemerintah daerah juga perlu menetapkan Peraturan Kepala Daerah atau Surat Keputusan sebagai payung hukum teknis untuk membentuk Forum Satu Data Daerah, menetapkan Walidata, dan menyusun rencana aksi implementasi SDI.

Dengan tata kelola yang baik, Satu Data Indonesia di tingkat daerah mendorong terciptanya ekosistem data yang mendukung keterbukaan informasi publik, meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, serta mempercepat transformasi digital pemerintahan. Oleh karena itu, komitmen kepala daerah, kesiapan kelembagaan, SDM, serta infrastruktur data sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan SDI secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Padang membentuk Forum Data Indonesia Tingkat Kota yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Padang dan di ikuti dengan Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 216 Tahun 2024 tentang Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Padang Tahun 2024-2026. Bappeda sebagai Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kota bertugas untuk memberikan dukungan dalam bentuk pendampingan dan penerbitan regulasi satu data indonesia tingkat daerah.

Dalam konteks implementasi kebijakan Satu Data Indonesia (SDI), data prioritas merupakan komponen penting yang harus dikelola secara konsisten, akurat, dan terpadu. Data prioritas adalah jenis data yang dianggap strategis dan krusial untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Dalam peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 144

disebutkan bahwa data dan informasi pembangunan terdiri atas 4 (empat) aspek yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Didalam data prioritas juga dijelaskan tentang indikator kinerja makro, indikator kinerja utama, indikator kinerja daerah, indikator kinerja kunci dan indikator kinerja program yang digunakan untuk mengevaluasi capaian pembangunan yang termuat dalam dokumen perencanaan.

Dengan sistem pengendalian yang terstruktur dan evaluasi yang berbasis kinerja, Pemerintah Kota Padang dapat secara berkala menilai konsistensi, efektivitas, serta efisiensi pelaksanaan pembangunan. Hasil evaluasi yang komprehensif menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan perencanaan tahunan dan perbaikan pelaksanaan di tahun-tahun berikutnya, sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban publik kepada masyarakat.

Lebih dari itu, pengendalian dan evaluasi juga menjadi refleksi terhadap komitmen Pemerintah Kota Padang dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparan, partisipatif, dan berorientasi pada hasil. Melalui proses ini, arah pembangunan daerah diharapkan dapat senantiasa adaptif terhadap dinamika dan tantangan yang berkembang, sehingga visi pembangunan Kota Padang bisa dicapai secara berkelanjutan

WALI KOTA PADANG,

FADLY AMRAN

METADATA

I. METADATA INDIKATOR KINERJA MAKRO

1. Indeks Pembangunan Manusia

Nama Indikator	Indek Pembangunan Manusia (skor)
Definisi	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia pendekatan tiga dimensi dasar, mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak.
Rumus Perhitungan	$IPM = \sqrt[3]{I_{Kesehatan}\, X\, I_{Pendidikan}\, X\, I_{pengeluaran}}$
Interpretasi	IPM merupakan indikator untuk mengetahui tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, meliputi; umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Semakin baik perkembangan empat dimensi variabel tersebut maka akan semakin tinggi pula angka IPM. Merujuk kepada dimensi pembangunan manusia tersebut, maka IPM dihitung melalui komponen-komponen yaitu; 1) usia harapan hidup, 2) harapan lama sekolah, 3) rata-rata lama sekolah dan 4) pengeluaran perkapita disesuaikan (paritas daya beli)
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Satu kali satu tahun

2. Tingkat Kemiskinan

Nama Indikator	Tingkat Kemiskinan (%)
Definisi	Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikanmiskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).
Rumus Perhitungan	$P_{\propto} = \frac{1}{n}\sum_{i-1}^{\varphi}(\frac{z - y_i}{z})$ Dimana: $\propto$=0 x= garis kemiskinan yi= rata-rata pengeluaran per kapita sebelum penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (i=1,2,3, ……, q),yi<z q= banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan n= jumlah penduduk
Interpretasi	Persentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk Indonesia.

	Tingkat kemiskinan yang tinggi mengindikasikan masalah serius dalam mencapai kesejahteraan dasar masyarakat.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekurnsi	Dua kali per tahun (Maret dan september)

3. Angka pengangguran

Nama Indikator	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
Definisi	Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan penggangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.
Rumus Perhitungan	$$TPT = \frac{PP}{PAK}\ x100\%$$ Keterangan: TPT = Tingkat pengangguran terbuka (%) PP = Jumlah pengangguran (orang) PAK = Jumlah angkatan kerja (orang)
Interpretasi	Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (supply) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi dan perubahan siklus bisnis dan teknologi. Pembedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja antar kelompok tersebut.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Frekuensi	Dua kali per tahun (Februari dan Agustus)

4. Pertumbuhan Ekonomi

Nama Indikator	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
Definisi	Merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu
Rumus Perhitungan	$$r(k) = PDRB\frac{(k)t}{PDRB\ (k)t - i}\ x\ 100\%$$ Keterangan K = komponen t = tahun berjalan (atas harga konstan) t-1 = Tahun sebelumnya sebelum tahun berjalan (dasar haraga konstan)
Interpretasi	Hasil perhitungan Laju Pertumbuhan Ekonomi

Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	

5. Pengeluaran Per Kapita

Nama Indikator	Pengeluaran Per Kapita
Definisi	Merupakan jumlah pengeluaran konsumsi rumah tangga dalam periode waktu tertentu (umumnya 1 bulan), dibagi dengan jumlah anggota rumah tangga
Rumus Perhitungan	$Pengeluaran\ Per\ Kapita = \frac{Total\ Pengekuaran\ Konsumsi\ Rumah\ Tangga}{Jumlah\ Anggota\ Rumah\ Tangga}$ Jika data dikumpulkan per tahun, maka biasanya dibagi 12 untuk mendapatkan nilai bulanan Keterangan
Interpretasi	Indikator ini mencerminkan tingkat kesejahteraan ekonomi individu dalam rumah tangga, dan sering digunakan untuk mengukur kemiskinan dan ketimpangan
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Setiap bulan

6. Rasio Gini

Nama Indikator	Rasio Gini
Definisi	Merupakan indikator statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pengeluaran (atau pendapatan) penduduk Nilai Gini Ratio berkisar antara: • 0 (nol) = pemerataan sempurna • 1 (satu) = ketimpangan sempurna (satu orang menguasai semua pengeluaran)
Rumus Perhitungan	$G = 1 - \sum_{i=1}^{n} (Y_i + Y_{i-1}) \times (X_i - X_{i-1})$ Dengan: • X : proporsi kumulatif penduduk • Y : proporsi kumulatif pengeluaran/pemasukan Nilai dihitung berdasarkan kurva Lorenz
Interpretasi	Gini Ratio — Tingkat Ketimpangan 0,00–0,30 — Rendah (merata) 0,31–0,50 — Sedang >0,50 — Tinggi (tidak merata)
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Dua kali setahun

II. METADATA INDIKATOR KINERJA SASARAN VISI

1. PDRB per Kapita ADHB

Nama indikator	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (Rp Juta)
Definisi	PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita dihitung dengan cara membagi total PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.
Rumus Perhitungan	$PDRB\ per\ kapita = \frac{PDRB\ ADHB}{populasi}$ Keterangan: PDRB ADHB = PDRB Atas Dasar Harga berlaku populasi = jumlah penduduk regional t = periode
Interpretasi	Peningkatan PDRB per kapita biasanya dianggap sebagai tanda pertumbuhan ekonomi yang positif dan dapat meningkatkan standar hidup penduduk. Namun, penting untuk diingat bahwa PDRB per kapita tidak mencerminkan distribusi pendapatan yang merata di dalam wilayah tersebut, sehingga tidak memberikan gambaran lengkap tentang ketidaksetaraan ekonomi
Sumber Data	Badan Pusat statistik
Frekuensi	Tahunan

2. Kontribusi PDRB sektor Perikanan

Nama Indikator	Kontribusi PDRB Sektor Perikanan
Definisi	Kontribusi PDRB Sektor Perikanan adalah persentase sumbangan nilai tambah bruto dari kegiatan perikanan (baik perikanan tangkap maupun budidaya) terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku pada suatu wilayah dan periode tertentu.
Rumus Perhitungan	$= \frac{\text{Nilai Tambah Bruto Sektor Perikanan}}{\text{Total PDRB Atas Dasar Harga Berlaku}} \times 100\%$ Keterangan : • Nilai Tambah Bruto Sektor Perikanan = Jumlah seluruh output sektor perikanan dikurangi biaya input antar sektor. Termasuk perikanan tangkap, budidaya, pengolahan hasil, dan jasa penunjang. • Total PDRB = Jumlah seluruh nilai tambah bruto dari semua sektor ekonomi di wilayah tersebut (misalnya provinsi atau kabupaten).
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin besar kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian daerah
Sumber Data	• Badan Pusat Statistik (BPS) – publikasi: ➢ PDRB Menurut Lapangan Usaha ➢ Statistik Perikanan • Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten • Publikasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tahunan • Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD)

Frekuensi	Tahunan (Biasanya dirilis BPS sekitar Maret–April tahun berikutnya)

3. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)

Nama Indikator	Kpntribusi PDRB Industri Pengolahan (%)
Definisi	Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor industri pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDRB.
Rumus Perhitungan	Kontribusi PDRB Idustri pengolahan $\frac{Nilai\ tambah\ sektor\ industri\ pengolahan}{nilai\ PDRB\ ADHB} x100\%$
Interpretasi	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB ADHB yang mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor industri pengolahan dengan total nilai PDRB . Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan, semakin tinggi proporsinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

4. Tingkat Kemiskinan

Nama Indikator	Tingkat Kemiskinan (%)
Definisi	Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikanmiskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).
Rumus Perhitungan	$P_{\propto} = \frac{1}{n}\sum_{i-1}^{\varphi}(\frac{z-y_i}{z})$ Dimana: ∝=0 x= garis kemiskinan yi= rata-rata pengeluaran per kapita sebelum penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (i=1,2,3, ……, q),yi<z q= banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan n= jumlah penduduk
Interpretasi	Persentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk Indonesia. Tingkat kemiskinan yang tinggi mengindikasikan masalah serius dalam mencapai kesejahteraan dasar masyarakat.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekurnsi	Dua kali per tahun (Maret dan september)

5. Rasio Gini

Nama Indikator	Rasio Gini
Definisi	Merupakan indikator statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pengeluaran (atau pendapatan) penduduk Nilai Gini Ratio berkisar antara: • 0 (nol) = pemerataan sempurna • 1 (satu) = ketimpangan sempurna (satu orang menguasai semua pengeluaran)
Rumus Perhitungan	$G = 1 - \sum_{i=1}^{n} (Y_i + Y_{i-1}) \times (X_i - X_{i-1})$ Dengan: • X : proporsi kumulatif penduduk • Y : proporsi kumulatif pengeluaran/pemasukan Nilai dihitung berdasarkan kurva Lorenz
Interpretasi	Gini Ratio — Tingkat Ketimpangan 0,00–0,30 — Rendah (merata) 0,31–0,50 — Sedang >0,50 — Tinggi (tidak merata)
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Dua kali setahun

6. Pertumbuhan Ekonomi

Nama Indikator	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
Definisi	Merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu
Rumus Perhitungan	$r(k) = PDRB \frac{(k)t}{PDRB\ (k)t - i}\ x\ 100\%$ Keterangan K = komponen t = tahun berjalan (atas harga konstan) t-1 = Tahun sebelumnya sebelum tahun berjalan (dasar haraga konstan)
Interpretasi	Hasil perhitungan Laju Pertumbuhan Ekonomi
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	

7. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Nama Indikator	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Defenisi	Merupakan nilai yang diberikan terhadap hasil evaluasi atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat setiap tahun. Nilai ini menunjukkan tingkat kinerja tata kelola pemerintahan daerah, berdasarkan indikator-indikator utama penyelenggaraan pemerintahan.
Rumus Perhitungan	$\text{EKPPD} = 0{,}95 \times (\text{Indeks Capaian Kinerja}) + 0{,}05 \times (\text{Indeks Kesesuaian Materi})$
Interpretasi	Menurut Permendagri No. 73/2009, nilai EKPPD merupakan indeks komposit yang terdiri dari dua komponen utama: • Indeks Capaian Kinerja (IKK capaian) – diberikan bobot sebesar 95% • Indeks Kesesuaian Materi – bobot sebesar 5%
Sumber Data	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Frekuensi	Tahunan

8. Indeks Pembangunan Manusia

Nama Indikator	Indek Pembangunan Manusia (skor)
Definisi	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia pendekatan tiga dimensi dasar, mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak.
Rumus Perhitungan	$IPM = \sqrt[3]{I_{Kesehatan}\ X\ I_{Pendidikan}\ X\ I_{pengeluaran}}$
Interpretasi	IPM merupakan indikator untuk mengetahui tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, meliputi; umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Semakin baik perkembangan empat dimensi variabel tersebut maka akan semakin tinggi pula angka IPM. Merujuk kepada dimensi pembangunan manusia tersebut, maka IPM dihitung melalui komponen-komponen yaitu; 1) usia harapan hidup, 2) harapan lama sekolah, 3) rata-rata lama sekolah dan 4) pengeluaran perkapita disesuaikan (paritas daya beli)
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Satu kali satu tahun

9. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Nama Indikator	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (%)
Definisi	Tingkat produktivitas tenaga kerja adalah rasio antara produk berupa barang dan jasa dengan tenaga kerja yang digunakan, baik individu maupun kelompok dalam satuan waktu tertentu yang merupakan besaran kontribusi tenaga kerja dalam pembentukan nilai tambah suatu produk dalam proses kegiatan ekonomi.
Rumus Perhitungan	$tingkat\ produktivitas\ tenaga\ kerja = \frac{PDRB\ Atas\ Dasar\ Harga\ Konstan\ tahun\ berjalan}{jumlah\ Tenaga\ Kerja}\ X100\%$
Interpretasi	Produktivitas tenaga kerja dalam memberikan kontribusi terhadap pembentukan nilai tambah suatu produk dalam proses kegiatan ekonomi cukup rendah karena keterbatasan keahlian dalam mengelola lapangan usaha untuk menghasilkan nilai tambah produk yang bernilai tinggi
Sumber Data	Badan Pusat statistik
Frekuensi	Tahunan

10. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Nama Indikator	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Definisi	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. IKLH nilai komposit dari; Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL).
Rumus Perhitungan	$\text{IKLH} = (0.376 \text{ x IKA}) + (0.405\ x\ \text{IKU}) + (0.219\ \ x\ \text{IKL})$
Interpretasi	Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Nomor | Kategori | Angka Rentang 1 | Sangat Baik | 90 ≤ x ≤ 100 2 | Baik | 70 ≤ x < 90 3 | Sedang | 50 ≤ x < 70 4 | Kurang | 25 ≤ x < 50 5 | Sangat KUrang | 0 ≤ x < 25
Sumber Data	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Frekuensi	Satu kali satu tahun

III. INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Indeks Reformasi Birokrasi

<table>
<tr><td>Nama Indikator</td><td>Indeks Reformasi Birokrasi</td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>Merupakan indeks yang mencerminkan sejauh mana suatu instansi pemerintah (pusat atau daerah) telah melakukan perbaikan dalam tata kelola pemerintahan, efektivitas, efisiensi, pelayanan publik, transparansi, dan pencegahan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme)</td></tr>
<tr><td>Rumus Perhitungan</td><td>Terdiri dari dua komponen utama, sesuai aturan dalam Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi:
a. Komponen Pengungkit (60%)
• Aspek Pemenuhan: 20%
• Aspek Hasil Antara: 10%
• Aspek Reform: 30%
b. Komponen Hasil (40%)
• Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan: 10%
• Kualitas Pelayanan Publik: 10%
• Pemerintah yang Bersih dan Bebas dari KKN: 10%
• Kinerja Organisasi: 10%</td></tr>
<tr><td>Interpretasi</td><td>Hasil IRB dikategorikan berdasarkan rentang skor:
<table>
<tr><td>Kategori</td><td>Rentang Nilai (%)</td><td>Predikat</td></tr>
<tr><td>AA</td><td>> 90 – 100</td><td>Istimewa</td></tr>
<tr><td>A</td><td>> 80 – 90</td><td>Sangat Baik</td></tr>
<tr><td>BB</td><td>> 70 – 80</td><td>Baik</td></tr>
<tr><td>B</td><td>> 60 – 70</td><td>Cukup Baik</td></tr>
<tr><td>CC</td><td>> 50 – 60</td><td>Cukup</td></tr>
<tr><td>C</td><td>> 30 – 50</td><td>Buruk</td></tr>
<tr><td>D</td><td>0 – 30</td><td>Sangat Buruk</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>Kementerian Hukum dan HAM, KASN</td></tr>
<tr><td>Frekuensi</td><td>Tahunan</td></tr>
</table>

2. Nilai SAKIP

<table>
<tr><td>Nama Indikator</td><td>Nilai SAKIP</td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>SAKIP adalah sistem integratif yang mencakup:
• Perencanaan kinerja,
• Pengukuran kinerja,
• Pelaporan kinerja,
• Evaluasi kinerja, dan
• Penggunaan informasi kinerja untuk pengambilan keputusan.
Nilai SAKIP diberikan kepada kementerian/lembaga/pemerintah daerah berdasarkan evaluasi akuntabilitas kinerjanya oleh KemenPANRB</td></tr>
<tr><td>Rumus Perhitungan</td><td>
<table>
<tr><td>No</td><td>Komponen</td><td>Bobot (%)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Perencanaan Kinerja</td><td>30</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Pengukuran Kinerja</td><td>10</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Pelaporan Kinerja</td><td>15</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Evaluasi Internal Kinerja</td><td>10</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td>5</td><td>Capaian Kinerja dan Penggunaan Informasi Kinerja</td><td>35</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Interpretasi</td><td>
<table>
<tr><th>Predikat</th><th>Rentang Nilai</th></tr>
<tr><td>AA</td><td>> 90 – 100</td></tr>
<tr><td>A</td><td>> 80 – 89,99</td></tr>
<tr><td>BB</td><td>> 70 – 79,99</td></tr>
<tr><td>B</td><td>> 60 – 69,99</td></tr>
<tr><td>CC</td><td>> 50 – 59,99</td></tr>
<tr><td>C</td><td>> 30 – 49,99</td></tr>
<tr><td>D</td><td>< 30</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>Dokumen SAKIP, Kementerian PANRB, Output/Outcome program/kegiatan</td></tr>
<tr><td>Frekuensi</td><td>Tahunan</td></tr>
</table>

3. Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

<table>
<tr><td>Nama Indikator</td><td>Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>Merupakan penilaian profesional oleh BPK atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam LKPD berdasarkan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)</td></tr>
<tr><td>Rumus Perhitungan</td><td>
<table>
<tr><th>Jenis Opini</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><td>Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)</td><td>LKPD dianggap wajar dalam semua hal yang material dan sesuai SAP</td></tr>
<tr><td>Wajar Dengan Pengecualian (WDP)</td><td>LKPD wajar, kecuali pada pos tertentu</td></tr>
<tr><td>Tidak Wajar</td><td>LKPD tidak menyajikan secara wajar secara keseluruhan</td></tr>
<tr><td>Disclaimer (Tidak Memberikan Pendapat)</td><td>BPK tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Interpretasi</td><td>BPK memberikan opini berdasarkan 4 kriteria utama:
1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
2. Kecukupan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
4. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI)</td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>BPK</td></tr>
<tr><td>Frekuensi</td><td>Tahunan</td></tr>
</table>

4. Indeks Reformasi Hukum

<table>
<tr><td>Nama Indikator</td><td>Indeks Reformasi Hukum</td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>Reformasi Hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah instrumen untuk</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional.</td></tr>
<tr><td>Rumus Perhitungan</td><td>Penghitungan IRH didasarkan pada 4 (empat) variabel sebagaiberikut:
a. Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi, dengan bobot 25%.
b. Penguatan Kompetensi ASN sebagai perancang PUU yangberkualitas, dengan bobot 25%.
c. Kualitas re-regulasi atau de-regulasi PUU berdasarkan hasilreviu, dengan bobot 35%.
d. Penataan database PUU, dengan bobot 15%.
Dalam hal ini, sumber data yang digunakan oleh IRH adalah data administrati Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Kategori penilaian IRH:
<table>
<tr><td>No.</td><td>kategori</td><td>Nilai/angka</td><td>Predikat</td></tr>
<tr><td>1</td><td>AA</td><td>>90-100</td><td>Istimewa</td></tr>
<tr><td>2</td><td>A</td><td>>80-90</td><td>Sangat Baik</td></tr>
<tr><td>3</td><td>BB</td><td>>70-80</td><td>Baik</td></tr>
<tr><td>4</td><td>B</td><td>>60-70</td><td>Cukup Baik</td></tr>
<tr><td>5</td><td>CC</td><td>>50-60</td><td>Cukup</td></tr>
<tr><td>6</td><td>C</td><td>>30-50</td><td>Buruk</td></tr>
<tr><td>7</td><td>D</td><td>0-30</td><td>Sangat Buruk</td></tr>
</table>
Pada perhitungan IRH, Pemerintah Daerah melakukan penilaian mandiri (self-assesment) yang menghasilkan berita acara hasil penilaian mandir. Kemudian, kementrian hukum dan HAM akan melakukan verifikasi terhadap self-assesment tersebut dan mengeluarkan berita acara hasil penilaian.</td></tr>
<tr><td>Interpretasi</td><td>Semakin tinggi nilai IRH, maka semakin berhasil pelaksanaan komponen-komponen reformasi hukum oleh lembaga yang bersangkutan.</td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>Kementerian Hukum dan HAM</td></tr>
<tr><td>Frekuensi</td><td>Tahunan</td></tr>
</table>

5. Indeks Pelayanan Publik

Nama Indikator	Indeks Pelayanan Publik
Definisi	Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek SistemInformasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks.
Rumus Perhitungan	Penentuan nilai indeks dilakukan dengan menentukan nilai setiap indikator, menentukan nilai setiap aspek,

<table>
<tr><td></td><td>menentukan nilai indeks formulir dan menentukan nilai indeks pelayanan publik.
1. Menetukan nilai untuk setiap indikator
Nilai per indikator
$(\frac{nilai\ F01+nilai\ F02+nilai\ F03}{3})\ xbobot\ per\ indikator$
2. Menentukan nilai setiap aspek
3. Nilai per aspek: Σ nilai per indikator
Nilai indeks: Σ $nilai\ aspek_n xbobot\ aspek_n$</td></tr>
<tr><td>Interpretasi</td><td>Angka indeks yang dihasilkan merupakan komposit dari berbagai data, baik data primer dan sekunder serta data obyektif maupun persepsi. Prinsip yang digunakan dalam menyusun indikator IPP berdasarkan kepada UndangUndang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Prinsip-prinsip tersebut adalah:
1. Keadilan (Fairness);
2. Partisipasi (Participation);
3. Akuntabilitas (Accountability);
4. Transparansi (transparency);
5. Berdayaguna (useful);
6. Aksesibilitas (accessibility)
Aspek yang harus dipenuhi oleh unit penyelenggara pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, meliputi: Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan serta Inovasi. Indikator dihasilkan melalui persilangan antara prinsip dan aspek yang dijadikan dasar penilaian. Berdasarkan persilangan tersebut diperoleh 37 indikator penilaian yang diisi melalui Formulir F01 (Unit Penyelenggara Pelayanan Publik), Formulir F02 (Evaluator) dan Formulir F03 (Pengguna Layanan). Perhitungan Indeks Pelayanan Publik dikategorikan menjadi:
<table>
<tr><th>Range Nilai</th><th>Kategori</th><th>Makna</th></tr>
<tr><td>0-1,00</td><td>F</td><td>Gagal</td></tr>
<tr><td>1,01-1,50</td><td>E</td><td>Sangat Buruk</td></tr>
<tr><td>1,51-2,00</td><td>D</td><td>Buruk</td></tr>
<tr><td>2,01-2,50</td><td>C-</td><td>Cukup (Dengan Perbaikan)</td></tr>
<tr><td>2,51-3,00</td><td>C</td><td>Cukup</td></tr>
<tr><td>3,01-3,50</td><td>B-</td><td>Baik (Dengan Perbaikan)</td></tr>
<tr><td>3,51-4,00</td><td>B</td><td>Baik</td></tr>
<tr><td>4,01-4,50</td><td>A-</td><td>Sangat Baik</td></tr>
<tr><td>4,51-5,00</td><td>A</td><td>Pelayanan Prima</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.</td></tr>
<tr><td>Frekuensi</td><td>Tahunan</td></tr>
</table>

6. Indeks Pengawasan Arsip

Nama Indikator	Indeks Pengawasan Arsip
Definisi	Merupakan ukuran kuantitatif yang mencerminkan efektivitas pengawasan kearsipan dalam suatu organisasi. Skor diperoleh melalui mekanisme audit, evaluasi terhadap standar dan prosedur kearsipan, dan pemantauan penerapan kebijakan kearsipan
Rumus Perhitungan	Detail komponen lengkap belum tersedia secara publik, tapi indikator biasanya didasarkan pada pedoman, seperti:

	• UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan • PP No. 28 Tahun 2012 • Peraturan ANRI No. 6 Tahun 2019 tentang pengawasan kearsipan
Interpretasi	Nilai pengawasan biasanya diekspresikan dalam angka persentase serta dikategorikan berdasarkan predikat, contohnya: • AA — Sangat Memuaskan • BB — Sangat Baik Contoh penggunaan: Kemenko Marves memperoleh skor 76,43 dengan kategori BB (Sangat Baik)
Sumber Data	Data diperoleh dari: • Pelaksanaan audit kearsipan internal/eksternal • Laporan evaluasi dan rekomendasi ANRI
Frekuensi	Tahunan

7. Indeks Pencegahan Korupsi Daerah

Nama Indikator	Indeks Pencegahan Korupsi Daerah
Definisi	Indeks yang digunakan untuk mengukur efektivitas upaya pencegahan korupsi di tingkat pemerintahan daerah. MCP menjadi alat diagnostik dan monitoring untuk mengidentifikasi celah rawan korupsi dalam tata kelola daerah
Rumus Perhitungan	a. Skor disajikan dalam nilai numerik indeks (0–100). b. Skor nasional MCP 2023: ~75,13, MCP 2024: ~76 (naik sekitar 1 poin) c. Contoh skor per area (tahun 2024): • Perencanaan: 88 • Manajemen ASN: 81 • Pelayanan Publik: 78 • Pengadaan Barang & Jasa (terendah): 68
Interpretasi	Cakupan : a. Semua level pemerintahan daerah: Provinsi, Kabupaten, dan Kota. b. Tahun 2023 diikuti oleh 546 Pemda, 2022 oleh 542 Pemda
Sumber Data	Hasil evaluasi APIP, dokumen perencanaan daerah, data layanan publik, dan aspek pengelolaan keuangan
Frekuensi	Tahunan

8. Indeks Sistem Merit

Nama Indikator	Indeks Sistem Merit
Definisi	Indeks ini menilai sejauh mana instansi pemerintah menerapkan prinsip meritokrasi dalam manajemen ASN—berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, tanpa diskriminasi identitas seperti agama, ras, usia, atau latar belakang politik

<table>
<tr><td>Rumus Perhitungan</td><td><table>
<tr><th>Aspek Penilaian</th><th>Bobot (%)</th></tr>
<tr><td>Perencanaan Kebutuhan ASN</td><td>10</td></tr>
<tr><td>Pengadaan ASN</td><td>10</td></tr>
<tr><td>Pengembangan Karir</td><td>30</td></tr>
<tr><td>Promosi & Mutasi</td><td>10</td></tr>
<tr><td>Manajemen Kinerja</td><td>20</td></tr>
<tr><td>Penggajian, Penghargaan & Disiplin</td><td>10</td></tr>
<tr><td>Perlindungan & Pelayanan ASN</td><td>4</td></tr>
<tr><td>Sistem Informasi ASN</td><td>6</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Interpretasi</td><td>Cakupan :
c. Semua level pemerintahan daerah: Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
d. Tahun 2023 diikuti oleh 546 Pemda, 2022 oleh 542 Pemda</td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>Hasil evaluasi APIP, dokumen perencanaan daerah, data layanan publik, dan aspek pengelolaan keuangan</td></tr>
<tr><td>Frekuensi</td><td>Tahunan</td></tr>
</table>

9. Smart City Index

Nama Indikator	Smart City Index
Definisi	Merupakan indeks tahunan yang mengukur *persepsi warga* terhadap seberapa "pintar" kota mereka, melalui penggabungan aspek teknologi, infrastruktur, kualitas hidup, inklusivitas, dan pemerintahan
Rumus Perhitungan	Survei warga (~100–120 orang per kota), data tiga tahun terakhir digabung dengan bobot 3:2:1 (tahun terkini lebih dominan)
Interpretasi	• Sumber data: Survei warga (~100–120 orang per kota), data tiga tahun terakhir digabung dengan bobot 3:2:1 (tahun terkini lebih dominan) • Dua pilar utama: o Structures: infrastruktur kota yang ada. o Technology: penyediaan layanan berbasis teknologi kepada warga. • Kelima dimensi penilaian per pilar: 1. Kesehatan & keselamatan 2. Mobilitas 3. Aktivitas (budaya, rekreasi, dsb.) 4. Peluang (ekonomi, pendidikan, kerja) 5. Pemerintahan (governance)
Sumber Data	Survei, data teknologi/infrastruktur, IMD & WeGO
Frekuensi	Tahunan

10. Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)

Nama Indikator	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Definisi	SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang

	memanfaatkan layanan SPBE. Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan.
Rumus Perhitungan	Nilai indeks SPBE dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain. Rumus penghitungan nilai indeks SPBE dijabarkan sebagai berikut: $Indeks\ Domain_i\ \frac{1}{BD_i}\sum_{j=m}^{n} NA_{ii} x\ BA_{ii}$ dimana: • NDj adalah nilai indeks domain ke-j; • BDj adalah nilai bobot domain ke-j.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indeks domain dan bobot domain maka akan semakin besar pula nilai indeks SPBE yang dihasilkan.
Sumber Data	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Frekuensi	Tahunan

11. Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintahan

Nama Indikator	Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintahan
Definisi	Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat kemajuan dan kapabilitas pemerintah dalam mengadopsi dan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, kualitas layanan publik, dan tata kelola pemerintahan. Indeks ini mencerminkan sejauh mana pemerintah telah bertransformasi secara digital dalam berbagai aspek operasional dan pelayanannya, yang diukur melalui berbagai indikator yang dikelompokkan ke dalam pilar-pilar transformasi digital pemerintah yang telah ditetapkan.
Rumus Perhitungan	$$\text{Indeks Pilar Pemerintah} = \frac{\sum \text{Skor Indikator}}{\text{Jumlah Indikator}} \times 100$$ Keterangan : □ Skor Indikator: nilai dari masing-masing indikator (biasanya dalam skala 0–1 atau 0–100). □ Bobot: persentase atau proporsi pentingnya setiap indikator terhadap keseluruhan indeks. □ Jumlah Indikator: total indikator yang digunakan dalam pilar pemerintah (misalnya: digitalisasi layanan publik, keterbukaan data, kapasitas SDM digital, keamanan sistem, dsb).
Interpretasi	Nilai indeks yang lebih tinggi menunjukkan tingkat transformasi digital yang lebih baik pada pilar tersebut. Perbandingan nilai indeks dari waktu ke waktu atau antar unit pemerintahan dapat memberikan wawasan tentang kemajuan dan disparitas.
Sumber Data	Kementerian/Lembaga terkait
Frekuensi	Tahunan

12. Indeks Masyarakat Digital Indonesia

Nama Indikator	Indeks Masyarakat Digital Indonesia
Definisi	Indeks yang dirancang untuk mengukur tingkat kompetensi masyarakat dalam penggunaan teknologi digital — baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam konteks pekerjaan dan produktivitas. IMDI dikembangkan berdasarkan *G20 Toolkit for Measuring Digital Literacy and Digital Skills* dan dilakukan oleh Kementerian Kominfo melalui BPSDM Kominfo
Rumus Perhitungan	Infrastruktur, Pemberdayaan Keterampilan, Pekerjaan
Interpretasi	• Diukur setiap tahun sejak tahun 2022 di 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. • Skor disajikan dalam rentang 0–100, dengan rata-rata nasional sebagai indikator perkembangan • IMDI didesain dengan memadukan data primer (survei kuesioner) dan data sekunder (misalnya statistik infrastruktur digital
Sumber Data	BPSDM Kominfo, survei, dashboard SDM digital
Frekuensi	Tahunan

13. Indeks Kesehatan

Nama Indikator	Indeks Kesehatan
Definisi	Merupakan indikator komposit yang dirancang untuk menggambarkan kemajuan pembangunan kesehatan dalam suatu wilayah. Indeks ini disusun berdasarkan data kesehatan berbasis komunitas
Rumus Perhitungan	Dihitung sebagai indeks komposit berdasarkan skor setiap indikator kesehatan. Setiap indikator diungkapkan dalam skor, lalu dirata-rata untuk menghasilkan nilai indeks dalam rentang 0–1, dimana nilai lebih tinggi menunjukkan kondisi kesehatan yang lebih baik. Contohnya: • Nilai terendah: 0,247 (Pegunungan Bintang, Papua) • Nilai tertinggi: 0,709 (Kota Magelang, Jawa Tengah)
Interpretasi	Terdiri dari 24 indikator kesehatan dengan korelasi tertinggi terhadap umur harapan hidup (UHH), antara lain: • Prevalensi gizi buruk, pendek, kurus, gemuk (balita). • Prevalensi diare, pneumonia, hipertensi, gangguan mental, asma, penyakit gigi dan mulut. • Disabilitas, cedera, penyakit sendi, ISPA. • Perilaku cuci tangan, merokok. • Akses air bersih & sanitasi. • Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan, pemeriksaan neonatal-1, imunisasi lengkap, penimbangan balita. • Rasio dokter per puskesmas, rasio bidan per desa.
Sumber Data	Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Potensi Desa (Podes)

Frekuensi	Tahunan

14. Meningkatkan Penilaian Hasil Evaluasi Kota Sehat

Nama Indikator	Meningkatkan Penilaian Hasil Evaluasi Kota Sehat
Definisi	Adalah proses penilaian terhadap implementasi program Kabupaten/Kota Sehat (KKS) yang mencakup berbagai aspek pembangunan kesehatan berbasis lingkungan dan masyarakat. Penilaian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana tatanan KKS diterapkan di tingkat kabupaten/kota dan memberikan penghargaan sesuai dengan capaian tersebut
Rumus Perhitungan	Berdasarkan hasil evaluasi, kabupaten/kota diberikan predikat sebagai berikut: • Swasti Saba Padapa: Minimal 2 tatanan diterapkan. • Swasti Saba Wiwerda: 3–4 tatanan diterapkan. • Swasti Saba Wistara: Lebih dari 5 tatanan diterapkan
Interpretasi	• Menilai sejauh mana penerapan tatanan KKS di kabupaten/kota. • Memberikan penghargaan kepada kabupaten/kota yang berhasil menerapkan tatanan KKS secara efektif. • Mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui lingkungan yang sehat
Sumber Data	Kementerian Kesehatan
Frekuensi	2 tahun sekali

15. Indeks Pembangunan Manusia

Nama Indikator	Indek Pembangunan Manusia (skor)
Definisi	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia pendekatan tiga dimensi dasar, mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak.
Rumus Perhitungan	$IPM = \sqrt[3]{I_{Kesehatan}\, X\, I_{Pendidikan}\, X\, I_{pengeluaran}}$
Interpretasi	IPM merupakan indikator untuk mengetahui tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, meliputi; umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Semakin baik perkembangan empat dimensi variabel tersebut maka akan semakin tinggi pula angka IPM. Merujuk kepada dimensi pembangunan manusia tersebut, maka IPM dihitung melalui komponen-komponen yaitu; 1) usia harapan hidup, 2) harapan lama sekolah, 3) rata-rata lama sekolah dan 4) pengeluaran perkapita disesuaikan (paritas daya beli)
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Satu kali satu tahun

16. Indeks pembangunan Literasi masyarakat

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)
Definisi	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat pembangunan literasi di masyarakat berdasarkan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan fasilitas layanan perpustakaan serta aktivitas literasi di suatu daerah. IPLM dikembangkan untuk menilai kemampuan masyarakat dalam mengakses, memahami, dan menggunakan informasi melalui aktivitas membaca, belajar, dan berpartisipasi dalam kegiatan literasi yang difasilitasi oleh perpustakaan dan lembaga sejenis.
Rumus Perhitungan	$$\mathbf{IPLM} = \frac{\sum_{i=1}^{n} (w_i \times I_i)}{\sum_{i=1}^{n} w_i}$$ Keterangan : □ Ii = Skor indikator ke-i pada dimensi pembangunan literasi masyarakat □ wiw_iwi = Bobot indikator ke-i □ nnn = Jumlah indikator yang digunakan dalam penghitungan □ IPLM memiliki rentang nilai dari 0 sampai 100, di mana makin tinggi nilai IPLM, makin baik tingkat pembangunan literasi masyarakat di wilayah tersebut.
Interpretasi	Semakin tinggi skor IPLM, semakin baik pembangunan dan pencapaian literasi masyarakat di wilayah tersebut
Sumber Data	Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi/Kabupaten/Kota, BPS, data survei literasi daerah
Frekuensi	Tahunan (1 kali per tahun, disesuaikan dengan pelaporan nasional)

17. Indeks Pendidikan

Nama Indikator	Indeks Pendidikan
Definisi	Adalah ukuran komposit yang menggambarkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan di setiap provinsi di Indonesia. Indeks ini dihitung berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan diolah oleh Dinas Komunikasi dan Informatika
Rumus Perhitungan	Indeks Pendidikan dihitung dengan menggabungkan skor standar dari masing-masing indikator menggunakan metode statistik tertentu, seperti metode principal component analysis (PCA) atau agregasi rata-rata tertimbang. Hasilnya adalah nilai indeks yang menggambarkan tingkat pendidikan di setiap kota.
Interpretasi	Indeks Pendidikan mencakup beberapa indikator utama, antara lain: • Angka Melek Huruf: Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis.

	• Angka Partisipasi Sekolah: Persentase penduduk usia 7–18 tahun yang sedang bersekolah. • Angka Lulus Ujian Nasional: Persentase peserta didik yang lulus Ujian Nasional pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. • Rasio Guru terhadap Siswa: Jumlah guru per jumlah siswa di setiap jenjang pendidikan. • Fasilitas Pendidikan: Ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai di setiap satuan pendidikan
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Portal Satu Data Indonesia
Frekuensi	Tahunan

18. Indeks Pembangunan Pemuda

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Pemuda(IPP)
Definisi	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah indikator komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan pemuda secara holistik di suatu wilayah dalam lima domain utama, yaitu: pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, kesempatan kerja dan kewirausahaan, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan inklusi. IPP menggambarkan sejauh mana pemuda memiliki akses terhadap sumber daya dan peluang yang mendukung pertumbuhan dan partisipasi aktif mereka dalam pembangunan nasional. IPP disusun dalam skala 0 sampai 100, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan tingkat pembangunan pemuda yang lebih baik.
Rumus Perhitungan	$\text{Indeks Domain} = \frac{\text{Skor Indikator 1} + \text{Skor Indikator 2} + \cdots + \text{Skor Indikator k}}{\text{Jumlah Indikator dalam Domain}}$ Keterangan : Metodologi dan rumus pasti dapat bervariasi dari waktu ke waktu dan mungkin tidak dipublikasikan secara detail.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai IPP, semakin baik capaian pembangunan pemuda dalam berbagai aspek penting kehidupannya. IPP juga bisa digunakan untuk membandingkan kinerja pembangunan kepemudaan antar daerah atau antar waktu.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik (BPS), Kemendikbudristek
Frekuensi	Tahunan

19. Indeks Pembangunan Gender

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Defenisi	Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah rasio antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan terhadap IPM laki-laki, yang digunakan untuk mengukur kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan dalam aspek dasar pembangunan manusia: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.
Rumus Perhitungan	$$\text{IPG} = \left(\frac{\text{IPM Perempuan}}{\text{IPM Laki-laki}}\right) \times 100$$ Atau jika menggunakan skala desimal: $$\text{IPG} = \frac{\text{IPM Perempuan}}{\text{IPM Laki-laki}}$$ Keterangan Rumus: • IPM Perempuan Indeks Pembangunan Manusia untuk penduduk perempuan, dihitung dari: ○ Angka harapan hidup perempuan ○ Rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah perempuan ○ Pengeluaran riil per kapita perempuan • IPM Laki-laki Sama seperti IPM perempuan, namun untuk penduduk laki-laki. • × 100 Untuk menyajikan IPG dalam bentuk persentase (biasa digunakan oleh BPS).
Interpretasi	Semakin mendekati 100 atau 1.000, semakin kecil kesenjangan pembangunan gender
Sumber Data	Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PPPA
Frekuensi	Tahunan

20. Indeks Rasa Aman

Nama Indikator	Indeks Rasa Aman
Definisi	Merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu
Rumus Perhitungan	• **Berjalan kaki sendirian di siang hari:** $$\text{PMA Siang} = \left(\frac{\text{Jumlah Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Siang}}{\text{Jumlah Penduduk}}\right) \times 100$$ Scribd +2 • **Berjalan kaki sendirian di malam hari:** $$\text{PMA Malam} = \left(\frac{\text{Jumlah Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Malam}}{\text{Jumlah Penduduk}}\right) \times 100$$ Keterangan: • PMA Siang: Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di siang hari.

	• PMA Malam: Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di malam hari. • Jumlah Penduduk: Total jumlah penduduk yang menjadi responden dalam survei
Interpretasi	➢ Sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan sektoral di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat.Membantu dalam identifikasi area yang memerlukan perhatian khusus terkait masalah keamanan. ➢ Mendukung evaluasi kebijakan dan program yang telah dilaksanakan dalam meningkatkan rasa aman masyarakat
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Bappenas
Frekuensi	Tahunan

21. Indeks Penyelenggaran Trantibumlinmas

Nama Indikator	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas
Definisi	Adalah indikator komposit yang mengukur capaian penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar terkait ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di tingkat daerah. Indeks ini disusun berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022 dan mencakup beberapa sub-urusan, antara lain: • Sub Urusan Bencana • Sub Urusan Trantib • Sub Urusan Kebakaran • Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas)
Rumus Perhitungan	Indeks Trantibumlinmas dihitung menggunakan metode agregasi berbasis bobot, seperti Analytic Hierarchy Process (AHP), yang mempertimbangkan pentingnya setiap indikator dalam mencapai tujuan penyelenggaraan Trantibumlinmas. Metode ini memungkinkan penilaian yang objektif dan komprehensif terhadap kinerja daerah
Interpretasi	Indeks Trantibumlinmas terdiri dari empat sub-indeks utama, yaitu: 1. Indeks Penyelenggaraan Sub Urusan Bencana: Menilai kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana. 2. Indeks Penyelenggaraan Sub Urusan Trantib: Mengukur efektivitas penegakan ketertiban dan keamanan. 3. Indeks Penyelenggaraan Sub Urusan Kebakaran: Evaluasi kesiapan dan penanganan kebakaran. 4. Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satlinmas: Penilaian terhadap pengelolaan dan pemberdayaanSatlinmas. Setiap sub-indeks tersebut terdiri dari beberapa dimensi dan indikator yang relevan dengan aspek-aspek tersebut. Misalnya, dalam sub-urusan kebakaran, indikator yang dinilai meliputi kelembagaan, perencanaan anggaran, pemenuhan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM),

	pemenuhan sarana prasarana, pemenuhan SDM terverifikasi, dan pemberdayaan masyarakat
Sumber Data	Data untuk penyusunan Indeks Trantibumlinmas diperoleh dari berbagai sumber, antara lain: • Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) • Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) • Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan • Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) • Badan Pusat Statistik (BPS) • Dokumen perencanaan dan evaluasi daera
Frekuensi	Tahunan

22. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Nama Indikator	Indeks Kerukunan Umat Beragama
Definisi	Indeks yang mengukur tingkat keharmonisan, toleransi, dan kerjasama antar umat beragama di suatu wilayah berdasarkan persepsi masyarakat dan data kejadian terkait kerukunan maupun konflik agama
Rumus Perhitungan	Penghitungan indeks biasanya dilakukan dengan metode penggabungan skor dari beberapa indikator kuantitatif dan kualitatif yang terkait kerukunan dan konflik agama, menggunakan bobot tertentu. Skor akhir menunjukkan tingkat kerukunan, semakin tinggi nilai indeks, semakin baik kerukunan umat beragama di wilayah tersebut
Interpretasi	➢ Persepsi masyarakat tentang kerukunan antarumat beragama ➢ Jumlah dan frekuensi insiden konflik atau gangguan kerukunan antaragama ➢ Partisipasi dalam kegiatan lintas agama ➢ Keberadaan dan aktivitas forum kerukunan umat beragama (FKUB)
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Kementerian Agama
Frekuensi	Tahunan

23. Indeks Kesejahteraan Sosial

Nama Indikator	Indeks Kesejahteraan Sosial
Definisi	Adalah indikator pengukuran komprehensif terhadap kesejahteraan sosial individu dan kelompok masyarakat, yang mencakup aspek: • Surviving: kemampuan bertahan hidup (misalnya akses pangan, pendidikan, kesehatan), • Functioning: pemulihan peran sosial dan fungsi (contoh: rehabilitasi), • Empowering: pemberdayaan masyarakat agar memiliki kapasitas mandiri dan berdaya dalam lingkungan sosialnya
Rumus Perhitungan	• Pembobotan Indeks dilakukan menggunakan metode seperti Analytic Hierarchy Process (AHP)—melibatkan

	pemangku kepentingan dan ahli dalam proses penentuan bobot. • Hasil akhir adalah indeks komposit yang menggambarkan kondisi kesejahteraan sosial dengan pendekatan inklusif.
Interpretasi	• Menyediakan indikator valid dan objektif untuk mengevaluasi kesejahteraan sosial masyarakat. • Mendorong kebijakan pembangunan sosial yang inklusif dan responsif kebutuhan masyarakat rentan. • Memberikan basis strategi program dalam perencanaan sosial di tingkat daerah maupun nasional
Sumber Data	DTSEN (sekunder) + survei, FGD
Frekuensi	Tahunan

24. Indeks Daya Saing Daerah

Nama Indikator	Indeks Daya Saing Daerah
Definisi	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah, Pengukuran pada IDSD ini mengadopsi kerangka konseptual yang sama dengan Global Competitiveness Index (GCI) dari World Economic Forum (WEF)
Metode Perhitungan	$skor_{i,d} = (N_{id} - NR_i/NT_i - NR_i)$ Skor id adalah skor kemajuan dari daerah ke-d untuk indikator ke-I; Nid adalah nilai data indikator ke-I untuk daerah ke-d; NRi aadalah nilai terendah untuk indikator ke-I;dan Nti adalah nilai terbaik untuk indikator ke-I, hal ini tergantung pada indikatornya (berdasarkan peraturan, kebijakakan, atau persentil ke-90 atau 95). Penjelasan rinci dimensi dan indikator pembentuk daya saing, termasuk metadatanya dapat diakses di tautan.
Interpretasi	Kekuatan utama dari IDSD terletak pada kemampuannya dalam mengombinasikan perspektif mikro di level perusahaan/industri dan perspektif makro di level institusi publik. Secara konseptual, kedua perspektif mikro-makro daya saing ini diklasifikasikan ke dalam tiga faktor penentu daya saing, yaitu faktor ketersediaan kebutuhan fundamental (*basic requirement factors*), faktor penguat efisiensi (*efficiency enhancers*), dan faktor inovasi dan kecanggihan (innovation and shopistication factors). Ketiga faktor penentu daya saing ini diterjemahkan ke dalam 12 pilar daya saing, sehingga terlihat kapasitas daerah dalam meningkatkan kualitas pembagunan.
Sumber Data	Badan Riset dan Inovasi Nasional
Frekuensi	Tahunan

25. Nilai PMTB terhadap PDRB

Nama Indikator	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)
Definisi	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakanbarang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan.PMTB juga merupakan salah satu unsur yang dipakai dalam metode penghitungan PDRB. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) merupakan share PMTB terhadap PRDB
Rumus Perhitungan	*Pembentukan modal* tetap Bruto (% PDRB) $\frac{Total\ PMTB}{PDRB\ ADHK}$ x 100% Keterangan: Pembentukan Modal TetapBruto = Total PMTB Berdasarkan PDRB Sisi Pengeluaran (Miliar Rupiah) $PDRB\ ADHK$ = Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)
Interpretasi	PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal, sewa beli (financial leasing), serta pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter barang modal pada pihak lain, serta sewa beli pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Triwulanan dan Tahunan

26. Perbandingan Orang yang Bekerja terhadap Angkatan Kerja

Nama Indikator	Perbandingan Orang yang Bekerja terhadap Angkatan Kerja
Definisi	Indikator ini menunjukkan persentase angkatan kerja yang bekerja, atau dengan kata lain, bagian dari angkatan kerja yang tidak menganggur
Rumus Perhitungan	$\text{Tingkat Kesempatan Kerja} = \left(\frac{\text{Jumlah Penduduk Bekerja}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}\right) \times 100\%$
Interpretasi	• Nilai mendekati 100%: Menunjukkan hampir seluruh angkatan kerja terserap dalam pekerjaan → kesempatan kerja tinggi. • Nilai rendah: Banyak penganggur dalam angkatan kerja → kesempatan kerja rendah
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

27. Indeks Kota Layak Huni

Nama Indikator	Indeks Kota Layak Huni
Definisi	mencerminkan tingkat kenyamanan lingkungan dan suasana kota sebagai hunian dan tempat beraktivitas. Penilaian mempertimbangkan aspek fisik (fasilitas, prasarana, tata ruang) dan aspek non-fisik (hubungan sosial, aktivitas ekonomi, dsb.)
Rumus Perhitungan	• IKLH dihitung melalui survei persepsi masyarakat terhadap berbagai aspek atau indikator terkait. • Hasilnya dirata-ratakan atau dijadikan agregat menjadi skor indeks dalam satuan persen (%)—semakin tinggi nilai, semakin layak huninya kota tersebut.
Interpretasi	• Menilai kualitas hidup dan kenyamanan di kota. • Menjadi dasar rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan aspek-aspek yang lemah (contoh: sektor informal, fasilitas pejalan kaki). • Mendorong perencanaan kota yang lebih inklusif dan partisipatif.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Bappeda, Dinas Kependudukan, PUPR, dan Dinas Kesehatan
Frekuensi	Tahunan

28. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Nama Indikator	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Definisi	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. IKLH nilai komposit dari; Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL).
Rumus Perhitungan	$\text{IKLH} = (0.376 \text{ x IKA}) + (0.405\ x\ \text{IKU}) + (0.219\ \ x\ \text{IKL})$
Interpretasi	Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Nomor | Kategori | Angka Rentang 1 | Sangat Baik | 90 ≤ x ≤ 100 2 | Baik | 70 ≤ x < 90 3 | Sedang | 50 ≤ x < 70 4 | Kurang | 25 ≤ x < 50 5 | Sangat KUrang | 0 ≤ x < 25
Sumber Data	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Frekuensi	Satu kali satu tahun

29. Persentase Hunian Layak dan Terjangkau

Nama Indikator	Persentase Hunian Layak dan Terjangkau
Definisi	Indikator ini mengukur proporsi rumah atau hunian yang memenuhi standar kelayakan tempat tinggal sekaligus dapat dijangkau secara ekonomi oleh masyarakat. Hunian layak berarti memenuhi syarat teknis, kesehatan, keamanan, dan kenyamanan; sedangkan terjangkau berarti

	biaya kepemilikan atau sewa hunian tidak membebani secara signifikan penghasilan rumah tangga
Rumus Perhitungan	$Persentase\ Hunian\ Layak\ dan\ Terjangkau = \frac{Jumlah\ rumah\ layak\ dan\ terjangkau}{Total\ jumlah\ rumah}$
Interpretasi	• Mengukur akses masyarakat terhadap hunian yang sehat dan terjangkau • Menjadi acuan kebijakan perumahan dan pengentasan kemiskinan • Memantau perkembangan kualitas permukiman dan perumahan
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, PUPR
Frekuensi	Tahunan

30. Indeks Infrastruktur

Nama Indikator	Indeks Kepuasan Layanan lnfrastruktur (IKLI)
Defenisi	Nilai indeks yang menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan infrastruktur publik yang disediakan oleh pemerintah, seperti jalan, jembatan, drainase, air bersih, sanitasi, fasilitas transportasi, dan lainnya.
Rumus Perhitungan	$\text{IKLI} = \left(\frac{\sum(\text{Nilai Jawaban Responden})}{\text{Jumlah Responden} \times \text{Skor Maksimal}} \right) \times 100$ Keterangan: • Nilai Jawaban Responden: Penilaian tiap responden terhadap pertanyaan terkait layanan infrastruktur, biasanya dengan skala likert (misalnya 1–4 atau 1–5). • Jumlah Responden: Total individu yang mengisi survei. • Skor Maksimal: Nilai tertinggi dalam skala likert (misalnya 4 atau 5). • Hasil IKLI: Disajikan dalam bentuk indeks (0–100) agar mudah dibandingkan antar wilayah atau tahun.
Interpretasi	Nilai yang lebih tinggi menunjukkan tingkat kepuasan yang lebih baik terhadap layanan infrastruktur
Sumber Data	Survei pengguna, Dinas PUPR, Bappeda, atau lembaga independen
Frekuensi	Tahunan / 2 Tahunan

31. Rasio Konektivitas Wilayah

Nama Indikator	Rasio Konektivitas Wilayah
Definisi	Indikator ini mengukur tingkat keterhubungan antara satu wilayah dengan wilayah lain, khususnya dalam hal jaringan transportasi, komunikasi, dan aksesibilitas infrastruktur yang mempermudah mobilitas barang, jasa, dan manusia antar wilayah
Rumus Perhitungan	$Rasio\ Konektivitas\ = \frac{Jumlah\ titik\ koneksi\ efektif}{Jumlah\ total\ titik\ wilayah}$ Atau, dapat juga diukur berdasarkan: • Persentase wilayah yang memiliki akses transportasi publik tertentu • Indeks kualitas jaringan jalan dibanding luas wilayah

Interpretasi	Rasio (nilai antara 0-1) atau persentase (%), tergantung definisi dan metode pengukuran.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, PUPR
Frekuensi	Tahunan

32. Indeks Risiko Bencana (IRB)

Nama Indikator	Indeks Risiko Bencana (IRB)
Definisi	Adalah indikator yang mengukur tingkat risiko yang dihadapi suatu wilayah terhadap kemungkinan terjadinya bencana alam, yang mencakup potensi bahaya, kerentanan masyarakat, dan kapasitas adaptasi atau mitigasi wilayah tersebut.
Rumus Perhitungan	$$IRB = Bahaya\ x\ Kerentanan/Kapasitas$$ atau dalam bentuk indeks yang dinormalisasi sehingga bernilai antara 0 (risiko sangat rendah) sampai 1 (risiko sangat tinggi)
Interpretasi	• Mengidentifikasi dan memetakan tingkat risiko bencana untuk perencanaan mitigasi • Mendukung pengambilan keputusan dalam penanggulangan bencana • Menjadi dasar perencanaan pembangunan yang berwawasan risiko bencana
Sumber Data	BNPB, BMKG, BIG, BPS
Frekuensi	Tahunan

33. Indeks Ketahanan Daerah (IKD)

Nama Indikator	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)
Definisi	Indeks Ketahanan Daerah mengukur tingkat kemampuan suatu daerah dalam mempertahankan stabilitas sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan serta menghadapi berbagai tantangan dan ancaman, termasuk bencana, krisis sosial, dan gangguan lainnya
Rumus Perhitungan	$$Indeks\ Ketahanan\ Daerah = \sum(Skor\ Dimensi\ x\ Bobot\ Dimensi)$$ Skala indeks, biasanya 0 sampai 100 atau 0 sampai 1
Interpretasi	Indeks ini biasanya meliputi beberapa dimensi utama: • Ketahanan Ekonomi: kapasitas daerah menjaga pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, dan ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat. • Ketahanan Sosial: tingkat kohesi sosial, keamanan, dan perlindungan sosial masyarakat. • Ketahanan Politik: stabilitas pemerintahan, tata kelola yang baik, dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. • Ketahanan Lingkungan: kemampuan daerah mengelola sumber daya alam dan menjaga keberlanjutan lingkungan. • Ketahanan Infrastruktur: ketangguhan infrastruktur dasar dalam mendukung aktivitas masyarakat.

Sumber Data	Badan Pusat Statistik, BPBD
Frekuensi	Tahunan

34. PDRB Sektor Perdagangan dan Jasa

Nama Indikator	PDRB Sektor Perdagangan dan Jasa
Definisi	PDRB Sektor Perdagangan dan Jasa adalah nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh aktivitas ekonomi di sektor perdagangan (grosir dan eceran) dan jasa dalam suatu wilayah geografis (provinsi, kabupaten/kota) selama periode tertentu. Indikator ini mencerminkan kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap perekonomian daerah
Rumus Perhitungan	$PDRB = Nilai\ tambah\ bruto\ sektor\ perdagangan\ dan\ jasa$
Interpretasi	Data biasanya diolah menggunakan metodologi standar yang mengacu pada sistem akun nasional (SNA)
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Dinas Perdagangan dan Dinas Perindustrian Daerah
Frekuensi	Triwulan dan Tahunan

35. Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah

Nama Indikator	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah
Definisi	Indikator ini mengukur persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah yang meliputi PAD, Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber lokal seperti pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain yang sah
Rumus Perhitungan	$Kontribusi\ PAD\ = \frac{PAD}{Total\ Pendapatan\ Daerah}\ x\ 100\%$
Interpretasi	Hasil perhitungan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah
Sumber Data	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, Kemendagri, BPS, LKPD
Frekuensi	Tahunan

36. Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan dan Jasa

Nama Indikator	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan dan Jasa
Definisi	Indikator ini mengukur persentase perubahan nilai PDRB sektor perdagangan dan jasa dari satu periode ke periode berikutnya (biasanya tahun ke tahun atau kuartal ke kuartal), yang mencerminkan laju pertumbuhan ekonomi sektor tersebut dalam suatu wilayah
Rumus Perhitungan	$= \frac{\mathrm{PDRB}_t - \mathrm{PDRB}_{t-1}}{\mathrm{PDRB}_{t-1}} \times 100\%$ Keterangan • PDRBt = Nilai PDRB sektor perdagangan dan jasa pada periode saat ini

	• PDRBt−1 = Nilai PDRB sektor perdagangan dan jasa pada periode sebelumnya
Interpretasi	Hasil perhitungan Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan dan Jasa
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Dinas Perdagangan dan Dinas Perindustrian daerah
Frekuensi	Triwulan dan Tahunan

37. Persentase Petumbuhan Net Ekspor

Nama Indikator	Persentase Pertumbuhan Net Ekspor
Definisi	Indikator ini mengukur persentase perubahan nilai net ekspor (ekspor dikurangi impor) suatu wilayah atau negara dari satu periode ke periode berikutnya, yang mencerminkan kinerja perdagangan luar negeri dalam menghasilkan surplus atau defisit perdagangan
Rumus Perhitungan	$= \frac{\text{Net Ekspor}_t - \text{Net Ekspor}_{t-1}}{\text{Net Ekspor}_{t-1}} \times 100\%$
Interpretasi	Hasil perhitungan Petumbuhan Net Ekspor
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Kementerian Perdagangan, Bea Cukai
Frekuensi	Bulanan, Triwulanan, Tahunan

38. Kontribusi Lapangan Usaha Perdagangan terhadap PDRB

Nama Indikator	Kontribusi Lapangan Usaha Perdagangan terhadap PDRB
Definisi	Mengukur persentase kontribusi nilai tambah bruto dari lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran terhadap total PDRB suatu wilayah dalam periode tertentu. Ini menunjukkan seberapa besar peran sektor perdagangan dalam struktur ekonomi daerah
Rumus Perhitungan	$= \frac{\text{PDRB Sektor Perdagangan}}{\text{Total PDRB}} \times 100\%$
Interpretasi	Hasil perhitungan Kontribusi Lapangan Usaha Perdagangan terhadap PDRB
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Publikasi PDRB tahunan atau triwulanan (ADHK dan ADHB), Laporan keuangan dan ekonomi daerah (Neraca Wilayah dan Statistik Daerah)
Frekuensi	Triwulan dan Tahunan

39. Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB

Nama Indikator	Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)
Definisi	Ekspor didefinisikan sebagai transaksi alih kepemilikan atas barang dan jasa antara residen suatu perekonomian dengan non residen. Suatu unit institusi didefinisikan sebagai residen dari wilayah ekonomi sebuah negara, jika unit institusi tersebut memiliki pusat kepentingan ekonomi yang utama di dalam wilayah ekonomidan unit institusi ini terlibat dalam aktivitas atau transaksi ekonomi untuk periode waktu yang lama, umumnya ditetapkan

	minimal satu tahun. Ekspor barang menggunakan prinsip pencatatan dengan basis akrual di mana untuk barang dicatat saat terjadi alih kepemilikan yang pendekatannya menggunakan waktu pencatatan pada dokumen kepabeanan, sedangkan untuk ekspor jasa dicatat saat jasa tersebut disediakan atau diberikan. Ekspor barang dan jasa merupakan share ekspor barang dan jasa terhadap PDRB
Rumus Perhitungan	$Ekspor\ Barang\ dan\ Jasa\ (\%\ PDRB)$ $\frac{Nett\ ekspor\ barang\ dan\ jasa}{PDRB\ ADHK}$ x 100% Keterangan: Ekspor Barang dan Jasa = Total Ekspor Barang dan Jasa berdasarkan PDB Sisi Pengeluaran (Miliar Rupiah) PDRB ADHK = Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)
Interpretasi	Ekspor barang dan jasa memiliki dampak signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto, karena ekspor barang dan jasa dapatmemperluas pasar untuk produk-produk domestik di pasar internasional, meningkatkan penjualan, dan membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi. Ketika ekspor barang dan jasa mengalami peningkatan, maka pendapatan negara juga juga meningkat karena peningkatan penjualan dan penerimaan deviden. Peningkatan pendapatan ini mendorong investasi, inovasi, dan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang terkait dengan produksi barang dan jasa yang diekspor. Selain itu, ekspor juga meningkatkan efisiensi dan daya saing industri dalam negeri untuk dapat bersaing di pasar global
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

40. PDRB Sektor Industri Kreatif dan Pariwisata

Nama Indikator	PDRB Sektor Industri Kreatif dan Pariwisata
Definisi	Nilai tambah bruto yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi sektor industri kreatif dan pariwisata dalam suatu wilayah geografis (nasional, provinsi, kabupaten/kota) selama periode tertentu. Merupakan bagian dari total PDRB menurut lapangan usaha
Rumus Perhitungan	$PDRB = \sum(Output\ Sektor - Input\ antara\ Sektor)$
Interpretasi	Hasil perhitungan PDRB Sektor Industri Kreatif dan Pariwisata
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata dan Dinas Perindustrian/Koperasi Daerah,
Frekuensi	Tahunan

41. Persentase Pertumbuhan Sektor PDRB Ekonomi Kreatif

Nama Indikator	Persentase Pertumbuhan Sektor PDRB Ekonomi Kreatif
Definisi	Mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi yang berasal dari aktivitas industri kreatif di suatu wilayah dari satu periode ke periode lainnya (misalnya tahun ke tahun). Pertumbuhan ini mencerminkan dinamika sektor ekonomi kreatif terhadap perekonomian daerah
Rumus Perhitungan	$= \frac{\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1}}{\text{PDRB}_{t-1}} \times 100\%$
Interpretasi	Hasil perhitungan Pertumbuhan Sektor PDRB Ekonomi Kreatif (%)
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Laporan Keuangan dan Statistik Daerah
Frekuensi	Tahunan

42. Persentase Pertumbuhan Sektor Pariwisata

Nama Indikator	Persentase Pertumbuhan Sektor Pariwisata
Definisi	Mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata dalam suatu wilayah dari satu periode ke periode lainnya, yang menunjukkan perkembangan aktivitas ekonomi yang didorong oleh kunjungan wisatawan dan kegiatan terkait pariwisata
Rumus Perhitungan	$= \frac{\text{PDRB Pariwisata}_t - \text{PDRB Pariwisata}_{t-1}}{\text{PDRB Pariwisata}_{t-1}} \times 100\%$
Interpretasi	Hasil perhitungan Pertumbuhan Sektor Pariwisata (%)
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata Kota
Frekuensi	Tahunan

43. Nilai Omset Sektor Koperasi dan UMKM

Nama Indikator	Nilai Omset Sektor Koperasi dan UMKM
Definisi	Nilai omset sektor koperasi dan UMKM mengukur total pendapatan atau penjualan bruto yang diperoleh dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh koperasi serta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam periode tertentu.
Rumus Perhitungan	$\text{Total Omset} = \sum(\text{Omset UMKM}) + \sum(\text{Omset Koperasi})$ Omset bisa juga dihitung sebagai rata-rata per unit: $\text{Rata-rata Omset} = \frac{\text{Total Omset}}{\text{Jumlah Unit Usaha}}$
Interpretasi	Hasil perhitungan Nilai Omset Sektor Koperasi dan UMKM
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Kementerian Koperasi dan UKM, Sistem Online Data Koperasi dan UMKM
Frekuensi	Tahunan

IV. INDIKATOR KINERJA DAERAH

a. Aspek Geografi dan Demografi

1. Indeks Ketahanan Pangan

Nama Indikator	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)
Defenisi	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah indikator komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat ketahanan pangan suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota) berdasarkan tiga dimensi utama.
Rumus Perhitungan	$$\text{IKP} = \frac{\sum (\text{Skor Dimensi} \times \text{Bobot Dimensi})}{\sum \text{Bobot}}$$ Atau jika bobot sama rata: $$\text{IKP} = \frac{\text{Skor Ketersediaan} + \text{Skor Akses} + \text{Skor Pemanfaatan}}{3}$$ Keterangan Rumus: Tiga Dimensi Utama IKP: 1. Ketersediaan Pangan o Indikator: Produksi pangan lokal, cadangan pangan, luas panen, distribusi pangan. o Sumber: Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, BPS. 2. Akses Pangan o Indikator: Persentase penduduk miskin, harga pangan, aksesibilitas geografis, infrastruktur distribusi. o Sumber: BPS, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan. 3. Pemanfaatan Pangan o Indikator: Angka gizi buruk, stunting, ketersediaan air bersih dan sanitasi, pengetahuan gizi. o Sumber: Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, BPS. Setiap dimensi memiliki skor 0–100 berdasarkan normalisasi indikator turunan. .
Interpretasi	Nilai IKP semakin tinggi menunjukkan ketahanan pangan yang semakin baik
Sumber Data	Badan Pangan Nasional (Bapanas), BPS, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian
Frekuensi	Tahunan

2. Prevalansi ketidakcukupan konsumsi pangan

Nama Indikator	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)
Definisi	• Ketidakcukupan konsumsi pangan merupakan kondisi seseorang secara reguler mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energiyang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif.

	• Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Atau, probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang secara reguler mengkonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energinya
Rumus Perhitungan	$PoU = \int_{x<MDER} f(x)\,dx$ Keterangan: PoU : Proporsi populasi yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi (MDER) yang diukur dengan kkal. MDER : Kebutuhan Minimum Energi yang diukur dengan kkal (Minimum Dietery Energy Requirement). f(x) : Fungsi kepadatan probabilitas tingkat konsumsi kalori umumnya sehari-hari untuk rata-rata per kapita individu dalam suatu populasi tertentu
Interpretasi	Mengidentifikasi seberapa banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan dibawah standar kecukupan energi yang direkomendasikan. Semakin tinggi nilai PoU mengidentifikasikan semakin banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan tidak ideal secara kandungan nutrisinya.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

3. Kapasitas Air Baku

Nama Indikator	Kapasitas Air Baku (m^3/detik)
Definisi	Debit air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan, industri, dan lain-lain yang bersumber dari mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, atau sumber air lainnya
Rumus Perhitungan	Total kapasitas debit pengambilan air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan, industri dan lain-lain di setiap sumber air meliputi mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, dan atau sumber air lainnya
Interpretasi	Semakin tingginya kapasitas air baku menunjukkan ketersediaan air untuk pemanfaatan keperluan domestik, perkotaan, industri, dan lain-lain dapat terpenuhi secara maksimal.
Sumber Data	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Frekuensi	Tahunan

4. Konsumsi Listrik Per Kapita

Nama Indikator	Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)
Definisi	Konsumsi Listrik per kapita (kWh/Kapita) adalah pemakaian tenaga listrik dibagi jumlah penduduk pada suatu wilayah dalam periode satu tahun. Pemakaian tenaga

	listrik tersebut merupakan jumlah kWh (kilo Watt hours) energi listrik yang digunakan secara langsung ataupun tidak langsung.
Rumus Perhitungan	$\text{KLPK} = \frac{\text{KLpln} + \text{KLnonpln}}{\text{P}}$ Keterangan: KLpk : Konsumsi listrik per kapita KLpln : Total konsumsi listrik yang disalurkan oleh PT.PLN KLnonpln : Total konsumsi listrik yang disalurkan olehnon PT. PLN P: Jumlah penduduk Catatan: 1. Jumlah pemakaian tenaga listrik adalah total penjualan listrik PT. PLN dan non PT. PLN yang disalurkan ke pelanggan; 2. Perhitungan indikator masih difokuskan pada wilayah usaha PT. PLN.
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mengetahui kualitas pemenuhan kebutuhan listrik dan rata-rata konsumsi listrik per kapita yang didukung oleh pengelolaan ketenagalistrikan guna mencapai keberhasilan pembangunan nasional.
Sumber Data	Kementerian ESDM, PT PLN, dan BPS
Frekuensi	Tahunan

5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Nama Indikator	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (skor)
Definisi	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. IKLH nilai komposit dari; Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL).
Rumus Perhitungan	$\text{IKLH} = (0.376 \text{ x IKA}) + (0.405\ x\ \text{IKU}) + (0.219\ \ x\ \text{IKL})$
Interpretasi	Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Nomor | Kategori | Angka Rentang 1 | Sangat Baik | 90 ≤ x ≤ 100 2 | Baik | 70 ≤ x < 90 3 | Sedang | 50 ≤ x < 70 4 | Kurang | 25 ≤ x < 50 5 | Sangat KUrang | 0 ≤ x < 25
Sumber Data	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Frekuensi	Satu kali satu tahun

6. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Nama Indikator	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)
Definisi	Akses Aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya

	menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T)
Rumus Perhitungan	$\text{PSA} = \frac{JRTST + JRTIPLT}{JRTS}\ x\ 100\%$ PSA = Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi aman JRTSPAL = Jumlah rumah aangga yang memiliki akses terhadap SPALD-T J RTIPLT = Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap tangka septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) JRTS = Jumlah rumah tangga seluruhnya
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mendapatkan data akses sanitasi aman sebagai pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat. Akses terhadap sanitasi yang aman serta sanitasi sangat penting bagi kesehatan, kesejahteraan dan produktivitas dan diakui sebagai hak asasi manusia. Sebagian besar penyakit menular disebabkan oleh bakteri atau virusyang ditularkan baik melalui udara, melalui permukaan atau makanan, atau melalui kotoran manusia. Untuk itu persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman dinilai penting untuk melihat terpenuhinya layanan sanitasi dan kebersihan dasar dari masyarakat
Sumber Data	Kementerian PUPR
Frekuensi	Tahunan

7. Timbulan Sampah terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Nama Indikator	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)
Definisi	Timbulan Sampah Timbulan sampah merupakan sampah yang berasal dari sumber sampah. Jenis sampah yang dimaksud adalah Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT). Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. Kegiatan pengolahan sampah merupakan kegiatan mengubahkarakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah. Pengolahan sampah yang dimaksud mempertimbangkan; karakteristik sampah, teknologi pengolahan yang ramah lingkungan, keselamatan kerja, dan kondisi sosial masyarakat. Sampah diolah berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Kegiatan pengolahan sampah yang diukur meliputi kegiatan; a. Pengolahan sampah organik seperti pengomposan, dan/atau pengolahan sampah organik lainnya seperti

	biokonversi maggot BSF, vermi composting, biodigester, dsb. b. Daur ulang materi (material recovery) merupakan upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu. Jenis sampah yang diutamakan di daur ulang seperti; plastik, kardus, kertas, kaca, logam, dan sejenisnya. Rantai nilai daur ulang materi biasanya melibatkan beberapa langkah seperti industri daur ulang swasta yang membeli, memproses, dan memperdagangkan bahan mulai daripengambilan hingga diproses ulang menjadi produk, bahan, atau zat yang memiliki nilai pasar. Pada rantai daur ulang materi ini melibatkan pemulung informal, lapak, pengepul, bandar, dan pendaur ulang rantai akhir. c. Kegiatan pengolahan sampah berlangsung di fasilitas pengolahan sebagai berikut; TPS3R, TPST, Pusat Olah Organik(POO), Bank Sampah, Pusat Daur Ulang (PDU), fasilitas pengolahan lainnya yang dikelola operator pemerintah dan/atau swasta.
Rumus Perhitungan	Langkah ke-1: Menghitung Jumlah Sampah Terolah Terdapat dua alternatif menghitung jumah sampah terolah: **Cara (1)** $$SO = ST - MFPA + RDP$$ Keterangan: SO : Sampah terolah (ton/hari) ST : Sampah terkumpul (ton/hari) MFPA : Sampah yang masuk ke fasilitas pemrosesan akhir sampah (ton/hari) RPD : Residu dari fasilitas pengolahan-daur ulang sampah (ton/hari) **Cara (2)** $$SO = MFPD + DPA - RPD$$ Keterangan: SO : Sampah terolah (ton/hari) MFPD : Sampah yang masuk ke fasilitas pengolahan-daur ulang sampah (ton/hari) DPA : Material daur ulang yang diambil dari fasilitas pemrosesan akhir oleh sektor informal (ton/hari) RPD : Residu dari fasilitas pengolahan-daur ulang sampah (ton/hari) Langkah ke-2: Menghitung Timbulan Sampah $$TS = TP\ x\ (TPRT + TPNRT)$$ Keterangan: TS : Timbulan sampah (kg/hari) TP : Total populasi (orang) TPRT : Timbulan sampah per kapita dari rumahtangga (kg/orang/hari) TPNRT : Timbulan sampah per kapita dari non-rumah tangga (kg/hari) Langkah ke-3: Menghitung Tingkat Sampah Terolah $$\%SO = \frac{SO}{TS}\ X\ 100\%$$ Keterangan: %SO : Tingkat sampah terolah (%) SO : Sampah ter olah (ton/hari) TS : Timbulan sampah (ton/hari)

Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pengolahan sampah di Provinsi/Kabupaten/Kota
Sumber Data	1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) 2. Kementerian PUPR SI INSAN
Frekuensi	Tahunan

8. Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

Nama Indikator	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan layanan penuh Pengumpulan Sampah (% RT)
Definisi	Pengumpulan Sampah Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R. Sampah yang dikumpulkan berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, Kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah adalah rumah tangga yang: • Menerima layanan pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan frekuensi tetap danrutin (minimal 2 kali dalam seminggu), serta sampah dikumpulkan minimal dalam tiga atau lebih yang terpisah misal: fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu; atau • Memiliki tempat pengumpulan sampah bersama (Komunal) yang disepakati di lingkungan dalam jarak 200m, dilayani dengan frekuensi tetap danrutin tanpa membuang sampah sembarangan dan sampah dikumpulkan dalam tiga fraksi atau lebih yang terpisah, misalnya fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu. Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten/Kota. Penting untuk diketahui bahwa; (a) Sampah terkumpul, dan (b) Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah adalah dua konsep yang berbeda. Pada (a) Sampah Terkumpul mengacu pada jumlah sampah yang mencapai fasilitas pengelolaan sampah, sementara (b) Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah mempertimbangkan rumah tangga yang menerima layanan pengumpulan sampah. Praktik lapangan yang terjadi di beberapa Kabupaten/Kota, sampah yang terkumpul dibuang ke lingkungan (tidak diangkut ke fasilitas pengelolaan sampah). Dalam hal ini rumah tangga tersebut memiliki pelayanan pengumpulan sampah, namun sampah terkumpul mencemari lingkungan. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan suatu Kabupaten/Kota memiliki nilai yang tinggi dalam “Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah”, namun jumlah “sampah terkumpul” dan diangkut ke fasilitas pengelolaan sampah rendah.
Rumus Perhitungan	$PRTLP = \frac{JRTLA}{JRTS}\ X\ 100\%$

	Keterangan: PRTLA : Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah JRTLA : Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap layanan penuh pengumpulansampah JRTS : Jumlah rumah tangga seluruhnya
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pengolahan sampah di Provinsi/Kabupaten/Kota
Sumber Data	BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
Frekuensi	Tahunan

b. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Nama Indikator	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
Definisi	Merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu
Rumus Perhitungan	$r(k) = PDRB\dfrac{(k)t}{PDRB\ (k)t-i}\ x\ 100\%$ Keterangan K = komponen t = tahun berjalan (atas harga konstan) t-1 = Tahun sebelumnya sebelum tahun berjalan (dasar haraga konstan)
Interpretasi	Hasil perhitungan Laju Pertumbuhan Ekonomi
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	

2. Tingkat Kemiskinan

Nama Indikator	Tingkat Kemiskinan (%)
Definisi	Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikanmiskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).
Rumus Perhitungan	$P_{\propto} = \dfrac{1}{n}\sum_{i-1}^{\varphi}(\dfrac{z-y_i}{z})$ Dimana: $\propto$=0 x= garis kemiskinan yi= rata-rata pengeluaran per kapita sebelum penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (i=1,2,3, ……, q),yi<z q= banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan n= jumlah penduduk

Interpretasi	Persentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk Indonesia. Tingkat kemiskinan yang tinggi mengindikasikan masalah serius dalam mencapai kesejahteraan dasar masyarakat.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekurnsi	Dua kali per tahun (Maret dan september)

3. PDRB Per Kapita

Nama indikator	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (Rp Juta)
Definisi	PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita dihitung dengan cara membagi total PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.
Rumus Perhitungan	$PDRB\ per\ kapita = \frac{PDRB\ ADHB}{populasi}$ Keterangan: PDRBADHB = PDRB Atas Dasar Harga berlaku populasi = jumlah penduduk regional t = periode
Interpretasi	Peningkatan PDRB per kapita biasanya dianggap sebagai tanda pertumbuhan ekonomi yang positif dan dapat meningkatkan standar hidup penduduk. Namun, penting untuk diingat bahwa PDRB per kapita tidak mencerminkan distribusi pendapatan yang merata di dalam wilayah tersebut, sehingga tidak memberikan gambaran lengkap tentang ketidaksetaraan ekonomi
Sumber Data	Badan Pusat statistik
Frekuensi	Tahunan

4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Nama Indikator	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
Definisi	Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan penggangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.
Rumus Perhitungan	$TPT = \frac{PP}{PAK}\ x100\%$ Keterangan: TPT = Tingkat pengangguran terbuka (%) PP = Jumlah pengangguran (orang) PAK = Jumlah angkatan kerja (orang)
Interpretasi	Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu

	menyerap persediaan (supply) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi dan perubahan siklus bisnis dan teknologi. Pembedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja antar kelompok tersebut.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Frekuensi	Dua kali per tahun (Februari dan Agustus)

5. Indeks Pembangunan Manusia

Nama Indikator	Indek Pembangunan Manusia (skor)
Definisi	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia pendekatan tiga dimensi dasar, mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak.
Rumus Perhitungan	$IPM = \sqrt[3]{I_{Kesehatan}\ X\ I_{Pendidikan}\ X\ I_{pengeluaran}}$
Interpretasi	IPM merupakan indikator untuk mengetahui tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, meliputi; umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Semakin baik perkembangan empat dimensi variabel tersebut maka akan semakin tinggi pula angka IPM. Merujuk kepada dimensi pembangunan manusia tersebut, maka IPM dihitung melalui komponen-komponen yaitu; 1) usia harapan hidup, 2) harapan lama sekolah, 3) rata-rata lama sekolah dan 4) pengeluaran perkapita disesuaikan (paritas daya beli)
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Satu kali satu tahun

6. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Nama Indikator	Tingkat produktivitas Tenaga kerja (%)
Definisi	Tingkat produktivitas tenaga kerja adalah rasio antara produk berupa barang dan jasa dengan tenaga kerja yang digunakan, baik individu maupun kelompok dalam satuan waktu tertentu yang merupakan besaran kontribusi tenaga kerja dalam pembentukan nilai tambah suatu produk dalam proses kegiatan ekonomi.
Rumus Perhitungan	$tingkat\ produktivitas\ tenaga\ kerja = \frac{PDRB\ Atas\ Dasar\ Harga\ Konstan\ tahun\ berjalan}{jumlah\ Tenaga\ Kerja}\ X100\%$
Interpretasi	Produktivitas tenaga kerja dalam memberikan kontribusi terhadap pembentukan nilai tambah suatu produk dalam proses kegiatan ekonomi cukup rendah karena keterbatasan keahlian dalam mengelola lapangan usaha untuk menghasilkan nilai tambah produk yang bernilai tinggi
Sumber Data	Badan Pusat statistik

Frekuensi	Tahunan

7. Usia Harapan Hidup

Nama Indikator	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)
Definisi	Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.
Rumus Perhitungan	Idealnya dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (*Age Specific Death Rate*/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program *Micro Computer Program for Demographic Analysis* (MCPDA) atau *Mortpack*
Interpretasi	Semakin tinggi usia harapan hidup di suatu daerah, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	SP: 10 tahun dan SUPAS: 10 tahunan

8. Prevalensi Stunting

Nama Indikator	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)
Definisi	Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (*Z-score*) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1995/MENKES/SK/XII/2010 : a. Sangat pendek: Zscore < -3,0 b. Pendek: Zscore ≥ -3,0 s/d Zscore < -2,0
Rumus Perhitungan	Jumlah anak balita pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%). $\text{PAB(5)P stunting} = \frac{\text{JAB}_{(5)}\text{pstunting}}{\text{JAB}_{(5)}}\ x\ 100\%$ Keterangan PAB(5) P : Prevalensi anak balita yang stunting menderita pendek (stunting) JAB(5)P stunting : Jumlah anak balita pendek (stunting) pada waktu tertentu JAB(5) : Jumlah anak balita pada waktu yang sama
Interpretasi	Prevalensi stunting yang tinggi di suatu wilayah menggambarkanbeberapa masalah serius, termasuk: 1. Kekurangan Gizi: Stunting adalah indikator kekurangan gizi kronis. Prevalensi stunting yang tinggi menunjukkan.

	2. Akses Pelayanan Kesehatan: Prevalensi stunting yang tinggi dapat mencerminkan akses yang terbatas ke pelayanan kesehatan berkualitas, termasuk pelayanan gizi dan kesehatan ibu dan anak. 3. Kemiskinan: Stunting sering kali terkait dengan kemiskinan. Keluarga yang miskin mungkin tidakmampu menyediakan makanan bergizi untuk anak-anak mereka, yang pada gilirannya dapat menyebabkan stunting. 4. Pendidikan: Tingkat pendidikan orang tua, khususnya ibu, juga berpengaruh terhadap prevalensi stunting.Orang tua yang berpendidikan cenderung lebih memahami pentingnya gizi dan kesehatan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. 5. Faktor Lingkungan: Faktor lingkungan seperti sanitasi yang buruk dan akses terbatas ke air bersih juga dapat berkontribusi terhadap prevalensi stunting.
Sumber Data	Kementrian Kesehatan
Frekuensi	SSGI: tahunan dan Survei Kesehatan Indonesia : 5 tahunan

9. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional

Nama Indikator	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)
Definisi	Indikator ini menyatakan jumlah penduduk yang terdaftar sebagaikepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan di mana bagi fakir miskin dan orang tidak mampu dibayarkan oleh pemerintah.
Rumus Perhitungan	Metode perhitungan yang digunakan adalah jumlah peserta jaminan kesehatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk di daerah dikali 100%. Cakupan Kepersetaan JKN $\frac{\text{jumlah peserta JKN}}{\text{jumlah penduduk}}\ x\ 100\%$
Sumber Data	Dinas Kesehatan dan BPJS
Frekuensi	Tahunan

10. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)

Nama Indikator	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (*treatment coverage*) (%)
Definisi	Persentase kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan di suatu wilayah dalam periode tertentu
Rumus Perhitungan	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis dihitung berdasarkan jumlah seluruh kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan dibandingkan dengan perkiraan jumlah kasus

	tuberkulosis yang ada di suatu wilayah dalam periode tertentu.
Interpretasi	Indikator ini adalah ukuran penting dalam penanggulangan tuberkulosis, karena menunjukkan sejauh mana upaya penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis berhasil dilakukan. Indikator ini mencakup dua aspek penting: 1. Penemuan Kasus: Ini merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk mengidentifikasi dan mendiagnosis individu yang menderita tuberkulosis. 2. Pengobatan Kasus: Ini merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk memberikan pengobatan yang tepat dan efektif kepada individu yang didiagnosis dengan tuberkulosis.
Sumber Data	Dinas Kesehatan
Frekuensi	Tahunan

11. Rata-rata Lama Sekolah

Nama Indikator	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)

Definisi	Rerata waktu (dalam satuan tahun) yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (RLS 15+) dihitung dengan cara mengkonversikan ijazah terakhir dan tingkat pendidikan yang sedang dijalani ke dalam satuan tahun dengan tidak memperhitungkan adanya kejadian pengulangan kelas. Ijazah yang dimiliki akan dikonversi ke dalam lama waktu bersekolah (satuan tahun) berdasarkan ketentuan berikut:
	a. Tidak punya ijazah = 0 tahun;
	b. SD = 6 tahun;
	c. SMP = 9 tahun;
	d. SMA = 12 tahun;
	e. D1/D2 = 14 tahun;
	f. D3 = 15 tahun;
	g. D4 = 16 tahun;
	h. S1 = 17 tahun;
	i. S2 = 19 tahun;
	j. S3 = 22 tahun.
	Konversi ijazah ke menjadi lamanya waktu bersekolah memenuhi perhitungan berikut ini:
	a. Tidak pernah sekolah = 0 tahun;
	b. Masih sekolah di SD sampai dengan S1= konversi ijazahterakhir + kelas terakhir – 1;
	c. Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1;
	d. Tidak bersekolah lagi dan tamat kelas terakhir = konversi ijazah terakhir;
	e. Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir – 1

Rumus Perhitungan	$Rata-rata\ Lama\ Sekolah\ 15+= \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} xi$ Keterangan:

	P 15+ = Jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas x i = Lama sekolah penduduk ke- i
Interpretasi	Misal: RLS 15+ Kota Padang tahun 2023 = 11,62 tahun, artinya secara rata-rata penduduk Kota Padang yang berusia 15 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 11,62 tahun atau belum menamatkan jenjang Pendidikan SLTP.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

12. Harapan Lama Sekolah

Nama Indikator	Harapan Lama Sekolah
Definisi	Lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang.
Rumus Perhitungan	$$Harapan\ Lama\ Sekolah = FK \sum_{i=7}^{n} \frac{E_i^t}{P_i^t}$$ Keterangan: $F\,K$ = Faktor koreksi pesantren $E\,t$ = Jumlah penduduk usia i yang berkolah pada tahun t i $P\,t$ = Jumlah penduduk usia i pada tahun t i i = Usia (7, 8, …, n)
Interpretasi	Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal pada waktu tertentu. Misal: HLS Kota Padang pada tahun 2023 sebesar 16,56 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2023 memiliki peluang untuk bersekolah selama 16,56 tahun atau setara dengan menamatkan jenjang pendidikan SLTA
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan (hasil survei bulan Maret di setiap tahunnya)

13. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)
Definisi	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat pembangunan literasi di masyarakat berdasarkan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan fasilitas layanan perpustakaan serta aktivitas literasi di suatu daerah. IPLM dikembangkan untuk menilai kemampuan masyarakat dalam mengakses, memahami, dan menggunakan informasi melalui aktivitas membaca, belajar, dan berpartisipasi dalam kegiatan literasi yang difasilitasi oleh perpustakaan dan lembaga sejenis.
Rumus Perhitungan	$$\mathbf{IPLM} = \frac{\sum_{i=1}^{n} (w_i \times I_i)}{\sum_{i=1}^{n} w_i}$$ Keterangan :

	Ii = Skor indikator ke-i pada dimensi pembangunan literasi masyarakat wiw_iwi = Bobot indikator ke-i nnn = Jumlah indikator yang digunakan dalam penghitungan IPLM memiliki rentang nilai dari 0 sampai 100, di mana makin tinggi nilai IPLM, makin baik tingkat pembangunan literasi masyarakat di wilayah tersebut.
Interpretasi	Semakin tinggi skor IPLM, semakin baik pembangunan dan pencapaian literasi masyarakat di wilayah tersebut
Sumber Data	Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi/Kabupaten/Kota, BPS, data survei literasi daerah
Frekuensi	Tahunan (1 kali per tahun, disesuaikan dengan pelaporan nasional)

14. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Nama Indikator	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan(%)
Definisi	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial nasional bagi pekerja di Indonesia. Definisinya adalah jumlah pekerja yang memiliki Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja.
Rumus Perhitungan	$cakupan\ jamsos\ Naker = \frac{jumlsh\ peserta\ BPJS\ Ketenagakerjaan}{jumlah\ semesta\ penduduk\ bekerja} x100\%$ Dimana: *Peserta*= pekerja penerima upah (PPU), Jasa Konstruksi, dan Pekerja bukan Penerima Upah *Semesta penduduk bekerja*= penduduk bekerja yang berusia 15-65 tahun
Interpretasi	Semakin tinggi Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menunjukkan tingkat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang semakin tinggi. Jaminan sosial ini mencakup perlindungan terhadap risiko- risiko seperti kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan kematian. Manfaat yang diperoleh peserta maupun keluarga meliputi santunan tunai, fasilitasi pengembalian ke pasar kerja, dan beasiswa bagi anak.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

15. Indeks Perlindungan Khusus Anak

Nama Indikator	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)
Definisi	IPKA adalah indikator yang menggambarkan pencapaian pembangunan perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan

	rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya
Rumus Perhitungan	$IPHA = \sum_{j=1}^{4} (W_j \; x \; Indeks \; K_j)$ dimana IPA : Indeks Perlindungan Anak IPHA : Indeks Pemenuhan Hak Anak W_j : Bobot Klaster ke-j $Indeks \; K_j$: nilai indeks Klaster ke-j
Interpretasi	Nilai IPKA berkisar antara 0 - 100 dan bermakna positif. Nilai IPKA yang semakin besar menunjukkan kualitas perlindungan khusus terhadap anak semakin meningkat dan sebaliknya.
Sumber Data	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Frekuensi	Tahunan

16. Indeks Ketimpangan Gender

Nama Indikator	Indeks Ketimpangan Gender (IKG))
Definisi	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20), dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA/sederajat ke atas dan persentase anggota legislatif, serta dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPAK perempuan.
Rumus Perhitungan	Langkah-langkah metode penghitungan IKG berikut formulayang digunakan adalah sebagai berikut: 1. Menghitung Indeks Perempuan dan Indeks Laki-laki $G_p = \sqrt[3]{(\frac{0{,}005}{MTF} \; x \; \frac{0{,}01}{MHPK\;20})^{\frac{1}{2}} \; x \; (PR_p x SE_p)^{\frac{1}{2}} \; x \; TPAK_p}$ 2. Menghitung agregasi indeks perempuan dan indeks laki-laki dengan rata-rata harmonic $HARM\;(G_p, G_L = [\frac{(G_p)^{-1} + (G_L)^{-1}}{2}]^{-1}$ 3. Menghitung indeks masing-masing dimensi $IKR = \frac{\left(\sqrt{\frac{0{,}005}{MTF} \times \frac{0{,}01}{MHPK\,20}} + 1\right)}{2}$ $IPK = \frac{TPAK_P + TPAK_L}{2}$ $IP = \frac{\left(\sqrt{PR_P \times SE_P} + \sqrt{PR_L \times SE_L}\right)}{2}$

	4. Menghitung agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik $G_{P,L} = \sqrt[3]{IKR \times IP \times IPK}$ 5. Menghitung indeks kesetaraan gender $Indeks\ Kesetaraan\ Gender = \frac{HARM(G_P, G_L)}{G_{P,L}}$ 6. Menghitung indeks ketimpangan gender $IKG = 1 - \frac{HARM(G_P, G_L)}{G_{P,L}}$ Keterangan: G_P = Indeks Perempuan G_L = Indeks Laki-laki MTF = Proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan MHPK20 = Proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun PR_P = Persentase perempuan di legislatif PR_L = Persentase laki-laki di legislatif SE_P = Persentase perempuan usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas SE_L = Persentase laki-laki usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas $TPAK_P$ = Persentase angkatan kerja perempuan terhadap penduduk perempuan usia kerja $TPAK_L$ = Persentase angkatan kerja laki-laki terhadap penduduk laki-laki usia kerja $HARM(G_P, G_L)$ = Agregasi indeks perempuan dan laki-laki dengan rata-rata harmonik IKR = Indeks dimensi kesehatan reproduksi IP = Indeks dimensi pemberdayaan IPK = Indeks dimensi pasar tenaga kerja $G_{P,L}$ = Agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik IKG = Indeks Ketimpangan Gender
Interpretasi	IKG bernilai antara 0 - 1 dan bermakna positif. Nilai IKG yang semakin rendah menunjukkan ketimpangan gender yang semakin rendah atau kesetaraan gender yang semakin tinggi, dan sebaliknya.
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS, dan Sekretaris Dewan (Sekwan)
Frekuensi	Tahunan

17. Indeks Pembangunan Gender

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Defenisi	Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah rasio antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan terhadap IPM laki-laki, yang digunakan untuk mengukur kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan dalam aspek dasar pembangunan manusia: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.
Rumus Perhitungan	$\text{IPG} = \left(\frac{\text{IPM Perempuan}}{\text{IPM Laki-laki}} \right) \times 100$ Atau jika menggunakan skala desimal: $\text{IPG} = \frac{\text{IPM Perempuan}}{\text{IPM Laki-laki}}$ Keterangan Rumus: • IPM Perempuan Indeks Pembangunan Manusia untuk penduduk perempuan, dihitung dari: ○ Angka harapan hidup perempuan

	○ Rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah perempuan ○ Pengeluaran riil per kapita perempuan • IPM Laki-laki Sama seperti IPM perempuan, namun untuk penduduk laki-laki. • × 100 Untuk menyajikan IPG dalam bentuk persentase (biasa digunakan oleh BPS).
Interpretasi	Semakin mendekati 100 atau 1.000, semakin kecil kesenjangan pembangunan gender
Sumber Data	Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PPPA
Frekuensi	Tahunan

18. Indeks Pembangunan Pemuda

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Pemuda(IPP)
Definisi	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah indikator komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan pemuda secara holistik di suatu wilayah dalam lima domain utama, yaitu: pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, kesempatan kerja dan kewirausahaan, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan inklusi. IPP menggambarkan sejauh mana pemuda memiliki akses terhadap sumber daya dan peluang yang mendukung pertumbuhan dan partisipasi aktif mereka dalam pembangunan nasional. IPP disusun dalam skala 0 sampai 100, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan tingkat pembangunan pemuda yang lebih baik.
Rumus Perhitungan	$\text{Indeks Domain} = \frac{\text{Skor Indikator 1} + \text{Skor Indikator 2} + \cdots + \text{Skor Indikator k}}{\text{Jumlah Indikator dalam Domain}}$ Keterangan : Metodologi dan rumus pasti dapat bervariasi dari waktu ke waktu dan mungkin tidak dipublikasikan secara detail.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai IPP, semakin baik capaian pembangunan pemuda dalam berbagai aspek penting kehidupannya. IPP juga bisa digunakan untuk membandingkan kinerja pembangunan kepemudaan antar daerah atau antar waktu.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik (BPS), Kemendikbudristek
Frekuensi	Tahunan

19. Angka Kematian Ibu

Nama Indikator	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)
Definisi	Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.
Rumus Perhitungan	Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas yang tercatat atau hasil estimasi pada tahun tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup pada periodeyang sama dan dikali 100.000. AKI = (JKI/JLH) x 100.000 Keterangan: AKI : Angka kematian ibu JKI : Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas atau estimasi pada waktu tertentu JLH : Jumlah kelahiran hidup
Interpretasi	Indikator Angka Kematian Ibu (AKI) adalah ukuran yang digunakan untuk memantau jumlah kematian ibu yang terjadi sebagai akibat langsung dari komplikasi kehamilan, persalinan, dan masa nifas. AKI sangat penting karena memberikan gambaran tentang kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak di suatu negara atau wilayah. Angka Kematian Ibu (AKI) yang rendah di suatu wilayah mencerminkan beberapa hal penting: 1. Kualitas Pelayanan Kesehatan: AKI yang rendah biasanya mencerminkan kualitas pelayanan kesehatan yang baik, termasuk pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan antenatal, persalinan, dan pascapersalinan. 2. Akses Pelayanan Kesehatan: AKI yang rendah juga bisa mencerminkan akses yang baik ke pelayanan kesehatan. Ini bisa berarti bahwa fasilitas kesehatan mudah dijangkau dan terjangkau oleh masyarakat. 3. Pendidikan Kesehatan: AKI yang rendah bisa mencerminkan tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan reproduksi dan pentingnya pelayanan kesehatan selama kehamilan dan persalinan. 4. Status Gizi: AKI yang rendah juga bisa mencerminkan status gizi ibu yang baik. Gizi yang baik selama kehamilan sangat penting untuk mencegah komplikasi yang bisa mengancam nyawa ibu. 5. Kesadaran Masyarakat: AKI yang rendah juga bisa mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya perawatan kesehatan selama kehamilan dan persalinan.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Sensus Penduduk (SP): 10 tahunan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS): 10 tahunan

20. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Ke atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Nama Indikator	Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi (%)
Definisi	• Proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi adalah untuk memantau jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. • Nilai tertinggi dari indikator ini mencapai 100% (seluruh penduduk berusia 15 tahun ke atas di daerah tersebut sudah menyelesaikan pendidikan tinggi) • Jenjang pendidikan tinggi mencakup: o Diploma I-IV o S1 o S2 o S2 Terapan o S3
Rumus Perhitungan	Proporsi penduduk Berusia 15 Tahun Ke atas yang Berkualifikasi Pendidikan tinggi $\frac{jumlah\ penduduk\ berusia\ 15 tahun\ ke\ atas\ yang\ berkualifikasi\ pendidikan\ tinggi}{jumlah\ penduduk\ berusia\ 15\ Tahun\ ke\ atas} x100\%$
Interpretasi	• Positif • Tingginya proporsi penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi menggambarkan kualitas penduduk dari segi pendidikan semakin baik
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

21. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi Yang Bekerja Di Bidang Keahlian Menengah Tinggi

Nama Indikator	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)
Definisi	• Pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi merupakan penduduk usia 15 tahun ke atas lulusan pendidikan menengah atau pendidikan tinggi.

Tingkat Pendidikan Rendah	Tingkat Pendidikan Menengah	Tingkat Pendidikan Tinggi
• Tidak/belum tamat SD • SD/MI/SDLB/Paket A • SMP/MTs/SMPLB/ Paket B	• SMA/MA/SMLB/Paket C • SMK • MAK	• Diploma I/II/III • Diploma IV • S1 • S2 • S2 terapan • S3

	• Bidang keahlian menengah (*semi-skilled*) adalah bidang kerja yang membutuhkan pekerja yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dengan tingkat kompleksitas sedang untuk menyelesaikan tugas yang umumnya bersifat rutin dan tidak membutuhkan kemampuan mental tinggi. • Bidang keahlian tinggi (skilled) adalah bidang kerja yang membutuhkan pekerja dengan pengetahuan dan keterampilan komprehensif atas pekerjaan yang dilakukannya sehingga mampu menyelesaikan tugas yang sifatnya kompleks dan membutuhkan kemampuan mental tinggi. • Indikator ini diperoleh dengan membagi jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada bidang keahlian menengah atau tinggi dengan jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada bidang keahlian rendah atau menengah atau tinggi
Rumus Perhitungan	Persentase pekerja Lulusan pendidikan Menengah dan tinggi Yang bekerja di Bidang keahlian Menengah tinggi $\frac{\begin{array}{c}jumlah\ penduduk\ 15\ tahun\ ke\ atas,\\ yang\ lulus\ pendidikanmenengah\\ atau\ pendidikan\ tinggi, sedang\\ bekrja\ pada\ bidang\ keahlian\\ menengah\ atau\ tinggi\end{array}}{\begin{array}{c}jumlah\ penduduk\ 15\ tahun\ ke\ atas,\\ yang\ lulus\ pendidikan\ menengah\\ atau\ pendidikan\ tinggi, dan\ sedang\\ bekrja\end{array}}\ x\ 100\%$
Interpretasi	• Positif • Meningkatnya persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi menggambarkan peningkatan linkand match tenaga kerja antara dunia pendidikan (supply) dan lapangan kerja (*demand*) dengan klasifikasi keahlian yang sesuai dengan tingkat pendidikan
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Dua kali per tahun (Februari dan Agustus), digunakan adalah publikasi Agustus.

22. Persentase Penyandang Disabilitas Yang Bekerja Di Sektor Formal

Nama Indikator	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)
Definisi	Pekerja penyandang disabilitas adalah penduduk penyandang disabilitas berusia 15 tahun ke atas yang bekerjadan mengalami satu atau lebih hambatan diantaranya: gangguan dalam penglihatan, pendengaran, mobilitas, menggunakan atau menggerakan jari atau tangan, gangguan berbicara atau memahami atau berkomunikasi dengan orang lain, gangguan mengingat, berkonsentrasi, dan gangguan emosional dengan tingkat keparahan rendah, sedang, sampaiparah. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal adalah

	penyandang disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar (status pekerjaan 3) dan buruh/karyawan/pegawai (status pekerjaan 4). Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal adalah proporsi penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (status pekerjaan 3 dan 4) terhadap total penyandang disabilitas pada angkatan kerja. Penyandang disabilitas yang dihitung dalam indikator ini adalah penyandang disabilitas kategori sedang dan berat.
Rumus Perhitungan	$\%\ PD_{formal} = \frac{\sum Pd\ formal}{\sum AKPD} x100\%$ Keterangan: *PD formal*: Pekerja Penyandang Disabilitas Sektor Formal AKPD : Angkatan Kerja Penyandang Disabilitas
Interpretasi	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal merupakan proporsi penyandang disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar dan bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai terhadap total angkatan kerja penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal mendapatkan jobs security, penghasilan yang stabil, serta cakupan perlindungan sosial yang lebih baik untuk mendapatkan kehidupan yang layak dibandingkan mereka yang bekerja di sektor informal.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

c. Aspek Daya Saing Daerah

1. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Nama Indikator	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)
Definisi	Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor industri pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDRB.
Rumus Perhitungan	Rasio PDRB Idustri pengolahan $\frac{Nilai\ tambah\ sektor\ industri\ pengolahan}{nilai\ PDRB\ ADHB} x100\%$
Interpretasi	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB ADHB yang mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor industri pengolahan dengan total nilai PDRB . Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan, semakin tinggi proporsinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

2. Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

Nama Indikator	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)
Definisi	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum adalah persen bagian PDB regional yang dikontribusikan oleh aktivitas terkait pariwisata meliputi: 1. Penyediaan Akomodasi bagi Wisatawan, dan 2. Penyediaan Jasa Makan dan Minum.
Metode Perhitungan	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan minum $\frac{nilai\ tambah\ penyediaan\ akomodasi\ makan\ dan\ minum}{nilai\ PDRB\ ADHB} x100\%$
Interpretasi	Semakin besar nilai PDRB ADHB yang dihasilkan oleh aktivitas terkait pariwisata, semakin tinggi proporsinya terhadap PDRB regional. Sehingga perlu ada pemutakhiran dari aktivitas-aktivitas yang terkait pariwisata.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik Daerah, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Frekuensi	Tahunan

3. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif

Nama Indikator	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)
Definisi	PDRB pada definisi BPS merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada satu daerah. Dengan demikian, Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif adalah persen bagian PDB regional yang dikontribusikan oleh aktivitas ekonomi kreatif dari 17 subsektor yang termasuk: 1. Fesyen 2. Kuliner 3. Kriya 4. Film, Animasi dan Video 5. Pengembang Permainan 6. Aplikasi 7. Musik 8. Seni Pertunjukan 9. Fotografi 10. Desain Komunikasi Visual 11. Televisi dan Radio 12. Seni Rupa 13. Desain Produk 14. Periklanan 15. Penerbitan 16. Arsitektur 17. Desain Interior
Metode Perhitungan	$rasio\ PDRB\ ekonomi \frac{nilsi\ tambah\ dektor\ jas\ lainnya}{nilai\ PDRB\ ADHB} x100\%$

Interpretasi	Semakin besar nilai PDRB ADHB yang dihasilkan oleh sektor jasa lainnya (sub sektor ekonomi kreatif), semakin tinggi proporsinya terhadap PDB nasional. Namun dalam penerjemahannya ke depan, perlu diperhatikan nilai rupiah dari PDRB sub sektor ekonomi kreatif untuk menghindari misinterpretasi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

4. Rasio Kewirausahaan

Nama Indikator	Rasio Kewirausahaan (%)
Definisi	Rasio kewirausahaan merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.
Metode Perhitungan	$Rasio\ Kewirausahaan \frac{jumlah\ Usaha\ dibantu\ tenaga\ kerja\ tetap}{Total\ Angkatan\ kerja} x100\%$
Interpretasi	Pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas).
Frekuensi	Sakernas dilaksanakan dua kali dalam setahun (Februari dan Agustus). Perhitungan untuk indikator merujuk pada Sakernas bulan Agustus.

5. Indeks Inovasi Daerah

Nama Indikator	Indeks Inovasi Daerah (skor)
Definisi	Indeks Inovasi Daerah sebagai alat ukur untuk melihat keberhasilan daerah dalam melaksanakan segala bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah secara cepat dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.
Rumus Perhitungan	Pengukuran Indeks Inovasi Daerah dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan, Kemendagri melalui website http://indeks.inovasi.otda.go.id/layanan/
Interpretasi	Indeks Inovasi Daerah merupakan dokumen yang memberikan informasi dan data terkait pelaksanaan Inovasi Daerah yang telah berhasil dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah paling sedikit 2 (dua) tahun
Sumber Data	Kementerian Dalam Neger

Frekuensi	Tahunan

6. Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan

Nama Indikator	Rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (%)
Definisi	Rasio PDRB yang bersumber dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB ADHB
Metode Perhitungan	$Rasiod\ PDRB\ sektor\ pertanian, kehutanan\ dan\ perikanan = \frac{Nilai\ tambah\ sektor,\ kehutanan\ dan\ perikanan}{nilai\ PDRB\ ADHB} x100\%$
Interpretasi	Semakin besar nilai PDRB ADHB yang dihasilkan oleh aktivitas sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan mengedepankan ekonomi hijau mencerminkan pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
Sumber Data	Badan Pusat Statistik Daerah
Frekuensi	Tahunan

7. Rasio PDRB Sektor Perikanan

Nama Indikator	Rasio PDRB Sektor Perikanan
Definisi	Rasio PDRB Sektor Perikanan adalah persentase sumbangan nilai tambah bruto dari kegiatan perikanan (baik perikanan tangkap maupun budidaya) terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku pada suatu wilayah dan periode tertentu.
Rumus Perhitungan	$= \frac{\text{Nilai Tambah Bruto Sektor Perikanan}}{\text{Total PDRB Atas Dasar Harga Berlaku}} \times 100\%$ Keterangan : • Nilai Tambah Bruto Sektor Perikanan = Jumlah seluruh output sektor perikanan dikurangi biaya input antar sektor. Termasuk perikanan tangkap, budidaya, pengolahan hasil, dan jasa penunjang. • Total PDRB = Jumlah seluruh nilai tambah bruto dari semua sektor ekonomi di wilayah tersebut (misalnya provinsi atau kabupaten).
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin besar kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian daerah
Sumber Data	• Badan Pusat Statistik (BPS) – publikasi: ➢ PDRB Menurut Lapangan Usaha ➢ Statistik Perikanan • Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten • Publikasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tahunan • Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD)

Frekuensi	Tahunan (Biasanya dirilis BPS sekitar Maret–April tahun berikutnya)

8. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Nama Indikator	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)
Definisi	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakanbarang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan.PMTB juga merupakan salah satu unsur yang dipakai dalam metode penghitungan PDRB. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) merupakan share PMTB terhadap PRDB
Rumus Perhitungan	*Pembentukan modal* tetap Bruto (% PDRB) $\frac{Total\ PMTB}{PDRB\ ADHK}$ x 100% Keterangan: Pembentukan Modal TetapBruto = Total PMTB Berdasarkan PDRB Sisi Pengeluaran (Miliar Rupiah) $PDRB\ ADHK$ = Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)
Interpretasi	PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal, sewa beli (financial leasing), serta pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter barang modal pada pihak lain, serta sewa beli pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Triwulanan dan Tahunan

9. Ekspor Barang dan Jasa (Rasio Terhadap PDRB)

Nama Indikator	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)
Definisi	Ekspor didefinisikan sebagai transaksi alih kepemilikan atas barang dan jasa antara residen suatu perekonomian dengan non residen. Suatu unit institusi didefinisikan sebagai residen dari wilayah ekonomi sebuah negara, jika unit institusi tersebut memiliki pusat kepentingan ekonomi yang utama di dalam wilayah ekonomidan unit institusi ini terlibat dalam aktivitas atau transaksi ekonomi untuk periode waktu yang lama, umumnya ditetapkan minimal satu tahun. Ekspor barang menggunakan prinsip pencatatan dengan basis akrual di mana untuk barang dicatat saat terjadi alih kepemilikan yang pendekatannya menggunakan waktu pencatatan pada dokumen kepabeanan, sedangkan untuk ekspor jasa dicatat saat jasa tersebut disediakan atau diberikan. Ekspor barang

	dan jasa merupakan share ekspor barang dan jasa terhadap PDRB
Rumus Perhitungan	$Ekspor\ Barang\ dan\ Jasa\ (\%\ PDRB)$ $\frac{Nett\ ekspor\ barang\ dan\ jasa}{PDRB\ ADHK}$ x 100% Keterangan: Ekspor Barang dan Jasa = Total Ekspor Barang dan Jasa berdasarkan PDB Sisi Pengeluaran (Miliar Rupiah) PDRB ADHK = Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)
Interpretasi	Ekspor barang dan jasa memiliki dampak signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto, karena ekspor barang dan jasa dapatmemperluas pasar untuk produk-produk domestik di pasar internasional, meningkatkan penjualan, dan membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi. Ketika ekspor barang dan jasa mengalami peningkatan, maka pendapatan negara juga juga meningkat karena peningkatan penjualan dan penerimaan deviden. Peningkatan pendapatan ini mendorong investasi, inovasi, dan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang terkait dengan produksi barang dan jasa yang diekspor. Selain itu, ekspor juga meningkatkan efisiensi dan daya saing industri dalam negeri untuk dapat bersaing di pasar global
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

10. Indeks Infrastruktur/Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

Nama Indikator	Indeks Kepuasan Layanan lnfrastruktur (IKLI)
Defenisi	Nilai indeks yang menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan infrastruktur publik yang disediakan oleh pemerintah, seperti jalan, jembatan, drainase, air bersih, sanitasi, fasilitas transportasi, dan lainnya.
Rumus Perhitungan	$\text{IKLI} = \left(\frac{\sum(\text{Nilai Jawaban Responden})}{\text{Jumlah Responden} \times \text{Skor Maksimal}} \right) \times 100$ Keterangan: • Nilai Jawaban Responden: Penilaian tiap responden terhadap pertanyaan terkait layanan infrastruktur, biasanya dengan skala likert (misalnya 1–4 atau 1–5). • Jumlah Responden: Total individu yang mengisi survei. • Skor Maksimal: Nilai tertinggi dalam skala likert (misalnya 4 atau 5). • Hasil IKLI: Disajikan dalam bentuk indeks (0–100) agar mudah dibandingkan antar wilayah atau tahun.
Interpretasi	Nilai yang lebih tinggi menunjukkan tingkat kepuasan yang lebih baik terhadap layanan infrastruktur
Sumber Data	Survei pengguna, Dinas PUPR, Bappeda, atau lembaga independen
Frekuensi	Tahunan / 2 Tahunan

11. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak

Nama Indikator	Persentase RT yang memiliki Akses terhadap hunian layak, terjangkau
Definisi	Maka rumah tangga dengan akses rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan adalah rumah tangga yang menempati rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan. Mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan memenuhi: a. Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat b. Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan. Pengukuran indikator tersebut menggunakan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi).Mempertimbangkan variasi penerapan PBG dan SLF di tingkat pemerintah daerah (kabupaten/kota) maka pengukuran indikator ini dapat menggunakan proksi yaitu memenuhi empatkriteria sebagai berikut: 1. Ketahanan bangunan (durable housing) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat, 2. Kecukupan luas tempat tinggal (sufficient living space) yaitu luas lantai perkapita ≥ 7,2 m2 3. Memiliki akses air minum layak 4. Memiliki akses sanitasi layak
Rumus Perhitungan	1. Bagi kabupaten/kota yang telah menerapkan PBG dan SLF secara menyeluruh menggunakan rumus sebagai berikut: $PHLTB \frac{JRTHLTB}{JRT} X\ 100\%$ • PHLTB : persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan • JRTHLTB : jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan • JRT : jumlah rumah tangga 2. Bagi kabupaten/kota yang belum menerapkan PBG dan SLF secara menyeluruh maka dapat menggunakan indikator proksi yaitu 4 kriteria (ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, memiliki akses air minum layak, dan memiliki akses sanitasi layak). $PHLTB\ (proksi) \frac{JRTHLTB\ (proksi)}{JRT} X\ 100\%$ • PHLTB (proksi): Persentase rumah tangga hunian layak,terjangkau, berkelanjutan. • JRTHLTB (proksi): jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan. • JRT: Jumlah rumah tangga
Interpretasi	Indikator ini untuk mengukur kesejahteraan rumah tangga di Indonesia dari sektor perumahan. Semakin tinggi persentase rumah tangga yang menghuni hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan maka semakin baik

	kesejahteraan rumah tangga di Indonesia dari sektor perumahan
Sumber Data	• Badan Pusat StatistikBPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) • Data Kementerian PUPR (untuk mengetahui status pelaksanaan PBG dan SLF di Kabupaten/Kota)
Frekuensi	Tahunan

12. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Nama Indikator	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)
Definisi	• Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. • PDRB adalah Penjumlahan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta ataudihasilkan di wilayah domestik suatu regional/negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen, di mana barang dan jasa dihitung menggunakan harga yang berlaku pada periode penghitungan. • Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerahterhadap PDRB suatu daerah. Persentase rasio tersebut menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak daerah bagi pemerintah daerah
Rumus Perhitungan	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB $\frac{penerimaan\ pajak\ daerah}{nilai\ PDRB\ ADHB}\ x\ 100\%$
Interpretasi	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) yang semakin besar menunjukkan bahwa Semakin tinggi penerimaan pajak daerah, maka semakin besar nilai rasio pajak daerah. Semakin tinggi nilai rasio pajak daerah maka pemerintah daerah dapat lebih mengandalkan APBD untuk membiayai pembangunan di daerah.
Sumber Data	Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dan BPS
Frekuensi	Tahunan

13. Tingkat Inflasi

Nama Indikator	Tingkat Inflasi (%)
Definisi	Kecenderungan naiknya harga barang dan jasa yang berlangsung secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu dalam wilayah kota tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi.

Rumus Perhitungan	Tingkat inflasi $\frac{IHkt-IHK_{t-1}}{IHK_{t-1}}\ x\ 100\%$ Perhitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) berdasarkan the Classification of Individual Consumption by Purpose (COICOP) 2018. Pengukuran IHK dilakukan melalui Survei Biaya Hidup (SBH) oleh BPS di 90 Kabupaten/Kota sampel IHK.
Interpretasi	Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan harga (inflasi) atau tingkat penurunan harga (deflasi) dari barang dan jasa. Setelah diketahui indeks harga konsumen (IHK) di bulan tersebut, inflasi dapat diketahui melalui perhitungan persentase perubahan IHK. Secara umum, persentase perubahan inflasi dibagi dapat menjadi tiga: 1. **Inflasi m-t-m** membandingkan nilai IHK pada bulan amatan dengan bulan sebelumnya (misal bulan amatan adalah bulan Januari maka bulan sebelumnya adalah Desember). 2. **Inflasi y-t-d** membandingkan IHK pada akhir tahun amatan dengan titik tertentu dalam tahun yang telah berjalan. 3. **Inflasi y-o-y** membandingkan nilai IHK pada bulan amatan tertentu dengan IHK pada bulan yang sama pada tahun sebelumnya (sebagai contoh untuk menghitung inflasi year-on-year September 2023 maka IHK September 2023 dibandingkan dengan IHK September 2022).
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Bulanan, Triwulanan dan Tahunan

14. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara

Nama Indikator	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara
Definisi	Jumlah tamu wisatawan mancanegara yang menginap di hotelberbintang di daerah
Metode Perhitungan	Data jumlah tamu asing di hotel berbintang
Interpretasi	Semakin tinggi jumlah tamu wisatawan mancanegara yang menginap di hotel berbintang di daerah, maka akan meningkatkan devisa dari sektor pariwisata secaranasional.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

15. Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB

Nama Indikator	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)
Definisi	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB ADHB yang menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta

	penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu.
Metode Perhitungan	$rasio\ volume\ usaha\ koperasi\ terhadap\ PDRB$ $\frac{total\ volume\ koperasi}{Nilai\ PDRB\ ADHB}\ x100\%$
Interpretasi	Semakin besar rasio volume usaha koperasi daerah terhadap PDRB, merepresentasikan semakin besar kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah tersebut.
Sumber Data	• Data volume koperasi yang dikumpulkan oleh urusan pemerintahan Bidang Koperasi dan UKM • Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

16. *Return on Asset* (ROA) BUMD

Nama Indikator	*Return on Asset* (ROA) BUMD (%)
Definisi	*Return On Asset* adalah indikator untuk mengukur kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. Sehingga Return On Asset dihitung dengan membandingkan laba bersihdengan total nilai aset yang dimiliki perusahaan.
Metode Perhitungan	$Return\ On\ ASset \frac{total\ lab\ bersih}{total\ nilai\ asset}\ x100\%$
Interpretasi	*Return On Asset* (ROA) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur produktivitas perusahaan melalui pemanfaatan asset yang dimiliki. Dengan mengetahui tingkat ROA perusahaan, maka dapat diketahui tingkat produktivitas perusahaan jika dibandingkan dengan perusahaan lain dalam sektor atau industri yang sama. Sehingga data ROA dapat dimanfaatkan untuk perencanaan strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah, yang pada akhirnya akan berdampak pada pencapaian sasaran pembangunan nasional secara keseluruhan.
Sumber Data	Laporan keuangan BUMD
Frekuensi	Tahunan

17. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal

Nama Indikator	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)
Definisi	Tenaga Kerja Formal adalah tenaga kerja yang dengan status pekerjaan utama termasuk dalam pekerja dengan kategori berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar, dan buruh/ karyawan/ pegawai.
Rumus Perhitungan	$\text{Tenaga Kerja Formak} = \left(\frac{\sum_{i=3}^{4} y_i}{\sum_{i-1}^{7} y_i}\right) \text{ x } 100\%; i = 1,2,3,\dots,7$ Keterangan: Tenaga Kerja Formal = Proporsi penciptaan lapangan kerja formal yi = Jumlah pekerja dari status pekerja utama ke-i 1 = Berusaha sendiri

	2 = Berusaha dibantu buruh tidak tetap 3 = Berusaha dibantu buruh tetap/buruh bayar 4 = Buruh/karyawan/pegawai 5 = Pekerja bebas di pertanian 6 = Pekerja bebas di non pertanian 7 = Pekerja keluarga/tak dibayar
Interpretasi	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal dengan satuan nilai dalam bentuk persentase menununjukan seberapa dominan pekerja dengan status pekerjaan utama yang termasuk dalam pekerja formal sesuai dengan ketentuan nasional yang berlaku. Semakin tinggi nilai persentasenya, maka semakin dominan Kekuatan ekonomi nasional dalam menciptakan lapangan kerja formal.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Frekuensi	Dua kali per tahun (Februari dan Agustus)

18. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Nama Indikator	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)
Definisi	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan adalah persentase jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan. Angkatan kerja perempuan adalah penduduk usia kerja perempuan yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengganggguran. Penduduk usia kerja perempuan adalah penduduk berjenis kelamin perempuan yang berusia 15 tahun ke atas.
Rumus Perhitungan	$$TPAK_p = \frac{PAK_p}{p_{((23,p)}} \, x100\%$$ Keterangan: TPAKp = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) PAKp = Jumlah angkatan kerja perempuan (orang) P(15+,p) = Jumlah penduduk perempuan usia 15 tahunke atas (orang)
Interpretasi	TPAK menunjukkan indikasi besarnya pasokan tenagakerja (labor supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa relatif terhadap penduduk usia kerja. Pembagian berdasarkan jenis kelamin (perempuan) menunjukkan ukuran dan komposisi penduduk perempuan yang aktif dalam pasar kerja. Kegunaan indikator ini antara lain untuk memproyeksikan pasokan tenaga kerja, menetapkan
Sumber Data	Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Frekuensi	Dua kali per tahun (Februari dan Agustus)

19. Total Dana Pihak Ketiga / PDRB

Nama Indikator	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)
Definisi	Dana pihak ketiga adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang

	diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrument produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Bank yang dimaksud dalam pengertian ini adalah seluruh unit bank baik Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) maupun Bank Perekonomian Rakyat (BPR-BPRS) di suatu daerah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yangdihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB adalah persentase rasiototal dana pihak ketiga perbankan di suatu daerah terhadap PDRB tersebut pada suatu waktu tertentu.
Rumus Perhitungan	Total Dana Pihak ketiga/PDRB $\frac{total\ Dana\ Pihak}{nilai\ PDRB\ ADHB}\ x\ 100\%$
Interpretasi	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) menggambarkan tingkat besaran perbandingan DPK perbankan suatu daerah terhadap PDRB atau pendapatan total perekonomian daerahnya. Nilai Total DPK/PDRB menggambarkan tingkat pendalaman keuangan di suatu daerah, dimana peningkatan angka rasio Total DPK/PDRB (%), menunjukkan peningkatan tingkat simpanan masyarakat di sektor keuangan yang mengarah pada semakin dalamnya sektor keuangan di suatu daerah.
Sumber Data	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Bulanan, Triwulanan dan Tahunan

20. Nilai Transaksi Saham per Kapita

Nama Indikator	Nilai Transaksi Saham per Kapita
Definisi	Nilai transaksi saham adalah total nilai transaksi saham yang dilakukan oleh investor berdasarkan domisili (kota). Nilai transaksi saham merupakan hasil dari volume atau jumlah saham yang ditransaksikan dikali dengan harga saham.
Rumus Perhitungan	Nilai transaksi saham berupa nilai rata-rata tahunan = $\frac{nilai\ transaksi\ investor\ saham\ per\ kota\ selama\ setahun}{12}$
Interpretasi	Untuk mengukur size dari pasar modal dapat digunakan berbagai pendekatan. Salah satunya dengan mengukur tingkat likuiditas pasar melalui pendekatan rata-rata transaksi. Pasar modal yang aktif memberikan sinyal adanya pertumbuhan perekonomian. Sentimen pasar yang baik kemudian akan meningkatkan performa saham yang pada akhirnya akan mempengaruhi nilai kapitalisasi pasarsecara keseluruhan
Sumber Data	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Frekuensi	Tahunan

21. Total Kredit / PDRB

Nama Indikator	Total Kredit /PDRB (%)
Definisi	Total Kredit adalah penjumlahan dari total penyaluran kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan yang terdiri dari Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR-BPRS) di lingkup daerah. Total Kredit /PDRB menunjukkan persentase rasio total kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan di suatu daerah terhadap PDRB (atas dasar harga berlaku) daerah tersebut pada suatu waktu tertentu.
Rumus Perhitungan	Total Kredit/PDRB $\frac{total\ Kredit}{Nilai\ PDRB\ ADHB}\ x\ 100\%$
Interpretasi	Total Kredit per daerah/PDRB (%) menggambarkan tingkat pemanfaatan kredit dan pembiayaan perbankan di daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Semakin tinggi nilai Total Kredit /PDRB menunjukkan semakin berfungsinya perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang berperan dalam menyalurkan pendanaan pada usaha- usaha dalam perekonomian daerah tersebut.
Sumber Data	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Bulanan, Triwulan dan Tahunan

22. Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan

Nama Indikator	Rasio PDRB sektor jasa keuangan (%)
Definisi	Rasio PDRB yang bersumber dari sektor jasa keuangan mencerminkan proporsi nilai tambah sektor jasa keuangan terhadap PDRB ADHB.
Metode Perhitungan	Raasiod PDRB sektor jasa keuangan $\frac{nilai\ tambah\ sektor\ jasa\ keuangan}{Nilai\ PDRB\ ADHB}\ x\ 100\%$
Interpretasi	Semakin besar nilai PDRB ADHB yang dihasilkan oleh aktivitas sektor jasa keuangan menunjukkan adanya aktivitas ekonomi di suatu daerah agar bertumbuhnya perekonomian daerah dan berdaya saing.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

23. Proporsi Jumlah IKM

Nama Indikator	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM)
Definisi	Proporsi jumlah industri kecil dan menengah merupakan perbandingan jumlah unit industri kecil dan menengah terhadapseluruh unit industri pada tahun yang sama.
Metode Perhitungan	$Proporsi\ IKM = \frac{jumlah\ uni\ IKM}{Total\ JumlahUnit\ Industri}\ x100\%$

Interpretasi	Industri kecil dan menengah (UKM) merepresentasikan bagian dari industri mikro, kecil dan menengah yang cenderung sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. Meningkatnya proporsi IKM yang diiringi dengan menurunnnya proporsi industri mikro dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja.
Sumber Data	• Survei Industri Kecil dan Menengah, Badan Pusat Statistik • Survei Industri Menengah dan Besar, Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

24. Persentase kerjasama wajib yang dilaksanakan

Nama Indikator	Persentase kerja sama wajib yang dilaksanakan
Definisi	Perbandingan jumlah kerja sama yang ditindak lanjuti dengan jumlah kerja sama yang disepakati dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan dan kualitas kerja sama
Metode Perhitungan	Persantase kerja sama daerah ditindak lanjuti $\frac{jumlah\ kerja\ sama\ yang\ ditindak\ lanjuti}{jumlah\ kerja\ sama\ yang\ disepakati}\ x\ 100\%$
Interpretasi	Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Kerja sama daerah dapat dilakukan dengan daerah lain, pihak ketiga atau lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan kerja sama daerah juga dimaksudkan sebagai sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah, menyinergikan potensi antar daerah, daerah dengan pihak ketiga, dan daerah dengan Pemerintah Daerah atau lembaga di luar negeri serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi, dan kapasitas fiskal daerah. Sehingga semakin tinggi persentase kerja sama daerah ditindak lanjuti menunjukkan adanya kualitas kerja sama sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014
Sumber Data	Sekretariat Daerah
Frekuensi	Tahunan

25. Proporsi jumlah UKM non Pertanian

Nama Indikator	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Non Pertanian (%)
Definisi	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian merupakan perbandingan jumlah unit usaha kecil dan

	menengah non pertanian terhadap seluruh unit usaha non pertanian pada tahun yang sama.
Metode Perhitungan	$\frac{Proporsi\ jumlah\ UKM\ non\ pertanian}{\frac{jumlah\ unit\ UKM\ non\ pertanian}{Total\ Unit\ UKM}}\ x100\%$
Interpretasi	Usaha kecil dan menengah (UKM) non pertanian merepresentasikan bagian dari UMKM yang cenderung sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. Meningkatnya proporsi UKM yang diiringi dengan menurunnya proporsi usaha mikro dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja.
Sumber Data	• Data Pendataan Lengkap UMKM, Kementerian Koperasi danUKM • Data UMKM yang dikumpulkan oleh urusan pemerintahan Bidang Koperasi dan UKM
Frekuensi	Tahunan

26. Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok

Nama Indikator	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok
Definisi	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok merupakan indikator untuk mengetahui stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan harga yang terjangkau
Metode Perhitungan	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok $\frac{jumlah\ ketersediaan\ barang\ kebutuhan\ pokok\ sesuai\ dengan\ harga\ yang\ terjangkau}{total\ barang\ kebutuhan\ pokok}$ x 100%
Interpretasi	Semakin tingginya persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok menunjukkan terjaminnya stabilitas dan terpenuhi kebutuhan bahan pokok bagi masyarakat dengan harga yang dapat dikendalikan
Sumber Data	Data ketersediaan barang kebutuhan pokok dan total kebutuhan yang dikumpulkan oleh urusan pemerintahan Bidang Perdagangan
Frekuensi	Tahunan

27. Proporsi kontribusi PDRB kota terhadap PDRB Provinsi

Nama Indikator	Proporsi kontribusi PDRB kota terhadap PDRB Provinsi
Definisi	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada dasarnya merupakan data dan informasi dasar tentang kegiatan ekonomi suatu daerah, jumlah nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu daerah pada periode tertentu. Nilai tambah yang terbentuk dalam PDRB suatu daerah (kabupaten/kota) biasanya dijadikan bahan untuk mengukur tingkat perekonomian daerah tersebut. Pembentukan PDRB di setiap kabupaten/kota merupakan

	penjumlahan dari nilai tambah yang dihasilkan oleh setiap aktivitas ekonomi yang terjadi di daerah tersebut. Dalam publikasi ini, dapat diamati perkembangan perekonomian setiap kabupaten/kota dari waktu ke waktu.
Rumus Perhitungan	$Ekspor\ Barang\ dan\ Jasa\ (\%\ PDRB)$ *ekspor barang dan jasa (% PDRB)*= $\frac{ekspor\ barang\ dan\ jasa}{PDRB\ ADHK}$ x 100% Keterangan: Ekspor Barang dan Jasa = Total Ekspor Barang Dan Jasa Berdasrkan PDB Sisi Pengeluaran (Miliar Rupiah) PDRB ADHK = Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)
Interpretasi	Ekspor barang dan jasa memiliki dampak signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. PDB adalah ukuran nilai total produksi dalam suatu negara dalam satu periode waktu. Ekspor barang dan jasa dapat memperluas pasar untuk produk-produk domestik di pasar internasional, meningkatkan penjualan, dan membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi.

28.Jumlah warisan budaya benda yang dilestarikan

Nama Indikator	Jumlah warisan budaya benda yang dilestarikan
Definisi	Tingkat pelestarian warisan budaya merupakan capaian rata-rata dari tingkat cagar budaya yang dimanfaatkan dengan tingkat seni budaya yang dimanfaatkan. Sehingga terjaganya kualitas warisan budaya secara berkelanjutan dan lestari
Metode Perhitungan	$\frac{tingkat\ pelestarian\ warisan\ budaya}{\frac{tingkat\ cagar\ budaya\ yang\ dimanfaatkan + tingkat\ seni\ budya\ yang\ dimanfaatkan}{2}}\ x\ 100\%$
Interpretasi	Pemanfaatan warisan budaya merupakan salah upaya menjaga, melestarikan dan mengembangkan seni budaya masayarakat dan cagar budaya yang dilindungi oleh negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mengingat kebudayaan memiliki peran penting dalam pembangunan, dengan menekankan hubungan yang erat dan saling terkait antara pembangunan dan kebudayaan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu nilai budaya dan sikap mental seperti etos kerja, motivasi berprestasi, ulet, dan daya juang dapat menjadi pendorong produktivitas dan kemajuan bangsa. Nilai budaya dan mentalitas menjadi penentu untuk mencapai kemajuan dalam suatu proses pembangunan
Sumber Data	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Frekuensi	Tahunan

29. Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan

d. Aspek Pelayanan Umum

1. Indeks Reformasi Hukum

<table>
<tr><td>Nama Indikator</td><td>Indeks Reformasi Hukum</td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>Reformasi Hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional.</td></tr>
<tr><td>Rumus Perhitungan</td><td>Penghitungan IRH didasarkan pada 4 (empat) variabel sebagaiberikut:
• Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi, dengan bobot 25%.
• Penguatan Kompetensi ASN sebagai perancang PUU yangberkualitas, dengan bobot 25%.
• Kualitas re-regulasi atau de-regulasi PUU berdasarkan hasilreviu, dengan bobot 35%.
• Penataan database PUU, dengan bobot 15%.
Dalam hal ini, sumber data yang digunakan oleh IRH adalah data administrati Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Kategori penilaian IRH:
<table>
<tr><td>No.</td><td>kategori</td><td>Nilai/angka</td><td>Predikat</td></tr>
<tr><td>1</td><td>AA</td><td>>90-100</td><td>Istimewa</td></tr>
<tr><td>2</td><td>A</td><td>>80-90</td><td>Sangat Baik</td></tr>
<tr><td>3</td><td>BB</td><td>>70-80</td><td>Baik</td></tr>
<tr><td>4</td><td>B</td><td>>60-70</td><td>Cukup Baik</td></tr>
<tr><td>5</td><td>CC</td><td>>50-60</td><td>Cukup</td></tr>
<tr><td>6</td><td>C</td><td>>30-50</td><td>Buruk</td></tr>
<tr><td>7</td><td>D</td><td>0-30</td><td>Sangat Buruk</td></tr>
</table>
Pada perhitungan IRH, Pemerintah Daerah melakukan penilaian mandiri (self-assesment) yang menghasilkan berita acara hasil penilaian mandir. Kemudian, kementrian hukum dan HAM akan melakukan verifikasi terhadap self-assesment tersebut dan mengeluarkan berita acara hasil penilaian.</td></tr>
<tr><td>Interpretasi</td><td>Semakin tinggi nilai IRH, maka semakin berhasil pelaksanaan komponen-komponen reformasi hukum oleh lembaga yang bersangkutan.</td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>Kementerian Hukum dan HAM</td></tr>
<tr><td>Frekuensi</td><td>Tahunan</td></tr>
</table>

2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Nama Indikator	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Definisi	SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah

	Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan.
Rumus Perhitungan	Nilai indeks SPBE dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain. Rumus penghitungan nilai indeks SPBE dijabarkan sebagai berikut: $Indeks\ Domain_i \frac{1}{BD_i} \sum_{j=m}^{n} NA_{ii} x\ BA_{ii}$ dimana: • NDj adalah nilai indeks domain ke-j; • BDj adalah nilai bobot domain ke-j.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indeks domain dan bobot domain maka akan semakin besar pula nilai indeks SPBE yang dihasilkan.
Sumber Data	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Frekuensi	Tahunan

3. Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintahan

Nama Indikator	Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah
Definisi	Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat kemajuan dan kapabilitas pemerintah dalam mengadopsi dan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, kualitas layanan publik, dan tata kelola pemerintahan. Indeks ini mencerminkan sejauh mana pemerintah telah bertransformasi secara digital dalam berbagai aspek operasional dan pelayanannya, yang diukur melalui berbagai indikator yang dikelompokkan ke dalam pilar-pilar transformasi digital pemerintah yang telah ditetapkan.
Rumus Perhitungan	$\text{Indeks Pilar Pemerintah} = \frac{\sum \text{Skor Indikator}}{\text{Jumlah Indikator}} \times 100$ Keterangan : □ Skor Indikator: nilai dari masing-masing indikator (biasanya dalam skala 0–1 atau 0–100). □ Bobot: persentase atau proporsi pentingnya setiap indikator terhadap keseluruhan indeks. □ Jumlah Indikator: total indikator yang digunakan dalam pilar pemerintah (misalnya: digitalisasi layanan publik, keterbukaan data, kapasitas SDM digital, keamanan sistem, dsb).
Interpretasi	Nilai indeks yang lebih tinggi menunjukkan tingkat transformasi digital yang lebih baik pada pilar tersebut. Perbandingan nilai indeks dari waktu ke waktu atau antar unit pemerintahan dapat memberikan wawasan tentang kemajuan dan disparitas.
Sumber Data	Kementerian/Lembaga terkait
Frekuensi	Tahunan

4. Indeks Pelayanan Publik

<table>
<tr><td>Nama Indikator</td><td>Indeks Pelayanan Publik</td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek SistemInformasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.
Hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks.</td></tr>
<tr><td>Rumus Perhitungan</td><td>Penentuan nilai indeks dilakukan dengan menentukan nilai setiap indikator, menentukan nilai setiap aspek, menentukan nilai indeks formulir dan menentukan nilai indeks pelayanan publik.
4. Menetukan nilai untuk setiap indikator
Nilai per indikator
$(\frac{nilai\ F01+nilai\ F02+nilai\ F03}{3})\ xbobot\ per\ indikator$
5. Menentukan nilai setiap aspek
6. Nilai per aspek: Σ nilai per indikator
Nilai indeks: Σ $nilai\ aspek_n xbobot\ aspek_n$</td></tr>
<tr><td>Interpretasi</td><td>Angka indeks yang dihasilkan merupakan komposit dari berbagai data, baik data primer dan sekunder serta data obyektif maupun persepsi. Prinsip yang digunakan dalam menyusun indikator IPP berdasarkan kepada UndangUndang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Prinsip-prinsip tersebut adalah:
7. Keadilan (Fairness);
8. Partisipasi (Participation);
9. Akuntabilitas (Accountability);
10. Transparansi (transparency);
11. Berdayaguna (useful);
12. Aksesibilitas (accessibility)
Aspek yang harus dipenuhi oleh unit penyelenggara pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, meliputi: Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan serta Inovasi. Indikator dihasilkan melalui persilangan antara prinsip dan aspek yang dijadikan dasar penilaian. Berdasarkan persilangan tersebut diperoleh 37 indikator penilaian yang diisi melalui Formulir F01 (Unit Penyelenggara Pelayanan Publik), Formulir F02 (Evaluator) dan Formulir F03 (Pengguna Layanan). Perhitungan Indeks Pelayanan Publik dikategorikan menjadi:
<table>
<tr><th>Range Nilai</th><th>Kategori</th><th>Makna</th></tr>
<tr><td>0-1,00</td><td>F</td><td>Gagal</td></tr>
<tr><td>1,01-1,50</td><td>E</td><td>Sangat Buruk</td></tr>
<tr><td>1,51-2,00</td><td>D</td><td>Buruk</td></tr>
<tr><td>2,01-2,50</td><td>C-</td><td>Cukup (Dengan Perbaikan)</td></tr>
<tr><td>2,51-3,00</td><td>C</td><td>Cukup</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

	3,01-3,50	B-	Baik (Dengan Perbaikan)
	3,51-4,00	B	Baik
	4,01-4,50	A-	Sangat Baik
	4,51-5,00	A	Pelayanan Prima
Sumber Data	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.		
Frekuensi	Tahunan		

5. Survey Penilaian Integritas KPK

Nama Indikator	Survey penilaian integritas (SPI) KPK (Nilai)
Definisi	Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan survei yang dibangun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai alat ukur risiko korupsi di instansi publik (Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah) serta upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan. Survei tersebut, melibatkan 3 sumber data, yaitu sumber internal yang merupakan pegawai di K/L/PD, sumber eksternal yang merupakan pengguna layanan publik, vendor, dan penerima manfaat dari pelaksanaan tugas dan fungsi K/L dan Pemerintah Daerah serta sumber eksper atau narasumber ahli yang terdiri dari auditor BPK, BPKP, Ombudsman dan instansi yang terkait. Sedangkan untuk menjaga objektivitas angka indeks, SPI juga menggunakan data objektif sebagai faktor koreksi.
Rumus Perhitungan	Mengumpulkan data survei melalui aplikasi pesan Whatsapp dan email kepada responden terpilih, serta melalui Computer Assisted Personal Interview (CAPI) berdasarkan 7 penilaian meliputi; transparansi; Integritas dalam pelaksanaan tugas; pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ); pengelolaan Sumber Daya Manuisa (SDM); trading in influence (intervensi eksternal untuk pemberian izin/rekomendasi teknis); pengelolaan anggaran; dan sosialisasi antikorupsi.
Interpretasi	Semakin tingginya nilai survey penilaian integritas (SPI) KPK menunjukkan semakin baiknya integritas Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah dalam menjalankan tata kelola pemerintahan
Sumber Data	Komisi Pemberantasan Korupsi.
Frekuensi	Tahunan

6. Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda (Penegakan Perda)

Nama Indikator	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda
Definisi	Perbandingan kasus pelanggaran Perda yang dapat diselesaikan dengan kasus pelanggaran Perda yang terjadi pada tahun berkenaan
Rumus Perhitungan	Jumlah kasus pelanggaran Perda yang dapat diselesaikan dibagi dengan jumlah kasus pelanggaran Perda yang terjadi pada tahun berkenaan dikali seratus persen
Interpretasi	Tingkat capaian untuk menyelesaikan kasus pelanggaran Perda
Sumber Data	Satpol PP Provinsi Sumatera Barat
Frekuensi	Tahunan

7. Indeks Daya Saing Daerah

Nama Indikator	Indeks Daya Saing Daerah
Definisi	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah, Pengukuran pada IDSD ini mengadopsi kerangka konseptual yang sama dengan Global Competitiveness Index (GCI) dari World Economic Forum (WEF)
Metode Perhitungan	$skor_{i,d} = (N_{id} - NR_i/NT_i - NR_i)$ Skor id adalah skor kemajuan dari daerah ke-d untuk indikator ke-I; Nid adalah nilai data indikator ke-I untuk daerah ke-d; NRi aadalah nilai terendah untuk indikator ke-I;dan Nti adalah nilai terbaik untuk indikator ke-I, hal ini tergantung pada indikatornya (berdasarkan peraturan, kebijakakan, atau persentil ke-90 atau 95). Penjelasan rinci dimensi dan indikator pembentuk daya saing, termasuk metadatanya dapat diakses di tautan https://awan.brin.go.id/s/jg296fjXHYCBPRZ
Interpretasi	Kekuatan utama dari IDSD terletak pada kemampuannya dalam mengombinasikan perspektif mikro di level perusahaan/industri dan perspektif makro di level institusi publik. Secara konseptual, kedua perspektif mikro-makro daya saing ini diklasifikasikan ke dalam tiga faktor penentu daya saing, yaitu faktor ketersediaan kebutuhan fundamental (*basic requirement factors*), faktor penguat efisiensi (*efficiency enhancers*), dan faktor inovasi dan kecanggihan (innovation and shopistication factors). Ketiga faktor penentu daya saing ini diterjemahkan ke dalam 12 pilar daya saing, sehingga terlihat kapasitas daerah dalam meningkatkan kualitas pembagunan.
Sumber Data	Badan Riset dan Inovasi Nasional
Frekuensi	Tahunan

8. Indeks Capaian Aksi HAM

Nama Indikator	Indeks Capaian Aksi HAM
Definisi	Merupakan ukuran kuantitatif yang menunjukkan tingkat pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, berdasarkan aksi-aksi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat
Rumus Perhitungan	$Indeks\ Capaian\ Aksi\ HAM = \frac{Jumlah\ Aksi\ yang\ Tercapai}{Jumlah\ Aksi\ yang\ Direncanakan}\ x\ 100\%$ Indeks kemudian dikategorikan: • Tinggi (≥91%) • Sedang (76%–90%) • Rendah (≤75%)
Interpretasi	Hasil perhitungan Indeks Capaian Aksi HAM
Sumber Data	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Frekuensi	Tahunan

9. Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pemilu

Nama Indikator	Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pemilu
Definisi	Tingkat partisipasi pemilih mengukur persentase jumlah warga negara yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dibandingkan dengan jumlah total pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) pada suatu wilayah dan periode pemilu tertentu
Rumus Perhitungan	$Tingkat\ Partisipasi\ Pemilih = \frac{Jumlah\ Pemilih\ yang\ mempunyai\ Hak\ Pilih}{Jumlah\ Pemilih\ dalam\ DPT}\ x\ 100\%$ Indeks kemudian dikategorikan: • Tinggi (≥91%) • Sedang (76%–90%) • Rendah (≤75%)
Interpretasi	Hasil perhitungan Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pemilu
Sumber Data	KPU, Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Formulir Model C1 (hasil pemungutan suara),
Frekuensi	Tahunan

10. Penurunan Angka Kriminalitas

Nama Indikator	Penurunan Angka Kriminalitas
Definisi	Indikator ini mengukur tingkat penurunan jumlah tindak pidana atau kejahatan yang terjadi dalam suatu wilayah dan periode tertentu, dibandingkan dengan periode sebelumnya. Ini mencerminkan kondisi keamanan dan efektivitas upaya penegakan hukum serta pencegahan kejahatan
Rumus Perhitungan	$= \frac{\text{Jumlah Kasus}_{t-1} - \text{Jumlah Kasus}_{t}}{\text{Jumlah Kasus}_{t-1}} \times 100\%$
Interpretasi	Hasil perhitungan Penurunan Angka Kriminalitas
Sumber Data	POLRI, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Pemerintah
Kota Padang